



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PERGERAKAN GLOBALISASI

(Sebelum Covid, Saat Covid, Sesudah Covid)



Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

PERGERAKAN GLOBALISASI

(Sebelum Covid, Saat Covid, Sesudah Covid)

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-19-9 (PDF)



**PERGERAKAN GLOBALISASI
(Sebelum Covid, Saat Covid, Sesudah Covid)**

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

ISBN : 978-623-8642-19-9

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniato, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "*Pergerakan Globalisasi - (Sebelum Covid, Saat Covid, Sesudah Covid)*". Dalam buku ini Membaca dan memahami topik pergerakan globalisasi memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa. Studi ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang konsep globalisasi, tetapi juga membuka wawasan tentang interaksi kompleks antar-negara dan antar-kawasan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Mahasiswa akan mengembangkan keterampilan analitis untuk mengevaluasi dampak globalisasi terhadap berbagai sektor dan populasi, serta memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika global yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, studi tentang globalisasi juga membantu dalam menghargai keberagaman budaya global dan mempersiapkan mahasiswa untuk karier di pasar kerja yang semakin terhubung internasional. Kesadaran terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi juga akan meningkat, membuka peluang untuk berkontribusi dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk masalah-masalah ini.

Pergerakan globalisasi merujuk pada fenomena integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya di seluruh dunia. Ini melibatkan pertukaran barang, jasa, teknologi, informasi, dan gagasan antar negara dan wilayah yang semakin terhubung secara global. Pergerakan ini didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, serta kebijakan ekonomi yang mendukung liberalisasi perdagangan internasional. Globalisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, dari ekonomi global yang terintegrasi hingga penyebaran budaya dan nilai-nilai di berbagai belahan dunia. Namun, fenomena ini juga menjadi sumber debat tentang dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan tantangan bagi kedaulatan negara dalam era global yang semakin kompleks ini.

Dalam buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Dalam bagian pertama ini mencakup Bab 1 sampai Bab 6. Dalam bagian ini akan membahas membahas tentang berbagai aspek globalisasi, terutama melalui studi kasus Musim Semi Arab dan transisi demokrasi di Tunisia. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana globalisasi, terutama dalam bentuk kapitalisme neoliberal, mempengaruhi kondisi ekonomi dan politik di negara-negara seperti Tunisia. Meskipun globalisasi sering dikaitkan dengan dorongan menuju demokratisasi, terdapat juga tantangan signifikan yang timbul, seperti ketimpangan ekonomi dan tekanan politik yang mempengaruhi proses demokratisasi. Bab ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan analisis sistem dunia, sejarah telegrafi, dan studi kasus kontemporer untuk mengilustrasikan kompleksitas hubungan antara konektivitas global dan dis: konektivitas. Kesimpulannya, bab ini menekankan perlunya memahami dinamika globalisasi yang kompleks dan dampaknya yang tidak selalu sejalan dengan narasi linear progresif yang sering kali disajikan.

Selanjutnya bagian ke 2 buku ini mencakup bab ke 7 sampai bab 14 akan menyajikan bacaan tentang berbagai aspek globalisasi yang kompleks dan evolusinya dalam konteks zaman yang terus berubah. Bab-bab yang dibahas meliputi refleksi terhadap pandemi COVID-19 sebagai ujian terhadap teori globalisasi dan respons internasional, serta eksplorasi platform pendidikan online transnasional seperti ABCKID yang memperlihatkan dinamika kerja migran

dalam konteks digital. Selain itu, bacaan membahas fenomena koridorisasi ekonomi regional yang didorong oleh Tiongkok melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, serta respon negara-negara seperti India dan Rusia terhadap perubahan global yang kompleks. Secara keseluruhan, bacaan ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya tentang integrasi ekonomi dan politik, tetapi juga tentang tantangan dan adaptasi yang dihadapi oleh negara-negara dan aktor non-negara dalam menghadapi dinamika global yang semakin rumit dan bervariasi.

Bagian ke 3 yang merupakan bagian terakhir dari buku ini meliputi bab 15 sampai bab 20, dalam bagian ini membahas globalisasi dan masa depannya, dapat disimpulkan bahwa globalisasi tetap menjadi fenomena dominan yang membentuk dunia saat ini meskipun menghadapi tantangan yang signifikan. Afrika, sebagai contoh, mengalami interaksi yang kompleks antara globalisasi dan pembangunan berkelanjutan, dengan tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan politik yang mendalam. Pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana globalisasi mempengaruhi respons terhadap krisis global, menggerakkan nasionalisme dan proteksionisme di beberapa negara sambil memperkuat ketergantungan global di sektor-sektor tertentu. Meskipun ada prediksi tentang kemungkinan deglobalisasi, bukti menunjukkan bahwa keterhubungan global tetap kuat meskipun mengalami adaptasi dan ketegangan. Sebagai hasilnya, ke depan, tantangan utama akan melibatkan bagaimana mengelola dan mengarahkan arus globalisasi secara lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah perubahan ekonomi, teknologi, dan politik yang terus berubah. Semoga buku ini berguna bagi para pembaca.

Semarang, Juli 2024

Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAGIAN SATU – Globalisasi: Masa lalu	1
BAB 1 DIS:KONEKTIVITAS DALAM SEJARAH GLOBAL	1
1.1. Krisis Dan Globalisasi	1
1.2. Globalisasi Dan Kajian Sejarah	2
1.3. Sejarah Global Dan Putusnya Konektivitas	4
1.4. Dari Disconnectivity Ke Dis:Connectivity	6
1.5. Telegrafi Dan Dis:Konektivitas	8
1.6. Rekapitulasi	11
BAB 2 JANJI DAN BAHAYA GLOBALISASI	13
2.1. Latar Belakang Dan Gambaran Umum Pemberontakan Arab	14
2.2. Gambaran Umum Ekonomi Tunisia	16
2.3. Demokrasi Yang Apa Dalam Kondisi Globalisasi Neoliberal?	21
2.4. Kesimpulan	23
BAB 3 (RE)ARTIKULASI GLOBALISASI MASA LALU, SEKARANG, DAN MASA DEPAN .	26
3.1. Konseptualisasi Hubungan Antara Globalisasi Dan Nostalgia	27
3.2. Contoh Studi Kasus	29
3.3. Keterangan Penutup	36
BAB 4 MOBILITAS DAN GLOBALISASI	38
4.1. Kaitan Mobilitas Dan Globalisasi	38
4.2. Mobility Dan Globality	39
4.3. Mobility Sebagai Migrasi	41
4.4. Penyebab Migrasi	43
4.5. Pekerja Imigran	44
4.6. Perdagangan Manusia Dan Perbudakan	45
4.7. Brain Drain Incirculation	47
4.8. Mobility Of Ide, Ideologi, Dan Pengetahuan	48
BAB 5 DEGLOBALISASI	50
5.1. Konsep Deglobalisasi	50
5.2. Berbagai Makna Deglobalisasi	51
5.3. Pendekatan Metodologi Deglobalisasi	57
BAB 6 TRANSFORMASI STRUKTURAL TERKINI DALAM RUANG PUBLIK GLOBAL	63
6.1. Bagaimana Kita Terlalu Globalisasi Atau Tidak Cukup	63
6.2. Globalisasi Mestizo/Dekolonial	65
6.3. Bidang Publik, Komunitas Yang Dibayangkan, Dan Pendapat Publik	68
6.4. Tentang Mediatisasi/Carni Valisasi Politik Dan Defisit Epistemik	74

BAGIAN KEDUA – Globalisasi: Sekarang	80
BAB 7 GLOBALISASI DAN KESEHATAN DI ERA COVID	80
7.1. Gender Dan Kesehatan Global	81
7.2. Hewan Dan Manusia Dan Mikroba, Yaaa!	82
7.3. Berdiri Bersama Atau Jatuh Terpisah?	84
7.4. Jangan Mengabaikan Politik Ekonomi Internasional	86
7.5. Kesimpulan, Atau Setidaknya Pikiran Akhir	89
BAB 8 MIGRASI VIRTUAL DAN PLATFORM PENDIDIKAN ONLINE TRANSNASIONAL .	91
8.1. Pendahuluan	91
8.2. Platform Dan Kontraktornya	93
8.3. Dua Kelompok Kial Dan Kendala Laboratorium Atau Pasarnya	94
8.4. Beralih Ke Migrasi Virtual	96
8.5. Pengalaman Kerja Dan Kepuasan Kerja Imigran Virtual	100
8.6. Terlepas Dari Konteks Lokal Dan Makna Bagi Migran Virtual	103
8.7. Kesimpulan Dan Pembahasan	106
BAB 9 KORIDORISASI GLOBALISASI REGIONAL	109
9.1. Menuju Globalisasi Corridorizing	110
9.2. Aliran Perdagangan Besar Corrid Orizing Di Seluruh Eurasia	113
9.3. Jalur Globalisasi Regional Baru: Kereta Api Cina-Laos	117
9.4. Mendorong Globalisasi Ekonomi Baru Dari Tengah	121
BAB 10 PERUBAHAN WAJAH GLOBALISASI	123
10.1. Krisis Tata Dunia, Keamanan Manusia, Dan Globalisasi	125
10.2. Adaptasi Rusia Terhadap Globalisasi	129
10.3. Kesimpulan	134
BAB 11 EKSPERIMEN INDIA YANG BERKEMBANG DENGAN NEOLIBERALISME	136
11.1. Pendahuluan	136
11.2. Konseptualisasi Evolusi Neoliberal India Sebagai Perangkat Model Mental	137
11.3. Benturan Dan Adaptasi Model Mental Pasar Dan Socialis	140
11.4. Model Mental Hegemonik Yang Berkembang Di India	140
11.5. Backlash Populis: Munculnya Neoliberalisme Otoritas	143
11.6. Neoliberalisme Yang Diperbarui	147
11.7. Pandangan Neoliberalisme	149
BAB 12 LEDAKAN GLOBALISME DAN MUNCULNYA NOMOS KETIGA BUMI	151
12.1. 2022: Globalisasi Saat Ini Dan Masa Lalu	151
12.2. Saat Ini (2008–2022) Dan Masa Depan Globalisasi (2022–2040)	156
BAB 13 GERAKAN GLOBAL DAN GOSSAMER DARI “GLOBALISASI”	163
13.1. Wacana Mobility Dan Visi Gerakan Pasifik	165
13.2. Cara Jalur Olahraga Dan Imajinari Global	169
13.3. Memikirkan Kembali Imajinari Global	173
BAB 14 MENATAP PUSAT AKADEMIK	174
14.1. Pelajaran Dari Zaman Kuno	176

14.2. Perang Paradigma	179
14.3. Dunia Yang Lebih Dari Manusia	181
14.4. Teori Globalisasi Yang Berkedip	183
14.5. Globalisasi Berbasis Iklim	188
BAGIAN KETIGA – Globalisasi: Masa Depan	191
BAB 15 GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI MASA DEPAN	191
15.1. Afrika Saat Ini	192
15.2. Globalisasi Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Afrika	195
15.3. Tantangan Globalisasi Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Afrika	199
15.4. Afrika Dalam Dunia Globalisasi	202
BAB 16 GLOBALISASI VIRTUAL MENEMBUS BATAS INDIVIDU	204
16.1. Menyembuhkan Globalisasi	205
16.2. Teknologi Dan Keterbatasan Kondisi Manusia	208
BAB 17 GLOBALISASI DAN RETORIKA VISUAL	218
17.1. Bangkitnya Tatanan Media Global	218
17.2. Metode Digital Untuk Meneliti Global	222
17.3. Sistem Symbolic Instagram	222
17.4. Dimensi Digital Mimpi Milenial	224
BAB 18 GLOBALISASI, PANDEMI COVID, DAN VISI UNTUK MASA DEPAN GLOBAL	229
18.1. Covid-19 Dan Akhir Viral Globalisasi	230
18.2. Deglobalisasi Atau Bust?	232
18.3. Redux Globalisasi	236
BAB 19 KRISIS KAPITALISME GLOBAL, FINANSIALISASI, DAN DIGITALISASI	243
19.1. Pendahuluan	243
19.2. Krisis Kapitalis Global	245
19.3. Era Digital Kedua	247
19.4. Krisis Berlanjut Dan Perjuangan Untuk Masa Depan	251
BAB 20 MENATA ULANG GLOBALISASI MASA DEPAN YANG MASUK AKAL	255
20.1. Tatanan Gobalisasi Masa Depan	255
20.2. Empat Subnaratif Utama Dan Indikator Global	259
20.3. Konseptualisasi Globalisasi	263
Daftar Pustaka	265

BAB 1

DIS:KONEKTIVITAS DALAM SEJARAH GLOBAL

Bab ini mengambil perspektif sejarah tentang proses globalisasi. Bab ini mengevaluasi bagaimana ilmu-ilmu sejarah sampai sekarang menerapkan konsep globalisasi dalam penelitian sejarah dan mengkaji beberapa ketidakpuasan yang muncul di kalangan sejarawan dalam konteks ini. Bab ini menyatakan bahwa ketidakpuasan seperti ini seringkali merupakan konsekuensi dari pemahaman globalisasi yang terlalu disederhanakan dan searah yang mengabaikan peran diskoneksi dalam proses keterikatan global. Laporan ini menganjurkan fokus yang lebih kuat pada keterkaitan antara konektivitas global dan diskonektivitas (disebut dengan istilah dis:konektivitas) dan mengembangkan klaim ini dengan bantuan contoh-contoh dari sejarah telegrafi.

1.1 KRISIS DAN GLOBALISASI

Secara etimologis, krisis adalah fenomena yang dramatis—bahkan mungkin mengancam jiwa—(Koselleck, 1982). Sejauh ini, di abad ke-21 yang masih muda ini, krisis-krisis yang terjadi pada individu mungkin hanya bersifat sementara, namun keadaan krisis yang melanda masyarakat secara lebih luas tampaknya terlalu permanen. Selama bertahun-tahun, kita terus-menerus mengalami keadaan darurat yang sangat transformatif, yang terdiri dari krisis ekonomi dan sosial yang saling tumpang tindih (Macho, 2020). Tidak lama setelah serangan mengerikan pada tanggal 11 September dan “Perang Global Melawan Teror” yang terjadi setelahnya, sebagian besar dunia mengalami krisis keuangan yang parah mulai tahun 2008. Saat perekonomian global secara bertahap mulai pulih, kesadaran masyarakat mulai memahami dampaknya. realitas perubahan iklim, yang dampak sosio-ekonominya semakin sulit untuk diabaikan. Ketika masyarakat secara perlahan mulai terlibat dalam krisis iklim, pada pertengahan tahun 2010-an – setidaknya di Eropa – krisis ini dibayangi oleh “krisis pengungsi” dan ketakutan yang ditimbulkannya. Meskipun kedua permasalahan ini masih ada, namun permasalahan tersebut telah memudar dan digantikan oleh krisis COVID yang tidak menyenangkan dan tidak menentu.

Terlepas dari semua tumpang tindih dan keterkaitannya, krisis-krisis ini, tentu saja, menunjukkan perbedaan-perbedaan penting: krisis-krisis ini bergerak dengan kecepatan dan waktu masing-masing; semuanya mempengaruhi episentrum regional yang berbeda, yang dapat berubah seiring berjalannya waktu; mereka semua memanifestasikan dirinya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan caranya masing-masing; semuanya melibatkan ketakutan kolektif dan individu tertentu; dan masing-masing mempunyai dilema etika tersendiri. Namun ada satu kesamaan yang dimiliki oleh semua krisis ini: krisis ini sangat melekat dalam proses globalisasi, baik dulu maupun sekarang. Terorisme yang bermotif politik dan agama, misalnya, dipupuk oleh jaringan ambisi geopolitik dan antagonisme budaya global yang kompleks,

setidaknya sejak masa kejayaan imperialisme Eropa. Di bidang ekonomi, krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008 telah menyebar ke pasar modal global melalui hubungan timbal balik yang tak terhitung jumlahnya. Gelembung real estate regional dengan cepat menyebabkan krisis perbankan global. Dalam ekologi, perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia tidak dapat dipisahkan dari sejarah industrialisasi dan konsumerisme. Pertumbuhan pesat, mobilitas antarwilayah, dan pembagian kerja global menjadi pemicunya. Perubahan iklim tidak memedulikan batas-batas kemanusiaan, baik secara nasional maupun lainnya. Ini adalah salah satu dari sedikit fenomena global. Yang lainnya tentu saja adalah COVID-19. Pada awal tahun 2020, virus ini menyebar dengan mudah ke seluruh dunia melalui jalur jaringan mobilitas global. Jaringan global yang padat dan saling terhubung adalah hal yang dimiliki oleh semua krisis ini. Hal ini tidak akan terpikirkan tanpa proses pertukaran global yang telah berkembang selama dua ratus tahun terakhir ini. Krisis-krisis ini membuat cakupan dan kedalaman jaringan global menjadi jelas.

1.2 GLOBALISASI DAN KAJIAN SEJARAH

Situasi krisis dan permasalahan yang menjengkelkan bukanlah satu-satunya hal yang menyebar berkat jaringan global. Koneksi global dan proses pertukaran benar-benar merasuki masyarakat modern kita, dan anatomi khususnya sering kali merupakan hasil dari proses sejarah yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, ilmu sejarah telah lama memperhatikan kemunculan dan signifikansi sosial dari keterkaitan tersebut. Misalnya, sejarah ekspansi Eropa, kolonialisme, imperialisme, perang dunia, dan tatanan internasional pascaperang telah menyita perhatian para sejarawan selama beberapa dekade. Sejak sejarah global mulai muncul pada pergantian milenium, telah ada program penelitian untuk menyelidiki fenomena keterkaitan global dan signifikansi historisnya di luar prasangka Eurosentris. Sebagai cabang sejarah, sejarah global mengutamakan konektivitas global dan mencurahkan banyak upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan global.

Oleh karena itu, proses globalisasi bukanlah hal baru dalam kajian sejarah. Namun, banyak sejarawan yang merasa tidak nyaman dengan istilah globalisasi. Meskipun para ekonom dan sosiolog sudah mulai menyelidiki konsep globalisasi pada tahun 1960an dan 70an, para sejarawan pertama kali membahasnya pada tahun 1990an dan terus mengikuti tren yang menjadikan istilah tersebut sebagai “kata kunci akademis yang menembus setiap disiplin ilmu”. Namun, antusiasme tersebut hanya berumur pendek. Hal ini dengan cepat dibayangi oleh dampak serius dari pendekatan yang semakin dominan dari sejarah budaya dan semakin kuatnya kritik terhadap istilah Eurosentrisitas. Sejarah budaya hanya mendapat sedikit nilai dalam istilah yang cakupan universalisasinya hanya memberikan sedikit ruang bagi konteks budaya dan asumsi makna. Antropologi sejarah curiga terhadap konsep apa pun yang pretensi teleologisnya sebagian besar menghalangi para aktor sejarah dan agensi mereka.

Sejarah global, sejarah transkultural, dan khususnya apa yang disebut “sejarah ekstra-Eropa” bergulat dengan Eurosentrisisme yang tidak dapat dihindari dalam banyak penerapan analitis globalisasi. Frederick Cooper memberikan satu contoh. Kritiknya menyusun episode-episode sejarah Afrika untuk menunjukkan betapa terbatasnya pemahaman globalisasi dan

paradigma integrasi yang menyertainya. Kekhawatiran Cooper mendapat persetujuan luas dan membantu memperkuat keraguan tentang kegunaan analitis istilah globalisasi dalam sejarah Afrika serta dalam disiplin ilmu yang lebih luas.

Beberapa sejarawan hampir siap untuk menghindari istilah tersebut sepenuhnya. Penelitian lain menggunakan definisi globalisasi yang begitu luas dan kabur sehingga kehilangan nilai analitisnya. Dan ketika konsep tersebut benar-benar memainkan peran yang berarti dalam studi sejarah, dengan cepat menjadi jelas betapa banyak definisi berbeda yang harus dicakupnya dan betapa mudahnya hal ini menyebabkan para sarjana saling berdebat. Sebagai akibat dari hambatan-hambatan tersebut, para sejarawan sudah lama menghindarinya. Keterlibatan produktif dengan konsep globalisasi dan enggan menyelidiki potensinya untuk penelitian sejarah.

Istilah ini kadang-kadang terus muncul dalam penelitian sejarah, namun penggunaannya umumnya sederhana dan hanya mengacu pada peningkatan koneksi dan integrasi global. Globalisasi pada dasarnya mengacu pada semakin dalamnya konektivitas global atau—sebaliknya—terpisahnya interaksi manusia (yaitu, pembagian waktu) dari jarak yang dekat. Penafsiran seperti ini telah menjadikan ruang geografis sebagai elemen yang memecah belah secara sosial, sehingga mengidentifikasi “kompresi waktu-ruang” sebagai penanda penting proses globalisasi. Anehnya, sejarah globalisasi tetap berjalan linier, baik dalam wacana publik maupun dalam perdebatan akademis. Orang-orang bermigrasi. Pasar terintegrasi. Informasi disebarkan ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Metafora yang tajam digunakan untuk menangkap pandangan globalisasi ini dalam gambaran yang mudah dicerna. Dunia sedang menyusut. Itu sebuah desa. “Dunia ini datar”.

Bahkan ketika sejarah global berkembang menjadi sebuah program penelitian tersendiri, konsep globalisasi pada intinya tetap tidak berubah. Memang benar, sejarah global masih lebih terfokus pada motif utamanya: jaringan global yang kepadatannya semakin meningkat. Meskipun mengacu pada proses keterikatan global dan signifikansi sosialnya yang mendalam, fenomena utama yang diselidiki sebagian besar masih di bawah teori (Wenzlhuemer, 2019). Mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan global dalam hubungan sebab akibat yang beragam sepanjang sejarah telah lama dipahami sebagai perhatian empiris utama dalam sejarah global dan disiplin ilmu terkait, baik mereka menggunakan istilah globalisasi secara eksplisit atau tidak.

Baru pada dekade terakhir sejarah global mulai merefleksikan konsep globalisasi dan kegunaan analitisnya. Jika istilah ini terus mendapat perhatian dalam studi “transformasi dunia”, misalnya, teleologi dan otomatisme yang terkandung di dalamnya tidak dapat lagi diabaikan. Salah satu langkah penting adalah membahas proses globalisasi dalam bentuk jamak dibandingkan globalisasi dalam bentuk tunggal, dengan masing-masing proses ditempatkan dalam konteks historis dan sosialnya sendiri. Jürgen Osterhammel secara khusus menyatakan bahwa pluralisasi konsep globalisasi akan sangat bermanfaat bagi penelitian sejarah. Menurutnya, bentuk jamak akan “secara politis meredakan” istilah tersebut dan meredakan “dorongan menuju holisme dalam diskusi kontemporer” tentang globalisasi. “Bentuk jamak menyederhanakan kehidupan para sejarawan dengan membiarkan kita

mempertahankan perhatian terhadap detail dan skeptisisme terhadap generalisasi tanpa memaksa kita menghindari pertanyaan-pertanyaan besar”.

Namun, Osterhammel melanjutkan, “gagasan megaglobalisasi yang tunggal (dan unik) akan tetap tersembunyi” meskipun proses integrasi dibingkai dalam bentuk jamak. Oleh karena itu, meskipun perspektif sejarah yang lebih luas yang melampaui sejarah Eropa telah menghasilkan konsep globalisasi yang lebih halus dan terstratifikasi, praktik penelitian sebenarnya tetap fokus pada penyelidikan peningkatan konektivitas. Bagaimanapun, pendekatan ini tetap menjadi lensa yang melaluinya fenomena globalisasi dilihat dan dianalisis.

Akibatnya, keilmuan sejarah—di antara disiplin ilmu lainnya—masih kurang memiliki konsepsi yang bernuansa tentang hubungan global yang pada akhirnya dapat menghilangkan anggapan kuno tentang linearitas dan universalitas serta mampu menangkap berbagai bentuk dan artikulasi konektivitas. Proses penyeimbang, konektivitas yang terputus, pentingnya tidak adanya integrasi, dan peran pertukaran yang rumit dan berputar-putar merupakan bidang-bidang yang sering diabaikan. Koneksi bisa lambat dan sulit. Mereka dapat dipotong atau tidak pernah muncul lagi. Mereka bisa saja absen di tempat yang diharapkan. Mereka bisa meninggalkan celah. Ketika sekelompok aktor memperkuat hubungan mereka, kelompok lain akan menjauh—setidaknya secara relatif. Relevansi koneksi tidak hanya terletak pada bagaimana koneksi tersebut berhubungan dengan koneksi lainnya, namun juga karena koneksi tersebut tertanam dalam bentuk keterputusan dan isolasi. Ketika cakupan globalisasi diperluas dengan cara ini, maka globalisasi akan lebih mudah menerima analisis yang lebih kompleks mengenai masyarakat kontemporer dan lebih berguna sebagai alat untuk studi sejarah.

1.3 SEJARAH GLOBAL DAN PUTUSNYA KONEKTIVITAS

Dalam penelitian sejarah globalisasi yang membahas pentingnya disrupsi, disintegrasi, dan tidak adanya koneksi global, ada dua jenis argumen yang muncul kembali. Entah ada keberatan bahwa fokus yang terlalu sempit pada integrasi global akan mengaburkan praktik-praktik integrasi global yang tidak tersentuh oleh perkembangan tersebut dan yang konteks budayanya berisiko dikaburkan, atau ada upaya untuk menunjukkan bagaimana proses integrasi global dapat berbalik arah dalam kondisi tertentu. dan menyebabkan deglobalisasi terbatas.

Esai Jeremy Adelman “Apa Itu Sejarah Global Saat Ini?”, yang menjadi perdebatan sengit di kalangan sejarawan ketika muncul pada tahun 2017, adalah salah satu contohnya. Adelman dengan tajam mengkritik praktik aktual dalam sejarah global. Ia mengungkapkan kegelisahannya menghadapi euforia beberapa sejarawan global, yang kadang-kadang bahkan bisa berubah menjadi kemenangan yang tidak pantas. Ia memperingatkan akan semakin banyaknya aspirasi keilmuan yang normatif dalam sejarah global. Ia juga memperingatkan semua orang untuk menghindari jebakan historiografis yang mengintai setiap kali sejarah ditulis hanya dengan mengacu pada pengalaman dan keyakinan para pengamat kosmopolitan yang sangat mobile. Ini hanyalah beberapa kritik valid yang mengarah pada diskusi aktif di

lapangan mengenai pentingnya konteks lokal dan “ruang kecil” dalam sejarah global. Proses yang dihasilkan dalam menempatkan sejarah dan menyelidiki hubungan antara konteks global, nasional, dan konteks lainnya masih jauh dari selesai. Kritik Adelman lainnya tidak banyak mendapat tanggapan. Ia menyerukan kepada kita untuk “menghilangkan gagasan bahwa integrasi global bagaikan sirkuit listrik, yang memberikan pencerahan bagi semua pihak.” Bertahan dengan metafora ini, dia melanjutkan:

Menerangi sudut-sudut bumi membuat sudut-sudut bumi lainnya berada dalam kegelapan. Kisah para globalis mencerahkan sebagian orang dengan mengorbankan sebagian lainnya, mereka yang tertinggal, mereka yang tidak bisa bergerak, dan mereka yang tidak bisa bergerak karena cahaya tidak lagi menyinari mereka. [. . .] Untuk mengubah gambaran tersebut: memahami saling ketergantungan berarti melihat bagaimana hal ini memperluas cakrawala pribadi dan sosial bagi sebagian orang, namun juga menipiskan ikatan dengan orang lain. Setidaknya sampai ikatan tersebut menjadi lebih bermakna dibandingkan daftar Instagram, akan ada lebih banyak penolakan terhadap integrasi daripada yang kita akui. Untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika dan resistensi terhadap integrasi, untuk memberikan waktu tayang yang sama terhadap pemisahan, disintegrasi dan kerapuhan seperti yang kita lakukan terhadap koneksi, integrasi dan konvergensi, kita harus menyingkirkan narasi dan ide-ide Bumi datar. predestinasi global untuk selamanya.

Bagian ini berisi tiga poin penting untuk makna keterhubungan. Pertama, metafora iluminasi dan pencerahan mengacu pada pandangan integrasi global yang meresap namun secara subliminal yang menjadikan proses integrasi sebagai kekuatan penting yang mempunyai makna sejarah. Hal ini bertepatan dengan pandangan sebaliknya tentang benda yang tidak terhubung sebagai massa inert. Adelman mengkritik nada normatif dari banyak penelitian dalam sejarah global. Kedua, ia menunjukkan pada tingkat lain bias perhatian historiografis. Sejarah global dan globalisasi pada dasarnya berfokus pada kelompok aktor yang bergerak, aktif secara global, dan relatif kosmopolitan. Menurut metafora Adelman, sebagian besar orang yang tidak bisa berpindah-pindah dan terikat dengan tempat tinggalnya, terjebak dalam kegelapan. Para sejarawan global umumnya mengabaikan partisipasi mereka yang mengalami stagnasi dan terkadang kemunduran dalam proses globalisasi. Ketiga, Adelman memunculkan kekuatan perlawanan aktif yang juga diabaikan oleh literatur penelitian global. Singkatnya, hal ini merupakan sebuah seruan untuk mengurangi beban normatif dalam sejarah integrasi global dan khususnya untuk tidak mengabaikan pengaruh historis dari pihak-pihak yang bukan merupakan titik tumpu proses pertukaran tersebut dan bahkan mungkin telah mencoba untuk melakukan hal tersebut. secara aktif menghindarinya.

Konteks lain di mana wacana sejarah global telah berubah menjadi interupsi dan kurangnya konektivitas global adalah “deglobalisasi,” yang mengacu pada fase di mana skala integrasi global dan signifikansi sosialnya menurun. Periode antar perang dan Depresi Besar adalah contoh klasiknya. Integrasi komersial dan volume perdagangan yang jauh lebih rendah pada fase ini dibandingkan pada abad kesembilan belas atau tahun-tahun pascaperang telah menjadi hal yang lumrah. Banyak studi semacam itu didasarkan pada “teori pendulum” globalisasi yang murni bersifat ekonomi, seperti yang baru-baru ini ditekankan oleh Stefan

Link. Interpretasi seperti ini menilai globalisasi terutama dalam kaitannya dengan perdagangan global, integrasi pasar global, dan konvergensi harga, yang mengikuti perkembangan gelombang sinus. Ibarat pendulum, periode integrasi terbelakang atau bahkan deglobalisasi mengikuti periode globalisasi yang intensif.

Akibatnya, koneksi yang tidak ada, terputus, atau terputus-putus—terputusnya hubungan—tidak memainkan peran utama dalam sejarah global, dan juga tidak sepenuhnya diabaikan. Meskipun cabang-cabang sejarah ekonomi telah mengembangkan model fase globalisasi dan deglobalisasi yang bergantian, Adelman berupaya mencegah kelompok yang tertinggal dan yang tidak setuju agar tidak dilupakan. Pierre-Yves Saunier, pada bagiannya, menganggap seruan Adelman tidak berguna karena banyak penelitian dalam sejarah global telah mempertimbangkan keterputusan yang berkaitan dengan konteks khusus mereka sebagai hal yang wajar. Saunier memberikan sejumlah contoh, seperti penelitian tentang sejarah komunikasi dan transportasi, yang juga memperhatikan infrastruktur yang tidak bergerak. Populasi yang menetap dan tidak bermigrasi selalu berperan dalam studi tentang sejarah migrasi. Oleh karena itu, Saunier sampai pada kesimpulan bahwa sejarah global sama sekali tidak menghilangkan atau mengabaikan keterhubungan; sebaliknya, hal ini selalu menjadi bagian dari persamaan.

1.4 DARI DISCONNECTIVITY KE DIS:CONNECTIVITY

Apakah kemudian ilmu sejarah telah lama memahami fenomena-fenomena yang terputus-putus dalam konteks globalisasi dan telah lama melakukan pendekatan terhadap objek-objek penyelidikan tersebut dengan kehalusan dan nuansa? Bahkan tidak dekat. Hal ini terutama terlihat dalam keberatan Saunier. Fenomena disconnective diperlakukan hanya sebagai pelapis terhadap apa pun yang sebenarnya sedang diperiksa, jika memang ada. Praktis tidak ada keterlibatan teoritis atau metodologis dengan keterhubungan. Permohonan dan kontras sederhana seperti itu tidak banyak mengganggu bias sejarah global terhadap kisah-kisah integrasi; jika ada, mereka secara halus memperkuatnya. Mengklaim bahwa keterputusan selalu menjadi bagian dari persamaan mengalihkan perhatian dari kebutuhan untuk terlibat secara serius dengan nonkoneksi, perannya dalam konstelasi koneksi, dan bagaimana kaitannya dengan koneksi global.

Hanya sedikit hal yang menunjukkan perlunya hal ini dengan jelas seperti cara penanganan fenomena keterputusan dalam kaitannya dengan proses integrasi. Kasus yang umum terjadi adalah model koneksi/pemutusan biner yang sederhana, di mana diskonektivitas diperlakukan sebagai kebalikan dari konektivitas. Kecenderungan ini terlihat jelas dalam esai Adelman dan juga dalam banyak penelitian mengenai deglobalisasi. Ketika Adelman memperingatkan bahwa memusatkan perhatian pada hal-hal yang terhubung secara bersamaan akan meninggalkan hal-hal yang tidak terhubung dalam kegelapan, ia tidak hanya merangkum salah satu argumen utama dari kritik kontemporer terhadap globalisasi, yang telah lama berpendapat bahwa sejarah globalisasi telah meninggalkan banyak orang, dieksploitasi dan terpinggirkan setelahnya; dia sekaligus memperkuat dikotomi tersebut.

Ketika sejarah ekonomi menunjukkan terhentinya dan berbaliknya proses integrasi global, hal ini juga mencerminkan konsep globalisasi biner yang sangat sederhana dan efektif.

Namun pada kenyataannya, proses penghubung dan pemutusan hubungan sangat erat dan saling bereaksi secara intensif, yang menjadi jelas dalam kaitannya dengan argumen Adelman. Terdapat saling ketergantungan antara yang terkoneksi dan yang tidak terkoneksi, berbanding terbalik. Ketika berbagai tempat, wilayah, dan masyarakat di seluruh dunia berintegrasi, konsekuensinya adalah pihak lain tidak dapat (atau tidak mau) berpartisipasi dalam proses integratif tersebut, dan secara relatif mereka akan tertinggal. Jaringan global tidak stabil; beberapa cabang sangat lebat. Semakin padat, semakin terlihat area yang tidak rata dan kosong. Untuk menggambarkan metafora penelitian globalisasi lainnya, dunia tidak “menyusut” secara keseluruhan; itu melengkung. Terusan Suez, salah satu contoh paling terkenal dalam sejarah infrastruktur global pada abad kesembilan belas, adalah contoh cemerlang. Ketika kanal ini dibuka pada tahun 1869, hal ini sangat memudahkan dan mempersingkat perjalanan antara Eropa dan Asia. Kanal tersebut mengubah rute sebagian besar lalu lintas maritim. Valeska Huber, yang telah mempelajari secara cermat pentingnya Terusan Suez bagi sejarah mobilitas, menyatakan bahwa terusan tersebut mengubah Mediterania “dari danau menjadi jalur”. Rute lain—khususnya rute panjang di sekitar Tanjung Harapan—lalu lintasnya lebih sedikit dan kemudian digunakan terutama oleh kapal layar untuk angkutan barang. Ketika suatu wilayah menjadi semakin erat hubungannya dengan dunia, wilayah lain menjadi (relatif) terpisah. Pelengkungan ruang global seperti ini juga akan memainkan peran utama dalam studi kasus yang dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Hal yang sama juga berlaku pada asumsi bahwa, jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19, berkurangnya arus barang dan modal selama tahun-tahun antar perang merupakan periode deglobalisasi. Ini hanyalah sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar dan sangat kurang konteksnya. Fakta bahwa krisis ekonomi global pada akhir tahun 1920-an dan 30-an meluas hingga Amerika Serikat dan segera melanda seluruh dunia merupakan indikasi kuat mengenai tingkat integrasi global pada saat itu. Sejarah global teknik manajemen krisis, perkembangan organisasi internasional secara simultan, dan penyebaran pemikiran fasis secara global adalah contoh lainnya. Dengan menggunakan contoh tahun-tahun antar perang, Jörn Leonhard dengan tepat menandai simultanitas integrasi dan disintegrasi ini. Ia menulis bahwa “secara historis, globalisasi struktural sering kali terjadi bersamaan dengan deglobalisasi sektoral, dan keduanya sering kali saling memperkuat”. Hal ini berlaku pada proses integrasi global secara umum. Globalisasi bukanlah sebuah mekanisme yang berputar-putar, juga bukan sebuah proses makro yang bisa dibalik. Sebaliknya, hal ini terdiri dari banyak proses kecil yang saling berkaitan dan saling melengkapi.

Para aktor dan tempat globalisasi itu sendiri selalu tertanam dalam keadaan yang bersifat ikat dan terputus secara bersamaan, dan harus dikaji dalam keadaan yang penuh ketegangan tersebut. Koneksi dan non-koneksi bertemu di tempat-tempat tertentu dan dalam pengalaman hidup para pelaku sejarah, sehingga menyingkapkan signifikansi keduanya dalam keterhubungan mereka. Terusan Suez juga merupakan contoh ilustratif di sini. Kanal merupakan salah satu tempat di mana fenomena penghubung dan pemutusan bertemu dan

bertabrakan dalam berbagai cara. Kanal ini tidak hanya menghubungkan Mediterania dengan Laut Merah, meresmikan jalur laut baru yang memiliki signifikansi global; jalur ini juga membagi dua rute karavan kuno, yang mengharuskan pelancong dan unta menunggu celah lalu lintas laut agar mereka bisa menyeberang kanal.

Dalam artikel yang dikutip di atas, Leonhard menyebutkan “ketegangan antara globalitas dan deglobalisasi” (Leonhard, 2020), menyentuh salah satu poin terpenting dari konsepsi globalisasi yang memadai. Ketegangan yang muncul dari simultanitas dan deglobalisasi konstitusi timbal balik dari elemen-elemen yang menghubungkan dan memisahkan memberikan pengaruh penting pada bagaimana proses globalisasi berkembang dan dibentuk, dialami, dan dikategorikan. Pentingnya hal ini bagi studi sejarah global tidak dapat dilebih-lebihkan. Dari perspektif ini, istilah dis:konektivitas sangat berharga karena istilah ini menggambarkan dengan tepat hubungan yang saling membangun dan tegang antara integrasi global, disintegrasi, dan tidak adanya koneksi yang relevansinya hanya terlihat dalam konteks yang mereka bangun secara kolektif. Istilah hak istimewa ini tidak mengacu pada proses-proses yang bersifat menghubungkan dan tidak memutuskan hubungan, melainkan berfokus pada saling mempengaruhi yang bergejolak, yang menjadi faktor penentu dalam memahami kekuatan sosial globalisasi. Ini merupakan sebuah pendekatan baru terhadap sejarah global dan kajian-kajian globalisasi yang lebih bersifat masa kini—sebuah pendekatan yang akan terus tumbuh dan diartikulasikan serta dikembangkan lebih lanjut dalam kajian-kajian empiris yang konkrit.

1.5 TELEGRAFI DAN DIS:KONEKTIVITAS

Untuk memberikan setidaknya beberapa petunjuk tentang bagaimana dis:konektivitas dapat memfasilitasi perspektif baru mengenai proses globalisasi, kita perlu kembali sejenak ke sejarah telegrafi. Teknologi ini memainkan peranan penting dalam lonjakan globalisasi yang terjadi pada abad kesembilan belas. Telegraf mengubah pesan singkat menjadi impuls listrik dan mengirimkannya melalui kabel dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jarak yang jauh. Sekitar pertengahan abad, teknologi tersebut sudah cukup matang untuk memungkinkan adanya koneksi telegraf lintas samudera antar benua. Pada pergantian abad, jaringan telegraf global telah berkembang sehingga memungkinkan, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang sezamannya, “komunikasi dengan kecepatan pemikiran” dan berkontribusi besar terhadap “penyusutan dunia”. Dalam sebagian besar studi telegrafi dalam sejarah global, teknologi ini dianggap sebagai konektor pola dasar.

Tapi itu hanya sebagian dari cerita. Jika diamati lebih dekat, menjadi jelas bahwa telegrafi tidak mengecilkan dunia; sebaliknya, hal itu—mengikuti metaforanya—menyesatkannya. Jarak komunikasi antara beberapa wilayah menyusut, sementara wilayah lainnya tetap tidak berubah sehingga terdesak hingga ke batas komunikatif. Sambungan yang terputus merupakan hal yang biasa terjadi bahkan di sepanjang jalur utama, sehingga membuat frustrasi pelanggan yang sudah terbiasa dengan kemudahan telegrafi. Terlebih lagi, telegrafi tidak menghilangkan ruang geografis, seperti yang diklaim oleh beberapa orang

sezamannya; hal ini menggabungkan interaksi intens ruang tersebut dengan jenis konektivitas lainnya.

Sebuah surat kepada editor yang dicetak di Times of London (Anonymous, 1870) setidaknya tidak meninggalkan keraguan mengenai dua poin pertama. Dalam surat ini, penulis menggambarkan kesulitan yang dialaminya baru-baru ini ketika mencoba mengirim telegraf dari London ke Kalkuta pada malam hari. Dia mulai menggambarkan perjalanannya pada malam hari melalui London dengan kalimat berikut: “Saya berkesempatan mengirim telegram ke Kalkuta antara jam 9 dan 10 malam.” Bagi penulis, perlunya melakukan hal tersebut tampak sebagai hal yang lumrah dan dapat dimengerti, sehingga tidak memerlukan penjelasan atau pembenaran lebih lanjut. Kemampuan untuk berkomunikasi secara telegrafis dengan wilayah yang jauh, bagi tipe aktor tertentu, sudah menjadi hal yang biasa pada tahun 1870. Namun komplikasi pertama tidak akan lama lagi terjadi. Penulis mencatat bahwa dia tidak yakin mengenai “kantor apa yang akan buka pada jam tersebut.” Oleh karena itu, tindakan yang paling aman tampaknya adalah melanjutkan ke cabang utama Kantor Pos Umum. Namun, sesampainya di sana, sebuah tanda di pintu mengarahkannya ke agen telegraf di Cornhill, yang akan menerima telegram mulai jam 8 malam. sampai tengah malam. Saat tiba di tujuan berikutnya, penulis berpendapat bahwa agen tersebut kekurangan staf dan agen yang melayaninya tampak bingung dengan keinginan penulis untuk mengirim telegram ke Kalkuta: “Kalkuta!’ katanya, dan tampak seperti saya telah meminta untuk mengirim telegram ke Fernando Po. [. . .] Sekarang, Pak, Kalkuta bukanlah tempat yang tidak dikenal. Saya pikir itu adalah ibu kota British India, dan komunikasinya erat dan konstan dengan Kota London.”

Bagian ini berbicara banyak. Dari sudut pandang tokoh protagonis, “komunikasi yang dekat dan terus-menerus” ini membawa Calcutta lebih dekat ke London dibandingkan contoh tandingan yang ia berikan pada Fernando Po, pulau yang sekarang dikenal sebagai Bioko di lepas pantai Kamerun. Fernando Po seharusnya menjadi contoh isolasi total. Namun dari segi geografi murni, Fernando Po berjarak sekitar 2.500 kilometer lebih dekat ke London dibandingkan Kalkuta, dan pada abad kesembilan belas kota ini menduduki posisi strategis di pantai barat Afrika. Kapal-kapal Eropa sering mengunjungi pulau itu, dan pulau itu merupakan pelabuhan penting bagi angkatan laut Inggris. Namun, penulis surat kepada editor ini menggunakannya untuk melambangkan keterpencilan, sambil memperlakukan Kalkuta seolah-olah letaknya sudah dekat.

Memang benar, jaringan telegraf global pada saat itu telah mengembangkan struktur khusus yang mendukung pandangan semacam itu. Di luar wilayah pesisir Mediterania dan Eropa, upaya awal untuk memasang kabel bawah laut melintasi jarak yang jauh pada tahun 1850-an dan 1860-an berfokus pada sambungan transatlantik dan kabel ke India. Proyek darat besar pertama, seperti “Siemens Line”, membentang dari Eropa menuju Asia Selatan. Perusahaan-perusahaan ini jelas mengambil isyarat dari kepentingan imperial negara-negara Eropa, khususnya Kerajaan Inggris. Maka timbullah poros timur-barat yang kuat dalam jaringan komunikasi global yang menghubungkan Eropa—khususnya Inggris Raya—di tengah dengan Amerika Utara di barat, melintasi Mediterania, Laut Merah, dan Samudera Hindia hingga India di timur. Poros ini meluas lebih jauh ke arah timur hingga Oseania pada tahun

1870an. Dalam beberapa tahun dan dekade berikutnya, jaringan tersebut menyebar keluar dari poros inti ini. Jalur utama timur-barat telah lama menjadi jalur dengan bandwidth tertinggi dan permintaan terbesar, sementara wilayah lain jauh lebih sedikit koneksinya. Koneksi di sepanjang pantai Afrika baru terjadi beberapa waktu kemudian, apalagi jalur darat ke pedalaman benua. Meskipun benua Afrika telah lama menjadi kendala yang tidak dapat disangkal ketika merencanakan rute antara Eropa dan Asia karena adanya pelayaran keliling, pola ini pada dasarnya terganggu oleh struktur jaringan telegraf serta dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869 (lihat bagian sebelumnya). Telegrafi tidak “memusnahkan” ruang angkasa, namun membengkokkannya. Akibatnya, Fernando Po menjadi kurang sentral. Kontraksi dalam satu dimensi bertepatan dengan ekspansi di tempat lain (Wenzlhuemer, 2013).

Kembali ke surat di Times, agen yang kebingungan mengirim penulis yang gelisah ke kantor Perusahaan Telegraf Falmouth, Gibraltar dan Malta di Broad Street. Di sana dia mengetahui bahwa kabel ke India sedang tidak berfungsi saat ini. “[Petugas] memberi tahu saya bahwa jalur Falmouth terputus antara Lisbon dan Gibraltar, sehingga memerlukan waktu lima atau enam hari untuk mengirimkan telegram ke Kalkuta, dan bahwa perusahaannya menyarankan masyarakat saat ini untuk mengirimkan pesan mereka melalui Persia melalui Persia.

Tokoh protagonis menunjukkan sedikit pemahaman terhadap situasi tersebut dalam suratnya: “Saya akui, saya merasa aneh bahwa di pusat jantung Kerajaan Inggris seseorang harus dikirim dari pilar ke tiang, sesuai dengan jam malam, untuk menemukan ujung kabel listrik yang tepat yang kini menjadi saraf utama badan sosial.” Mengapa ada orang yang perlu mengirim telegram ke British India pada larut malam bukanlah masalah baginya. Konektivitas global dianggap remeh, meskipun hambatan dan gangguan tetap ada. Dalam hal ini telegram hanya sampai ke India melalui jalur darat, karena kabel bawah laut tidak berfungsi. Hal ini merupakan kejadian umum pada tahun 1870-an dan 1880-an, sebagaimana dibuktikan oleh penyebutan berulang-ulang dalam laporan tahunan perusahaan telegraf. Pada tahun 1881, hubungan bawah laut antara Inggris Raya dan India sama sekali tidak dapat dioperasikan selama lebih dari sebulan pada bulan Juli dan Agustus. Empat tahun kemudian, kabel tersebut terputus antara bulan Juni dan Oktober. Dan Laporan Administrasi Departemen Telegraf Indo-Eropa menyatakan bahwa, untuk tahun fiskal 1882–83, “Rute Suez terputus sebagian atau rusak pada satu atau lebih bagian kabelnya selama hampir sepanjang tahun resmi”. Pada paruh kedua abad kesembilan belas, gangguan terhadap konektivitas kabel bawah laut merupakan hal yang rutin terjadi. Jalur darat ke India tidak lebih dapat diandalkan. Menambah penghinaan, penyabot dan penipu terkadang dengan sengaja mengganggu hubungan.

Untuk memahami poin ketiga yang tercantum di atas, kita harus meninggalkan tempat penulis surat di London dan pergi ke titik yang lebih jauh di jaringan telegraf global. Jaringan ini terus berkembang seiring dengan kemajuan abad kesembilan belas, sehingga memerlukan lebih banyak stasiun pemancar menjelang akhir abad tersebut. Karena alasan infrastruktur, banyak yang dibangun di lokasi yang sangat terpencil, seperti pulau-pulau kecil di Samudera Atlantik, Pasifik, dan Hindia yang berfungsi sebagai stasiun perantara dan simpul jaringan. Tiga stasiun tersebut mungkin dapat memberikan contoh fenomena yang lebih luas: Ascencion,

sebuah pulau di Atlantik Selatan, menjadi stasiun perantara antara Cape Town dan Tanjung Verde pada tahun 1899 dan 1900, dengan kabel yang mengarah ke Eropa dan satu lagi ke Amerika Selatan; kabel telegraf antara Freemantle, Australia, dan pantai timur Afrika dibuka pada tahun 1901, dengan Kepulauan Cocos (Keeling) di Samudera Hindia berfungsi sebagai stasiun pemancar; dan antara tahun 1902 dan 1903, kabel transpasifik menghubungkan Fiji dengan Vancouver, melewati atol kecil Tabuaeran (alias Pulau Fanning). Para telegrafer Eropa menjalankan tugas mereka di lokasi-lokasi ini dan lokasi-lokasi terpencil dan jauh lainnya, di mana mereka berada dalam konteks-konteks penghubung yang sangat berbeda secara bersamaan. Mereka termasuk orang pertama di planet ini yang mendengar dan menyebarkan berita terkini, namun mereka sendiri praktis tidak bisa bergerak. Mereka dilarang menggunakan telegraf untuk keperluan pribadi. Komunikasi dengan teman dan keluarga hanya dapat dilakukan melalui surat.

Kapal pasokan mungkin hanya mendarat setiap beberapa minggu, dan penundaan serta kekurangan pasokan sering terjadi. Hasilnya adalah ketegangan luar biasa antara konektivitas global yang sangat tinggi dan rendah yang harus dihadapi oleh para aktor tersebut. Setelah pecahnya Perang Dunia Pertama, sebuah insiden yang sangat ilustratif terjadi di Pulau Fanning. Kapal perang Jerman dari Skuadron Asia Timur menerima perintah untuk menghancurkan stasiun relay Inggris di pulau itu dan semua kabel telegraf yang terhubung dengannya. Para petugas telegraf di Pulau Fanning menerima peringatan sebelumnya bahwa sebuah kapal penjelajah Jerman sedang menuju ke arah mereka, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain menunggu rombongan pendarat Jerman tiba dan menghancurkan peralatan komunikasi mereka.

1.6 REKAPITULASI

Sekilas saja sejarah telegrafi, seperti di atas, mengungkap beberapa macam dis:konektivitas dalam proses globalisasi. Pertama, konektivitas di beberapa wilayah dan pelaku bertepatan dengan ketidakterhubungan relatif di wilayah lain, yang mana struktur jaringan telegraf pada akhir abad ke-19 menjadi sangat jelas. Lebih jauh lagi, gangguan, penundaan, dan gangguan komunikasi sering kali menimpa jaringan telegraf global. Meskipun sering terjadi berbagai macam masalah transmisi, telegrafi menimbulkan harapan yang tinggi sehubungan dengan konektivitas. Surat kepada editor yang dijelaskan di atas dengan jelas menunjukkan contoh ketegangan dis:connective yang diakibatkannya. Dan yang terakhir, telegrafi mengungkap simultanitas berbagai bentuk konektivitas global yang saling tumpang tindih dan bersinggungan pada orang-orang dan tempat-tempat tertentu serta dapat terwujud dalam cara yang sangat berbeda. Hal serupa terjadi pada stasiun pemancar jarak jauh, di mana interaksi antara konektivitas komunikatif dan spasial serta keterputusan langsung terlihat.

Ini hanyalah beberapa contoh jelas mengenai arti fenomena dis:konektif dalam proses integrasi global. Hal ini sangat menarik karena berasal dari kemunculan jaringan telegraf global pada akhir abad kesembilan belas, yang mana penelitian sejarah mengenai globalisasi cenderung memperlakukannya sebagai contoh kasus integrasi global. Sebaliknya, kasus ini

menunjukkan bahwa globalisasi menyiratkan adanya gangguan, penundaan, dan ketidakhadiran dalam berbagai bentuk dan intensitas, bukan keterhubungan linear dan total. Sifat spesifik dan signifikansi sosial dari proses integrasi tidak akan terpikirkan tanpa mengacu pada proses tersebut. Hal ini berlaku pada perkembangan saat ini dan juga pada sejarah globalisasi, seperti yang terlihat pada kelangkaan pasokan di Inggris setelah Brexit dan terhambatnya logistik global yang disebabkan oleh kapal barang Ever Give yang kandas di Terusan Suez. Krisis-krisis besar yang disebutkan dalam pendahuluan juga menunjukkan ketegangan antara integrasi dan disintegrasi global. Krisis Keuangan Global yang dimulai pada tahun 2008 tumbuh dari gelembung spekulatif di pasar real estate Amerika. Asal usulnya dapat ditemukan dalam ketegangan antara properti yang terikat secara lokal dan tidak bergerak (misalnya real estat) dan penilaiannya di pasar keuangan yang sangat cair dan terintegrasi secara mendalam. Interaksi ini menjadi lebih jelas ketika mempertimbangkan apa yang memicu krisis ini. Ketika kepanikan melanda arus modal global yang padat, krisis mendasar yang terjadi adalah krisis kepercayaan—sebuah bentuk hubungan yang sangat mendasar—dalam sistem yang sangat berjejaring ini. Hal yang sama juga berlaku pada krisis iklim, yang perkembangannya yang perlahan dan hampir tidak nyata mengandung unsur yang tidak dapat memutuskan hubungan. Sejauh ini, upaya untuk melawan perubahan iklim telah gagal terutama karena kurangnya kemauan dan terbatasnya kerjasama internasional. Meskipun pemanasan global berdampak pada seluruh bumi, kepentingan dan struktur yang sempit telah mengalahkan kerja sama global dalam menangani krisis ini. Migrasi pengungsi skala besar menunjukkan lebih dari sekedar mobilitas manusia. Sebaliknya, karakteristik utama mereka adalah perlakuan tidak adil, penutupan perbatasan, penundaan yang lama, rezim suaka yang ketat, dan bahkan “penolakan” yang brutal. Di sini juga, elemen penghubung dan pemutus saling bertautan secara langsung.

Semua krisis ini bukan sekedar contoh integrasi global; mereka secara langsung menyoroiti aspek-aspek globalisasi yang disruptif dan tidak berhubungan. Dengan interaksi yang konstan, kedua faktor tersebut menentukan jalannya proses secara keseluruhan. Konsep dis:konektivitas adalah upaya untuk mendapatkan pemahaman analitis terhadap fenomena tersebut, yang akan menghasilkan perspektif baru mengenai proses integrasi global di masa lalu dan saat ini dan bahkan mungkin untuk lebih memahami bagaimana proses tersebut terlibat dalam krisis.

BAB 2

JANJI DAN BAHAYA GLOBALISASI

Protes Musim Semi Arab tahun 2011 terjadi di tengah Resesi Hebat, dengan terbatasnya atau menurunnya investasi asing langsung di wilayah tersebut, kenaikan harga pangan, tingginya tingkat pengangguran (terutama di kalangan generasi muda), dan rendahnya investasi publik dan swasta. Pada tahun 2014, harga minyak turun. Pada saat yang sama, dampak dari invasi dan pendudukan AS/Inggris di Irak pada tahun 2003–2004, invasi NATO ke Libya, dan upaya untuk mengacaukan rezim Suriah turut melahirkan apa yang disebut ISIS, yang mendatangkan malapetaka pada perekonomian. komunitas di Irak dan Suriah dan memiliki efek limpahan di Tunisia. Dipuji sebagai salah satu hasil demokratis dari protes Musim Semi Arab, Tunisia mulai terpuruk secara ekonomi dan politik, karena negara ini mempunyai beban utang yang besar, tidak mampu mengurangi tingginya pengangguran kaum muda, dan kemudian menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun 2020–21.

Sebagai tahap terkini dari kapitalisme, globalisasi neoliberal ternyata bukanlah sebuah penyeimbang yang hebat seperti yang diklaim oleh para pendukung awal kapitalisme, namun lebih merupakan sesuatu yang mendekati kehancuran. Bab ini berkontribusi pada literatur tentang dimensi dan evolusi globalisasi melalui penerapannya di kawasan Arab dan studi kasus Tunisia. Konsep-konsep dari teori Marxis dan teori sistem dunia akan menjelaskan janji-janji dan bahaya globalisasi kapitalis neoliberal seperti yang dialami dalam pemerintahan yang mengalami demokratisasi.

Pada bulan Maret 2022, majalah *The Economist* menyatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina adalah “pukulan besar ketiga terhadap globalisasi dalam satu dekade,” dua serangan pertama adalah perang dagang yang dilakukan mantan Presiden AS Donald Trump dan permulaan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. yang mengungkap kerapuhan rantai pasokan global (*The Economist*, 2022c). Dengan gaya liberal, majalah ini memperingatkan bahwa “perdagangan bebas dan kebebasan”, yang seharusnya “berjalan beriringan”, telah retak, dan negara-negara mungkin akan menerapkan proteksionisme dan bahkan kemandirian. Memang benar bahwa setelah perang Rusia-Ukraina, yang dipicu oleh penolakan NATO untuk menghentikan ekspansionismenya ke arah timur, harga gandum dan bahan bakar meningkat. Namun kelemahan globalisasi kapitalis neoliberal telah terungkap jauh sebelumnya, dalam bentuk krisis keuangan di Asia, Rusia, dan Amerika Latin pada akhir tahun 1990an; invasi AS ke Afghanistan dan Irak; Resesi Besar pada tahun 2007–2009, yang diikuti oleh langkah-langkah penghematan dan utang; dan meningkatnya kekayaan kaum elit di tengah stagnasi upah, kenaikan harga, dan memburuknya layanan publik.

“Kontradiksi-kontradiksi” tersebut (dalam istilah Marxis) melahirkan gerakan-gerakan sosial dan pemerintahan baru pada awal abad kedua puluh satu (Forum Sosial Dunia dan “gelombang merah muda” di Amerika Latin) dan gelombang protes pada tahun 2011, yang mencakup protes Arab Spring, protes anti-penghematan Eropa, dan Occupy Wall Street. Meski begitu, sistem hierarki dunia tetap utuh, dan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara

mengalami sanksi ekonomi yang keras (Iran) dan invasi militer (oleh NATO di Libya, oleh banyak negara di Suriah, dan oleh Arab Saudi dan Persatuan Arab). Emirates, dipersenjatai oleh negara-negara Barat, di Yaman). Salah satu kisah sukses Arab Spring adalah Tunisia, yang terhindar dari serangan militer, namun juga tidak mendapatkan imbalan atas transisi demokrasi prosedural yang mengagumkan, baik dari Uni Eropa (UE) atau hegemon sistem tersebut, Amerika Serikat. Pada tahun 2021, utang nasional negara ini telah membengkak hingga 90 persen dari PDB, tingkat pengangguran tetap berada di angka dua digit, dan sistem politik negara tersebut sedang terpuruk. Masalah ini diperburuk oleh kenaikan harga pangan dan bahan bakar setelah krisis Rusia-Ukraina-NATO (UE-AS). Bagi Mesir dan Tunisia, harga gandum meroket. Seandainya para pemimpin NATO, pemerintah AS, dan UE mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah negara-negara yang memprovokasi Rusia, kemungkinan perang, dan sanksi?

Bab ini dimulai dengan ringkasan gambaran lintasan dan perjalanan protes Musim Semi Arab, diikuti dengan fokus pada transisi demokrasi di Tunisia dalam kondisi globalisasi kapitalis neoliberal. Kasus kesulitan ekonomi Tunisia menunjukkan bagaimana dimensi ekonomi dan politik globalisasi kontemporer dapat dipisahkan atau dipisahkan. Artinya, meskipun globalisasi dianggap mendorong demokratisasi, model ekonomi globalisasi – kapitalisme neoliberal – melemahkan prospek pembangunan demokrasi yang berkelanjutan atau transisi demokrasi yang layak secara ekonomi. Sumber materi untuk bab ini mencakup banyak studi akademis yang dihasilkan setelah pemberontakan tahun 2011; akun pers; dokumen pemerintah, PBB, dan LSM; dan observasi serta wawancara saya sendiri selama dua dekade. Bab ini dibingkai oleh analisis sistem dunia, yang mengemukakan perekonomian dunia yang bersifat hierarkis yang didorong oleh keharusan akumulasi modal dan sistem antarnegara yang dipimpin oleh hegemon. Zona ekonomi inti, pinggiran, dan semipinggiran terkadang hidup berdampingan dalam tingkat keseimbangan tertentu, namun secara berkala dilanda krisis—atau tantangan dari dalam semipinggiran—yang dapat memicu transisi dan kekacauan yang sistemik. Perkembangan pada abad kedua puluh satu memberikan contoh postulat ini.

2.1 LATAR BELAKANG DAN GAMBARAN UMUM PEMBERONTAKAN ARAB

Arab Spring, yang dimulai dengan protes di Tunisia pada bulan Desember 2010, pada awalnya meningkatkan ekspektasi akan transisi demokrasi di seluruh wilayah, bersamaan dengan kontrak sosial dan gender yang baru. Beberapa penelitian menghubungkan penyebab struktural pemberontakan ini dengan dampak dari neoliberalisasi selama dua dekade, termasuk kenaikan harga-harga, tingginya pengangguran, dan memburuknya layanan publik. Penelitian lain mengeksplorasi kombinasi faktor dan kekuatan internal dan eksternal: otoritarianisme dan rezim yang tidak populer; warisan aksi kolektif; promosi demokrasi dan difusi norma-norma hak asasi manusia; dampak Resesi Hebat. Protes melanda banyak negara di kawasan ini; empat otokrat jatuh (di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman); dan pemerintah lainnya memadamkan protes dan menghindari pemberontakan melalui reformasi dan konsesi pada tingkat tertentu.

Pemberontakan di Arab gagal menghasilkan revolusi transformatif atau transisi demokrasi yang terkonsolidasi. Shamiran Mako dan Valentine M. Moghadam (2021) mengaitkan hal ini dengan lingkungan internasional dan regional yang kurang menguntungkan bagi gerakan protes tersebut dan dampak buruk dari intervensi eksternal, baik yang bersifat koersif maupun non-koersif. Di Bahrain, Libya, Suriah, dan Yaman, intervensi pihak luar untuk mendukung, menentang, atau menetralkan rezim secara drastis mengubah arah protes (lihat tabel 2.1). Faktor internal juga berperan dalam menentukan hasil: kualitas institusi politik, kapasitas masyarakat sipil, dan kekuatan serta status organisasi feminis. Dalam hal ini, hanya Tunisia yang mempunyai keunggulan yang memungkinkannya memulai transisi demokratis. Tuntutan protes tahun 2010-2011 akan pekerjaan, roti, dan martabat mencerminkan keinginan akan demokrasi sosial (jika bukan sosialis).

Tunisia membentuk sistem pemerintahan perwakilan proporsional parlementer, dengan berbagai kebebasan serta kewajiban negara yang diabadikan dalam konstitusi tahun 2014. Namun, negara ini segera merasakan dampak krisis regional dan global. Intervensi NATO di negara tetangga Libya mempunyai dampak buruk dalam hal memburuknya situasi keamanan serta hilangnya pendapatan (lihat pembahasan di bawah). Serangan militer Barat ke Irak, Libya, dan Suriah berkontribusi pada kebangkitan jaringan teroris ISIS dan “kekhalifahannya”, yang menarik generasi muda dari wilayah tertinggal di Tunisia. Penarikan investasi asing langsung (FDI) memperburuk pengangguran dan timbulnya pandemi COVID-19 memperburuk situasi sosio-ekonomi secara keseluruhan, yang pada gilirannya mengakibatkan polarisasi dan disfungsi politik. Janji globalisasi neoliberal mengenai tatanan dunia baru yang saling berhubungan, berupa kerja sama, kebebasan, dan perdagangan terbukti salah.

Berikut ini, saya fokus pada posisi Tunisia dalam sistem global dan pola pembangunan ekonomi, sosial, dan politiknya. Dalam konteks sistem dunia, Tunisia adalah negara perifer dengan perekonomian kecil yang menerapkan strategi modernisasi yang bercirikan negara kesejahteraan, kebijakan luar negeri yang independen, dan masyarakat sipil yang dinamis. Pada tahun 1960-an Tunisia sempat bereksperimen dengan strategi pembangunan sosialis namun kemudian beralih ke perekonomian yang lebih liberal, yang kemudian menghadapi utang, kebijakan penyesuaian struktural, dan gelombang privatisasi. Pergeseran ini sesuai dengan “Konsensus Washington,” istilah yang diciptakan oleh ekonom John Williamson untuk merujuk pada serangkaian resep kebijakan yang didorong oleh pasar untuk perekonomian Amerika Latin yang dikelola oleh Bank Dunia, Internasional, dan Internasional yang berbasis di Washington, DC. Dana Moneter, dan Departemen Keuangan AS. Kebijakan seperti “disiplin fiskal” dan penghentian subsidi, liberalisasi perdagangan, privatisasi perusahaan negara, dan deregulasi kemudian dipromosikan ke seluruh wilayah dunia.

Tabel 2.1 Protes Arab Spring: Hasil Yang Berbeda, 2011–2022

Tanpa kekerasan; tidak ada intervensi militer eksternal	Brutal; intervensi militer eksternal
Tunisia: transisi demokrasi prosedural; kesulitan ekonomi; presiden menangguhkan parlemen Juli 2021	Bahrain (intervensi Saudi/GCC): kembali ke status quo
Mesir: MB memenangkan pemilu; lebih banyak protes; tentara melakukan intervensi pada musim panas 2013	Libya (zona larangan terbang; serangan NATO): negara yang terpecah dan gagal
Maroko: Demonstrasi Mouvement 20 février mengarah pada amandemen konstitusi	Suriah (Turki membuka perbatasan bagi senjata dan jihadis): arus keluar pengungsi secara besar-besaran; keadaan retak namun tetap utuh
Aljazair dan Yordania: protes dengan cepat dipadamkan dengan reformasi dan konsesi; Aljazair mengalami gelombang protes anti-pemerintah pada tahun 2019 (konsesi pemerintah)	Yaman (Pres. Saleh mengundurkan diri setelah serangan): pemerintahan baru ditentang; Serangan Saudi dan UEA pada tahun 2015; kehancuran dan kelaparan hingga tahun 2022

2.2 GAMBARAN UMUM EKONOMI TUNISIA

Pengalaman Tunisia dengan utang dan penyesuaian struktural disertai dengan protes pekerja, bangkitnya militansi Islam, dan meningkatnya represi. Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) mengorganisir protes berskala luas pada tahun 1984 dan memberikan perlindungan bagi para pembangkang dan aktivis sayap kiri yang melemah di negara tersebut. Pada akhir dekade ini terjadi pemecatan presiden pertama pasca kemerdekaan, Habib Bourguiba, dan penggantinya oleh Zein El-Abedin Ben Ali. Gerakan Islamis ditindas, dua organisasi feminis yang telah dibentuk sebelumnya dilegalkan, bekas partai komunis diizinkan beroperasi dengan nama baru, dan aktor masyarakat sipil lainnya—terutama Bar Association, Human Rights League, dan UGTT—menjadi lebih aktif. Meskipun demikian, kerangka kebijakan ekonomi terus berlanjut. Jika tahun 1980-an merupakan periode restrukturisasi utang melalui kebijakan penyesuaian struktural di banyak negara Dunia Ketiga, maka tahun 1990-an mengkonsolidasi peralihan besar-besaran ke arah privatisasi, liberalisasi, dan fleksibilitas. Tunisia tidak terkecuali.

Pada tahun 1980an dan 1990an, sektor manufaktur yang didorong oleh ekspor meningkat pesat dan menjadi sektor perekonomian dan angkatan kerja yang paling banyak mempekerjakan perempuan. Produksi garmen di Tunisia memiliki hubungan erat dengan perusahaan di luar negeri melalui FDI, kontrak asing, dan lokalisasi di zona pemrosesan ekspor. Namun, keberhasilan industri garmen Tunisia bergantung pada kebijakan perdagangan khusus yang memberikan mereka akses istimewa ke pasar UE. Ketika negara-negara lain, sebagian besar di Eropa Timur pasca-komunis, menerima perlakuan serupa dan Tunisia kehilangan posisi istimewanya, kinerja industri garmen semakin memburuk. Mitra dagang utama dan investor asing di sektor manufaktur Tunisia berasal dari Perancis, Spanyol, Italia, dan pada

tingkat lebih rendah Jerman, dan konsentrasi ekspor yang berlebihan di pasar UE, terutama di wilayah selatan, membuat Tunisia mengalami resesi di pasar-pasar tersebut mulai tahun 2009 dan seterusnya, mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan meningkatnya pengangguran. Resesi Hebat kemudian berdampak buruk. Lebih banyak kehilangan pekerjaan terjadi setelah revolusi politik tahun 2011, dan hal ini memberikan dampak yang sangat berat terhadap perempuan.

Selama periode ini, dan agar tetap kompetitif, kontrak kerja yang “fleksibel” diperluas di sektor swasta Tunisia, yang berarti upah lebih rendah, lebih banyak pekerjaan sementara, dan lebih sedikit jaminan kerja bagi pekerja. Bentuk pekerjaan yang fleksibel mencakup rotasi pekerjaan, kontrak jangka pendek, kerja paruh waktu, jam kerja fleksibel, kerja akhir pekan, kerja malam, dan kerja lembur. Sebuah penelitian menemukan bahwa pekerja yang terlibat dalam praktik kerja fleksibel menghadapi risiko cedera kerja dan ketegangan mental yang lebih tinggi dibandingkan pekerja di organisasi kerja yang lebih tradisional. Fleksibilitas dan upah rendah menjadi penyebab terjadinya pemogokan di kawasan industri Gafsa pada tahun 2008, namun kondisinya tidak berubah. Program privatisasi dan liberalisasi terus berlanjut. Pada tahun-tahun awal abad baru, pemerintahan Ben Ali mencoba memecah maskapai penerbangan nasional, Tunis Air, menjadi perusahaan-perusahaan kecil, memprivatisasinya, dan menjualnya satu per satu. Kasper Ly Netterstrøm (2016) menjelaskan bagaimana serikat pekerja bandara UGTT menentang privatisasi bertahap, sehingga menyebabkan badan nasional tersebut menyerukan pemogokan. Pemerintah mencoba membeli para pemimpin serikat pekerja dengan paket pensiun yang besar, namun masalah ini terus berlanjut hingga revolusi tahun 2011, setelah itu Tunis Air dinasionalisasi ulang.

Pada tahun 2012, pekerja yang memperoleh manfaat dari kontrak jangka waktu tidak tertentu mencakup 43 persen dari populasi pekerja, namun 44,6 persen tidak memiliki kontrak sama sekali, sementara 12,3 persen memiliki kontrak tetap. Menurunnya pengeluaran pemerintah menyebabkan kontraksi anggaran upah sektor publik, dan persentase lapangan kerja sektor publik terhadap total lapangan kerja di Tunisia terus menurun. Pada tahun 2013, persentase lapangan kerja sektor publik terhadap total lapangan kerja di Tunisia telah turun menjadi sekitar 22 persen, sedikit di atas rata-rata OECD, dan jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara kaya minyak. Para ekonom yang menulis mengenai dampak ekonomi Arab Spring telah menyoroti hilangnya output yang signifikan di Tunisia: masing-masing sebesar 5,5 persen, 5,1 persen, dan 6,4 persen dari PDB pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Sebuah studi menyebutkan “tingginya ketergantungan perekonomian Tunisia terhadap aktivitas perekonomian di kawasan Euro” dan menemukan bahwa lesunya aktivitas perekonomian Tunisia setelah tahun 2011 “didorong oleh melemahnya permintaan dari kawasan Euro”.

Aset Tunisia mencakup perekonomian yang terdiversifikasi, infrastruktur yang relatif berkembang dengan baik dan tenaga kerja yang terlatih, serta lokasi geografis yang strategis antara Eropa dan Afrika. Namun, para ahli mencatat bahwa pertumbuhan sektor-sektor yang tidak dapat diperdagangkan, seperti konstruksi, real estate, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan jasa makanan, telah menyebabkan apa yang Dani Rodrik (2016) sebut sebagai “deindustrialisasi prematur.” Meskipun sektor jasa dengan produktivitas tinggi—keuangan

dan asuransi, serta informasi dan komunikasi—telah tumbuh pesat di Tunisia, sektor-sektor tersebut tumbuh dari skala kecil dengan dampak terbatas terhadap keseluruhan struktur lapangan kerja.

Selain itu, peran Tunisia dalam proses globalisasi neoliberal mencerminkan pola yang terlihat di mana-mana: pembangunan yang tidak merata dan tidak setara serta kesenjangan regional dan kelas. Sebagian wilayah Tunisia juga mengalami degradasi lingkungan akibat praktik ekstraktif, seperti yang terjadi di wilayah pertambangan Gafsa. Kita akan kembali ke pola pembangunan Tunisia yang tidak merata dan tidak setara. Pertama, kami mengkaji dampak keamanan dan ekonomi dari serangan militer NATO pada tahun 2011 di Libya yang menggulingkan rezim Ghaddafi.

Perubahan Rezim di Libya dan Dampaknya di Tunisia

Sebelum tahun 2011, Libya yang kaya minyak telah menjadi sumber lapangan kerja bagi pekerja migran Tunisia, dan banyak warga Libya beralih ke Tunisia untuk mencari perbankan, liburan, dan perawatan medis. Penilaian yang bijaksana mengenai dampak pemboman NATO di Libya menunjukkan keruntuhan dan fragmentasi negara yang terjadi kemudian (Bank Dunia, 2017). Pada tahun 2014, “sekitar 60.000 pekerja Tunisia (dari 91.000) yang secara resmi terdaftar di Libya [telah] kembali ke negaranya.” Akibatnya, arus masuk pengiriman uang resmi dari Libya turun menjadi TD 38,1 juta pada tahun 2014, dari sekitar TD 55,9 juta pada tahun 2010—penurunan sebesar 32 persen. Pekerja Tunisia yang dipulangkan termasuk pekerja sektor konstruksi, wiraswasta, dan kategori pekerja serupa. Laporan Bank Dunia mencatat bahwa wilayah termiskin di Tunisia terkena dampak buruk baik dari penurunan pengiriman uang maupun pengangguran, karena banyak pekerja Tunisia yang pulang ke negaranya berasal dari wilayah tersebut (Bank Dunia, 2017).

Otoritas keuangan dan moneter Tunisia terus mengizinkan warga Libya untuk membuka rekening bank, sehingga memberikan aliran masuk mata uang asing yang bermanfaat dan likuiditas yang sangat dibutuhkan oleh bank-bank Tunisia. Pada tahun 2014, simpanan Libya di tujuh bank Tunisia yang disurvei dalam laporan Bank Dunia berjumlah TD 2,07 miliar (2,4 persen dari PDB tahun 2015), atau 12 persen dari total simpanan di tujuh bank tersebut.

Uang tunai juga dibawa melalui perbatasan Tunisia–Libya setelah diserahkan ke bea cukai Tunisia, menurut laporan Bank Dunia tahun 2017 (hal. 1), yang menambahkan bahwa agen penukaran mata uang informal di kota-kota perbatasan Tunisia memproses sekitar 1,25 miliar uang tunai. Dinar Libya (LD) pada tahun 2015 (sekitar TD 814 juta) dari wisatawan Libya yang memasuki Tunisia. Namun, tingkat arus kas masuk tersebut tiga kali lebih rendah dibandingkan tahun 2013.

Tunisia telah menjadi tujuan wisata populer bagi orang Eropa, serta bagi orang Libya dan Aljazair. Setelah tahun 2011, meningkatnya ancaman keamanan menurunkan daya tarik Tunisia sebagai tujuan wisata. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2017, antara tahun 2010 dan 2015, kunjungan wisatawan asing turun sebesar 9,5 persen per tahun, dibandingkan dengan peningkatan rata-rata sebesar 3,2 persen per tahun, dari tahun 2000 hingga 2010, yang diikuti dengan penurunan drastis pada malam hari. menginap di hotel dan tempat

serupa. Dua serangan teroris di Tunisia pada tahun 2015—di Museum Bardo Tunis pada bulan Maret dan resor wisata Port El Kantaoui pada bulan Juni—menyebabkan penurunan tajam dalam pariwisata Tunisia. Tunisia secara umum telah melindungi diri dari risiko politik dan perselisihan sipil mendalam yang terjadi di negara-negara Arab Spring lainnya seperti Libya, Yaman, Suriah, dan Mesir. Namun, ancaman keamanan yang terus berlanjut dan tidak dapat diprediksi terus berlanjut, diperburuk oleh dampak regional yang besar.

Meskipun masa transisi awal Tunisia (2011-2014) dilanda tantangan keamanan dan ekonomi, organisasi masyarakat sipil yang dinamis serta lembaga-lembaga modern dan berfungsi dengan baik mampu mencegah kekerasan dan keruntuhan yang terjadi di negara lain. Penerapan konstitusi baru pada awal tahun 2014 merupakan pencapaian besar. Namun, tantangan masih tetap ada, karena pembangunan yang tidak merata di negara ini, tingginya angka pengangguran, kurangnya dukungan eksternal yang besar, dan bangkitnya ISIS menarik kaum muda dari wilayah-wilayah tertinggal di Tunisia. Meskipun Tunisia memiliki reputasi sebagai salah satu negara yang lebih liberal di dunia Arab dan satu-satunya kisah sukses demokrasi di kawasan ini, Tunisia menjadi lahan subur untuk merekrut kelompok yang menamakan diri Negara Islam di Irak dan Suriah. Pada gilirannya, pemerintah Tunisia meningkatkan belanja pertahanan dan keamanan secara tajam.

Pembangunan yang Tidak Merata

Meskipun ada upaya untuk melakukan reorientasi perekonomian pada tahun 1990an dan memasuki abad baru, Tunisia gagal mempromosikan lapangan kerja di sektor swasta. Memang benar, lapangan kerja di sektor swasta menjadi sangat informal dan berbahaya. Sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja formal di sektor swasta—manufaktur, keuangan, pariwisata, komunikasi, dan jasa-jasa kelas atas lainnya—tumbuh terlalu lambat, memainkan peran yang terbatas dalam keseluruhan lapangan kerja, atau menjadi korban Resesi Hebat. Restrukturisasi dan privatisasi selama bertahun-tahun juga mengurangi jumlah lapangan kerja. Di sektor pertambangan Gafsa, misalnya, lapangan kerja menyusut ketika Gafsa Phosphate Company, yang pernah menjadi monopoli negara, semakin diprivatisasi (Gobe, 2010). Meskipun sebagian besar pengangguran hanya memiliki ijazah sekolah menengah atas, generasi muda yang berpendidikan perguruan tinggi semakin tidak memiliki prospek kerja. Persatuan Lulusan Pengangguran didirikan pada tahun 2006 dan memperoleh pengakuan hukum pada tahun 2011.

Pengangguran menjadi lebih besar di kalangan perempuan, pemuda, dan kelompok berpenghasilan rendah. Meskipun total pengangguran mencapai 15 persen pada pertengahan tahun 2017, jumlah tertinggi terjadi di kalangan pemuda (35,7 persen), perempuan (21,5 persen), dan lulusan universitas (39,5 persen, dengan 40 persen perempuan). Tingkat partisipasi angkatan kerja total masih rendah (51,7 persen), khususnya di kalangan perempuan (28,2 persen). Tingkat pengangguran yang tinggi terdapat di wilayah pedalaman di wilayah tenggara dan barat daya, yang juga mengalami kemiskinan dan memburuknya layanan sosial dan infrastruktur fisik. Sadiki (2019) mengacu pada “marginalisasi ganda” yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut, yang sering menyebabkan protes dalam beberapa tahun terakhir. Menurut sebuah analisis (Weilandt, 2018), “Kemiskinan secara keseluruhan 10 kali

lebih tinggi di kota Kairouan (34,9%) dan Kef (34,2%) dibandingkan di kota Tunis (3,5%). Rata-rata, 88% penduduk Tunisia memiliki akses terhadap air keran yang dapat diminum. Meskipun jumlah ini mencakup hampir 100% populasi di wilayah-wilayah makmur di negara ini, jumlah ini hanya mencakup setengah dari penduduk Sidi Bouzid.”

Setelah tahun 2011, pemerintah berturut-turut meningkatkan belanja sosial dan perekrutan sektor publik untuk mengatasi meningkatnya kerusuhan sosial dan pengangguran kaum muda, namun hal ini dilakukan melalui pinjaman IMF yang kemudian membebani negara. IMF terus memantau Tunisia dalam hal devaluasi mata uang, pengendalian tagihan upah sektor publik (melalui paket pensiun dan pembekuan upah dan perekrutan), “fleksibilitas” dengan upah minimum, rekapitalisasi bank, dan “memperkuat independensi Bank Sentral”. UGTT memaksa pemerintah untuk menyetujui kenaikan gaji pada tahun 2018, namun hal ini diimbangi oleh inflasi. Protes dan pemogokan terjadi di wilayah pedalaman, dimana penduduk menuntut lebih banyak lapangan kerja dan investasi, melumpuhkan produksi gas, minyak bumi, dan fosfat. Sebagian besar utang Tunisia adalah utang luar negeri, dan pada bulan Juli 2020, dengan perekonomian yang menyusut namun belanja meningkat untuk mengimbangi dampak pandemi COVID-19, pemerintah berupaya untuk menunda pembayaran utang ke Arab Saudi, Qatar, Prancis, dan Italia.

Suara-suara dari masyarakat sipil dan pemerintah Tunisia serta dunia internasional menyerukan restrukturisasi atau pembatalan utang, karena pembayaran utang yang tinggi pada saat pendapatan pemerintah menurun. Pada sesi parlemen di awal masa jabatannya pada bulan September 2020, Perdana Menteri Hichem Mechichi mencatat bahwa pembayaran utang publik berjumlah dua kali lipat pengeluaran pembangunan negara (Arab Center for Research & Policy Studies, 2020). Rasio utang pemerintah terhadap PDB Tunisia meningkat dari sekitar 40 persen pada tahun 2010–11 menjadi 77 persen pada akhir tahun 2018. Pada tahun 2022, angkanya mungkin mencapai 90 persen. Laporan OECD menyoroti permasalahan yang terkait dengan defisit anggaran, utang, dan pandemi (OECD, 2021). Laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2019 menyatakan bahwa perdana menteri Tunisia pada saat itu “menekankan tantangan fiskal yang dihadapi negara tersebut dalam memenuhi meningkatnya harapan masyarakat Tunisia sehubungan dengan hak-hak sosial dan ekonomi mereka, dan mendesak masyarakat internasional untuk mengakui hak-hak sosial dan ekonomi mereka. pentingnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara yang merupakan bagian integral dari konsolidasi pencapaian demokrasi dari revolusi” (Dewan Hak Asasi Manusia, 2019). Sebuah studi baru-baru ini mengenai kesengsaraan ekonomi Tunisia menegaskan kembali seruan agar lebih banyak bantuan Eropa guna meningkatkan perekonomian Tunisia dan membantu mengkonsolidasikan transisi demokrasinya.

Alih-alih memberikan pinjaman, Tunisia memerlukan investasi dan pertumbuhan di sektor-sektor seperti manufaktur, keuangan, komunikasi, pariwisata, dan pengolahan makanan, untuk mengimbangi deindustrialisasi dini dan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Berakhirnya era Ben Ali dan transisi menuju demokrasi menimbulkan ekspektasi yang tinggi di kalangan masyarakat. Namun sistem demokrasi yang baru “sejauh ini gagal memenuhi harapan masyarakat akan peningkatan standar hidup. Faktanya, hal ini telah

menyebabkan kemerosotan mereka”. Keluhan sosial dan ekonomi menimbulkan protes, sering kali ditanggapi dengan intervensi keras pemerintah yang diikuti dengan penolakan yang lebih besar dari masyarakat dan serikat pekerja. Protes di wilayah pertambangan Gafsa—yang disebabkan oleh keluhan atas rendahnya upah, pengangguran, dan bagaimana pekerja bergaji dipilih oleh Perusahaan Fosfat Gafsa—mengganggu produksi fosfat, sehingga berujung pada tindakan polisi. Pada bulan Juni 2020, petugas layanan kesehatan melakukan pemogokan untuk memprotes pemotongan gaji dan pengurangan gaji serta menuntut kondisi kerja yang lebih baik.

Ketidakpuasan masyarakat Tunisia terhadap kondisi kehidupan mereka menjadi ancaman mendasar bagi transisi demokrasi di negara tersebut. Kesulitan ekonomi menyebabkan kelumpuhan dan disfungsi politik, yang kemudian memicu intervensi drastis dari presiden baru, Kais Saied. Pada bulan Juli 2021, ia memecat perdana menteri, membubarkan parlemen, dan mengambil alih kekuasaan eksekutif yang besar.

2.3 DEMOKRASI YANG APA DALAM KONDISI GLOBALISASI NEOLIBERAL?

Pembangunan yang dipimpin oleh negara selama beberapa dekade, yang telah memperluas sektor publik, juga telah menghasilkan harapan yang tinggi terhadap peningkatan hak-hak sosial ekonomi. Pada gilirannya, hal ini memotivasi para guru, pekerja layanan kesehatan, dan pegawai negeri untuk berada di garis depan dalam protes publik dan, bersama dengan sektor masyarakat lainnya—seperti pekerja industri, kaum miskin yang terpinggirkan, dan pekerja rentan—untuk melakukan tindakan pencegahan. tentu saja pada pemerintah. Memang benar, data survei Arab Barometer menunjukkan bahwa warga negara di Tunisia, seperti halnya di negara-negara Arab lainnya, umumnya mengasosiasikan demokrasi dengan hak-hak ekonomi dan sosial serta hak-hak sipil dan politik. Survei yang saya lakukan terhadap dokumen masyarakat sipil Tunisia, berbagai webinar, dan postingan di Facebook, serta wawancara yang saya lakukan di Tunisia sejak tahun 2013, menegaskan preferensi terhadap demokrasi sosial yang kuat. Mungkin inilah sebabnya belanja sosial publik Tunisia pada tahun-tahun awal transisi demokrasi relatif tinggi. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2015, total belanja sosial publik Tunisia—termasuk pendidikan, asuransi sosial (pensiun, kesehatan, alokasi pendapatan minimum, layanan sosial), dan subsidi—berjumlah 26 persen dari PDB pada tahun 2013, jauh lebih tinggi. dibandingkan di banyak negara berpendapatan menengah dan tinggi (Bank Dunia, 2015).

Samia Letaief, seorang pejabat UGTT yang juga aktif dalam gerakan feminis, menjelaskan dalam sebuah wawancara pada bulan Maret 2014 bahwa dalam kedua gerakan tersebut “kami bekerja untuk kesetaraan undang-undang ketenagakerjaan publik dan swasta, asuransi sosial untuk semua pekerja, cuti hamil dan penitipan anak, kesehatan tempat kerja, dan menentang pelecehan seksual. Kami ingin pemerintah meratifikasi Konvensi ILO 183 [tentang perlindungan kehamilan].” Tujuan-tujuan tersebut disepakati oleh Forum untuk Hak-Hak Ekonomi dan Sosial, yang mengorganisir unjuk rasa dan unjuk rasa di Tunis pada bulan Maret 2014, bersama dengan Observatorium Sosial Tunisia, UGTT, dan dua organisasi feminis lama ATFD dan AFTURD. Senada dengan itu, Nadia Chaabane, anggota Majelis Konstituante

Nasional yang mewakili partai sayap kiri El Massar, menekankan pentingnya hak-hak sosial ekonomi:

Kita memerlukan asuransi sosial bagi seluruh warga negara dan pembangunan infrastruktur di pedalaman—jalan raya, sekolah, dan sebagainya—sehingga masyarakat di pedalaman tidak perlu meninggalkannya ke kota; ini adalah bagian dari tanggung jawab negara. Kita tidak perlu bergantung pada investasi swasta dan terlebih lagi pada investasi asing karena kita pernah mengalami hal tersebut di masa lalu dan digunakan dengan cara yang korup. Kita mempunyai sumber daya internal sendiri dan sumber daya tersebut perlu disebar dan didistribusikan secara efektif dan adil. Dan kita memerlukan konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan; dengan cara ini kita dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap diri mereka sendiri dan terhadap pemerintah. Seperti yang dikatakannya: “Saya menyukai sistem kesejahteraan di negara-negara Nordik dengan perlindungan sosial yang luas terhadap warga negaranya dan model partisipatif [un modele participatif] dari kelompok sayap kiri. negara-negara Amerika Latin. Masa depan harus lebih partisipatif: dengan partisipasi organisasi masyarakat sipil dan pemuda; dengan transparansi, tanpa korupsi, dan tanpa paternalisme.” Ia berharap Tunisia tidak akan menjadi “seperti negara-negara dengan hak suara terbatas. Kami telah melihat defisit demokrasi dan ingin menghindarinya.”

Langkah-langkah partisipatif dan konsultatif tersebut sebenarnya dilakukan setelah tugas Majelis Konstitusi berakhir dan pemilu baru dilaksanakan. Sebuah rancangan undang-undang disiapkan pada tahun 2014 untuk pembentukan Dewan Dialog Sosial Nasional yang baru. Dengan kepresidenan bergilir, Dewan akan memiliki perwakilan tripartit yang terdiri dari pemerintah (dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial), serikat pekerja (diwakili oleh UGTT dan badan-badan lainnya), dan sektor swasta (diwakili oleh Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, atau UTICA, dan badan lainnya). Pemerintahan baru yang dibentuk pada tahun 2015 ditugaskan untuk mengembangkan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun yang pertama sejak tahun 2010. Rencana Pembangunan Nasional Tunisia untuk tahun 2016–21 memberikan platform penting untuk mendanai agenda terpadu perlindungan sosial dan reformasi ketenagakerjaan. Konsolidasi demokrasi di Tunisia memerlukan peningkatan sistem perlindungan sosial dan penyediaan tenaga kerja dalam jangka pendek dan menyelaraskan kembali kebijakan mengenai manfaat, kelayakan, dan skema pembiayaan dalam jangka menengah dan panjang. Namun, dukungan internasional yang diperlukan—baik dalam bentuk investasi asing langsung untuk pertumbuhan lapangan kerja atau pinjaman lunak dan hibah—belum diberikan. Sebaliknya, beban utang Tunisia meningkat, pengangguran tetap tinggi, dan jenis pekerjaan informal dan non-reguler semakin menjamur.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh International Republican Institute yang berbasis di AS (2017) menunjukkan bahwa 68 persen responden menggambarkan situasi ekonomi di Tunisia saat ini sangat buruk, dan 21 persen lainnya menggambarkan situasi tersebut agak buruk. Sekitar 61 persen merasa bahwa pemerintah yang berkuasa buruk atau sangat buruk dalam menciptakan lapangan kerja. Sebanyak 83 persen merasa bahwa negara ini sedang

menuju ke arah yang salah. Meskipun pada prinsipnya terdapat dukungan yang luas terhadap demokrasi, 41 persen mengatakan bahwa kesejahteraan ekonomi “pasti lebih penting” dan 21 persen lainnya menganggapnya “sedikit lebih penting.” Responden Tunisia pada survei Arab Barometer gelombang IV dan gelombang V menganggap perekonomian Tunisia “sangat buruk.” Pada tahun 2019, 48 persen responden mengidentifikasi “ekonomi” sebagai “tantangan paling penting yang dihadapi Tunisia saat ini”; mayoritas (56 persen) generasi muda menyatakan ingin beremigrasi.

Meskipun terdapat tantangan ekonomi politik yang terus berlanjut, UGTT dan UTICA pada tahun 2017 bersama-sama menghasilkan program “pekerjaan yang layak”, *Le contrat social: Un exemple innovant de Program par Pays pour le Travail Décent (PPTD) pour la Tunisie 2017–22*, yang membahas masalah-masalah industri hubungan dan kondisi kerja yang layak, kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan kejuruan, jaminan sosial, kebijakan pendapatan dan upah, perundingan bersama, dan kebijakan pembangunan regional. Dan pada bulan April 2021, pemerintahan Perdana Menteri Hichem Mechichi dan UGTT menandatangani perjanjian bersama untuk meluncurkan reformasi di tujuh perusahaan negara (termasuk Tunis Air) dan sistem subsidi dan pajak. “Perjanjian bersejarah mengenai pertempuran penting” ini dimaksudkan untuk mencegah pinjaman yang melumpuhkan lebih lanjut dan pengenaan IMF. Dalam siaran pers tersebut, Mechichi menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga kelestarian BUMN dan tidak menyerahkannya kepada swasta karena menurutnya merupakan kekayaan negara. Sementara itu, pemimpin UGTT Nouredine Tabboubi menyerukan reformasi sistem perpajakan menuju keadilan sosial, dan dia mengkritik pencabutan subsidi untuk beberapa produk makanan seperti minyak dan gula. Namun perjanjian ini tidak dapat mencegah terjadinya hal yang sama. “Kudeta” presiden pada bulan Juli 2021. Hal ini juga tidak menghalangi permintaan tambahan bantuan keuangan IMF pada tahun 2022 sebesar Rp. 19 Triliun dalam jangka waktu empat puluh delapan bulan (IMF, 2022). Sebuah studi Bank Dunia mencatat 'dekade pertumbuhan yang hilang' setelah tahun 2011, ketidakmampuan pemerintah memenuhi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik meskipun ada pengentasan kemiskinan melalui transfer sosial, dampak pandemi COVID-19, dan meningkatnya utang negara (Bank Dunia, 2022). Dokumen tersebut tidak menyebutkan kebutuhan negara demokrasi Arab yang masih kecil dan masih muda akan dukungan ekonomi internasional.

2.4 KESIMPULAN

Protes Arab Spring dimulai pada tahun penting tahun 2011, yang juga mencakup protes anti-penghematan Eropa di musim panas dan Occupy Wall Street di musim gugur. Kenaikan harga, informalitas, pengangguran, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang terjadi bahkan sebelum pandemi COVID-19. Sebaliknya, konsentrasi kekayaan meningkat setelah COVID-19, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di negara-negara Arab. Pada bulan Agustus 2021, IMF mengalokasikan \$650 miliar “hak penarikan khusus” (SDR) baru, mata uang kuasi yang digunakan untuk menambah cadangan devisa suatu negara. Namun karena SDR dialokasikan berdasarkan kontribusi masing-masing

negara anggota terhadap IMF, sebagian besar SDR diberikan ke negara-negara inti, seperti Amerika Serikat dan Jerman. Tunisia dan negara-negara berpenghasilan menengah atau rendah lainnya hampir tidak mendapatkan manfaat dari hal ini. Pada tahun 2022, konflik Rusia-Ukraina-NATO memperburuk kekurangan pangan dan bahan bakar serta kenaikan harga. Tantangan ekonomi dan persaingan antarnegara merupakan indikasi krisis struktural yang dibahas oleh para pakar sistem dunia. Sebagaimana dicatat oleh Immanuel Wallerstein (2013: 35), sistem dunia telah menyimpang jauh dari keseimbangan sehingga kecil kemungkinannya untuk kembali.

Kesusahan yang dialami Tunisia merupakan contoh dari defisit sistem internasional yang didasarkan pada model ekonomi yang cacat dan berpura-pura mengenai apa yang dapat dihasilkan oleh demokrasi dalam kondisi ekonomi seperti itu. Namun saran kebijakan yang cacat ini tidak ada habisnya: mengakhiri subsidi, mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan peraturan ketenagakerjaan, membatasi tagihan upah sektor publik. Sebaliknya, para akademisi yang lebih bersimpati terhadap kesulitan Tunisia menyerukan lebih banyak bantuan eksternal, terutama dari Uni Eropa: “Bank-bank pembangunan nasional serta Bank Investasi Eropa dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan harus memberikan pinjaman lebih lanjut dengan persyaratan yang menguntungkan bagi pemerintah dan swasta Tunisia. investasi. UE harus secara sepihak meliberalisasi perdagangan dengan Tunisia, khususnya untuk produk pertanian. Perusahaan Tunisia [harus memperoleh] akses segera ke pasar UE [dengan] Tunisia membuka pasarnya sendiri secara bertahap”.

Perspektif yang lebih tegas diberikan oleh mantan anggota Majelis Konstituante Nadia Chaabane: “Kita harus lebih kreatif dalam solusi kita, misalnya menciptakan lapangan kerja dalam konteks keberlanjutan, seperti memajukan energi pembaruan.” Komentar Chaabane mengenai energi terbarukan juga diamini oleh pakar asal Tunisia, Larbi Sadiki (2019), yang mempromosikan “Pembangunan Penghijauan.” Pemerintah Tunisia, tulisnya, harus berusaha membalikkan degradasi lingkungan yang ditambah dengan penyebaran penyakit kronis akibat produksi bahan kimia dan pertambangan:

Pemerintah pusat harus berkomitmen untuk menawarkan kompensasi yang serius untuk mengurangi dampak marginalisasi ganda. Untuk melakukan hal ini, pemerintah harus berkolaborasi dengan daerah-daerah tertinggal dan komunitas donor internasional untuk mendorong praktik pembangunan inklusif. Tujuannya adalah untuk mencari bantuan dalam mengembangkan pembangunan daerah yang mampu meregenerasi diri sendiri; desentralisasi politik yang membantu memastikan keterwakilan daerah yang lebih besar di tingkat nasional; dan sistem udara dan energi yang bersih. Kebijakan-kebijakan tersebut juga akan membantu menghentikan degradasi lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh pembangunan pascakolonial yang tidak merata yang merugikan manusia dan alam.

Ada manfaatnya dalam argumen yang mendukung lebih banyak dukungan Uni Eropa terhadap perkembangan demokrasi di Tunisia. Namun tidak ada bukti bahwa UE dan Amerika Serikat akan berupaya mewujudkan ekonomi politik global tipe baru, yang didasarkan pada

redistribusi kekayaan dan lebih banyak solidaritas transnasional. Saat artikel ini ditulis, semua mata negara Barat masih tertuju pada penderitaan yang dialami Ukraina, kemurahan hati terhadap Ukraina tampaknya tidak terbatas, dan belanja militer negara-negara Barat terus meningkat. Globalisasi neoliberal sebagai sebuah sistem keterhubungan yang menjanjikan kemajuan telah berubah menjadi kebalikannya, dan gagal menyediakan kondisi bagi pembangunan demokratis yang berkesinambungan—apalagi berkelanjutan.

BAB 3

(RE)ARTIKULASI GLOBALISASI MASA LALU, SEKARANG, DAN MASA DEPAN

Dengan mengambil kasus di Inggris, Amerika Serikat, dan Tiongkok, bab ini mengeksplorasi hubungan transnasional dari retorika nostalgia—atau, lebih tepatnya, apa yang Roland Robertson (1990) sebut sebagai “nostalgia yang disengaja”—dalam fase krisis saat ini. globalisasi. Menganalisis kasus-kasus ini melalui kaca mata studi global memungkinkan pemahaman tentang nostalgia sebagai respons terhadap paradoks—seperti antara dunia yang terkompresi dan semakin intensifnya perbedaan kelompok negara, antara integrasi dan kemunduran, serta antara globalisasi dan deglobalisasi, yang dihasilkan oleh krisis global. proses globalisasi—dan sebagai konstruksi multifaset yang terkait dengan geotemporalitas, pengaruh, politik, budaya, dan sejarah. Saya berpendapat bahwa retorika nostalgia yang berbeda mencerminkan tahapan empiris dan pengalaman globalisasi yang berbeda-beda di negara-negara ini dan artikulasi (re)artikulasi tentang tempat-tempat yang mereka cita-citakan di masa depan. Meskipun nostalgia yang disengaja yang sedang dibahas telah mengungkap ketegangan yang terus berlanjut di antara negara-bangsa, warga negara, hubungan internasional, dan kemanusiaan dalam konteks percepatan kapitalisme global, hubungan yang saling bertentangan dan saling membangun antara globalisasi dan nostalgia juga penting untuk dipertimbangkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, nostalgia—yang dicontohkan oleh slogan Brexit “Inggris Global”, slogan Trumpian “Make America Great Again” (MAGA) di Amerika Serikat, dan “Impian Tiongkok” di bawah kepemimpinan Xi—telah terlihat jelas di seluruh rezim politik dan wilayah geografis. Munculnya nostalgia sebagai sentimen publik, artikulasi yang berkaitan dengan waktu (tidak harus linier), dan sebagai alat manipulasi politik di era ketidakpastian (misalnya ekonomi, politik, kesehatan masyarakat, dan lingkungan hidup) menimbulkan pertanyaan tentang hubungan tersebut. antara globalisasi dan nostalgia. Dengan mengambil kasus di Inggris, Amerika Serikat, dan Tiongkok, bab ini mengeksplorasi hubungan transnasional dari retorika nostalgia—atau, lebih tepatnya, apa yang disebut Roland Robertson (1990) sebagai “nostalgia yang disengaja”—dalam fase globalisasi saat ini. Melihat nostalgia sebagai tempat artikulasi yang terdiri dari konstruksi diskursif dan kontestasi di antara berbagai kekuatan (misalnya, sejarah, ekonomi, budaya, dan ideologi), saya juga memperhatikan bagaimana temporalitas nasional dan imajinasi globalisasi dinarasikan dan saling berhubungan. mengenai implikasinya terhadap masa depan globalisasi.

Menganalisis kasus-kasus ini melalui lensa studi global yang memberikan perhatian penuh pada kontinum lokal-global yang dipenuhi dengan fluiditas, keragaman, dan kompleksitas, kerangka konseptual bab ini, dibahas di bagian pertama. bagian, mengacu pada teori tentang hubungan antara globalisasi dan nostalgia. Hal ini memungkinkan pemahaman tentang nostalgia sebagai respons terhadap ketegangan—seperti antara dunia yang

terkompresi dan semakin intensifnya perbedaan kelompok negara, antara integrasi dan kemunduran, serta antara globalisasi dan deglobalisasi—yang dihasilkan oleh proses globalisasi dan sebagai sebuah multifaktor. konstruk eted terkait dengan geotemporalitas, pengaruh, politik, budaya, dan sejarah. Berpedoman pada kerangka tersebut, saya kemudian menyajikan penceritaan tentang nostalgia di ketiga negara tersebut pada bagian berikut. Secara khusus, kasus Inggris menggambarkan bagaimana sejarah Kerajaan Inggris telah membentuk makna keanggotaannya di Uni Eropa (UE) dan imajinasi mengenai masa depannya pasca-Brexit dengan mengandalkan ikatan transatlantik (kolonial) untuk “Inggris Global.” Retorika “America First” di Amerika Serikat pada era Trump melambangkan terkikisnya multilateralisme, fondasi globalisasi kontemporer, dan (angan-angan) kembali ke masa lalu yang dibayangkan dengan mengabaikan semakin intensifnya kesenjangan yang berakar pada neoliberalisme di masa kini. Sebaliknya, ingatan selektif Tiongkok mengenai Jalur Sutra (kuno)—sebuah kisah tentang konektivitas kosmopolitan pra-globalisasi—bertujuan untuk melegitimasi ekspansi geopolitik Tiongkok dan mengejar globalisasi alternatif yang sejajar dengan tatanan global yang dipimpin oleh Barat.

Saya berpendapat bahwa retorika nostalgia yang berbeda-beda mencerminkan tahapan empiris dan pengalaman globalisasi serta artikulasi (re)artikulasi negara-negara tersebut yang berbeda-beda mengenai tempat-tempat yang mereka cita-citakan di masa depan. Meskipun terdapat simultanitas dalam skala global pada momen bersejarah ini, nostalgia yang disengaja yang sedang dibahas tidak boleh disederhanakan sebagai tren global perlawanan lokal terhadap globalisasi. Analisis yang lebih mendalam perlu diarahkan pada dinamika geotemporal masing-masing negara—seperti perubahan kekuasaan, hubungan sosial, dan struktur perasaan lintas waktu dan tempat—dalam perjalanan globalisasi yang panjang (dan tidak terbatas pada globalisasi kontemporer).

3.1 KONSEPTUALISASI HUBUNGAN ANTARA GLOBALISASI DAN NOSTALGIA

Dalam penggunaan masa kini, nostalgia mengacu pada reaksi emosional yang ditandai dengan rasa kehilangan, dislokasi, dan/atau “tunawisma”. Dalam tulisan mereka tentang nostalgia sebagai konstruksi diskursif sosiokultural, Bryan S. Turner dan Georg Stauth (Turner, 1987; Stauth & Turner, 1988) mengidentifikasi empat komponen utama paradigma nostalgia: gagasan kemunduran sejarah, rasa tidak adanya keutuhan pribadi dan kepastian moral, perasaan kehilangan kebebasan dan otonomi individu, dan perasaan kehilangan ekspresi pribadi dan spontanitas emosional. Sebagai respons terhadap gangguan atau diskontinuitas identitas, nostalgia dapat digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan, menegaskan kembali, dan merekonstruksi identitas kita, misalnya dengan mencari keakraban dan kepastian di masa lalu. Dalam pengertian ini, nostalgia bukan tentang tempat melainkan tentang waktu: khususnya, “masa keemasan” yang dirasakan atau dibayangkan di mana kesenjangan antara masa lalu dan masa kini dapat dijembatani, diri yang diinginkan dapat diakomodasi, dan tidak ada lagi kerinduan terhadap apa pun. ruang-waktu lain.

Melihat globalisasi sebagai akar utama nostalgia, Roland Robertson (1990, 1992, 1995) adalah salah satu dari sedikit orang yang membahas hubungan antara globalisasi.

Menurutnya, fase “lepas landas” globalisasi (yaitu, 1870–1925) menyaksikan sejumlah perubahan penting, termasuk perkembangan berbagai sarana komunikasi, perjanjian internasional, dan lembaga-lembaga global mengenai dunia secara keseluruhan. , seperti standarisasi Waktu Dunia dan popularitas global kalender Gregorian. Transformasi teknologi, ekonomi, kelembagaan, sosial, dan budaya tersebut tidak hanya memicu perasaan terasing atau “tunawisma” pada individu; yang lebih penting lagi, hal-hal tersebut membangkitkan nostalgia yang disengaja dan didorong oleh politik sebagai suatu bentuk politik budaya—dan juga politik budaya—di dalam negara-bangsa yang difasilitasi oleh kepedulian yang besar di seluruh dunia terhadap identitas nasional dan integrasi nasional.

Modernitas kapitalis di abad kedua puluh melibatkan homogenisasi persyaratan negara-bangsa modern—seperti produksi warga negara yang terstandarisasi—di hadapan keberagaman etnokultural dan agama lokal. Hal ini menimbulkan ketegangan antara universalisasi partikularisme nasional (dan lainnya) dan ekspektasi akan keunikan identitas, serta perbedaan geo-temporal antar kelompok negara. Meskipun intensitas dan jenis kekhawatiran terhadap masa lalu sangat bervariasi, nostalgia yang disengaja banyak terjadi pada periode tersebut, mulai dari Amerika Utara hingga Eropa dan Asia. Meskipun nostalgia di Jepang, yang merupakan negara berkembang di Asia dan merupakan pendatang baru dalam masyarakat internasional pada saat itu, adalah tentang konsolidasi “esensi nasional” dan memperkuat identitas “unik” mereka terhadap dunia luar, misalnya, apa yang mendominasi gagasan sosiologi Jerman saat itu adalah pesimisme yang luar biasa. tentang masa depan dan modernitas secara umum.

Robertson (1990) berpendapat bahwa penolakan terhadap globalisasi akan tetap ada, mengingat terus adanya perubahan pada empat komponen ruang global yang saling bergantung. Secara khusus, negara-negara secara bersamaan mengalami tekanan eksternal dan internal untuk merekonstruksi identitas kolektif mereka dalam konteks meningkatnya heterogenitas dan keragaman; individu semakin menjadi sasaran persaingan etnik, budaya, dan agama; sistem masyarakat dunia (hubungan internasional) menjadi semakin multipolar dan cair; dan gagasan tentang kemanusiaan yang sama, atau tentang umat manusia sebagai suatu spesies, sedang menjadi sasaran tematisasi dan pengawasan yang diperebutkan. Dalam fase globalisasi saat ini, nostalgia telah menjadi kolektif dalam skala global dan diarahkan pada globalitas itu sendiri, mengingat perubahan global yang sangat cair. Dibandingkan dengan nostalgia sintetik yang disengaja yang menjadi unsur politik budaya dalam fase lepas landas globalisasi, nostalgia kontemporer lebih bersifat ekonomis dan lebih bersifat kultural, dalam artian menjadi produk utama kapitalisme transnasional.

Namun, di mata Neil Brenner, analisis Roland Robertson—khususnya, konsepsinya tentang ruang—“merekproduksi gambaran ruang global yang berpusat pada negara sebagai kerangka teritorial abadi yang mengandung historisitas tanpa berevolusi secara historis” (Brenner, 1999). Alih-alih memperlakukan globalisasi sebagai situasi statis atau kondisi terminal, ia memahaminya sebagai “konfigurasi ulang ruang sosial yang bersifat konfliktual yang terjadi secara bersamaan pada berbagai skala geografis yang bertumpuk”, dan sebagai proses berkelanjutan di mana spasial dan temporalitas hubungan sosial terus diproduksi dan

ditransformasikan berdasarkan perluasan, restrukturisasi, dan percepatan kapitalisme global. Meskipun hal ini sangat menantang peran negara-bangsa sebagai wadah tertutup bagi hubungan sosio-ekonomi, globalisasi dan nasionalisasi secara historis berjalan beriringan sebagai proses restrukturisasi sosio-spasial yang saling membangun. Namun, di tengah krisis yang semakin menumpuk (misalnya krisis keuangan, demokrasi, pengungsi, kesehatan masyarakat, dan iklim), penggunaan nostalgia yang disengaja atau versi romantis dari masa lalu tidak hanya menutupi perpecahan sosio-ekonomi yang mendalam di masyarakat; hal ini juga mengalihkan perhatian orang-orang dari interaksi dengan masa kini, dan dari cita-cita serta imajinasi tentang masa depan yang cerah tanpa kepicikan dan ketakutan.

Singkatnya, meskipun nostalgia berakar pada “kompresi waktu-ruang” yang diakibatkan oleh globalisasi dan merupakan bagian dari “kondisi manusia global”, globalisasi itu sendiri juga terus-menerus dibentuk kembali oleh hal-hal seperti itu. dinamika yang sangat konfliktual. Pada bagian berikutnya saya mengeksplorasi dinamika kompleks yang tertanam dalam retorika nostalgia, yang melaluinya cerita tentang globalisasi sebagai proses historis multiskalar dari deterritorialisasi dan reteritorialisasi diartikulasikan (re) di masing-masing dari tiga kasus negara yang dipilih.

3.2 CONTOH STUDI KASUS

Inggris: Brexit dan Inggris Global

Perdebatan seputar Brexit tahun 2016, dengan tema utama imigrasi, “kedaulatan,” dan perdagangan bebas, sebenarnya membahas posisi Inggris di dunia yang pengaruh globalnya sedang menurun. Pada tahun 1950an, krisis Suez, misalnya, tidak hanya merusak kepercayaan kekaisaran negara tersebut; hal ini juga memperlihatkan batas kemampuannya untuk bertindak secara independen dari Amerika Serikat, sebuah hegemon yang muncul dalam tatanan pascaperang. Meskipun masuknya Inggris ke dalam Komunitas Eropa pendahulunya, Komunitas Ekonomi Eropa, pada tahun 1973 merupakan salah satu upaya Inggris untuk menggunakan pengaruhnya dalam Komunitas Eropa yang sedang berkembang, namun seiring berjalannya waktu, keanggotaan Inggris semakin dipandang, terutama oleh kaum Eurosceptics, sebagai gejala dari keterpurukannya. kemunduran dan hilangnya hak istimewa, serta ancaman terhadap “narasi sejarah Inggris tentang diri sendiri”. Dalam versi ekstrimnya, kemenangan kampanye Leave dinyatakan oleh pemimpin UKIP Nigel Farage sebagai “hari kemerdekaan” negara tersebut (BBC, 2016). Melihat bahwa “identitas” sama pentingnya dengan perekonomian, Paul Beaumont berpendapat bahwa visi nostalgia tentang apa yang menjadikan Inggris “hebat” di masa lalu—Kekaisaran dan Perang Dunia II—telah memberikan lahan subur bagi Euroscepticisme jangka panjang yang memungkinkan Brexit, yang dapat dipahami sebagai “upaya radikal untuk menahan kemerosotan Inggris dengan berlayar menuju masa depan”.

Dalam konteks perdebatan Brexit, Theresa May, perdana menteri saat itu, juga meluncurkan kembali “Inggris” sebagai “Inggris Global” (Selchow, 2020). Disajikan sebagai alternatif dari UE setelah Brexit, Global Britain dibingkai oleh pemerintah Inggris sebagai kisah Inggris yang melarikan diri dari “penjara” UE dan strategi besar untuk memperbarui peran

kepemimpinan global dalam “baru” dunia pasca-Brexit (Daddow, 2019). Retorika ini menyatukan dua visi yang tampaknya kontradiktif namun saling terkait: kerinduan kekaisaran untuk memulihkan posisi Inggris sebagai primus inter pares, yang dibangun di atas penaklukan dan hierarki kolonial, dan narasi Powell yang picik tentang mundurnya pulau-pulau tersebut dari “globalisasi”. dunia yang tidak lagi dapat dikenali sebagai “Inggris”. Meskipun beberapa pakar mengkritisi Global Britain sebagai visi “Empire 2.0”, sebagian pakar lain dengan tajam menyatakan bahwa gagasan tersebut bukan tentang kesadaran global Britania Raya, melainkan strategi retorik untuk meremehkan masa lalu kolonialnya, untuk melepaskannya dari stigma imperium, dan juga untuk meminimalkan pentingnya dekolonisasi. Dengan kata lain, itu bukanlah “narasi kerajaan”, melainkan narasi kebesaran, identitas khas Inggris sebagai negara kecil namun heroik yang pernah “memerintah dunia”.

Amnesia—yang dihasilkan dengan menggabungkan nostalgia kekaisaran dengan aspirasi global yang positif—yang melekat dalam retorika Global Britain mungkin memang berkontribusi pada kemampuannya menarik pendukung Brexit dari berbagai spektrum sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun pemilih Brexit pada umumnya sering digambarkan sebagai mereka yang berkulit putih, lebih tua, kurang berpendidikan, dan lebih miskin, misalnya, banyak pemilih yang lebih muda (sekitar seperempat dari usia 18-24 tahun dan lebih dari sepertiga dari usia 25-34 tahun), orang-orang dengan gelar universitas (sedikit di atas dua perlima), dan sebagian besar etnis minoritas (antara lain sepertiga pemilih Asia dan seperempat pemilih kulit hitam) mendukung Cuti. Meskipun permusuhan terhadap imigrasi dan multikulturalisme adalah salah satu karakteristik yang terkait dengan suara meninggalkan, antusiasme terhadap kekayaan bersama—yang mungkin berarti “Dominion” kulit putih bagi sebagian orang, dan negara multiras dari Persemakmuran “baru” bagi sebagian lainnya—secara bersamaan terlihat jelas. Mengaitkan suara orang kulit hitam dan orang Asia dengan kesulitan dalam membedakan antara kekayaan bersama dan kesetiaan kekaisaran, Robert Saunders lebih lanjut berpendapat bahwa warisan kerajaan—seperti yang diwujudkan dalam wacana dan kritik Global Britain—merupakan warisan budaya bersama yang mempengaruhi semua sisi dunia. Perdebatan Brexit, bukan “kekacauan yang hanya dialami separuh populasi”.

Meskipun kesenjangan antara pihak yang menang dan yang kalah dalam globalisasi, seperti meningkatnya kesenjangan sosio-ekonomi, merupakan pendorong utama perolehan suara, dinamika geotemporal yang sangat berbeda—akibat lain dari globalisasi—juga patut mendapat perhatian khusus. memahami. Di tingkat nasional, empat negara di Inggris (Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales) mempunyai pengalaman berbeda dalam hal migrasi, kedaulatan politik, dan kebijakan ekonomi; dan arah dukungan mereka terhadap Leave dan Remain juga berbeda. St. Andrews, sebuah kota tepi pantai di Skotlandia (yang memilih untuk Tetap), misalnya, adalah tempat di mana “kehidupan sehari-hari selama beberapa dekade telah ditentukan oleh kosmopolitanisme,” yang telah menjadi “landasan temporalitas masa lalu milik orang-orang Skotlandia di Eropa,” namun kini ditanggihkan oleh pemungutan suara Brexit di Inggris. Pemungutan suara untuk Keluar di kota Margate (di Inggris) dimungkinkan oleh keterikatan penduduknya, bahkan mereka yang secara ekonomi mampu, terhadap sejarah kelas pekerja (termasuk kebanggaan atas partisipasi nenek moyang mereka dalam

Perang Dunia II dan perang lokal). sejarah manufaktur) yang dianggap terpinggirkan dari budaya politik arus utama. Dinamika geotemporal yang kompleks juga terlihat jelas di London: walaupun kota global ini sebagian besar mendukung Remain, kelas pekerja “tersisih” di London Timur memilih sebaliknya sebagai cara untuk mengekspresikan kemarahan mereka terhadap kemiskinan dan ketidaktaatan politik selama beberapa dekade.

Selama kampanye Cuti, istilah-istilah seperti CANZUK dan Anglosfer semakin populer. Meskipun CANZUK mengacu pada persatuan Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris, Anglosphere adalah konsepsi yang lebih luas yang menyatukan negara-negara berbahasa Inggris di seluruh dunia. Ide-ide tersebut dapat ditelusuri kembali ke Greater Britain (1868) karya Charles Dilke, di mana ia mencirikan Inggris sebagai pusat sistem dunia yang terikat oleh identitas yang sama—terutama ras (misalnya, ras Anglo-Saxon), tetapi juga budaya dan linguistik—atau apa yang Penelope Edmonds (2009) sebut sebagai “keistimewaan Anglo-Saxon trans-imperial”. Meskipun retorika tersebut tampaknya efektif untuk memobilisasi kelompok masyarakat Inggris yang cukup besar dengan menanamkan harapan dan pembaruan (yang salah), hal ini juga memperkuat populisme, nasionalisme etnis, rasisme, prasangka, dan homofobia dalam masyarakat, mengingat keterikatan mereka yang mendalam dengan politisasi. tentang “budaya” dan identitas nasional.

Namun pada kenyataannya, menggunakan imajinasi era Victoria akhir yang berpusat pada integrasi Inggris dan koloni pemukim kulit putihnya tidak akan pernah menjadi alternatif yang layak bagi integrasi Eropa, terutama dalam hal perdagangan dan keamanan. Meskipun bertujuan untuk memulihkan pengaruh globalnya di dunia dan pandangan globalisnya, inti dari Global Britain sebenarnya adalah perjanjian bilateral (dengan masing-masing negara) untuk mengkompensasi hilangnya hubungan dengan UE. Di dunia di mana ancaman Rusia dan kekuatan Tiongkok semakin meningkat, Inggris mungkin terpaksa lebih berkonsentrasi di Eropa. Melihat Global Britain sebagai narasi dalam negeri dan bukan narasi internasional, Oliver Turner (2019) berpendapat bahwa narasi tersebut merupakan komponen kebijakan luar negeri Inggris yang bermasalah, mengingat pandangan dunianya yang bersifat regresif. Bertentangan dengan kepentingan para pendukung Brexit dan aspirasi mereka, kemerosotan Inggris pasca-kekaisaran kemungkinan akan terus berlanjut karena hilangnya keuntungan struktural yang diperoleh perekonomian Eropa.

AS: MAGA dan Amerika Pertama

Sejak tahun 1970-an, kekuatan hegemonik Amerika telah diperebutkan atau setidaknya mendapat tantangan karena berbagai kondisi internasional dan dalam negeri, termasuk Perang Vietnam, hilangnya lapangan kerja di sektor manufaktur secara besar-besaran, defisit perdagangan yang besar (terutama dengan Tiongkok), dan krisis global tahun 2008. Krisis Keuangan, dan bahkan pandemi COVID-19 yang terjadi baru-baru ini. Misalnya saja hilangnya lapangan kerja dan perdagangan internasional, dua topik hangat yang saling berhubungan baik dalam globalisasi maupun pemilu tahun 2016. Sejak awal tahun 1980-an hingga tahun 2015, pangsa manufaktur global Amerika Serikat menurun dari hampir 30 persen menjadi 18,6 persen, dan lapangan pekerjaan di bidang manufaktur turun dari hampir 19 juta menjadi lebih dari 12 juta.

Selama pemilu tahun 2016, meningkatnya kesenjangan dan polarisasi sosio-ekonomi, yang merupakan konsekuensi dari globalisasi neoliberal, merupakan faktor yang berkontribusi nyata terhadap kemenangan Donald Trump. Misalnya, Rust Belt, wilayah yang mengalami penurunan industri sejak tahun 1980an dan memainkan peran yang tidak terduga dalam kemenangan Trump, menjadi salah satu sasaran retorika nostalgianya. Banyak pemilih di sana memberikan tanggapan keras terhadap pesan populernya “Make America Great Again” (MAGA), yang mana ia berjanji untuk mengembalikan lapangan pekerjaan di bidang manufaktur dengan menstimulasi perekonomian melalui deregulasi, perjanjian perdagangan baru, dan pembalikan banyak kebijakan energi Amerika. Obama dan pendahulunya lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa pekerjaan telah hilang secara permanen karena teknologi, sifat afektif dari retorika MAGA sangat menarik mengingat keinginan para pemilih akan masa lalu yang menganggap mereka berharga bagi industri, budaya, dan politik negara tersebut; Meskipun keberhasilan Trump sering dikaitkan dengan dukungan dari mereka yang “tertinggal” secara ekonomi, Diana C. Mutz berpendapat pentingnya “ancaman status” yang dirasakan oleh berkurangnya proporsi orang Amerika yang secara tradisional berstatus tinggi (misalnya, orang kulit putih, Kristen, dan laki-laki) dan oleh mereka yang menganggap dominasi global Amerika Serikat terancam dalam konteks meningkatnya keberagaman ras dalam negeri dan persaingan ekonomi global. Dalam kata-katanya, “Pemilu tahun 2016 merupakan akibat dari kekhawatiran terhadap status kelompok dominan di masa depan, bukan karena diabaikan di masa lalu”. Meskipun perasaan kehilangan (misalnya status seseorang dalam hierarki domestik atau internasional) bukanlah hal yang baru, perasaan ini sangat dipolitisasi selama kampanye presiden tahun 2016.

Melihat hilangnya keaslian (yaitu, ke-Amerika-an dan kebangsaan yang “sejati”) sebagai inti dari kemunduran Amerika Serikat, para pendukung Trump secara khusus mengusulkan perlunya kembali ke masa lalu di mana hierarki status atau tatanan sosial yang “ideal” dibangun di atas dasar kemerosotan Amerika Serikat. Kekristenan dan ras mendominasi. Meskipun ada variasi dalam kerangka mereka tentang bagaimana agama dan ras bersinggungan—misalnya dengan menggunakan bahasa supremasi kulit putih atau buta warna ketika berbicara tentang idealisme Amerika dan sejarah Amerika—sebagai penanda kepemilikan dan kekuasaan Amerika, Ruth Braunstein (2021) berpendapat bahwa berbagai gerakan sayap kanan terikat oleh kepatuhan mereka pada visi nostalgia Amerika Serikat sebagai negara Kristen. Meskipun kekhususan temporal dari zaman keemasan tampak samar-samar dalam narasi-narasi ini, masa depan relasionalnya jelas. Artinya, ini adalah zaman, atau ruang waktu, di mana laki-laki Kristen heteroseksual, berkulit putih, memonopoli kekuasaan sosial dan politik, dan di mana kebajikan moral dan nilai-nilai agama yang kini hilang yang penting bagi “keAmerikaan yang autentik” telah hilang. ” harus dihidupkan kembali dan direbut kembali. Artikulasi keAmerikaan yang tunggal dan esensial melalui masa lalu yang terdistorsi menjadi dasar bagi Trump untuk memobilisasi dan mengkonsolidasikan kekuasaan melawan lawan-lawan politiknya.

Seperti yang ditunjukkan oleh Michael Mayne, nasionalisme kulit putih dan retorika nostalgia memiliki tiga elemen doxa (yaitu, kebenaran yang terbukti dengan sendirinya):

keaslian, asal usul, dan restorasi. Namun, untuk melegitimasi kembalinya ke rumah khayalan di mana “masa kini telah merosot menjadi perpaduan kosmopolitan”, komponen retorik lebih lanjut juga sangat diperlukan (2018: 85). Melalui pidatonya selama ini Trump telah menyusun daftar panjang musuh dan penghinaan historis, mulai dari elit demokrasi dan media hingga Muslim, Meksiko, dan Tiongkok. Membuat klaim yang mengorbankan diri sendiri menciptakan “rantai biner yang setara” antara kita sebagai patriot, setia dan otentik, versus mereka sebagai pengkhianat, tidak beriman dan penyusup, dan memperkuat perpecahan dalam masyarakat pluralis, yang keduanya merupakan inti dari wacana popularistis. Lebih penting lagi, seperti yang ditunjukkan oleh Omar Al-Ghazzi, “memproyeksikan korban ke dalam narasi meta-historis tentang konflik antara korban dan penindas memungkinkan kita membayangkan lintasan komunitas dalam garis waktu sejarah yang 'zigzag', di mana masa kini digambarkan sebagai sebuah titik persimpangan. mirip dengan saat-saat yang menentukan di masa lalu”. Misalnya, dengan menempatkan Amerika Serikat, seperti Eropa, sebagai negara yang kalah dalam gelombang imigrasi (non-kulit putih), maka masa depannya akan menjadi krisis eksistensial bagi kejayaan sejarahnya, identitasnya, dan bahkan peradabannya. Seperti yang dikatakan Trump (2017), “Pertanyaan mendasar di zaman kita adalah apakah negara-negara Barat mempunyai keinginan untuk bertahan.” Menghadapi pilihan tegas antara “kemerosotan tragis” dan MAGA, Trump digambarkan sebagai pemimpin, pahlawan, dan perwujudan para pendukungnya (sebagai “rakyat Amerika” yang dibajak) yang ditakdirkan untuk mengarahkan struktur zigzag (pemerintahan). emosi dan ingatan yang diinginkan) ke arah dan ruang-waktu yang benar.

Persimpangan antara identitas dan nostalgia juga berlaku dalam kebijakan luar negeri AS. Pada tingkat diskursif, *America First* merupakan campuran dari eksepsionalisme Amerika dan amnesia sejarah. Retorika MAGA didukung oleh konstruksi sejarah—bukan hanya oleh Trump—yang menggambarkan Amerika Serikat sebagai “Kota di Atas Bukit” atau negara yang “unik”, unggul, tunggal, dan “disukai Tuhan”, yang merupakan bagian integral dari strategi besarnya di dunia pasca-Perang Dingin. Namun, dalam “kesadaran sejarah yang bercabang” ini, hanya ada sedikit pengakuan mengenai sejarah kelam yang terkait dengannya. Sebagai kode untuk nativisme dan nasionalisme kulit putih, menurut Sarah Churchwell (2018), *America First*, yang berulang kali digunakan Trump dalam pidato pengukuhanannya, adalah sebuah ungkapan dan cita-cita yang secara historis terkait dengan warisan brutal perbudakan, xenofobia, dan isolasiisme di negara tersebut, dicontohkan dengan kemunculan awalnya pada tahun 1884 sebagai slogan untuk berperang melawan Inggris dan Komite Amerika Pertama yang dibentuk pada tahun 1940 oleh koalisi Amerika menentang masuknya AS ke dalam Perang Dunia II. Pada tingkat praktis, kemunduran pemerintahan Trump dari multilateralisme—yang dicontohkan oleh perannya dalam mengikis Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perjanjian Paris—tidak hanya berkontribusi dan memperkuat berbagai krisis nyata yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. dunia saat ini; hal ini juga membahayakan sistem “tatanan dunia liberal” di masa depan.

Baik sentimen antiglobalisasi (termasuk anti-imigrasi) maupun proteksionisme ekonomi bukanlah hal baru dalam sejarah Amerika Serikat; namun kemenangan baru-baru ini dalam politik Amerika (dan di Inggris serta Tiongkok, seperti yang akan dibahas) dalam hubungan antara kebijakan identitas dan nostalgia yang disengaja, atau manipulasi politik dan eksploitasi nostalgia kolektif, merupakan tren yang berbahaya. Persimpangan antara nostalgia dan popularitasisme tidak hanya membatasi kemungkinan untuk mengeksplorasi dan mempromosikan jeremia Amerika yang alternatif dan progresif tentang masa lalu (misalnya, dicontohkan oleh pemikiran Abraham Lincoln dan Frederick Douglass)—tentu saja bukan tanpa paradoks. Hal ini juga salah mengarahkan perhatian masyarakat dan tindakan-tindakan politik dari masa sekarang, yang diganggu oleh kesenjangan sosio-ekonomi yang semakin intensif, menuju pihak-pihak lain yang dikambinghitamkan (misalnya, kelompok minoritas ras, etnik, agama, dan seksual serta gender) atas nama patriotisme dan “kemerdekaan besar” masa depan negara.

Tiongkok: Jalur Sutra dan Impian Tiongkok

Tujuan dari retorika resmi mengenai Impian Peremajaan Besar Tiongkok, yang diprakarsai oleh pemerintahan Partai Komunis Tiongkok (PKT) setelah akses kepemimpinan Xi Jinping pada tahun 2012, adalah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara tersebut yang pesat dan memungkinkan negara tersebut untuk bergabung dengan Tiongkok atau bahkan melampaui, negara-negara kaya di dunia. Pada tahun berikutnya Tiongkok mengumumkan Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), sebuah strategi pembangunan infrastruktur global dengan dua komponen: Inisiatif Jalur Sutra Maritim dan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra. Berangkat dari sikap rendah hati yang diterapkan para pendahulunya sejak kebijakan Pintu Terbuka Tiongkok (diperkenalkan pada tahun 1978), penerapan kebijakan luar negeri yang secara eksplisit berwawasan ke luar oleh Xi juga mencerminkan semakin besarnya kepercayaan Partai Komunis Tiongkok terhadap urusan global. Pada tahun 2008, Tiongkok, yang sebagian besar kebal terhadap dampak Krisis Keuangan Global, melampaui Jepang dengan jumlah utang AS sebesar \$600 miliar (BBC, 2010). Pada tahun 2011, defisit perdagangan AS dengan Tiongkok mencapai angka tertinggi sepanjang masa sebesar \$295,5 miliar (CFR, n.d.). Dalam Laporan Pembangunan Dunia tahun 2012, Bank Dunia (2011) untuk pertama kalinya menempatkan Tiongkok sebagai “negara berpendapatan menengah atas” (UMIC); hanya satu dekade sebelumnya, negara ini masih merupakan negara berpenghasilan rendah. Kenaikan spektakuler ini, tidak kalah dengan penurunan tragis sebelumnya, memerlukan artikulasi (ulang) baik bagi khalayak domestik maupun global.

Namun, narasi Jalur Sutra kuno bukanlah sesuatu yang baru atau statis. Masyarakat Barat sudah familiar dengan istilah ini, misalnya melalui karya Ferdinand von Richthofen, seorang ahli geografi dan geologi Jerman yang pertama kali mengusulkan istilah ini pada tahun 1870-an untuk merujuk pada konektivitas Timur-Barat yang berasal dari Dinasti Han Tiongkok, sebagai serta Jalan Sutra karya Steven Hedin (1938). Dengan tujuan mengurangi permusuhan, konsep ini juga dianut, dan diperluas, oleh Jepang pasca-Perang Dunia II untuk menekankan manfaat bersama dari pertukaran dan dialog damai selama berabad-abad antara peradaban Jepang dan budaya serta masyarakat lain, dan kemudian oleh UNESCO. atas inisiatif

multilateral Jalur Sutra: Jalan Dialog yang telah berlangsung selama satu dekade di akhir Perang Dingin (Winter, 2019, 2021). Melihat Jalur Sutra sebagai salah satu konsep geokultural yang paling menarik di era modern, Tim Winter (2021) berpendapat bahwa konsep strategis ini memungkinkan Tiongkok menampilkan dirinya sebagai negara peradaban guna membangun konektivitas regional dan kontinental melalui BRI sebagai cara baru. membayangkan masa lalu dan masa depan baru yang akan datang.

Dalam konteks BRI, Jalur Sutra—melalui berbagai aktivitas seperti pameran museum, pembuatan film, pertunjukan seni, dan pembuatan warisan budaya—telah menjadi konsep yang sangat elastis untuk menceritakan kisah perdagangan, pertukaran, kerja sama, persahabatan, kemakmuran, dan kosmopolitanisme. Dalam narasi-narasi ini Dinasti Tang (618–906 M), yang perbatasannya meluas hingga ke Korea dan Asia Tengah, digambarkan sebagai titik tertinggi peradaban Tiongkok, model pemerintahan kekaisaran, dan zaman keemasan budaya kosmopolitan. Dengan menggunakan computer-generated imagery (CGI), sebuah film dokumenter berjudul “Maritime Silk Road” menciptakan nostalgia sejarah untuk membantu memperkenalkan BRI ke negara-negara Asia Tenggara dan untuk menanamkan rasa nostalgia diaspora bagi orang Tionghoa perantauan. Pada tahun 2020 warisan Zheng He, seorang laksamana Muslim Tiongkok dan navigator Dinasti Ming (abad kelima belas), dipromosikan oleh media yang dikelola pemerintah sebagai simbol hubungan harmonis Tiongkok dengan negara-negara Samudra Hindia melalui hubungan erat antara Taicang (sebuah kota di Cina) dan kota-kota di Malaysia, Indonesia, dan Kenya. Ketidakstabilan—yang juga tercermin dalam kejayaan dan amnesia yang dipilih—antara waktu dan ruang dalam nostalgia berfungsi sebagai kendaraan sekaligus demonstrasi kekuatan geokultural Tiongkok: yaitu, kapasitasnya “untuk menulis dan memetakan sejarah geokultural, mengarahkan peristiwa, tempat, dan orang-orang yang mana.” dirangkai menjadi narasi yang bermanfaat secara strategis”. Menurut Winter (2021), kekuasaan tersebut tidak bersifat teritorial, namun bersifat nodal, yang menyatukan banyak lokasi, peristiwa, dan aktor di sepanjang rute tertentu melintasi ruang dan waktu.

Meromantisasi Jalur Sutra sebagai kisah “peradaban kita yang hilang” dan globalisasi pramodern merupakan bagian integral dari narasi Tiongkok tentang “impian” dan posisinya di dunia. Kisah ini mengungkapkan nostalgia masa ketika universalisme—dalam bentuk kemanusiaan yang sama, konektivitas di dalam dan di luar Asia, dan “komunitas global”—adalah sebuah norma (Thorsten, 2005). Mengingat kemegahan masa lalu sebagai preseden, hal ini menaturalisasikan dan melegitimasi ekspansi geo-ekonomi dan geopolitik Tiongkok dan “kembali” ke pusat perdagangan global dan konektivitas multisektor sebagai bentuk kesinambungan sejarah. Eksepsionalisme Tiongkok yang meluas—sebuah peradaban milenial yang secara historis digambarkan sebagai peradaban global dan “pada dasarnya damai” meskipun memiliki sejarah kekaisaran yang penuh kekerasan—juga membantu menampilkan Tiongkok sebagai sebuah alternatif yang unik dan, tentu saja, lebih baik dibandingkan tatanan global yang dipimpin oleh AS. Sehubungan dengan hal ini, membingkai keterlibatannya saat ini dengan dunia (khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin) dalam bahasa yang terbuka dan inklusif—misalnya, “[BRI] berasal dari Tiongkok, namun menjadi milik dunia.”; dan, “Kita

dapat memulai jalan menuju persahabatan, pembangunan bersama, perdamaian, harmoni, dan masa depan yang lebih baik”—memungkinkan imajinasi untuk melampaui globalisasi yang dipimpin Barat dan batasan globalisasi di masa lalu dan masa kini (dikutip dalam Benabdallah, 2021). Terlepas dari retorikanya yang bersifat globalis dan dianggap bebas konflik, BRI di lapangan—yang melibatkan hubungan bilateral dengan banyak negara yang lebih lemah—dipenuhi dengan ketegangan dan tantangan.

Meskipun propaganda negara Impian Tiongkok juga ditujukan pada politik dalam negeri, inti dan pesan-pesan inti dari mimpi tersebut diartikulasikan dengan cara yang agak berbeda dibandingkan dengan propaganda internasional. Trauma yang dipilih—khususnya, “abad penghinaan” Tiongkok yang dimulai dengan Perang Candu dengan Inggris pada akhir abad kesembilan belas—menekankan sejarah korban mereka di tangan “kekuatan asing,” yang menimbulkan kecemasan patriotik dan harapan bagi masa depan bangsa. Selain itu, mempromosikan kombinasi impian individu (untuk kehidupan yang baik) dan impian kolektif (untuk negara yang kaya dan berkuasa di dunia) akan menumbuhkan hubungan antara “realisasi diri” individu dan kepemilikan nasional mereka, dan antara rasa nasionalisme, sentimen dan dukungan terhadap CPP. Dalam hal ini, Impian Peremajaan Besar-besaran Tiongkok juga telah menjadi alat untuk membangun bangsa dan melegitimasi kekuatan Xi dan PKT. Dalam pidato Xi (2021) pada peringatan seratus tahun Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2021, misalnya, kejayaan Impian Tiongkok dibicarakan secara bergantian dengan kejayaan Partai Komunis Tiongkok. Sementara itu, retorika memberikan kerangka kognitif dan emosional di mana elit politik dan warga negara biasa dapat menafsirkan dunia dan menciptakan rasa persatuan yang diperlukan untuk melanjutkan keterlibatan dengan kapitalisme global dan kekuasaan Partai Komunis Tiongkok. Meskipun sulit untuk menilai bagaimana berbagai kelompok masyarakat di Tiongkok menanggapi retorika tersebut, William A. Callahan (2017) berpendapat bahwa hal ini tentu saja menguntungkan mereka yang mengikuti jalan kolektif menuju mimpi, dan juga mengetahui apa yang tidak berani mereka lakukan. untuk bermimpi (misalnya, demokrasi).

3.3 KETERANGAN PENUTUP

Meskipun ada perbedaan dalam artikulasinya, nostalgia yang disengaja dari kasus-kasus yang dibahas memiliki ciri-ciri yang sama. Pertama, nostalgia—dengan orientasi waktu yang hibrid, multiarah, dan afektif—memungkinkan para pemimpin politik di masing-masing negara untuk bergerak bolak-balik dalam waktu untuk membawa kembali masa lalu yang “kejayaan”, bahkan tidak harus, demi kepentingan masa lalu. saat ini, melainkan janji akan masa depan yang bisa dibayangkan. Dalam masa ketidakpastian, duduk di persimpangan waktu, ruang, dan pengaruh juga memungkinkan konstruksi (re)konstruksi narasi dan manipulasi politik yang selektif dan cair untuk membentuk, bersaing, dan/atau mengkonsolidasikan posisi mereka di dunia. Kedua, politik identitas—mendefinisikan Diri Sendiri versus Yang Lain—telah menjadi alat penting untuk menciptakan lintasan kepemilikan nasional yang dikotomis atau oposisional dan untuk menceritakan bangsa pada titik balik globalisasi. Gagasan tentang titik waktu bersejarah di mana masa depan bangsa hanya bisa

berupa kebangkitan (“zaman keemasan”) atau kejatuhan (“penghinaan”) merupakan hal yang menonjol dalam ketiga kasus tersebut, sehingga mendorong dukungan publik terhadap para pemimpin agar terhindar dari ancaman. perubahan yang dramatis tentunya. Ketiga, meskipun perdagangan merupakan bagian integral dari retorika nostalgia dalam ketiga kasus tersebut, politik budaya juga terlihat jelas. Kebudayaan, menurut Jennifer Robertson (1997, mengutip Comaroff dan Comaroff 1992), dapat dipahami sebagai “suatu keragaman ruang-waktu 'di mana manusia membangun dan mewakili diri mereka sendiri dan orang lain, dan karenanya masyarakat dan sejarah mereka’” (J. Robertson , 1997: 98). Kualitas yang tidak menentu ini ditegaskan dalam argumen Roland Robertson tentang pentingnya aspek ekonomi dan budaya dari nostalgia, di mana “perubahan global yang sangat lancar telah mengundang [. . .] nostalgia akan bentuk-bentuk 'tatanan dunia' yang aman, serta semacam nostalgia proyektif akan dunia sebagai rumah” (R. Robertson, 1992: 162).

Sementara itu, simultanitas dan paradoks dari artikulasi dan kesadaran mereka yang berpusat pada negara atau nasionalis mengenai dunia dalam retorika nostalgia patut mendapat perhatian yang lebih bernuansa, mengingat dinamika geotemporal yang berbeda di dalam dan di antara negara-negara tersebut dalam hal globalisasi (tidak terbatas pada globalisasi kontemporer) dan dampaknya. Selain melihat nostalgia yang disengaja sebagai respons terhadap ketegangan yang terus berlanjut di antara negara-bangsa, warga negara, hubungan internasional, dan kemanusiaan sebagai akibat dari percepatan kapitalisme global, hubungan yang saling bertentangan dan saling konstitutif antara globalisasi dan nostalgia juga penting untuk dipertimbangkan. Meskipun Amerika Serikat dan Inggris—kedua pemimpin dan pendukung globalisasi ekonomi neoliberal sejak tahun 1978—mengundurkan diri dari sistem integrasi ekonomi dan politik global, negara-negara tersebut merupakan “kerajaan non-teritorial”. dan aspirasi Inggris untuk melakukan reteritorialisasi berdasarkan “lingkaran kekaisaran dunia” milik Inggris juga hidup berdampingan. Sebaliknya, sebagai peserta yang terlambat atau pendatang baru dalam globalisasi, Tiongkok kini menjadi pendukung globalisasi ekonomi—seperti yang diilustrasikan dalam pidato Xi Jinping (2017) di Forum Ekonomi Dunia di Davos—dan penjelajah globalisasi alternatif yang ekspansionis. Meskipun Amerika Serikat pasti berharap masa kininya akan menjadi masa depan Tiongkok—yakni, berintegrasi ke dalam tatanan global yang dipimpin Barat—ketika mendukung partisipasi Barat dalam WTO dua dekade lalu (dengan bantuan tegas dari pemerintahan Clinton), namun perkembangan Tiongkok telah menantang status quo temporal dan spasial (termasuk tatanan geotemporal) globalisasi kontemporer. Namun, pada tingkat global, perubahan-perubahan yang paralel namun bersifat kontraktif ini tampak konsisten dengan konsepsi Brenner (1999) mengenai globalisasi sebagai proses deteritorialisasi dan reteritorialisasi yang bersifat multiskalar dan berkelanjutan. Dalam hal ini, masa depan globalisasi bisa sangat berbeda dan penuh konflik.

BAB 4

MOBILITAS DAN GLOBALISASI

4.1 KAITAN MOBILITAS DAN GLOBALISASI

Mobilitas, yang secara empiris dipandang sebagai pergerakan manusia, modal, teknologi, institusi, gagasan, sistem ideologi, dan pengetahuan, merupakan wajah globalisasi yang paling terlihat. Mobilitas merupakan hal penting dalam proses globalisasi yang menandai kesinambungan awet muda. Meskipun beberapa penulis mendefinisikan fase globalisasi saat ini (abad ke-20 dan ke-21) sebagai “zaman migrasi”, migrasi manusia dalam sejarah—baik yang disengaja maupun tidak disengaja—juga menjadi ciri fase-fase sejarah sebelumnya. Pergerakan buruh yang bebas dalam fase globalisasi saat ini menyembunyikan bentuk-bentuk perbudakan dan perbudakan yang masih menjadi ciri globalisasi abad ke-21. Kajian terhadap mobilitas manusia pada kuartal pertama abad ke-21 akan menggambarkan kecenderungan dunia yang tanpa batas dan berbatasan yang bersifat jungkat-jungkit, yang mengungkap kontradiksi-kontradiksi globalisasi yang berimplikasi pada mobilitas manusia dan penyebaran atau mobilitas. ilmu pengetahuan dan teknologi. Bab ini mengambil perspektif interdisipliner untuk mengkaji interseksionalitas mobilitas dan globalisasi.

Kaitan antara mobilitas dan globalisasi, dua konsep utama yang mencakup beberapa ilmu sosial, dapat dipahami dalam beberapa cara. Kajian mengenai mobilitas dan globalisasi menggabungkan pendekatan geografis, sosiologis, politik-ekonomi, dan sejarah. Istilah-istilah seperti mobilitas dan sirkularitas telah sering digunakan dalam diskusi globalisasi dan sejarah global belakangan ini. Judul-judul seperti sejarah yang terhubung, diikuti oleh sosiologi yang terhubung, telah mulai beredar belakangan ini. Peralihan ke arah mobilitas dan munculnya paradigma mobilitas terjadi pada dekade pertama abad kedua puluh satu.

Globalisasi dan mobilitas merupakan istilah yang polisemi. Berbagai pendekatan terhadap globalisasi dipersempit menjadi dua. Dalam satu pendekatan, yang sering dianut oleh para jurnalis, sejumlah ekonom, dan politisi, globalisasi dipandang sebagai label baru bagi kapitalisme neoliberal. Dalam pandangan ini, globalisasi memungkinkan terjadinya mobilitas manusia, modal, dan teknologi. Namun proses ini bukannya tanpa kontradiksi. Meskipun para pendukung globalisasi neoliberal memuji mobilitas kelas profesional, mobilitas kelas pekerja merupakan sumber kekhawatiran mereka. Mereka memandang mobilitas modal yang tidak dibatasi sebagai suatu anugerah karena hal tersebut memicu globalisasi, namun mobilitas tenaga kerja yang tidak dibatasi dapat membahayakan stabilitas politik, sehingga menimbulkan xenofobia.

Pandangan sosiologi globalisasi yang lebih luas, holistik, dan berakar pada sejarah memandang mobilitas tenaga kerja, modal, teknologi, gagasan, agama, sistem ideologi, pengetahuan, gaya hidup, dan produk budaya sebagai proses alami yang dibatasi atau dimoderasi oleh dunia. kebangkitan negara dan ideologi nasionalisme ekstrim. Pada bab ini, kami mengadopsi pandangan sosiologis mengenai globalisasi dan mempertimbangkan

mobilitas dalam pengertian yang lebih luas yang mencakup artefak dan gagasan, namun mobilitas manusia tetap menjadi komponen utamanya.

Mobilitas manusia dapat dilihat dalam tiga fase besar. Selama ribuan tahun dalam mencari makan dan hidup sebagai penggembala, mobilitas manusia adalah hal yang lumrah, karena kehidupan tidak terbebani oleh batas-batas negara atau fungsi organisasi yang setara. Secara historis, migrasi merupakan kondisi normal. Orang-orang bermigrasi dalam jumlah besar dari Afrika ke seluruh dunia. Migran Asia menghuni Arktik dan mencapai Amerika Utara jauh sebelum pergeseran benua. Sejak berakhirnya masyarakat penggembala dan munculnya masyarakat agraris, sebagian besar masyarakat tidak berpindah-pindah, namun bukannya tidak berpindah-pindah, karena mobilitas terbatas pada migrasi musiman atau jarak pendek. Dengan munculnya modernitas yang dipicu oleh industrialisasi, mobilitas menjadi hal yang lumrah. Mobilitas, dalam pengertian ini, dapat dilihat sebagai penanda utama modernitas. “Hipotesis mobilitas,” yang dikemukakan oleh Wilber Zelinsky (1971) dan didukung oleh Charles Tilly (1978), berpendapat bahwa keharusan kapitalisme menciptakan tenaga kerja bebas berpindah-pindah melalui proses proletarisasi. Pandangan yang menghubungkan mobilitas penduduk dengan industrialisasi telah mendapat kajian kritis.

Perdebatan ini, sampai batas tertentu, bergantung pada definisi dan skala migrasi. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain bukanlah hal yang baru. Secara historis, terdapat aliran manusia secara alami, misalnya, pada saat panen, yang saat ini dianggap sebagai migrasi musiman. Memang benar, orang-orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, secara individu atau kelompok, demi kehidupan yang lebih baik. Emigrasi ke Dunia Baru, migrasi dari pedesaan ke perkotaan, dan perpindahan tentara dan pelaut sudah ada sebelum industrialisasi. Setidaknya secara teori, masyarakat dapat bergerak lebih bebas melintasi batas-batas geografis hingga ditemukannya paspor dan monopoli kendali atas sarana pergerakan oleh negara pada abad kesembilan belas. Di Eropa hingga Perang Dunia I, pergerakan orang berlangsung cukup bebas. Selama dan setelah Perang Dunia I, seiring dengan meluasnya perjalanan massal dan penjagaan perbatasan menjadi lebih ketat, peraturan dan pemantauan pergerakan manusia oleh negara menjadi lebih ditentukan. Pada awal abad kedua puluh satu, warga dunia melakukan perjalanan sejauh 23 miliar kilometer; pada tahun 2050, angka tersebut akan meningkat menjadi 105 miliar.

4.2 MOBILITY DAN GLOBALITY

Dalam kondisi global saat ini, mobilitas telah menjadi salah satu ciri utama globalitas. Mobilitas teknologi, alat, dan ide memiliki sejarah yang panjang. Dengan kemajuan revolusioner di bidang transportasi dan komunikasi, banyak orang di seluruh dunia yang memiliki mobilitas tinggi. Bagi kelompok masyarakat tertentu, batasan geografis sudah tidak lagi penting, dan masyarakat serta negara menjadi lebih mudah ditembus. Meskipun terdapat dimensi kelas dalam mobilitas, karena hanya kelas menengah dan atas yang dapat melakukan perjalanan, semakin banyak kelas pekerja yang juga melakukan perjalanan melintasi batas negara dan dalam masyarakat masing-masing untuk mencari penghidupan. Oleh karena itu, mobilitas dan migrasi menjadi sama artinya.

Pandemi COVID-19, yang melemahkan globalisasi dan mobilitas, tanpa disadari menyingkapkan eratnya hubungan antara keduanya. Namun, jika globalisasi didefinisikan secara sosiologis, dengan fokus pada pertemuan historis antar peradaban, masyarakat, dan budaya, maka mobilitas menjadi ciri khas globalisasi. Pertimbangkan definisi globalisasi oleh Roland Robertson (1992), yang berpendapat bahwa globalisasi berarti dunia menjadi satu tempat yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran akan menyusutnya dunia. Dalam proses ini, mobilitas merupakan penyebab dan konsekuensi dari globalisasi. John Urry (2000), antara lain, membingkai ulang masyarakat modern sebagai masyarakat yang mobile, menekankan pada mobilitas tubuh jasmani, yaitu manusia, tetapi juga cara hidup, yaitu gagasan Urry (2002). Mobilitas jasmani, yang merupakan ciri khas masyarakat global modern, terganggu oleh imobilitas yang disebabkan oleh pandemi virus corona pada tahun 2020–21. Bahkan tanpa keadaan darurat kesehatan masyarakat yang besar, kita tidak dapat mengabaikan kontradiksi-kontradiksi dunia modern (sekitar dekade kedua abad kedua puluh satu): hadirnya mobilitas dan sifat dunia yang semakin berbatasan dan berpagar, yang berjalan beriringan. sejalan dengan kemajuan globalisasi.

Mobilitas, yang secara empiris dipandang sebagai pergerakan manusia, modal, teknologi, institusi, gagasan, sistem ideologi, dan pengetahuan, merupakan wajah globalisasi yang paling terlihat. Mobilitas tidak hanya penting dalam proses globalisasi, mengingat kedalaman sejarahnya, namun juga membantu menandai perbedaan dalam berbagai fase sejarah globalisasi. Peningkatan mobilitas telah menjadi ciri utama globalisasi kontemporer. Pada akhir abad kedua puluh, hampir 2,6 miliar orang melakukan perjalanan dengan maskapai penerbangan dunia setiap tahunnya. Pada tahun 2019, setahun sebelum merebaknya COVID-19, kompilasi awal statistik global tahunan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional menyebutkan jumlah total penumpang yang diangkut dalam layanan berjadwal mencapai 4,5 miliar (ICAO, 2019). Asia dan Pasifik menyumbang 34,7 persen lalu lintas, sedangkan Eropa dan Amerika Utara masing-masing menyumbang 26,8 persen dan 22,2 persen lalu lintas.

Peningkatan perjalanan udara merupakan indikator yang baik mengenai mobilitas intra dan internasional. Para pebisnis, pekerja, pelajar, dan orang-orang yang bepergian bolak-balik untuk bertemu anggota keluarga di berbagai belahan dunia merupakan sebagian besar penumpang udara. Mobilitas pelajar telah menjadi tren yang menarik dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak reformasi ekonomi di Tiongkok. Peningkatan jumlah wisatawan merupakan aspek lain dari peningkatan mobilitas. Pada tahun 1896, penulis Mark Twain mendarat di Bombay (sekarang berganti nama menjadi Mumbai) dan menginap di Watson's, hotel terkemuka di Bombay pada saat itu. Persinggahannya merupakan bagian dari perjalanan globalnya yang membawanya ke Eropa, India, dan Australia. Pariwisata dapat ditelusuri kembali ke abad ketujuh belas dan kedelapan belas, ketika pariwisata masih merupakan hak istimewa yang terbatas pada para bangsawan, ketika penginapan dan hotel didirikan di berbagai kota di Eropa. Ketika Revolusi Industri dimulai, pariwisata dimulai pada abad kesembilan belas. Agen perjalanan pertama, Thomas Cook & Son, berdiri sejak abad kesembilan belas, menawarkan tamasya dan liburan. Pariwisata berkembang pesat pada abad kedua puluh dengan perluasan jalur kereta api, munculnya mobil, dan kemudian pesawat

terbang. Kemampuan untuk bepergian, khususnya untuk alasan non-kerja, hanya tersedia bagi segelintir elit dan merupakan tanda status. Frekuensi perjalanan ke luar negeri mendorong Ohmae mendeklarasikan gagasan “dunia tanpa batas” (Ohmae, 1989). Pada tahun 1988, hampir 90 persen orang Jepang yang berbulan madu pergi ke luar negeri.

Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) memperkirakan bahwa secara internasional, hanya terdapat 25 juta kunjungan wisatawan internasional pada tahun 1950. Enam puluh delapan tahun kemudian, jumlah ini meningkat menjadi 1,4 miliar kunjungan internasional per tahun. Ini merupakan peningkatan lima puluh enam kali lipat. Eropa menyumbang lebih dari 51 persen dari seluruh wisatawan pada tahun 2018 (Our World in Data, n.d.). Kontribusi langsung pariwisata dan perjalanan terhadap PDB secara global berjumlah sekitar US\$9,1 triliun pada tahun 2019, dan turun menjadi US\$4,7 triliun pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19 (Statista, 2021).

Cikal bakal pariwisata adalah ziarah di mana orang-orang yang dimotivasi oleh keyakinan agama melakukan kunjungan ke tempat-tempat suci secara berkala. Ziarah memberikan kesinambungan dalam historisitas globalisasi. Salah satu pertemuan keagamaan terbesar di dunia adalah ibadah haji, yang diikuti oleh sekitar 2,5 juta jamaah Muslim pada tahun 2019 (Pemerintah Arab Saudi, 2019). Kumbh Mela, yang dianggap sebagai ziarah terpadat, menarik puluhan juta umat Hindu untuk berenang di Sungai Gangga, hal ini bertentangan dengan ketakutan akan COVID-19.

4.3 MOBILITY SEBAGAI MIGRASI

Migrasi, yang merupakan perpindahan fisik manusia dari satu tempat ke tempat lain, telah menjadi wajah globalisasi yang paling terlihat saat ini. Kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa semakin banyak penduduk di hampir setiap negara saat ini yang lahir di luar negeri, hal ini menunjukkan adanya mobilitas global. Meskipun beberapa penulis mendefinisikan fase globalisasi saat ini (abad ke-20 dan ke-21) sebagai “zaman migrasi” (Castles & Miller, 1993), sejarah migrasi manusia—baik yang tidak disengaja maupun sukarela—menandai pentingnya migrasi di masa lalu. fase sejarah juga. Pitrim Sorokin, seorang sosiolog Harvard dan seorang imigran dari Uni Soviet, menggunakan istilah mobilitas pada tahun 1940-an dan membedakan antara mobilitas horizontal, yang berarti migrasi, dan mobilitas vertikal, atau mobilitas sosial.

Meskipun migrasi manusia bukanlah hal baru, salah satu ciri paling menarik dari globalisasi abad ke-21 adalah peningkatan mobilitas, dimana lebih banyak orang cenderung lebih sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Masyarakat yang berpindah-pindah mencakup wisatawan, komuter, dan migran. Kami membedakan antara migran dan orang yang berpindah-pindah dengan alasan bahwa migran tinggal selama jangka waktu tertentu di negara tujuan untuk bekerja, pendidikan, atau bisnis atau untuk bergabung dengan anggota keluarga; tunduk pada peraturan, ketentuan, dan kebiasaan negara penerima; dan diharuskan melakukan akomodasi budaya pada tingkat tertentu. Semua masyarakat modern mengizinkan pergerakan bebas warga negara di dalam batas negara mereka dan undang-undang nasional memastikan bahwa mereka menikmati kebebasan untuk bepergian. Pengecualiannya adalah

sistem hukou di Tiongkok, yang merupakan upaya untuk mengatur dan membatasi migrasi internal. Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi telah dilakukan pada sistem hukou untuk memfasilitasi produksi industri di kota-kota pesisir di Selatan dan Tenggara. Meskipun sistem ini secara resmi telah dihapuskan pada tahun 2014, kemungkinan besar praktik ini tidak akan dihapuskan dalam waktu dekat. Di Eropa pra-modern, terdapat pembatasan terhadap kemampuan masyarakat pedesaan untuk pindah ke kota tanpa bekerja. Vagabondage adalah pelanggaran yang dapat dihukum di Eropa modern awal.

Migrasi menimbulkan isu menarik mengenai hubungan antara kekuatan pasar dan otoritas negara. Ini adalah hukum klasik penawaran dan permintaan yang menentukan pergerakan orang melintasi batas negara. Namun, negara di negara penerima, dalam membantu kekuatan pasar, biasanya tunduk pada kekuatan ekonomi yang dominan, namun negara bertanggung jawab terhadap warganya. Negara pengirim juga terkadang berperan dalam mempromosikan kepentingan pekerja migran dengan memberikan segala macam bantuan atau memblokir pergerakan mereka jika ada kemungkinan pekerja terjerumus ke dalam situasi eksploitatif di luar negeri.

Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam populasi migran dalam beberapa dekade terakhir, abad-abad sebelumnya menunjukkan mobilitas orang yang lebih besar dalam hal persentase total populasi dan tingkat kebebasan—jika bukan kemudahan—bergerak. Dekade terakhir abad kedua puluh dinyatakan sebagai “era migrasi” oleh Stephen Castles dan Mark J. Miller (2003). Namun abad kesembilan belas memungkinkan arus migrasi lebih mudah. Di tengah euforia diskusi mengenai globalisasi, penulis seperti Kenichi Ohmae (1989), seorang pemimpin pemikiran bisnis, mengumumkan akan datangnya “dunia tanpa batas.” Sungguh ironis ketika pernyataan perayaan tentang apa yang disebut sebagai dunia tanpa batas sedang disuarakan, tembok-tembok didirikan di banyak bagian dunia untuk membatasi pergerakan orang. Bertentangan dengan persepsi umum, pada abad kedua puluh, dunia menjadi lebih berbatasan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kita hidup di dunia yang berpusat pada negara. Kontradiksi globalisasi terlihat jelas dalam aliran bebas modal dan terbatasnya pergerakan tenaga kerja.

Kekuatan globalisasi yang tidak seimbang telah menjadikan negara lebih sentral. Hubungan antara globalisasi dan negara telah mengalami perubahan baru, menjadikan negara lebih kuat dalam hal pengawasan perbatasan. Kekuasaan negara seringkali terlihat pada kemampuannya mengontrol dan mengatur pergerakan manusia, barang, teknologi, dan kekayaan intelektual. Dalam wacana globalisasi, terdapat beberapa cara untuk mengkonseptualisasikan proses globalisasi. Salah satu konseptualisasi memandang globalisasi sebagai serangkaian arus: arus modal, teknologi, gagasan, dan populasi. Pandangan ini paling relevan dalam pembahasan mobilitas. Sejak munculnya sistem negara, migran dapat dipandang sebagai migran internal atau internasional. Sebagian besar migran di dunia saat ini adalah migran internal, yang mencerminkan pembangunan yang tidak merata di dalam negeri, karena migrasi internasional berakar pada pembangunan global yang tidak merata. Baik migran internal maupun internasional berjumlah hampir satu miliar pekerja migran di dunia. Di sini, migran didefinisikan—minimal—sebagai seseorang yang tinggal di tempat lain selain

tempat ia dilahirkan. Dalam dunia negara-bangsa, sebagian orang berpindah dari pedesaan ke perkotaan atau dari kota kecil ke kota metropolitan untuk mencari pekerjaan, pendidikan, peningkatan karier, kondisi kehidupan yang lebih baik, dan sebagainya. Jumlahnya sekitar 740 juta orang (UNDP, 2009, dikutip dalam IOM, 2015).

Perkiraan global mengenai migran internasional mencapai sekitar 286 juta pada tahun 2022, termasuk 32,5 juta pengungsi pada pertengahan tahun 2022 (Bank Dunia, 2022). Secara keseluruhan, perkiraan jumlah migran internasional telah meningkat selama lima dekade terakhir. Seratus sembilan puluh satu juta orang, atau 3 persen populasi dunia, tinggal di luar negara kelahiran mereka pada tahun 2005, menurut Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB. Angka yang setara pada tahun 1960 adalah sebesar 75 juta orang atau 2,5 persen penduduk dunia. Hampir satu dari setiap sepuluh orang yang tinggal di daerah maju adalah seorang migran. Diperkirakan total 281 juta orang yang tinggal di negara selain negara kelahiran mereka pada tahun 2020 adalah 128 juta lebih banyak dibandingkan pada tahun 1990 dan tiga kali lipat jumlah perkiraan pada tahun 1970 (IOM, 2022).

Tiongkok merupakan negara dengan jumlah migran internal tertinggi di dunia. Menurut sensus tahun 2020, populasi terapung, atau migran,—yang didefinisikan sebagai mereka yang tidak memiliki registrasi rumah tangga lokal (*hukou*)—telah meningkat menjadi 376 juta, naik dari 155 juta pada tahun 2010. Industrialisasi yang tidak merata adalah penyebab migrasi internal dan internasional. Di Tiongkok, migrasi internal mempunyai dampak kesehatan, terutama pada migran muda berusia 16–35 tahun.

Hal yang unik tentang migrasi di era globalisasi adalah semakin banyak orang yang berpindah ke dan dari lebih banyak negara, dan pergerakan mereka didokumentasikan dan disurvei dengan cermat. Kontroversi pergerakan orang tidak berdokumen merupakan penegasan akan pentingnya dokumentasi dan pengawasan. Migrasi merupakan hasil dari serangkaian proses sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kompleks. Ada beberapa jenis migrasi: sukarela, tidak disengaja atau dipaksa, dan ekonomi atau politik. Seringkali, kombinasi beberapa faktor mendorong orang untuk bermigrasi. Meskipun para migran menggunakan kemauan mereka dalam memilih untuk pindah, namun bagi para pengungsi dan pengungsi internal, pilihan seperti itu tidak ada. COVID-19 membatasi jumlah orang yang bergerak namun tidak sepenuhnya membatasi mobilitas. Pengungsi terus terjadi dan bertambah, dengan 1 dari 95 orang mengungsi pada akhir tahun 2020, naik dari 1 dari 159 orang pada tahun 2010 (UNHCR, 2022).

4.4 PENYEBAB MIGRASI

John Maynard Keynes, ekonom Inggris terkenal, mengatakan bahwa “migrasi adalah tindakan pertama melawan kemiskinan.” Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tiga D menyumbang mayoritas migrasi saat ini: demografi, pembangunan, dan demokrasi. Masyarakat cenderung berpindah dari negara-negara yang dianggap kelebihan penduduk ke negara-negara yang penduduknya lebih sedikit, dari negara-negara kurang berkembang ke negara-negara yang lebih maju, dan dari negara-negara otoriter ke negara-negara demokratis. Negara-negara yang berpenduduk sedikit namun kaya seperti Kanada dan Australia tetap

menjadi tujuan populer para migran. Meskipun beberapa migran pindah secara permanen, negara-negara Teluk yang kaya minyak tetap menjadi tujuan para pekerja migran sementara. Uni Emirat Arab mempunyai proporsi migran sementara tertinggi, yaitu lebih dari 88 persen populasi.

Menurut Adam McKeown (2004), migrasi dunia mencapai puncaknya pada tahun 1920-an, dan pembatasan imigrasi pada tahun 1920-an juga merupakan bagian dari tren regulasi, pengawasan perbatasan, dan nasionalisme yang telah berkembang seiring dengan migrasi sejak tahun 1920-an. pertengahan abad kesembilan belas. Dari tahun 1846 hingga 1940, ada tiga jalur utama migrasi jarak jauh. Selama abad migrasi ini, 55–58 juta orang Eropa dan 2,5 juta orang dari India, Tiongkok, Jepang, dan Afrika bermigrasi atau dibawa ke Amerika. Pada periode yang sama, tujuan utama lainnya adalah Asia Tenggara, Lingkar Samudra Hindia, dan Pasifik Selatan, tempat 48–52 juta orang Tionghoa dari Tiongkok dan India pindah.

Pada abad ke-20, seiring dengan migrasi paksa yang disebabkan oleh perang, migrasi sukarela juga meningkat pesat. Pada awal abad kedua puluh satu, karena kombinasi beberapa faktor seperti perjalanan udara yang relatif lebih murah, perluasan kesempatan kerja, penurunan angka kelahiran di beberapa negara, dan ketersediaan kelebihan populasi di negara lain, maka semakin banyak orang yang meninggal. menjadi semakin mobile. Ada migran dan pengungsi internasional serta pengungsi internal. Kelompok yang terakhir sering kali merupakan akibat dari perang saudara atau kerusuhan sosial.

4.5 PEKERJA IMIGRAN

Globalisasi politik-ekonomi dapat ditelusuri kembali ke perdagangan budak pada abad keenam belas dengan perpindahan paksa pekerja budak Afrika ke perkebunan Karibia dan Amerika Utara. Pemindahan tenaga kerja secara paksa dan eksploitatif masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kolonialisme dan perampasan tanah di Eropa meminggirkan masyarakat miskin di banyak koloni yang akhirnya terpaksa menjadi buruh kontrak karena kebutuhan ekonomi. Pada abad kesembilan belas, migrasi orang Eropa ke berbagai belahan dunia menciptakan masyarakat pemukim kulit putih seperti Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Di sini, isu migrasi dikaitkan dengan rasisme dan marginalisasi berbagai komunitas Pribumi. Banyak permasalahan yang masih ada, terutama seputar status masyarakat adat dan hubungan mereka dengan tanah.

Orang yang mobile sangatlah heterogen. Mereka dapat berupa pekerja migran, turis, pelajar internasional, atau pengungsi. Selain migran dan pengungsi, terdapat 48 juta pengungsi internal pada tahun 2020 (UNHCR, 2021). Salah satu tren penting dalam migrasi adalah peningkatan migrasi Selatan-Selatan. Sekitar 60 persen dari seluruh migran kini berada di negara-negara paling makmur di dunia dan sekitar 40 persen di negara-negara berkembang (GCIM, 2005) Para migran yang datang ke negara-negara industri maju sering kali mencari status dan kewarganegaraan permanen. Karena tingginya mobilitas masyarakat antar negara, banyak negara kini menerima kewarganegaraan ganda. Tenaga profesional di bidang spesialisasi tertentu sangat dibutuhkan, dan beberapa negara menawarkan insentif untuk menarik tenaga spesialis tersebut. Insinyur perangkat lunak India dapat dilihat di banyak

negara berbeda. Beberapa negara, seperti Filipina, telah mengambil sikap proaktif terhadap ekspor tenaga kerja atau strategi migrasi keluar sejak pertengahan tahun 1970an di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos. Pada dekade pertama abad kedua puluh satu, perempuan Filipina dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di lebih dari 130 negara di dunia. Diperkirakan ada delapan juta pekerja—baik sebagai pekerja rumah tangga maupun di bidang lain—yang dikenal sebagai “pekerja asing luar negeri” (OFW) dari Filipina yang memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut. Pendapatan yang mereka peroleh di luar negeri membantu menghidupi keluarga mereka yang ditinggalkan di tanah air.

Bank Dunia memperkirakan pengiriman uang ke seluruh dunia akan mencapai \$689 miliar pada tahun 2021, dengan pengiriman uang ke negara berkembang mencapai \$529 miliar. India pada tahun 2021 kembali menduduki puncak daftar dengan pendapatan sebesar US\$87 miliar (Bank Dunia, 2021). Gagasan bahwa mobilitas melahirkan kemungkinan sering kali terwujud di kalangan migran jika proses ini dikelola dengan baik. Namun, seringkali migrasi yang tidak dikelola dengan baik dan laissez-faire mengarah pada kategori baru masyarakat rentan yang dikenal sebagai “pekerja tidak tetap” atau “pekerja tidak berdokumen.” Dengan memangsa keberadaan mereka yang rentan dan mengeksploitasi ketidaktahuan mereka, para pelaku perdagangan manusia membawa orang-orang ke dalam perjalanan yang penuh ketidakpastian. Menurut Badan Pengungsi PBB, pada tahun 2021, 3.231 orang tewas saat mencoba menyeberangi Laut Mediterania (UNHCR, 2022).

4.6 PERDAGANGAN MANUSIA DAN PERBUDAKAN

Beberapa orang memilih meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan keamanan di tempat lain, dan migrasi ekonomi semacam ini sering kali merupakan respons terhadap dorongan dan tarikan kekuatan globalisasi. Mereka meninggalkan rumah mereka untuk menghindari kemiskinan dan penindasan, sementara yang lain terpicu oleh prospek kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Ada orang yang menentukan pilihannya sendiri, namun ada juga yang terpaksa bermigrasi karena sejumlah faktor, mulai dari kesulitan ekonomi, represi politik, hingga pengusiran paksa (atau yang disebut dengan repatriasi wajib). Bentuk ekstrim dari migrasi paksa adalah perdagangan manusia; anak-anak dan perempuan sering kali diculik, dicuri, dan dijual sebagai budak.

Perdagangan manusia telah diidentifikasi sebagai bentuk perbudakan baru di dunia saat ini, yang memperlihatkan beberapa dampak buruk dari globalisasi yang tidak terkendali. Organisasi Internasional untuk Migrasi menyebut perdagangan manusia sebagai “bentuk migrasi tidak teratur yang paling mengancam karena skala dan kompleksitasnya yang terus meningkat, yang juga melibatkan senjata, narkoba, dan prostitusi.” Di dunia yang teduh ini, angka pastinya sulit didapat. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), terdapat 24,9 juta korban perdagangan manusia di seluruh dunia pada tahun 2016, 10,9 juta di antaranya adalah perempuan dan 3,3 juta adalah anak-anak. ILO juga memperkirakan terdapat 4,8 juta korban perdagangan seks yang menjadi sasaran eksploitasi seksual komersial di seluruh dunia pada tahun 2016. Sembilan puluh sembilan persen korbannya adalah perempuan, sedangkan 3,8 juta adalah orang dewasa dan 1 juta adalah anak-anak.

Dalam Laporan Perdagangan Manusia yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS, “Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan modern, suatu jenis perdagangan budak global yang baru.” Pelaku memangsa kelompok paling rentan di antara kita, terutama perempuan dan anak-anak, demi keuntungan dan keuntungan. Korban perempuan masih sangat banyak dalam perdagangan manusia. “Pada tahun 2018, untuk setiap 10 korban yang terdeteksi secara global, sekitar lima orang adalah perempuan dewasa dan dua orang lagi adalah anak perempuan. Sekitar sepertiga dari keseluruhan korban yang terdeteksi adalah anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, sementara 20 persennya adalah laki-laki dewasa” (UNODC, 2021).

Perbudakan secara resmi dihapuskan pada tahun 1833 di Kerajaan Inggris, pada tahun 1865 di Amerika Serikat melalui Amandemen Ketigabelas, dan pada tahun 1886 di Kuba, namun praktik tersebut masih berlangsung di masyarakat kita dengan nama yang berbeda. Perdagangan manusia adalah perbudakan versi abad kedua puluh satu. Besarnya perbudakan di dunia kontemporer didokumentasikan secara luas, misalnya dalam karya Kevin Bales (1999).

Menurut Bales, sejak penghapusan perbudakan secara umum pada akhir abad ke-19, perbudakan dengan mudah masuk ke dalam ekonomi bayangan. Perbudakan dapat didefinisikan sebagai penguasaan penuh seseorang atas eksploitasi ekonomi melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam perbudakan, seseorang hanya menjadi komoditas atau benda.

Menurut pakar lain, “Saat ini, perbudakan terjadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.” Di Afrika, puluhan ribu orang adalah budak harta benda, yang ditawan dalam perang atau disembunyikan selama beberapa generasi. Di seluruh Eropa, Asia, dan Amerika, pelaku perdagangan manusia telah memaksa dua juta orang menjadi pelacur atau bekerja. Di Asia Selatan, yang memiliki konsentrasi budak tertinggi di dunia, hampir sepuluh juta orang mendekam dalam perbudakan, tidak mampu meninggalkan para penculiknya sampai mereka melunasi “utangnya”. Bales memperkirakan terdapat dua puluh tujuh juta budak di dunia saat ini, lima belas hingga dua puluh juta di antaranya berada di India, Pakistan, dan Nepal. Pandangan positif mengenai pergerakan bebas tenaga kerja dalam perekonomian global tidak akan mau berurusan dengan isu-isu ini dan sebaliknya akan berusaha untuk fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian global yang dideregulasi, dimana pada prinsipnya masyarakat memiliki kebebasan untuk menyeberang. perbatasan dengan nyaman di dunia tanpa batas. Secara umum, ilmu ekonomi tidak menangani pasar gelap dan aktivitas kriminal di pasar secara efektif, melainkan hanya berkonsentrasi pada pasar formal di mana barang dan jasa ditransaksikan berdasarkan aturan publik yang formal. Oleh karena itu, ilmu ekonomi akademis yang berhubungan dengan pertukaran formal dan hukum biasanya tidak mencakup aktivitas kriminal, yang dapat membuat sebagian besar masyarakat tetap memiliki pekerjaan dan produk domestik bruto. Perbudakan, perdagangan manusia, dan perpindahan orang secara informal dan tidak terdokumentasi sering kali luput dari perhatian dan tidak diperhitungkan. Orang-orang ini tetap terpinggirkan secara permanen.

4.7 BRAIN DRAIN INCIRCULATION

Pada tahun 1970-an, “brain drain” merupakan slogan yang populer, dan hal ini sering dianggap sebagai salah satu penyebab buruknya kinerja perekonomian negara-negara yang mengekspor dokter, insinyur, dan ilmuwan mereka yang paling berbakat ke negara-negara kaya dan maju. Memang benar, banyak pemuda dan pemudi berbakat yang bermigrasi dari pinggiran ke pusat perekonomian dunia untuk mendapatkan kesempatan pendidikan dan karir yang lebih baik. Universitas-universitas di negara-negara kaya, seperti Amerika Serikat, merupakan magnet dalam menarik talenta-talenta asing. Proses ini berbalik pada tahun 1990an dan dekade pertama abad kedua puluh satu. Gagasan “brain drain” dilengkapi dengan “brain gain,” dan Analee Saxsenian (2005) memperkenalkan konsep “brain incirculation.” Negara-negara seperti India menghasilkan banyak pria dan wanita berbakat di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik, namun kemudian diserap oleh lesunya perekonomian India pada tahun 1960an, 1970an, dan 1980an, yang menyebabkan banyaknya kelas kreatif India yang berbondong-bondong ke Amerika Utara dan Amerika. di tempat lain. Pada tahun 1990-an dan khususnya pada dekade pertama abad kedua puluh satu, banyak orang India berbakat yang berpengalaman dalam industri teknologi tinggi mulai kembali ke negara mereka sendiri, yang pada saat itu menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk mengejar karir profesional mereka.

Brain drain masih menjadi masalah global yang menguntungkan negara-negara kaya di wilayah Utara dan merugikan negara-negara miskin di Selatan. Alasan terjadinya brain drain sebagian besar adalah karena faktor ekonomi: kondisi kerja yang buruk di negara asal dan ketertarikan akan kualitas kehidupan pribadi dan profesional yang lebih baik di negara tujuan. Pada dekade kedua abad kedua puluh satu, penduduk kelahiran asing mewakili 10 persen angkatan kerja di negara-negara OECD, peningkatan dua kali lipat sejak tahun 1960 dan peningkatan dua kali lipat sejak tahun 1990. Migrasi berketerampilan tinggi tumbuh lebih cepat lagi, dengan peningkatan dua kali lipat selama tahun 1990an saja.

Gagasan bahwa batas-batas negara menjadi lebih rentan bagi kelas kreatif dipopulerkan oleh Richard Florida (2002). Sifat kelas kreatif yang bebas bergerak dan seringnya pergerakan profesional telah menyebabkan beberapa penulis mengembangkan gagasan “kewarganegaraan yang fleksibel” (Ong, 1999). Meskipun Aihwa Ong mengembangkan gagasan untuk menggambarkan fleksibilitas global kelas bisnis Tiongkok, ungkapan tersebut telah menjadi populer dalam literatur tentang migrasi global. Meskipun mungkin hanya sejumlah kecil pekerja terampil yang bisa berpindah-pindah dengan nyaman, dan sering kali mereka memiliki lebih dari satu paspor, bagi sebagian besar migran kelas pekerja, batasan negara masih menjadi kenyataan yang sulit.

Beberapa negara, seperti Taiwan dan Israel, telah mempunyai kebijakan insentif yang efektif untuk membalikkan tren migrasi orang-orang berbakat. Pengurusan otak terbalik pun terjadi. Dalam kasus Taiwan, banyak orang Tionghoa dari luar negeri—terutama dari Amerika Serikat—yang pulang tidak hanya dengan membawa uang tunai, namun banyak dari mereka membawa pengetahuan ilmiah dan teknologi yang berharga, yang membantu perkembangan ekonomi Taiwan yang luar biasa. India juga berhasil memanfaatkan tren ini, dan banyak warga

India yang memiliki pengalaman bertahun-tahun di luar negeri kini kembali ke India. Beberapa profesional India di industri informasi dan teknologi telah meninggalkan Silicon Valley untuk kembali ke Bangalore, pusat informasi India. Banyak profesional India kini kembali ke Bangalore dan pusat ekonomi lainnya di India dengan pengalaman yang kaya di bidang teknologi, pendidikan, dan keuangan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini juga memberikan India status internasional yang menonjol. Setelah liberalisasi perdagangan dan keterbukaan perekonomian terhadap investasi dari luar, Tiongkok telah menerima dana dan keahlian dalam jumlah besar dari komunitas Tionghoa perantauan. Untuk menarik orang-orang keturunan Tionghoa, Tiongkok menerapkan kebijakan migrasi masuk berbasis etnis. Di tengah pesatnya perkembangan kapitalis, stimulus ekonomi ini tepat waktu dan penting. Di India juga, NRI, yang berarti “orang India yang bukan penduduk”, memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi tinggi di India.

Komunitas diaspora jarang memutuskan hubungan mereka dengan negara asal mereka, meskipun dalam banyak kasus, hubungan ini dapat berlangsung selama beberapa generasi. Ikatan komunitas yang erat dari kelompok diaspora terkadang mempunyai konsekuensi yang tidak menguntungkan. Radikalisasi generasi muda seringkali terjadi dalam lingkungan diaspora yang penuh keterasingan dan keterasingan. Teknologi modern telah berperan penting dalam menjaga hubungan antara keluarga dan komunitas di dunia diaspora. Berbeda dengan situasi diaspora di masa lalu, para migran tetap mempunyai hubungan dekat dengan negara asal mereka, sehingga menjadikan makna “rumah” menjadi lemah. Kelompok Islam diaspora sering kali menunjukkan rasa religiusitas yang tinggi dan mendekati radikalisme. Penelitian telah menunjukkan bagaimana beberapa komunitas diaspora berada di bawah pengaruh agama yang diradikalisasi, sehingga menjadi sumber ekstremisme agama di negara asal mereka (Kibria, 2008).

4.8 MOBILITY OF IDE, IDEOLOGI, DAN PENGETAHUAN

Secara historis, intelektual transnasional telah menjadi penyalur ide, ideologi, dan pengetahuan. Pengetahuan ilmiah pada fase globalisasi saat ini cenderung berpindah dari Dunia Utara ke Dunia Selatan, sedangkan pada fase terakhir milenium pertama, pengetahuan sains matematika, filsafat, dan fisiologi berpindah dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah ke negara-negara Barat. Barat. Ideologi seperti Marxisme berkembang di Barat dan menjadi kekuatan dominan di Timur ketika para intelektual yang berubah menjadi pemimpin mulai dari Lenin dan Trotsky di bekas Uni Soviet hingga Chou En-Lai dari Tiongkok dan lainnya dididik dalam ideologi Marxis di ibu kota-kota di Barat. Para pemimpin nasionalis Asia kemudian seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru, pemimpin Afrika seperti Kwame Nkrumah dan Jomo Kenyatta, dan Ho Chi Minh dari Vietnam dididik dalam gagasan nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme di universitas-universitas di Inggris dan Perancis. yang pada gilirannya menyebarkan ide-ide ini ke negara asal mereka. Ketika ekonomi pengetahuan menjadi mode dominan dalam perekonomian global, globalisasi pengetahuan menjadi suatu keharusan. Universitas dengan bebas memainkan peran penting dalam penyebaran tradisi intelektual, humaniora, dan ilmu sosial. Namun, kontradiksi muncul ketika menyangkut

pembagian pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai relevansi langsung dengan perolehan keuntungan. Undang-undang kekayaan intelektual dirancang untuk melindungi hak paten, namun undang-undang tersebut dapat menjadi hambatan dalam berbagi pengetahuan.

Selama krisis COVID-19 pada tahun 2020-2021, perdebatan muncul ketika terdapat argumen kuat yang mendukung dan menentang pelanggaran undang-undang kekayaan intelektual agar vaksin dapat menjadi barang publik global. Organisasi Perdagangan Dunia di satu sisi dan Afrika Selatan serta India di sisi lain menuntut pelanggaran undang-undang kekayaan intelektual selama tiga tahun atas dasar kemanusiaan sehingga vaksin dapat diproduksi selama masa ini di berbagai lokasi, terutama di wilayah yang mengalami defisit vaksin. Global South, upaya yang ditentang oleh industri Big Pharma.

Proses globalisasi pada dasarnya tidak seimbang baik dalam bentuk maupun dampaknya. Salah satu tantangan dunia global adalah perekonomian dan politik didorong oleh kepentingan atau logika yang berbeda. Perekonomian modern memerlukan pasar tenaga kerja yang fleksibel sehingga pekerja dapat berpindah dengan cepat dan mudah antar lokasi kerja yang berbeda tergantung pada permintaan lokal akan input tenaga kerja. Kepentingan politik dan kebutuhan negara akan kedaulatan dan keamanan melebihi kebutuhan ekonomi akan mobilitas tenaga kerja. Pengendalian ini tentunya memerlukan negosiasi dan pengelolaan migrasi yang lebih besar, dan akibatnya adalah mobilitas dan imobilitas tenaga kerja yang tidak menentu. Kontradiksi semacam ini juga terdapat dalam dilema aliran bebas penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta perlindungan informasi dan hak cipta melalui undang-undang kekayaan intelektual. Mengesampingkan kontradiksi-kontradiksi tersebut, mobilitas—khususnya dalam bidang pengetahuan, ide, dan teknologi—masih menjadi bagian intrinsik dan ciri khas era global, yang kemungkinan akan diperkuat oleh AI dan teknologi generatif baru di tahun-tahun mendatang.

BAB 5

DEGLOBALISASI

MASALAH DEFINISI DAN METODOLOGIS

5.1 KONSEP DEGLOBALISASI

Bab ini pertama-tama membahas kurangnya konsensus mengenai cara mendefinisikan deglobalisasi, sebuah istilah yang kemungkinan besar akan menjadi kata kunci pada pertengahan abad ke-21. Setidaknya ada tiga penjelasan berbeda mengenai deglobalisasi. Pertama, deglobalisasi didefinisikan sebagai serangkaian proses yang berfungsi untuk “membalikkan” globalisasi. Kedua, deglobalisasi dirayakan sebagai proyek emansipatoris yang mendesentralisasikan Barat dan bertujuan untuk melakukan reglobalisasi. Ketiga, dari sudut pandang sejarah, deglobalisasi dipahami sebagai fase atau “gelombang” sementara yang merupakan bagian dari pemerintahan global. Kemudian, bab ini berfokus pada indeks populer dan pengukuran globalisasi yang digunakan untuk lebih memahami kondisi globalisasi saat ini dan memprediksi apakah globalisasi akan digantikan oleh deglobalisasi. Meskipun pengukuran dan indeks kuantitatif berfungsi untuk memberikan “gambaran besar” dalam hal membandingkan ratusan negara-bangsa dalam dimensi globalisasi tertentu (ekonomi, politik, sosial, dan teknologi), hal ini menuai banyak kritik, tidak hanya bagi nasionalisme metodologis mereka, tetapi juga karena mengabaikan aspek globalisasi yang kompleks dan tidak terukur.

Setelah Krisis Keuangan Global tahun 2008, beberapa negara berupaya membatasi perdagangan dan menerapkan kontrol perbatasan yang lebih ketat terhadap arus manusia, jasa, dan modal global. Perkembangan regional seperti pemberontakan di Arab dan konflik Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011 mempunyai dampak global dalam hal memperkuat terorisme Islam radikal dan menyebabkan krisis pengungsi, yang menambah pemicu meningkatnya xenofobia dan politik populis sayap kanan di Eropa dan negara-negara lain. Ditambah lagi dengan dampak buruk pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, masyarakat, politik, dan budaya. Karena tidak dapat dengan mudah mencapai jumlah masker dan vaksin yang diperlukan, banyak negara memilih untuk melarang perjalanan dan mengurangi kerja sama dan bantuan internasional. Kepercayaan terhadap mekanisme kerja sama internasional menurun. Oleh karena itu, Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa) ditafsirkan sebagai gejala penting deglobalisasi. Negara-negara juga khawatir akan munculnya jaringan kriminal, kelompok bersenjata non-negara, dan organisasi teroris yang beroperasi dengan lancar melintasi perbatasan tanpa mudah dilacak dan dihukum. Meningkatnya ketidakpastian seputar tatanan dunia liberal menyebabkan kebangkitan “politik orang kuat” dalam bentuk pemimpin otoriter baru yang mengesampingkan hambatan demokrasi dengan menekankan “Nation First!” Dari Vladimir Putin dari Rusia hingga Donald Trump dari Amerika, dari Viktor Orbán dari Hongaria hingga Narendra Modi dari India, para pemimpin kuat baik di belahan dunia Barat maupun non-Barat menentang cita-cita kosmopolitan dan melemahkan mekanisme tata kelola global tatanan dunia liberal pasca-Perang Dunia II. Mereka cenderung

melihat pembatasan dalam negeri terhadap arus orang, barang, tenaga kerja, dan gagasan liberal sebagai hal yang dapat dibenarkan. Mereka secara terbuka menyalahkan globalisasi atas permasalahan dalam negeri seperti meningkatnya pengangguran kaum muda, kelesuan sosial ekonomi, masalah kesehatan, serta perang dan konflik yang berkepanjangan.

Bahkan Amerika Serikat—penyedia utama jaminan keamanan dan insentif ekonomi untuk memelihara tatanan dunia pasca-Perang Dingin—menjadi mangsa politik kuat di bawah pemerintahan Trump (2017–21). Negara ini enggan mendukung upaya multilateral baru untuk mengkonsolidasikan rezim global dalam bidang lingkungan hidup, keadilan, dan diplomasi (seperti Pengadilan Kriminal Internasional, dan perjanjian nuklir Iran, dan masih banyak lagi) dan menarik diri dari rezim yang sudah mapan seperti Perjanjian INF. (Perjanjian pengendalian senjata AS-Soviet tahun 1987). Penghematan atau pengunduran diri AS dari urusan dunia karena kelelahan intervensi yang terkait dengan perang melawan teror pasca tahun 2001 dan munculnya penantang seperti Rusia dan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan politik dalam sistem global telah menyebabkan banyak orang secara terbuka menyatakan bahwa “globalisasi seperti yang kita tahu ini sudah berakhir” (Sharma, 2016). Di kalangan akademis dan pembuat kebijakan, konsep “deglobalisasi” semakin sering digunakan untuk memperingatkan para pembuat kebijakan bahwa terdapat kebutuhan untuk lebih memahami tatanan dunia yang sedang berkembang serta ancaman dan peluang baru yang terkait dengannya. Namun, terdapat kurangnya konsensus mengenai bagaimana mendefinisikan deglobalisasi. Meskipun awalan tersebut menunjukkan “pembalikan” globalisasi, beberapa analisis merujuk pada deglobalisasi dengan arti yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Mereka juga memberikan berbagai jenis bukti yang mendukung deglobalisasi. Bab ini membahas permasalahan definisi dan metodologis yang timbul dari konsep deglobalisasi yang baru-baru ini dipopulerkan (kembali). Argumen utama bab ini adalah bahwa mendefinisikan deglobalisasi sebagai akhir dari globalisasi terlalu menyederhanakan dan bersifat reduksionis. Deglobalisasi sebagai “akhir dunia yang kita kenal” hanyalah sebuah mitos.

Bab ini disusun sebagai berikut. Pertama, bab ini merangkum tiga penjelasan berbeda tentang deglobalisasi yang sering ditemukan dalam literatur akademis, media, dan dokumen kebijakan: deglobalisasi sebagai pembalikan globalisasi, deglobalisasi sebagai proyek emansipatoris, dan deglobalisasi sebagai sebuah fase (atau gelombang) yang merupakan bagian dari pemerintahan global. Kedua, fokusnya adalah pada indeks dan pengukuran utama globalisasi yang digunakan untuk lebih memahami keadaan saat ini dan lintasan proses globalisasi di masa depan. Yang terakhir, bab ini memberikan ringkasan kritik sosiologis terhadap cara memahami dan menjelaskan deglobalisasi.

5.2 BERBAGAI MAKNA DEGLOBA LISASI

Barrie Axford (2013) menjelaskan bahwa globalisasi digunakan untuk merujuk pada tiga fenomena berbeda: suatu proses, suatu proyek, atau suatu pemerintahan. Demikian pula, konsep deglobalisasi menyiratkan berbagai fenomena yang berkaitan dengan proses yang berupaya membalikkan arus global manusia, barang, jasa, dan gagasan; terhadap proyek-

proyek emansipasi dari tatanan global yang berpusat pada Barat dan kapitalistik; dan fase siklus pemerintahan global yang secara inheren melibatkan “gelombang” globalisasi dan deglobalisasi dari perspektif sejarah. Meskipun Walden F. Bello (2002) mempopulerkan deglobalisasi sebagai proyek emansipatoris, kecenderungan yang ada saat ini adalah memahami deglobalisasi sebagai “pembatasan globalisasi” (Steger & James, 2020). Oleh karena itu, bagian berikut ini dimulai dengan definisi deglobalisasi sebagai “membalikkan globalisasi dengan kembali melakukan sesuatu di tempat-tempat yang tidak berhubungan” (Lechner, 2009: 52). Bab ini kemudian akan membahas mengenai deglobalisasi sebagai sebuah proyek dan, pada akhirnya, sebagai fase konstitutif dari pemerintahan global.

Deglobalisasi sebagai Pembalikan Globalisasi

Pernyataan deglobalisasi yang radikal dan pesimis ini meramalkan akhir dari globalisasi. Di kalangan akademis dan pembuat kebijakan, argumen bahwa globalisasi pada akhirnya akan berakhir karena berbagai krisis sosial, ekonomi, dan politik yang memaksa negara-negara menutup perbatasannya semakin sering digunakan. Argumennya adalah bahwa reaksi reaksioner ini memperkuat kebangkitan pandangan dunia parokialisme yang berupaya mengakhiri globalisasi untuk selamanya. Deglobalisasi secara kasar didefinisikan sebagai “kebalikan” dari globalisasi atau “globalisasi berjalan terbalik” (Pieterse, 2020). Jika globalisasi adalah “proses peningkatan saling ketergantungan dan integrasi menuju masyarakat dunia,” deglobalisasi berarti “proses berkurangnya saling ketergantungan dan integrasi antara unit-unit tertentu di seluruh dunia, biasanya negara-bangsa” (Kim, Li, & Lee, 2020).

Deglobalisasi memerlukan upaya aktif dari pemerintah nasional untuk membalikkan jaringan dan institusi global yang sudah ada melalui “rekonstruksi hambatan nasional terhadap perdagangan, investasi dan migrasi; perbaikan dan pemendekan rantai pasok; dan pergerakan menuju blok perdagangan regional eksklusif dan wilayah pengaruh negara-negara besar” (Arase, 2020). Hal ini memerlukan “pengurangan nilai tukar global dan penegasan kembali kendali nasional atas perdagangan, politik, dan urusan sosial” dengan mengorbankan mekanisme tata kelola global seperti Dana Moneter Internasional, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Bank Dunia (Ripsman, 2021). Oleh karena itu, “Deglobalisasi adalah gerakan menuju dunia yang kurang terhubung, ditandai dengan negara-bangsa yang kuat, solusi lokal, dan kontrol perbatasan dibandingkan institusi global, perjanjian, dan pergerakan bebas” (Kornprobst & Wallace, 2021).

Oleh karena itu, deglobalisasi melibatkan serangkaian proses yang membalikkan deterritorialisasi dengan memperkuat segmentasi teritorial dalam pemerintahan global dan membantu negara mendapatkan kembali kedaulatannya atas wilayah nasional. Selain itu, hal ini juga memerlukan pembalikan integrasi fungsional lintas negara di sektor-sektor tertentu di mana aliran modal dan jasa telah mencapai tingkat yang signifikan sejak berakhirnya Perang Dingin. Hal ini tidak hanya berarti penurunan tingkat perdagangan internasional dan investasi asing secara global. Hal ini juga berarti munculnya “perintah paralel” (Benedikter, 2022) yang dipimpin oleh meningkatnya kekuatan Tiongkok, yang misalnya bertujuan untuk menggantikan dolar AS dengan yen Tiongkok sebagai mata uang global dalam perdagangan.

Lebih jauh lagi, deglobalisasi membalikkan stratifikasi sosial dan politik dalam pemerintahan global saat ini. Banyak kekuatan baru di dunia non-Barat yang menentang legitimasi tatanan dunia liberal dan mekanisme tata kelola globalnya, seperti PBB, dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa tatanan dunia dan lembaga-lembaganya cenderung mencerminkan kepentingan dan norma-norma Barat, yang juga memudahkan negara-negara Barat untuk menikmati hak-hak istimewa tertentu dan menerapkan “standar ganda” pada negara-negara lain. Misalnya, pada masa pemerintahan George W. Bush, Amerika Serikat mengabaikan PBB dan membentuk “koalisi yang berkeinginan” untuk menyerang Irak di bawah pemerintahan Saddam. Namun, mereka mengutuk intervensi internasional Rusia dan negara-negara lain karena melanggar tatanan multilateral yang dipimpin oleh PBB. Sementara itu, banyak negara di Afrika memprotes Pengadilan Kriminal Internasional karena ketidakmampuannya menghukum negara-negara besar di Barat.

Selain itu, pada masa pemerintahan Trump, Amerika Serikat juga menentang beberapa pengaturan keamanan dan ekonomi tatanan dunia liberal. Hal ini menandakan ketertarikannya untuk melepaskan diri dari urusan dunia baik kepada sekutu maupun musuhnya. Penarikan militer Amerika Serikat dari Afghanistan, kegagalan Amerika Serikat untuk secara efektif menanggapi serangan teroris terhadap fasilitas penyimpanan minyak Saudi (Aramco) dan agresi Rusia terhadap Ukraina, serta kritik Amerika Serikat terhadap NATO membuat banyak sekutu dan musuhnya berpikir bahwa Amerika Serikat adalah negara yang paling berpengaruh dalam hal ini. Hegemoni mengalami kemunduran. Presiden Perancis Emmanuel Macron berkomentar kepada media internasional bahwa Amerika Serikat sama mengancam keamanan Eropa dan dunia seperti Rusia dan Tiongkok dan telah membuat NATO “mati otak” dengan lebih memilih dialog pragmatis, transaksional, dan bilateral dibandingkan Suriah dan banyak krisis lainnya. Merusak mekanisme pengambilan keputusan strategis NATO (The Economist, 2019). Perpecahan transatlantik yang semakin dalam antara Eropa dan Amerika Serikat terkait banyak masalah luar negeri dan keamanan seperti hubungan dengan Rusia, Tiongkok, Iran, dan Israel memicu perdebatan di Eropa mengenai perlunya pembentukan tentara dan industri pertahanan Eropa yang otonom. Secara keseluruhan, deglobalisasi mengacu pada pembubaran mekanisme dan institusi pemerintahan global dan dipimpin oleh Barat yang berupaya menjaga stabilitas dan ketertiban di era pasca-Perang Dingin.

Meskipun ada yang berpendapat bahwa deglobalisasi adalah fenomena struktural yang “akan menetap” (Novy, 2022; Hammes, 2019), ada pula yang menganggapnya sebagai fase sementara. Banyak analis yang menekankan bahwa globalisasi tampak “melambat” dalam satu dekade terakhir, namun hal ini tidak berarti akhir dari globalisasi. Proses globalisasi sosiopolitik, ekonomi, dan budaya sepertinya tidak akan mudah dibalik. Frank J. Lechner (2009) menemukan bahwa “membalikkan globalisasi dengan kembali melakukan hal-hal di tempat-tempat yang tidak terhubung—‘deglobalisasi’—sulit untuk dibayangkan.” Oleh karena itu, deglobalisasi tampaknya hanya merupakan fenomena yang terbatas dan bersifat sementara di abad kedua puluh satu (Karunaratne, 2012). Definisi alternatif dari deglobalisasi

menganggap deglobalisasi sebagai proyek emansipasi yang mendesentralisasikan Barat dalam pemerintahan global.

Deglobalisasi sebagai Decentering Globalisasi

Seorang sosiolog Filipina, Walden Bello (2002), mempopulerkan istilah deglobalisasi sebagai proyek politik emansipasi melawan neoliberalisme Barat yang mendasari lintasan globalisasi saat ini. Penjelasan radikal dan optimis ini mengkritik penerapan norma, aktor, dan institusi Barat sebagai standar universal dan memandang deglobalisasi sebagai obat mujarab. Di sini, deglobalisasi disajikan sebagai proyek emansipatoris untuk menyelamatkan bangsa, negara, dan individu dari dampak buruk globalisasi yang memperkuat kesenjangan, kekurangan, dan kekerasan antar negara, wilayah, kelas, dan masyarakat.

Bagi Bello, deglobalisasi berarti “pemberdayaan kembali masyarakat lokal dan nasional” (2002: 114). Mengkritik bentuk globalisasi saat ini yang memperparah kemiskinan, diskriminasi, kesenjangan, dan masalah lingkungan hidup, Bello berpendapat bahwa deglobalisasi dapat membawa sistem alternatif di mana proyek-proyek global yang dipimpin oleh elit dan perusahaan transnasional dapat digantikan dengan kebijakan demokratis yang berorientasi pada rakyat. Meningkatkan solidaritas sosial, kesetaraan, dan keamanan. Demikian pula, pandangan Neo-Marxis mengenai globalisasi mengkritik “semangat Davos” yang menyiratkan dominasi proyek elit top-down yang dipimpin oleh kelas kapitalis Barat dalam menentukan aturan global dalam interaksi ekonomi, politik, dan sosial.

Dari sudut pandang non-Barat dan pasca-kolonialisme, deglobalisasi sebagai sebuah proyek akan membawa kemerosotan norma-norma dan kekuasaan Barat yang tidak hanya membentuk proses globalisasi di era pasca-Perang Dingin namun juga membajak imajinasi sosial dan politik yang dominan. Menulis untuk edisi khusus *International Affairs* tahun 2021 mengenai deglobalisasi, Navnita Chadha Behera mengemukakan bahwa deglobalisasi “membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk menantang hegemoni barat dalam produksi pengetahuan” dengan memberikan suara kepada mereka yang memiliki masa lalu dan “cara mengetahui” telah “terkubur” oleh ontologi Barat-sentris yang membentuk globalisasi (2021). Demikian pula, dari sudut pandang feminis, globalisasi dikecam karena memperkuat ketidakadilan gender. Oleh karena itu, deglobalisasi dipandang sebagai upaya untuk “memberikan suara” kepada pihak-pihak yang kurang terwakili dan dirugikan, atau bahkan kelompok “subaltern”.

Namun, Bello dan para pendukung proyek deglobalisasi lainnya tidak serta merta meramalkan atau menganjurkan berakhirnya globalisasi. Daripada melepaskan diri dari perekonomian internasional, deglobalisasi adalah tentang mengurangi ketergantungan pada investasi dan produksi asing untuk ekspor dan memproduksi untuk pasar lokal dengan sumber daya dalam negeri. Faktanya, gerakan “deglobalisasi” yang terjadi dalam perekonomian nasional kemungkinan besar terjadi bersamaan dengan gerakan menuju pembangunan “sistem tata kelola ekonomi global yang pluralis” (Bello, 2002). Oleh karena itu, deglobalisasi melibatkan dekonstruksi mekanisme pemerintahan global pasca tahun 1945 dan rekonstruksi pemerintahan yang lebih inklusif dan sah melalui “globalisasi dari bawah.” Deglobalisasi tidak dapat mengembalikan status quo ante dalam arti bahwa tidak mungkin kembali ke konteks

spatiotemporal dimana dan ketika globalisasi belum ada. Kita tidak mungkin mengabaikan atau melupakan imajinasi sosial global.

Oleh karena itu, deglobalisasi sebagai sebuah proyek bertujuan untuk globalisasi yang direformasi atau “re-globalisasi” (Paul, 2021). “Sebagai sebuah program, re-globalisasi berarti upaya reformasi, revisi, atau pembaruan globalisasi ‘klasik’ sejak tahun 1990-an” (Benedikter, 2022: 17). Reglobalisasi adalah (1) penyempurnaan, (2) rekontekstualisasi dan penyusunan ulang, (3) reformasi, (4) pendefinisian ulang, dan (5) revisi globalisasi. Oleh karena itu, reglobalisasi melibatkan gerakan ganda: memikirkan kembali tatanan dunia yang berpusat pada Barat karena meningkatnya multipolaritas dan “redefinisi Barat” baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya. Advokasi deglobalisasi tanpa reglobalisasi akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana “negara-negara miskin akan mendapat manfaat dari fokus pada pasar lokal dan tidak menekankan pertumbuhan” (Lechner, 2009). Banyak akademisi yang mengkritisi keadaan globalisasi saat ini karena menciptakan ketidakadilan global bukan sekadar melakukan deglobalisasi, namun mereka mengupayakan “reglobalisasi” dengan cara yang lebih manusiawi, adil, dan adil.

Terakhir, setidaknya ada dua jenis proyek deglobalisasi: “deglobalisasi dari kanan” dan “dari kiri” (Bishop & Payne, 2021). Keduanya berupaya menghentikan “aliansi 'tidak suci' antara realisme neoliberal dan idealisme kosmopolitan liberal kiri yang membentuk pemahaman diri terhadap globalisasi yang dipimpin Barat selama tiga dekade 1990–2020” (Benedikter, 2022) —walaupun dengan motivasi berbeda. Meskipun deglobalisasi sayap kanan membawa tren deinternasionalisasi dan renasionalisasi neonasionalis yang regresif, deglobalisasi sayap kiri bersifat progresif dalam hal membangun, misalnya, “negara hijau” (Bishop & Payne, 2021). Oleh karena itu, meskipun sebagian kelompok deglobalisasi menyerukan kembalinya nasionalisme lokal dan ekonomi, sebagian lainnya menganjurkan regionalisme. Dalam pengertian ini, deglobalisasi sebagai sebuah proyek mencakup berbagai visi anti dan perubahan globalis yang bertujuan untuk mendesentralisasikan Barat dalam pemerintahan global. Bagian berikut ini mengeksplorasi gambaran deglobalisasi sebagai fase atau “gelombang” sementara yang merupakan bagian integral dari pemerintahan global.

Gelombang Deglobalisasi

Deglobalisasi sering dianggap sebagai gerakan reaksioner dan korektif terhadap dampak buruk globalisasi. Oleh karena itu, hal ini merupakan reaksi antiglobalisasi. Asal usulnya berawal dari protes Organisasi Perdagangan Dunia di Seattle pada tahun 1999 (Ripsman, 2021). Argumen utamanya adalah bahwa sepanjang sejarah, hiperglobalisasi telah membawa fase tandingan terhadap deglobalisasi di mana negara-negara mulai melihat ke dalam dan membatasi arus lintas negara. Globalisasi yang kuat “membawa benih kehancuran” karena menyebabkan pemerintah membatasi internasionalisasi mereka (van Bergeijk, 2019). Bagi Geoffrey Jones (2005), gelombang globalisasi pada tahun 1840an diikuti oleh gelombang deglobalisasi setelah Depresi Besar tahun 1929, dan kemudian Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Khususnya, pada tahun 1930an, negara-negara berusaha membatasi impor untuk meningkatkan produksi dalam negeri, yang dianggap sebagai gejala penting

deglobalisasi. Jonathan Friedman (2014) sependapat bahwa dunia menyaksikan deglobalisasi ekonomi dan budaya dari tahun 1920 hingga 1945.

Sejarawan ekonomi cenderung membagi sejarah globalisasi menjadi berbagai “gelombang”. Misalnya, Neil Dias Karunaratne (2012) memberikan daftar gelombang globalisasi (1870–1914, didorong oleh kolonisasi; 1946–73, dipimpin oleh perdagangan bebas; dan 1980–2009, didorong oleh mobilitas modal) dan deglobalisasi (1914–30, proteksionisme; 1939–46, antar perang) sejak abad kesembilan belas. Menurut Hermann Schwengel (2006), pemulihan ekonomi setelah “deglobalisasi perang dunia” dimulai pada tahun 1973 dan diikuti oleh fase globalisasi politik setelah runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989. Hal ini berkontribusi pada konsolidasi globalisasi sebagai sebuah “konsep inti” dalam imajinasi sosial akhir abad kedua puluh.

Sistem dunia tentunya menjadi lebih terintegrasi dalam gelombang globalisasi terkini. Tingkat integrasi ekonomi yang tinggi saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan puncaknya pada abad ke-19, namun kita juga harus ingat bahwa gelombang globalisasi selalu diikuti oleh periode deglobalisasi di mana interaksi jarak jauh berkurang, dan hal ini kemungkinan besar akan menurun. juga berlaku untuk masa depan meskipun sebagian besar analis menganggap hal ini sulit untuk dibayangkan.

Dalam sebuah wawancara pada tahun 2014 yang diberikan pada edisi khusus Globalisasi yang diedit oleh Manfred B. Steger dan Paul James, Jonathan Friedman berpendapat bahwa dunia sedang menuju fase deglobalisasi lainnya dalam hal “penurunan konektivitas.” Bagi Friedman, periode deglobalisasi tersebut disebabkan oleh perubahan dalam sistem global “akibat kemunduran hegemonik dan fragmentasi yang diakibatkannya” (Friedman, 2014). Gelombang deglobalisasi baru-baru ini di era pasca-Perang Dingin dipicu oleh penghematan yang dilakukan Amerika Serikat dan persaingan geostrategis dan geo-ekonominya dengan kekuatan-kekuatan yang sedang berkembang di Asia serta krisis legitimasi tatanan dunia liberal pasca-1945. Selain itu, Krisis Ekonomi Dunia pada tahun 2008, kebangkitan populisme, penghematan yang dilakukan AS, Brexit, keretakan transatlantik yang semakin dalam, perang dagang, dan pandemi COVID-19 dapat dilihat sebagai akselerator gelombang deglobalisasi saat ini.

Upaya periodisasi historis deglobalisasi masih memiliki kelemahan karena sifat globalisasi yang beragam dan kompleks. Misalnya, Joseph S. Nye Jr. (2009) mengingatkan pembaca bahwa meskipun globalisasi ekonomi meningkat pada era pasca-Perang Dingin, pada saat yang sama terjadi deglobalisasi di sektor militer karena berkurangnya penempatan pasukan di luar negeri. Demikian pula, Florian Haelg (2020) mencatat bahwa setelah krisis keuangan tahun 2008, integrasi perdagangan menurun dan globalisasi ekonomi mengalami stagnasi, sedangkan globalisasi sosial, politik, dan keuangan mengalami kemajuan. Oleh karena itu, sifat globalisasi yang multidimensi dan kompleks perlu ditanggapi dengan lebih serius ketika mencoba mengukur tingkat deglobalisasi saat ini.

5.3 PENDEKATAN METODOLOGI DEGLOBALISASI

Wacana deglobalisasi yang ada saat ini didukung oleh pendekatan positivis yang cenderung mereduksi globalisasi ke dimensi ekonominya. Ketika mengukur penurunan perdagangan dunia dan aliran modal serta menekankan meningkatnya proteksionisme, perang mata uang, dan sanksi, banyak yang menyatakan bahwa deglobalisasi akan segera terjadi. Misalnya, Hag-Min Kim dkk. (2020) menyatakan bahwa deglobalisasi dapat diperkirakan dengan menurunnya porsi impor terhadap produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Hal ini terutama berfokus pada peningkatan hambatan tarif dan non-tarif impor yang diberlakukan oleh negara-negara maju. Untuk mengukur deglobalisasi, banyak ahli fokus pada penurunan tingkat saling ketergantungan perdagangan, aliran modal, dan migrasi. Oleh karena itu, ekspor barang dunia sebagai bagian dari PDB dunia dan investasi asing langsung sebagai bagian dari PDB dunia merupakan indikator empiris penting dari deglobalisasi. Keluarnya perusahaan multinasional dari pasar global juga dapat dianggap mencerminkan deglobalisasi. Peningkatan pembatasan peraturan yang dilaporkan oleh Indeks Pembatasan Perdagangan Jasa OECD—seperti batasan ekuitas asing, kewarganegaraan dewan direksi, persyaratan perizinan, merger dan akuisisi lintas batas, pengendalian modal, persyaratan izin kerja, masuknya kuota visa, durasi tinggal orang asing yang memberikan layanan—digunakan sebagai indikator deglobalisasi di sektor perdagangan (BIS Papers, 2018). Namun, data ekonomi memberikan hasil yang beragam mengenai deglobalisasi. Selain itu, penjelasan ekonomi mengenai deglobalisasi “terlalu sempit dari sudut pandang sosiologis” karena mengabaikan “pertukaran budaya, politik dan sosial yang kompleks” (Raab dkk., 2008).

Literatur mengenai deglobalisasi menunjukkan ketidakseimbangan perdagangan, tingkat pengangguran, konflik perdagangan, dan meningkatnya populisme sebagai pendorong utama deglobalisasi. Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempercepat pembatasan pergerakan orang, barang, dan jasa, yang menyebabkan perekonomian global semakin menyusut. Dengan menyelidiki 169 negara, DHL Global Connectedness Index (2018) menekankan bahwa meskipun ada peningkatan tertentu dalam arus internasional setelah Krisis Ekonomi Dunia tahun 2008, hambatan nasional terhadap perdagangan, tindakan keras terhadap investasi asing, dan penolakan terhadap imigrasi masih mengkhawatirkan.

Meskipun Indeks Keterhubungan Global DHL berfokus pada konektivitas dibandingkan globalisasi secara keseluruhan, ada beberapa indeks dan pengukuran globalisasi yang digunakan dalam literatur: Indeks Globalisasi KOF, Indeks Globalisasi A.T. Kearney / Foreign Policy Globalization Index (Kearny / Foreign Policy, 2003), Pusat Studi Indeks Globalisasi dan Regionalisasi (Lockwood & Redoano, 2005), Maastricht Globalization Index (MGI) (Figge & Martens, 2014), dan the Indeks Globalisasi Baru (NGI) (Vujakovic, 2010). Indikator ekonomi yang sering digunakan dalam berbagai indeks globalisasi meliputi: ekspor atau perdagangan, pembayaran dan penerimaan pendapatan, aliran modal dan portofolio, penanaman modal asing langsung, serta aliran dan cadangan keuangan lainnya. Terkait arus manusia, penurunan jumlah migran internasional, pelajar, pengiriman uang, perjalanan, dan pariwisata dapat dianggap sebagai perlambatan globalisasi. Arus informasi melalui teknologi komunikasi merupakan aspek lain dari globalisasi yang dicakup oleh banyak indeks. Oleh karena itu,

perubahan dalam lalu lintas telepon internasional, pengguna dan host Internet, bandwidth Internet, dan arus digital (media sosial dan e-commerce lintas negara) dipelajari untuk lebih memahami fase deglobalisasi saat ini. Selain itu, inovasi teknologi dan perdagangan barang budaya dan jasa pribadi (misalnya berdasarkan merek dagang internasional) tercakup dalam beberapa indeks (de)globalisasi.

Sejak tahun 2002, Indeks Globalisasi KOF menyediakan data mengenai globalisasi yang mencakup hampir setiap negara di dunia dari tahun 1970 hingga 2016. Diperkenalkan oleh Dreher (2006), indeks ini diperbarui (Dreher, Gaston, & Martens, 2008) dan kemudian direvisi (Gygli dkk., 2018). Versi revisinya mengukur globalisasi *de facto* dan *de jure* dengan fokus pada dimensi ekonomi, sosiokultural, dan politik globalisasi. Ia mengkritik pengukuran globalisasi yang mereduksi proses kompleks ke dalam dimensi ekonominya.

Indikator tunggal, yang sering kali mencerminkan keterbukaan, seperti perdagangan sebagai persentase terhadap PDB, sering kali digunakan sebagai proksi globalisasi. Namun globalisasi merupakan konsep multifaset yang mencakup lebih dari sekadar keterbukaan terhadap perdagangan dan arus modal. Hal ini juga mencakup warga negara dari berbagai negara yang berkomunikasi satu sama lain dan bertukar ide dan informasi, atau pemerintah bekerja sama untuk mengatasi masalah politik yang berdampak global. Konsekuensinya, para sarjana perlu memperhitungkan berbagai aspek globalisasi.

Dimensi politik dan militer dalam globalisasi juga dipertimbangkan dalam beberapa indeks. Misalnya, A.T. Kearney / Foreign Policy Globalization Index menilai perubahan dalam keterlibatan politik suatu negara dengan melihat, misalnya, keanggotaan mereka dalam organisasi internasional, ratifikasi perjanjian multilateral, dan kontribusi mereka terhadap anggaran dan misi PBB. Selain itu, jumlah kedutaan asing dan organisasi non-pemerintah internasional dijadikan sebagai indikator empiris globalisasi politik. Terakhir, globalisasi militer sering kali diukur dengan perubahan pengerahan kekuatan militer dan kontribusinya terhadap operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

Selain itu, Iliana Olivié dan Ignacio Molina (2011) memperkenalkan Elcano Global Presence Index, yang mengukur proyeksi internasional 120 negara dalam hal ekonomi, militer, dan lunak (migrasi, pariwisata, budaya, olahraga, informasi, pendidikan, sains, teknologi), kerjasama pembangunan) kehadiran. Mereka menyimpulkan bahwa “dunia tidak sedang mengalami proses de-globalisasi. Globalisasi telah melambat sejak awal dekade ini, namun mengalami penurunan hanya dalam dua tahun (-0,7% pada tahun 2014 dan -1,4% pada tahun 2015) dan kini mulai pulih” (Olivié & Gracia, 2020). Mereka berpendapat bahwa globalisasi ekonomi telah melambat dalam satu dekade terakhir, namun yang mencolok adalah perubahan sifat globalisasi: dimensi lembut globalisasi telah menjadi pendorong utama fase globalisasi saat ini.

Indeks alternatifnya adalah GlobalIndex karya Marcel Raab et al. (2008), yang berupaya menambahkan faktor sosiologis tentang konvergensi norma dan nilai lintas negara seperti hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk mencakup dimensi ekonomi, siosoteknologi, politik, dan budaya globalisasi pada saat yang bersamaan. GlobalIndex mengkritik Indeks Globalisasi KOF karena mengabaikan indikator proksi globalisasi

sosioteknologi seperti penyebaran telepon rumah dan telepon seluler secara internasional dan bahasa Inggris sebagai lingua franca, serta impor dan ekspor buku atau majalah. Dalam hal ini, versi revisi Indeks Globalisasi KOF lebih baik. Namun, hal ini masih ditemukan kekurangan dalam mengukur globalisasi budaya. Meskipun laporan ini memasukkan waralaba McDonald's dan IKEA sebagai indikator proksi globalisasi budaya, laporan ini gagal memasukkan indikator lain yang berkaitan dengan konvergensi norma dan nilai lintas negara, termasuk “hak atas pendidikan, pentingnya pendidikan sebagai faktor produksi, penyebaran penyakit hak asasi manusia, kesetaraan gender, peningkatan urbanisasi dan peningkatan tertiarisasi sebagai nilai dan standar yang dimiliki bersama secara global” (Raab dkk., 2008).

Selain itu, Indeks Globalisasi Budaya Randolph Kluver dan Wayne Fu (2004) bertujuan untuk mengukur penyebaran nilai-nilai dan gagasan budaya. Namun, mereka menggunakan impor dan ekspor buku, brosur, surat kabar, dan majalah sebagai indikator proksi globalisasi budaya karena indikator lain yang mungkin ada tidak memiliki sumber data yang sistematis. Akibatnya, analisis mereka menekankan pentingnya negara-negara maju berbahasa Inggris dalam globalisasi budaya, dengan mengorbankan dimensi globalisasi budaya non-Barat.

Selain bias yang berpusat pada Barat, pilihan sewenang-wenang dan subyektif yang mendasari konstruksi indeks tersebut telah dikecam oleh beberapa pakar:

1. Penilaian dibuat mengenai ‘variabel relevan’ yang harus dimasukkan dalam indeks.
2. Pengukuran kuantitatif terhadap variabel-variabel ini dilakukan—dalam hal ini, batasan data menjadi penting.
3. Pengukuran kuantitatif ini dinormalisasi, untuk mengatasi masalah bahwa variabel yang berbeda biasanya diukur dalam satuan yang berbeda sehingga dapat menghasilkan nilai numerik yang sangat berbeda.
4. Jumlah tertimbang dari variabel-variabel yang dinormalisasi dihitung, yang memberikan skor numerik untuk setiap negara.

Sulit untuk mengesampingkan nilai-nilai pribadi, budaya, dan nilai-nilai lainnya, yang dapat menimbulkan bias dalam konstruksi indeks globalisasi. Terlebih lagi, indikator komposit yang digunakan oleh indeks-indeks tersebut hanyalah perkiraan terhadap fenomena kompleks terkait globalisasi. Keputusan apriori peneliti mengenai dimensi globalisasi apa yang akan dipelajari dan diprioritaskan secara langsung mempengaruhi analisis. Secara khusus, kecenderungan untuk mengukur perubahan tingkat konektivitas global harus dilengkapi dengan analisis mendalam mengenai kesadaran global. Namun, bagaimana mengukur kesadaran seseorang terhadap eksistensi globalnya masih menjadi tantangan.

Indeks Kearney / Foreign Policy Globalization mengukur hasil globalisasi dibandingkan kebijakan utama terhadap interaksi global (Lockwood, 2004). Misalnya, daripada menggunakan nilai total perdagangan sebagai persentase PDB untuk mengukur keterbukaan perdagangan, fokus pada kebijakan perdagangan seperti hambatan tarif dan non-tarif terhadap perdagangan yang diberlakukan oleh pemerintah nasional lebih masuk akal karena hasilnya ditentukan oleh kondisi ekonomi spesifik suatu negara, karakteristik demografi, dan geografis. Namun, kebijakan nasional mengenai aspek non-ekonomi globalisasi tidak dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu perlu untuk mengembangkan studi interdisipliner

yang mengadopsi metodologi campuran yang merekonsiliasi penelitian kuantitatif dan kualitatif mengenai globalisasi.

Ada juga kebutuhan untuk melampaui nasionalisme metodologis, yang membatasi pemahaman yang lebih baik tentang globalisasi sebagai proses multiskalar yang terjadi tidak hanya di tingkat negara-bangsa tetapi juga di berbagai wilayah (misalnya kota), suprateritorial (misalnya planet), dan ranah nonspasial (misalnya kelas dan gender). Terdapat upaya-upaya tertentu untuk melampaui nasionalisme metodologis dalam indeks globalisasi dengan memperkenalkan Indeks Globalisasi Berbasis Manusia dan Indeks Kota Global oleh A.T. Kearney (2018). Marco Caselli mengakui bahwa sulit untuk mengoperasionalkan beberapa tema yang ingin dicakup oleh Indeks Globalisasi Berbasis Manusia yang diusulkannya—sumber daya individu dan kemampuan untuk beroperasi dalam skenario global; mobilitas dalam domain global; rasa memiliki terhadap komunitas global; paparan dan partisipasi dalam arus komunikasi massa global; dan tingkat kesadaran global.

Indeks Kota Global Kearney berupaya mengukur tingkat keterlibatan global dari 156 kota dalam lima dimensi: aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik. Indeks ini berfokus pada faktor-faktor seperti dinamika pasar kota, tingkat pendidikan, akses informasi, pilihan budaya dan hiburan, dan kehadiran organisasi masyarakat internasional. Yang terakhir, banyak arus modal, perdagangan, dan manusia saat ini terjadi di dalam wilayah dibandingkan antar wilayah. Oleh karena itu, deglobalisasi berarti lebih sedikit interaksi antar kawasan namun lebih banyak interaksi regional. Berdasarkan latar belakang sejarah, status sosial ekonomi, dan kondisi kelembagaan yang berbeda-beda, wilayah-wilayah tersebut terkena dampak globalisasi secara berbeda dan tidak merata. Pengukuran deglobalisasi perlu mempertimbangkan perbedaan analitis antara regionalisme (atau internasionalisasi) dan globalisasi. Namun, data mengenai satuan teritorial alternatif seperti penduduk, kota, dan wilayah masih langka karena masih berlakunya negara-sentrisme dalam menentukan unit utama analisis. Oleh karena itu, persoalan deglobalisasi masih menjadi tantangan metodologis yang serius bagi mereka yang ingin memahami karakter globalisasi yang kompleks dan multidimensi.

Sebagai Pengganti Kesimpulan

Bab ini telah merangkum kecenderungan-kecenderungan utama dalam mendefinisikan dan mengukur deglobalisasi saat ini. Sebagai sebuah proyek, deglobalisasi masih jauh dari membawa kesetaraan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Mengingat ketidakpastian mengenai dampak deglobalisasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, tidak mudah untuk menganggap deglobalisasi sebagai penyelamat negara. Beberapa pakar menentang optimisme mengenai deglobalisasi:

Kami tidak percaya bahwa deglobalisasi akan menghasilkan tatanan global yang lebih adil, terlepas dari apakah gagasan ini mengacu pada penghentian semua atau sebagian besar bentuk kerja sama internasional, atau ditinggalkannya sistem perdagangan multilateral dan digantikan dengan perdagangan bilateral. hubungan dimana negara-negara yang paling kuat mempunyai kemampuan terbaik untuk mengamankan kepentingan mereka.

Selain itu, deglobalisasi tidak selalu berarti lokalisasi atau swasembada lokal. Hal ini mempercepat munculnya dan konsolidasi blok-blok regional dengan mengorbankan kedaulatan nasional dan otoritas lokal. Juga menyesatkan jika menyamakan deglobalisasi dengan dekolonisasi atau “decentering” Barat. Deglobalisasi tidak bisa dianggap sebagai fenomena anti-Barat atau antiglobalis. Jarrod Hayes dan Katja Weber (2021) berpendapat bahwa deglobalisasi lebih merupakan perubahan lingkungan operasional aktor internasional dibandingkan membalikkan globalisasi. Deglobalisasi sering disamakan dengan reglobalisasi. Tingkat saling ketergantungan antara teknologi dan produksi dunia saat ini menghalangi deglobalisasi atau swasembada lokal sepenuhnya. Sistem ini rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Keruntuhan akan membawa kesengsaraan yang lebih dalam dan lebih luas daripada yang dialami oleh mereka yang paling miskin saat ini. Reglobalisasi, bukan deglobalisasi, diperlukan, dan hal ini dapat dicapai dengan cara yang memberikan kontrol lokal yang besar, termasuk otonomi bagi masyarakat adat.

Kritik yang didasari secara sosiologis terhadap kondisi deglobalisasi yang ada menekankan sifat proses globalisasi yang kompleks dan tidak merata. Dalam konteks ini, walaupun globalisasi telah melambat di beberapa sektor, namun globalisasi telah mengalami percepatan di sektor-sektor lain. “Deglobalisasi bisa saja terjadi di beberapa tingkat, sementara re-globalisasi semakin intensif di tingkat lain” (Featherstone, 2020). Misalnya, Steger dan James (2019) menekankan bahwa “globalisasi tanpa tubuh”—dalam hal aliran ide, teks elektronik, materi audiovisual, dan mata uang digital melintasi batas negara—semakin cepat, sedangkan keduanya “mewujudkan globalisasi” —aliran manusia, termasuk pekerja, migran, dan pengungsi—dan “globalisasi yang diperluas objek” (sirkulasi barang) semakin menghadapi pembatasan nasional. Hayes dan Weber (2021) melaporkan bahwa:

Sehubungan dengan komponen teknologi fisik dalam globalisasi, sebagian besar deglobalisasi tidak terjadi. Teknologi fisik yang mendasari globalisasi—perjalanan udara massal, pengiriman peti kemas, proyek infrastruktur berskala besar (bendungan, jalur kereta api, pelabuhan, perkebunan kelapa sawit) yang dimungkinkan oleh arus keuangan yang terdigitalisasi dan mengglobal, serta revolusi ICT—tidak berkurang. Memang benar, pertumbuhan konektivitas internet terus berlanjut, meningkatkan potensi perluasan intensitas dan cakupan proses globalisasi.

Mengacu pada konsep “deglobalisasi fisik” (Livesey, 2017), Steger dan James (2020) mengingatkan kita bahwa “sisi lain dari 'deglobalisasi' adalah 'reglobalisasi', yaitu penataan ulang secara mendalam formasi konstituen yang bergerak dengan kecepatan berbeda dan pada tingkat intensitas berbeda.” Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa globalisasi adalah sebuah proses yang “berbatasan dengan sendirinya” dalam arti bahwa globalisasi melibatkan integrasi dan fragmentasi atau “universalisasi yang partikular” dan “partikularisasi yang universal” pada saat yang bersamaan (Robertson, 1995). Dalam hal ini, masuk akal untuk berpendapat bahwa globalisasi pada dasarnya melibatkan dinamika deglobalisasi, atau bahkan “gelombang” yang membentuk pemerintahan global. Oleh karena itu, “deglobalisasi

dan globalisasi merupakan fenomena sistemik global” (Friedman, 2014). Oleh karena itu, dari sudut pandang kritis, mendefinisikan deglobalisasi sebagai akhir atau pembalikan globalisasi adalah sebuah pernyataan yang berlebihan, atau bahkan sebuah mitos.

BAB 6

TRANSFORMASI STRUKTURAL TERKINI DALAM RUANG PUBLIK GLOBAL

Bab ini menawarkan sketsa tentang apa yang penulis sebut sebagai teori globalisasi versi “mestizo/dekolonial”. Argumennya adalah jika kita hidup di dunia yang terglobalisasi, hal ini disebabkan karena dunia juga pernah terjajah, yaitu penjajahan adalah salah satu kekuatan globalisasi yang paling kuat dan tertua. Kemudian, bab ini membahas peran apa yang disebut oleh Jürgen Habermas sebagai kategori borjuis dalam “ruang publik” di era globalisasi. Dua pertanyaan penting adalah: Bagaimana konsep “ruang publik” berhubungan dengan globalisasi? Jika kita bisa bicara tentang masyarakat dunia yang sebagiannya diciptakan oleh proses globalisasi, bisakah kita juga bicara soal bangkitnya ruang publik global? Dalam konteks ini, pertanyaan kedua muncul: di era ruang publik dunia, dapatkah kita terus membicarakan dimensi rasional dan rasionalisasi ruang publik sebagai ruang sosial/politik/budaya/ekonomi yang di dalamnya terdapat sesuatu seperti “opini publik” dapat, dapat, seharusnya diinginkan atau dimiliki? Bagian terakhir menawarkan analisis mengenai “transformasi struktural terkini” dalam ruang publik dengan berfokus pada dampak kebangkitan “media sosial” dan “teknologi komunikasi” baru serta dampaknya terhadap politik.

6.1 BAGAIMANA KITA TERLALU GLOBALISASI ATAU TIDAK CUKUP

Adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan bersifat misantropis jika tidak menyebutkan apa yang telah terjadi selama penulisan bab ini. Ada banyak hal yang harus dikedepankan. Pertama, pandemi COVID-19, yang telah merenggut nyawa lebih dari enam juta orang, lebih dari satu juta jiwa terjadi di Amerika Serikat saja, saat tulisan ini dibuat. Pandemi ini berawal dari krisis kesehatan global yang kemudian berkembang menjadi krisis sistemik global, yang berdampak pada perekonomian, politik, produksi pangan, dan transportasi. Kedua, adanya latar belakang krisis perubahan iklim global yang tiada henti, yang terus memanifestasikan dirinya dalam bentuk cuaca yang semakin bergejolak dan merusak. Dua konsekuensi utama dari cuaca buruk ini adalah krisis pangan dan meningkatnya pengungsi akibat perubahan iklim, baik antar negara maupun dalam negara. Ketiga, pada tahun 2021 ketika kita akhirnya menyaksikan penarikan pasukan AS dari Afghanistan, setelah perang selama dua puluh tahun yang tampaknya tidak menghasilkan apa-apa (karena kemajuan yang dicapai di sana telah dicabut dan dibubarkan oleh rezim baru), Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Dalam kedua kasus tersebut, krisis kemanusiaan baru telah terjadi. Di Afghanistan, negara ini telah mundur ke masa lalunya yang biadab, khususnya dengan melancarkan gelombang baru kekerasan terhadap perempuan. Invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan banyaknya warga sipil yang tewas, dan hal ini juga menimbulkan gelombang guncangan terhadap perekonomian global, terutama pada rantai pasok pangan, yang diperkirakan akan menimbulkan dampak buruk bagi negara-negara yang bergantung pada

Ukraina. pupuk, biji-bijian, dan minyak. Keempat, seiring dengan semakin terintegrasinya dunia, saling bergantung, dan rentan secara global, kita melihat munculnya populisme sayap kanan, nativis, dan xenofobia yang baru, atau tidak terlalu baru, baik di negara maju maupun berkembang.

Dekade terakhir, dan khususnya setengah dekade terakhir, telah menjadi panggung bagi badai global yang sempurna: pandemi global, guncangan besar terhadap perekonomian nasional dan global, krisis kemanusiaan baru dengan berakhirnya permusuhan di satu tempat dan permulaan yang parah di tempat lain. Dan sebagai obat yang lebih buruk dari penyakit, kita mengalami kebangkitan nasionalisme antiglobalis. Dapat dikatakan bahwa krisis-krisis ini menunjukkan betapa globalisasi merupakan fakta yang menentukan dalam dunia modern kita. Pandemi COVID-19 adalah produk sampingan dari globalisasi pasar kerja dan komoditas. Cara kita mengatasinya atau gagal merupakan indikator jaringan global. Namun, kita juga harus menyoroti bahwa krisis kesehatan global dikelola di tingkat nasional. Bahkan Uni Eropa tidak mempunyai langkah-langkah kesehatan yang konsisten atau umum. Di Amerika Serikat, situasinya bahkan lebih buruk lagi, karena setiap kebijakan kesehatan dipolitisasi untuk semakin memanas polarisasi politik yang sudah memanas. Fakta bahwa kita belum mencapai tujuan untuk memvaksinasi 70 persen populasi global terhadap virus corona merupakan indikasi keberhasilan dan kegagalan globalisasi, sementara penyebaran virus di seluruh dunia menunjukkan seberapa besar kita telah terglobalisasi. Negara-negara berkembang khususnya sangat terpukul oleh pandemi ini (contohnya India) karena kurangnya akses terhadap vaksin (yang dapat diandalkan). Jadi, bisa dikatakan bahwa hal ini menunjukkan betapa buruknya globalisasi yang kita miliki. Dan ketika perekonomian global mulai pulih dari guncangan pandemi COVID-19, setelah krisis ekonomi global pada tahun 2008–2009, invasi Rusia ke Ukraina telah memicu krisis ekonomi global lainnya, yang sebagian dipicu oleh ketidakpastian dalam perekonomian. pasokan bahan bakar—apakah itu gas, minyak, atau listrik. Sekali lagi, kita terlalu terglobalisasi, atau tidak cukup, sehingga krisis seperti ini terus terulang. Kembalinya, kebangkitan, dan metastasis populisme ke dalam politik xenofobia dan rasis yang fanatik adalah fenomena global yang harus dilihat sebagai respons terhadap globalisasi. Karena alasan inilah banyak pemimpin populis memandang diri mereka sebagai antiglobalis.

Berikut ini dan dengan latar belakang pandangan global yang suram ini, yang diakibatkan oleh kekuatan globalisasi dan antiglobalisasi, saya ingin mempertimbangkan bagaimana kita harus memikirkan kembali “globalisasi”, baik sebagai bentuk teori maupun sebagai fakta dari sistem dunia modern kita. Pada bagian berikut, saya akan menawarkan sketsa tentang apa yang saya sebut sebagai teori globalisasi versi “mestizo/dekolonial”. Argumen yang ada adalah jika kita hidup di dunia yang terglobalisasi, hal ini disebabkan karena dunia juga pernah terjajah, artinya penjajahan adalah salah satu kekuatan globalisasi yang terkuat dan tertua. Kemudian, saya akan membahas peran yang disebut oleh Jürgen Habermas sebagai kategori borjuis dalam “ruang publik” di era globalisasi. Ada dua pertanyaan besar yang memotivasi bagian ini. Ada yang bertanya: bagaimana konsep “ruang publik” selaras atau tidak dengan globalisasi? Jika kita dapat berbicara mengenai masyarakat

dunia yang sebagiannya diciptakan oleh proses globalisasi, dapatkah kita juga berbicara mengenai kebangkitan ruang publik global? Dalam konteks ini, yang sebagian terjadi melalui konfrontasi antara dua pemikir ruang publik, yaitu Habermas dan Niklas Luhmann, muncul pertanyaan kedua: di era yang diduga sebagai ruang publik dunia, dapatkah kita juga terus berbicara tentang rasional dan rasio? - menyempurnakan dimensi ruang publik sebagai ruang sosial/politik/budaya/ekonomi di mana sesuatu seperti “opini publik” dapat, dapat, harus diinginkan atau dimiliki? Pada bagian terakhir, saya beralih ke apa yang baru-baru ini disebut Habermas sebagai “transformasi struktural baru” ruang publik dengan berfokus pada dampak kebangkitan “media sosial” dan “teknologi komunikasi” baru serta dampaknya terhadap politik. (Habermas, 2021). Saya berpendapat bahwa “media sosial” yang lebih baru memiliki dampak yang menguntungkan dan konsekuensi yang merusak, khususnya bagi musyawarah publik, penentuan nasib sendiri secara demokratis, dan non-dominasi. Dampaknya merupakan konsekuensi dari kekuatan globalisasi dan antiglobalisasi.

6.2 GLOBALISASI MESTIZO/DEKOLONIAL

Literatur mengenai globalisasi, atau lebih tepatnya, jika kita berbicara bersama dengan Manfred B. Steger (2008), globalisme, terlalu luas dan kaya untuk mencoba menjelaskan sesuatu yang bermakna dalam satu bab. Paling banter, seseorang dapat mencoba menggunakan tipologi teori globalisasi, yang memungkinkan kita untuk mulai memahami konsep dan asumsi yang mendasari beberapa teorisasi globalisasi. Dalam Transformasi Global: Politik, Ekonomi dan Budaya yang penting dan masih sangat diperlukan, dari tahun 1999, David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, dan Jonathan Perraton membuka dengan menawarkan tipologi posisi berbeda yang mungkin dianut oleh berbagai teoritikus globalisasi, atau apa yang mereka sebut “kecenderungan”: kaum hiperglobalis, kaum skeptis, dan kaum transformasionalis (Held et al., 1999). Di halaman 10 pendahuluan, mereka memberi kita bagan yang sangat berguna untuk memahami kecenderungan yang mereka identifikasi.

Bagan ini dapat dibaca dengan sendirinya, namun dari sini saya pikir penting untuk menyoroti tiga baris: pertama, kekuatan pendorong globalisasi; kedua, lintasan sejarah; dan ketiga, argumen ringkasan. Bagi kaum hiperglobalis, kekuatan pendorong utama globalisasi adalah apa yang kita sebut “teknokapitalisme,” yang saya maksudkan adalah ekspansi kapitalis didasarkan pada penciptaan pasar dan teknologi baru untuk mengeksploitasi tenaga kerja guna memaksimalkan akumulasi kapitalis. Bagi mereka yang skeptis, walaupun ada kecenderungan untuk menciptakan pasar transnasional dan global, pasar-pasar ini masih terikat pada negara-bangsa. Jika bagi kaum hiperglobalis negara-negara melayani kapitalisme global, bagi kaum skeptis, pasar dan modal tetap bergantung dan tunduk pada negara-bangsa. Bagi kaum transformasionalis, baik pasar maupun negara bukanlah satu-satunya kekuatan yang menyatukan kita: ada kebangkitan media global dan “republik sastra global,” baik nasional maupun transnasional, dan bisa dikatakan “imperial” dan “imajinasi postimperial,” “kolonial” dan “postkolonial” (Aschcroft, 2002) yang memungkinkan kita membayangkan diri kita sebagai anggota “komunitas yang dibayangkan” (Anderson, 1991). Bagi kaum transformasionalis, tidak ada satu pun agen atau vektor globalisasi.

Tabel 6.1 Konseptualisasi Globalisasi: Tiga Kecenderungan

	Hiperglobalis	Skeptis	Transformasionalis
Apa yang baru?	Era global	Blok perdagangan, geogovernance yang lebih lemah dibandingkan periode sebelumnya	Tingkat keterhubungan global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah
Fitur yang dominan	Kapitalisme global, pemerintahan global, masyarakat sipil global	Dunia tidak lagi saling bergantung dibandingkan pada tahun 1890-an	Globalisasi yang “tebal” (intensif dan ekstensif).
Kekuasaan pemerintah nasional	Menurun atau terkikis	Diperkuat atau ditingkatkan	Dibentuk kembali, direstrukturisasi
Kekuatan pendorong globalisasi	Kapitalisme dan teknologi	Negara bagian dan pasar	Gabungan kekuatan modernitas
Pola stratifikasi	Erosi hierarki lama	Meningkatnya marginalisasi di wilayah Selatan	Arsitektur baru tatanan dunia
Motif dominan	McDonalds, Madonna, dll.	Kepentingan nasional	Transformasi komunitas politik
Konseptualisasi globalisasi	Sebagai penataan kembali kerangka tindakan manusia	Seperti internasionalisasi dan regionalisasi	Sebagai penataan kembali hubungan antardaerah dan tindakan jarak jauh
Lintasan sejarah	Peradaban global	Blok regional/benturan peradaban	Tak tentu: integrasi dan fragmentasi global
Argumen ringkasan	Akhir dari negara-bangsa	Internasionalisasi bergantung pada persetujuan dan dukungan negara	Globalisasi mengubah kekuasaan negara dan politik dunia

Terkait dengan deretan “lintasan sejarah”, bagi kaum hiperglobalis, globalisasi berarti kebangkitan peradaban global yang didorong oleh komersialisasi dan komodifikasi, di mana segala sesuatu dan setiap orang telah distandarisasi: semua bandara terlihat sama, begitu pula semua bandara mal. Bagi mereka yang skeptis, lintasan sejarah dapat dipahami sejalan dengan Clash of Clash of yang agresif karya Samuel P. Huntington.

Peradaban, paling buruk, atau kebangkitan blok-blok regional: Amerika, Uni Eropa, Eropa Timur atau sisa-sisa Uni Soviet, dan perekonomian-perekonomian di Timur di bawah naungan Tiongkok yang dapat dianggap sebagai blok Asia, dan segera. Bagi kaum transformasionalis, lintasan sejarah adalah salah satu dari apa yang disebut “glokalisasi”, yaitu konstruksi efek global di lokalitas dan wilayah yang berbeda. Bisa dikatakan bahwa bagi kaum transformasionalis, globalisasi menghasilkan yang lokal dan yang lokal menghasilkan global, sehingga mengarah pada integrasi dan fragmentasi. Yang terakhir, sehubungan dengan perselisihan mengenai “argumen ringkasan”: kaum hiperglobalis melihat berakhirnya negara-

bangsa, dan bangkitnya perekonomian dunia; kelompok skeptis berpendapat mengenai ketahanan dan bahkan kemerosotan negara-bangsa dan bahkan terputusnya hubungan mereka dari jaringan ekonomi global; kaum transformasionalis berpendapat bahwa globalisasi telah memunculkan bentuk-bentuk pemerintahan baru, yang mengarah pada transformasi kekuasaan negara di bawah pengawasan rezim global hak asasi manusia dan hukum internasional.

Saya telah menyoroti ketiga baris tersebut karena dengan melakukan hal ini kita dapat melihat bahwa perbedaan ketiga “kecenderungan” ini, sebagaimana diidentifikasi oleh penulis, berkaitan dengan kekuatan ekonomi, politik, dan budaya, dan bagaimana kekuatan-kekuatan ini diproyeksikan, baik dari atas atau dari bawah, dan dengan jangkauan apa, baik secara horizontal, lintas negara dan benua, atau hanya vertikal dalam negara dan wilayah. Dengan kata lain, ketiga kecenderungan ini berkaitan dengan keutamaan apa yang Anda berikan pada bidang ekonomi, politik, dan budaya. Meskipun tipologi ini bermanfaat, saya berpendapat bahwa tipologi ini memerlukan kolom keempat, atau “tendensi,” yang saya sebut sebagai tendensi “mestizo/dekolonial”, yang mencakup para pemikir pascakolonial dan dekolonial yang telah mengembangkan teori ini. Kritik mereka terhadap globalisasi Euro-Amerika dan teoritikus globalis mereka. Tambahan saya terhadap tipologi Held, McGrew, Goldblatt, dan Perraton, serta mengikuti bagan berguna mereka, mungkin terlihat seperti ini:

Dalam tipologi saya mengenai para globalis, atau para ahli teori globalisasi, para ahli teori “mestizo/dekolonial” bukanlah seorang hiperglobalis yang fasih atau seorang yang skeptis dan pesimistis, dan terlebih lagi, para penganut teori transformasional (Pollyannaish), yang berpikir bahwa globalisasi selalu membawa kebaikan bagi semua orang, termasuk negara-negara bekas jajahan. Hal ini merupakan koreksi yang sangat diperlukan terhadap semua teori bagus yang telah dilakukan mengenai globalisasi yang sampai saat ini belum memperhitungkan peran penjajahan di apa yang disebut “Dunia Baru,” yaitu Amerika, dalam sebuah dunia baru. sistem. Dalam pengantar bukunya Held, McGrew, Goldblatt, dan Perraton mengidentifikasi lima sumber utama perdebatan di antara para ahli teori globalisasi:

1. Konseptualisasi;
2. Sebab-Akibat;
3. Periodisasi;
4. Dampak; Dan
5. Lintasan Globalisasi (Held Et Al., 2000).

Tabel 6.2 Mestizo: Globalis Dekolonial

	Mestizo/Globalis Dekolonial
Apa yang baru?	Sistem Global/Modern/Kolonial
Fitur yang dominan	Integrasi ekonomi/politik/budaya/linguistik yang terjerat, simultan, intensif dan ekstensif
Kekuasaan pemerintah nasional	Pemerintahan bawahan, pemerintahan nasional boneka, atau pemerintahan hipernasional sebagai respons terhadap dekolonisasi dan imperialisme yang sedang berlangsung

Kekuatan pendorong globalisasi	Integrasi terdiferensiasi yang berlapis-lapis dan tidak sinkron, di mana globalisasi dari atas dilawan dengan glokalisasi dan akulturasi lokal
Pola stratifikasi	Tatanan pemerintahan global yang baru dan kolonialitas kekuatan politik Euro-Amerika yang dilawan oleh rezim hak asasi manusia global yang baru dan terlokalisasi
Motif dominan	Kolonialitas semua kekuatan (ekonomi, politik, budaya, dan sosial)
Konseptualisasi globalisasi	Penataan kembali dan integrasi sistem regional ke dalam sistem dunia yang bersifat kolonial/global/modern
Lintasan sejarah	Ketergantungan yang bertahan lama dalam integrasi dan glokalisasi yang berkembang
Argumen ringkasan	Globalisasi adalah fakta dalam sejarah dunia, namun globalisasi mulai mencapai proporsi global pada abad keenam belas dengan integrasi Amerika dan Afrika melalui penaklukan benua Amerika dan bangkitnya perdagangan budak dan sistem perkebunan—suatu hal yang sering terjadi. faktor yang diabaikan dalam globalisasi dunia.

Bagi para pemikir mestizo/dekolonial yang berteori globalisasi, hal ini berarti memikirkan tentang apa yang disebut Quijano sebagai “matriks kekuasaan kolonial”, yaitu cara sistem dunia yang dikonfigurasi oleh penaklukan Amerika dan pembentukan negara-negara Amerika. perdagangan budak global memunculkan kekuatan baru globalisasi (Quijano, 2008). Oleh karena itu, bagi mereka, tidak ada penyebab tunggal, namun merupakan kumpulan institusi yang memberi kita Sistem Global/Modern/Kolonial.

Konsekuensinya, bagi mereka, menara waktu global (yaitu, bagaimana kronologi kebangkitan sistem global modern harus ditemporalisasikan) harus ditetapkan pada abad ke-16, masa yang disebut penemuan/penemuan benua Amerika. Bagi para pemikir global mestizo/dekolonial, dampaknya memang bersifat global, berulang, dan bertahan lama, serta mengubah seluruh dunia. Dalam kaitannya dengan lintasan, seperti yang saya kemukakan di atas, bagi kelompok pemikir ini, lintasannya lebih bersifat globalisasi (saling ketergantungan) dan lebih banyak glokalisasi (integrasi yang terdiferensiasi), atau mestizaje dan kreolisasi.

Di atas, saya tunjukkan alasan saya menyoroti tiga baris tipologi globalis Held, McGrew, Goldblatt, dan Perraton, yaitu karena ketiga baris tersebut memungkinkan kita melihat apa yang saya sebut tiga bentuk kekuasaan: ekonomi, politik, dan budaya. Argumen saya adalah bahwa para pemikir global mestizo/dekolonial memungkinkan kita melihat dimensi lain dari kekuasaan, yaitu kolonialitasnya, yang oleh Quijano disebut sebagai “kolonialitas kekuasaan.” Ini berarti bahwa semua kekuasaan, baik ekonomi, politik, atau budaya, ditanamkan, diartikulasikan, diteleskop, dan diedarkan melalui jaringan, ketergantungan, dan pelepasan yang kita warisi dari penjajahan globalisasi dan globalisasi kolonial.

6.3 BIDANG PUBLIK, KOMUNITAS YANG DIBAYANGKAN, DAN PENDAPAT PUBLIK

Dalam *The Coming of the Book: The Impact of Printing, 1450–1800* yang mengesankan, Lucien Febvre dan Henri-Jean Martin mendokumentasikan bagaimana buku menjadi “kekuatan perubahan” pada abad keenam belas (Febvre & Martin, [1976] 2010). Buku mereka

bisa saja diberi judul Revolusi Buku. Saat mereka menulis: “Dengan asumsi jumlah cetakan rata-rata tidak lebih dari 500, maka sekitar 20 juta buku telah dicetak sebelum tahun 1500, suatu jumlah yang mengesankan jika dibandingkan dengan standar abad ke-20, dan terlebih lagi jika kita mengingat bahwa Eropa pada masa itu adalah jauh lebih sedikit penduduknya dibandingkan sekarang”. Kemudian, mereka kemudian menambahkan dalam bab yang sama, “Tetapi intinya adalah bahwa pada abad ke-16 buku cetak telah diproduksi dalam jumlah yang cukup sehingga dapat diakses oleh siapa saja yang mampu membaca”. Dalam bukunya yang berjudul *The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making* (Sifat Buku: Cetak dan Pengetahuan dalam Pembuatan), Adrian Johns menawarkan salah satu sejarah paling mengesankan mengenai dampak “buku” terhadap budaya Inggris, dengan fokus khusus pada London. Febvre dan Martin berpendapat bahwa penyebaran dan komersialisasi buku memungkinkan terjadinya penyebaran pengetahuan ilmiah dan perspektif “teologis” baru yang mendorong Reformasi. Argumen mereka adalah bahwa buku yang kini mudah didapat dan terjangkau telah memicu revolusi ilmiah dan agama. Buku abad pertengahan, yang sebagian besar disalin dengan tangan di biara-biara oleh para biarawan, adalah barang mewah, sebagian besar tersedia bagi para pendeta. Pada akhirnya, buku yang disalin dengan tangan digantikan oleh incunabula, buku cetakan paling awal, yang sebagian besar juga diproduksi untuk tujuan keagamaan atau gerejawi. Dengan berkembangnya kertas murah dan percetakan massal, buku dapat disebarluaskan ke berbagai profesi. Buku tidak lagi menjadi alat eksklusif para ulama. Febvre dan Martin mencatat dalam buku mereka bagaimana rasio kepemilikan buku antara pengacara dan pendeta pada dasarnya berubah antara abad kelima belas dan keenam belas. Meskipun penekanan mereka adalah pada buku sebagai “kekuatan” perubahan, penekanan Johns adalah pada apa yang kita sebut sebagai revolusi “epistemik” dalam cara kita mulai memikirkan pengetahuan dan objek pengetahuan yang dibawa oleh buku tersebut. Menurut perkiraan Johns, pengaruh dan penyebaran buku ini membuat kita berpikir bahwa alam adalah sebuah buku, yakni buku tentang alam, yang dapat dibaca dan dibaca oleh semua orang. Buku ini mendemokratisasikan pengetahuan dan epistemologi: pengetahuan dapat diakses oleh semua orang dan semua orang dapat menjadi agen epistemik, atau setidaknya inilah yang diharapkan.

Buku, sebagai komoditas yang diproduksi secara massal, atau seperti yang dikatakan Anderson, “komoditas industri yang diproduksi secara massal dengan gaya modern pertama” (Anderson, 1991), tidak hanya membawa revolusi ilmu pengetahuan dan agama, tetapi juga revolusi politik, sosial, dan politik. yang bisa kita sebut sebagai revolusi kognitif. Sebagaimana dikemukakan oleh Elizabeth L. Eisenstein, buku merupakan salah satu elemen, meskipun merupakan salah satu elemen kunci, dalam “revolusi komunikasi, atau (yang paling eksplisit) pergeseran dari budaya juru tulis ke budaya tipografi” (Eisenstein, 1968). Segala pengetahuan, apa yang dapat diketahui, hendaknya diketahui, akan diketahui, akan dicetak dan tersedia bagi semua orang. Buku ini merupakan elemen penentu dalam revolusi kognitif yang memberi kita dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pencerahan modern. Di atas, buku merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam penciptaan masyarakat pembaca yang mulai

berbagi dunia sastra yang sama, atau apa yang disebut Johns sebagai “kehidupan sastra” (Johns, 1998).

Namun, meskipun buku ini penting dalam revolusi “kognitif” yang melahirkan Sistem Global/Modern/Kolonial, dapat dikatakan bahwa surat kabar bahkan lebih menentukan dan berdampak. Jika buku tersebut mendemokratisasi pengetahuan dan epistemologi, maka surat kabar bahkan lebih efektif dalam “mendemokratisasikan” pengetahuan dan menjadikan “suatu” masyarakat sebagai agen pengetahuan dan “pendapat.” Dengan demikian, surat kabar sangat diperlukan dalam konstitusi “rakyat” bukan sebagai objek kekuasaan politik, namun sebagai “subyek” lembaga politik. Anderson mencatat bahwa surat kabar adalah “bentuk ekstrim” dari buku. Meskipun buku bisa menjadi buku terlaris, jumlah pembacanya terbatas. Mereka mungkin menjadi buku terlaris, tetapi dari pembaca terpilih. Sebaliknya, surat kabar, dulunya hanya sementara, namun tetap ada. Surat kabar memiliki edisi pagi dan akhir, edisi nasional dan internasional, dan hingga saat ini, setidaknya di Amerika Serikat, setiap kota besar memiliki surat kabar lokalnya sendiri. Dengan cara ini, surat kabar menjadi lebih penting dalam membentuk apa yang Anderson, mengikuti Hegel, sebut sebagai “upacara massal.” Anderson mengatakannya dengan cara yang provokatif:

Arti penting dari upacara massal ini—Hegel mengamati bahwa surat kabar melayani manusia modern sebagai pengganti salat subuh—adalah sebuah paradoks. Hal ini dilakukan dalam privasi yang sunyi, di sarang tengkorak. Namun setiap komunikan sadar betul bahwa upacara yang ia lakukan ditiru secara serentak oleh ribuan (atau jutaan) orang lain yang keberadaannya ia yakini, namun identitasnya tidak ia pedulikan. . . Figur apa lagi yang bisa dibayangkan untuk komunitas sekuler, yang tercatat dalam sejarah dan dibayangkan?” (Anderson, 1991)

Meskipun kita mungkin mengapresiasi dorongan klaim Anderson dalam membaca ulang ungkapan Hegel yang terkenal tentang membaca surat kabar sebagai versi sekuler dari upacara massal—perkumpulan figuratif orang-orang di bawah atap gereja virtual—ada beberapa koreksi yang perlu diperhatikan. Berbeda dengan buku yang dikonsumsi secara pribadi, surat kabar dikonsumsi secara kolektif dan komunal. Seperti yang dicatat oleh Matthew J. Shaw dalam bukunya *An Inky Business: A History of Newspapers from the English Civil Wars to the American Civil War*, surat kabar tersedia di kedai kopi, kedai bir, dan sebagai *affiches*, yaitu, sebagai lembaran lebar yang akan digunakan, dipasang di sekitar kota dan akan dibaca oleh orang-orang yang berkumpul, seolah-olah di gereja luar ruangan. Yang terpenting, pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas, surat kabar akan dibacakan dengan lantang oleh pembaca surat kabar kepada mereka yang buta huruf atau hanya ingin minum kopi atau bir sambil mengikuti perkembangan dunia (Shaw, 2021). Sebagaimana dicatat oleh Andrew Pettegree, “berita cetak” menciptakan “kebiasaan konsumsi” baru yang menghubungkan hal-hal komunal dan pribadi (Pettegree, 2014). Surat kabar, lebih dari media “cetak” lainnya, berkontribusi terhadap penciptaan “publik” yang mementingkan apa yang “publik”.

Sejauh ini saya telah membahas revolusi materi dan kognitif yang dihasilkan oleh buku dan surat kabar, sehingga melahirkan Sistem Global/Modern/Kolonial. Faktanya, dan bisa dibilang, lebih dari sekadar buku, surat kabar merupakan faktor utama dalam penciptaan komunitas terbayang “global”. Simon J. Potter, misalnya, mencatat bahwa surat kabar berperan penting dalam memproyeksikan rasa ke-Inggris-an secara global, sekaligus meningkatkan alokasi lokal. Sama seperti London yang menjadi pusat berita metropolitan dan kekaisaran, setiap pos terdepan kolonial dan kekaisaran mengembangkan surat kabar lokal atau nasionalnya (Potter, 2007). Surat kabar terglobalisasi dan terglobalisasi. Seperti yang ditunjukkan Shaw, surat kabar merupakan “instrumen” proses pembangunan negara-bangsa, dan dengan demikian berperan penting dalam kebangkitan nasionalisme (Shaw, 2021). Pada saat yang sama, ketika surat kabar mengintegrasikan “kerajaan” dan “koloni,” mereka berkontribusi terhadap identitas mereka yang berbeda, dan akhirnya emansipasi dan kemerdekaan, seperti yang dicontohkan oleh deklarasi kemerdekaan AS dari Inggris. Dan, yang sama pentingnya, atau lebih penting lagi, globalisasi surat kabar menciptakan krisis epistemik lainnya, atau yang lebih baru: krisis kebenaran. Di era produksi berita secara massal dan menjamurnya surat kabar dengan sudut pandang yang berbeda-beda, muncullah apa yang kita sebut sebagai “krisis legitimasi epistemik.” Seperti yang ditunjukkan dengan fasih oleh Pettegree, kebangkitan dan penyebaran kertas koran di seluruh dunia menimbulkan pertanyaan tentang keandalan berita tersebut (Pettegree, 2014). Dengan demikian, surat kabar mempunyai efek sentrifugal dan sentripetal: ia menciptakan “publik” yang juga “kritis” terhadap media yang menyatukan mereka sebagai publik.

Revolusi komunikasi yang ditimbulkan oleh revolusi media cetak juga mempunyai dampak revolusioner terhadap bidang politik, yang terwujud dalam munculnya “publik”, “opini publik” dan “publisitas”, “publikasi”, dan “publikasi”. “lingkup” (Öffenlichkeit). Jürgen Habermas, tidak seperti filsuf dan ahli teori sosial lainnya, pada tahun 1962 dalam buku klasiknya *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, mendiagnosis dan menguraikan kemunculan penting tersebut dan transformasi entitas baru ini, publik, dan bentuk penalarannya: penalaran publik (Habermas, 1989a, 1989b). Bagi Habermas, pada tingkat paling dasar, “ruang publik” muncul sebagai “domain spesifik—domain publik versus privat” (Habermas, 1989b). Ruang publik borjuis “dapat dipahami terutama sebagai ruang lingkup masyarakat privat yang bersatu sebagai ruang publik; mereka segera mengklaim bahwa ruang publik diatur dari atas dan bertentangan dengan otoritas publik itu sendiri, untuk melibatkan mereka dalam perdebatan mengenai hubungan pemerintahan secara umum.” Perdebatan ini mengambil bentuk yang “aneh” dan belum pernah terjadi sebelumnya: “penggunaan akal sehat oleh masyarakat (öffenliches Rasonnement)” (Habermas, 1989b). Ruang publik kemudian menjadi ruang bagi penggunaan nalar publik oleh “rakyat” untuk memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan kekuasaan politik. Penggunaan nalar publik di ruang publik kemudian menjadi sarana transformasi voluntas menjadi rasio. “Debat publik seharusnya mengubah voluntas menjadi suatu rasio yang dalam kompetisi publik argumen pribadi muncul sebagai konsensus tentang apa yang secara praktis diperlukan demi kepentingan semua orang” (Habermas, 1989b; huruf miring

dalam versi asli). Penalaran publik dalam ruang sosial baru ini akan mendomestikasi kekuasaan politik dengan cara mengajukannya ke dalam debat publik. Masyarakat sebagai penalar publik dalam ruang publik mengklaim kekuasaan pengawasan terhadap pemerintah, menuntut agar keputusan diumumkan. Dengan cara ini, ruang publik menjadi mesin transformasi dan pembangkitan kekuasaan politik (Habermas, 1989b).

Bernhard Peters, mantan rekan Habermas, memberikan gambaran sinoptik tentang “kategori” penting ini dengan menyoroti tiga fungsi berbeda. Pertama, ketika digabungkan dengan konsep tandingannya, yaitu privat, publik membatasi domain tindakan sosial dengan “kekuatan normatif” masing-masing—menggunakan ungkapan James Bohman (2007). Kedua, ketika digabungkan dengan dua konsep tandingan lainnya, “pribadi” dan “rahasia”, keduanya membatasi domain komunikasi dan pengetahuan yang berbeda. Kita kemudian dapat mengatakan bahwa “publik” juga memiliki karakteristik epistemik yang memerlukan jenis komunikasi tertentu, yaitu komunikasi sipil dan publik. Ketiga, menggabungkan dua karakteristik semantik publik, dan mengutip Peters: “Ruang publik di sini menunjukkan semacam kolektivitas dengan struktur komunikatif tertentu, atau ruang tindakan komunikatif dengan karakteristik dan fungsi yang menuntut secara spesifik” (Wessler, 2008).

Karya klasik Habermas tahun 1962, tentu saja, diterbitkan sebelum Magnus Opusnya, *The Theory of Communicative Action* tahun 1981 (Habermas, 1984–87). Namun, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dari pekerjaan yang terakhir ini baru saja dimulai dari pekerjaan yang pertama. Memang benar, dengan menggunakan terminologi yang kemudian dikembangkan Habermas, dapat dikatakan bahwa ruang publik adalah cakrawala tindakan komunikatif, rasionalitas, dan kebebasan komunikatif. Ruang publik, sebagai ruang sosial baru dengan klaim dan kekuasaan normatifnya sendiri, memunculkan gagasan tentang nalar publik, tentang penggunaan nalar “publik” secara spesifik. Dalam buku superlatifnya *Öffentlichkeit: Die Politische Form des Bewusstseins* (Ruang Publik: Bentuk Kesadaran Politik), Volker Gerhardt, dengan subjudul bukunya, dengan kuat menangkap apa yang dimaksud Habermas ketika ia menyatakan bahwa publik dan ruang publiknya adalah sarana untuk mentransformasikan kekuasaan politik menjadi sesuatu yang harus dihasilkan oleh masyarakat melalui musyawarah publik. Gerhardt juga secara ringkas dan pedih menangkap maksud kosmopolitan dari gagasan Habermas tentang kepublikan penggunaan nalar publik ketika ia menutup bukunya dengan bab “*Der Weltbürger als homo publicus*,” yaitu, “warga dunia, atau warga kosmopolitan, sebagai manusia publik” (Gerhardt, 2012).

Niklas Luhmann adalah salah satu tokoh antagonis dan pengkritik Habermas yang paling tangguh. Mereka terlibat dalam perdebatan terkenal di awal tahun tujuh puluhan yang mana dapat dikatakan bahwa Habermas belajar lebih banyak daripada Luhmann. Seringkali diabaikan bahwa Luhmann berkontribusi terhadap konseptualisasi publik, opini publik, dan ruang publik. Namun, posisi Luhmann hampir bertolak belakang dengan posisi Habermas. Luhmann juga mengakui bahwa transformasi sosial besar-besaran telah terjadi pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas karena revolusi media pada abad tersebut. Komunikasi massa baru yang dimungkinkan oleh media massa menciptakan ruang publik dan ruang publik, yang pada gilirannya melahirkan sistem sosial baru. Publik, ruang publik, dan opini publik

adalah bentuk-bentuk sosial yang memungkinkan sistem sosial menciptakan realitas sosial—lingkungan—yang memungkinkan sistem sosial mengamati dirinya sendiri. Ini adalah cermin dari cermin, pengamatan dari pengamat, yang pada kenyataannya menciptakan bentuk “pengamat.” Bagi Luhmann, “opini publik” “digayakan sebagai sebuah paradoks, sebagai kekuatan tak terlihat dari apa yang terlihat” (Luhmann, 1990). Yang terpenting, opini publik mengacu pada sistem sosial, dan bukan pada apa yang mungkin terbentuk dalam kesadaran warga negara. Opini publik adalah otopoiesis sistem sosial yang dibentuk oleh komunikasi, dan hanya melalui komunikasi. Komunikasi ini bukanlah transfer informasi, laporan, atau pengungkapan dari satu agen ke agen lainnya. Komunikasi tersebut tanpa isi komunikatif. Itu hanyalah kinerjanya. “Komunikasi adalah penciptaan realitas yang muncul, yaitu masyarakat, yang berada dalam reproduksi komunikasi yang terus-menerus melalui komunikasi” (Luhmann, 1990). Oleh karena itu, menurut Luhmann, opini publik, sebagai alat komunikasi, “meninggalkan” rasionalitas dan irasionalitas “psikologi massa” (Luhmann, 1990). Juga, dalam bentuk kebebasan pers yang membentuk opini publik, kebebasan tersebut tidak dapat menjadi jaminan “kehidupan pikiran yang bebas” (Luhmann, 1990). Media tidak memberikan informasi kepada pikiran, juga bukan sarana untuk membentuk “pikiran”.

Dalam teks selanjutnya, Luhmann mengklaim bahwa media massa menciptakan “ilusi transendental” Kantian. Menurut pemahaman ini, aktivitas media massa dipandang bukan sekedar rangkaian operasi, melainkan sebagai rangkaian observasi, atau lebih tepatnya operasi observasi” (Luhmann, 2000).

Inilah sistem sosial yang mengamati dirinya sendiri yang mengamati. Dalam teks selanjutnya ini, paradoks kekuatan tak terlihat dari yang terlihat kini menjadi paradoks lain. Namun, keterlibatan media massa sangat diperlukan ketika isu yang menjadi permasalahan adalah penyebaran informasi secara luas dan kemungkinan penyerapan yang anonim dan tidak dapat diprediksi. Meski terdengar paradoks, hal ini tidak kalah pentingnya, ketika kita berbicara mengenai ketidaktransparanan sebagai reaksi terhadap penggunaan kebijakan ini. Oleh karena itu, dampaknya, jika bukan fungsi media massa, terletak pada reproduksi ketidaktransparanan melalui transparansi, dan reproduksi dampak non-transparansi melalui transparansi pengetahuan. Dengan kata lain, ini berarti reproduksi masa depan.

Di sini, Luhmann sepertinya menggemakan apa yang dicatat oleh Pettegree, yaitu bahwa dengan bangkitnya surat kabar, masalah kebenaran dan keandalan media pun ikut muncul. Media massa, dengan memproduksi berita dan informasi dalam jumlah besar, menciptakan permasalahan mengenai informasi apa yang relevan dan sumber berita mana yang dapat dipercaya. Dalam karyanya yang berjumlah dua jilid, *Gesellschaft der Gesellschaft* (yang seharusnya diterjemahkan sebagai *Society of Society*), penjumlahan dan sistematisasi teori sistem sosialnya, Luhmann menulis bahwa opini publik bukanlah sekadar opini yang modis, seperti yang dilihat pada abad ketujuh belas. , maupun media pencerahan rasional atau *puissance* yang tidak kasat mata diharapkan dapat membawa emansipasi dari tradisi pada abad kedelapan belas. Ini adalah media deskripsi diri dan dunia dari dunia modern. Itu adalah 'Roh Kudus' dari sistem, ketersediaan komunikatif dari hasil komunikasi” (Luhmann, 2012). Dengan demikian, bagi Luhmann ruang publik, publik, dan opini publik bukanlah ruang sosial

di mana publik terlibat dalam pertimbangan rasional, sehingga berupaya mentransformasikan kekuasaan politik, atau pemisahan dua ranah (privat dan publik) dengan kekuasaan normatifnya masing-masing. Sebaliknya bagi Luhmann, yang dilahirkan oleh media massa adalah apa yang oleh Walter Lippmann disebut sebagai “phantom public” dengan pendapatnya masing-masing, yang tidak memiliki nilai epistemik, rasional, dan tidak bersifat emansipatoris (Lippmann, 1993). Namun, Luhmann telah mendiagnosis beberapa paradoks yang terjadi seiring dengan bangkitnya komunikasi massa: pertama, bahwa atas nama publisitas, muncullah lingkungan dan masyarakat baru yang tidak bersifat publik; kedua, bahwa publik terfragmentasi, sehingga menciptakan banyak publik, yang semuanya belum tentu berbagi informasi atau opini yang sama; ketiga, opini yang dianut oleh publik tersebut bersifat sementara seperti berita yang dikonsumsi oleh publik tersebut; keempat, bahwa komunikasi massa memungkinkan terjadinya komunikasi pengetahuan dalam jumlah besar, sehingga menciptakan menara Babel dengan krisis legitimasi epistemiknya sendiri; kelima, dan yang paling menyedihkan, bahwa ruang publik yang dimungkinkan oleh komunikasi massa bukanlah ruang pertimbangan rasional atau ruang penggunaan nalar publik. Yang paling menarik, sosiolog Spanyol Ignazio Izuzquiza Otero memberi judul studi komprehensifnya tentang Luhmann *La Sociedad sin Hombres: Niklas Luhmann o la Teoría como Escandalo* (Masyarakat tanpa Manusia: Niklas Luhmann atau Teori sebagai Skandal). Memang benar, meskipun karyanya sangat banyak, yang menjadi pusatnya bukanlah kesadaran manusia, kebebasan, emansipasi, pembebasan, atau musyawarah atau nalar (Izuzquiza Otero, 2013). Autopoiesis sistem sosial tidak memerlukan kesadaran manusia, dunia kehidupan, atau praktik komunikasi untuk melestarikannya. Bahkan, kesadaran manusia hanyalah sebuah fatamorgana, tidak berbeda dengan “Roh Kudus” (Key, 1961).

6.4 TENTANG MEDIATISASI/CARNI VALIZASI POLITIK DAN DEFISIT

Dalam bab ini saya telah merangkai sebuah cerita, dengan maksud normatif, tentang globalisasi, dengan menyatakan bahwa kita harus mempertimbangkan para pemikir global mestizo/dekolonial sebagai orang yang memberikan kontribusi wawasan substantif terhadap Sistem Global/Modern/Kolonial, atau apa yang bisa kita lakukan. sebut juga kolonialitas globalitas. Kemudian, saya membahas revolusi media pada abad kelima belas, keenam belas, dan ketujuh belas, dengan fokus pada buku dan surat kabar, sehingga kita dapat melihat bahwa revolusi politik, sosial, budaya, epistemik, dan normatif saling berhubungan. Argumennya adalah revolusi-revolusi ini terkristalisasi dalam munculnya apa yang disebut Habermas sebagai *Öffenlichkeit*, dengan semua akar kata dan spin-off semantiknya. Seperti bagian sebelumnya, bagian ketiga ini berfokus pada kondisi material yang memungkinkan dan bagaimana kondisi tersebut mengeluarkan kekuatan dan standar normatif baru. Revolusi media selama hampir enam ratus tahun terakhir telah mengubah cara umat manusia memandang dirinya sendiri, “mengamati dirinya sendiri,” menggunakan bahasa Luhmann, namun juga bagaimana umat manusia menghasilkan tuntutan normatif baru. Pada bagian terakhir ini, saya ingin menjawab pertanyaan: Apa yang terjadi dengan globalisasi dan ruang publik di era media sosial yang terkomputerisasi dan dilengkapi Internet? Apakah kita kurang

lebih sudah terglobalisasi dan masih menjadi bagian dari masyarakat yang berpikir dan berunding? Di era globalisasi yang dimediasi media sosial, apa yang terjadi dengan masyarakat yang berpikir, yang menurut perkiraan Habermas terkait dengan kebajikan epistemik dari masyarakat yang berpengetahuan, egaliter, dan penuh pertimbangan?

Di sini, saya ingin mengikuti tetapi sedikit menyimpang dari kontribusi penting James Bohman, yang telah dikutip. Dalam esainya yang terbit pada tahun 2004, “Memperluas Dialog: Internet, Ruang Publik, dan Prospek Demokrasi Transnasional,” Bohman mempertimbangkan janji-janji utopis dari demokrasi digital yang dimungkinkan dan diperkuat oleh Internet (Bohman, 2004). Meskipun Bohman optimis terhadap dimensi utopis dari teknologi baru, pada awal tahun 2000an ia mencatat bahwa interaksi baru yang dimediasi Internet ini mempunyai konsekuensi yang terfragmentasi dan tidak egaliter. Yang terpenting, mereka berkontribusi terhadap fragmentasi ruang publik menjadi ruang publik, publik yang terkurung dan terisolasi, yang mengikis dan menghilangkan kemungkinan untuk bersatu dan memunculkan “opini publik.” Untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi, Bohman memberikan sketsa singkat tentang bagaimana teknologi media telah mengubah kemampuan masyarakat modern dalam berkomunikasi. Ia membedakan antara bentuk-bentuk komunikasi satu-ke-satu, satu-ke-banyak, dan banyak-ke-banyak yang dimungkinkan oleh sistem komunikasi yang semakin canggih—walaupun semua bentuk komunikasi yang memungkinkan ini memerlukan materi yang diperlukan: pelari yang membawa pesan, kuda, kapal, kereta api, telegraf, radio, televisi, dan sebagainya. Tipologi ini perlu diubah mengingat media sosial baru kita, terutama karena ini dimungkinkan oleh telepon seluler dan jaringan nirkabel hingga 5 gigabyte. Hidup di era telepon seluler yang murah, mudah dibawa-bawa, dan tersedia di mana-mana memungkinkan kita melihat adanya modalitas baru dalam komunikasi: satu-ke-satu, beberapa-ke-beberapa, satu-ke-banyak, banyak-ke-banyak, dan tidak ada satu sama lain (seperti bot yang memproduksi dan menyebarkan berita palsu dan misinformasi). Dua bentuk komunikasi terakhir adalah yang benar-benar revolusioner di zaman kita. Ponsel membuat semua komunikasi menjadi datar dan horizontal, sekaligus memusatkan dan menyebarkannya. Hal inilah yang diterjemahkan ke dalam mimpi Aesopian mengenai demokrasi digital dengan ruang publik yang dinamis. Namun, Internet, telepon seluler, media sosial massal, Tik-Tok, dan lain-lain telah memberi kita versi digital dari apa yang disebut Lippmann sebagai “publik hantu”. Yang terburuk, dan seperti yang telah kita saksikan dalam dekade terakhir, bentuk-bentuk baru misinformasi, berita palsu, dan teori konspirasi telah membanjiri Internet, memperburuk apa yang saya sebut sebagai “krisis legitimasi epistemik” dalam masyarakat global. Bisa dibilang, “berita palsu” lahir bersama dengan berita. Namun, kita telah memasuki kabut perang informasi yang salah. Untuk lebih menggambarkan apa yang saya maksud, izinkan saya menjadi sedikit provinsial.

Beberapa revolusi media telah terjadi di ruang publik AS, yang menjadi pendorong utama munculnya komunikasi melalui komputer, berita nonstop, media sosial, dan telepon seluler. Revolusi-revolusi ini bisa dibilang berawal dari peluncuran CNN pada tahun 1980, dan Fox News pada tahun 1996, yang diharapkan dapat melawan dugaan bias liberal dari CNN. CNN akan mengudara 24/7, menggunakan format yang mengubah jurnalisisme. Format ini

memerlukan wawancara dengan “pakar” yang akan menyajikan pendapat, perspektif, dan analisis yang berbeda, bahkan saling bersaing dan kontras, mengenai apa pun yang diberitakan. Jaringan kabel membawa perubahan epistemik dalam cara berita disajikan dan diterima, disiarkan di televisi, dan dikonsumsi. Mereka menjadikan berita itu sebagai tontonan. Dan lebih jauh lagi, hal-hal tersebut berkontribusi terhadap melemahnya kredibilitas epistemik para ilmuwan dan pakar—yakni agen epistemik yang kredibel.

Baik CNN maupun Fox News menegaskan bahwa berita tersebut tidak hanya untuk diberitakan, namun sebenarnya dibuat-buat. Mereka menunjukkan bahwa segala sesuatu bergantung pada sudut pandang, pada “sudut” seseorang. Mereka menunjukkan bahwa “berita” ada di mata orang yang melihatnya, dan bahwa mata yang berbeda melihat hal yang berbeda—bahkan, mereka mungkin melihat hal yang sangat berbeda. “Berita” bukan lagi sesuatu yang “baru” setiap hari, namun apa yang dianggap oleh para penyiar sebagai sesuatu yang layak diberitakan. Penyiaran berita yang tiada henti, pembaharuan berita yang tiada henti, “berita terkini”, pembaharuan yang tiada henti mengenai berita yang “berkembang”, memperjelas bahwa apa yang menjadi “berita” pada satu jam selalu sudah ketinggalan jaman pada jam berikutnya. Dengan cara ini, berita tidak pernah cukup “baru”. Namun kegaduhan dan hiruk pikuk pemberitaan tersebut juga mempunyai dampak psikososial. Hal ini menciptakan rasa ancaman dan kegelisahan: ada sesuatu yang selalu “rusak” di dunia. Konsekuensi lain dari maraknya pemberitaan 24/7 adalah deprofesionalisasi jurnalisisme, yang berkontribusi pada karnavalisasi berita. “Berita” tersebut menjadi sebuah tontonan, sebuah pertandingan seni bela diri campuran, di mana para tokoh dan pakar dari Kiri dan Kanan saling bertukar pendapat. Semua itu membuat berita dan pemirsanya menjadi kekanak-kanakan.

Dengan diluncurkannya “media sosial” dan perluasan akses ke Internet, lima tren menyatu dan menciptakan fenomena baru di ranah publik AS: gelembung media. Lima tren yang dikuatkan oleh media berita 24/7 adalah: subjektifikasi, yaitu gagasan bahwa berita tergantung pada siapa yang melihatnya; manufaktur, gagasan bahwa “berita” tidak dilaporkan tetapi dibuat dengan menggabungkan perspektif tertentu; deprofesionalisasi jurnalisisme, yang menunjukkan bahwa seseorang tidak perlu menjadi seorang ahli untuk mempunyai pendapat atau perspektif mengenai apa yang layak diberitakan atau tidak; keempat, penerapan pertarungan komunikatif: semakin Anda bersikap Rabelasian, mesum, vulgar, dan keterlaluan, semakin banyak penonton dan “suka” yang akan Anda terima; dan yang tak kalah pentingnya, munculnya apa yang kita sebut sebagai waktu digital, yaitu waktu yang mendahului waktu untuk bermusyawarah dan telah menyebabkan gangguan defisit perhatian masyarakat. Kebetulan, masa digital ini adalah masa antidemokrasi, karena bukan waktu untuk berunding, melainkan waktu untuk bereaksi. Fenomena ini, di luar bab ini, sama pentingnya dengan krisis legitimasi epistemik yang diakibatkan oleh produksi misinformasi digital.

Logika yang dikeluarkan oleh CNN, yang membutuhkan musuh bebuyutannya, Fox News, melahirkan banyak saluran berita, masing-masing dengan merek dan kecenderungan ideologisnya yang unik. Jika Fox News bermaksud untuk melawan dugaan bias liberal CNN, ratusan saluran lainnya akan melawan kecenderungan agresif Fox News yang bersifat konservatif dan Partai Republik. Wacana sipil hampir tidak ditemukan. Banyak jaringan

menyampaikan pesan mereka langsung ke Internet, di mana banyak situs “berita” baru mulai bermunculan. Untuk setiap CNN dan Fox News, Huffington Post (2005) atau Breitbart News Networks (2007) yang baru bermunculan. Perpecahan lama ruang publik antara media cetak dan televisi memberi jalan bagi bentuk media lain: media Internet. Media cetak kini harus bersaing dengan media televisi, yang pada gilirannya harus bersaing dengan media Internet, sebuah platform yang tentunya tidak memerlukan biaya overhead tinggi yang dibutuhkan oleh dua bentuk jurnalisme lainnya. Hal ini mempercepat fragmentasi dan polarisasi ruang publik. Tiba-tiba setiap selera politik mempunyai salurannya sendiri, setiap kecenderungan subyektif mempunyai platformnya sendiri. Uniknyanya, persekongkolan politik, yang memungkinkan politisi memilih pemilihnya, bukan sebaliknya, tercermin dan diperburuk oleh apa yang kini terjadi di media sosial: saluran berita dipilih berdasarkan jenis “berita” yang ingin Anda sampaikan. mengkonsumsi.

Revolusi teknologi lainnya menjadi katalisator media sosial, dan hal ini adalah munculnya telepon seluler atau biasa disebut “ponsel pintar”. Diperkenalkan pada tahun 1992 oleh IBM, namun dipopulerkan dan didigitalkan sepenuhnya oleh Apple pada tahun 2007, ketika perusahaan tersebut merilis iPhone-nya, perangkat ini tidak hanya mengubah berita, tetapi juga politik. Obama adalah presiden pertama yang menggunakan ponsel pintar, dan semua “aplikasi” yang dibawanya ke ruang publik, seperti Twitter, Tik-Tok, dll. Patut dicatat bahwa Obama melakukan tweet dan, menurut Internet, akunnya adalah yang paling banyak diikuti sepanjang masa, dengan 130 juta pengikut, dibandingkan dengan Trump yang memiliki 15,6 juta pengikut. Ponsel pintar mengubah layar “pertama” (televisi) dan “kedua” (komputer) menjadi “layar ketiga” (TV seluler/komputer), yang juga menjadi panoptikon seluler dan mimbar keliling dengan megafon. Kini, siapa pun dapat mengikuti berita, komedi situasi, atau tokoh media sosial favoritnya melalui notifikasi instan dari Instagram (sejak 2010) atau Twitter (sejak 2006) atau Facebook (sejak 2004). Setiap ponsel memungkinkan segudang notifikasi.

Revolusi media ini, yang secara struktural telah mentransformasi ruang publik AS, dan bisa dibilang ruang publik Masyarakat Dunia, memungkinkan penggunaan Donald Trump, sebagai pribadi, untuk dijadikan Trumpisme, sebuah fenomena politik. Trumpisme melampaui Trump sebagai individu. Dalam banyak hal, Trump adalah avatar Trumpisme. Dan Trumpisme adalah fenomena global yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk serupa lainnya.

Bukan suatu kebetulan bahwa Trump adalah presiden pertama yang mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan ruang publik yang terfragmentasi, dengan gelembung-gelembung media yang melayani kepentingan ideologis tertentu. Meskipun Obama memanfaatkan Internet, media sosial, dan Twitter, dia tidak menggunakan media tersebut untuk menjalankan politik pemerintahannya. Obama tidak mungkin menggunakan tweet dengan cara seperti itu karena dia memahami bahwa dia terikat pada standar normatif yang lebih tinggi. Trump, tidak seperti Obama, secara eksplisit dibantu oleh media berita seperti Fox News, Breitbart, dan sejumlah media, situs web, dan tokoh sayap kanan lainnya, seperti Steven Bannon. Trump adalah presiden pertama yang melakukan kebijakan dan membuat pengumuman publik terutama melalui Twitter. Dia juga menggunakan acara TV untuk melakukan beberapa pengarahan “presiden” yang diduga dilakukannya.

Meskipun “berita palsu”—istilah favorit Trump untuk mengejek—sudah ada di media cetak, kemunculan media sosial, berita Internet, Twitter, dan semua tempat virtual lainnya untuk menyampaikan “informasi” (misalnya, Newsfeed Facebook) semakin meningkat. menghambat produksi dan penyebaran informasi yang salah. Fenomena lain yang termasuk dalam “berita palsu” adalah penyebaran dan penyebaran teori konspirasi. Trump mahir dalam memberi label apa pun yang tidak ia sukai atau yang menantanginya, terutama ketika ia berbohong secara terang-terangan, sebagai “berita palsu.” Ia juga mahir dalam memanfaatkan “keuntungan para pembohong” dan menggunakan “teori konspirasi” demi keuntungannya sendiri dan merugikan pihak-pihak yang ia lawan atau ingin rongrong. Dia men-tweet kebohongannya dan me-retweet teori konspirasi sayap kanan. Karena ini adalah tweet, maka itu adalah pidatonya, bukan pernyataan resmi resmi. Dari laporan mantan pegawai Gedung Putih, kami juga mengetahui bahwa Trump adalah konsumen harian media sayap kanan dan konservatif, seperti Fox News. Trump mungkin adalah “presiden kulit putih” pertama karena ia menjalankan agenda eksplisit supremasi kulit putih, rasisme, xenofobia, dan anti-imigrasi, namun ia mampu mendorong agenda ini karena ia juga merupakan presiden media sosial dan Twitter pertama. . Trump adalah avatar media sosial sayap kanan. Seperti Ronald Reagan dan George W. Bush, presiden Teflon sebelum dia, Trump juga menjadi presiden Teflon. Namun analogi yang lebih baik adalah dengan mengatakan bahwa Trump lebih seperti “layar ketiga” yang dapat Anda klik atau usap; Anda dapat menyukai tweetnya dan me-retweetnya, atau memalingkan muka; Anda dapat menggeser ke kiri atau ke kanan, seolah-olah dia hanyalah gambar profil di aplikasi kencan (Match.com, atau Cupid). Trump adalah metonim untuk sebuah fenomena baru: “agnostologi digital,” yaitu produksi digital dari defisit epistemik, ketidakpercayaan, gelembung epistemik, dan ketidaktahuan yang muncul dengan sendirinya.

Namun, saat saya menulis ini, saya dapat menyaksikan di CNN (yang telah menjadi merek global dengan jangkauan global) kehancuran Ukraina yang mengerikan oleh pasukan Rusia, banyaknya orang yang meninggalkan negara tersebut, serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh tentara Rusia. perang sedang terjadi tepat di depan mata kita. Setiap hari, kita dapat mendengar kabar terbaru di NPR tentang rencana ekonomi Presiden Biden untuk membangun kembali Amerika Serikat. Namun, kita juga mendengar tentang penutupan media di Rusia, cengkeraman kuat Pemerintah Tiongkok terhadap Internet, dan gelombang informasi yang salah tentang apa yang terjadi di seluruh dunia. Revolusi media pada abad ke-15 dan ke-16 memberi kita revolusi-revolusi yang mengglobalkan dunia kita, sekaligus memberikan kita nasionalisme yang membentuk arah globalisasi tersebut. Secara paralel, revolusi media baru telah menyatukan kita dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun juga memisahkan dan memisahkan kita dengan cara yang baru dan tidak menaruh curiga. Kita terlalu terglobalisasi dan tidak cukup.

Dalam bab ini, saya menggambarkan apa yang saya sebut sebagai teori globalisasi “mestizo/dekolonial” yang merupakan koreksi besar terhadap sebagian besar teori globalisasi yang diproyeksikan dan dipikirkan seolah-olah dari atas atau hanya dari sudut pandang Eropa-

Amerika. Saya berpendapat bahwa para pemikir “mestizo/dekolonial” ini memungkinkan kita untuk memikirkan kembali “kolonialitas globalitas,” yang mengartikulasikan perspektif dari sisi modernitas, globalisasi, dan kolonialisme. Kemudian, saya membahas kebangkitan ruang publik nasional dan transnasional, melalui kemunculan surat kabar, dan apa yang disebut dengan “republik sastra dunia”. Bagian tak terpisahkan dari revolusi media ini adalah munculnya ruang publik imperial dan kolonial, dengan medianya yang berbeda. Oleh karena itu, ketika kita menjadi bagian dari komunitas pembaca global yang “dibayangkan”, banyak warga kolonial mengembangkan media lokal mereka sendiri. Dengan demikian, kolonisasi merupakan kekuatan utama globalisasi, yang pada gilirannya menjadi katalisator terciptanya ruang publik dan ruang publik yang “dekolonisasi”. Ruang publik global selalu merupakan ruang publik yang banyak, banyak di antaranya yang secara eksplisit dan terang-terangan melakukan dekolonial atau antikolonial. Kemudian, saya beralih ke apa yang saya sebut sebagai “transformasi struktural” yang “terkini” atau “transformasi struktural” terkini dalam ruang publik global dengan melihat kebangkitan media sosial dan dampak telepon seluler dan Internet terhadap politik. Secara khusus, saya berfokus pada munculnya masyarakat otoriter, xenofobia, rasis, dan antiglobalis dengan politik mereka yang berbeda, yang telah dimungkinkan dan diperburuk oleh media baru ini. Saya ingin menunjukkan bahwa media sosial baru ini mengglobalisasikan kita sekaligus mengglokalkan kita ke dalam sikap dan tren politik yang lebih nasionalistis dan xenofobik. Sekali lagi, klaim saya adalah bahwa kondisi material baru dalam produksi ruang publik, dan publik, menunjukkan betapa kita sudah cukup terglobalisasi, namun juga belum cukup.

BAB 7

GLOBALISASI DAN KESEHATAN DI ERA COVID

Bab ini mewakili latihan reflektivitas ilmiah. Seringkali sebagai sarjana, kita lalai merenungkan apa yang benar dan salah. Dalam kondisi baik atau (sangat) buruk, munculnya pandemi COVID-19 dan respons internasional memberikan ujian langsung terhadap asumsi yang saya masukkan dalam buku saya tentang hubungan antara globalisasi dan kesehatan dan apa yang akan terjadi jika pandemi ini terjadi. dorongan datang untuk mendorong.

Sebelum munculnya pandemi ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa konsensus ilmiah mengakui banyak kekurangan signifikan dalam arsitektur tata kelola kesehatan global yang telah berkembang sejak awal tahun 1990an, namun terdapat penerimaan umum terhadap norma-norma internasional yang mengatur perilaku terkait kesehatan. Namun, pada saat yang sama, terdapat kekhawatiran yang semakin besar bahwa dorongan menuju multilateralisme yang merupakan inti tata kelola kesehatan global mulai melemah. Meskipun terpilihnya Donald Trump dan sikapnya yang terang-terangan menentang perjanjian politik internasional mungkin merupakan bukti paling nyata dari perubahan ini, hal tersebut bukanlah penyebab dari kekacauan ini. Respons global terhadap COVID-19 adalah hasil dari ketegangan yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun dan keengganan yang sudah berlangsung lama untuk mereformasi lembaga tata kelola kesehatan global. Isu-isu ini menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara kebutuhan untuk mengatasi tantangan global secara kolektif dan keinginan pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan pengambilan keputusan mereka. Akibatnya, negara-negara anggota ragu-ragu untuk mereformasi lembaga-lembaga yang dibentuk dalam kondisi geopolitik dan ekonomi yang sangat berbeda—bahkan ketika stasis tersebut harus mengorbankan penciptaan lembaga-lembaga yang lebih efektif.

Dalam kasus isu-isu yang belum tereksplorasi dan belum terselesaikan yang saya identifikasi pada bagian akhir Globalisasi dan Kesehatan, saya berpendapat bahwa ketiga aspek inti yang disebutkan—peran gender dalam menanggapi isu-isu kesehatan global, keterkaitan antara kesehatan manusia dan hewan, dan meningkatnya skeptisisme terhadap respons multilateral terhadap krisis global—yang memang akurat dan relevan, namun tidak mencakup isu-isu yang lebih besar. Secara khusus, analisis saya tidak cukup mengkaji kedalaman skeptisisme mengenai respons multilateral di antara aktor-aktor kunci tertentu. Hal ini juga gagal untuk menginterogasi secara memadai betapa rapuh dan lemahnya lembaga-lembaga tata kelola kesehatan global—baik karena kelemahan mereka maupun karena belenggu yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Selain itu, saya gagal mengkaji sejauh mana ekonomi politik internasional—terutama ketika menyangkut isu hak

kekayaan intelektual dan manufaktur farmasi—akan menentukan arah respons global dan efektivitasnya.

Dalam bab ini, saya ingin menelusuri secara singkat bagaimana tiga isu yang belum tereksplorasi yang saya identifikasi pada akhir buku *Globalisasi dan Kesehatan* berperan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung dan mengapa mengabaikan ekonomi politik internasional merupakan suatu kekeliruan. Isu-isu ini akan terus menantang keterkaitan antara globalisasi dan kesehatan saat ini dan di masa depan kecuali kita serius mengatasinya—dan mencari cara untuk menyeimbangkan kedaulatan nasional dan perlunya respons kolektif untuk mengatasi masalah-masalah mendesak.

7.1 GENDER DAN KESEHATAN GLOBAL

Karya akademis mengenai politik kesehatan global, termasuk karya saya, kurang memberikan perhatian pada gender. Hal ini tidak berarti bahwa hal ini telah diabaikan sepenuhnya, melainkan untuk menarik perhatian pada fakta bahwa, seperti halnya dalam banyak pekerjaan dalam hubungan internasional, gender sering kali diturunkan ke tingkat kepentingan sekunder atau tersier.

Keengganan kolektif kita untuk lebih memusatkan perhatian pada gender dalam analisis kita mengenai politik kesehatan global menyebabkan konsekuensi yang merugikan. Colleen O'Manique menekankan, "Kehidupan sosial dan politik sangat dipengaruhi oleh gender, dan keilmuan feminis mempunyai peran penting dalam menjelaskan dasar-dasar ketidakamanan kesehatan dan dampak ketidakamanan pada badan-badan yang memiliki gender dan lokasi yang berbeda" (2015). Gender sangat mempengaruhi cara seseorang menikmati kesehatan dan layanan kesehatan, dan akses terhadap kesehatan dan layanan kesehatan dimediasi oleh hubungan sosial, budaya, dan kekuasaan yang terkait erat dengan gender. Dampak-dampak ini menjadi lebih besar lagi dalam konteks globalisasi.

Memasukkan gender dalam analisis kami mengenai politik kesehatan global memerlukan perhatian pada sejumlah isu utama. Misalnya, sebagian besar tanggung jawab untuk merawat orang sakit, baik formal maupun informal, berada di tangan perempuan. Akibatnya, kebijakan kesehatan global sangat bergantung pada tenaga kerja tanpa kompensasi ini, meskipun lembaga-lembaga yang mendorong kebijakan tersebut jarang (jika pernah) mengakui ketergantungan ini. Hal ini dapat mempunyai dampak langsung terhadap kemampuan untuk menerapkan kebijakan yang telah dirancang – dan kegagalan untuk melakukan hal tersebut seringkali dianggap sebagai "ketidakpatuhan" dibandingkan memahami kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas yang sedang diupayakan oleh perempuan untuk bernavigasi. Kegagalan mengarusutamakan gender sebagai bagian dari respons kelembagaan terhadap keadaan darurat kesehatan global juga menyebabkan respons kebijakan yang tidak bersuara. Selama epidemi Zika di Amerika Tengah dan Selatan, banyak pemerintah di wilayah tersebut memperingatkan perempuan untuk menghindari kehamilan—namun nasihat ini sama sekali mengabaikan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan aborsi, juga tidak memperhitungkan prevalensi pelecehan seksual, kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Akibatnya, kita mendapatkan panduan kebijakan yang

(paling banter) tidak praktis—dan alasan yang siap untuk menyalahkan perempuan karena “gagal” mematuhi nasihat pemerintah jika mereka hamil.

Gender memainkan peran penting dalam cara pemerintah merespons COVID dengan berbagai cara. Dalam evaluasi ekonomi politik feminis transnasional terhadap kebijakan di Tiongkok, Hong Kong, Kanada, dan Inggris, Julia Smith dkk. (2021) menemukan bukti yang kuat dan konsisten bahwa kondisi struktural merugikan perempuan, baik dalam hal paparan mereka terhadap pandemi karena ketergantungan pada perempuan sebagai pekerja garis depan dan pengasuh di rumah, maupun dalam hal kebijakan yang secara langsung mengabaikan hak pribadi, kesehatan, dan hak perempuan. keamanan ekonomi. Mereka menyoroti bahwa kesenjangan ini semakin diperparah karena adanya hubungan interseksional dengan rasisme dan marginalisasi lainnya.

Lebih luas lagi, Ginette Azcona dkk. menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah COVID akan menghapus kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah dalam beberapa tahun terakhir dalam mendorong kesetaraan gender dan kondisi kehidupan bagi perempuan yang merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, mendorong kesetaraan gender, menyediakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sistemik semuanya bersifat gender, sehingga kegagalan dalam mencapai SDGs selama pandemi ini akan berdampak langsung dan negatif terhadap perempuan dan perempuan. orang non-biner. Mereka menekankan, “Meskipun mikroba atau penyakit tertentu mungkin tidak melakukan diskriminasi, mereka ada di masyarakat yang melakukan diskriminasi” (2020). Akibatnya, kebijakan apa pun yang tidak mempertimbangkan gender secara serius dapat memperburuk kesenjangan ini—meskipun kebijakan tersebut terkesan “netral gender”.

Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya memusatkan analisis feminis secara lebih kuat pada literatur politik kesehatan global. Mengasumsikan bahwa kebijakan-kebijakan bersifat netral gender akan menimbulkan sejumlah konsekuensi yang tidak diinginkan, dan lensa gender sangat penting dalam membantu kita memahami keberhasilan atau kegagalan kebijakan-kebijakan tertentu.

7.2 HEWAN DAN MANUSIA DAN MIKROBA, YAAA!

Sistem tata kelola kesehatan global dirancang hampir secara eksklusif untuk berfokus pada kesehatan manusia, namun mengabaikan realitas saling mempengaruhi antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Diperkirakan 60 persen dari seluruh penyakit menular pada manusia, dan 75 persen penyakit menular baru atau baru muncul, berasal dari zoonosis. Perubahan iklim memperburuk permasalahan ini karena mengubah zona tempat hidup serangga vektor, mengubah kondisi lingkungan tempat hidup hewan, dan meningkatkan peluang terjadinya pertukaran manusia-hewan. Semua keterkaitan ini membuat kita memiliki lembaga yang dapat bekerja lintas batas disiplin ilmu menjadi semakin penting, namun juga mempersulit upaya untuk memfasilitasi hubungan tersebut.

Konsep One Health menyatukan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk mengenali keterkaitan dan kebutuhan untuk memadukan analisis jika kita ingin mencapai kemajuan (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, n.d.). Ide One Health pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1960an, ketika dokter hewan Calvin Schwabe menulis tentang keterkaitan antara kesehatan manusia dan hewan dengan nama “One Medicine.” Selama empat puluh tahun berikutnya, gagasan untuk menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan mendapat perhatian yang lebih besar. Pada tahun 2004, Wildlife Conservation Society mensponsori sebuah konferensi di New York yang bertajuk “Satu Dunia, Satu Kesehatan.” Konferensi ini mengembangkan Prinsip Manhattan, yang merupakan dua belas rekomendasi untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik guna meningkatkan kesehatan dan keanekaragaman hayati. Empat tahun kemudian, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di antara lembaga-lembaga internasional lainnya, mengembangkan kerangka kerja One Health, dan masing-masing organisasi kemudian menciptakan inisiatif untuk lebih memajukan kerangka One Health. Tujuan mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam upaya melindungi ketiganya dengan lebih baik. Meskipun upaya intelektual mengenai konsep ini sangatlah penting, namun hal ini belum tentu menghasilkan perubahan besar dalam struktur kelembagaan.

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa pentingnya menangani kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara bersamaan. Pemahaman terbaik kami tentang asal muasal COVID, seperti yang saya tulis pada pertengahan tahun 2022, adalah bahwa virus tersebut berpindah dari kelelawar ke manusia melalui spesies hewan lain yang tidak teridentifikasi dan tidak didomestikasi yang dijual untuk konsumsi manusia. Ketika manusia semakin dekat dengan hewan akibat perusakan habitat dan pola makan berbasis daging, kemungkinan terjadinya penularan penyakit dari hewan ke manusia meningkat. Hal ini juga konsisten dengan penyakit menular baru dan baru lainnya, seperti sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS) dan sindrom pernapasan akut parah (SARS), yang keduanya disebabkan oleh virus corona yang terkait dengan COVID dan diyakini berasal dari hewan.

Keberadaan hewan yang menjadi reservoir penyakit manusia mempersulit strategi untuk memerangi wabah, karena hal ini memberikan tempat bagi virus untuk bersirkulasi hingga memiliki kesempatan untuk berpindah ke manusia. Terus terang, kehadiran hewan yang menjadi inang berarti kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya memberantas COVID-19. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan strategi global saat ini untuk mengatasi penyakit ini. Permasalahan struktural yang lebih besar dalam tata kelola kesehatan global kurang terfokus pada kinerja internal lembaga-lembaga tertentu, namun lebih pada kemampuan berbagai lembaga untuk bekerja sama secara efektif. Mandat WHO berfokus pada kesehatan manusia, sedangkan OIE memberikan perhatian pada hewan dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menjaga lingkungan global. Ketiganya harus saling terkait erat dalam mengatasi (pasca-)COVID, namun kolaborasi di antara ketiganya masih relatif lemah—yang merugikan kita bersama. Dari perspektif tata kelola global, permasalahannya adalah tidak ada satu organisasi pun yang hanya berfokus pada One Health. Akibatnya, hal ini dapat dengan

mudah gagal atau tidak lagi diprioritaskan seiring dengan perubahan kepemimpinan organisasi. Tidak ada organisasi yang memiliki kepemilikan atas masalah ini, sehingga posisi One Health dalam agenda kesehatan global tidak pasti—dan hal ini berarti lebih sedikit sumber daya manusia dan keuangan yang dicurahkan untuk kolaborasi tersebut. Jika upaya reformasi yang dilakukan baru-baru ini di dalam WHO merupakan indikasinya, komunitas global tidak mempunyai cukup keinginan untuk mengatasi pengawasan ini. Sekali lagi, kita menyaksikan situasi di mana kebutuhan akan respons kolektif bertentangan dengan keinginan (beberapa) pemerintah untuk mengistimewakan kedaulatan mereka.

7.3 BERDIRI BERSAMA ATAU JATUH TERPISAH?

Sistem tata kelola kesehatan global sebagian besar didasarkan pada norma-norma yang menekankan multilateralisme, kerja sama, dan penyediaan barang publik global. Sedihnya, jika ada satu masalah yang benar-benar menghambat respons kolektif global kita terhadap COVID, hal tersebut adalah ketidakpercayaan (atau ketidakpercayaan) terhadap lembaga-lembaga kesehatan global yang dilakukan oleh para pemain kunci pada masa-masa awal pandemi ini. Hal ini menyebabkan anggota komunitas global menghabiskan waktu yang penting ketika pandemi ini pertama kali muncul untuk saling bertengkar dan saling tuduh sementara virus terus menyebar. Virus mungkin tidak peduli dengan politik atau perbatasan kita, tapi mereka pasti bisa memanfaatkannya.

Ketika saya menulis buku ini, terlihat jelas bahwa pemerintahan Trump tidak begitu tertarik pada tata kelola kesehatan global. Mungkin hal ini merupakan hal yang unik di antara komitmen multilateral Amerika lainnya, dimana pemerintahan Trump menunjukkan permusuhan yang sangat hina dan terang-terangan terhadap kesehatan global. Meskipun saya mencoba berargumen kepada pemerintahan Trump untuk terlibat dalam kesehatan global atas dasar keamanan dalam buku dan artikel lainnya, mereka tidak mengindahkan saran saya. Memang benar, antipati Trump terhadap WHO jauh melampaui apa yang saya perkirakan—dan hal ini berdampak langsung pada kemampuan komunitas global dalam merespons pandemi COVID.

Munculnya COVID memperburuk pola pikir Trump yang mengutamakan Amerika, ketidakpercayaannya terhadap multilateralisme, dan penolakannya terhadap kesehatan global. Meskipun Trump pada awalnya memberikan pujian kepada pemerintah Tiongkok atas tanggapan mereka terhadap munculnya COVID, ia dan pejabat pemerintahnya segera menyalahkan Tiongkok atas penyakit ini dan menggambarkan COVID dalam istilah rasis dalam pernyataan publik dan rapat umum politik (yang memiliki dampak langsung dalam mendorong diskriminasi dan kekerasan terhadap orang Asia dan Amerika keturunan Asia di Amerika Serikat). Pada bulan April 2020, beberapa bulan setelah pandemi dimulai, Trump mengecam WHO, menyebutnya “berpusat pada Tiongkok” dan mengatakan bahwa mereka “menganggapnya salah.” Pada konferensi pers bulan itu, ia melontarkan ancaman publik pertamanya untuk menarik dana Amerika Serikat untuk WHO dan menarik negara tersebut dari organisasi tersebut (Wamsley, 2020). Terakhir, pada bulan Juli, pemerintahan Trump mengirimkan pemberitahuan kepada WHO mengenai niat resminya untuk menarik diri dari

organisasi tersebut dalam satu tahun. Meskipun Konstitusi WHO tidak memuat mekanisme formal apa pun bagi suatu negara untuk menarik diri dari organisasi tersebut, resolusi bersama tahun 1948 yang disahkan oleh Kongres AS memberikan pemerintah Amerika hak untuk meninggalkan WHO jika negara tersebut memberikan pemberitahuan satu tahun sebelumnya (Congressional Research Service, 2020). Sekalipun Presiden Trump mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tersebut (dan hal ini merupakan poin yang ambigu dan diperdebatkan), para pakar kesehatan global dan pembuat kebijakan mengkritik keputusan tersebut karena dianggap mengancam kesehatan Amerika dan global. Semua hal ini tidak membebaskan Tiongkok dari keterlibatannya yang tidak menentu dengan WHO, namun ketika negara yang selama ini menjadi penyedia bantuan pembangunan kesehatan terbesar dan kontributor tunggal terbesar bagi WHO menolak lembaga tata kelola kesehatan global terkemuka di tengah krisis, hal ini mengirimkan sinyal kepada mitra internasional—dan sinyal tersebut dapat bertahan lama dan semakin melemahkan upaya untuk mencapai respons kolektif terhadap krisis yang memerlukan kerja sama untuk mengatasinya.

Di satu sisi, keputusan Trump untuk menarik Amerika keluar dari WHO merupakan ekspresi kemarahannya. WHO sebagian besar tetap diam dalam menanggapi keputusan Trump, dan mencoba menunggu hingga pemilu untuk melihat apakah suhu sudah turun. Pejabat pemerintah melontarkan gagasan untuk membentuk organisasi kesehatan baru yang dipimpin AS untuk menggantikan WHO, namun pemerintah negara lain tidak berminat melakukan perubahan tersebut dan upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Pada akhirnya, kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa ini lebih merupakan gertakan dan sikap elektoral dibandingkan konsekuensinya. Bagaimanapun, Biden membatalkan perintah Trump untuk mundur pada hari pertamanya menjabat. Namun pandangan ini tidak memberikan konsekuensi yang lebih besar dari upaya pemerintahan Trump. Pada bulan-bulan awal pandemi COVID-19, waktu yang berharga terbuang sia-sia karena pertikaian internal. Alih-alih membangun front persatuan, kita malah mendapati negara-negara besar saling melontarkan hinaan—dan pada organisasi yang mempunyai mandat untuk merespons keadaan darurat kesehatan global.

Namun alasan terakhir inilah yang menjadi alasan kita menciptakan lembaga-lembaga internasional. Kita membutuhkan mereka untuk meletakkan dasar dan membangun hubungan sehingga mereka dapat mengambil tindakan ketika keadaan darurat terjadi. Tentu saja lebih baik jika ada pemadam kebakaran yang melakukan pelatihan terlebih dahulu sehingga siap merespons ketika terjadi kebakaran daripada mencoba membuat sesuatu untuk pertama kalinya ketika sebuah gedung terbakar.

Fakta bahwa kita menghadapi pertanyaan publik mengenai pentingnya lembaga kesehatan global yang penting seharusnya mendorong WHO dan organisasi serupa lainnya untuk menanggapi tantangan ini dengan serius. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintahan Trump benar, namun hal ini menunjukkan bahwa konsensus yang mendasari tata kelola kesehatan global selama bertahun-tahun ternyata lebih rapuh daripada yang kita asumsikan. Salah satu permasalahan yang menimpa WHO dan lembaga tata kelola kesehatan global lainnya selama abad ke-21 adalah lambatnya mereka beradaptasi dengan kenyataan yang ada

saat ini. Ada tuduhan bahwa struktur dan model pembiayaan mereka sudah ketinggalan zaman, hal ini mencerminkan dinamika politik internasional pada akhir tahun 1940an dan bukannya pengaturan yang ada saat ini, serta perlunya respons yang lebih holistik dan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan global yang melintasi batas negara dan memerlukan dukungan yang lebih besar. strategi yang melampaui kepentingan masing-masing negara. Ada sejumlah tinjauan dan panel independen yang mengusulkan reformasi—namun hanya sedikit laporan yang melakukan apa pun kecuali hanya mengumpulkan informasi. Jika WHO dan organisasi kesehatan global lainnya tidak dapat menunjukkan respons terhadap kritik – dan jika tidak ada negara anggota yang bersedia memimpin upaya reformasi yang serius – maka tidak dapat dihindari bahwa kita akan melihat lebih banyak tantangan terhadap legitimasi kesehatan. multilateralisme di bidang kesehatan global.

7.4 JANGAN MENGABAIKAN POLITIK EKONOMI INTERNASIONAL

Belum lagi pendahuluan dan penutup, Globalisasi dan Kesehatan terdiri dari tujuh bab. Ketika saya pertama kali mengusulkan buku ini, buku itu memiliki delapan bab. Namun, selama penelitian dan penulisan, saya memutuskan untuk menghapus salah satu bab. Itu tidak berjalan dengan baik, dan saya merasa sulit untuk mengidentifikasi “dalam” yang menarik yang akan menarik perhatian pembaca.

Subjek bab itu? Ekonomi politik kesehatan internasional.

Apa yang mendorong keputusan saya? Salah satu penyebabnya adalah saya menyadari bahwa saya tidak menyamakan kejelasan dan wawasan dari beberapa karya terbaik yang sudah ada mengenai ekonomi politik internasional dan kesehatan global. Salah satu alasannya adalah topiknya terasa begitu luas sehingga sulit mengetahui di mana saya bisa menawarkan sesuatu yang unik dan berwawasan luas dalam rentang satu bab dalam buku ini.

Namun yang paling penting, hal yang tidak saya pahami dengan baik adalah cakupan dan skala persaingan institusional dalam politik global. Saya pada dasarnya adalah seorang institusionalis. Institusi tata kelola kesehatan global jelas dan tentu saja penting, namun fokus saya pada institusi tersebut mengarah pada suatu pandangan sempit yang, jika dipikir-pikir, akan mengungkap beberapa masalah yang ada pada institusi tata kelola kesehatan global. Ketika kita berpikir tentang lembaga-lembaga tata kelola kesehatan global yang besar, kita (atau setidaknya saya) cenderung memikirkan badan-badan antar pemerintah seperti WHO, organisasi non-pemerintah seperti Rotary International, kemitraan publik-swasta seperti Gavi, dan organisasi filantropi seperti Yayasan Bill dan Melinda Gates. Semua hal ini penting dan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan arah politik kesehatan global.

Namun, hal yang umumnya tidak mereka lakukan adalah membahas upaya merombak hak kekayaan intelektual dan ekonomi politik internasional yang lebih luas, yaitu kesehatan. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak memperjuangkan perlunya kebijakan untuk memperhatikan faktor-faktor penentu sosial dalam bidang kesehatan, namun mereka jarang menentang status quo ekonomi politik internasional kontemporer. Hal ini merupakan sebuah masalah—bukan hanya karena hal ini memungkinkan berlanjutnya kesenjangan, namun juga karena hal ini turut berperan dalam lemahnya organisasi-organisasi yang berhubungan

dengan kesehatan dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan ekonomi. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), meskipun menghadapi tantangan dalam menghadapi COVID, masih jauh lebih kuat dalam bidang kesehatan global dibandingkan WHO, (relatif) memiliki mekanisme penegakan hukum yang serius, dan menarik perhatian internasional yang SIAPA yang tidak melakukannya. Kami tidak melihat institusi tata kelola kesehatan global yang kuat bersedia mengganggu perekonomian.

Memang benar, ketika kita melihat respons terhadap kesenjangan global yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, kita melihat adanya upaya yang disengaja untuk memanfaatkan sistem yang ada. Akses Global Vaksin COVID-19, lebih dikenal sebagai COVAX, diciptakan pada bulan April 2020 sebagai kemitraan antara WHO, Pusat Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI), dan Gavi dengan tujuan khusus untuk “mempercepat pengembangan dan pembuatan vaksin COVID-19. 19 vaksin, dan untuk menjamin akses yang adil dan merata bagi setiap negara di dunia” (Organisasi Kesehatan Dunia, n.d.). Ide dasarnya adalah COVAX akan menyalurkan sumber daya internasional ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk memastikan akses terhadap tes dan vaksin COVID. COVAX akan berfungsi sebagai pembeli dan distributor vaksin secara besar-besaran, dengan memanfaatkan daya beli kolektifnya. Negara-negara kaya akan menyediakan pendanaan, dan sembilan puluh dua negara berpendapatan rendah dan menengah akan menerima vaksin melalui mekanisme pembelian ini. COVAX telah menerima janji pendanaan dari negara-negara kaya senilai lebih dari \$6 miliar pada musim gugur tahun 2021 dan menetapkan tujuan untuk mendistribusikan dua miliar vaksin pada akhir tahun 2021 (BBC News, 2021). Program ini pada dasarnya bertujuan untuk mengubah kalkulus pasar dibandingkan mengubah pasar untuk menyediakan distribusi vaksin yang lebih adil—sebuah respons pragmatis terhadap realitas kondisi pasar farmasi internasional saat ini. Hal ini juga bergantung pada pengakuan atas kerentanan kolektif kita.

Sayangnya, janji-janji COVAX belum membuahkan hasil. Pada pertengahan Maret 2022, COVAX telah mengirimkan 1,37 miliar vaksin—jumlah yang signifikan, namun jauh dari target awalnya. Salah satu masalah terbesar yang membatasi kemampuan COVAX untuk membeli vaksin adalah kurangnya uang tunai. Pada awal tahun 2022, CEO Gavi Seth Berkley mengatakan bahwa COVAX “pada dasarnya kehabisan uang” dan memulai putaran pendanaan mendesak untuk mengumpulkan \$5,2 miliar (Associated Press, 2022). Dari 1,1 miliar dosis vaksin COVID yang dijanjikan Amerika Serikat pada tahun 2021 untuk dikirimkan pada tahun 2023 (tidak semuanya dimaksudkan untuk melalui COVAX), masih ada lebih dari 400 juta dosis yang belum dikirimkan atau dikirimkan pada bulan Mei 2023.

Apa yang menjelaskan perbedaan-perbedaan ini? Banyak negara kaya telah menjanjikan dana atau dosis vaksin untuk COVAX—namun komitmen besar mereka tidak sesuai dengan logika pasar. Negara-negara bagian ini membuat komitmen pembelian di muka dalam jumlah besar untuk warganya, yang pada gilirannya menaikkan harga sisa stok vaksin sebelum COVAX dapat dibentuk. Akibatnya, tindakan negara-negara kaya ini mengurangi daya beli COVAX dan meningkatkan harga yang harus dibayar oleh COVAX—dan penundaan negara-negara kaya dalam memenuhi janji keuangan mereka menghambat kemampuan

COVAX untuk benar-benar melakukan pembelian (Reardon, 2021). Meskipun hasil ini mungkin membuat frustrasi, namun hal ini sepenuhnya konsisten dengan aturan ekonomi politik internasional yang ada.

Perilaku ini semakin diperburuk oleh keterlibatan negara-negara donor dalam nasionalisme vaksin dan diplomasi vaksin. Nasionalisme vaksin “mengacu pada upaya mendapatkan vaksin demi kepentingan nasional. . . melalui perjanjian pasokan atau larangan ekspor, termasuk jika hal ini mungkin merugikan negara lain” (Vanderslott dkk., 2021), namun gambaran yang lebih ringkas adalah bahwa ini adalah pendekatan “negara saya yang utama” terhadap vaksin. Negara-negara mungkin bersedia membuat janji dalam upaya internasional untuk memvaksinasi dunia, namun mereka hanya akan melakukannya setelah mereka memiliki persediaan vaksin yang cukup untuk rakyat mereka sendiri. Alih-alih melihat vaksin COVID sebagai barang publik global, negara-negara kaya menafsirkannya sebagai barang zero-sum, artinya jika satu pihak mendapatkan sesuatu, maka pihak lain pasti akan rugi. Pola pikir ini memperburuk masalah yang coba diberantas oleh pemerintah karena hal ini mendorong negara-negara kaya untuk membeli sebanyak mungkin vaksin, sehingga pasokan vaksin tidak mencukupi bagi negara-negara yang kurang kaya—dan membuat negara-negara tersebut rentan (Peacock, 2022). Diplomasi vaksin mengacu pada proses negara-negara menggunakan dosis vaksin sebagai alat untuk meningkatkan hubungan mereka dengan negara penerima. Meskipun Peter J. Hotez (2021) memaparkan diplomasi vaksin sebagai alat untuk mempromosikan kebaikan bersama, banyak analisis melihatnya lebih bersifat transaksional. Yanzhong Huang (2021) mengomentari upaya diplomasi vaksin Tiongkok, “ke mana arah inokulasi Beijing, pengaruhnya akan mengikuti.” Perilaku seperti ini tidak hanya terjadi di Tiongkok; Samantha Kiernan, Serena Tohme, dan Gayeong Song (2021) mencatat bahwa Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan negara-negara donor terkemuka lainnya telah mengalokasikan sebagian besar sumbangan dosis vaksin mereka untuk “didistribusikan dengan cara yang memperkuat lingkungan tradisional para donor. pengaruh” dan bukan didasarkan pada kebutuhan dan kesetaraan global.

Baik nasionalisme vaksin maupun diplomasi vaksin dapat menggagalkan banyak tujuan tata kelola kesehatan global, namun keduanya konsisten dengan aturan ekonomi politik internasional saat ini. Antoine De Bengy Puyvallee dan Katerini Storeng (2022) menunjukkan bagaimana gagasan-gagasan ini bertentangan satu sama lain, sehingga mengarah pada situasi di mana “dampak COVAX dirusak oleh upaya donor dan industri terhadap keamanan nasional, kepentingan diplomatik, dan komersial, yang sebagian besar diakomodasi oleh COVAX.”

Bab ini tidak membahas evaluasi komprehensif mengenai kekurangan COVAX atau gambaran aturan ekonomi politik internasional terkait farmasi, namun penyimpangan singkat ini menggambarkan bahwa kita tidak bisa—dan tidak seharusnya—mencoba untuk melakukan hal ini. memisahkan ekonomi politik internasional dari tata kelola kesehatan global. Ketika kesehatan dan perdagangan saling bertentangan, kesehatan pada umumnya akan mengalami kerugian. Sistem tata kelola perdagangan global mempunyai kekuatan yang lebih besar, dan organisasi seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mempunyai wewenang untuk mengenakan sanksi yang dapat berdampak langsung pada negara.

Sebaliknya, sistem tata kelola kesehatan global sangat bergantung pada konsensus normatif dan saling menyalahkan untuk mendorong kepatuhan. Hal ini tidak berarti bahwa norma tidak berpengaruh dalam kesehatan global, karena sebagian besar negara sering kali mematuhi peraturan kesehatan global (Ruger, 2012). Namun faktanya masih terdapat banyak subsistem tata kelola global yang saling bersaing, dan negara-negara telah memutuskan untuk memberikan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada sistem ekonomi dibandingkan dengan sistem yang mengatur kesehatan. Sistem kami memprioritaskan mereka yang mampu membayar—dan melakukan hal tersebut atas risiko kita bersama.

7.5 KESIMPULAN, ATAU SETIDAKNYA PIKIRAN AKHIR

Pada bulan September 2019, saya berkesempatan memberikan ceramah dalam rangka peluncuran buku saya di institusi asal saya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa isu-isu yang saya sampaikan kepada audiens tentang sifat tata kelola kesehatan global dan keterkaitan antara globalisasi dan kesehatan akan menjadi hal yang utama dan utama bagi komunitas global dalam beberapa bulan ke depan. Salah satu pesan yang saya coba tekankan kepada para hadirin, dan dalam teks *Globalisasi dan Kesehatan*, adalah bahwa kemudahan pergerakan orang dan barang melintasi batas negara—yang merupakan ciri khas globalisasi—dapat meningkatkan risiko wabah penyakit. Namun, pada saat yang sama, kualitas-kualitas tersebut yang dapat meningkatkan risiko yang kita hadapi juga memberikan kita alat yang dapat kita gunakan untuk melawan wabah ini.

Terlepas dari semua yang telah terjadi selama dua tahun terakhir, saya masih mempercayainya. Pada saat yang sama, pandemi COVID harus menjadi katalis yang mendorong kita untuk terus mengeksplorasi keterkaitan antara globalisasi dan kesehatan serta lebih mempersiapkan diri menghadapi wabah berikutnya. Kita tahu bahwa kita akan melihat pandemi di masa depan; kita hanya tidak tahu kapan hal itu akan terjadi, di mana hal itu akan dimulai, dan apa penyebabnya. Inilah sebabnya kita perlu waspada dan menghindari siklus pengabaian panik yang cenderung menjadi ciri pendekatan yang cenderung diambil oleh pembuat kebijakan terhadap kesehatan global. Kita mungkin tidak dapat memprediksi masa depan, namun penting bagi kita untuk terus menerapkan pembelajaran yang kita pelajari sekarang untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menavigasi masa depan.

Penyakit tidak mengenal batas negara, dan pandemi COVID-19 telah memberikan pengingat yang jelas tentang perlunya negara-negara untuk tidak hanya memikirkan kepentingan kedaulatan mereka sendiri, namun juga mengambil pendekatan yang lebih kolaboratif. Dalam banyak hal, hal ini merupakan pelajaran yang sama yang telah kita pelajari dalam berbagai isu lainnya, seperti mengatasi perubahan iklim, melindungi lautan, dan memerangi polusi. Namun, pada saat yang sama, titik temu antara globalisasi dan kesehatan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 menunjukkan perlunya kebijakan holistik yang memusatkan faktor-faktor penentu sosial kesehatan (termasuk gender) dalam politik internasional, pentingnya merancang institusi yang mampu dapat memberi insentif pada pendekatan kooperatif yang diperlukan untuk mengatasi tantangan secara memadai, dan kebutuhan penting untuk mengakui keterkaitan kebijakan politik dan ekonomi. Daripada

melihat hal ini sebagai konflik antara kolektivisme yang meluas versus gagasan ketat tentang kedaulatan Westphalia, COVID-19 menunjukkan kepada kita perlunya membangun kebijakan, institusi, dan wadah diplomasi yang dapat menghargai keprihatinan dan kebutuhan lokal sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan global kita bersama. . Globalisasi dapat meningkatkan risiko kita terhadap pandemi, karena peningkatan arus manusia dan barang melintasi batas negara dengan kecepatan yang semakin meningkat memudahkan mikroba untuk menyebar, namun globalisasi juga dapat memberi kita alat dan informasi yang diperlukan untuk merespons secara tepat waktu.

BAB 8

MIGRASI VIRTUAL DAN PLATFORM PENDIDIKAN ONLINE TRANSNASIONAL

8.1 PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, migrasi virtual—pekerja yang menyediakan layanan transnasional tanpa mobilitas fisik tubuh pekerja—telah menjadi komponen penting dalam globalisasi. Bab ini mengacu pada platform pendidikan online transnasional yang menghubungkan kontraktor di Amerika Utara dengan pelajar muda bahasa Inggris di Tiongkok, khususnya ABCKID (nama samaran), untuk mengeksplorasi bagaimana migran virtual dari negara maju memberikan layanan kepada pelanggan di negara berkembang. Dengan menggunakan wawancara mendalam, survei, dan data online, saya mengilustrasikan bagaimana ABCKID telah memobilisasi kelompok sosial yang sangat mobile dan sangat tidak mobile yang sebelumnya terpinggirkan oleh berbagai pasar tenaga kerja—istri militer, digital nomad, dan ibu rumah tangga di Amerika. Amerika Serikat dan Kanada—untuk bergabung dalam platform ini, dan dengan demikian memperluas jumlah migran virtual. Keselarasan antara motivasi para migran virtual untuk mengatasi kendala pasar tenaga kerja dan karakteristik pekerjaan ABCKID tidak hanya mendorong mereka untuk bergabung dengan platform ini tetapi juga memberikan kepuasan kerja yang luar biasa bagi mereka. Meskipun platform ini menjauhkan kontraktor dari konteks lokalnya, kontraktor dari kelompok sosial ini telah menemukan makna dalam pekerjaan mereka. Saya membahas bagaimana mobilisasi kelompok sosial yang tadinya terpinggirkan menjadi migran virtual telah memfasilitasi transisi bentuk globalisasi, sekaligus mengaburkan dan membenarkan kontrol dan pengawasan globalisasi digital. Saya juga membahas dampak transisi ini terhadap arah globalisasi dan kesenjangan global.

Bagaimana individu melakukan pekerjaan dalam skala global merupakan pertanyaan penting dalam studi globalisasi. Ini juga merupakan jendela dimana kita dapat mengamati masa lalu, masa kini, dan masa depan globalisasi. Menurut Baldwin (2016, 2019), salah satu cara untuk memahami sejarah evolusi globalisasi adalah dengan menelusuri bagaimana cara pekerja memanfaatkan pasar tenaga kerja global secara bertahap beralih dari mobilitas fisik lintas batas ke telemigrasi—menggunakan Internet dan sarana transportasi lainnya. telekomunikasi untuk memberikan layanan kepada pasar dan pelanggan di negara lain. Telemigrasi juga dikenal sebagai migrasi virtual atau teleworking. Dalam bab ini, saya menggunakan migrasi virtual untuk menjelaskan kategori luas pekerja yang melakukan pekerjaan transnasional tanpa mobilitas fisik tubuh pekerja.

Hingga saat ini, sebagian besar studi tentang migrasi virtual berfokus pada bagaimana pekerja di negara-negara berkembang memberikan layanan kepada pelanggan dan pasar yang berbasis di negara-negara maju. Kita kurang mengetahui arah alternatif—apakah dan

bagaimana pekerja dari negara maju memberikan layanan kepada pelanggan di negara berkembang melalui migrasi virtual.

Bab ini mengacu pada platform pendidikan online transnasional, khususnya pemimpin pasar ABCKID, untuk menunjukkan arah alternatif ini. Seperti para pesaingnya, kantor pusat ABCKID berada di Tiongkok, dan ABCKID telah memobilisasi warga Amerika dan Kanada untuk mengajar bahasa Inggris online kepada siswa muda Tiongkok. Karena individu yang bekerja pada platform digital sering kali dikenal sebagai kontraktor independen dan peran utama kontraktor ABCKID adalah mengajar, bab ini menggunakan kata kontraktor dan guru secara bergantian ketika mendiskusikan individu yang bekerja pada ABCKID. Mengingat sifat pekerjaan di ABCKID, para kontraktor dan guru ini sebenarnya adalah migran. Sejauh enam pesaing utama ABCKID (7-Speak-Up, Tada English, MagiKid, Wonder Fun, Mango Lingo, ELIKid; semuanya adalah nama samaran) mengadopsi model bisnis yang sama dengan ABCKID dan berinteraksi dengan kontraktor mereka dengan cara yang sama. pemahaman ABCKID dan kontraktornya menyoroti pengoperasian semua platform pendidikan transnasional dan pekerjaan kontraktor mereka.

Pada akhir tahun 2010-an, ABCKID adalah salah satu platform pendidikan transnasional online terbesar di dunia. Bahkan pada tahun 2019, tahun sebelum pandemi ketika pendidikan online di seluruh dunia belum berkembang dibandingkan saat ini, ABCKID menghubungkan lebih dari seratus ribu guru Amerika Utara dengan lebih dari tujuh ratus ribu siswa Tiongkok (Business Wire, 2019). Tentu saja terdapat perubahan sosial makro yang mengakar yang telah mendorong begitu banyak guru di Amerika Utara untuk memberikan layanan pendidikan kepada pelajar Tiongkok melalui migrasi virtual. Salah satu perubahan tersebut terletak pada kebangkitan keluarga kelas menengah di Tiongkok sejak reformasi Deng Xiaoping dan menurunnya jumlah keluarga kelas menengah di Amerika Serikat karena melonjaknya utang, stagnasi upah, dan meningkatnya biaya hidup.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana partisipasi kontraktor individu berkembang dalam latar belakang makro ini, bab ini mengeksplorasi interaksi antara karakteristik organisasi tingkat meso dan motivasi individu tingkat mikro serta tingkat kepuasan kerja. Dengan menggunakan wawancara dan survei terhadap 37 guru ABCKID dan data online, saya mengungkap bagaimana karakteristik organisasi ABCKID telah membantu kelompok sosial baru mengatasi kendala pasar tenaga kerja, sehingga memobilisasi mereka untuk bergabung dengan platform ini dan memperluas jumlah migran virtual. Dengan mengetahui dinamika di tingkat meso dan mikro, kita akan mengetahui arah migrasi virtual di tingkat makro dan ketidaksetaraan global yang terkait. Melihat dinamika ini juga memberikan pencerahan baru mengenai peran globalisasi digital dalam mengarahkan arah globalisasi—apakah meningkatnya koneksi virtual dalam skala global dan menurunnya koneksi fisik membawa kita ke “deglobalisasi”, yang merupakan akhir dari globalisasi saat kita mengetahuinya, atau sekadar “reglobalisasi”, munculnya bentuk globalisasi yang berbeda? Setelah memperkenalkan platform dan profil dasar para kontraktornya, saya mengilustrasikan bagaimana kelompok sosial yang sangat mobile dan sangat tidak mobile di Amerika Serikat dan Kanada (misalnya, wisatawan global, istri militer, digital nomad, dan ibu rumah tangga)

sebelumnya menghadapi tantangan yang sama. kendala dalam, atau tidak adanya akses terhadap, berbagai pasar tenaga kerja lokal dan global. Saya menyebut orang-orang ini sebagai kelompok yang terpinggirkan secara sosial, mengingat kendala dan hambatan pasar kerja. Sebagai platform transnasional dan virtual yang menyediakan pekerjaan yang fleksibel dan portabel, ABCKID sangat menarik bagi kelompok sosial ini, dan telah membantu mereka mengatasi kendala pasar tenaga kerja. Keselarasan antara karakteristik organisasi ABCKID dan motivasi kontraktor telah memfasilitasi partisipasi kelompok sosial dan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Meskipun platform ini mengalihkan kontraktor dari konteks lokalnya, kontraktor dari kelompok sosial ini menemukan makna dalam pekerjaan mereka dan menerima kendali platform. Di akhir bab ini, saya membahas implikasi lebih luas dari temuan saya dalam memahami arah globalisasi dan kesenjangan global.

8.2 PLATFORM DAN KONTRAKTORNYA

Izinkan saya memperkenalkan platform dan kontraktornya terlebih dahulu. ABCKID adalah salah satu platform pengajaran online terbesar di dunia pada akhir tahun 2010an, dan salah satu perusahaan teknologi pendidikan yang paling dicari di kalangan investor global. Selain itu, ABCKID adalah sebuah platform dalam artian guru menunjukkan slot waktu yang tersedia, sementara siswa dan orang tua mereka memesan slot tersebut kepada guru. ABCKID juga bersifat transnasional: kantor pusatnya berada di Beijing, Tiongkok; guru-gurunya, sebagian besar warga negara AS dan Kanada, tinggal di seluruh dunia dan mengajar siswa yang tinggal di Tiongkok dari jarak jauh. ABCKID tidak mengharuskan guru bekerja pada waktu atau ruang yang telah ditentukan. Sebaliknya, sistem ini menggunakan pemantauan kamera, penilaian pelanggan, dan keterlibatan orang tua siswa untuk mengawasi tenaga kerja yang tersebar secara spasial.

Mengenai profil dasar pekerja, analisis survei saya terhadap 37 guru ABCKID memberikan petunjuk. Usia rata-rata dari 37 guru ini adalah 31,5 tahun. Dua puluh sembilan di antaranya adalah perempuan. Sedangkan untuk ras, 32 orang berkulit putih dan sisanya 1 orang Afrika-Amerika, 2 orang Hispanik, 1 orang kulit putih Asia, dan 1 orang kulit putih Hispanik. Kelompok ini merupakan kelompok yang berpendidikan tinggi: 4 orang bergelar PhD/JD, 18 orang bergelar master, dan sisanya bergelar sarjana. Mengenai kewarganegaraan, 36 orang adalah orang Amerika dan 1 orang Kanada. Hal ini memang wajar, karena ABCKID menuntut guru-gurunya menjadi penutur asli dengan aksen Amerika Utara.

Karena tertarik pada mobilitas pekerja, saya juga menganalisis lokasi 37 guru tersebut. Ketika mereka memulai pekerjaan ABCKID, 11 guru sedang belajar, bekerja, atau bepergian ke luar negara asal mereka di Amerika Serikat atau Kanada. Saat wawancara dilakukan pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019, 9 guru masih tinggal di luar negara asalnya. Negara dan wilayah tuan rumah tempat tinggal informan saya meliputi tiga negara Eropa (Jerman, Swedia, dan Kroasia), lima negara dan wilayah Asia (Korea Selatan, Jepang, Thailand, Hong Kong, dan Taiwan), serta Meksiko dan Taiwan. Ekuador. Patut dicatat bahwa tidak ada satu pun informan saya yang tinggal di Tiongkok Daratan selama wawancara.

8.3 DUA KELOMPOK KIAL DAN KENDALA LABORATORIUM ATAU PASARNYA

Penelitian yang lebih cermat terhadap guru-guru yang dijadikan sampel menunjukkan adanya dua kelompok marginal yang menghadapi kendala besar dalam pasar tenaga kerja domestik dan global. Kelompok pertama mencakup migran virtual dengan mobilitas tinggi, mencakup 11 warga negara AS yang belajar, bekerja, atau bepergian ke luar negeri dan 3 istri militer. Dari mereka yang pernah bepergian ke Eropa dan Asia, 2 diantaranya adalah digital nomad yang menggunakan telekomunikasi dan teknologi lainnya untuk mencari nafkah sambil terus bepergian. Ketiga istri militer tersebut juga harus sering berpindah-pindah bersama suaminya di Amerika Serikat atau di antara pangkalan militer AS di luar negeri. Kelompok sosial kedua mencakup individu yang tidak banyak bergerak, dengan ibu rumah tangga sebagai contohnya. Ada 3 ibu rumah tangga dalam sampel saya. Mereka tidak hanya jarang bepergian, tetapi juga jarang bekerja di luar rumah di komunitas lokalnya.

Memang benar, beberapa pekerja dalam kelompok dengan mobilitas tinggi mempunyai mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan pekerja lainnya. Misalnya, digital nomad biasanya lebih sering bepergian dibandingkan istri dari militer, yang rata-rata lebih mobile dibandingkan warga AS lainnya yang belajar di negara asing. Namun, seperti yang akan saya uraikan, semua pekerja ini menghadapi kendala serupa baik di pasar tenaga kerja lokal maupun nasional. Oleh karena itu, saya memasukkan semuanya ke dalam kelompok yang sangat mobile.

Sebagian karena mereka sangat mobile atau sangat tidak mobile, individu-individu yang terpinggirkan secara sosial ini menghadapi kendala baik di pasar tenaga kerja offline lokal atau pasar platform online yang melayani secara lokal (misalnya, pekerjaan di Uber atau DoorDash), atau pasar tenaga kerja online global yang didasarkan pada sistem yang kaku. jadwal (misalnya, pusat panggilan). Beberapa dari mereka bahkan menghadapi kendala di berbagai pasar tenaga kerja. Misalnya saja, para digital nomad dan istri dari militer biasanya menghadapi keterbatasan dalam mencari pekerjaan yang stabil di pasar tenaga kerja lokal. Sekalipun mereka dapat mengakses pekerjaan yang melayani secara lokal di platform online, mobilitas mereka yang tinggi menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut dalam jangka panjang.

Mobilitas yang tinggi juga menempatkan istri militer dan digital nomaden pada situasi di mana mereka rentan terhadap berbagai hukuman jika pindah. Clara, seorang istri militer berusia 27 tahun dan mantan guru sekolah menengah, memberikan rincian tentang bagaimana kendala pasar kerja, jika digabungkan dengan penurunan pangkat sebagai hukuman dalam sistem sekolah umum, mendorongnya keluar dari sistem:

Suami saya bertugas di militer, jadi kami cukup sering berpindah-pindah. Sangat sering . . . Kami baru saja pindah ke sini sebulan yang lalu. Kami akan pindah lagi, mungkin dalam lima atau enam bulan. Jadi mendapatkan pekerjaan sekolah umum selama satu semester? Saya akan merasa sangat tidak jujur jika saya berjanji untuk berada di sana selama satu tahun. Tidak ada yang akan mempekerjakan saya selama lima atau enam bulan. Tidak seorang pun. Kami tidak tahu ke mana kami akan pergi dalam lima atau enam bulan. . .

Saya telah berganti pekerjaan, berganti distrik [sekolah]. Saya mengajar selama dua tahun di dua distrik yang berbeda. Itu berantakan. Kami tinggal di tiga tempat berbeda di Texas. Dan di Texas, setiap kali Anda berpindah distrik, mereka memindahkan Anda kembali ke guru tahun pertama.

Bahkan bagi warga negara AS dan Kanada yang bepergian ke negara lain untuk belajar atau bekerja, mereka sering menghadapi hambatan institusional di negara tuan rumah, seperti peraturan visa yang membatasi peluang kerja bagi non-warga negara. Misalnya, Bella adalah seorang guru perempuan kulit putih berusia 27 tahun yang merupakan warga negara AS. Dia telah tinggal di Swedia pada saat wawancara. Ia menjelaskan bagaimana awalnya ia mengalami kendala pasar kerja terkait visa setelah kehilangan pekerjaan sebelumnya di Swedia, dan bagaimana situasi ini pada akhirnya mendorongnya untuk menjajaki peluang kerja virtual bersama ABCKID:

Saya tinggal di Swedia pada saat itu, dan saya kehilangan pekerjaan yang saya miliki di Swedia. Karena peraturan visa, saya tidak bisa melakukan pekerjaan lain. Saya hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan yang selama ini saya lakukan. Jadi, sampai saya mendapatkan registrasi yang benar, secara teknis saya tidak bisa melamar pekerjaan apa pun di Swedia. Jadi ketika saya kehilangan pekerjaan itu, saya harus mencari pilihan pekerjaan jarak jauh yang bisa saya lakukan sebagai warga negara AS namun tidak tinggal di AS. Jadi pada dasarnya saya melakukan banyak penelitian tentang pekerjaan online. . . (Informan no.3)

Dalam beberapa kasus, seseorang memulai perjalanan global hanya karena mereka berusaha mengubah jalur karier, namun menghadapi hambatan dalam melakukan perjalanan tersebut, baik di wilayah asal mereka maupun wilayah lain di negara yang sama. Misalnya, Kristin adalah seorang guru perempuan berusia 37 tahun, dan dia sering bepergian ke luar negeri ketika dia gagal mengubah kariernya di dalam negeri:

Saya mulai mengajar pada tahun 2014 di Taiwan di sebuah sekolah bahasa. Kemudian saya pindah ke Myanmar pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 saya pindah ke China. Dari 2017 hingga 2018 di Polandia. Dan 2018 hingga 2019 di Jepang. Saya mengambil jurusan drama dan komunikasi, yang saya sukai. Saya tinggal di San Francisco selama lima tahun, melakukan segala macam hal. Sebelum saya pindah ke luar negeri, saya adalah koordinator acara khusus untuk organisasi nirlaba. Maksud saya, ini sangat berbeda dari apa yang saya lakukan nanti. Namun saya telah mencapai titik di mana langkah selanjutnya adalah penggalangan dana. Dan saya sangat buruk dalam meminta uang kepada orang lain. Baru saja merasa sangat tidak nyaman. Ini lucu, karena saya sedang mencari pekerjaan di negara bagian lain. Hanya butuh perubahan. Namun lebih mudah untuk pindah ke belahan dunia lain daripada pindah ke negara bagian lain. Itu sangat lucu. Kecuali Anda berada di sana, orang tidak akan melihat lamaran Anda jika Anda tidak berada di negara bagian tersebut.

Bagi wisatawan global, digital nomaden, dan istri militer, mobilitas mereka yang tinggi juga dikaitkan dengan banyak periode dan situasi transisi: kebutuhan terus-menerus untuk menetap di tempat baru, transisi ke peran baru, dan penyesuaian diri dengan lingkungan baru. Situasi ini mempersulit proses mengakses berbagai pasar tenaga kerja.

Sedangkan bagi kelompok dengan mobilitas terbatas, khususnya ibu rumah tangga, menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk merawat anak di rumah berarti mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses pekerjaan offline lokal, serta pekerjaan online yang memiliki jadwal yang kaku. Meskipun ibu rumah tangga dapat bekerja di platform layanan lokal (misalnya, Uber dan DoorDash) yang memungkinkan jadwal fleksibel, fakta bahwa mereka adalah perempuan dan pekerjaan ini memerlukan interaksi tatap muka dengan pelanggan sering kali menimbulkan keraguan di kalangan ibu rumah tangga. ibu-ibu ini.

Bagi ibu rumah tangga di daerah tertentu, budaya lokal memberikan hambatan tambahan. Misalnya, di Utah banyak ibu tidak bisa keluar rumah untuk mencari pekerjaan karena budaya lokal yang dipengaruhi oleh Mormonisme memaksa mereka untuk tinggal di rumah. Judy, seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun di Utah, mengungkapkan tekanan di lingkungannya sebagai berikut:

Dari orang-orang yang saya kenal yang melakukan, mereka semua adalah ibu rumah tangga. Di tempat saya tinggal, hampir semua ibu adalah ibu rumah tangga. Begitulah budaya di tempat saya tinggal. Seperti itulah rasanya. . . Maksud saya, hal ini memuaskan dan bermanfaat, namun terkadang tidak. . . itu monoton.

Singkatnya, pasar tenaga kerja tidak terlalu bersahabat terhadap individu-individu yang berada pada dua sisi spektrum mobilitas: mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau mobilitas tinggi menghadapi berbagai kendala dalam mengakses pasar tenaga kerja, meskipun tingkat dan jenis hambatan untuk masing-masing kelompok berbeda-beda. Bagi individu-individu tertentu dalam kelompok ini, seperti ibu rumah tangga, kendala pasar tenaga kerja bisa sangat besar sehingga mereka tidak dapat mengakses seluruh pasar tenaga kerja.

8.4 BERALIH KE MIGRASI VIRTUAL

Bagian ini akan menggambarkan bagaimana individu-individu yang terpinggirkan secara sosial, terutama mereka yang berada dalam kelompok dengan mobilitas tinggi dan mobilitas tinggi, telah menjadi kontraktor ABCKID. Saya menyoroti bagaimana karakteristik organisasi ABCKID menarik bagi kedua kelompok ini. Partisipasi mereka dalam pekerjaan platform transnasional memperluas jumlah migran virtual.

Sebagai platform virtual, berbasis rumah, dan transnasional jenis baru, ABCKID menghasilkan lapangan kerja yang dikenal dengan pendapatan yang relatif kompetitif, fleksibilitas jadwal, dan portabilitas. ABCKID memberikan pendapatan yang relatif kompetitif dan pemesanan yang stabil. Ia membayar upah per jam yang berkisar antara Rp. 140.000 hingga Rp. 220.000, dan gaji rata-rata per jam di antara guru dalam sampel saya adalah sekitar Rp. 200.000. Ada konsensus di antara para informan saya bahwa gaji ini lebih tinggi dibandingkan sebagian besar pekerjaan lain di platform yang pernah mereka kerjakan, misalnya menjadi pekerja transkripsi atau penata pakaian lepas (informan no. 8, no. 14, no. 23). Menurut Grace, seorang ibu rumah tangga berusia 36 tahun yang tinggal di Pennsylvania dan telah bekerja di berbagai platform, “untuk pekerjaan lain, pekerjaan sah lainnya dari rumah di tingkat pemula, gaji per jam mereka bahkan tidak mendekati [dengan ABCKID]”

(informan no. 14). Selain itu, ABCKID menyediakan pemesanan yang lebih stabil dibandingkan banyak platform lainnya, sehingga memastikan jam kerja dapat diprediksi.

Pendapatan yang relatif kompetitif dan pemesanan yang stabil merupakan hal yang menarik meskipun banyak kontraktor hanya tertarik menggunakan pekerjaan ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tabel 8.1 melaporkan motivasi orang yang saya wawancarai untuk memulai pekerjaan mereka di platform, dan saya melakukan analisis frekuensi untuk setiap motivasi yang disebutkan. Tentu saja, banyak yang bergabung dengan ABCKID karena berbagai alasan, dan 33 guru menyebutkan berbagai motivator. Seperti yang terlihat pada tabel 8.1, mendapatkan sedikit penghasilan tambahan merupakan motivasi yang paling sering dibicarakan oleh para informan saya. Dua puluh lima informan menyebutkan bahwa mendapatkan penghasilan tambahan merupakan salah satu motivasi utama bekerja di ABCKID.

Kompensasi yang kompetitif, bila dipadukan dengan jam kerja yang fleksibel dan portabilitas pekerjaan, menjadikan pekerjaan tersebut lebih menarik secara luas. Seperti pekerjaan platform lainnya seperti mengemudi Uber, bekerja di ABCKID didasarkan pada jadwal yang fleksibel. Kontraktor dapat memutuskan kapan memulai dan kapan berhenti bekerja. Apalagi kontraktor hanya membutuhkan komputer atau iPad untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya di ABCKID. Artinya, pekerjaan tersebut sepenuhnya virtual dan portabel: kontraktor dapat melakukan pekerjaan di rumah, atau mereka dapat membawa pekerjaan tersebut ke mana saja yang memiliki koneksi Internet.

Kombinasi karakteristik organisasi ini sangat menarik bagi kelompok yang memiliki mobilitas tinggi dan kelompok yang tidak memiliki mobilitas tinggi. Bagi istri-istri militer dan ibu rumah tangga yang suaminya biasanya memikul tanggung jawab keuangan utama, apa yang sering dicari perempuan dari pekerjaan bukanlah “membawa pulang hasil”, melainkan sedikit penghasilan tambahan dan sesuatu untuk dikerjakan. Fleksibilitas pekerjaan ABCKID khususnya menarik bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi yang perlu sering bepergian, dan mereka yang tidak memiliki mobilitas tinggi yang menghabiskan sebagian besar waktunya merawat anggota keluarga di rumah. Portabilitas pekerjaan ini semakin memastikan bahwa kontraktor di platform ini terbebas dari interaksi tatap muka dengan pelanggan. Oleh karena itu, para kontraktor, khususnya kontraktor perempuan, tidak perlu khawatir akan keselamatan dirinya dalam bekerja.

Yang lebih penting lagi, kombinasi karakteristik organisasi ini memungkinkan kelompok yang memiliki mobilitas tinggi untuk mengatasi kendala pasar tenaga kerja. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 8.1, 18 informan menyebutkan bahwa salah satu alasan penting mereka memilih bekerja di ABCKID adalah karena platform tersebut membantu mengatasi kendala yang diberlakukan oleh negara tuan rumah bagi non-warga negara, seperti peraturan visa. Hal ini menjadikan mengatasi kendala pasar tenaga kerja sebagai motivasi kedua yang paling sering disebutkan.

TABEL 8.1 Motivasi Kerja, Frekuensinya, dan Kutipan Representatif di Kalangan Guru ABCKID

Motivator	Frekuensi	Kutipan Perwakilan
Menghasilkan uang tambahan	25	<p>“Saya butuh sedikit uang tambahan.” (Beberapa informan)</p> <p>“Saya seorang guru, jadi saya tidak menghasilkan banyak uang. Saya sedang memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk pekerjaan musim panas, sesuatu yang fleksibel sehingga saya masih bisa bepergian dengan putri saya.” (Informan no. 20)</p>
Mengatasi kendala pasar tenaga kerja	18	<p>“Saya kehilangan pekerjaan yang saya miliki di Swedia. Karena peraturan visa, saya tidak bisa melakukan pekerjaan lain.” (Informan no.3)</p> <p>“Suami saya mendapat pekerjaan di Universitas Cape Town. Kami pindah ke sini. . . Ada beberapa batasan pada visa saya dalam hal jenis pekerjaan yang dapat saya lakukan. Kami juga membutuhkan dolar AS pada saat itu.” (Informan no. 12)</p> <p>“Suami saya bertugas di militer, jadi kami cukup sering berpindah-pindah. . . Jadi mendapatkan pekerjaan sekolah umum selama satu semester? Saya akan merasa sangat tidak jujur jika saya berjanji untuk berada di sana selama satu tahun. Tidak ada yang akan mempekerjakan saya selama lima atau enam bulan. Tidak ada siapa-siapa.” (Informan no.8)</p> <p>“Saya tidak tahan berada jauh, Anda tahu, bekerja selama sepuluh jam sehari, merindukan segalanya, pada dasarnya merindukan pertumbuhannya. Itu sebabnya saya sudah lama mencari sesuatu yang jauh dan saya belum dapat menemukan apa pun. Jadi ini jelas merupakan sebuah motivator [bagi ibu rumah tangga yang bekerja di ABCKID].” (Informan no.14)</p>
Melewati masa dan situasi transisi	17	<p>“Saat saya mulai, saya baru saja kembali dari Taiwan. Saya sebenarnya sedang mencari di beberapa perusahaan berbeda. . . Saya tinggal di Denver Colorado, tetapi saya mengikuti audisi untuk sebuah grup tari di Indianapolis. Jadi saya butuh sesuatu yang bisa dipindahkan ke kedua tempat itu.” (Informan no. 28)</p> <p>“Saya baru saja kembali dari Thailand dan saya perlu melakukan sesuatu sambil menetap.” (Informan no. 23)</p> <p>“Saya berada di sekolah pascasarjana sebelum itu. Saya berada di sekolah terapi fisik, dan saya melakukannya selama beberapa semester. Saya baru saja sampai pada titik ini Saya berpikir, ini bukanlah hal yang ingin saya lakukan dalam hidup saya, jadi saya berhenti sejenak dari hal itu dan saya mencari pekerjaan atau melakukan sesuatu sambil memikirkan berbagai hal.” (Informan no.1)</p>
Latar belakang, minat, dan	10	<p>“Saya sangat menikmati mengajar. Saya mengajar ESL sebentar, hanya beberapa minggu dalam perjalanan ke China. Saya menikmatinya.” (Informan no. 34)</p>

spesialisasi yang sesuai		<p>“Saya dulu mengajar bahasa Inggris di Taiwan jadi saya ingin menggunakan pengalaman saya sebelumnya.” (Informan no. 28)</p> <p>“Saya seorang guru penuh waktu dengan gelar master di bidang ESL.” (Informan nomor 21)</p>
Cobalah	5	<p>“Saya berpikir, ini pantas untuk dicoba. Jika berhasil, itu bagus. Jika tidak, tidak apa-apa juga.” (Informan no. 26)</p> <p>“Tidak banyak ruginya.” (Informan no.5)</p> <p>“Saya bolak-balik sebentar karena zona waktu saya, saya tidak tahu apakah saya bisa melewatinya. Dan saya memutuskan, Anda tahu, jika saya membencinya, saya dapat mencari hal lain untuk dilakukan. Itu pantas untuk dicoba. Sekarang ini adalah sumber penghasilan utama saya.” (Informan no. 34)</p>

Bagi istri militer yang sering bepergian, baik secara global maupun domestik, bekerja di ABCKID berarti mengatasi kendala pasar tenaga kerja secara langsung. Misalnya, Rebecca adalah seorang guru wanita berusia 33 tahun dan seorang istri militer. Dia membahas bagaimana pekerjaan di ABCKID membantunya mengatasi masalah pengangguran yang terkait dengan seringnya berpindah-pindah dan bagaimana pengalaman positif menginspirasi untuk mempertahankan pekerjaan ini sebagai karier seumur hidup:

Salah satu hal besar bagi saya adalah portabilitas karir ini, karena suami saya sedang menjalani wajib militer. Dia mendaftar sekitar delapan tahun yang lalu. Dia akan menjadi seorang militer karir. Jadi setiap kali kami pindah di masa lalu, meskipun saya bekerja di federal, karena birokrasi dan lambat, saya selalu mengalami masa pengangguran setidaknya selama beberapa bulan. Kadang sampai enam bulan. Kami pindah ke Jerman, dan kemudian pindah kembali dari Jerman ke Texas—itu adalah langkah yang sangat besar. Maksudku, aku seperti, tidak bekerja selama enam bulan. Saya tidak suka tidak bekerja. Saya tidak senang, hanya di rumah, tidak melakukan apa pun. Jadi saya pikir saya akan tetap bersama ABCKID, bukan sebagai pekerja penuh waktu. Tapi selalu ada, terutama saat beraktivitas. Saya tahu mungkin ada langkah lain yang akan dilakukan pada bulan November. Saya tidak tahu kemana kami akan pindah, atau semacamnya. (Informan no.31)

Tabel 8.1 juga menunjukkan bahwa motivator ketiga yang paling sering disebutkan adalah penggunaan pekerjaan saat ini untuk memperlancar masa dan situasi transisi. Meskipun beberapa orang termotivasi untuk menggunakan pekerjaan ini ketika mencoba untuk menetap di dalam negeri setelah melakukan perjalanan global, yang lain menggunakan pekerjaan ini karena mereka mencoba mencari tahu jalur karier masa depan mereka. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, banyak dari periode transisi ini dikaitkan dengan seringnya perpindahan. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang menyebut motivator ini adalah individu yang memiliki mobilitas tinggi, seperti pelancong global dan istri militer.

Sedangkan bagi kelompok yang memiliki mobilitas terbatas, terutama ibu rumah tangga, banyak yang tidak masuk dalam pasar tenaga kerja karena berbagai kendala. Kemungkinan untuk mengatasi kendala-kendala ini dan memenuhi tugas rumah tangga dan pekerjaan telah menjadi pertimbangan utama ketika mengevaluasi pekerjaan baru. Grace, ibu rumah tangga dari seorang anak perempuan berusia dua tahun yang disebutkan sebelumnya, berkata:

Saya tidak tahan berada jauh, Anda tahu, bekerja selama sepuluh jam sehari, merindukan segalanya, merindukan pertumbuhannya, pada dasarnya. Itu sebabnya aku sudah lama mencari sesuatu yang jauh dan aku belum bisa menemukan apa pun. Jadi itu pasti menjadi motivator. (Informan no.14)

Dengan memobilisasi kelompok sosial yang sebelumnya menghadapi kesulitan dalam pasar tenaga kerja, ABCKID telah memperluas jumlah migran virtual. Karena karakteristik organisasi ABCKID sangat membantu dalam mengatasi kendala pasar tenaga kerja bagi kelompok yang memiliki mobilitas tinggi dan sosial tinggi, pekerjaan ini dikenal sebagai pekerjaan ideal bagi kelompok sosial tersebut.

Pemeriksaan saya terhadap ulasan pekerjaan ini oleh kontraktor di Glassdoor menegaskan hal ini: ketika kontraktor diminta untuk membuat daftar “pro” dan “kontra” pekerjaan tersebut, “pro” yang paling sering disebutkan untuk bekerja dengan ABCKID, muncul di 254 dari 1.164 ulasan, adalah “bekerja dari rumah atau saat bepergian.” Faktanya, pekerjaan ini sangat ramah terhadap wisatawan sehingga, menurut seorang guru ABCKID, “menarik orang-orang yang tidak seharusnya menjadi guru” dan “mengajar di kamar mandi bandara” (informan no. 26). “Pro” lain yang muncul dalam 32 ulasan di Glassdoor adalah, “ini adalah pekerjaan yang bagus untuk ibu rumah tangga.” Ketika orang-orang yang berada pada dua kelompok spektrum mobilitas ini bergabung dengan ABCKID secara massal, jumlah migran sebenarnya membengkak.

8.5 PENGALAMAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA IMIGRAN VIRTUAL

ABCKID telah membantu kelompok dengan mobilitas tinggi dan mobilitas tinggi mengatasi kendala pasar kerja, dan pekerjaan ini juga memungkinkan para migran virtual mendapatkan uang tambahan dengan jadwal yang fleksibel. Oleh karena itu, sebagian besar guru, terutama mereka yang berasal dari kelompok yang sangat mobile dan sangat tidak mobile, melaporkan kepuasan yang tinggi terhadap pekerjaan ini. Di bawah ini saya dokumentasikan dulu bagaimana ABCKID mengatur pengajaran dan mengontrol guru. Dengan latar belakang inilah, tingginya tingkat kepuasan guru menjadi suatu hal yang membingungkan.

ABCKID dikenal dengan dua pendekatan yang tampaknya bertentangan dalam manajemen dan evaluasi guru: model lepas tangan dan manajemen mikro. Di satu sisi, ABCKID menerapkan manajemen guru dengan mendorong orang tua untuk berpartisipasi di kelas dan mengevaluasi guru. Model lepas tangan ini, yang bergantung pada evaluasi pelanggan, serupa di seluruh sektor ekonomi platform. Di sisi lain, ABCKID melakukan manajemen mikro dengan

melakukan intervensi pada apa dan bagaimana cara mengajar. ABCKID menawarkan konten pendidikan yang disiapkan secara terpusat kepada guru. Platform ini mengadopsi kurikulum berbasis American Common Core dan menyiapkan struktur kursus standar untuk para guru. ABCKID juga memberikan slide kursus kepada guru dan meminta guru menggunakan slide tersebut. Bahkan upaya untuk membakukan cara guru mengajar. Misalnya, guru diharuskan memberi siswa berbagai bentuk penghargaan virtual dan menggunakan alat peraga (misalnya mainan) sesering mungkin. Banyak guru menyambut baik model yang dipersiapkan secara terpusat ini, terutama karena model ini mengurangi waktu persiapan kursus mereka. Selain itu, ABCKID melarang guru terlihat menguap, menyeruput kopi, atau menyandarkan lutut di atas meja. Selain itu, platform ini sangat ketat terhadap pembatalan kelas dan ketidakhadiran guru. Guru perlu menunjukkan catatan rawat inap atau surat kematian anggota keluarga dekat untuk membatalkan kelas tanpa membahayakan kontrak mereka.

Sekalipun mereka dapat menunjukkan bukti tersebut, mereka masih sering menghadapi denda. Meskipun platform ini memiliki manajemen mikro dan peraturan yang ketat, sebagian besar guru ABCKID yang saya wawancarai merasa puas dengan pengaturan kerja mereka, dan bahkan menganggap pekerjaan mereka di ABCKID bermakna. Dalam survei tersebut, saya meminta setiap informan untuk mengevaluasi kepuasan kerja mereka pada skala 1–5, dan angka 5 berarti sangat puas.

TABEL 8.2 Rata-rata Kepuasan Kerja di Seluruh Grup

	Jumlah Informan	Rata-rata Skor Kepuasan Kerja (1 = sangat tidak puas dan 5 = sangat puas)
Grup yang Sangat Mobile dan Sangat Tidak Bergerak	17	4.59a
Lainnya	19	4.11a

CATATAN: Responden yang ada hanya 36 orang karena ada satu responden yang datanya hilang.

a Uji-t menunjukkan bahwa rata-rata kedua kelompok berbeda secara signifikan ($p < 0,05$).

Rata-rata tingkat kepuasan 36 responden adalah 4,33. Peringkat kepuasan kerja yang tinggi dalam sampel saya konsisten dengan evaluasi ABCKID dalam laporan media dan situs ulasan pekerjaan. Misalnya, Forbes menempatkan ABCKID sebagai pekerjaan “bekerja dari rumah” No. 1 pada tahun 2017 dan No. 3 pada tahun 2018. Sebagai perbandingan, Amazon Mechanical Turk menduduki peringkat No. 3 pada tahun 2017 dan No. 7 pada tahun 2018 dalam daftar yang sama. . Pada tahun 2020, sebagian besar ulasan positif dari para guru membantu ABCKID menduduki peringkat 10 Besar dalam Tempat Kerja Terbaik Glassdoor di AS (Business Wire, 2019).

Kontraktor sangat puas bekerja dengan ABCKID bukan hanya karena gajinya yang kompetitif, jadwal yang fleksibel, dan mudah dibawa, namun juga karena karakteristik organisasi ini sangat diterima oleh kelompok yang sangat mobile dan sangat tidak mobile. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 8.2, 19 kontraktor yang termasuk dalam kelompok yang tidak memiliki mobilitas tinggi maupun kelompok yang sangat tidak berpindah-pindah

menunjukkan tingkat kepuasan kerja rata-rata sebesar 4.11. Sebagian besar kontraktor dalam kelompok ini adalah guru sekolah, mahasiswa pascasarjana, atau staf hukum yang tidak memperoleh gaji tinggi dari pekerjaan penuh waktu mereka.

Sebagai perbandingan, 17 kontraktor dalam kelompok mobilitas tinggi dan mobilitas tinggi merasa lebih puas. Rata-rata peringkat kepuasan kerja 17 kontraktor ini adalah 4,59, lebih tinggi dibandingkan 19 guru lainnya. Perbedaan rata-rata peringkat kepuasan kerja antara 17 dan 19 guru adalah signifikan secara statistik ($p < 0,05$). Tentu saja, masuk akal untuk menanyakan apakah hasil tes tersebut valid mengingat ukuran sampel yang kecil, dan kehati-hatian diperlukan ketika menarik kesimpulan umum pada tingkat populasi. Meskipun demikian, fakta bahwa uji-t memperhitungkan ukuran sampel dan bahwa hasilnya signifikan secara statistik meskipun sampelnya kecil memiliki setidaknya satu implikasi: rata-rata tingkat kepuasan kerja dari 17 informan memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan kerja rata-rata dari 19 informan lainnya. Faktanya, peringkat tinggi dari 17 guru meningkatkan kepuasan kerja secara keseluruhan dalam sampel saya.

Salah satu alasan utama mengapa 17 guru ini merasa sangat puas adalah karena menjadi migran virtual di ABCKID telah memberdayakan mereka untuk mengatasi kendala pasar tenaga kerja. Mereka kini tidak hanya mampu mendapatkan pekerjaan yang di masa lalu tampak mustahil, namun juga mampu mendamaikan kewajiban yang saling bertentangan antara tetap bekerja dan menghidupi keluarga mereka. Clara, istri tentara yang disebutkan sebelumnya, menyebut pengalamannya bersama ABCKID “sempurna” karena dia bisa “pindah dan masih mempunyai pekerjaan” (informan no. 8). Setelah bekerja di ABCKID, dia juga meningkatkan kunjungannya ke anggota keluarga besarnya di kota-kota AS lainnya karena “seluruh ruang kelas bisa muat di dalam koper.” Menjadi migran virtual di luar negeri juga berarti tidak harus bangun pagi-pagi untuk mengajar, seperti yang dilakukan banyak kontraktor di Amerika Serikat. Saya akan menguraikannya di bagian berikut. Selain itu, pengalaman ibu rumah tangga sebagian besar positif karena mengajar di ABCKID memungkinkan mereka untuk memasuki dunia kerja tanpa mengabaikan tanggung jawab pengasuhan anak.

Bagi ibu yang tinggal di rumah, sumber kepuasan lainnya adalah menghabiskan lebih sedikit waktu, uang, dan sumber daya dalam perjalanan dan karenanya memiliki dedikasi yang lebih besar terhadap pengasuhan anak. Beberapa informan rela mengorbankan pekerjaan mereka yang sebelumnya bergaji lebih tinggi demi waktu perjalanan yang lebih singkat. Seperti disebutkan sebelumnya, Grace adalah seorang ibu rumah tangga berusia 36 tahun yang tinggal di Pennsylvania. Dia dulu bekerja di bank tetapi berhenti setelah putrinya lahir. Ia menjelaskan mengapa ia berhenti bekerja di bank meskipun gajinya lebih tinggi dibandingkan ABCKID:

Saya pikir rata-rata orang mendapat penghasilan sekitar 20 dolar per jam dengan ABCKID.

Jumlahnya pasti lebih kecil dari apa yang saya hasilkan di bank. Tapi [Anda juga harus mempertimbangkan] tidak perlu bepergian, tinggal di rumah, dan mengatur jam kerja Anda sendiri. Satu-satunya kelemahan adalah asuransi kesehatan. Saya harus membayar asuransi kesehatan saya

sendiri. Tapi yang lainnya seperti saya baik-baik saja menghasilkan lebih sedikit uang selama saya bisa tinggal di rumah. (Informan no.14)

Alasan utama kedua atas tingginya tingkat kepuasan terletak pada kenyataan bahwa pengaturan pekerjaan yang fleksibel di bawah ABCKID telah menambah warna dalam kehidupan dan mengurangi monoton. Faktor-faktor ini juga sangat membantu bagi ibu rumah tangga dan istri militer yang dulunya kurang memiliki kehidupan sosial. Judy dan Madeline, yang merupakan ibu rumah tangga, mengindikasikan bahwa pekerjaan tersebut memberi mereka “sesuatu yang menyegarkan” di pagi hari dan “sesuatu yang lain untuk mengisi hari” (informan no. 17, no. 29). Madeline menambahkan, bekerja di ABCKID membuat mengasuh putrinya semakin menyenangkan (informan no. 29).

Alasan ketiga di balik tingginya tingkat kepuasan kerja adalah karena menjadi migran virtual di ABCKID memungkinkan beberapa guru mewujudkan impian mereka. Misalnya, dua digital nomaden dalam sampel saya mengatakan bahwa mereka selalu ingin bepergian sambil menghidupi diri mereka sendiri secara finansial. Namun mereka tidak mungkin menjalani kehidupan seperti itu jika mereka bekerja dalam sistem kerja tradisional. Mereka telah memilih untuk melakukan perjalanan keliling dunia ketika mereka menyadari bahwa mereka dapat membawa pekerjaan ABCKID ke mana pun mereka dapat menggunakan wi-fi.

Brian, seorang guru laki-laki berusia 27 tahun yang sedang bepergian keliling Eropa, adalah salah satunya. Dia menjelaskan bahwa dia pertama kali terjebak antara pekerjaan yang tidak dia sukai dan pengangguran setelah lulus dari perguruan tinggi seni liberal dengan pinjaman mahasiswa. Dia memutuskan untuk menjadi pengembara digital yang bepergian melintasi Eropa:

Saya pernah bekerja di Perusahaan Amerika [sebelum bergabung dengan ABCKID] dan itu adalah organisasi yang buruk. [Itu terjadi di] perbankan, industri hipotek. Sangat buruk . . . Jadi saya sungguh, saya tidak punya rencana lain. Tapi itu juga bukan karena putus asa, karena tabunganlah yang membawa saya melewati masa-masa menganggur. Saya hanya mencoba memikirkan langkah selanjutnya karena usia saya. Umurku 27 tahun. Tahun lalu umurku 25 tahun dan bertambah menjadi 26 tahun. Kelompok umurku, sepertinya kita semua terbebani oleh hutang pinjaman mahasiswa. Kita tidak bisa membiayai rumah karena generasi X bisa mengalahkan kita dengan modal yang tidak kita miliki. Dan sepertinya, semua teman saya bekerja di Perusahaan Amerika atau mereka memiliki pekerjaan yang tidak memuaskan. Pekerjaan khusus ini [di ABCKID] memungkinkan saya untuk bepergian. (Informan no. 4)

8.6 TERLEPAS DARI KONTEKS LOKAL DAN MAKNA BAGI MIGRAN VIRTUAL

Meskipun kontraktor ABCKID masih mempunyai kehidupan lokal dan ABCKID telah membantu dalam mengatasi berbagai kendala pasar tenaga kerja, platform ini mengalihkan kontraktornya dari konteks lokal mereka. Berbagai bentuk dislokasi merupakan manifestasi tingkat mikro dari transisi dari globalisasi yang diwujudkan ke globalisasi yang tidak berwujud digital (Steger & James, 2020). Menurut kedua pakar tersebut, globalisasi yang diwujudkan ditandai dengan mobilitas fisik tubuh manusia, sedangkan globalisasi yang tidak diwujudkan

mencakup pertukaran ide, informasi, dan data yang dimediasi secara digital. Transisi ini, menurut mereka, tidak hanya kacau namun juga kontradiktif: di satu sisi, kebangkitan globalisasi yang tidak berwujud memberikan para pekerja fleksibilitas kerja yang lebih besar, kepuasan kerja yang lebih tinggi, dan kadang-kadang bahkan lebih banyak akses terhadap pekerjaan; di sisi lain, peralihan ke arah globalisasi yang tidak berwujud sering kali dikaitkan dengan keterpisahan dan disorientasi pekerja dari keterikatan yang nyata pada dunia sosial lokal. Di bawah ini saya menyoroti tiga cara terjadinya berbagai bentuk dislokasi di ABCKID.

Pertama, kontraktor ABCKID terdislokasi dari waktu setempat. Kontraktor ABCKID diharuskan untuk menyesuaikan jadwal siswanya. Karena siswa Tiongkok biasanya menggunakan layanan pendidikan tambahan ini pada jam-jam setelah jam sekolah seperti malam hari, para guru ABCKID yang tinggal di Amerika Utara menyapa siswanya dengan “selamat malam” pada jam-jam awal pagi para guru tersebut. Jam kerja umum bagi guru yang tinggal di Pantai Timur adalah pukul 06.00–08.00. Guru yang tinggal di Pantai Barat menghadapi jam kerja yang lebih menantang karena mereka harus mengajar mulai pukul 03.00 hingga 05.00. Guru yang tinggal di Asia dan Eropa menikmati jam kerja yang lebih nyaman pada sore dan malam hari. Bella, guru asal Swedia yang dikutip sebelumnya, bahkan mengatakan bahwa ia tidak akan mempertimbangkan ABCKID seandainya ia masih tinggal di Amerika Serikat (informan no. 3).

Karena jadwal pekerjaan platform fleksibel, kontraktor ABCKID dapat lebih terdislokasi dari waktu setempat dibandingkan mereka yang mengerjakan jenis pekerjaan migrasi virtual lainnya dengan jadwal jam 9–5. Di satu sisi, fleksibilitas jadwal kerja ini mencegah guru dari keharusan bekerja berjam-jam, terutama di pagi hari. Guru juga dapat menyesuaikan jadwalnya agar sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, fleksibilitas jadwal kerja memungkinkan beberapa guru untuk memaksakan jam kerja yang menuntut dengan sedikit pengawasan atau dukungan organisasi. Beberapa guru bahkan harus begadang selama liburan musim panas dan musim dingin ketika siswa Tiongkok memiliki waktu belajar tambahan di rumah. Mia, seorang guru perempuan berusia 25 tahun yang tinggal di Midwest, menghabiskan musim panas tahun 2018 dengan bekerja dari jam 8 malam. sampai jam 8 pagi, tujuh hari seminggu. Dia berkata:

Ketika saya melakukan tugas semalaman, rasanya hari-hari saya lebih panjang dari 24 jam, karena, maksud saya, saya akan bekerja 12 jam dan saya tidak ingin tidur sepanjang hari karena saya ingin merasakan bahwa saya punya kehidupan. Jadi saya tidur sangat sedikit di siang hari, kemudian begadang sepanjang malam dan berusaha untuk tetap terjaga. Maksudku, itu sangat buruk. Buruk sekali. (Informan no. 26)

Kedua, ABCKID mendislokasi kontraktor dari lingkungan hukum setempat. Kita telah melihat bagaimana pekerjaan ABCKID telah memungkinkan beberapa guru mengatasi kendala visa yang terkait dengan tinggal di luar Amerika Serikat saat mengajar siswa di Tiongkok. Di sisi lain, tidak jarang guru ABCKID terjebak dalam perbedaan hukum dan kebijakan di berbagai negara, termasuk negara asal, negara tuan rumah tempat mereka tinggal, dan Tiongkok,

tempat ABCKID bermarkas. Sekalipun perbedaan hukum dan kebijakan hanya terjadi di dua negara, guru ABCKID masih harus mengatasi kesenjangan tersebut.

Dustin, seorang guru laki-laki berusia 30 tahun yang tinggal di Amerika Serikat, mengenang situasi berikut: pemerintah Tiongkok telah menekan ABCKID untuk menuntut agar semua guru memperoleh sertifikat mengajar dan mengenakan seragam berwarna oranye untuk melakukan demonstrasi. profesionalisme, namun undang-undang ketenagakerjaan di Amerika Serikat melarang kontraktor untuk mengenakan seragam. Menurut Dustin, guru-guru ABCKID menyampaikan keluhannya kepada ABCKID dan akhirnya *“ABCKID harus mengubahnya karena kami adalah kontraktor independen jadi saya rasa mereka tidak bisa mengharuskan kami memakai sesuatu yang spesifik”* (informan no. 11).

Cara ketiga dislokasi terjadi terletak pada terputusnya hubungan antara kontraktor ABCKID dengan lingkungan sosial budaya setempat. Berbeda dengan migran internasional tradisional yang biasanya bekerja pada organisasi di negara tuan rumah, migran virtual sebagian besar bekerja sendiri dalam lingkungan sosiokultural yang lebih kompleks. Hal yang membuat pekerjaan di platform transnasional ini menantang adalah karena platform ini tidak memberikan pengawasan di tempat, pelatihan formal, atau dukungan organisasi. Kontraktor harus melakukan penyesuaian lintas budaya sendiri. Misalnya, kontraktor sering kali terjebak dalam wacana yang berbeda mengenai masalah sosial dan politik di Tiongkok. Hal ini terutama terjadi dalam beberapa tahun terakhir, ketika Tiongkok dan Amerika Serikat menyaksikan meningkatnya nasionalisme.

Meskipun banyak informan saya yang terdislokasi dari konteks lokal dan menghadapi kontrol ketat dari platform, cukup banyak dari mereka yang menganggap pekerjaan ini bermakna. Saya bertanya kepada informan saya apakah mereka menganggap mengajar di ABCKID sebagai pekerjaan yang bermakna. Delapan belas informan menjawab ya. Di antara mereka, banyak yang termasuk dalam kelompok yang sangat mobile dan sangat tidak mobile. Bagi mereka, mengajar di ABCKID merupakan kesempatan untuk merasakan budaya transnasional, khususnya membantu anak-anak dari negara lain untuk tumbuh. Tujuh informan menjelaskan bahwa mereka merasakan pentingnya membantu anak-anak tumbuh, menjalin ikatan dengan siswa muda, dan mendorong batas-batas apa yang dapat didiskusikan oleh siswa. Clara, istri militer yang disebutkan sebelumnya, mengenang bagaimana dia menemukan makna dalam membantu seorang gadis muda Tionghoa. Dia berkata:

Saya punya satu murid, gadis cantik ini. Saat pertama kali aku mulai bersamanya, dia sangat pendiam. Tenang seperti tikus kecil. . . Dia sangat gugup dan takut melakukan kesalahan. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia berkata, “Saya minta maaf, Guru. Saya minta maaf.” Saya mengatakan kepadanya, “Kamu jauh lebih pintar dari apa yang dipikirkan semua orang.” Saya mengatakan kepadanya, “Kamu pandai berbicara dan kamu bisa melakukan ini.” Begitu dia mendapatkannya, dia melompat empat level. . . yang penting adalah dorongan ke depan. (Informan no.8)

Yang penting bukan hanya membantu anak-anak dari negara lain, tapi juga menjalani kehidupan lintas budaya, meski kontraktor tidak bisa bergerak. Beberapa informan secara eksplisit menyebutkan bahwa pengajaran di ABCKID telah membantu mereka terhubung

dengan budaya asing. Hal ini sangat penting terutama bagi orang-orang yang biasanya menghabiskan banyak waktu di lingkungan sekitar mereka. Misalnya, seorang ibu berusia 33 tahun berkata, *“Saya menikmati sosialisasi budaya yang dihasilkan dari hal ini. Saya merasa bahwa saya sekarang mempunyai kepentingan terhadap apa yang terjadi di Tiongkok”* (informan no. 30).

Tentu saja, kelompok-kelompok khusus ini, karena sangat puas dengan pekerjaan dan menganggapnya bermakna, mungkin mencerminkan kenyataan pahit: karena kelompok-kelompok sosial ini sangat terpinggirkan di pasar tenaga kerja dan lebih cenderung menemukan makna dalam lintas budaya yang berkaitan dengan anak. bekerja, mereka juga cenderung menoleransi kontrol dan eksploitasi platform.

8.7 KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, saya telah menyelidiki migrasi virtual yang disebabkan oleh platform sebagai elemen penting dalam globalisasi. Saya telah menggunakan ABCKID untuk menunjukkan bagaimana platform pendidikan transnasional semacam ini memobilisasi kelompok sosial baru yang sebelumnya dibatasi oleh pasar tenaga kerja lokal dan global, serta bagaimana keselarasan antara karakteristik organisasi platform dan motivasi kontraktor telah memfasilitasi partisipasi kontraktor. partisipasi sambil meningkatkan tingkat kepuasan kerja mereka. Dengan memobilisasi kelompok-kelompok baru, dan menggunakan investasi global untuk meningkatkan pangsa pasar, ABCKID telah menjadi yang teratas di antara platform pendidikan transnasional dan seluruh bidang platform ini telah berkembang pesat.

Temuan saya mempunyai implikasi penting untuk memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan globalisasi. Di satu sisi, globalisasi memang telah menjauhi mobilitas fisik masyarakat. Secara tradisional, pengajaran bahasa asing berkaitan dengan pekerjaan migrasi internasional karena mencocokkan siswa dengan guru asing biasanya memerlukan perpindahan fisik lintas negara dari setidaknya satu pihak. Namun kebangkitan ABCKID dan platform virtual lainnya telah mengubah dinamika tersebut. Sejauh bentuk pengajaran bahasa asing yang dominan mungkin telah beralih ke pengajaran online transnasional, bab ini memberikan kepercayaan pada klaim Manfred B. Steger dan Paul James (2020) tentang transisi dari globalisasi yang diwujudkan ke globalisasi yang tidak berwujud. Bab saya juga mendukung klaim mereka mengenai sifat transisi ini yang kacau dan kontradiktif. Selain itu, temuan saya memberikan pembuktian lebih lanjut mengenai pengalaman kerja para kontraktor di bawah globalisasi digital dan tanpa tubuh, terutama *“kesadaran tidak bahagia”* mereka—sebuah pola pikir yang terpecah secara internal yang menghargai fleksibilitas, kepuasan yang lebih besar, dan pendapatan yang lebih tinggi, sementara pada saat yang sama menderita akibat langkah-langkah pengawasan online baru dan keterpisahan secara umum dari keterikatan nyata dalam dunia sosial lokal.

Pada tingkat makro dan teoretis, bab ini membahas perdebatan deglobalisasi versus reglobalisasi, serta sifat reglobalisasi. Temuan empiris saya tentang kebangkitan pengajaran online global menunjukkan bahwa kita tidak sedang menghadapi akhir dari globalisasi, melainkan globalisasi dalam bentuk yang berbeda. Temuan saya mengenai meningkatnya

kekuatan konsumsi kaum elit dan keluarga kelas menengah Tiongkok, serta meningkatnya kapasitas perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam memanfaatkan modal global dan tenaga kerja global, juga menunjukkan adanya pengalihan besar dalam proses reglobalisasi. Selain itu, reglobalisasi berbasis internet ini telah memberdayakan manajer perusahaan untuk merekrut kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya belum tersentuh, sekaligus mengaburkan kontrol dan pengawasan terhadap kelompok-kelompok sosial ini mengingat jam kerja dan lokasi kelompok-kelompok tersebut yang terfragmentasi.

Selain itu, kehidupan dan pengalaman kerja para kontraktor ABCKID memerlukan pemikiran ulang teori sistem dunia dan studi terkait kesenjangan global (misalnya, Arrighi & Drangel, 1986; Firebaugh, 2000; Wallerstein, 2011; Hung, 2016). Di satu sisi, temuan saya menantang teori sistem dunia dalam arti bahwa ABCKID mengungkapkan arah alternatif untuk menghubungkan pekerja di negara-negara inti dengan pelanggan di negara-negara semiperifer. Di sisi lain, kasus dan temuan saya mendukung dan memperluas teori sistem dunia dalam dua cara. Pertama, kebangkitan ABCKID dan platform serupa lainnya dapat disebabkan oleh kebangkitan Tiongkok setelah reformasi Deng Xiaoping, yang memungkinkan pelanggan dan perusahaan Tiongkok membeli produk dan layanan dari negara-negara inti.

Kedua, temuan saya mempunyai implikasi besar terhadap peran Tiongkok dalam kesenjangan global. Para ahli umumnya sepakat bahwa kesenjangan global semakin meningkat sejak dimulainya Revolusi Industri. Penting untuk menyelidiki ke arah mana kesenjangan global akan terjadi setelah transisi pasar Tiongkok sejak akhir tahun 1970an. Hung (2016) memberikan gambaran yang berbeda: di satu sisi, pertumbuhan ekonomi di negara dengan jumlah penduduk terbesar ini telah sangat mengurangi kesenjangan global; di sisi lain, keberhasilan Tiongkok di bidang manufaktur dan ekspor mungkin telah memperburuk kesenjangan global dengan mengganggu industrialisasi negara-negara berkembang lainnya.

Temuan saya menunjukkan arah yang serupa namun sedikit berbeda. Kebangkitan Tiongkok mungkin telah mengurangi kesenjangan global dengan menyediakan kesempatan kerja bagi pekerja di negara berkembang dan negara maju. Hal ini terutama benar karena saya telah menunjukkan pengaruh platform yang berbasis di Tiongkok terhadap pertumbuhan pendapatan kelompok sosial yang sebelumnya terpinggirkan secara sosial di Amerika Utara. Namun dislokasi kehidupan kelompok-kelompok sosial ini juga mengingatkan kita akan kelemahan jika kita hanya mengukur kesenjangan dalam hal pendapatan: memang, kesejahteraan finansial kelompok-kelompok sosial ini telah meningkat, namun kita tidak boleh mengabaikan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya. terkait dengan dislokasi dari kehidupan lokal, serta kerugian akibat peningkatan kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh platform.

Yang terakhir, ketimpangan global cenderung terus berlanjut karena migrasi virtual masih melibatkan pembagian kerja dan eksploitasi global yang tidak setara. ABCKID hanya menyajikan gambaran yang lebih beragam: pembagian kerja global yang tidak setara tidak hanya membuat kesenjangan antara negara-negara inti dan negara-negara semiperifer, melainkan antara modal/tenaga kerja dari negara-negara inti dan pelanggan/manajer dari negara-negara semiperifer. Hal ini, sekali lagi, membuktikan sifat reglobalisasi sebagai

perombakan kekuasaan dalam berbagai dimensi. Mengingat partisipasi kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya terpinggirkan dan tingginya tingkat toleransi mereka terhadap eksploitasi, reglobalisasi multidimensi ini juga cenderung kurang terlihat dibandingkan sebelumnya.

BAB 9
KORIDORISASI GLOBALISASI REGIONAL
– JANGKAUAN DAN DAMPAK JALUR GEOEKONOMI YANG DIPIMPIN KERETA API YANG
BERPUSAT PADA TIONGKOK DI SELURUH EROPA DAN ASIA –

Karena globalisasi telah mengalami kemunduran sejak Resesi Hebat pada tahun 2008–2009, globalisasi telah mengambil bentuk dan kekuatan yang semakin bersifat regional, dengan konsekuensi yang terintegrasi dan terfragmentasi. Dengan memajukan enam koridor ekonomi berskala besar, Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok telah melancarkan putaran globalisasi regionalisasi dengan melakukan koridorisasi pembangunan perkotaan dan ekonomi lokal dan translokal di sepanjang proyek transportasi berskala besar yang didorong oleh Tiongkok. Dalam bab ini, pertama-tama saya mengonseptualisasikan koridorisasi ekonomi sebagai babak baru globalisasi dari bawah yang memperkaya dan memajukan wacana globalisasi. Kemudian saya menelusuri dan mengeksplorasi jalur geoekonomi lintas batas yang dibentuk oleh koridor ekonomi regional yang digerakkan oleh Tiongkok dan dipimpin oleh kereta api, melalui contoh kasus Kereta Barang Tiongkok-Eropa dan Kereta Api Tiongkok-Laos. Analisis ini berfokus pada bagaimana arus logistik dan perdagangan di sepanjang koridor-koridor yang mendukung kereta api ini memupuk ikatan ekonomi translokal yang baru, restrukturisasi industri, mendistribusikan kembali kekuatan konsumsi, dan dengan demikian mendorong globalisasi regional dari kalangan menengah dan bawah. Bab ini menyimpulkan bagaimana jenis regionalisasi yang dikoridorisasi ini melakukan reteritorialisasi jalur-jalur globalisasi yang sudah ada dan menciptakan jalur-jalur globalisasi perekonomian yang baru.

Dilihat dari kaca mata sejarah singkat selama lebih dari dua puluh tahun pertama abad ke-21, globalisasi telah mengalami tiga pukulan besar berturut-turut dengan dampak yang berkepanjangan: Krisis Keuangan Global tahun 2008, ideologi nasionalis-populis, dan kebijakan proteksionis pemerintahan Trump selama tahun 2017–21, dan pandemi global COVID-19 pada tahun 2020–22. Dalam menghadapi tiga kemunduran globalisasi ini, Tiongkok mampu keluar dari krisis keuangan global dengan lebih mudah dibandingkan negara-negara Barat, menyerap sebagian besar dampak negatif tarif perdagangan dan sanksi ekonomi Trump, serta memastikan pemulihan ekonomi yang lebih cepat dari pandemi ini dibandingkan negara-negara lain di dunia. Yang lebih penting lagi, melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), yang diluncurkan pada tahun 2013, Tiongkok telah menjadi kekuatan yang kuat dalam mendorong perdagangan dan investasi global. Berasal dari sumber yang berlawanan, kemunduran sebagian negara-negara Barat dalam globalisasi dan langkah Tiongkok dalam menghadapi globalisasi telah menimbulkan konsekuensi global, regional, dan lokal yang luas.

Sejak reformasi dan keterbukaannya pada akhir tahun 1970an, Tiongkok terus menjadi kekuatan utama dalam globalisasi ekonomi karena posisinya yang sangat tinggi dalam perekonomian global. Dengan hanya menyumbang 1 persen dari PDB dan perdagangan dunia pada akhir tahun 1970an, Tiongkok meningkatkan kedua indikator tersebut menjadi sekitar

15 persen pada tahun 2020. Tiongkok menyumbang sekitar sepertiga pertumbuhan ekonomi global selama satu dekade penuh hingga tahun 2019, lebih besar dibandingkan gabungan pertumbuhan ekonomi global dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, Tiongkok telah berkomitmen atau menyalurkan pinjaman sebesar \$600 miliar sejak tahun 2013, dibandingkan dengan \$490 miliar yang dilakukan oleh seluruh kelompok bank pembangunan multilateral seperti Bank Dunia (CISION PR Newswire, 2020). BRI juga telah menambahkan dimensi regional yang khas pada globalisasi melalui enam koridor ekonomi berskala besar dan sejumlah subkoridornya. Hal ini telah memperkenalkan mode baru “globalisasi dari tengah” melalui koridorisasi regional jalur ekonomi baru yang mengglobal yang menarik lebih banyak negara dan kota ke dalam lingkaran infrastruktur dan pembangunan perkotaan yang saling terkait.

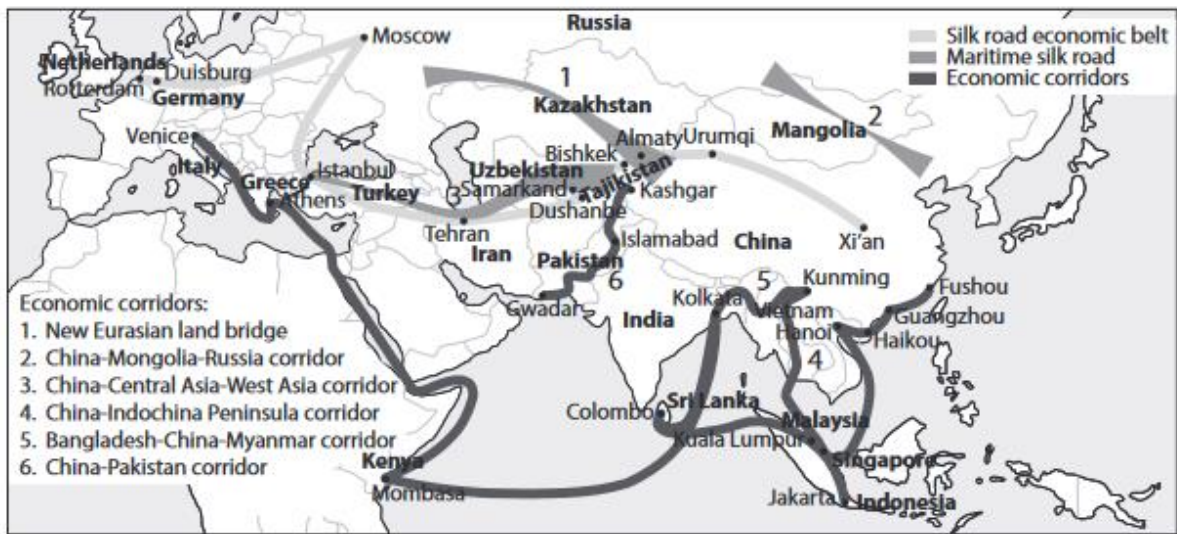
Saya memulai bab ini dengan menelusuri silsilah intelektual dari urbanisasi yang dikoridorisasi sebelumnya sebagai jembatan konseptual menuju periode baru koridorisasi globalisasi regional yang didorong oleh BRI. Saya melihat peningkatan dinamika ekonomi regional yang berbentuk koridor secara simultan menuju skala global dan penurunan skala arus terhubung baru di sepanjang koridor BRI menuju konektivitas dan pembangunan ekonomi translokal. Kemudian, dengan menggunakan Kereta Barang Tiongkok-Eropa dan Kereta Api Tiongkok-Laos, saya mengeksplorasi jalur ekonomi berbasis kereta api ini sebagai penggerak dan fasilitator koridorisasi globalisasi regional di Tiongkok-Eropa dan Tiongkok-Asia Tenggara. Sebagai kesimpulan, saya menarik wawasan untuk lebih memahami globalisasi yang terkoridorisasi dan konsekuensi jangka panjangnya yang bersifat lintas batas regional dan lokal.

9.1 MENUJU GLOBALISASI CORRIDORIZING

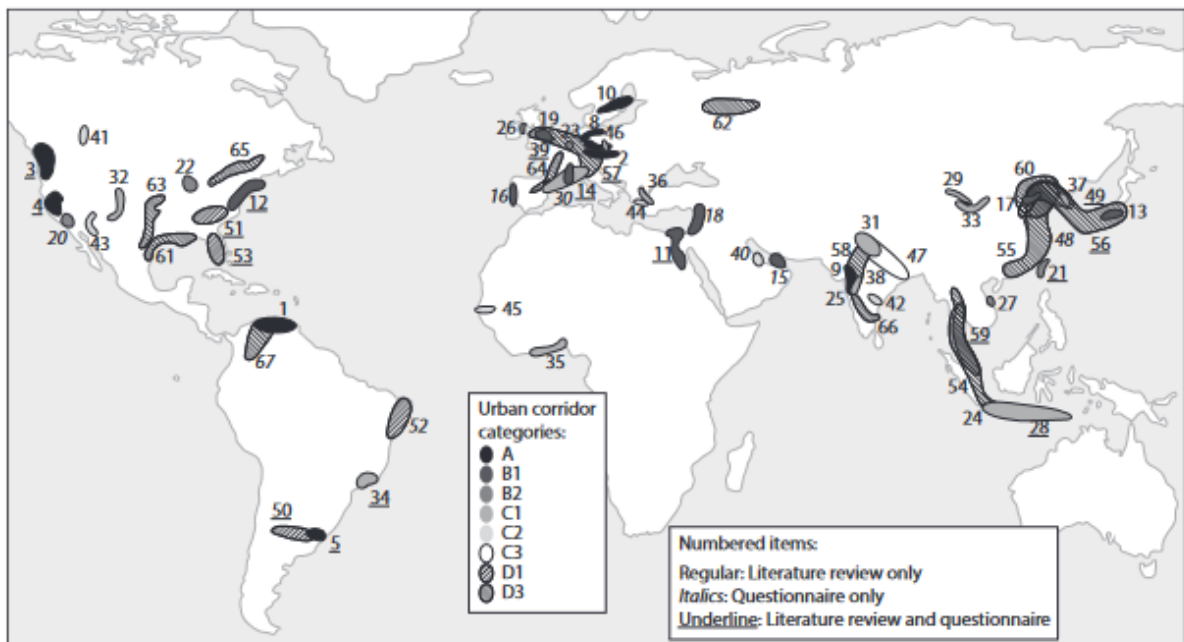
Globalisasi melalui koridorisasi mempunyai formasi dan bentuk yang sangat khas dan bersifat regional, dengan konsekuensi regional yang diharapkan serta dampak translokal yang lebih luas. Meskipun pembangunan regional di sepanjang koridor ekonomi perkotaan bukanlah hal baru, globalisasi yang dipicu oleh koridor dengan dimensi regional dan lokal lintas batas berskala besar merupakan hal yang baru terjadi, dan mulai terlihat sejak BRI. Dengan mempromosikan enam koridor ekonomi regional lintas batas yang terbentang dari dalam Tiongkok hingga negara-negara dan kota-kota tetangga dan jauh (lihat gambar 9.1A), termasuk dan melalui sejumlah subkoridor (tidak ditampilkan), BRI telah membuka era globalisasi melalui koridorisasi regional sebagai dimensi baru dalam geografi globalisasi yang ada. Ketika globalisasi koridorisasi ini mulai terbentuk, hal ini melawan kekuatan deglobalisasi yang ada saat ini dengan mengaktifkan kondisi laten dan kekuatan yang tersebar di sepanjang koridor transportasi tertentu dalam menghasilkan peluang dan tantangan baru bagi pembangunan regional dan lokal di dalam dan melintasi batas-batas nasional. Sejauh mana koridorisasi globalisasi merupakan suatu hal yang baru atau tidak, maka perlu ditelusuri sumber referensinya.

Bentuk koridorisasi globalisasi berkaitan dengan koridor perkotaan berskala lokal, yang asal muasalnya dapat ditelusuri hingga munculnya perluasan metropolitan di luar batas administratif lokal di negara-negara maju pada awal tahun 1960an, atau bahkan jauh lebih awal. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Jalur Sutra kuno, yang menginspirasi BRI, mungkin merupakan koridor perdagangan panjang pertama di dunia, meskipun terdapat banyak jalur atau subkoridor yang hampir tidak terhubung. Linearitas melalui infrastruktur transportasi merupakan ciri khas koridor perkotaan modern, yang juga dapat melibatkan dua sumbu lainnya—urbanisasi dan pembangunan ekonomi—antara dua wilayah kota atau lebih. Selain struktur liniernya yang umum, koridor perkotaan juga mempunyai atribut jaringan seperti tiang di kedua ujungnya, simpul di antara dua kutub, serta cabang dan titik perantara yang berfungsi sebagai jalur spin-off dan pusat sekunder. Fitur-fitur ini memiliki karakteristik jaringan vertikal dan horizontal dari sistem ekonomi berbasis infrastruktur regional yang tertanam secara spasial.

Untuk menarik kesimpulan lebih lanjut tentang globalisasi yang dikoridorisasi dari koridor perkotaan, faktor-faktor skala, panjang, perbatasan, tingkat pembangunan, dan negara bagian sangatlah relevan. Enam puluh tujuh koridor perkotaan global yang diidentifikasi oleh Isabel Georg dkk. (2016) biasanya memiliki panjang antara 400 dan 1.200 km, lebar 70 hingga 200 km, dan dengan rasio panjang-lebar antara empat dan sepuluh (lihat gambar 9.1B). Koridor ini umumnya lebih pendek dari enam koridor BRI, karena Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (no. 6 pada gambar 9.1A) membentang sepanjang 3.000 km dari Gwadar, Pakistan, hingga Kashgar, Xinjiang, meskipun lebar koridor BRI tidak jelas secara numerik karena kurangnya kriteria pengukuran yang jelas. Sekitar 95 persen dari enam puluh tujuh koridor perkotaan tersebut dimulai dan berakhir di dalam wilayah nasional, seperti kasus klasik koridor Boston-Washington (BosWash) di sepanjang Pesisir Timur Laut AS (no. 12 pada gambar 9.1B), sementara keenam BRI koridornya mencakup banyak perbatasan negara dan kota-kota perbatasan yang terpencil. Selain itu, sekitar 60 persen dari enam puluh tujuh koridor perkotaan terhubung dan melewati dua atau lebih pusat nasional dan internasional serta wilayah pedalamannya yang terintegrasi dengan baik di negara-negara maju, sedangkan enam koridor BRI mencakup berbagai negara kurang berkembang, negara dan kota dengan wilayah sekitarnya. Yang terakhir, sebagian besar koridor perkotaan dipengaruhi oleh pasar, dengan perencanaan formal nasional dan subnasional yang sangat terbatas dan koordinasi antar kota yang relatif sedikit. Namun, koridor BRI didorong oleh negara Tiongkok dan proyek infrastruktur yang direncanakan dan dibangun melintasi batas-batas internasional (X. Chen, 2022).



GAMBAR 9.1A. Koridor Ekonomi Regional Enam Sabuk dan Jalan.



GAMBAR 9.1B. Inventarisasi Global 67 Koridor Perkotaan.

Dimensi dan dampak global dari koridorisasi baru berskala regional seperti koridor BRI bersinggungan dengan jalur pembangunan regional dan lokal yang ada. Koridor BRI menciptakan jalur spasial baru yang dapat memicu satu atau lebih kegiatan sektoral. Hal ini dapat membentuk hubungan yang saling melengkapi atau bersaing dengan jalur pembangunan yang ada untuk mencapai pertumbuhan yang lebih kuat atau gesekan intraregional yang menghambat pertumbuhan. Melalui proyek infrastruktur yang besar dan panjang seperti Kereta Api Tiongkok-Laos, pembangunan koridor BRI mengubah wilayah regional dan lokal yang ada, melintasi banyak batas negara, berdampak pada lingkungan ekologi yang berdekatan, dan berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Dari wilayah tertentu dan lintas wilayah, globalisasi terkoridorisasi yang terkait dengan BRI

terjadi di sepanjang jalur ekonomi baru yang menyalurkan dan mendistribusikan manfaat dan risiko ke wilayah dan skala yang sebelumnya tidak terhubung atau terhubung secara lemah.

9.2 ALIRAN PERDAGANGAN BESAR CORRIDOR ORIZING DI SELURUH EURASIA

Kereta Api Angkutan Cina-Eropa

Benih koridorisasi globalisasi regional ditaburkan ke dalam dan di sepanjang Jalur Sutra Ekonomi yang berbentuk koridor, yaitu jalur darat yang mengular dari Tiongkok ke Eropa (gambar 9.1A) yang dirancang oleh BRI untuk menelusuri kembali dan merevitalisasi kontur geografis kasar di masa lalu. Jalur Sutra melintasi Eurasia. Sebelum BRI, pada tahun 2011, Kereta Barang Tiongkok-Eropa (CEFT) perdana mengangkut produk elektronik dari kota Chongqing di barat daya Tiongkok ke Duisburg, Jerman, melalui Kazakhstan, Rusia, Belarus, dan Polandia. Jumlah CEFT meningkat dari hanya 17 pada tahun 2011 menjadi 15.183 pada tahun 2021, sehingga menambah hingga 50.000 kereta barang yang melintasi 78 rute antara lebih dari 60 kota di Tiongkok dan 180 kota di 23 negara Eropa ditambah negara-negara Asia Tengah pada bulan Februari 2022 (Situs Web China BRI, 2022d).

Membentang melampaui Jalur Sutra kuno, rute CEFT menyalurkan arus kargo yang beragam dan kompleks, membentuk jaringan transportasi lintas benua yang memiliki tiga koridor/rute utama (gambar 9.2A). Jumlah terbesar CEFT berada di sepanjang rute Barat, yang sebagian besar sejajar dengan Koridor Jembatan Darat Eurasia Baru, versi lama yang menghubungkan Lianyungang dan Amsterdam, sementara beberapa jalur alternatif dari rute Barat melewati Jalur Tiongkok-Tengah BRI. Koridor Asia-Asia Barat. Rute Timur menghubungkan beberapa kota pesisir Tiongkok dan kota-kota industri tua di Tiongkok Timur Laut ke Rusia, sedangkan rute Utara menghubungkan Tiongkok utara ke Rusia melalui Mongolia. Kedua rute tersebut sejajar dengan Koridor Tiongkok-Mongolia-Rusia BRI. Rute antarmoda CEFT yang baru-baru ini diperluas membentang kembali ke timur dan selatan menuju laut di sepanjang Koridor Semenanjung Tiongkok-Indocina hingga Asia Tenggara (no. 4 pada gambar 9.1A). Meskipun cakupan spasialnya tidak merata dan aksesnya serta titik keberangkatan dan tujuan tersebar luas, rute CEFT yang berkembang pesat menunjukkan kesamaan geografis dengan empat dari enam koridor ekonomi BRI.

Untuk mengungkap kota-kota yang membentuk dan menghubungkan rute CEFT, Gambar 9.2B menyajikan empat zona regional dengan sub-zona antara pantai Tiongkok dan pantai Atlantik Eropa, yang memperkirakan tata letak geografis peta Eurasia-sentris. Keempat zona tersebut berisi tempat keberangkatan, transit, dan kedatangan untuk berbagai rute CEFT serta fitur lokasi dan ekonomi umum serta aktivitas yang menciptakan dan mempertahankan rute-rute tersebut (lihat baris paling bawah). Zona 1 mencakup tiga subzona kota-kota pesisir Tiongkok yang lebih maju, sedangkan Zona 2 mencakup tiga wilayah pedalaman dan perbatasan yang telah menjadi pendorong CEFT yang paling aktif dan dominan sebagai pengembang dan penerima manfaat dari kampanye "Go West" Tiongkok. Zona 3 terdiri dari tiga wilayah Asia yang berfungsi sebagai kota keberangkatan, zona transit, dan tujuan akhir. Zona 4 terdiri dari tiga wilayah lebih jauh ke barat, menampilkan Eropa, yang menjadi landasan ujung lain sistem CEFT. Wilayah ini juga mencakup beberapa kota di Asia Barat, seperti

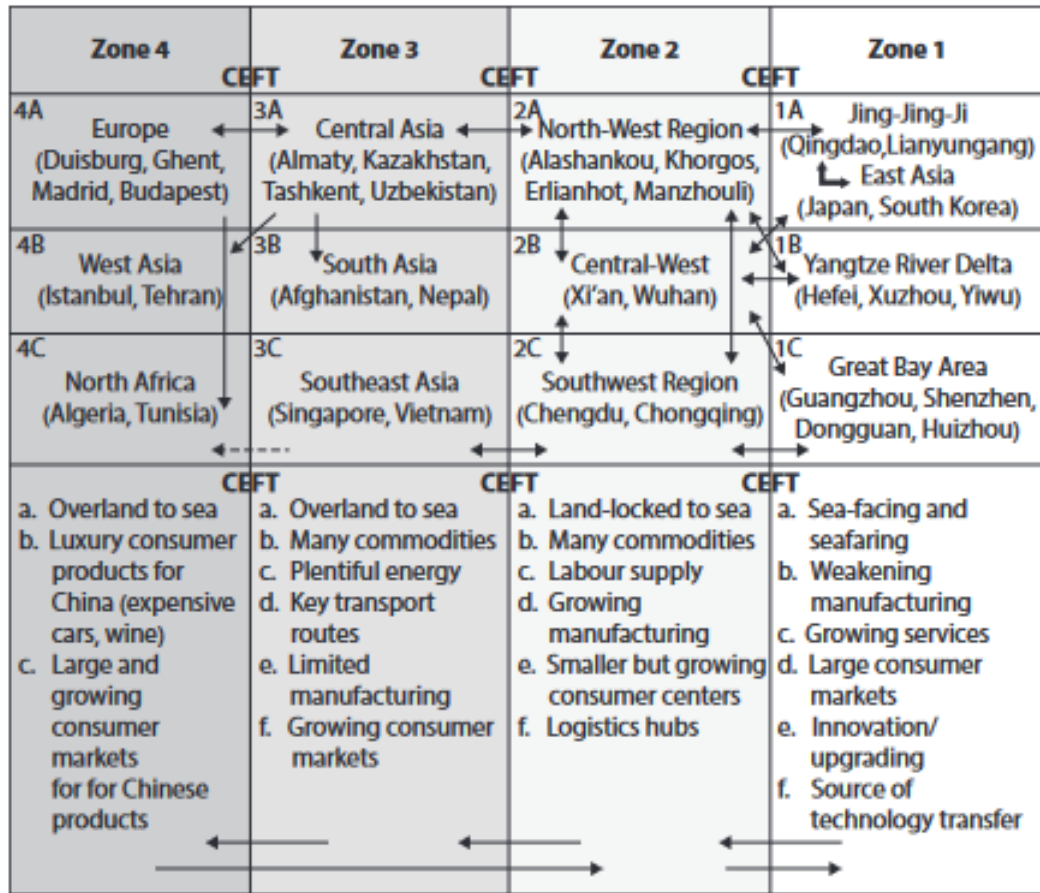
Istanbul, dan Afrika Utara (4C), meskipun Afrika Utara tidak terhubung langsung dengan Tiongkok melalui jalur darat. CEFT telah memfasilitasi penyatuan kembali Eurasia yang bersejarah dan perluasannya ke Afrika melalui Mediterania, yang kini dijangkau BRI melalui jalur darat dan Samudera Hindia melalui Terusan Suez. Keempat zona yang terhubung tersebut membentuk dan menghubungkan sejumlah rute angkutan kereta api yang menyalurkan sejumlah besar kargo perdagangan di dalam dan antara Tiongkok dan Eropa, sehingga menghasilkan kekuatan regional berbentuk koridor untuk globalisasi ekonomi.



GAMBAR 9.2A. Koridor/Rute Perjalanan Utama Kereta Barang Tiongkok-Eropa.

Menggambarkan panjang beberapa koridor kereta api dan jangkauannya yang jauh, sebuah kereta barang yang membawa produk elektronik dan barang-barang lainnya meninggalkan kota Shenzhen (1C) di Tiongkok, yang berbatasan dengan Hong Kong, menuju Duisburg pada tanggal 18 Agustus 2020. Kereta tersebut menempuh perjalanan melalui dua puluh-tujuh kota di Tiongkok termasuk Chengdu (2C), keluar di Alashankou (2A), melewati Kazakhstan (3A), dan akhirnya tiba di Duisburg (4A), sebelas hari kemudian setelah menempuh perjalanan sejauh 13.438 km. Dengan diberi label “Great Bay Express”, kereta ini beroperasi lebih teratur, sehingga menciptakan aliran ekspor yang stabil dari pusat manufaktur Great Bay Area di Tiongkok selatan melalui Asia Tengah hingga Eropa timur dan barat (WeChat Platform, 2020). Panjang rute ini sebanding dengan rute Yiwu-Madrid (1B->4A), yang membentang sepanjang 13.052 km, salah satu rute CEFT terpanjang. Kereta ini melewati delapan negara (yang terbanyak dari semua rute CEFT), melewati tiga perubahan ukuran rel, melibatkan operasi estafet oleh enam puluh masinis kereta dari berbagai negara, dan dapat memakan waktu hingga dua puluh satu hari untuk berangkat dari kota Yiwu di Tiongkok timur —pusat distribusi barang dagangan kecil terbesar di dunia—untuk mencapai Stasiun Kereta Api Abronikar, Madrid, tempat kargo yang tiba diangkut ke tujuan akhir lokal dan regional di Spanyol dan sekitarnya (Situs Web China BRI, 2022d). Kedua rute ini merupakan jalur kereta barang terpanjang di dunia yang berkesinambungan di sepanjang Koridor Jembatan Darat

Eurasia Baru (gambar 9.1A) dan mencakup banyak subkoridor pendek yang menghubungkan dan merangkai kota-kota di dalam dan melintasi sejumlah batas nasional Eurasia.



GAMBAR 9.2B. Rute Terhubung Kereta Barang Tiongkok-Eropa (CEFT) melintasi Empat Zona Trans-Regional.

Konektivitas di antara segmen-segmen rute panjang CEFT yang sedang berkembang baru-baru ini diperkuat dan didiversifikasi melalui lebih banyak kereta api tujuan timur dan pertumbuhan pelayaran antar moda. Sebagai contoh, kereta barang akan berangkat dari Eropa (4A) melalui Kazakhstan (3A) ke Chongqing (2C), yang pada 16 Maret 2018 mengirimkan kereta pertama ke selatan menuju Hanoi, Vietnam (3C), melalui perbatasan Tiongkok kota Pingxiang, provinsi Guangxi. Rute kereta api ini, yang mengurangi biaya transportasi hingga sepertiga dibandingkan pelayaran laut, juga meluas ke selatan hingga kota pelabuhan Tiongkok Beihai, provinsi Guangxi, tempat kargo dapat dikirim ke Singapura (juga 3C) melalui antar moda kereta api-laut. pengiriman. Subkoridor ini membantu lebih lanjut menghubungkan dan menyelaraskan rute Barat yang panjang dan dominan dari CEFT (gambar 9.2A) dengan Koridor Semenanjung Tiongkok-Indochina (gambar 9.1A). Hal ini juga menjadikan CEFT lebih seimbang secara arah. Meskipun setiap kereta api berangkat dari Tiongkok ke Eropa sebelum tahun 2014, perjalanan pulang pergi atau backhaul pada tahun 2016 menyumbang sepertiga dari seluruh perjalanan dan 45 persen dari total perjalanan pada

tahun 2019 (Situs Web China BRI, 2020a). Perkembangan ini berkontribusi pada solidifikasi CEFT sebagai koridorisasi jaringan angkutan kereta api lintas benua.

Koridorisasi CEFT telah berdampak pada posisi dan peran relatif kota-kota yang menjadi penghubung dan sepanjang rute angkutan barang dalam membentuk kembali dan memediasi dinamika spasial produksi dan konsumsi di seluruh Eurasia. Meskipun beberapa kota kecil dan letaknya terpinggirkan seperti Alashankou dan Khorgos, Xinjiang (2A pada gambar 9.2B), telah muncul sebagai pusat logistik khusus untuk pembersihan perbatasan, sejumlah kota pusat regional lapis kedua telah menggunakan CEFT sebagai pembangunan berbasis logistik. Strategi untuk mempengaruhi konfigurasi geografis dan titik temu rantai pasokan manufaktur dan arus barang konsumsi di dalam dan antara Tiongkok dan Eropa. Penyisipan lokal ke dalam sistem CEFT telah menimbulkan efek globalisasi ekonomi baru melalui koridorisasi intra dan lintas kawasan.

Kota Xi'an di barat laut Tiongkok menunjukkan efek globalisasi ini. Sebagai jangkar timur Jalur Sutra kuno, Xi'an menjadi salah satu kota paling awal di dunia pada masa dinasti Han (206 SM–220 M) dan Tang (618–907 M). Memasuki era kontemporer, Xi'an tertinggal dibandingkan negara-negara lain dalam sejarahnya seperti Nanjing di wilayah pesisir dan tertinggal jauh dari negara-negara pesisir seperti Shanghai dan Shenzhen pada tahun 1980an dan 1990an. Xi'an telah memperoleh kembali sebagian keuntungannya yang hilang sejak tahun 2000 berkat kebijakan "Go West" Tiongkok dan BRI (X. Chen, 2021c). Perubahan yang menguntungkan bagi Xi'an ini, ditambah dengan lokasinya yang berada di pusat geometri Tiongkok, memosisikan Xi'an untuk memanfaatkan CEFT sebagai strategi logistik yang efektif untuk menjadi pusat angkutan kereta api, menstimulasi pembangunan yang mengejar ketertinggalan dan menghasilkan pengaruh ekonomi di dalam dan di luar Tiongkok.

Strategi logistik Xi'an dimulai dengan pembangunan Taman Perdagangan dan Logistik Internasional Xi'an (ITLP) pada tahun 2008. Grup ITL, perusahaan kota yang bertanggung jawab atas fungsi logistik ITLP, meluncurkan kereta pertama ke Almaty, Kazakhstan, pada tahun 2013. Pada tahun 2021, Xi'an mengirim dan menerima rata-rata harian dua belas CEFT, yang berjumlah total lebih dari tiga puluh delapan ratus kereta, mengungguli Chengdu dan Chongqing sebagai kota peringkat kedua dan ketiga di Tiongkok, dan menyumbang sekitar sepertiga dari total jumlah CEFT Tiongkok (Situs Web BRI Tiongkok, 2022d). Untuk mengilustrasikan jangkauan luas dan dampak luas dari pertumbuhan CEFT yang cepat dan konsentrasi yang padat di Xi'an, pada bulan September 2019 Grup ITL meluncurkan "kereta blok LG" pertama, yang membawa panel dan elektroda liquid-crystal display (LCD) eksklusif ke pabrik milik perusahaan besar Korea yang berlokasi di kota Sławków di Polandia, 56 km dari Kraków, melalui Ukraina. Alih-alih membutuhkan waktu sekitar empat puluh hari melalui laut, komponen-komponen yang dimasukkan ke dalam peti kemas dengan kereta barang khusus ini tiba di tujuan dalam waktu sepuluh hingga dua belas hari. Sejak tahun 2019, LG telah mengirimkan lebih dari seribu TEU suku cadang ke pabriknya di Sławków dengan kapal "Chang'an Express" setelah mengirimkannya dari Korea ke kota pelabuhan Qingdao di Tiongkok dan kemudian ke Xi'an untuk Eropa (Situs Web BRI Tiongkok, 2020b). Dengan mengubah koridor logistik yang mencakup 1A->2B->2A->3A->4A (lihat gambar 9.2B) menjadi

jalur ekonomi, Xi'an telah membantu mengarahkan rantai pasokan global dari Asia Timur melalui Tiongkok barat ke Eropa tengah. Namun, invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 memaksa jalur angkutan ini dialihkan dari Ukraina untuk memasuki Polandia dari Belarus. Untuk menggunakan rute yang lebih aman, Xi'an telah mengarahkan lebih banyak kereta barang untuk melewati Rusia langsung ke pelabuhan Aqtau di Kazakh di Laut Kaspia di mana kontainer akan dikirim dengan perahu ke pelabuhan Azeri di Baku dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta api lagi untuk melewatinya. Tbilisi dan kota Kars di Turki sebelum pergi lebih jauh ke barat menuju Eropa melalui Istanbul.

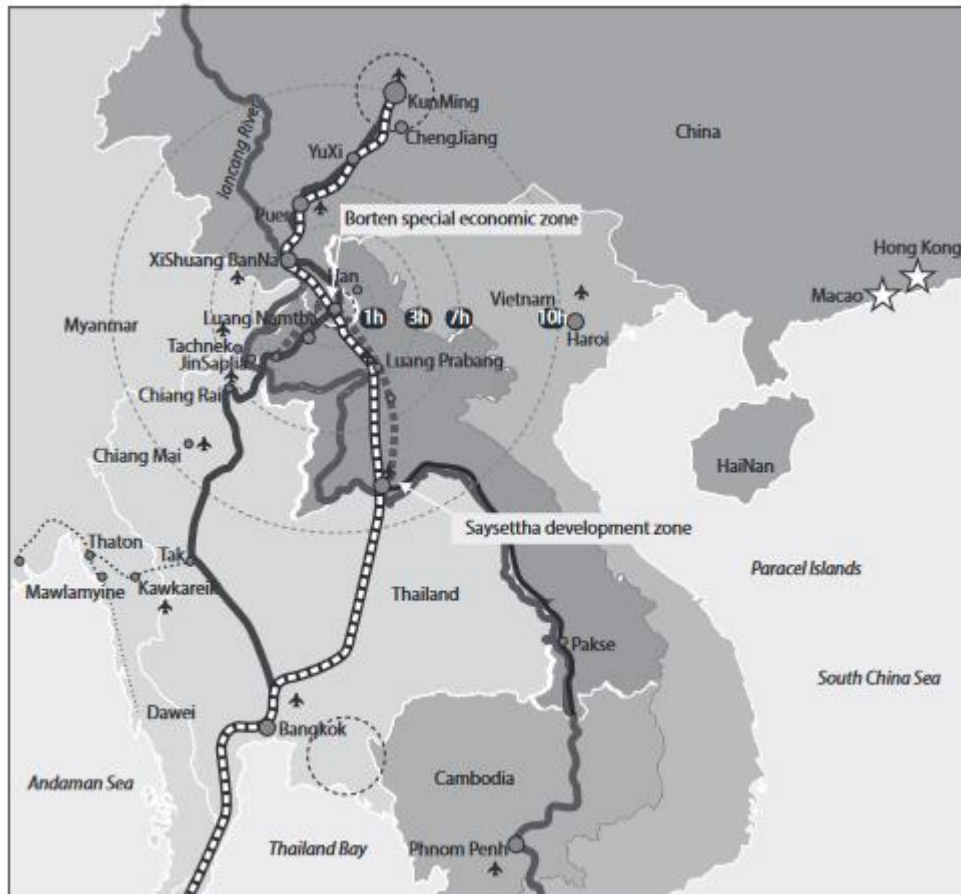
Dari produksi hingga konsumsi, ITL Group telah bekerja sama dengan Volvo dalam menghubungkan dan mendistribusikan kembali transportasi dan pengiriman berbagai mobil Volvo yang dibuat dan dijual di pasar Tiongkok dan Eropa. Pada bulan Juni 2018, kereta CEFT berangkat dari Ghent dan tiba di Pelabuhan Kendaraan Xi'an dengan 160 SUV Volvo XC90 dan hatchback V40 buatan Eropa, setelah enam belas hari. Model yang lebih mahal ini laris manis di Tiongkok, pasar mobil Volvo terbesar di dunia. Pada tahun 2019, sebuah kereta yang memuat 160 SUV XC60 meninggalkan Xi'an menuju Ghent, Belgia, dalam perjalanan delapan belas hari. Dibuat di pabrik Volvo di Tiongkok, XC60 dijual di dua puluh lima negara Eropa termasuk Prancis dan Jerman. Selama tiga bulan pertama tahun 2020 ketika Tiongkok menekan pandemi ini, dua puluh tujuh kereta api dari Xi'an membawa 3.377 XC60 (rata-rata 125 gerbong per blok kereta) ke pasar Eropa melalui sistem yang cepat dan aman dari truk ke kereta tanpa memaparkan virus ke pasar Eropa. mobil baru terhadap potensi kontaminasi virus (Stasiun TV Jiangxi, 2020). Sejak diregulasi, koridor logistik khusus ini telah menopang aliran produk utama untuk pasar konsumen besar di kedua ujung Eurasia. Kekuatannya mungkin berasal dari keterpaduan rantai pasokan dan produksi Volvo yang direorganisasi secara spasial yang menghubungkan Tiongkok dan Eropa.

9.3 JALUR GLOBALISASI REGIONAL BARU: KERETA API CINA-LAOS

Karena CEFT telah menghasilkan lebih banyak koridor arus perdagangan melalui banyak rute di sepanjang koridor BRI timur-barat, koridor lain yang dibentuk oleh Kereta Api Tiongkok-Laos (CLR) baru-baru ini merangsang jalur ekonomi baru di sepanjang Koridor Semenanjung Tiongkok-Indochina utara-selatan (gambar 9.1A). Ide untuk CLR muncul pada tahun 2010, dengan perjanjian bilateral yang ditandatangani pada akhir tahun 2014 dan peletakan batu pertama pada tahun 2016, dan mulai beroperasi pada tanggal 3 Desember 2021. CLR membentang kurang lebih 1.000 km, dengan sekitar 600 kilometer. km dari Kunming hingga Mohan di perbatasan dengan Laos dan sekitar 420 km dari Vientiane hingga kota Boten yang berbatasan dengan Mohan (lihat gambar 9.3). CLR mengangkut penumpang dan kargo pada jalur pengukur standar dalam satu sistem listrik terpadu di dua wilayah nasional.

CLR berjalan di sepanjang dua puluh stasiun penumpang di segmen Tiongkok dan sepuluh stasiun untuk segmen Laos. Jalur ini melewati sembilan puluh tiga terowongan dan lebih dari 136 jembatan layang di Tiongkok dan tujuh puluh lima terowongan dan 165 jembatan di Laos. Panjang seluruh terowongan dan jembatan mencapai 712 km, mencakup

76,5 persen dari keseluruhan rute. Untuk melistriki kereta api, para pembangun Tiongkok telah menyelesaikan 937 km jalur tegangan tinggi yang melintasi perbatasan (X. Chen, 2021a). Di Laos, pembangun Tiongkok memasang dua puluh saluran listrik berkekuatan 115 kilovolt sepanjang 257 km melalui sebelas interval gardu induk dengan sepuluh gardu traksi ke dalam Jaringan Negara Laos (Situs Web BRI Tiongkok, 2021). Kereta CLR dirancang berdasarkan teknologi canggih dari kereta peluru Fuxing Tiongkok untuk memenuhi persyaratan kecepatan lebih lambat, kapasitas lebih besar, dan biaya pemeliharaan lebih rendah.



GAMBAR 9.3. Kereta Api Tiongkok-Laos dalam Konteks Regional yang Lebih Luas.

Berlari dengan kecepatan 160 km/jam untuk membawa penumpang dan 120 km/jam untuk barang, yang memenuhi syarat sebagai kecepatan sedang, CLR telah menjadi arteri transportasi baru yang transformatif secara ekonomi yang mampu mengubah Laos dari negara yang terkurung daratan menjadi negara yang terkurung daratan, sekaligus memungkinkan negara yang terkurung daratan. Provinsi Yunnan mengakses laut melalui Laos dan Thailand (X. Chen, 2020). CLR mempersingkat perjalanan kereta api antara Vientiane dan Boten menjadi tiga jam dari dua hari saat ini, sekaligus mengurangi perjalanan dari perbatasan ke Kunming menjadi lima atau enam jam. Karena barang-barang biasanya diangkut secara perlahan antara Tiongkok dan Laos melalui jalan darat, hanya baik untuk jumlah kecil, atau dengan pengiriman udara yang relatif mahal, CLR kini menjadi media yang menyenangkan untuk mengangkut barang-barang dalam jumlah besar, terutama barang-barang pertanian yang sensitif terhadap

waktu dan lebih hemat biaya. Intinya, CLR telah menjadi tulang punggung koridor ekonomi berbasis kereta api yang mempunyai peran baru dan berjangka panjang dalam menstimulasi perdagangan dan pembangunan di sepanjang dan melalui wilayah-wilayah besar yang belum berkembang di kedua sisi perbatasan Tiongkok-Laos.

Meskipun para pengkritik CLR menunjukkan kurangnya penggunaan pekerja asal Laos untuk proyek tersebut dan tertundanya kompensasi bagi mereka dan beberapa rumah tangga pedesaan yang menjadi pengungsi, CLR secara kumulatif menciptakan lebih dari 110.000 lapangan kerja di Laos. termasuk banyak warga Laos di antara enam ribu insinyur dan pekerja yang memasang sistem transmisi listrik pada puncaknya. CLR juga melakukan subkontrak penggunaan bahan konstruksi lokal senilai sekitar \$80 juta. Manfaat tambahan yang diperoleh dari pembangunan ini mencakup irigasi air sepanjang 2.000 km di sepanjang jalan penghubung CLR. Selain itu, sebagai bagian dari CLR, pemerintah Tiongkok telah mendirikan Akademi Keterampilan Kejuruan Kereta Api Laos di Vientiane. Dengan fasilitas terpadu untuk administrasi, pelatihan, dan asrama yang menempati ruang konstruksi seluas 33.000 meter persegi, akademi ini telah mulai melatih insinyur dan pengemudi kereta api baru di Laos, beberapa di antaranya telah menerima pelatihan dasar di Tiongkok.

Seiring dengan semakin berkurangnya manfaat yang terkait dengan konstruksi, dampak awal pascaoperasi melalui kapasitas penghubung CLR yang panjang baik pada skala regional translokal maupun lintas batas telah muncul karena meningkatnya jadwal pengoperasian. Pada tanggal 2 Januari 2022, baru satu bulan beroperasi, CLR mengoperasikan enam puluh empat kereta penumpang dengan 45.800 penumpang dari Kunming dan Vientiane ke perbatasan, masih dalam masa penutupan pandemi untuk penyeberangan manusia, dan lima puluh jalur angkutan barang di kedua arah. membawa hampir 50.000 ton kargo, beberapa di antaranya melintasi perbatasan setelah melewati prosedur pengendalian pandemi yang ketat. Pesanan untuk memesan gerbong barang dua arah tetap tinggi (Situs Web China BRI, 2022b). Mengingat bukti awal keberhasilan peluncuran CLR, presiden Laos memberikan ucapan selamat Tahun Baru 2022 yang optimis untuk mendorong negara tersebut agar menggunakan kereta baru tersebut sepenuhnya (WeChat Platform, 2022).

Sektor pertanian Laos, dengan 60 persen angkatan kerjanya, akan memperoleh banyak manfaat dari CLR. Pemerintah Tiongkok baru-baru ini setuju untuk mengimpor ekspor utama Laos dalam jumlah yang lebih besar seperti karet, sapi, beras, singkong, dan buah-buahan tropis seperti pisang dan jeruk yang dapat diangkut secara efisien sebagai kargo curah oleh CLR. Jalan penghubung menuju stasiun CLR yang baru diaspal dari desa-desa terdekat di Laos utara memungkinkan petani lokal untuk mengangkut beras, sapi, dan buah-buahan ke stasiun untuk dikirim ke Tiongkok. Pada tahun 2021, ekspor Laos ke Tiongkok sebagai mitra dagang terbesarnya dipimpin oleh pisang senilai Rp. 2.25 Triliyun, diikuti oleh karet, singkong, jagung, tebu, dan semangka. Dengan perjanjian bilateral baru, Laos berencana mengeksport 50.000 ton buah-buahan mirip jeruk ke Tiongkok senilai Rp. 500 Miliar pada tahun 2022. Ekspor ini sangat penting untuk mempertahankan keseluruhan ekspor Laos sebesar Rp. 265 Triliyun selama tahun 2016–20 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 10,9 persen (Platform WeChat, 2021b). Karena CLR akan mengurangi biaya pengiriman Vientiane-Kunming sebesar 40–50

persen, ekspor jagung Laos ke Tiongkok diproyeksikan akan tumbuh 20 persen per tahun dari angka dasar sebesar R[. 17 Triliyun pada tahun 2019 (Bank Dunia, 2020). CLR menjadi pertanda baik untuk mempertahankan momentum ekspor Laos ke Tiongkok.

CLR juga memfasilitasi perdagangan bilateral dari pihak Tiongkok. Asian Potash International Co. yang berbasis di Guangzhou, yang memiliki hak penambangan di tambang besar Potash di provinsi Gammon, tenggara Vientiane, dengan cepat memesan kereta barang pertama dari Vientiane yang mengirimkan pupuk Potash produksi lokal ke Tiongkok dan dapat menggunakan kereta pulang pergi untuk mengangkut material dan peralatan dari Tiongkok untuk memperluas pertambangan dan manufaktur lokal di Laos. Dengan meningkatnya permintaan untuk produk Potash di Yunnan dan provinsi tetangga Guizhou, perusahaan ini berencana memperluas produksi untuk pasar regional di Tiongkok barat daya dan akan menghemat banyak waktu dan biaya dibandingkan dengan pengiriman laut antara Tiongkok selatan dan Laos melalui Kamboja. dan pelabuhan Thailand seperti Bangkok (Sina.com, 2021). Meskipun hal ini tampaknya memberikan banyak manfaat bagi investor Tiongkok di Laos, CLR mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih terhubung untuk memacu hubungan produksi-perdagangan melintasi perbatasan Tiongkok-Laos.

CLR mendorong lebih banyak arus melintasi perbatasan dari posisi pusatnya di Kunming, diperkuat oleh jaringan transportasi lintas kota yang kuat di Tiongkok dan antara Tiongkok dan Asia Tenggara seiring dengan berlakunya RECP pada tanggal 1 Januari 2022. Koneksi transportasi cepat ini telah tersalurkan mengeksport kargo untuk menaiki CLR dari Kunming. Pada tanggal 31 Desember 2021, 380 kereta barang domestik telah mengangkut 150.000 ton kargo dari Shanghai, Guangzhou, dan bahkan Beijing ke Kunming menuju Asia Tenggara (China BRI Website, 2022c). Sejauh ini, empat kereta barang dengan tujuan langsung ke Vientiane telah beroperasi dari Shenzhen, Nanjing, Chengdu/ Chongqing, dan Huaihua, provinsi Hunan, ke dan melalui Kunming. Arus kargo yang meningkat dari Kunming dan wilayah Tiongkok lainnya ke Vientiane dan pasar Asia Tenggara lainnya dalam waktu singkat siap untuk melakukan diversifikasi lebih lanjut sehingga memperkaya perdagangan di sepanjang CLR dan sekitarnya. Hal ini akan memperlancar dan memperkuat pergerakan barang yang lebih panjang dan lebih luas antara wilayah pedalaman Tiongkok dan subkawasan konsentris tetangganya di Asia Tenggara (gambar 9.3) di sepanjang Koridor Ekonomi Semenanjung Tiongkok-Indochina.

Bahkan jika Kunming, Vientiane, Boten, dan kota-kota kecil lainnya bekerja sama untuk menghubungkan pergerakan penumpang dan barang di sepanjang CLR, keduanya mungkin masih belum mencapai potensi manfaat penuh jika CLR tidak terhubung secara mulus dengan rencana pembangunan Jalan Raya Tiongkok-Thailand. Kereta Cepat yang menghubungkan Kunming ke Bangkok, terutama setelah RCEP berlaku efektif. Saat ini, jalur kereta api Laos-Thailand terbatas pada jalur meteran tua yang ditinggalkan oleh penjajah Perancis antara Stasiun Kereta Thanaleng di sisi Laos, jauh dari Stasiun Vientiane, terminal CLR di selatan kota, dan stasiun kereta api Laos. Stasiun Nong Khai dan pelabuhan darat di sisi perbatasan Thailand yang dibatasi oleh Sungai Mekong. Pada tanggal 7 Desember 2021, sayuran segar yang tiba dengan kereta barang CLR harus dijemput di Vientiane dengan tiga puluh tiga truk Thailand

dari Nong Khai untuk diteruskan ke seluruh Thailand (Situs Web China BRI, 2022a). Meskipun hal ini menghemat banyak waktu pengiriman dan lebih murah dibandingkan transportasi darat dari Tiongkok ke Laos dan kemudian ke Thailand, hal ini memerlukan terciptanya hubungan Laos-Thailand yang langsung dan lancar.

Pemerintah Thailand mendukung pembangunan jalur kereta api sepanjang 5,35 km dari Stasiun Thanaleng ke Vientiane utara, yang sudah 70 persen selesai, untuk meningkatkan transportasi dekat perbatasan. Namun solusi ini masih belum menghubungkan langsung ke CLR, meskipun pemerintah Thailand berencana membangun jembatan kereta api baru di sebelah Jembatan Persahabatan Thailand-Lao di atas Sungai Mekong untuk mengantisipasi lalu lintas kereta langsung dari CLR ke CLR. Kereta Api Tiongkok-Thailand. Dirancang untuk beroperasi dengan kecepatan 180 km/jam sepanjang 250 km di Thailand, kereta api berkecepatan tinggi ini pada akhirnya akan menghubungkan Bangkok ke utara ke Nong Khai, di mana kereta tersebut akan berlabuh secara mulus dengan CLR. Untuk saat ini, hal ini mempertahankan adanya missing link melalui Thailand agar CLR dapat terhubung ke Malaysia dan Singapura seperti yang dibayangkan oleh jaringan Kereta Api Trans-Asia, yang ditandatangani oleh delapan belas negara Asia pada tahun 2006 (X. Chen, 2022). Dalam hal ini, CLR berbeda dari CEFT karena tidak ada perluasan subkoridor yang memperluas dan menyebarkan dampak perdagangan, logistik, dan ekonomi lainnya secara lebih luas ke berbagai negara.

9.4 MENDORONG GLOBALISASI EKONOMI BARU DARI TENGAH

Bab ini menawarkan perspektif baru mengenai globalisasi ekonomi dengan membedakan koridor BRI sebagai kekuatan regionalisasi baru yang mendorong dan menarik hubungan perdagangan dan hubungan ekonomi lintas batas melalui dan sepanjang jalur transportasi/logistik baru. “Globalisasi dari tengah” ini—antara skala dan sumber daya nasional dan lokal—selaras dengan fokus regional yang diperbarui pada “perubahan infrastruktur” untuk lebih memahami kehidupan perkotaan kolektif (Addie, Glass, & Nelles, 2020). Saya telah berpendapat dan menunjukkan bahwa tiga pilar koridor ekonomi—infrastruktur, perkotaan, dan pembangunan ekonomi (Asian Development Bank, 2022)—di bawah BRI memainkan peran gabungan dalam menstimulasi lebih banyak perdagangan, mengatur kembali hubungan produksi-konsumsi, dan mendorong integrasi ekonomi lintas batas di Eurasia dan antara Tiongkok dan Laos dan sekitarnya, masing-masing melalui CEFT dan CLR. Dimensi infrastruktur yang paling penting dalam koridorisasi regional menampilkan logistik kereta api barang sebagai sektor utama dan penghubung serta jalur tambahan pembangunan, yang pada gilirannya telah mereformasi (kerugian) komparatif dari jalur dan dinamika ekonomi lokal dan translokal yang masih ada seperti yang dicontohkan oleh hubungan perdagangan dan transportasi Xi'an-Eropa dan Tiongkok (Kunming)—Laos (Vientiane) yang lebih kuat.

Kedua kasus tersebut menggambarkan titik temu yang berbeda antara para pelaku dan kegiatan ekonomi spasial dan sektoral. Meskipun tampak sebagai rute kereta api yang sangat panjang, CEFT terdiri dari koridor dan subkoridor logistik yang terhubung dan menjangkau

jauh dan luas dalam mendorong arus kargo baru melintasi Eurasia, menjadikannya arena globalisasi ekonomi regional yang sudah lama mendominasi sejak zaman Sutra kuno. Jalan dan jalur perdagangan turunannya. Sebagai negara yang secara historis merupakan kekuatan darat, kembalinya Tiongkok ke Eurasia melalui CEFT tidak hanya memperkuat peran awalnya dalam membentuk perekonomian Eurasia namun juga memperluas jangkauan maritimnya sebagai kekuatan ekonomi maritim yang sedang berkembang dengan menjalin hubungan pengangkutan baru antara negara-negara bagian dalam yang tidak memiliki daratan dan logistik. hub dan kota pesisir melalui pelayaran antar moda. Sebaliknya, CLR yang dibangun Tiongkok telah menciptakan koridor ekonomi Tiongkok-Laos sebagai ruang regional yang memanjang di mana perdagangan baru, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya mulai mengalir dan menyebar. Karena CLR yang baru beroperasi lebih sering mengangkut barang dan penumpang dalam volume yang lebih besar, maka CLR mampu menstimulasi pembangunan perkotaan dan perekonomian yang berorientasi transit di sepanjang dan berdekatan dengan rutenya, meskipun pengembangan koridor yang digerakkan oleh CLR jauh lebih terbatas secara spasial dibandingkan dengan CLR. CEFT.

Berangkat dari lingkup global pembangunan infrastruktur dan konektivitas ekonomi yang didukung oleh BRI, CEFT dan CLR mewujudkan jalur regional yang berbeda dalam globalisasi ekonomi baru dan padat dari tengah dengan konsekuensi nasional dan lokal yang kompleks. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan teoretis dan empiris serta tantangan-tantangan baru dalam kajian globalisasi yang ingin dibahas dalam bab ini, meskipun dalam skala yang terbatas.

BAB 10

PERUBAHAN WAJAH GLOBALISASI

Krisis Tataan Dunia, Tantangan (Dalam) Keamanan, Dan Adaptasi Rusia Terhadap Globalisasi

Tren internasional yang terkait dengan krisis tataan dunia, menguatnya posisi pemain non-Barat, ketidakpastian kerja sama global, serta krisis kesehatan terkait COVID-19 menyebabkan perubahan peran, tempat, dan keunggulan negara-negara di dunia. globalisasi. Meskipun proses globalisasi menghadapi banyak tantangan, penilaian yang lebih pragmatis dan realistis terhadap fenomena tersebut telah dilakukan. Globalisasi belum berakhir dan logika kemajuan ekonomi, sosial, teknologi, dan informasi global bahkan menjanjikan fase baru globalisasi. Namun, perubahan mode globalisasi menciptakan respons domestik yang bervariasi terhadap kekuatan global yang tidak dapat diprediksi dan tidak stabil. Proses globalisasi berkembang pada tingkat yang berbeda-beda, dengan hasil yang berbeda-beda di berbagai negara di dunia. Krisis tataan dunia liberal global yang telah banyak menggerem berbagai mesin globalisasi memaksa kita memikirkan kembali peran dan posisi Rusia, salah satu pemain utama non-Barat di dunia. Respons Rusia terhadap globalisasi berupa penyesuaian kontroversial terhadap lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat. Rusia sedang mengembangkan visinya sendiri mengenai globalisasi dan politik internasional, mengembangkan strategi pragmatis berdasarkan penerimaan yang selektif dan hati-hati dalam mengejar kepentingan nasional.

Gagasan globalisasi memicu perdebatan luas mengenai sifat dan kekuatan pendorong proses global serta dampak dan manfaat dari dunia global yang terintegrasi yang didorong oleh pembangunan ekonomi, perubahan politik, terobosan teknologi, rangsangan budaya, dan peningkatan komunikasi. Globalisasi memiliki beragam definisi, dan banyak di antaranya merujuk pada realisasi keterkaitan yang luas dan keterhubungan yang semakin intensif, yang mengakibatkan saling ketergantungan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Para ahli menggarisbawahi “intensifikasi jangkauan dan kecepatan kontak di antara berbagai belahan dunia dan perluasan jenis kegiatan yang terlibat erat dalam interaksi global” (Stearns, 2020: 6). Integrasi ekonomi yang maju melalui keterbukaan pasar, intensifikasi perdagangan, dan investasi menjadi instrumen utama yang memberikan peluang inovatif untuk meningkatkan proses produksi. Revolusi informasi dan komunikasi, serta kemajuan inovasi, berkontribusi terhadap momentum teknologi. Secara politis dan ideologis, globalisasi dikaitkan dengan kemenangan tataan dunia liberal global, liberalisme politik, dan penyebaran norma dan nilai demokrasi liberal dari Barat ke seluruh dunia.

Namun belakangan ini, tataan dunia liberal mulai menunjukkan gejala kemunduran. Penurunan ini terlihat dari meningkatnya ketidakpuasan di antara sejumlah negara non-Barat terhadap politik global, melemahnya kepemimpinan Barat, persaingan yang ketat antara negara-negara besar, hambatan terhadap pertumbuhan, pembangunan yang tidak merata,

dan kebencian terhadap saling ketergantungan global, serta meningkatnya populisme, nasionalisme, dan otoritarianisme. Kejengkelan dan ketegangan mengenai ketidakadilan dan kesenjangan dalam sistem global menciptakan perbedaan pendapat dan penolakan terhadap globalisasi di banyak negara. Selain itu, terdapat kontradiksi yang belum terselesaikan antara struktur ekonomi dunia yang lebih mengglobal dan aspek politik, yang mana mekanisme tata kelola global yang universal dan efektif belum pernah terbentuk. Serangan yang dilancarkan oleh politik terhadap perekonomian, seperti sanksi sepihak dan perang dagang, menciptakan hambatan langsung bagi pengembangan keterhubungan internasional dan secara tajam meningkatkan volatilitas sistem global. Tantangan terhadap keterkaitan global juga menjadikan penting untuk memiliki pandangan baru terhadap gagasan kepemilikan bersama, termasuk perubahan iklim global, polusi lintas batas, konservasi, kesehatan, migrasi, dan lain-lain. Krisis kesehatan akibat COVID-19 menjadi “ujian stres globalisasi” yang sangat besar. . . memaksa evaluasi ulang besar-besaran terhadap ekonomi global yang saling terhubung” (Farrell & Newman, 2020). Dengan retaknya rantai pasok yang kritis, perjalanan yang semakin meningkatkan infeksi, dan perusahaan, masyarakat, serta seluruh negara bagian menyadari kerentanan mereka, terjadi perubahan dinamika kekuasaan di negara-negara besar dunia (Niblett, 2020). Pandemi ini telah menimbulkan tuntutan masyarakat akan strategi proteksionis dalam kebijakan dalam negeri dan nasionalisme dalam kebijakan luar negeri. Dengan demikian, tren internasional yang terkait dengan krisis tatanan dunia, perubahan posisi pemain non-Barat, lanskap ekonomi yang tidak merata, serta krisis kesehatan terkait COVID-19 menimbulkan perubahan peran, tempat, dan keunggulan globalisasi.

Meskipun globalisasi menghadapi banyak tantangan, penilaian yang lebih pragmatis dan realistis terhadap fenomena tersebut telah dilakukan. Globalisasi belum berakhir dan logika kemajuan ekonomi, sosial, teknologi, dan informasi global bahkan menjanjikan fase baru globalisasi. Namun, perubahan mode globalisasi menciptakan respons dalam negeri yang bervariasi terhadap kekuatan global yang menjadi tidak dapat diprediksi dan tidak stabil. Proses globalisasi berkembang pada tingkat yang berbeda-beda, dengan hasil yang berbeda-beda di berbagai negara di dunia. Dalam kondisi seperti ini, setiap negara harus memikirkan kembali strategi perjuangannya untuk bertahan hidup dan pembangunan. Sifat ketidakstabilan global juga ditentukan oleh pergulatan yang terjadi di dalam suatu negara, tingkat persaingan di antara negara-negara tersebut, dan oleh ketegangan dalam bidang politik dan ekonomi internasional global dan regional. Krisis tatanan dunia liberal global yang telah banyak mengerem berbagai mesin globalisasi memaksa kita memikirkan kembali peran dan posisi Rusia, salah satu pemain utama non-Barat, di dunia. Setelah membahas krisis tatanan global dan masalah keamanan manusia, bab ini menganalisis karakter keterlibatan Rusia dalam globalisasi dalam kondisi perubahan tatanan dunia sebelum dimulainya perang di Ukraina. Hal ini akan menunjukkan bahwa tanggapan Rusia terhadap globalisasi merupakan penyesuaian yang kontroversial terhadap lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat. Rusia sedang mengembangkan visinya sendiri mengenai globalisasi dan politik internasional dengan mengembangkan strategi pragmatis, berdasarkan penerimaan yang selektif dan hati-hati dalam mengejar kepentingan nasional. Bab ini diakhiri dengan menekankan perlunya

penyesuaian antara elemen global dan domestik karena perubahan kapasitas dan kepentingan negara, dan kegagalan pengaturan global saat ini dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan globalisasi.

10.1 KRISIS TATA DUNIA, KEAMANAN MANUSIA, DAN GLOBALISASI

Ketegangan Tatanan Global dan Globalisasi

Krisis tatanan dunia liberal global memberikan dampak yang signifikan terhadap globalisasi. Perdebatan sengit terus berlanjut mengenai kapan tepatnya titik balik dalam proses global terjadi dan apa saja tanda-tanda spesifik serta implikasinya. Pertama, banyak orang berpendapat bahwa krisis tatanan global mungkin mengarahkan dunia ke sistem global pasca-Barat. Tiongkok, Rusia, India, Turki, dan negara-negara kuat non-Barat lainnya meluncurkan agenda dan gagasan mereka sendiri untuk globalisasi dan tatanan global. Para aktor ini menantang sisa-sisa sistem unipolar Barat, dan ambisi mereka untuk memainkan peran yang lebih penting dalam hubungan internasional semakin jelas. Namun, negara-negara ini mempunyai gagasan berbeda mengenai transisi global. Sementara Tiongkok menekankan kepemimpinan ekonomi, Rusia berfokus pada nilai-nilai pemerintahan, seperti kedaulatan nasional, keamanan, dan kebebasan memilih politik dan budaya.

Krisis tatanan global juga dapat dilihat sebagai “fondasi bagi hubungan dan solusi internasional baru” (James, 2021), di mana negara-negara terlibat dalam kerja sama yang pragmatis dan “praktis, non-ideologis, dan berbasis isu” (Acha -rya, 2017:282). Kondisi transisi global memberi sinyal bahwa “tatanan dunia pasca-Barat dan Amerika Serikat harus belajar hidup berdampingan untuk menghindari bentrokan yang saling berbahaya, sambil bersaing untuk mendapatkan peluang baru dalam skala global” (Tsygankov, 2019: 55).

Banyak antiglobalis non-Barat yang menganggap globalisasi tidak menguntungkan, menciptakan peningkatan dominasi negara-negara maju terhadap masyarakat kurang berkembang, memperburuk kesenjangan ekonomi, dan menghilangkan nilai-nilai budaya dan tradisi. Meskipun para penganut paham antiglobalisme bersikukuh bahwa ketimpangan distribusi manfaat dan ketidakseimbangan dalam hasil perekonomian serta pembuatan peraturan akan terus menimbulkan dampak buruk dan semakin melemahkan perekonomian dunia, banyak negara berkembang non-Barat yang tidak meninggalkan globalisasi. Sebaliknya, mereka berupaya membangun kepemimpinan dan pengaruh dalam sistem global dan terus mengeksploitasi manfaat globalisasi. Kapasitas ekonomi Tiongkok dan India menggarisbawahi meningkatnya peran negara-negara non-Barat dalam tata kelola global, khususnya di bidang lembaga keuangan internasional dan sistem moneter. Selain itu, strategi Tiongkok yang rumit dalam peluncuran Bank Investasi Infrastruktur Asia dan visi Satu Sabuk, Satu Jalan untuk kerja sama ekonomi Eurasia merupakan sinyal kuat bahwa Tiongkok mendukung globalisasi dan bahkan memajukan globalisasi.

Kedua, beberapa analis dan pengamat mengaitkan perubahan globalisasi dan tren pembangunan global dengan melemahnya perekonomian negara-negara Barat/AS. kepemimpinan. Konsep globalisasi yang paling luas menekankan westernisasi, dan khususnya Amerikanisasi dunia. Oleh karena itu, globalisasi dipahami sebagai penyebaran liberalisme,

rasionalisme, kapitalisme, dan demokrasi ke seluruh dunia. Tujuan “hegemoni liberal” Barat dan sebagian besar AS adalah pemberlakuan demokrasi liberal di seluruh dunia dan promosi ekonomi internasional terbuka. Namun, meskipun memiliki kekuatan yang tak tertandingi, Amerika Serikat “tidak berbuat banyak untuk mengatasi kesenjangan yang semakin besar antara tantangan global dan lembaga-lembaga yang harus menghadapi tantangan tersebut” (Haass, 2021). Tindakan antiglobal dan tidak liberal yang menjadi ciri tindakan AS, seperti penarikan diri dari sejumlah perjanjian multilateral, invasi ke Afghanistan dan Irak, dan posisi pemerintahan Trump dalam bidang perdagangan, lingkungan hidup, dan aliansi, sangat bertentangan dengan kebijakan AS. proses globalisasi. Tekad Presiden Trump untuk beralih ke cara-cara pembangunan nasional dan domestik, serta menarik diri dari sejumlah perjanjian internasional, “membahayakan” globalisasi (Patrick, 2017). Penolakannya terhadap dua proyek integrasi internasional, Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) dan Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik (TTIP), memberi isyarat kepada dunia bahwa perluasan rezim perdagangan liberal tidak menguntungkan kepentingan dalam negeri dan masyarakat AS. Awal krisis ini juga ditandai dengan pecahnya perang dagang dan teknologi AS-Tiongkok pada tahun 2017–2018 (Kortunov, 2020b). Situasi global yang berkembang dari konflik-konflik ini adalah akibat dari pengabaian Amerika Serikat terhadap “posisi kerja sama multilateral demi doktrin keutamaan” (Steinbock, 2018) dan kegagalan untuk beradaptasi dengan kebangkitan Tiongkok (Haass, 2021). Namun titik baliknya juga dapat ditelusuri ke masa lalu, seperti Krisis Keuangan Global pada tahun 2008–2009, ketika komunitas global kehilangan kesempatan untuk menciptakan cara baru dan lebih efisien dalam mengelola perekonomian global (Flew, 2018). . Setelah krisis ini, Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya menjadi penggerak perekonomian internasional, sehingga terhindar dari depresi global. Namun, seiring dengan melemahnya kerja sama G20, prospek pertumbuhan global dan masa depan integrasi ekonomi global juga menurun. Saat ini, Presiden Biden berjanji untuk memberikan kepemimpinan global dengan memperkuat komunitas transatlantik, mendorong globalisasi, menjunjung tinggi aliansi, dan mendorong solidaritas demokrasi liberal, yang sangat dihargai dan dirayakan oleh para globalis.

Ketiga, perubahan globalisasi secara progresif dibentuk oleh tantangan-tantangan yang dihadapi negara-negara di dalam dan luar negeri. Globalisasi menyoroti keunikan setiap negara dan masyarakat dengan latar belakang saling ketergantungan dan komunikasi dengan negara dan masyarakat lain. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan proses globalisasi mengubah sifat, peran, dan fungsi negara, sehingga menyebabkan negara beradaptasi dengan keadaan ekonomi dan politik global atau menunjukkan ketahanan dan kemauan untuk menentukan kebijakan ekonomi, sosial, dan politik mereka sendiri. Domestikasi keputusan mempengaruhi berfungsinya tatanan global dan tetap menjadi tantangan bagi tatanan yang sama. Negara-negara, terutama negara-negara kuat, terus mempertahankan dan memajukan kedaulatan dan bertindak dengan cara yang mencerminkan kepentingan nasional mereka. Kebijakan dalam negeri terhadap perdagangan dan investasi pada dasarnya bersifat politis dan tidak dapat diperkirakan hanya dengan mengacu pada efisiensi dan biaya. Ketimpangan pendapatan antar negara dan di dalam negara semakin meningkat, kekhawatiran terhadap

keamanan nasional menjadi hal yang sangat penting, dan kepercayaan antar negara semakin menurun. Perusahaan multinasional merasa perlu untuk mengatasi tekanan antara menjadi kompetitif secara global dan bertanggung jawab secara lokal terhadap masyarakat domestik. Selain itu, pandemi COVID-19 telah mendorong kebijakan yang berpusat pada negara, khususnya proteksionisme perdagangan, yang “mendorong tren deglobalisasi” (Heungchong, 2020). Namun, tampaknya tidak ada solusi yang benar-benar independen. Dunia saat ini ditandai dengan tingkat kompleksitas dan saling ketergantungan yang jauh lebih besar, yang berarti bahwa mengubah hubungan global saat ini menjadi hubungan antar negara yang tradisional adalah sebuah upaya yang sangat rumit dan bahkan mustahil.

Yang terakhir, kesulitan dalam sifat globalisasi, yang berasal dari krisis tatanan global, mungkin bukan terletak pada fenomena tersebut, melainkan pada ketidakmampuan atau keengganan komunitas internasional untuk mengatur jalannya globalisasi secara efisien. Artinya, permasalahan utama globalisasi berkaitan dengan kurangnya mekanisme tata kelola global yang sesuai dengan realitas baru kehidupan internasional. Ketika kepemimpinan global memburuk dan persaingan antara negara-negara besar meningkat, termasuk dalam menanggapi ancaman COVID-19, inilah saatnya untuk mengeksplorasi arah baru dalam kerja sama internasional. Terdapat kebutuhan untuk mereformasi lembaga-lembaga global yang ada dan membentuk lembaga-lembaga baru guna mencapai “keseimbangan yang lebih baik antara peraturan dan norma global di satu sisi dan beragam keadaan yang dihadapi berbagai negara di sisi lain” (Madhok, 2021: 201). Komunitas negara-negara global ternyata tidak siap menghadapi krisis ini dan tidak mampu mengusulkan model yang terorganisir dengan baik dan kredibel untuk mengatasi tantangan bersama global, termasuk krisis kesehatan saat ini. Krisis yang terjadi pada organisasi-organisasi internasional dan lembaga-lembaga multilateral, termasuk PBB, Uni Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan lainnya juga menjadi indikator ketidakmampuan lembaga-lembaga tersebut untuk bertindak sebagai pemimpin yang menyalurkan upaya-upaya aktor-aktor internasional dalam memulihkan kemampuan pemerintahan dari sistem internasional. Secara keseluruhan, kesediaan umat manusia untuk bekerja sama melawan tantangan bersama, baik itu bencana maupun epidemi, telah menurun setidaknya dalam satu dekade terakhir. Ciri-ciri politik global saat ini mencerminkan nasionalisme dan eksepsionalisme nasional yang terus-menerus dipromosikan, tidak menghormati hukum internasional, dan mengutamakan kepentingan jangka pendek dibandingkan kepentingan jangka panjang.

Keamanan Manusia dan Globalisasi

Konsep keamanan manusia, yang diperkenalkan oleh Program Pembangunan PBB pada tahun 1994 (UNDP 1994), disambut secara luas sebagai perubahan yang disambut baik terhadap pemahaman konvensional tentang keamanan. Meskipun konsep keamanan tradisional berkisar pada kesiapsiagaan militer melawan musuh asing, dan perlindungan informasi ilmiah dan keamanan, visi baru keamanan berfokus pada isu-isu kerentanan manusia di seluruh dunia. Ini adalah konsep yang lebih komprehensif untuk mengatasi konflik kekerasan, serta kehabisan sumber daya, pandemi kesehatan, kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, dan degradasi lingkungan. Saat ini, keamanan manusia menjadi semboyan

untuk menggambarkan tantangan sulit yang dihadapi individu, masyarakat, dan seluruh komunitas global dalam mencapai keselamatan dan kesejahteraan di dunia yang tidak aman.

Pemahaman globalisasi yang komprehensif dan lebih bernuansa harus mempertimbangkan munculnya berbagai dimensi realitas struktural dan relasional secara simultan, yang mencakup komponen sosio-ekonomi, politik, budaya, teknologi, informasi, dan keamanan. Sebagai sebuah proses, globalisasi mempunyai kekuatan karena menempatkan dimensi kemanusiaan sebagai fokus utama. Permasalahan keamanan manusia, yang secara jelas termanifestasi dalam bidang-bidang baru yang non-konvensional, seperti keamanan siber, ketahanan energi, ketahanan pangan, keamanan lingkungan hidup, dan lain-lain, khususnya patut mendapat perhatian di dunia global karena sebagian besar permasalahan ini bersifat global, bukan regional. atau lokal, alam. Idealnya, globalisasi menawarkan peluang baru untuk mengatasi masalah keamanan manusia, bersama-sama mencegah bencana, memerangi pandemi, terorisme internasional, dan perubahan iklim. Di dunia yang menghadapi tantangan besar, solusi adalah barang publik global (James, 2021). Dengan demikian, globalisasi juga dapat berfungsi sebagai arena yang diperlukan untuk melindungi kepentingan universal umat manusia.

Mayoritas tantangan pembangunan manusia dan keamanan saat ini muncul dari berbagai keadaan yang saling berhubungan dan saling memperkuat dalam globalisasi (PBB, 2016). Setiap negara memberikan respons yang berbeda terhadap peluang dan tantangan globalisasi karena situasi politik, sosial ekonomi, dan budaya dalam negerinya. Hal serupa juga terjadi karena kondisi keamanan manusia berbeda-beda di setiap negara, dan pada waktu yang berbeda-beda, keamanan manusia memperkuat solusi nasional, yang disesuaikan dengan pengalaman dalam negeri. Meskipun pemerintah nasional memegang peran dan tanggung jawab utama untuk menjamin keselamatan, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan warga negaranya, fungsi lembaga dan komunitas global adalah untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada negara-negara berdasarkan permintaan mereka, “untuk memperkuat kepentingan mereka.” kapasitas untuk merespons ancaman saat ini dan yang akan datang” (PBB, 2016: 6). Untuk mencapai keamanan manusia yang lebih baik diperlukan kerja sama dan kemitraan yang lebih efektif antar negara, dengan mengatasi penyebab sebenarnya dari permasalahan dan dengan mengembangkan solusi yang berkelanjutan dan berketahanan.

Keamanan manusia dan globalisasi menekankan keterkaitan dan saling ketergantungan berbagai aktor dan institusi di dunia. Keduanya memerlukan penilaian terhadap peluang, kapasitas, risiko, dan tantangan. Globalisasi dapat dan memang mempengaruhi keamanan manusia melalui transformasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Di satu sisi, globalisasi dapat meningkatkan keamanan manusia dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan pemahaman budaya, dan memberikan tingkat pemberdayaan politik dan kebebasan pribadi yang lebih besar. Di sisi lain, hal ini dapat memperburuk ketidakamanan manusia karena meningkatnya ketimpangan pembangunan, mengikis identitas budaya, mendorong degradasi lingkungan, dan keterasingan, terutama di negara-negara berkembang. Globalisasi, sebagai kekuatan transformasi yang kuat, mengawali berbagai perubahan yang diarahkan untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena

itu, tantangan keamanan manusia memerlukan respons multilateral global yang terintegrasi melalui sistem global, pendekatan keamanan manusia yang konsisten dan berfokus pada globalisasi tanggung jawab.

10.2 ADAPTASI RUSIA TERHADAP GLOBALISASI

Pengalaman Rusia dalam menghadapi globalisasi sangat kompleks dan beragam. Sejak berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet, Rusia ditantang oleh kebutuhan untuk secara mendasar merekonstruksi negaranya, institusi politik dan ekonomi, identitas, kekuasaan, dan citra internasionalnya. Negara ini berjuang untuk melakukan hal tersebut di tengah lingkungan global yang mengancam, menantang, dan tidak biasa. Pada awal tahun 1990-an, Rusia membuat keputusan strategis yang mendukung integrasi ke dalam globalisasi yang didukung Barat, karena Rusia menjanjikan prospek yang luas dalam pembangunan ekonomi, perdagangan, hubungan ilmiah, terobosan teknologi, komunikasi, dan peningkatan budaya melalui penyebaran norma-norma. dan ide.

Rusia mengalami transisi politik dan sosio-ekonomi yang luar biasa serta penggabungannya ke dalam dunia yang sedang mengglobal, dan mengadopsi arah transformasi Barat. Negara ini juga berusaha mendapatkan kembali kekuatannya dan kembali ke akarnya, serta memberi makna pada perubahan-perubahan yang membingungkan di dunia sekitar. Negara-negara Barat menyambut baik transformasi Rusia, dengan asumsi bahwa kepentingan Rusia akan serupa dengan sebagian besar kepentingan dan tujuannya. Namun, pada akhir tahun 1990an banyak kontradiksi yang terlihat jelas. Rusia mewarisi kapasitas nuklir Soviet, sumber daya alam yang berlimpah, dan keanggotaan permanen di Dewan Keamanan PBB, namun pada dasarnya negara tersebut kehilangan hampir semua keunggulan sebagai negara adidaya (Nikonov, 2004). Rusia mengalami kesulitan untuk memverifikasi kedudukan dan pengakuan internasionalnya, serta memohon bantuan ekonomi. Negara ini telah menjadi negara yang lemah secara internal dengan perbatasan yang rapuh, tentara yang lemah, identitas yang tidak dapat ditentukan, dan tidak adanya sekutu yang dapat diandalkan. Memahami keterbelakangan ekonomi dan teknologi serta keterbatasan institusi politik yang ada untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang independen, Rusia menerima kepemimpinan global AS, dan tujuannya adalah menemukan tempat yang sesuai dalam kerangka kerja mereka.

Namun dalam waktu yang relatif cepat, Rusia mengalami kekecewaan yang signifikan terhadap posisi Barat, yang memanfaatkan keuntungan yang didapat dari berakhirnya Perang Dingin, termasuk ekspansi NATO ke arah timur, sementara Rusia menanggung kerugian besar di semua bidang transformasi. Negara-negara Barat terus merayakan kemenangan yang tak terduga dan memproklamkan tatanan dunia baru berdasarkan prinsip-prinsip liberal, sementara Rusia berjuang untuk bertahan menghadapi tantangan ekonomi, perang di dalam wilayahnya sendiri, dan demoralisasi sosial. Rusia masih antusias dengan kemungkinan untuk bergabung dengan rezim dan organisasi internasional, namun sentimen ini secara bertahap mulai memudar menjadi kecurigaan dan semakin besarnya ketidakpastian mengenai manfaat keanggotaan tersebut bagi Rusia. Keragu-raguan mulai muncul mengenai apakah globalisasi

dan saling ketergantungan ekonomi mampu mengendalikan ketegangan dan konflik politik internasional.

Secara signifikan, harapan Rusia untuk bergabung dengan komunitas negara-negara Barat atas dasar kesetaraan tidak terpenuhi. Negara ini tidak setuju dengan ekspektasi dan rencana transformasi Barat, sementara Barat tidak mampu menafsirkan dengan benar motivasi dan perilaku Rusia. Ada kekhawatiran yang terus-menerus di Barat bahwa Rusia tidak akan cocok secara institusional, strategis, dan normatif. Perluasan NATO ke arah timur juga membuat para politisi Rusia percaya bahwa Barat tidak akan menyerah dalam melindungi kepentingan strategisnya dan tidak tertarik pada kebangkitan Rusia yang kuat (Torkunov, 2012). Selama dekade setelah berakhirnya Perang Dingin, tidak ada pengaturan kekuasaan baru yang dibuat dan Rusia tetap berada di luar sistem keamanan kolektif yang diwakili oleh NATO, yang mengakibatkan serangkaian implikasi negatif, termasuk rasa terkucilkan dan diasingkan. Oleh karena itu, pada awal abad ke-21, Rusia terpaksa menciptakan konsep baru tentang hubungan global, yang menguraikan syarat-syarat bagi negara-negara besar untuk mengakui keamanan, kedaulatan, dan kepentingan nasional negara lain secara sah. Rusia telah mengadopsi serangkaian prioritas yang berbeda dan mencoba melakukan pendekatan yang lebih selektif. Dalam hubungan politik dan ekonomi, negara ini bersikeras untuk menjaga kedaulatan negara dan hak untuk mempertahankan diri dari pengaruh eksternal yang merusak, serta mempromosikan visi globalisasinya sendiri. Sebagai negara yang baru bangkit, Rusia berupaya untuk menentukan perannya dalam dunia yang sedang mengglobal dan memastikan bahwa peralihan kekuasaan pasca-Perang Dingin akan ditandai dengan saling ketergantungan dan keterkaitan, serta sistem keamanan kolektif yang diperluas. Namun, setiap upaya Rusia untuk menyesuaikan diri dengan sistem politik, ideologi, dan nilai yang diciptakan oleh Barat tanpa partisipasi Rusia dan tanpa mempertimbangkan kepentingannya tidak sejalan dengan adaptasi sepihak terhadap tatanan liberal yang didukung Barat. Rusia menjadi “terperangkap dalam kebuntuan strategis,” di mana Rusia bisa saja menjadi “kekuatan besar namun hanya pihak luar; atau anggota Historical West, namun harus mengorbankan otonominya sebagai kekuatan besar” (Sakwa, 2017).

Dalam masyarakat, kecemasan terhadap globalisasi diperkuat oleh keyakinan bahwa globalisasi bukanlah hasil kekuatan keterkaitan dan integrasi yang bersifat impersonal, melainkan bahwa globalisasi dikendalikan oleh proyek hegemoni luar dari Barat. Upaya untuk membangun ekonomi pasar yang kompetitif dan pemerintahan demokratis bertabrakan dengan warisan sejarah otokrasi, perjuangan identitas, dan hambatan pembangunan. Kompleksitas dan biaya pembentukan sistem politik dan ekonomi baru menurut cara Barat tampaknya jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Ketika globalisasi meningkat pesat karena kemajuan dalam inovasi teknologi dan ekonomi informasi, Rusia menyadari keterbelakangan teknologi dan ekonominya. Globalisasi terutama dikaitkan dengan “terapi kejut”, runtuhnya sistem, dan ketidakmampuan untuk mempertahankan standar hidup yang telah dicapai sebelumnya, yang menyebabkan deprivasi sosial dan ekonomi. Memasuki globalisasi melalui liberalisasi dan privatisasi dibarengi dengan sikap bermusuhan terhadap fenomena tersebut, dan bangkitnya kembali gagasan nasionalisme dan patriotisme.

Reformasi ekonomi dan sosial serta keterlibatan dalam proses integrasi bertentangan dengan gagasan negara yang kuat, kedaulatan, dan keunikan pembangunan Rusia sendiri. Selain itu, banyak orang Rusia memandang konsep kebebasan, keadilan, dan ketertiban yang dipromosikan secara global, bukan sebagai dua hal yang saling bertentangan, namun sebagai nilai-nilai yang sama pentingnya bagi kehidupan normal negara dan setiap individu. Globalisasi seperti westernisasi tidak membawa manfaat yang diharapkan dan mengancam transformasi kedaulatan, kenegaraan, dan masyarakat. Rusia lebih memilih untuk mengikuti jalur pembangunannya sendiri, membela kepentingan nasionalnya sendiri dan perannya di arena internasional dalam konteks dampak positif dan negatif dari globalisasi. Rusia memilih untuk mengubah dirinya dari pengikut setia Barat menjadi pengkritiknya, dengan mengupayakan perluasan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan, institusi, pasar, dan nilai-nilai global.

Seiring dengan kemajuan globalisasi, Rusia menunjukkan hubungan yang kompleks dan bahkan kontradiktif dengan negara tersebut, mulai dari adaptasi hingga konfrontasi dengan tatanan global. Di satu sisi, retorika resmi menunjukkan keinginan untuk mengubah Rusia menjadi bagian integral dari perekonomian global. Di sisi lain, risiko-risiko yang terkait dengan globalisasi, seperti memperdalam kesenjangan, meningkatnya ketidakstabilan keuangan, dan penyebaran kejahatan ekonomi lintas negara, terus-menerus menjadi bahan diskusi. Penekanan juga berulang kali diberikan pada pencegahan agar globalisasi tidak melemahkan posisi negara-bangsa sebagai aktor utama dalam politik dan ekonomi global.

Hasil globalisasi pada akhir tahun 2010an menunjukkan bahwa upaya Rusia untuk berintegrasi ke dalam keterkaitan ekonomi global pada tahun 2000an hanya sedikit berhasil. Kaya akan sumber daya alam, dengan likuiditas yang signifikan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan mata uang, Rusia menjadi kekuatan di antara negara-negara pasar berkembang global, menempati posisi kedua belas di dunia berdasarkan nilai nominal hingga tahun 2013. Namun, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi secara bertahap dan diiringi dengan meningkatnya disparitas dalam sektor manufaktur, menurunnya inovasi yang dilakukan oleh produsen, semakin intensifnya ketidakseimbangan karakteristik teknis aset tetap, dan investasi pada aset tetap berdasarkan kegiatan ekonomi utama. Ketergantungan pada sumber daya alam dan perekonomian yang sangat berfokus pada energi masih menjadi pedang bermata dua bagi Rusia, sehingga membuat negara tersebut rentan terhadap fluktuasi kredit dan pasar komoditas. Struktur ekspor Rusia tidak banyak berubah, dan negara tersebut masih belum mampu menjadi anggota penuh rantai teknologi global. Pada saat yang sama, ketergantungan Rusia pada dunia luar semakin meningkat, sehingga menimbulkan risiko ekonomi dan politik baru. Krisis keuangan pada tahun 2008–2009 tidak dapat diantisipasi dan sangat menyusahakan Rusia. Namun, pada tahun 2014, ketika hubungan Rusia-Barat mengalami krisis akut, agenda integrasi global Rusia menjadi agenda geopolitik. Krisis Ukraina pada tahun 2014, penerapan sanksi, jatuhnya harga minyak, dan ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut menciptakan situasi yang semakin sulit dalam perekonomian Rusia, dan semakin sulit untuk menciptakan alternatif yang dirancang dengan baik terhadap integrasi komprehensif Rusia ke dalam perekonomian global. Rusia terus menghadapi tantangan kompleks yang disebabkan oleh kebutuhan langsung akan penyesuaian ekonomi terhadap

tantangan eksternal ditambah dengan perubahan internal jangka panjang yang besar dalam perekonomian dan masyarakatnya. Saat ini, guncangan eksternal, termasuk perjuangan melawan COVID-19 dan krisis dengan Ukraina, ditambah dengan inefisiensi struktural dan kurangnya inovasi, serta melemahnya konsumsi dan investasi, berdampak pada prospek pertumbuhan Rusia. Realisasi globalisasi ekonomi yang lebih sukses akan bergantung pada keterlibatan para pelaku ekonomi utama dalam proses pengembangan perubahan inovatif, implementasi terobosan teknologi, dan pencapaian percepatan pembangunan di industri-industri prioritas, yang dapat memberikan transisi dari aspirasi ke pencapaian.

Dalam konteks transisi tatanan dunia, krisis kesehatan yang terjadi saat ini, globalisasi yang tidak merata, dan kebangkitan kekuatan non-Barat, Rusia sedang menilai kembali perannya di dunia, kepentingannya, dan hubungannya dengan Barat. Rusia mulai melihat dirinya sebagai salah satu pemain terpenting di arena internasional, memajukan kondisinya sendiri dalam membentuk tatanan global, menjalin keterlibatan dengan skeptisisme dan keterbukaan dengan nasionalisme. Rusia telah mengembangkan kebijakan luar negeri yang sangat agresif untuk mempertahankan keamanan dan kenegaraannya, dan kebijakan ini diambil alih oleh diskusi mengenai krisis mendalam tatanan dunia liberal dan relevansi prinsip-prinsip Westphalia dalam penataan sistem internasional. Negara ini memberikan peran khusus dalam proses global, melindungi kedaulatan, identitas, kemerdekaan, dan keamanannya sendiri. Respons Rusia terhadap globalisasi tidak bertujuan untuk mengisolasi negaranya dari masyarakat internasional, namun menantang hak prerogatif Barat untuk menentukan norma dan tatanannya. Pandangan ini mengandaikan terciptanya keseimbangan alam, dengan mempertimbangkan secara bijaksana kepentingan terpenting setiap negara dalam urusan dunia. Perjanjian ini tidak menantang landasan masyarakat internasional, namun menolak praktik sistem kekuasaan unipolar.

Rusia mengupayakan strategi global sebagai partisipan dalam penciptaan norma dan aturan tatanan dunia baru yang mengglobal bersama dengan aktor-aktor lain. Mereka memandang tatanan baru ini bersifat polisentris, yaitu para arsitek lama dan pembangun baru globalisasi berpartisipasi dalam pengorganisasian dan penataan tatanan dunia dan regional, berpartisipasi dalam tata kelola global, dan mempunyai otonomi tertentu dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Dalam dekade terakhir, garis strategis perilaku internasional Rusia juga berupa tantangan terhadap globalisasi yang didukung Barat untuk mengamankan pencarian aturan main baru dalam politik multipolar global. Rusia telah menunjukkan bahwa mereka mampu menangani beberapa tantangan keamanan regional dan global yang paling akut. Ketika dunia semakin berkembang dengan memasuki tingkatan baru menuju sistem negara yang saling terhubung oleh globalisasi, kesenjangan antara semakin parahnya masalah-masalah global, di satu sisi, dan nasionalisasi solusi-solusinya serta deglobalisasi pemerintahan, di sisi lain tangan, semakin berkembang. Dengan mempertimbangkan seluruh kesulitan dan tantangan yang dihadapi Rusia sebagai akibat dari situasi global yang tidak stabil, yang diperburuk oleh krisis COVID-19 yang terus berlanjut, Rusia lebih siap menghadapi krisis ini dibandingkan banyak mitra dan pesaingnya. Negara-negara Barat terpaku pada Rusia dan agenda keamanan tradisionalnya, dan obsesi ini tidak membantu dalam menanggapi krisis dan

tantangan-tantangannya. Sejak lama, strategi Rusia sebagian besar dirancang untuk menghadapi lingkungan internasional yang tidak menguntungkan, sebuah dunia di mana kepentingan geopolitik lebih diutamakan daripada kepraktisan ekonomi dan konflik internasional lebih diutamakan daripada kerja sama. Namun, strategi global yang efektif hanya mungkin terjadi jika negara tersebut menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi resesi ekonomi dan pandemi ini, sambil mengalami kerugian minimal terhadap standar hidup dan mempertahankan prospek pertumbuhan ekonomi yang cepat pasca krisis. Namun, upaya yang jauh lebih menantang adalah mengalahkan sikap yang saat ini berlaku di masyarakat Rusia, termasuk perasaan mandiri, skeptisisme yang luar biasa terhadap dunia luar, dan isolasionisme, yang berakar pada pengalaman sejarah, psikologi nasional, dan naluri sosial Rusia. Masyarakat Rusia akan mendapatkan manfaat jika mereka menghargai peluang pembangunan yang ada, dan tidak hanya menilai tantangan keamanan yang ada. Tujuan utama strategi global Rusia adalah membantu masyarakat domestik mengintegrasikan diri ke dalam dunia global yang akan datang tanpa mengorbankan identitas nasional mereka terhadap globalisasi.

Namun demikian, salah satu peluang yang muncul dari krisis saat ini adalah prospek bagi Rusia untuk lebih aktif memajukan visinya mengenai sifat sistem internasional saat ini, pendorong pembangunannya, dan parameter yang diinginkan dari tatanan dunia baru. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka juga merupakan arsitek terampil yang siap, bersama dengan mitranya, untuk memajukan mekanisme, prinsip, dan model tatanan dunia baru yang masih dalam pembangunan. Perkembangan cara-cara baru dan ceruk kerja sama internasional untuk masa depan semakin penting. Bidang-bidang seperti keamanan energi global, ketahanan pangan, keamanan siber, dan kerja sama dalam isu-isu iklim dan lingkungan hidup cukup menjanjikan. Tugas utamanya adalah menguraikan sistem global yang dapat menjamin stabilitas dan keamanan dunia, membuat aturan perilaku bagi perekonomian dan perdagangan global, serta meredakan tantangan dan risiko yang ada sekaligus mencegah munculnya tantangan dan risiko baru. Terdapat prasyarat obyektif untuk membentuk tatanan global yang inklusif di mana setiap negara akan memikul tanggung jawab masing-masing untuk masa depan umat manusia, dan di mana komunitas global melindungi hukum internasional dan kepentingan sah setiap anggotanya.

Adaptasi Rusia terhadap globalisasi harus dilihat sebagai hasil penyesuaian terus-menerus terhadap tantangan-tantangan global dan dalam negeri yang terus berubah serta perkembangan sumber kekuatan dan identitas Rusia. Visi sistemik Rusia mengenai dunia dan perannya dalam tatanan global mencakup tujuan mendukung kerangka kerja dan kemitraan yang saling menguntungkan yang dipandu oleh prinsip-prinsip kedaulatan, kepraktisan, keterbukaan, dan komitmen untuk menjunjung tinggi kepentingan nasional, namun berkontribusi terhadap kerja sama internasional dalam bidang politik. dasar yang tidak diskriminatif.

10.3 KESIMPULAN

Globalisasi membawa negara-negara di dunia ke dalam jaringan keterhubungan, mendorong mereka untuk mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi, keamanan, inovasi, akses terhadap sumber daya, teknologi, dan sistem nilai. Ketidakpuasan terhadap saling ketergantungan mengungkap fakta bahwa, meskipun permasalahannya menunjukkan kecenderungan globalisasi, banyak tanggapan terhadap permasalahan tersebut masih bersifat domestik. Krisis tatanan dunia global menunjukkan adanya batasan terhadap sifat globalisasi tanpa batas yang dapat ditetapkan oleh pemerintah suatu negara. Situasi global mulai berubah, dan tantangan bagi negara-negara tersebut adalah bagaimana membangun hubungan internasional, kebijakan luar negeri, dan respons dalam negeri ketika aspek-aspek penting dalam tatanan internasional sedang berjalan. Perpecahan yang mendalam antara saling ketergantungan negara-negara dan ketidakmampuan mereka untuk mencapai kesepakatan, untuk membangun sistem hubungan internasional yang kurang lebih stabil dan tidak berujung pada pertikaian geopolitik yang terus-menerus, menciptakan situasi yang sulit. Elemen penyesuaian yang signifikan antara elemen global dan nasional diperlukan sebagai akibat dari fluktuasi kapasitas, kecenderungan yang tidak menentu, ambisi yang semakin besar, dan ketidakmampuan pengaturan yang ada saat ini untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan globalisasi. Negara-negara memerlukan konsep baru mengenai tatanan dunia dan pandangan baru yang radikal terhadap globalisasi.

Perlu disebutkan bahwa transformasi tatanan dunia global tidak boleh berfokus pada penghapusan pencapaian sosial, budaya, dan humanistik yang telah dicapai selama globalisasi. Ciri utama negara-negara berkembang mungkin adalah tidak adanya gagasan universal tentang struktur, perilaku, dan nilai-nilai yang “benar” di masing-masing negara (Valdai Club, 2018). Khususnya, keragaman bentuk struktur politik dan kecenderungan sosial mungkin meningkat, dan kemauan negara dan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap pola-pola eksternal yang seragam mungkin akan berkurang. Menyangkal penerapan standar dan nilai tidak boleh mengabaikan kesediaan untuk meniru jenis dan model pembangunan yang berhasil demi kepentingan kemajuan dalam negeri serta kesejahteraan dan keamanan global.

Apa bentuk dasar politik, hukum, dan ekonomi dari tatanan dunia baru yang dapat menjamin pembangunan, keamanan, dan stabilitas global? Hampir tidak ada orang yang bisa mengusulkan rencana pembangunan dunia, namun parameter realistis untuk prospek transisi global menuju sistem internasional baru dan keseimbangan kekuatan baru penting bagi Rusia dan negara-negara berkembang lainnya. Yang diperlukan bukan hanya pemahaman yang jelas mengenai kepentingan nasional negara, namun juga pemahaman yang jelas mengenai kemampuan dan kelemahannya. Perubahan situasi internasional menuntut Rusia dan negara-negara lain untuk memberikan respons yang fleksibel dan tepat waktu terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul seiring dengan evolusi seluruh sistem pembangunan global. Tidak diragukan lagi, peran faktor keamanan manusia—pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, budaya, lingkungan hidup—harus meningkat dalam sistem keterhubungan global seiring dengan globalisasi yang membuka peluang kerja sama di berbagai bidang aktivitas

manusia, sehingga meringankan beban internasional. - eksekusi nasional. Untuk mengatasi krisis ini, negara-negara besar perlu menyepakati cara berinteraksi dan membagi permasalahan menjadi permasalahan yang dapat diselesaikan dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan namun dapat dikelola. Umat manusia dihadapkan pada tugas untuk menciptakan sistem global baru yang akan mengurangi risiko politik, ekonomi, iklim, dan sumber daya serta menyajikan sudut pandang baru berdasarkan keseimbangan kekuatan dan keamanan multilateral, penggunaan sumber daya secara rasional, keadilan sosial, dan rasa hormat terhadap negara maupun hubungan Internasional.

BAB 11

EKSPERIMEN INDIA YANG BERKEMBANG DENGAN NEOLIBERALISME

Penemuan Model Mental

11.1 PENDAHULUAN

Sejak memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1947, India terus menyesuaikan model politik dan ekonominya untuk menghadapi tantangan dan keharusan yang ditimbulkan oleh lingkungan global yang terus berubah. Dimulai dengan peralihan India dari sosialisme (1947–91), yang mengawali revolusi yang dikenal sebagai “neoliberalisme dalam badai” setelah krisis mata uang bersejarahnya, bab ini berfokus terutama pada evolusi India berikutnya, yang semakin dikenal sebagai neoliberalisme otoriter dan seterusnya. Tampaknya menimbulkan elemen populis antiglobalisasi (sebagaimana dibuktikan oleh perintah Perdana Menteri saat ini Narendra Modi yang bertujuan untuk mendemonstrasikan mata uang nasional serta memutuskan beberapa perjanjian perdagangan bebas), fase berikutnya ini tampaknya menganut gaya merkantilis, negara kuat, dan negara yang kuat. - etos perintah-dan-kontrol. Evolusi “neo-liberalisme” yang tidak liberal ini merupakan model yang sangat beragam dan rumit, penuh dengan paradoks dan kontradiksi yang perlu dieksplorasi dan dijelaskan dengan lebih baik.

Sejak memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1947, India terus menyesuaikan model politik dan ekonominya sesuai dengan kebutuhan negara sebagaimana dilihat melalui kacamata kognitif berbagai rezim pemerintahan. Sejak pertengahan tahun 1980an, para pemimpin India menjadi semakin peka terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan global yang terus berubah. Bab ini secara selektif berfokus pada para pemimpin yang telah mempengaruhi titik-titik perubahan tertentu dalam eksperimen model mental ekonomi yang terus berkembang di India. Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mengeksplorasi kerangka kerja neoliberal yang berbeda-beda yang diadopsi pada masa pemerintahan berbagai perdana menteri India, dengan memberikan penekanan khusus pada pergeseran dari kosmopolitanisme global yang pertama kali muncul pada masa pemerintahan Perdana Menteri Rajiv Gandhi pada pertengahan tahun 1980an ke pola nasionalis yang baru-baru ini muncul. populisme yang dianut oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Meskipun demikian, patut dicatat bahwa Mont Pelerin Society (MPS), yang banyak diasosiasikan dengan kelahiran intelektual neoliberalisme, akan mengadakan rapat umum ke tujuh puluh enam di New Delhi pada musim gugur tahun 2024. Menurut penyelenggara konferensi, New Delhi berfungsi sebagai “tuan rumah yang ideal,” mengingat pembentukan MPS pada tahun 1947 bertepatan dengan “kemerdekaan politik India dari kekuatan kolonial, setelah hampir 200 tahun berada di bawah pemerintahan tirani dan eksploitasi” ([https://mpsnewdelhi.org/about/.](https://mpsnewdelhi.org/about/))

Seperti yang akan kita lihat, eksperimen India terhadap neoliberalisme yang terus berkembang tidaklah berkelanjutan dan tidak konsisten. Oleh karena itu, kita tidak boleh

menganggap berbagai eksperimen India terhadap kapitalisme pasar sebagai neoliberal monokratis. Pada saat yang sama, kita tidak boleh mengabaikan transformasi pasar luar biasa yang dialami India selama empat dekade terakhir. Reformasi pasar yang dilakukan di India terjalin dalam kerangka perencanaan ekonomi pusat yang dikembangkan pada pertengahan abad lalu. Oleh karena itu, reformasi-reformasi ini mencerminkan banyak karakteristik sistem birokrasi negara yang kaku dan tidak terkoordinasi dalam pengembangan dan penerapannya. Untuk memahami eksperimen neoliberal yang sedang berlangsung di India, kita harus mendalami kerangka kelembagaan sosialis yang menjadi landasan berkembangnya India.

Perjalanan neoliberal India ditandai oleh “fase” berbeda di mana sistem ide yang berbeda dianut oleh para pemimpin politik yang berbeda. Para pemimpin saat ini mewarisi elemen-elemen dari sistem ide pendahulunya yang masih bertahan, dan memasukkan sebagian dari sistem tersebut ke dalam model ekonomi dan agenda kebijakan mereka sendiri. Eksperimen yang dilakukan India terhadap neoliberalisme mencerminkan perpaduan berbagai model yang berbeda dari waktu ke waktu. Jejak model perencanaan terpusat sosialis India lebih menonjol pada agenda neoliberal yang dijalankan beberapa pemimpin dan kurang menonjol pada agenda neoliberal lainnya. Seperti yang akan kita lihat, reformasi kebijakan pasar bebas yang lebih giat yang diadopsi di bawah rezim kapitalis gaya Barat, seperti yang dipimpin oleh Perdana Menteri Monmohan Singh, mungkin telah “dipermudah” atau dalam beberapa kasus justru malah sebaliknya. pemimpin terkini. Pemerintah Modi yang bertujuan untuk mendemonetisasi mata uang nasional serta penghentian beberapa perjanjian perdagangan bebas, misalnya, tampaknya mencerminkan etos nasionalis, dan dalam banyak hal antiglobalis, negara kuat, komando dan kontrol. Retorika ultranasionalis yang terjalin dalam ekspresi “neo-liberalisme” Modi yang tidak liberal menimbulkan kontradiksi dan paradoks yang kuat yang telah menjadi sumber banyak kebingungan dan perdebatan. Memang benar, agenda kebijakan Modi yang berpusat pada negara dapat disebut sebagai neoliberalisme otoriter. Dalam bab ini, saya akan berusaha menguraikan berbagai eksperimen kapitalisme pasar yang dikemas dalam payung luas neoliberalisme.

11.2 KONSEPTUALISASI EVOLUSI NEOLIBERAL INDIA SEBAGAI PERANGKAT MODEL MENTAL

Secara umum, neoliberalisme adalah sebuah konsep yang diperdebatkan dan telah dikaitkan dengan berbagai pemimpin kapitalis pro-pasar di seluruh dunia sejak akhir tahun 1970an. Terkait dengan para pemimpin nasional mulai dari Margaret Thatcher dan Ronald Reagan hingga Augusto Pinochet dan bahkan Deng Xiaoping, istilah ini menimbulkan kebingungan dan kontroversi. Memang benar, penerapan istilah ini secara luas membuat analisis konseptual sistematis apa pun menjadi sangat sulit, bahkan sulit dilakukan. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, mempelajari bagaimana neoliberalisme dalam berbagai bentuk dan kedoknya telah membentuk negara demokrasi terbesar di dunia sejak tahun 1980an masih merupakan upaya yang bermanfaat.

Dalam analisis sebelumnya mengenai subjek ini, kami menemukan bahwa berguna untuk mengonseptualisasikan berbagai penerapan istilah-istilah tersebut sebagai bagian dari

rangkaian sistem “model mental” yang berbeda namun terkait yang memiliki tulang punggung ideasional yang sama (Roy, Denzau, & Willet, 2006). Masing-masing rangkaian neoliberalisme yang akan kita bahas dalam bab ini mempunyai karakteristik tersendiri. Apa yang dimaksud dengan model mental, dan apa manfaatnya dalam analisis kita terhadap beragam neoliberalisme yang telah membentuk India modern? Menurut Laporan Pembangunan Dunia tahun 2015 yang berjudul *Pikiran, Masyarakat, dan Perilaku*, “model mental mencakup kategori, konsep, identitas, prototipe, stereotip, narasi sebab akibat, dan pandangan dunia. . . [Dan tentu saja] tanpa model mental bersama, dalam banyak kasus mustahil bagi masyarakat untuk mengembangkan institusi, menyelesaikan permasalahan aksi kolektif, merasakan rasa memiliki dan solidaritas, atau bahkan memahami satu sama lain” (Bank Dunia, 2015).

Secara umum, neoliberalisme merupakan sebuah konstruksi ideologis yang muncul seiring dengan munculnya globalisasi. Beberapa pakar menganggap neoliberalisme sebagai serangkaian gagasan yang menjadi landasan ideologis yang memfasilitasi bangkitnya globalisasi, sementara pakar lainnya memandang istilah-istilah ini dapat dipertukarkan. Kebijakan neoliberal yang dipromosikan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF)—termasuk perdagangan bebas, tanggung jawab fiskal, deregulasi perekonomian, privatisasi layanan publik, pertumbuhan finansialisasi perekonomian, dan sebagainya—telah tertanam dalam kebijakan institusionalis. kerangka kerja yang awalnya disebut oleh ekonom John Williamson (1990) sebagai *The Washington Consensus* (WC). Namun, WC hanyalah heuristik kebijakan; ini bukan kerangka analisis. Di sisi lain, kerangka model mental memberi kita alat yang berguna untuk menganalisis sistem ideasional yang mendasari eksperimen India melawan neoliberalisme.

Seperti dikemukakan di atas, evolusi neoliberal di India sangatlah rumit dan selalu mencerminkan perpaduan berbagai model mental. Ironisnya, banyak lembaga pembuat kebijakan di India yang terus membentuk eksperimen negara tersebut terhadap kapitalisme pasar dikembangkan pada periode awal perkembangan sosialis (1947–84). Curiga akan bangkitnya kelas kapitalis yang akan mengutamakan kepentingan pribadi dan kepentingan pribadi serta kepentingan pribadi di atas kebutuhan pembangunan nasional, perdana menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, mengadopsi model perencanaan negara yang bersifat *developmentalis* berdasarkan prinsip-prinsip sosialis. untuk mengarahkan perekonomian negaranya. Dengan menekankan cita-cita kolektif dibandingkan gagasan liberalis Barat yang mendukung perdagangan bebas dan individualisme kewirausahaan, model perencanaan sentral Nehru menempatkan nasib perekonomian nasional India di tangan negara.

Model Nehruvian pertama-tama dan terutama berfokus pada inisiatif pembangunan industri yang dipimpin pemerintah yang bertujuan untuk menjamin distribusi sumber daya dalam negeri yang adil. Model Nehru mengambil inspirasi dari cita-cita sosialis demokratik Fabian yang menekankan hak asasi manusia dan kebebasan politik. Namun, kebebasan berwirausaha individu berada di bawah tujuan kebijakan industri yang ditetapkan oleh negara. Pada saat yang sama, Nehru menolak bentuk kolektifisme otoriter Marxis-Leninis yang dengan cepat dianut oleh Tiongkok. Model perencanaan pusat Nehruvian menganut sistem

federal yang demokratis yang melibatkan pembagian kekuasaan dengan negara bagian, yang sering kali menjadi pusat perhatian dalam politik India.

Program negara yang menganut paham pembangunan yang diusung Nehru memperkenalkan sejumlah langkah proteksionis yang dirancang untuk melindungi industri dalam negeri India dari persaingan internasional. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dibentuk dan didukung dengan subsidi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang didorong oleh industri. Lisensi negara—yang juga dikenal dengan sebutan raj lisensi, raj izin-lisensi, atau raj izin-izin-kuota—dikeluarkan kepada industri tertentu yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah pusat. Interaksi pasar bebas antara penawaran dan permintaan ditekan dan digantikan dengan arahan perintah dan kendali produksi yang ditentukan oleh perencana pemerintah. Sama seperti model kapitalisme merkantilisme gaya Eropa kuno yang terkenal dengan monopoli yang dilisensikan secara royal oleh British East India Company, lisensi raj merusak nilai-nilai inisiatif pasar bebas dan kebebasan berwirausaha.

Pertumbuhan wirausaha di India telah lama terhambat oleh birokrasi negara yang sedang berkembang. Memperoleh izin tersebut sering kali merupakan proses yang sulit dan panjang. Akibatnya, inisiatif kewirausahaan sering kali terhenti ketika mereka berusaha melewati labirin birokrasi yang rumit di India. Di bawah sistem yang “aneh dan merusak” ini, seperti dijelaskan oleh Gurcharan Das, seorang kritikus terkenal, proses yang dirancang dijalankan oleh “insinyur kelas tiga yang dibayar rendah” yang bekerja dengan informasi terbatas dan kriteria yang tidak tepat. Segera setelah sistem perizinan ini diberlakukan, “perusahaan-perusahaan besar membentuk birokrasi paralel” untuk “mengorganisir suap” dan dengan demikian “memenangkan izin”; “peluang korupsi” sangatlah “mengejutkan” (Das, 2001: 93–94).

Model perencanaan negara semakin mendalam ketika Perdana Menteri Indira Gandhi (putri Nehru) mengambil alih kekuasaan pada pertengahan tahun 1960an, dan mengadopsi program nasionalis ekonomi yang kuat dari dirinya. Dalam perebutan kekuasaan besar-besaran, ia menasionalisasi lebih dari selusin bank terbesar di negaranya dan menguasai beberapa lembaga keuangan utama, perusahaan asuransi, dan produsen energi. Dalam serangan terang-terangan terhadap inisiatif pasar bebas, Indira Gandhi memberlakukan peraturan baru terhadap perusahaan swasta, sehingga membuat mereka tidak mampu bersaing dengan perusahaan sektor publik. Pemborosan dalam jumlah besar dan inefisiensi diakibatkan oleh kegagalan menyediakan layanan dan infrastruktur dasar yang penting.

Meskipun model perencanaan ekonomi Nehruvian berfokus pada industrialisasi sebagai mesin utama pertumbuhan, sektor pertanian sebagian besar terabaikan. Hal ini merupakan kesalahan perhitungan yang sangat besar, karena lebih dari tiga perempat penduduk negara ini tinggal dan memperoleh penghidupan dasar dengan tinggal di daerah pedesaan. Karena tidak dapat memperhitungkan beragamnya kebutuhan jutaan orang yang tinggal di anak benua India yang luas (yang terdiri dari dua puluh delapan negara bagian dan lebih dari empat ribu kota besar, kecil, dan desa), model perencanaan pusat India secara konsisten gagal memenuhi kebutuhan masyarakat yang tersebar luas. kemakmuran yang awalnya diimpikan Nehru.

11.3 BENTURAN DAN ADAPTASI MODEL MENTAL PASAR DAN SOCIALIS

Setelah tiga generasi berturut-turut berkuasa, Dinasti Nehru mengukuhkan kekuasaan politiknya melalui perluasan negara birokrasi India. Namun, pada tahun 1980an, para pemimpin baru India berada di bawah tekanan dalam negeri yang kuat untuk mengatasi permasalahan sistemik yang mendasari pertumbuhan ekonomi negara tersebut yang mengecewakan. Kaum neoliberal menyatakan bahwa perluasan birokrasi India yang korup secara politik adalah penyebab buruknya kinerja perekonomian negara tersebut.

Menggantikan ibunya segera setelah pembunuhannya pada tahun 1984, Perdana Menteri Rajiv Gandhi memprakarsai serangkaian reformasi ekonomi baru yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan korupsi yang dilontarkan oleh semakin banyak kritikus domestik dan internasional. Selama periode ini, perekonomian parokial India akan mulai terbuka secara bertahap melalui serangkaian inisiatif yang disebut Arvind Panagariya (2005) sebagai “liberalisasi secara sembunyi-sembunyi” (1984–91). Membangun reputasinya sebagai “Mr. Bersih,” Rajiv Gandhi mempromosikan agenda neoliberal sederhana yang diarahkan pada reformasi perizinan dan menghilangkan pembatasan tertentu yang menghambat persaingan pasar domestik dan daya saing ekspor. Melalui pemotongan pajak yang sederhana dan pengurangan tarif barang modal tertentu, Rajiv Gandhi berhasil meningkatkan konvertibilitas rupee, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan perdagangan yang signifikan. Namun pertikaian antar faksi di dalam Partai Kongres yang berkuasa mengenai inisiatif reformasi neoliberal Rajiv Gandhi, disertai dengan skandal korupsi besar yang melibatkan perdana menteri sendiri, membuat upayanya terhenti. Meskipun relatif sederhana dan berumur pendek, keberhasilan simbolis dari reformasi pasar Rajiv Gandhi menandai awal dari berakhirnya model perencanaan terpusat yang dijalankan kakeknya.

11.4 MODEL MENTAL HEGEMONIK YANG BERKEMBANG DI INDIA

Perekonomian dalam negeri India yang terbatas menimbulkan kelemahan struktural yang mendalam dan akan sangat terekspos di era global. Di bawah kendali pemerintah pusat, para administrator yang mengawasi sektor perbankan India yang masih baru telah lama memberikan pinjaman berdasarkan patronase politik dalam negeri dan bukan berdasarkan prinsip-prinsip investasi yang baik dan protokol internasional. Praktik korupsi ini pada akhirnya akan mengakibatkan gelombang besar kredit bermasalah yang pada akhir tahun 1980an membahayakan seluruh sistem keuangan negara. Pada tahun 1991, di bawah kepemimpinan pemerintahan kiri-tengah yang dipimpin oleh Vishwanath Pratap Singh dari Partai Janata Dal (1989–90) dan Chandra Shekhar dari Partai Samajwadi Janata (Rashtriya) (1990–91), utang nasional India (yang telah meningkat selama bertahun-tahun) mendekati hampir 50 persen PDB. Pembayaran pinjaman ini menghabiskan cadangan devisa berharga yang telah berkurang hingga ke tingkat yang sangat rendah. Untuk menghindari gagal bayar (default) yang besar, pemerintah India meminta paket dana talangan (bailout) sebesar Rp. 18 Triliyun kepada IMF. Pada periode yang menyakitkan inilah para pembuat kebijakan India mulai mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang mendasari model ekonomi nasionalis India. Di tengah krisis, Narasimha Rao mengambil alih kekuasaan dari tahun 1991 hingga 1996. Untuk kedua kalinya

dalam sejarah demokrasi modern India, India memiliki perdana menteri yang merupakan anggota Partai Kongres namun bukan keturunan Motilal Nehru. Narasi yang umum menggambarkan Rao sendiri sebagai orang yang cukup heroik: “seorang pria yang pendiam dan tidak tegas,” yang dengan enggan menjadi pemimpin partai setelah pembunuhan tragis Rajiv Gandhi, namun kemudian dengan cepat “menunjukkan keberanian yang sangat bertentangan dengan apa yang diketahui sebelumnya tentang karakternya. Rao yang berpikiran reformis langsung menunjuk ekonom lulusan Oxford, Manmohan Singh, sebagai menteri keuangan, yang memberinya wewenang untuk meluncurkan serangkaian reformasi neoliberal yang secara dramatis akan mengubah lanskap ekonomi negara tersebut. Melihat krisis ini sebagai peluang bersejarah untuk membangun India baru, Singh berpendapat bahwa penting untuk memutuskan komitmen kuno terhadap model nasionalis ekonomi Nehru. Inisiatif berani Singh mengantarkan era berikutnya dalam model neoliberal India yang sedang berkembang dan disebut sebagai “reformasi demi badai,” yang berlangsung dari tahun 1991 hingga awal tahun 2000an. Salah satu reformasi neoliberal yang paling penting adalah inisiatif Singh yang sangat rumit untuk mulai menghapuskan lisensi-raj, yang ia lakukan dengan harapan dapat mendukung pertumbuhan yang didorong oleh kewirausahaan.

Setelah penghapusan sebagian besar persyaratan perizinan negara pada tahun 1991, terdapat harapan umum bahwa korupsi di India akan segera berkurang. Lagipula, laporan Bank Dunia menyatakan bahwa “kebijakan yang menurunkan kontrol terhadap perdagangan luar negeri, menghilangkan hambatan masuk bagi industri swasta, dan memprivatisasi perusahaan negara dengan cara yang menjamin persaingan—semuanya akan memberantas korupsi.” Menariknya, India melakukan semua hal ini. Hal ini tidak hanya menghilangkan hambatan masuk bagi industri swasta tetapi juga memperluas perdagangan. Meskipun terdapat langkah-langkah tersebut, liberalisasi ekonomi terbukti hampir tidak berpengaruh terhadap jumlah atau besarnya skandal korupsi yang telah lama melanda negara ini. Kalangan neoliberal dan kelompok lain yang mengantisipasi penurunan korupsi secara nyata merasa kecewa. Seperti yang dicatat dengan sedih oleh Shashi Tharoor pada pertengahan tahun 1990an, “Hampir sebulan berlalu tanpa munculnya skandal baru” (1997: 260). Sumit Ganguly, ketika mengomentari peristiwa tahun 1996, mengatakan, “Tahun tersebut merupakan salah satu tahun yang penuh gejolak di India, ketika sejumlah politisi terkemuka didakwa atas tuduhan keterlibatan dalam apa yang disebut skandal hawala” dan, di antaranya hal-hal lain, “menyatakan tuduhan korupsi dan penyuaian terhadap mantan Perdana Menteri Narasimha Rao dan sejumlah rekannya” (1997: 126). Pada tahun 2000, pada usia tujuh puluh sembilan tahun, Rao dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas tuduhan menyuap anggota sebuah partai kecil untuk mendukungnya dalam mosi tidak percaya, meskipun kasus tersebut dibatalkan di tingkat banding pada tahun 2002.

Namun, kekecewaan terhadap program neoliberal Rao dan terbatasnya kemampuannya untuk menjangkau massa menyebabkan terpilihnya Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee (1999–2004) dan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang merupakan partai nasionalisnya. Kaum neoliberal memuji reformasi penting yang diadopsi di bawah

kepemimpinan Vajpayee selama periode ini. Dalam artikel yang diterbitkan di *The Economic Times*, miliarder-filantropis India Kumar Mangalam Birla (2018) menegaskan bahwa:

Meskipun menghadapi tantangan akibat sanksi nuklir, dan kehancuran dot-com yang menyebabkan resesi global, masa jabatan Vajpayee mengalami perubahan dramatis yang menyebabkan perekonomian berada pada titik pertumbuhan yang solid. Dengan pengelolaan makroekonomi yang baik, kita melihat siklus baik dari rendahnya inflasi dan suku bunga, ditambah dengan rendahnya defisit fiskal, yang mengarah pada peningkatan investasi dan pertumbuhan yang lebih tinggi. Bahkan pertumbuhan ekspor pun mengagumkan. Arus masuk investasi asing melonjak. Dapat dikatakan bahwa landasan pertumbuhan yang tinggi selama tahun 2003 hingga 2008 terletak pada kebijakan pemerintahan Vajpayee.

Ketika Manmohan Singh akhirnya menjadi perdana menteri pada tahun 2004, dia tidak membuang-buang waktu untuk memperluas agenda pro-pasar yang dia mulai sebagai menteri keuangan. Sebagai perdana menteri, Singh bertekad bahwa reformasi neoliberalnya akan berdampak pada lebih banyak orang di seluruh lanskap sosial India yang sangat beragam. Program neoliberal Singh bertujuan untuk memanfaatkan pasar tenaga kerja yang luas dan murah, meningkatnya jumlah pekerja profesional yang berpendidikan namun menganggur, dan sumber daya alam yang besar untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejarah standar pada periode ini mengasosiasikannya dengan liberalisasi ekonomi yang luas: penghapusan sebagian besar perizinan industri, penghapusan kuota impor, pengurangan tarif, dorongan investasi asing langsung, dan upaya untuk membatasi pertumbuhan negara dan mengurangi pengeluarannya. Dengan sangat menganut etos pasar bebas dan nilai-nilai kosmopolitan yang dianut oleh para globalis pasar Barat, Singh mengadopsi program neoliberal yang mencakup tanggung jawab fiskal dan kebijakan moneter yang sehat.

Menyatakan bahwa hambatan terbesar bagi keberhasilan India dalam perekonomian global adalah buruknya kondisi jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik, Singh mendesak pembentukan berbagai kemitraan publik-swasta untuk merombak infrastruktur negara dan memasok bisnis dan desa-desa dengan harga murah dan listrik yang andal. Untuk memenuhi target energi dan infrastrukturnya yang ambisius, perdana menteri memberikan komitmen kepada India untuk mengembangkan tenaga nuklir. Oleh karena itu, Singh mulai bekerja sama dengan presiden Amerika George W. Bush (2001–9) untuk memperluas hubungan ekonomi dan politik Amerika Serikat guna membantu India mengembangkan teknologi nuklir mutakhir. Jagdish Bhagwati dan Arvind Panagariya mengemukakan bahwa reformasi neoliberal, termasuk akses yang lebih besar ke pasar dunia, telah menaikkan harga sumber daya seperti mineral dan tanah. Hal ini telah “melipatgandakan ruang bagi pejabat pemerintah (dan pengusaha yang berkolusi) untuk menghasilkan uang ilegal dalam jumlah besar melalui alokasi hak untuk mengekstraksi mineral dan memperoleh serta menjual kembali tanah yang sewenang-wenang dan tidak jelas seperti yang dilakukan sebelum reformasi”. Skandal yang mereka sebutkan adalah “penipuan spektrum 2G,” dimana, pada tahun 2008, menteri komunikasi dan teknologi informasi mengeluarkan 122 lisensi telepon seluler dengan harga di

bawah harga pasar sebagai imbalan atas suap. Skandal yang lebih baru adalah “penipuan alokasi batubara” atau “Coalgate,” di mana hak atas ladang batubara yang didenasionalisasi dialokasikan tanpa penawaran kompetitif. Kasus ini “mengungkap sisi buruk politik dan kehidupan ekonomi India: gaya kapitalisme kroni yang tidak tahu malu yang telah memungkinkan para politisi dan teman-teman mereka untuk meraup keuntungan besar dengan menguasai sebagian besar sumber daya alam negara tersebut, seringkali secara gratis”.

Pada dekade pertama abad kedua puluh satu, beberapa hasil positif dari reformasi neoliberal komprehensif yang dilakukan Singh terlihat jelas: pertumbuhan PDB besar-besaran yang mencapai 9 persen, stabilitas nilai tukar, dan peningkatan substansial dalam investasi asing langsung. Pada sisi negatifnya, reformasi neoliberal yang dilakukannya telah memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Terlepas dari ukuran dan cakupannya yang mengesankan, program reformasi neoliberal ambisius Singh yang dimulainya sebagai menteri keuangan dan didukung sebagai perdana menteri pada akhirnya mendapat keraguan dari beberapa pelaku pasar bebas yang lebih bersemangat, sehingga membuat beberapa orang menyatakan bahwa “lisensi raj sudah mati— panjang umur lisensinya raj.”

11.5 BACKLASH POPULIS: MUNCULNYA NEOLIBERALISME OTORITAS

Model neoliberal India sekali lagi mengalami revisi besar-besaran pada penghujung tahun 90an. Krisis Keuangan Besar pada tahun 2008–9 mengakhiri tahun-tahun kemakmuran ekonomi secara tiba-tiba, “menyebabkan nilai tukar melonjak dan nilai tukar runtuh” (Subramanian & Felman, 2022). Ketika perusahaan mulai gagal membayar utangnya, “bank-bank di India dibebani dengan kredit bermasalah yang jumlahnya melebihi sepuluh persen dari aset mereka” (Subramanian & Felman, 2022). Sementara itu, kaum nasionalis memandang reformasi Singh sebagai bentuk menyerah terhadap tekanan kapitalis global di Barat, dan berpendapat bahwa keterbukaan ekonomi yang lebih besar akan melemahkan otonomi India. Lebih jauh lagi, seperti yang kita lihat, pertumbuhan yang diilhami neoliberal, meskipun mengesankan, tampaknya tidak mampu menghentikan korupsi di negara seperti yang diperkirakan.

Pada tahun-tahun setelah krisis ini, inisiatif India yang ramah terhadap pasar telah terganggu oleh meningkatnya sentimen antiglobalisasi. Munculnya gerakan-gerakan nasionalis dan populis mulai bermunculan, menuntut akuntabilitas yang lebih besar, diakhirinya korupsi politik, dan pemerataan sumber daya negara. Dalam lingkungan politik inilah perdana menteri India saat ini, Narendra Modi, naik ke tampuk kekuasaan nasional pada tahun 2014. Setelah mendapatkan reputasi dalam memerintah secara efektif melalui anggota birokrasinya yang jujur dan kompeten, mantan menteri utama negara bagian Gujrat memprakarsai perubahan yang kuat. kampanye yang diilhami populis untuk mengakhiri birokrat korup yang melayani kelompok elit berpengaruh yang terhubung secara global.

Namun, citra Modi sebagai pemimpin populis terkemuka tampaknya berbenturan dengan pandangan jutaan orang India yang menganggapnya sebagai tokoh neoliberal yang klasik. Pada tahun 2018, editor jurnal Asia Selatan yang banyak dibaca mengklaim bahwa

partai nasionalis BJP yang dipimpinnya telah menjadi “partai politik neoliberalisme yang unggul” dan bahwa Modi telah muncul sebagai “kandidat pilihan bagi para pemodal korporasi” (Wilson, Loh, & Murni 2018). Setelah pemilu tahun 2014, para jurnalis dan akademisi menyebut kemenangan besar Modi dalam pemilu sebagai “momen Thatcher di India” (Shaw, 2014).

Perbandingan ini bukannya tanpa alasan. Mirip dengan inisiatif “Big Bang” Thatcher untuk memodernisasi sistem perdagangan berbasis komputer di Inggris pada tahun 1980an, Modi berinvestasi besar-besaran pada infrastruktur fisik dan digital India untuk menarik bisnis global baru. Untuk meningkatkan daya saingnya di sektor teknologi tinggi global, pada tahun 2019 Modi menurunkan tarif pajak perusahaan secara keseluruhan dari 35 persen menjadi 25 persen. Bertekad menjadikan India sebagai pesaing utama di sektor manufaktur internasional, Modi menurunkan tarif pajak untuk perusahaan manufaktur baru menjadi 15 persen. Selain itu, pemerintahan Modi telah menyelesaikan perselisihan pajak dengan perusahaan multinasional senilai hampir tujuh miliar dolar dan berkomitmen untuk memodernisasi peraturan perpajakan bisnis India. Sesuai dengan bentuk neoliberal, pada tahun 2021 Modi memprivatisasi maskapai penerbangan nasional India—Air India.

Mengingat inisiatif-inisiatif ini, tidak sulit untuk melihat mengapa banyak orang mengaitkan Modi dengan neoliberalisme. Namun, jika diamati lebih dekat, rekam jejak kebijakan Modi yang sebenarnya hampir tidak mirip dengan neoliberal pasar bebas. Meskipun pemerintah pusat terus mengalihkan sebagian fasilitas publik ke tangan swasta, platform neoliberal Modi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan inisiatif privatisasi komprehensif yang dilakukan secara berturut-turut oleh Manmohan Singh dan Atal Bihari Vajpayee. Rohit Chandra dan Michael Walton dengan gamblang menjelaskan bahwa meskipun kemenangan Modi pada pemilu tahun 2014 secara formal didasarkan pada “platform 'pemerintahan minimum, pemerintahan maksimum', namun selalu terdapat ambiguitas yang mendalam antara rezim yang pro-bisnis, pro-pemerintah, dan proyek yang pada dasarnya bersifat nasionalis yang menundukkan pertimbangan komersial” pada arahan negara.

Ekspresi neoliberalisme yang lebih “otoriter” yang dianut oleh pemerintahan Modi tampaknya mencerminkan perpaduan antara model pasar dan model statistik. Meskipun sering kali lebih bersandar pada sistem idealisme, kedua sistem ideal ini terbukti dalam model kebijakan ekonomi Modi sendiri. Daya tarik luas dari platform populis Modi telah dikembangkan melalui penggunaan media sosial yang strategis oleh partainya untuk menjangkau “rakyat biasa” yang mungkin merasa diabaikan di bawah rezim neoliberal sebelumnya. Memang benar, setelah Modi mengambil alih kekuasaan, para pemimpin di partainya menyombongkan diri bahwa perdana menteri baru mereka telah menjadi “pemimpin yang paling banyak diikuti di media sosial” (Sinha, 2017: 4158). Keberhasilan Modi dalam menggunakan platform sosial milik swasta untuk menyampaikan pesan populisnya kepada ratusan juta pengikutnya menjadikannya salah satu tokoh neoliberal paling berpengaruh di era digital.

Proyek nasionalis Modi memiliki ciri khas karena diresapi dengan fundamentalisme Hindu yang kuat. Raja M. Ali Saleem (2021) mengemukakan bahwa dalam manifesto BJP tahun 2009 populisme Hindu tampaknya mendapatkan daya tarik yang berarti di dalam partai. Modi berusaha mengungkap agenda politiknya yang berpusat pada Hindu setelah kerusuhan tahun 2002 di negara bagian Gujrat ketika ia menjabat sebagai menteri utamanya. Mencerminkan reaksi balik terhadap budaya kosmopolitan global dan cita-cita demokrasi borjuis yang dipromosikan di bawah rezim sebelumnya, agenda nasionalis-populis Hindu Modi melibatkan pembalikan inisiatif pasar utama yang telah diperkenalkan oleh para pendahulunya selama tiga dekade sebelumnya. Kita dapat melihat jejak kuat masa lalu sosialis India dalam retorika politik populis dan agenda kebijakan nasionalis Modi. Kebijakan ekonomi nasionalis Modi, yang mencakup penghapusan hampir enam puluh perjanjian investasi bilateral (BIT) dan menaikkan tarif impor populer ke tingkat tertinggi dalam tiga puluh tahun (hampir 3.200 sejak tahun 2014), mengingatkan kita pada era Nehruvian.

Mungkin demonstrasi kekuasaan negara yang paling berani terhadap perekonomian India terjadi dalam bentuk keputusan Modi untuk melakukan demonetisasi mata uang nasional. Dalam apa yang pada akhirnya dianggap sebagai upaya yang gagal untuk memerangi peredaran “uang gelap” yang merajalela, Modi melancarkan kampanye demonetisasi komprehensif yang mengakibatkan kekurangan uang tunai dan pencabutan investasi secara besar-besaran. Hal ini merupakan tindakan yang sangat tidak disarankan dan sangat berisiko mengingat fakta bahwa lebih dari 90 persen transaksi ekonomi di India dilakukan secara tunai. Dengan satu goresan pena, Modi menyatakan 80 persen dari seluruh uang kertas yang beredar adalah “ilegal” dalam semalam. Modi membuat program pertukaran yang dirancang dengan buruk sehingga menyebabkan ratusan juta orang tidak memiliki akses terhadap uang tunai yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan membeli barang-barang penting. Sebagian besar penderitaan dirasakan oleh usaha kecil dan pekerja miskin, dan bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan, para petani lah yang paling terkena dampaknya. Kritikus neoliberal terhadap kebijakan ini berpendapat bahwa dampak buruk terhadap produk domestik bruto negara tersebut akan terasa selama bertahun-tahun yang akan datang.

Para ekonom neoliberal berpendapat bahwa demonetisasi adalah alat kebijakan yang hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir untuk memerangi krisis moneter yang parah atau untuk memberantas korupsi yang melumpuhkan. Namun India tidak menghadapi salah satu permasalahan tersebut pada saat itu (Sambaraju, 2018). Faktanya, menurut Transparency International, sebuah gerakan global yang memantau dan melaporkan korupsi pemerintah, India sedang mengalami periode stabilitas ekonomi yang relatif dan catatan korupsi secara keseluruhan tampak membaik. Melalui penerapan strategi moneter otoriter ini, Modi berharap dapat memperkuat citranya sebagai “orang kuat” yang tidak hanya memiliki kemampuan politik, namun juga temperamen pribadi, untuk memberantas korupsi secara langsung (Chakravorti, 2017). Tindakan semacam ini dianggap oleh para pelaku pasar bebas sebagai serangan langsung terhadap kebijakan ramah investasi asing yang diterapkan oleh para pendahulu neoliberal Modi.

Penggunaan tindakan otoriter oleh Perdana Menteri Modi untuk mengendalikan masyarakat juga terlihat dari pendekatannya yang terkadang “ekstrim” dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19. Pendekatan kebijakan komando dan kontrol yang bersifat nasionalis terhadap pandemi ini dipandang sebagai kegagalan besar baik oleh kelompok neoliberal maupun non-neoliberal. Mandat lockdown nasional yang diterapkan Modi tidak hanya gagal meredakan krisis COVID dalam jangka panjang, namun juga menghancurkan bagian-bagian penting perekonomian dengan mengganggu rantai pasokan dan mencegah ratusan juta orang bepergian untuk bekerja atau membeli makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Ketika virus ini menyebar secara tidak terkendali dan menginfeksi lebih dari dua pertiga populasi negara tersebut, pertumbuhan ekonomi anjlok ke tingkat terendah yang pernah dialami oleh negara berkembang besar mana pun.

Penggunaan mandat nasional yang represif oleh Modi bertentangan dengan strategi neoliberal yang bertujuan memberdayakan pemerintah daerah. Kaum neoliberal umumnya bersimpati pada pandangan yang dianut oleh para ekonom pilihan publik bahwa masyarakat “memilih dengan kakinya sendiri” dan bahwa pejabat pembuat kebijakan yang bekerja di tingkat lokal memiliki posisi yang lebih baik untuk menyesuaikan kebijakan publik agar sesuai dengan keadaan, norma, nilai, dan harapan masyarakat yang unik. komunitas yang mereka layani. Selain itu, kaum neoliberal menegaskan bahwa kepatuhan Modi terhadap ideologi Hindutva telah menghalanginya untuk mengikuti proses sekuler yang diamanatkan secara konstitusional, yang menurut kaum neoliberal akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Kalangan neo-liberal berargumen bahwa pendekatan parokial berbasis agama yang dilakukan Modi malah memperluas perpecahan sosial dan memecah-belah bangsa, alih-alih menyatukan negara-negara tersebut dalam upaya bersatu untuk memerangi pandemi ini.

Ketika perekonomian India terus berjuang di era pandemi, modal sosial semakin berkurang. Penanganan krisis yang bergaya otoriter oleh Modi berdampak buruk pada kebebasan ekonomi dan demokrasi, serta mengancam kepercayaan dan kredibilitas institusi. Dalam artikel terbaru yang muncul di *Foreign Affairs* berjudul “Kebangkitan India yang Terhenti: Bagaimana Negara Menghambat Pertumbuhan,” Arvind Subramanian dan Josh Felman menjelaskan bahwa “pada bulan Juni 2021, indeks kepercayaan konsumen bank sentral turun ke rekor terendah, dengan tujuh puluh- lima persen dari mereka yang disurvei mengatakan mereka yakin bahwa kondisi ekonomi telah memburuk, yang merupakan penilaian terburuk sepanjang sejarah survei ini” (2020). Selain itu, mereka mengklaim bahwa “banyak masyarakat India yang sangat ambivalen terhadap sektor swasta—dan kapitalisme pada umumnya.” Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa “sektor swasta di India masih menanggung stigma sebagai bidan di bawah izin raja, sebuah era di mana korupsi merajalela”. Semakin banyak kaum neoliberal yang condong ke pasar bebas menyatakan bahwa kebijakan industri Modi, yang memberikan perlakuan istimewa dari pemerintah dan dukungan keuangan kepada kelompok industri dan perusahaan tertentu, hanya akan memperkuat stigma ini.

11.6 NEOLIBERALISME YANG DIPERBARUI

Dengan semakin populernya etos otoriter Modi, banyak yang mulai mempertanyakan apakah model pasar liberal akan bertahan dalam jangka panjang. Namun, kami yakin bahwa rumor mengenai runtuhnya neoliberalisme terlalu dilebih-lebihkan. Model neoliberal India akan terus berkembang, mengambil bentuk-bentuk baru untuk beradaptasi dengan lingkungan global yang terus berubah. Bentuk apa yang akan diambil selanjutnya masih belum jelas. Meskipun ada upaya Modi untuk menerapkan kontrol pemerintah yang lebih besar terhadap perekonomian swasta, komunitas bisnis India, yang telah menjadi lebih berani di bawah rezim politik neoliberal selama hampir tiga dekade, terus berkembang. Perusahaan-perusahaan terbesar di India, seperti Tata Group dan bank-bank terbesar, tidak hanya selamat dari skema demonetisasi Modi namun juga terus menghasilkan keuntungan besar. Faktanya, lebih dari dua puluh bank India masih masuk dalam daftar Forbes Global 2000 tahun 2019.

Berkembangnya kelas wirausaha swasta di negara ini secara dramatis membentuk kembali “India baru.” Pada tahun kedua pandemi ini, modal investasi miliaran dolar telah mengalir ke pasar saham India yang sedang melonjak. Subramanian dan Felman mengemukakan bahwa pemodal ventura telah mengucurkan modal investasi baru ke sektor start-up yang energik di India. Hingga saat ini, hampir tujuh puluh startup unicorn telah bermunculan di berbagai bidang mulai dari komputasi awan dan pendidikan hingga hiburan dan keuangan. Terdiri dari banyak generasi milenial muda dan berpikiran inovatif, kelas wirausaha baru ini tampaknya menganut etos pasar bebas. Mengingat fakta bahwa sebagian besar keberhasilan mereka didorong oleh inisiatif individu dan bakat pribadi dibandingkan dukungan pemerintah dan favoritisme, hal ini tidak mengherankan.

Perasaan “hiper-individualisme” di India mungkin merupakan salah satu (di antara banyak alasan) mengapa model perencanaan Nehru yang berfokus pada kolektif gagal total. Situasinya terbuka lebar bagi para wirausahawan generasi baru ini untuk menulis babak berikutnya dalam narasi neoliberal India. Namun bentuk neoliberalisme apa yang akan muncul? Hal ini masih jauh dari jelas. Namun, ada beberapa tren yang perlu ditelusuri yang mungkin bisa memberikan beberapa petunjuk. Kami melihat beberapa tanda yang menunjukkan kebangkitan ekspresi neoliberalisme yang lebih berorientasi pasar yang dipengaruhi oleh nilai-nilai milenial yang menekankan keadilan sosial, pemberdayaan karyawan, tanggung jawab perusahaan, dan kelestarian lingkungan. Jika nilai-nilai ini terus mendapat perhatian dalam sistem ekonomi dan politik India, kita bisa melihat munculnya model ekonomi baru yang mungkin melibatkan “konsep ulang neoliberalisme.” Alih-alih dipaksakan oleh negara kepada masyarakat dari atas ke bawah, ekspresi berikut ini mungkin terjadi secara organik ketika individu menemukan cara-cara inovatif untuk menciptakan industri baru dari bawah ke atas. Karena sangat curiga terhadap pemerintah, kaum milenial biasanya berkhotbah tentang pentingnya kebebasan dan ekspresi individu. Pengusaha muda India nampaknya memiliki nilai-nilai kosmopolitan yang sama.

Menurut Subramanian dan Felman, jika India dapat melewati pandemi ini, maka India mungkin mempunyai “peluang untuk menghidupkan kembali” perekonomiannya (2022: 149). Namun kebangkitan India akan bergantung pada peningkatan produktivitas sektor swasta,

terutama di sektor manufaktur dan perangkat lunak. Subramanian dan Felman lebih lanjut mengemukakan bahwa “PDB India telah kembali ke tingkat sebelum pandemi dan Dana Moneter Internasional memperkirakan India akan tumbuh sebesar 8,5 persen pada tahun 2022, sekitar tiga poin persentase lebih tinggi dibandingkan Tiongkok” (2022: 149). Perekonomian India lebih “cocok secara institusional” dibandingkan Tiongkok dalam mendukung pertumbuhan besar-besaran sektor swasta. Tiongkok, menurut mereka, “adalah negara yang semakin otoriter dan mulai melemahkan kewirausahaan dan inovasi sektor swasta melalui intervensi negara yang terkadang bersifat menghukum” (2022: 149). Meskipun kepemimpinan India saat ini memiliki beberapa karakteristik otoriter, kerangka konstitusional liberal dan budaya sosialnya secara umum lebih bersimpati pada pengembangan kewirausahaan swasta.

Perasaan “hiper-individualisme” di India mungkin merupakan salah satu (di antara banyak alasan) mengapa model perencanaan Nehru yang fokus pada kolektivis gagal total. Situasinya terbuka lebar bagi para wirausahawan generasi baru ini untuk menulis babak berikutnya dalam narasi neoliberal India. Namun bentuk neoliberalisme apa yang akan muncul? Hal ini masih jauh dari jelas. Namun, ada beberapa tren yang perlu ditelusuri yang mungkin bisa memberikan beberapa petunjuk. Kami melihat beberapa tanda yang menunjukkan kebangkitan ekspresi neoliberalisme yang lebih berorientasi pada pasar yang dipengaruhi oleh nilai-nilai milenial yang menekankan keadilan sosial, pemberdayaan karyawan, tanggung jawab perusahaan, dan kelestarian lingkungan. Jika nilai-nilai ini terus mendapat perhatian dalam sistem ekonomi dan politik India, kita bisa melihat munculnya model ekonomi baru yang mungkin melibatkan “konsep ulang neoliberalisme.” Alih-alih dipaksakan oleh negara kepada masyarakat dari atas ke bawah, ekspresi berikut ini mungkin terjadi secara organik ketika individu menemukan cara-cara inovatif untuk menciptakan industri baru dari bawah ke atas. Karena sangat curiga terhadap pemerintah, kaum milenial biasanya berkhotbah tentang pentingnya kebebasan dan ekspresi individu. Pengusaha muda India tampaknya memiliki nilai-nilai kosmopolitan yang sama.

Menurut Subramanian dan Felman, jika India dapat melewati pandemi ini, maka India mungkin mempunyai “peluang untuk menghidupkan kembali” perekonomiannya (2022: 149). Namun kebangkitan India akan bergantung pada peningkatan produktivitas sektor swasta, terutama sektor manufaktur dan perangkat lunak. Subramanian dan Felman lebih lanjut mengemukakan bahwa “PDB India telah kembali ke tingkat sebelum pandemi dan Dana Moneter Internasional mengira India akan tumbuh sebesar 8,5 persen pada tahun 2022, sekitar tiga poin persentase lebih tinggi dibandingkan Tiongkok” (2022: 149). Perekonomian India lebih “cocok secara institusional” dibandingkan Tiongkok dalam mendukung pertumbuhan besar-besaran sektor swasta. Tiongkok, menurut mereka, “adalah negara yang semakin otoriter dan mulai memasukkan kewirausahaan dan inovasi sektor swasta melalui intervensi negara yang terkadang bersifat menghukum” (2022: 149). Meskipun kepemimpinan India saat ini memiliki beberapa karakteristik otoriter, kerangka konstitusional liberal dan budaya sosialnya secara umum lebih bersimpati pada pengembangan kewirausahaan swasta.

11.7 PANDANGAN NEOLIBERALISME

Tentu saja, tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan masa depan. Saya telah memberikan beberapa wawasan di bagian akhir bab ini mengenai bentuk apa yang mungkin diambil oleh neoliberalisme dalam evolusi selanjutnya. Memang benar bahwa pernyataan saya sangat optimistis, mungkin terlalu berlebihan. Meski begitu, ada banyak perkembangan yang bisa dijadikan acuan ketika menawarkan pandangan alternatif yang kurang menyenangkan bagi masa depan India. Ketika India mulai menempuh jalur neoliberal saat ini, jutaan orang terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun rekam jejak korupsi politik negara ini membaik, namun masih belum dapat diterima, dan sistem birokrasinya sangat memerlukan reformasi mendasar. Terlebih lagi, negara ini masih terpecah belah berdasarkan agama dan kasta, dan perselisihan sipil merupakan kenyataan sehari-hari.

Seperti yang telah kita lihat dalam bab ini, taktik kepemimpinan komando dan kontrol yang dilakukan Modi tampaknya telah menempatkan demokrasi India dalam bahaya. Beberapa pengkritik Modi berargumentasi bahwa kecenderungan otoriternya sebanding dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin. Para kritikus mengutip penolakan Modi untuk mengecam keras invasi Putin ke Ukraina pada tahun 2022, sejalan dengan para pemimpin negara demokratis lainnya. Hubungan hangat Modi dengan Putin selama masa penuh gejolak ini tidak ada kaitannya dengan ideologi politik atau kedekatan pribadi yang mungkin dimiliki oleh kedua pemimpin tersebut, melainkan lebih berkaitan dengan realisme politik. Ketika Putin semakin dikucilkan oleh Barat, ia berupaya memperkuat hubungan strategisnya dengan pemerintah India. Selain itu, perluasan pengaruh militer dan ekonomi Tiongkok di Samudera Hindia menimbulkan ancaman bersama terhadap keamanan India dan Rusia. Penolakan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk mengambil sikap tegas terhadap sikap agresif Beijing di Asia dan sekitarnya, ditambah dengan dukungan bersejarah Amerika (dan Tiongkok saat ini) terhadap Pakistan, telah mengakibatkan hubungan yang lebih erat antara Moskow dan New Delhi.

Terlepas dari perkembangan ini, terdapat alasan untuk berharap bahwa demokrasi India dapat bertahan. Bagaimanapun juga, rezim konstitusional India secara konseptual ditanamkan dalam prinsip-prinsip pluralis demokratis. Memang benar, sejarah memberikan contoh ketahanan demokrasi di India. Pada tahun 1970-an, keadaan darurat yang diterapkan Indira Gandhi menempatkan “demokrasi India dalam krisis” (Roy, 1976), dan skema nasionalisasi yang diterapkannya melumpuhkan industri swasta. Namun, dalam dekade-dekade berikutnya, demokrasi India tidak hanya bertahan, namun para pemimpin terpilih secara bertahap mengadopsi cara berpikir baru yang memungkinkan sektor swasta mulai berkembang.

Tentu saja, eksperimen yang dilakukan India terhadap kapitalisme pasar sangatlah sulit dan sulit. Memang sering kali tidak koheren dan terputus-putus. Meskipun demikian, kita harus ingat bahwa ekonomi pasar India masih relatif muda dan belum berkembang. Seiring dengan terus berkembangnya model pasar, diharapkan para pemimpin India akan menciptakan lingkungan politik yang akan mengeluarkan potensi ekonomi negara yang sangat besar dengan memberdayakan individu di seluruh spektrum sosial untuk memanfaatkan bakat

dan keterampilan terpendam mereka untuk menciptakan kekayaan pribadi yang baru. Namun hal ini tidak akan mudah dan tidak akan terwujud dalam sekejap. Model yang diterapkan India saat ini yang diusung oleh Modi tampaknya tidak menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi yang parah di India. Jika perekonomian India ingin berkembang dan kehidupan masyarakatnya ingin meningkat secara dramatis, para pemimpinnya harus mengadopsi cara berpikir yang sangat berbeda. Transformasi ini harus berasal dari luar sistem politik dan sosial yang “tradisional” dan seringkali kaku serta lambat beradaptasi. Hal ini karena, seperti yang terkenal oleh W. Edwards Deming, “suatu sistem tidak dapat memahami dirinya sendiri”; oleh karena itu ia tidak dapat mengubah dirinya sendiri—ia “membutuhkan pandangan dari luar” (1994: 92). Dalam kasus India, perubahan ke arah yang lebih baik memerlukan revolusi generasi—dan hal ini mungkin adalah apa yang kita saksikan dalam beberapa perkembangan yang saya gambarkan sebagai “konsep ulang neoliberalisme.” Mengingat sejarah politik dan ekonomi India yang rumit, segala sesuatu mungkin terjadi, namun tidak ada yang pasti. Namun yang jelas adalah bahwa eksperimen India terhadap neoliberalisme yang terus berkembang akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk.

BAB 12

LEDAKAN GLOBALISME DAN MUNCULNYA NOMOS KETIGA BUMI

Kita di planet ini sedang mengalami perubahan zaman, bukan lagi era perubahan. Pada era perubahan (1500–2000) atau era Westernisasi dunia, perubahan bersifat linear dan berada dalam bingkai matriks kekuasaan kolonial. Konsep kebaruan, evolusi, perkembangan, transisi, dan postmodernitas adalah konsep yang menyoroti perubahan dalam waktu linier dan universal. Perubahan zaman tidak dapat dipahami sebagai transisi dalam waktu linear modernitas Barat, namun sebagai sebuah ledakan dan penyusunan kembali zaman budaya planet. Ledakan tersebut menandai munculnya nomos ketiga di Bumi dan pertikaian untuk menguasai matriks kekuasaan kolonial oleh negara-negara yang tidak didasarkan pada teori politik Barat dan di luar cakupan hubungan internasional setelah Perjanjian Westphalia (1648). Operasi khusus Rusia pada tahun 2022 di Ukraina, menanggapi provokasi NATO, dengan kolaborasi pemerintah Ukraina, untuk “menahan” Rusia, merupakan penanda perubahan zaman dan munculnya tatanan dunia multipolar yang setara dengan munculnya negara-negara Eropa. nomos ketiga di Bumi. Nomos kedua, narasi Carl Schmitt, sama saja dengan Westernisasi dunia dan matriks kekuasaan kolonial.

Sharjah bersejarah dan masa kini, sosial, alam, dan politik. Ini adalah tempat yang mendorong pemikiran dan negosiasi dengan orang lain. Respon alami saya terhadap dinamisannya adalah dengan menghasilkan Biennial yang mengajukan pertanyaan melalui seni, dan menciptakan dialog yang membebaskan kita dari Eurosentrisme, Globalisme, dan isme relevan lainnya.

Gagasan tentang totalitas secara umum saat ini dipertanyakan dan ditolak di Eropa, tidak hanya oleh kaum empiris abadi, namun juga oleh seluruh komunitas intelektual yang menamakan dirinya postmodernis. Faktanya, di Eropa, gagasan totalitas merupakan produk kolonial/modernitas [. . .]. Terlebih lagi, gagasan-gagasan seperti itu telah dikaitkan dengan praktik-praktik politik yang tidak diinginkan, yang melatarbelakangi impian rasionalisasi total masyarakat. Namun kita tidak perlu menolak seluruh gagasan totalitas untuk melepaskan diri dari gagasan dan gambaran yang dikembangkan dalam kolonial/modernitas Eropa. Apa yang harus dilakukan adalah sesuatu yang sangat berbeda: membebaskan produksi pengetahuan, refleksi, dan komunikasi dari perangkap rasionalitas/modernitas Eropa.

12.1 2022: GLOBALISASI SAAT INI DAN MASA LALU

Meskipun topik utama buku ini adalah globalisasi dalam tiga puluh tahun terakhir dan pandangan ke depan, saya akan membahasnya sejak tahun 1500. Saya akan menggunakan ungkapan tatanan global sebagai sinonimnya. Tatanan global dan globalisasi merupakan ekspresi nominatif yang mengacu pada sesuatu yang tampaknya terjadi di suatu tempat dan lembaga manusia (aktor, institusi, bahasa) yang melakukan intervensi terhadap sesuatu yang telah terjadi. Ungkapan globalisasi dan tatanan global menghalangi kita untuk mempertanyakan siapa yang membuat dan mengaturnya, siapa yang menafsirkan dan

menjelaskannya, siapa yang mengubah atau melestarikannya, mengapa dan untuk apa. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan untuk memahami globalisme, rancangan global di balik tatanan dunia. Oleh karena itu, setiap kali saya mengatakan “globalisasi”, yang saya maksud adalah tatanan global antar negara, yang menembus permukaan dan melihat ke dalam dalang yang tersembunyi di balik drama yang bergerak. anak anjing- hewan peliharaan. Pernyataan editor yang memotivasi penerbitan buku ini menyebutkan beberapa elemen dari kekacauan global dan penyakit saat ini. Saya berasumsi bahwa beberapa esai akan membahasnya secara rinci. Saya akan fokus pada gambaran besar di mana masa kini merupakan bab di mana para kontributor buku ini hidup dan bertahan. Saya menutup dengan spekulasi mengenai apa yang dapat diharapkan pada saat ini dan masa depan (dalam bentuk jamak), yang bergantung pada apa yang dilakukan dan tidak dilakukan saat ini.

Narasi saya tentang globalisasi dimulai pada tahun 1500. Namun, perspektif saya telah dibentuk oleh pengalaman saya di Dunia Ketiga ketika saya kuliah di universitas di Argentina antara tahun 1961 dan 1968. Saya mulai memahami “globalisasi” ketika saya menyadari arti dari globalisasi. kereta api dipasang oleh Inggris di Argentina pada akhir abad kesembilan belas. Salah satu jalur kereta api melintasi dan membagi kota tempat saya dilahirkan dan dibesarkan menjadi dua. Pengalaman awal yang membentuk sensorium saya kemudian dirasionalisasikan, bertahun-tahun kemudian, dengan bimbingan sosiolog, pemikir, dan aktivis Peru Anibal Quijano, yang saya temui secara pribadi sekitar tahun 1995, setelah membaca esai singkatnya yang inovatif “Kolonialitas dan Modernity/Rationality,” yang diterbitkan pada tahun 1992 dan diterjemahkan pada tahun 2007 (Quijano, [1992] 2007). Pada tahun 2000 Quijano menerbitkan esai inovatif lainnya yang membahas globalisasi dari perspektif modernitas kolonial yang diperkenalkannya pada tahun 1992. Dalam esai berjudul “Kolonialitas Kekuasaan, Eurosentrisme dan Klasifikasi Sosial,” yang ditulis pada tahun 2000, ia menyatakan:

Apa yang disebut globalisasi adalah puncak dari sebuah proses yang dimulai dengan konstitusi Amerika dan kapitalisme kolonial/modern yang berpusat pada Eropa sebagai kekuatan global baru. Salah satu poros mendasar dari model kekuasaan ini adalah klasifikasi sosial penduduk dunia berdasarkan gagasan ras, sebuah konstruksi mental yang mengungkapkan pengalaman dasar dominasi kolonial dan mencakup dimensi-dimensi yang lebih penting dari kekuasaan global, termasuk dimensi spesifiknya. rasionalitas: Eurosentrisme. Poros rasial mempunyai asal usul dan karakter kolonial, namun terbukti lebih tahan lama dibandingkan kolonialisme yang menjadi matriksnya. (Quijano, [2000] 2008: 186)

Meskipun kolonialitas kekuasaan dan matriks kekuasaan kolonial menjadi dasar argumen saya, saya akan mempertimbangkan keprihatinan Carl Schmitt terhadap situasi di Eropa setelah Perang Dunia II dan pemahamannya tentang nomos Bumi, dan khususnya nomos kedua dari bumi. Saya akan melihatnya secara paralel dengan kolonialitas kekuasaan Quijano dan matriks kekuasaan kolonial. Schmitt menyebut nomos sebagai organisasi teritorial yang mengandaikan suatu lembaga yang mengambil alih, membagi, mengatur, dan mengelola

Bumi. Dalam hal ini, Schmitt menyatakan bahwa selalu ada *nomos* di Bumi sejak nenek moyang manusia mulai mengontrol dan mengelola wilayah serta membangun organisasi kompleks yang saat ini disebut peradaban. Perbedaan dari *nomos* kedua adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah spesies manusia, sebuah peradaban menciptakan kondisi untuk mengendalikan dan mengelola seluruh planet. Schmitt menempatkan sejarah pembentukan dan landasan *nomos* kedua pada abad keenam belas. Peristiwa yang menentukan, dalam terminologinya, adalah penemuan Amerika oleh Eropa. Hal ini memotivasi penemuan hukum internasional Eropa, yang disebut Schmitt sebagai *Jus Publicum Europaeum*, dan pemikiran linier global yang mendorong rancangan untuk mengambil alih, membagi, dan mendistribusikan Bumi. Pembagian Bumi menjadi *Indias Occidentales* dan *Indias Orientales*, masing-masing pada tahun 1594 dan 1529, “dimiliki” oleh monarki Spanyol dan Portugis dengan berkat dari Kepausan, merupakan contoh dasar dari *nomos* kedua.

Titik balik abad keenam belas di Atlantik adalah “revolusi kolonial” dan invasi yang membentuk gagasan modernitas Eropa, yang secara bersamaan memiskinkan masyarakat, bahasa, ingatan, dan institusi. Ini melibatkan Bangsa-Bangsa Pertama di benua itu, orang-orang Eropa yang tidak diundang, dan tak lama kemudian pengangkutan orang-orang Afrika yang ditawan berubah menjadi budak. Itu adalah peristiwa-peristiwa mendasar, baik dalam perbuatan maupun perkataan, dalam globalisasi. Setelah mengalami warisan invasi Eropa di Amerika dan kondisi Dunia Ketiga di Amerika Selatan dan Karibia, Quijano memahami bahwa apa yang bagi Schmitt adalah *apropriasi*, pembagian, dan distribusi, di atas segalanya, adalah peristiwa mendasar dari narasi Eropa tentang modernitas yang melegitimasi dan mengaktifkan kolonialitas. Akibatnya, ketika Quijano menyatakan bahwa globalisasi mempunyai sejarah lima ratus tahun yang ditopang oleh wacana keselamatan, retorika modernitas, dan penerapan logika kolonialitas, ia menawarkan narasi dekolonial mengenai perampasan, perampasan, pembagian, dan distribusi. bumi dan tanahnya, serta narasi dekolonial mengenai eksploitasi tenaga kerja dan transformasi radikal subjektivitas semua pihak yang terlibat: *First Nations*, Eropa, dan Afrika. Oleh karena itu, globalisasi mempunyai momen awal dalam perbuatan dan perkataan dalam penemuan/penemuan benua yang oleh orang Eropa disebut Amerika. Itulah sebabnya Quijano menegaskan bahwa, dengan penemuan Amerika oleh Eropa, kontrol dan pengelolaan modal dan makna Eurosentris (semua narasi, verbal dan visual, yang melegitimasi invasi) sama saja dengan konstitusi kekuatan global Eurosentris: kolonialitas negara-negara Eropa. kekuatan. Dalam konstitusi tersebut, konstruksi mental gagasan “*ras*,” yang mengaktifkan logika klasifikasi dan pemeringkatan masyarakat dan wilayah, merupakan “dimensi terpenting dari kekuatan global, termasuk rasionalitas spesifiknya: Eurosentrisme” (Quijano, [2000] 2008: 186).

Revolusi kolonial yang menciptakan *nomos* kedua di Bumi dan kolonialitas kekuasaan/matriks kekuasaan kolonial mengawali proses panjang westernisasi dunia, dimana globalisasi merupakan salah satu eufemismenya. *Indias Occidentales* dan *Indias Orientales* adalah dua nominasi Barat yang membagi planet ini menjadi dua bagian. Mereka bermutasi menjadi “Belahan Bumi Barat” dan “Belahan Bumi Timur”, dan kemudian menjadi *Orientalisme*. Akibatnya, globalisasi menjadi babak baru dalam sejarah keinginan dan

instrumen (misalnya hukum internasional) untuk melakukan Westernisasi Bumi. Akibatnya, terbentuknya Peradaban Barat dan kemelaratan kaum barbar, peradaban primitif, dan terbelakang yang hidup berdampingan dan miskin, yang diharapkan dapat meningkatkan diri mereka sendiri—dengan bantuan para penyusup—dalam praksis kehidupan, penginderaan, dan pemikiran mereka.

Rasionalitas spesifik Eurosentris yang digambarkan Quijano sebagai Eurosentrisme mempunyai dua asumsi dasar: logika salah satu/atau (konstitusi/kemiskinan) dan konsep waktu universal yang unilinear. Keduanya merupakan warisan Kekristenan Barat yang bermutasi menjadi versi sekuler pada abad kedelapan belas. Logika salah satu/atau (oposisi biner) menaturalisasikan sensorium dan rasionalitas permainan zero-sum yang mendominasi tatanan global saat ini. Gagasan tentang waktu unilinear juga berasal dari agama Kristen. Konsep ini dimulai dari penciptaan dunia hingga akhir dunia (eschaton)—semua ciptaan Tuhan akan dimusnahkan. GWF Hegel menarasikan versi sekuler dalam pelajarannya tentang filsafat sejarah dan ruang waktu. Dalam versi tersebut, perjalanan Roh dari asal usulnya di Tiongkok kuno hingga masa kini di Eropa mengumumkan masa depan sejarah tanpa akhir yang terlihat. Masa depan, bagi Hegel, adalah Amerika Serikat dan, hingga saat itu, ia benar. Spasialisasi waktu telah dan terus menjadi cara mendasar untuk menolak keserupaan dalam kata-kata, yang memperkuat perbuatan (Fabian, 1983). Akibatnya, konstitusi teritorial Peradaban Barat (yang terletak di ruang umat Kristen Barat) sama saja dengan perjalanan waktu universal yang membentuk peradaban Eropa saat ini dan membuang peradaban yang hidup berdampingan ke masa lalu.

Ringkasan matriks kekuasaan kolonial dari tahun 1500 hingga 1989 akan membantu memperjelas sejarah sebelum periodisasi dalam buku ini: 1989–2008, 2008–22, dan 2022–40. Secara konseptual, matriks kekuasaan kolonial didasarkan pada temporalisasi ruang universal yang didukung oleh logika salah satu/atau. Logika ini mengamankan nomos kedua atas Bumi pada tahun 1500 hingga 1918 dan kendali serta pengelolaannya yang unipolar, pertama oleh Kekristenan Barat, dan kemudian oleh liberalisme sekuler sejak abad kedelapan belas. Ringkasannya seperti ini:

*Dari tahun 1500 hingga 1750, kerangka Eurosentris didominasi oleh teologi Kristen dan Humanisme Renaisans. Universitas dan seminari teologi membentuk dan mendistribusikan pengetahuan yang mengelola subjektivitas masyarakat (Vilches, 2010). Kapitalisme dagang meluas ke seluruh dunia mulai dari Amerika hingga Asia Selatan (Inggris) dan Asia Tenggara (Belanda). Hal ini mengubah sensorium dan intelektualitas yang bertentangan dengan Gereja dan membantu menciptakan kondisi bagi revolusi industri dan tergesernya negara-negara monarki oleh negara-bangsa etno-borjuis. Pencerahan berkembang pesat di persimpangan ini. Adam Smith menerbitkan *The Wealth of Nation* (1776) dan memetakan perekonomian, *The Conflict of the Faculties* (1798) karya Immanuel Kant memetakan kembali struktur pengetahuan Renaisans, dan *Revolusi Perancis* (1789) memberikan landasan bagi negara-bangsa liberal yang akan datang. Pencerahan adalah kelanjutan dari revolusi kolonial, yang tanpanya revolusi tidak akan terjadi. Hukum internasional diperluas*

dari perampasan tanah hingga penguasaan laut (misalnya, Grotius). Pengelolaan matriks kekuasaan kolonial berpindah tangan dan aktor, namun keinginan kolonial untuk berkuasa dan retorika penyelamatannya (bukan kemajuan dan peradaban, bukan keselamatan spiritual) terus membenarkan penerapan logika kolonialitas. Globalisasi menjadi sangat pesat.

Dari tahun 1750 hingga 1945 Inggris dan Perancis mendominasi dunia, menggantikan Spanyol dan Portugal dari posisi dominan mereka sebelumnya dalam pengelolaan uang dan makna. Revolusi Industri mengamankan keunggulan imperial/kolonial Inggris. Kapal uap meningkatkan jumlah orang dan komoditas yang diangkut melintasi benua, dan jalur kereta api membuka jalur di setiap benua untuk dieksplorasi, diambil alih, dibagi-bagi, dan didistribusikan sesuka hati, meskipun tidak selalu tanpa perlawanan dan kebencian—dominasi dan eksploitasi selalu tercipta konflik. Pada periode ini bentuk pemerintahan negara-bangsa yang terkonsolidasi di Eropa dan sekularisasi universitas model Renaisans menjamin terjadinya westernisasi di planet ini. Pada pertengahan abad ke-19, tiga sistem gagasan politik, teologis, dan humanistik (misalnya ideologi) yang berasal dari abad ke-16 bermutasi menjadi versi politik sekuler: (1) posisi konservatif membela hak masyarakat Spanyol untuk mendapatkan upah. perang melawan kaum barbar, (2) posisi progresif membela “orang Indian” yang mendorong perpindahan agama secara damai, dan (3) posisi teologis-hukum mengakui hak “orang Indian” atas tanah mereka tetapi menyatakan mereka tidak mampu mengelolanya. Yang pertama bermutasi menjadi konservatisme sekuler, yang kedua menjadi sosialisme sekuler, dan yang ketiga menjadi liberalisme sekuler. Revolusi Rusia (1917–23) mewujudkan sosialisme; Alt-Right di Amerika Serikat dan Eropa bukanlah fenomena baru: nenek moyang mereka sudah ada sejak abad keenam belas. Ketiga lintasan ini memandu ekspansi global Eropa hingga Perang Dunia II. Dan liberalisme Eropa bermutasi menjadi neoliberalisme AS, yang benihnya ditanam pada akhir tahun 1940an dan 50an.

Dari tahun 1945 hingga 1989 serangkaian peristiwa mengubah dan mengubah struktur matriks kolonial seperti yang terjadi pada periode sebelumnya (1500–1945). Salah satunya adalah Amerika Serikat yang menjadi pemain utama dalam kelangsungan Westernisasi dan menjaga tatanan global. Retorika modernitas bermutasi dari menuntut kemajuan dan membudayakan kaum barbar, menjadi mendorong pembangunan mereka. dan modernisasi. Perubahan retorika modernitas Barat ini mempunyai implikasi yang sangat besar. Sementara yang pertama menjaga keseimbangan antara perekonomian (kemajuan) dan bidang kebudayaan yang lebih luas (membudayakan dan mendidik masyarakat terbelakang), pembangunan dan modernisasi menjadikan perekonomian sebagai fokus penyelamat Barat: *untuk mengembangkan dan memodernisasi masyarakat terbelakang. Itu juga merupakan konsolidasi kolonialitas tanpa koloni pemukim, seperti yang sudah dialami dalam Perang Candu.*

Tiongkok tidak menanggung penjajahan pemukim, seperti India, namun tidak lepas dari penjajahan sama sekali. Konflik Barat dengan Tiongkok saat ini sangat berkaitan dengan hal ini. Orang Barat mungkin sudah lupa, tapi orang China tidak akan pernah lupa. Peran

penting Amerika Serikat pasca Perang Dunia II memperparah konflik dengan Uni Soviet yang kemudian berubah menjadi Perang Dingin.

Peristiwa lainnya adalah dekolonisasi. Hal ini bukan sekadar penyimpangan matriks kekuasaan kolonial, namun juga mempertanyakannya. Dekolonisasi menghadapi kapitalisme liberal dan komunisme negara. Konferensi Bandung tahun 1955 masih menjadi penanda persoalan globalisasi secara global. Dari batang Konferensi Bandung muncul tiga cabang besar yang independen. Salah satunya adalah Gerakan Non-Blok (GNB), yang di Karibia dilengkapi dengan Konferensi Tiga Benua di Havana pada tahun 1966. Ada perbedaan yang signifikan antara Konferensi Bandung dan penerusnya. “Ras” adalah penggerak dasar. “Ini adalah konferensi antar-benua yang pertama bagi orang-orang kulit berwarna,” kata Sukarno dalam pidato pengukuhan⁸. Ras digantikan oleh ideologi dalam GNB, dan “dekolonisasi” dimitigasi dalam pernyataan tujuannya. Kuba juga tidak terkecuali dari kebutaan ras (dan seksual). Penekanannya kemudian berubah menjadi kelas. Konfrontasi GNB bukan melawan penjajahan namun melawan kapitalisme dan komunisme, meskipun Bandung dan GNB mendirikan negara Dunia Ketiga yang bertujuan untuk memutuskan hubungan antara Dunia Pertama dan Dunia Kedua. Salah satu dampak dari Bandung adalah GNB, sedangkan dampak kedua adalah dewesternisasi. Singapura memperoleh kemerdekaan empat tahun setelah Konferensi Bandung dan dipimpin oleh Lee Kwan Yew dari tahun 1959 hingga 1990. Jika dipikir-pikir, Singapura adalah benih dewesternisasi. Yang ditolak Lee Kwan Yew bukanlah kapitalisme, melainkan ideologi liberal dan sikap Barat. Ketika Deng Xiaoping menjadi pemimpin de facto Republik Rakyat Tiongkok dan memelopori “sosialisme dengan karakteristik Tiongkok” dan “pasar sosialis,” ia berbincang dengan Lee Kwan Yew (2012: 1–36). Dari tahun 1959 hingga 1990, Singapura menjadi pusat keuangan terkemuka di Dunia Ketiga, sekaligus menjaga jarak dari Barat dan mendorong penyusunan kembali prinsip-prinsip dan praksis kehidupan Timur (Skaria, 1994). Deng Xiaoping juga mengikuti jalan yang sama, menggunakan kapitalisme untuk menjamin pemulihan praksis hidup dan berpikir nenek moyang Tiongkok. Singkat kata, ketika Bandung menghadapi kapitalisme atas nama dekolonisasi dan GNB mempromosikan nasionalisme Dunia Ketiga, dewesternisasi menganut kapitalisme tetapi menolak ideologi manajerial liberal dan neoliberal. Sejak saat itu, dewesternisasi terus berkembang dan menegaskan dirinya sebagai jalan menuju masa depan (saya akan membahasnya lagi di bagian selanjutnya). Perkembangan ketiga dari Bandung adalah dekolonialitas, seperti yang dilakukan Quijano pada akhir Perang Dingin. Tujuan dekolonialitas adalah untuk melepaskan diri dari prinsip-prinsip epistemologis, struktur dan isi pengetahuan serta pengetahuan yang menyatukan matriks kekuasaan kolonial dengan negara-bangsa, mengelola seluruh bidang pengalaman politik, ekonomi, dan budaya.

12.2 SAAT INI (2008–2022) DAN MASA DEPAN GLOBALISASI (2022–2040)

Invasi Rusia ke Ukraina merupakan titik balik munculnya tatanan global multipolar atau momen sulit dalam mempertahankan unipolaritas. Di luar penderitaan, penderitaan, dan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat yang mengalami invasi dan gangguan (Irak, Suriah), konfrontasi antara globalisme unipolar dan multipolaritas global merupakan

konfrontasi baik untuk pelestarian hak-hak istimewa yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. *nomos* kedua Bumi atau pembukaan menuju *nomos* ketiga Bumi (Turse, 2022). Namun, upaya menuju *nomos* ketiga tidak terbatas pada perampasan, pembagian, dan distribusi tanah maupun pada konfrontasi politik, ekonomi, teknologi, dan militer terhadap rewesternisasi dan dewesternisasi. Kekuatan dekolonisasi pada umumnya juga bersifat global. Sulit membayangkan seperti apa multipolaritas global jika dewesternisasi terus berlanjut, baik oleh para aktor yang menjalankan institusi politik dan ekonomi internasional maupun oleh para sarjana dan jurnalis yang menafsirkan apa yang telah dilakukan. Yang juga sulit dibayangkan adalah bagaimana unipolaritas akan terlihat jika rewesternisasi mengambil satu langkah maju, dan harus menghadapi koeksistensi dewesternisasi dan dekolonialitas secara luas. Namun hal ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih maju: permasalahan global yang ada saat ini tidak dapat diselesaikan dengan mentalitas yang sama dengan yang menciptakan permasalahan tersebut. Dengan demikian, globalisme unipolar akan bubar dan tunduk pada multipolaritas global. Jika pembaca menganggap hal ini tidak mungkin terjadi dan merupakan hal yang idealis, saya akan bertanya: mengapa kita harus berpikir bahwa keluar dari permainan salah satu/atau zero-sum saat ini adalah hal yang mustahil, dan bahwa perang tanpa akhir adalah masa depan selamanya?

Mari kita kembali ke awal abad ke-20, ketika impian global neoliberal mengenai akhir sejarah dan homogenisasi bumi semakin mendapat tantangan. Dalam penjelasan Schmitt, *nomos* kedua dihancurkan oleh Perang Dunia I. Saat ini, jika dipikir-pikir, orang merasa bahwa yang berakhir adalah tatanan dunia unipolar yang didirikan oleh *nomos* kedua. Namun warisannya bertahan dan diubah oleh cita-cita neoliberal pada akhir Perang Dunia II, diaktifkan kembali pada tahun 80an, dan diterapkan secara global pada tahun 90an. Uni Eropa diresmikan pada tahun 1993 dan Organisasi Perdagangan Dunia didirikan pada bulan Januari 1995, empat tahun setelah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) regional diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1994. Pada hari yang sama, Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mengangkat senjata dan menyuarakan pendapatnya, memobilisasi sejumlah besar penduduk Pribumi di Meksiko bagian selatan dan Guatemala. Pada tahun 1997, Subcomandante Marcos menyebarkan opini berjudul “Perang Dunia Keempat Telah Dimulai” (Marcos, 1997). Tanda-tanda munculnya *nomos* ketiga di Bumi mulai terlihat.

Tahun 2001 adalah tanggal yang patut dikenang. Pada bulan September, Menara Kembar World Trade Center runtuh. Kita mungkin tidak pernah tahu siapa yang merencanakan dan melaksanakan operasi tersebut, mengapa dan dengan tujuan apa. Apa yang kita ketahui adalah konsekuensinya: redefinisi terorisme, pembenaran atas perang yang adil selama diperlukan, dan legitimasi negara-negara yang melakukan invasi yang dianggap terlibat atau mendukung teroris. Unipolaritas yang diamankan oleh *nomos* kedua didesain ulang. Namun, pada tahun 2001 Tiongkok bergabung dengan WTO dan, jika dipikir-pikir, benih dewesternisasi yang ditanam beberapa dekade sebelumnya di Singapura dan Tiongkok mulai tumbuh. Pada tahun-tahun berikutnya, kegagalan membangun Irak setelah menginvasi dan menghancurkan negara tersebut pada tahun 2003, ditambah dengan gejolak keuangan pada tahun 2008 yang mengguncang sistem keuangan global, merupakan dua peristiwa yang

mengaburkan rancangan neoliberal untuk merombak negara-negara nomos kedua. menghomogenisasi Bumi di bawah panji-panji unipolaritas politik dan ekonomi serta universalitas epistemik.

Catatan peristiwa yang tidak jelas ini menunjukkan hilangnya kendali manajerial oleh negara-negara Barat (AS, NATO, dan Uni Eropa) atas matriks kekuasaan kolonial. Unipolaritas politik/ekonomi dan universalitas epistemik (Eurosentrisme), dua warisan dari nomos kedua, menjadi lebih sulit untuk dipertahankan. Dekolonisasi selama Perang Dingin dan dewesternisasi membawa dampak yang tidak terduga ke dalam tatanan global. Klaim dekolonial yang dikemukakan pada Konferensi Bandung dan dipertahankan oleh para pemimpin dekolonisasi di Afrika memungkinkan kita untuk berpikir bahwa ada kehidupan di luar liberalisme dan komunisme: kenangan jangka panjang, praksis kehidupan dan pemikiran masyarakat yang berjuang untuk mencapai tujuan tersebut. membebaskan diri mereka dari versi kosmologi Barat mana pun. Deng Xiaoping mengumumkan politik Tiongkok dalam dua formula “kapitalisme dengan karakteristik Tiongkok” dan “sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.” Pengumuman tersebut ditanggapi dengan senyuman ironis oleh para komentator Barat. Mereka tersenyum karena kosmologi Barat melatih sensorium dan kecerdasan subjeknya untuk merasakan, memikirkan oposisi biner Barat sebagai totalitas universal. Oleh karena itu, kapitalisme dan sosialisme tidak dapat saling melengkapi: keduanya tidak dapat direduksi satu sama lain. Namun jika indera dan kecerdasan Anda dilatih untuk merasakan, berpikir, dan melihat dualitas yang saling melengkapi (misalnya, tidak ada siang tanpa malam, tidak ada kiri tanpa kanan, tidak ada Barat tanpa Timur; tidak ada Utara tanpa Selatan) dan yin dan yang adalah dua kelompok tianxia (semuanya di bawah langit), maka kapitalisme dan sosialisme yang berkarakter Tiongkok menjadi masuk akal karena keduanya diappropriasi dan dimasukkan ke dalam kosmologi yang lain. Kapitalisme dan sosialisme bisa dikatakan telah mengalami denaturalisasi, dan permainan zero-sum kehilangan maknanya. Posisi Tiongkok terhadap Ukraina saat ini menolak untuk mengikuti permainan zero-sum Barat (Tsu, 2010). Ini adalah tanda lain munculnya nomos ketiga di Bumi.

Ciri lain yang terungkap melalui dekolonisasi dan dewesternisasi, yang mengacu pada nomos ketiga, adalah ketegangan produktif antara praksis kehidupan yang ada (bahasa, ingatan, penginderaan, pemikiran) dengan serbuan kolonialisme kekuasaan Barat. Dekolonialitas dan dewesternisasi muncul pada saat orang-orang yang mengalami gangguan memutuskan untuk tidak menyerah namun bangkit kembali. Persoalannya bukanlah kembali ke masa lalu, melainkan membawa masa lalu ke masa kini, menyusun kembali praksis kehidupan sementara yang kekurangan janji-janji modernitas. Dewesternisasi sesuai dengan kapitalisme namun menolak kosmologi Barat serta liberalisme politik, neo-liberalisme, dan Kekristenan Barat sambil menggunakan Marxisme sesuka hati. Ini semua adalah gangguan yang dipicu oleh nomos kedua dan pengelolaan matriks kekuasaan kolonial yang unipolar di Barat. Inilah perbedaan utama antara (a) dekolonisasi pada masa Perang Dingin dan (b) dewesternisasi dan dekolonialitas setelah Perang Dingin. Dewesternisasi pada saat itu bukanlah suatu pilihan. Dekolonisasi selama Perang Dingin mempertanyakan kapitalisme dan komunisme, namun gagal menghadapi matriks kekuasaan kolonial yang melahirkan dan

menopang keduanya. Sejak berakhirnya Perang Dingin, dekolonialitas mempertanyakan kolonialitas kekuasaan, sementara dewesternisasi memperlumahkan kendali dan pengelolaannya. Tanda lain munculnya nomos ketiga di Bumi: globalisme unipolar dan rasionalisme universal, yang ditaklukkan pada nomos kedua, telah meledak.

Jalur ketiga yang ingin saya garis bawah, di luar konflik politik, ekonomi, teknologi, dan militer antarnegara yang baru saja diuraikan, adalah dekolonialitas secara luas. Yang saya maksud dengan dekolonialitas secara luas adalah bidang yang digambarkan oleh Immanuel Wallerstein sebagai “gerakan antisistemik” (Wallerstein, 2014). Perbedaan antara gerakan dekolonialitas secara luas dan gerakan antisistemik terletak pada perbedaan antara analisis sistem dunia (Wallerstein) dan matriks kekuasaan kolonial (Quijano). Wallerstein melanjutkan karya sejarawan Perancis terkemuka Fernand Braudel (1973) sementara Quijano memulai dari karya ekonom terkemuka Argentina Raul Prebisch yang, pada tahun 1950-an, memperkenalkan terobosan pembedaan pusat-pinggiran. Dinamika ini tidak terlihat oleh Braudel dan Wallerstein, yang memandang dunia dari Atlantik Utara. Prebisch, dalam penafsiran Quijano, menggarisbawahi “model historis pengendalian tenaga kerja, sumber daya, dan produk yang membentuk bagian sentral dari model kekuasaan global yang baru, dimulai dengan Amerika sebagai pemain dalam perekonomian dunia baru,” tanpanya sistem dunia modern “tidak dapat dipahami dengan baik atau sepenuhnya” (Quijano, [2000] 2008: 180). Ras tidak ada dalam gerakan antisistemik Wallerstein.

Bagi Quijano, berbeda dengan Wallerstein dan Braudel, “ras” dan bukan “kelas” adalah konsep yang melegitimasi landasan historis kapitalisme berdasarkan perampasan tanah secara besar-besaran dan eksploitasi tenaga kerja secara besar-besaran. Oleh karena itu, yang saya maksud dengan dekolonialitas adalah segudang manifestasi masyarakat politik di ruang publik yang tidak hanya menolak namun juga hadir kembali. Artinya, mereka melepaskan diri dari regulasi matriks kekuasaan kolonial. Namun, karena matriks kekuasaan kolonial tidak mempunyai sisi luar, maka delinking bukanlah sebuah jalan keluar, melainkan sebuah komitmen untuk melakukan pembangkangan sipil dan epistemik. Singkatnya, spektrum masyarakat yang luas telah dimobilisasi oleh pertikaian yang terjadi saat ini untuk menguasai matriks kekuasaan kolonial. dalam domain pengetahuan dan standar heteronormativitas kulit putih. Semua ini merupakan tanda-tanda bahwa matriks kekuasaan kolonial semakin tidak terkendali; nomos kedua sedang dihancurkan (menggunakan kosakata Schmitt), dan nomos ketiga di Bumi sedang muncul.

Dekolonialitas dan dewesternisasi sama-sama merupakan pembangkangan epistemik. Teori-teori hubungan internasional Barat, yang dirumuskan berdasarkan gagasan sekuler dan bentuk pemerintahan negara-bangsa, dipertanyakan oleh para ahli de-Western dan dekolonial. Saya akan menutup dengan membahas satu contoh ketidaktaatan epistemik de-Western, dan mengesampingkan dekolonialitas untuk kesempatan lain. Dewesternisasi, seperti keilmuan yang dibaratkan ulang dalam hubungan internasional, terhubung dengan negara, sedangkan dampak keilmuan dekolonial terutama terjadi pada bidang ilmu-ilmu sosial dan ranah publik. Politik negara dan dekolonialitas adalah dua hal yang saling berhubungan.

Filsuf dan ahli teori politik asal Tiongkok, Zhao Tingyang, telah mendukung dewesternisasi hubungan internasional dalam artikel, wawancara, dan bukunya yang terkenal, *All under Heaven: The Tianxia System for a Kemungkinan Tatanan Dunia* (2016). Argumennya tidak mengusulkan untuk menggantikan hal tersebut. universalitas rasional oleh yang lain atau unipolaritas yang satu dengan yang lain. Itu berarti menyerah pada permainan zero-sum. Multipolaritas dalam tatanan dunia memerlukan teori-teori plural seperti halnya unipolaritas dalam tatanan dunia memerlukan teori-teori universal. Alih-alih berasumsi bahwa tatanan internasional akan diatur oleh teori-teori politik yang didasarkan pada negara-bangsa Barat dan kosmologi politik Barat, Zhao malah menggali masa lalu Tiongkok kuno (sama seperti para ahli teori Barat yang menggali masa lalu Yunani dan Romawi), dibantu oleh penelitian arkeologi dan etnohistoris, meminum air dari sumber kosmologi Tiongkok—tianxia, semuanya di bawah langit. Mengapa, tanya Zhao, teori ilmu politik Barat harus menjadi satu-satunya kriteria dalam hubungan antarnegara? Pertanyaannya memiliki konsekuensi yang lebih luas. Yang dipertaruhkan adalah seluruh wilayah pengetahuan Barat modern/kolonial dan landasan kosmologisnya.

Ada peringatan sebelum mengambil langkah selanjutnya dalam argumen Zhao. Pada awal Februari 2022, Presiden Xi Jinping dan Vladimir Putin menandatangani dokumen bertajuk “Pernyataan Bersama Hubungan Internasional” dan sebagai hasilnya, memasuki era baru hubungan internasional yang tidak ditentukan oleh Barat. Jika Anda mencari pernyataan ini, Anda akan menemukan artikel tentang hal ini di media Barat yang memuat judul dengan klausa “melawan Barat.” Secara dekolonial, pernyataan tersebut bukan “melawan Barat” melainkan “pro Timur.” Argumen Zhao tidak mematuhi dan menghilangkan keterkaitan dengan teori-teori Barat dan praksis negara dalam kata-kata dan perbuatan. Hal ini bukan anti, namun pro: terhadap teori-teori hubungan internasional yang plural. Tidak dapat dihindari, teori de-Western Zhao bertindak di luar pemikiran perbatasan dan gnoseologi perbatasan, menghindari jebakan pemikiran teritorial dan epistemologi Barat. Demikian pula, “Pernyataan Bersama” mengandaikan pemikiran tentang perbatasan karena hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, seolah-olah peraturan hubungan internasional di Atlantik Barat dan Utara tidak ada.

Bagi Zhao, tatanan global unipolar saat ini adalah sebuah non-dunia, sebuah kekacauan. Tantangan utama untuk keluar dari dunia yang tidak ada dan terlibat dalam dunia ini adalah melepaskan diri dari keyakinan bahwa dunia yang tidak ada saat ini yang memenuhi kepentingan dan keputusan G7 adalah satu-satunya pilihan yang tersedia. Poin-poin Zhao menunjukkan arah pemikirannya:

Konsep ulang saya terhadap konsep tianxia (Semua di Bawah Langit) menunjukkan suatu sistem tatanan dunia untuk dan oleh semua orang di dunia. Cita-cita politik ini bukanlah suatu utopia yang tidak dapat diwujudkan, melainkan suatu xontopia yang dapat dicapai. Konsep tianxia adalah titik awal politik Tiongkok. Berbeda dengan polis Yunani sebagai titik awal politik Eropa, tianxia sebagai sebuah konsep menunjukkan bahwa pemikiran politik Tiongkok dimulai dengan “dunia” yang mencakup segalanya dan bukan konsepsi “negara” yang eksklusif dan terpisah. [. . .] Lebih dari sekadar solusi terhadap tantangan tesis Huntington mengenai bentrokan peradaban yang tak

terelakkan, tianxia juga merupakan respons efektif terhadap kegagalan politik internasional dengan paradigma logika persaingan zero-sum yang berlaku di antara negara-negara dan antar negara. aturan permainannya yang sangat tidak efektif dan hanya menggunakan strategi bermusuhan yang tidak mampu menyelesaikan masalah politik dunia.

“Tatanan dunia oleh dan untuk semua orang” tidak berarti bahwa Tiongkok harus menjadi pengatur tertinggi tatanan dunia tersebut, karena hal tersebut merupakan versi lain dari unipolaritas. Zhao tidak mengusulkan tatanan dunia unipolar “baru” yang dikendalikan oleh Tiongkok dan bukan oleh Barat. Hal ini merupakan kesalahan dalam memahami argumennya dan, implikasinya, terhadap politik internasional pemerintah Tiongkok. Apa yang diusulkan Zhao adalah kerangka teoritis-politik untuk memahami filosofi politik pluralis de-Western dan multipolaritas de-Western untuk hubungan antarnegara global yang diusulkan dalam pernyataan bersama. Berdasarkan definisinya, multipolaritas tidak dapat dikelola secara unipolar! Sensorium dan intelek yang dipandu oleh yin-yang tidak dapat dimasukkan dan direduksi menjadi sensorium dan intelek yang masih mengikuti logika “teman-musuh” (yaitu, “kamu bersamaku atau melawanku”). Oleh karena itu, pertanyaan mengenai masa depan saat ini (2022-40) adalah sebagai berikut: pada abad ke-21, ketika para cendekiawan, politisi, dan jurnalis di seluruh dunia mengalami berakhirnya unipolaritas dan upaya putus asa untuk mempertahankan hak-hak istimewanya, mengapa tatanan dunia global hanya mengandalkan unipolaritas dalam perbuatan dan universalitas dalam perkataan?

Zhao menyebut keadaan yang tidak menentu saat ini sebagai privatisasi penafsiran dan penilaian. Argumennya membantu para intelektual memahami upaya Amerika Serikat, NATO, dan UE saat ini untuk mempertahankan perspektif unipolar dan untuk membendung pembangkangan politik, ekonomi, dan militer. Zhao memberikan beberapa nasihat mengenai hal ini: “Sejak agama Kristen menaklukkan peradaban Yunani, logika perjuangan melawan ajaran sesat telah terbentuk di Barat; dengan ini, Barat melihat dunia sedang terperosok dalam konflik dan peperangan” (2016). Dunia itu sendiri, tambah Zhao, “tidak lagi memiliki potensi untuk menjadi agen subjektif dan kini hanya menjadi sebuah objek belaka. Oleh karena itu, berbagai hal di dunia dan masyarakatnya yang beragam telah kehilangan sejarah uniknya. Sejarah dan budaya apa pun yang ada sebelum menjadi bagian dari peradaban 'Kristen' yang total ini dipandang sebagai sesuatu yang ditinggalkan dan sampai sekarang hanya ada dalam absurditas eksistensial yang tidak ada artinya” (2016: 208). Globalisme adalah kata lain dan versi sekuler dari peradaban Barat. menggabungkan konsepsi kosmos dan sejarah manusia serta implementasinya untuk menarik semua orang ke dalam satu payung besar.

Munculnya Nomos Ketiga di Bumi

Yang dipertaruhkan adalah tatanan global, bukan globalisasi. Saya berpendapat bahwa globalisasi bukanlah jaringan peristiwa dan proses yang terjadi seperti globalisasi, namun peristiwa dan proses tersebut bukanlah globalisasi sampai mereka diberi nama, dideskripsikan, dianalisis, dan dijelaskan seperti itu. Oleh karena itu, saya fokus pada globalisme, rancangan global yang disembunyikan oleh globalisasi nominatif dan memungkinkan kita memahami bagaimana globalisasi terjadi. Begitu sebuah nominatif

diterima, nominatif tersebut menjadi jangkar bagi serangkaian percakapan yang menghubungkan para negarawan, cendekiawan, jurnalis, seniman, kurator, dan masyarakat luas. Hal yang sama juga berlaku untuk semua nominatif dan deskriptor yang mendasari domain percakapan yang berkelanjutan seperti kosmos fisika teoretis, keilahian agama, dan seni museum. Percakapan mengkoordinasikan bidang-bidang interaksi, harmonis dan bertentangan, sampai-sampai kita lupa menanyakan kapan dan di mana percakapan itu dimulai, siapa yang memulainya, mengapa dan untuk apa. Tatahan global sedang dibentuk dengan munculnya nomos ketiga di dunia yang hidup berdampingan yaitu dewesternisasi, rewesternisasi, dan dekolonialitas.

Prasasti pertama saya menggarisbawahi dewesternisasi budaya (di luar lingkup dan hidup berdampingan dengan pengambilan keputusan politik negara), menampilkan kurator terkemuka Jepang Yuko Hasegawa, yang karyanya mempertanyakan asumsi epistemik Eurosentrisme dan globalisme. Prasasti kedua berasal dari sosiolog Peru terkemuka yang membahas Eurosentrisme dan totalitas pengetahuan. Kedua pernyataan tersebut memiliki klaim serupa: untuk membebaskan diri kita sendiri (Hasegawa) dan melepaskan diri kita (Quijano) dari Eurosentrisme, globalisme, dan paham serupa lainnya. Mereka serupa tetapi tidak dapat direduksi satu sama lain. Gerakan-gerakan ini menggerakkan dewesternisasi dalam politik kenegaraan dan politik keserjanaan akademis (Zhao), serta dalam praksis kuratorial di museum dan biennial. Demikian pula, dekolonialitas mengaktifkan ruang publik dan masyarakat politik yang memobilisasi potensinya untuk melepaskan diri dari masa depan yang didasarkan pada permainan zero-sum dalam bidang pengalaman apa pun. Munculnya nomos ketiga Bumi menyiratkan persaingan dalam perampasan, pembagian, dan distribusi Bumi dalam konseptualisasi Schmitt, serta meningkatnya klaim politik organisasi Masyarakat Adat untuk mendapatkan kembali tanah yang dicuri. Sejalan dengan wilayah di mana konflik politik-ekonomi didorong oleh dewesternisasi dan rewesternisasi, terdapat wilayah masyarakat politik di ruang publik di mana dewesternisasi budaya dan dekolonialitas pada umumnya digerakkan oleh keprihatinan yang sama: keluar dari kegagalan modernisasi, seperti yang dikatakan Yuko Hasegawa. berjudul salah satu pameran terbarunya (Hasegawa, 2016). Ini adalah beberapa tanda yang menunjukkan munculnya nomos ketiga di Bumi.

BAB 13

GERAKAN GLOBAL DAN GOSSAMER DARI “GLOBALISASI”

Orientasi yang melekat pada konsep globalisasi saat ini sering kali bertumpu pada kemenangan teknokratis—“kompresi waktu-ruang”—yang dimungkinkan oleh teknologi baru, berbagai macam “aliran” yang mentransformasikan “lanskap” yang dilewati dan dibentuk, modal yang bergerak menuju kebebasan tanpa batas - menciptakan pasar-pasar baru dan membentuk kemungkinan-kemungkinan tata kelola, pergerakan umat manusia yang difasilitasi oleh infrastruktur, dan kota-kota yang berfungsi sebagai pusat tatanan global. Visi kemenangan ini tidak hanya mengecualikan sebagian besar dunia, namun juga memanfaatkan serangkaian ideologi dan ontologi dari Barat untuk mewakili masa lalu, masa kini, dan masa depan global bagi semua orang. Pengecualian dan titik fokus ini bukan hanya kebetulan, namun saling berkaitan. Dengan perhatian pada dua topik yang sering kali ditempatkan dalam imajinasi globalisasi—wacana mobilitas dan ideologi olahraga—bab ini membahas pandangan dunia Pasifik tentang pergerakan untuk menyelidiki batas-batas globalisasi sebagai kerangka konseptual. Berfokus pada hal-hal yang menjadi kabur sebagai gerakan global, penelitian ini menunjukkan bahwa mengadopsi pendekatan kaleidoskopik yang memperhatikan kontingensi sejarah, hubungan transnasional, tempat, dan persaingan ontologi akan membantu kita memahami lebih baik dinamika zaman kita.

Orientasi yang melekat pada konsep globalisasi saat ini sering kali bertumpu pada kemenangan teknokratis—“kompresi waktu-ruang”—yang dimungkinkan oleh teknologi baru, berbagai jenis “aliran” yang mentransformasikan “lanskap” yang dilewati dan dibentuk, modal yang bergerak menuju kebebasan tanpa batas yang menguntit pasar-pasar baru dan pembentukan kemungkinan-kemungkinan tata kelola, pergerakan umat manusia yang difasilitasi oleh infrastruktur, dan kota-kota yang berfungsi sebagai pusat tatanan global. Meskipun beberapa sektor teknologi dan bisnis dengan sepenuh hati mendukung kerangka ini, bahkan wawasan kritis yang diberikan oleh para sarjana untuk menjelaskan arsitektur dan dinamika koneksi menjadi sebuah pandangan tentang globalisasi sebagai teleologi—dengan kekuatan yang tidak bisa dihindari, mandiri, dan semakin; Toby Miller dkk. berargumen bahwa “globalisasi adalah efek pengetahuan dengan dampak yang pasti terhadap praktik intelektual, ekonomi, sosial, dan pemerintahan” (2001). Dalam menelusuri kemunculan globalisasi sebagai sebuah konsep inti, Paul James dan Manfred B. Steger mendeskripsikannya sebagai konsep yang dikodekan dengan makna yang semakin padat karena “berkontribusi pada artikulasi imajinasi global yang sedang berkembang dalam kunci-kunci ideologis baru yang berhubungan dengan penebalan globalisasi.” kesadaran masyarakat terhadap dunia sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan”. Apa yang direpresentasikan sebagai visi universal tidak mencakup sebagian besar wilayah dunia dan memanfaatkan serangkaian ideologi dan ontologi dari Barat untuk mewakili masa lalu, masa kini, dan masa depan global bagi semua orang. Pengecualian dan area fokus ini bukan hanya kebetulan, namun merupakan hal yang saling berkaitan.

Meskipun kerangka globalisasi mungkin berguna untuk menangkap aspek-aspek hubungan skala besar yang diunggulkan dan dimungkinkan oleh pergeseran teknologi, kita masih memerlukan wawasan yang lebih baik mengenai artikulasi dan keterputusan antara apa yang kita pahami sebagai “lokal” dan “global,” atau mungkin lebih baik lagi. memahami kegunaan (dan batasan) mengonsepanya dengan cara ini. Di kalangan akademisi, kesadaran akan lokal sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, baik di tingkat negara bagian, regional, nasional, atau internasional, sudah tertanam dengan baik, dan hanya sedikit tempat di dunia yang tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Ketika kita berpikir tentang “lokal”, hal ini bukan hanya sekedar retorika provinsialisasi, namun mencakup dinamika berbasis tempat, sejarah, dan kontinjensi yang membentuk kehidupan sehari-hari, dan hal ini memerlukan perhatian terhadap kekhususan. Sebaliknya, kita sering menganggap “global” sebagai hubungan tidak berbentuk yang didukung oleh pihak lain, sebagai benang yang terjalin dalam media atau diwujudkan dalam rantai komoditas dan skema tenaga kerja musiman. Sementara itu, arus tenaga kerja transnasional dikondisikan oleh kebangkitan negara-bangsa dan politik perbatasan, serta didisiplinkan oleh kebijakan nasional, modal transnasional, dan badan-badan pemerintahan internasional. Gangguan akibat COVID-19 mematahkan pandangan globalisasi sebagai sistem mandiri yang kuat karena hal ini menunjukkan bahwa koneksi di seluruh dunia sangat bergantung pada jalur dalam jaringan, dan hal ini pada gilirannya dipengaruhi oleh kondisi di lapangan yang mendukung koneksi node yang efektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kita harus menulis menentang “globalisasi” dan menuju pendekatan kaleidoskopik dalam mengkaji dunia kita saat ini.

Memperhatikan dua topik yang sering kali ditempatkan dalam imajinasi globalisasi—wacana mobilitas dan ideologi olahraga—bab ini menanyakan: Apa yang berguna dan apa yang tidak dimasukkan dalam kerangka globalisasi? Apa yang bisa kita peroleh dari perubahan lensa yang sering digunakan di pusat-pusat kekuasaan di dunia Barat?

Masyarakat Pribumi dan Diaspora Pasifik, ontologi gerakan global ditantang oleh kerangka kerja dan artikulasi Masyarakat Pribumi, yang menunjukkan bagaimana globalisasi sebagai sebuah khayalan tidak hanya mengaburkan namun juga menghapus. Kedua, dengan memperhatikan pembuatan mitos dan olahraga global, kita melihat dengan lebih jelas bagaimana fantasi tidak hanya menginformasikan realitas tetapi juga mulai membengkokkannya melalui pilihan masyarakat sehari-hari. Dengan mengambil contoh nyata dari dunia olahraga—sering kali dikonseptualisasikan dalam lingkup hiperlokal atau global—kita bisa bertanya, bagaimana memperhatikan hubungan transnasional sebagai pilihan metodologis dan mengadopsi sensibilitas kaleidoskopik dapat membantu kita lebih memahami dinamika yang terjadi di dunia olahraga. apa yang sering dilihat sebagai bentuk lokal dan global satu sama lain? Berfokus pada hal-hal yang selama ini dikaburkan sebagai “gerakan global” membantu kita memahami lebih baik dinamika zaman dan memberikan pendekatan berbeda terhadap masa depan kita.

13.1 WACANA MOBILITY DAN VISI GERAKAN PASIFIK

Dalam artikel penting yang ditulisnya “Our Sea of Islands,” pakar terkemuka Epeli Hau'ofa menyusun visi baru tentang Pasifik yang berpaling dari wacana birokrasi mengenai pulau-pulau kecil, sumber daya yang terbatas, dan ketergantungan untuk memperhitungkan kepenuhan dunia Oseania. sehingga berdampak pada perubahan paradigma signifikan yang berlanjut hingga hari ini. Sewaktu mengenang para leluhur, ia mengatakan, “Dunia mereka sangat luas, tempat masyarakat dan kebudayaan bergerak dan berbaur, tanpa terhalang oleh batasan-batasan yang dibangun jauh di kemudian hari oleh kekuasaan kekaisaran. Dari satu pulau ke pulau lain mereka berlayar untuk berdagang dan menikah, sehingga memperluas jaringan sosial untuk mendapatkan aliran kekayaan yang lebih besar. Mereka melakukan perjalanan untuk mengunjungi kerabat mereka di berbagai lingkungan alam dan budaya, untuk memuaskan dahaga mereka akan petualangan, dan bahkan untuk bertarung dan mendominasi”. Ia melanjutkan dengan menggambarkan jaringan pulau-pulau yang dihubungkan oleh sirkulasi manusia dan kekayaan, yang dari sana mereka berkelana jauh ke wilayah barat, timur, dan selatan Pasifik. Konglomerasi pulau-pulau ini terlihat jelas dalam sejarah lisan, silsilah, dan pertukaran bentuk budaya seperti tarian.

Berbicara tentang pergerakan masyarakat Pasifik di era pasca-Perang Dunia II dan setelahnya, Hau'ofa menulis, “Realitas ekonomi baru menjadikan batasan-batasan artifisial menjadi tidak masuk akal, sehingga memungkinkan masyarakat untuk melepaskan diri dari kurungan mereka” yang telah diberlakukan oleh kekaisaran. perbatasan. Dia menjelaskan:

Sejak saat itu, mereka telah bergerak, dalam jumlah puluhan ribu, melakukan apa yang dilakukan nenek moyang mereka di masa lalu: memperluas dunia mereka, seiring berjalannya waktu, dalam skala yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Ke mana pun mereka pergi—ke Australia, Selandia Baru, Hawai'i, daratan Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan tempat lain—mereka berakar pada wilayah sumber daya baru, mendapatkan pekerjaan dan properti keluarga di luar negeri, memperluas jaringan kekerabatan melalui mana mereka bersirkulasi. diri mereka sendiri, kerabat mereka, harta benda mereka, dan cerita mereka di seluruh lautan, dan lautan adalah milik mereka karena selalu menjadi rumah mereka.

Dalam upaya untuk memahami volume dan arah pergerakan baru ini, Hau'ofa mengimbau kita untuk memperluas pandangan kita: “Kita tidak dapat melihat proses-proses ini dengan jelas jika kita membatasi perhatian kita pada hal-hal yang berada dalam batas-batas nasional dan pada peristiwa-peristiwa di tingkat atas. ekonomi politik dan diplomasi regional dan internasional. Hanya ketika kita fokus pada apa yang sebenarnya dilakukan orang biasa, bukan pada apa yang seharusnya mereka lakukan, kita bisa melihat gambaran realitas yang lebih luas” (1994: 156–57). Dalam pandangannya yang lebih luas mengenai pergeseran sejarah mobilitas di Oseania, ia menegaskan bahwa pergerakan yang semakin dekat dan jauh ke luar negeri selalu menjadi bagian dari praktik sehari-hari di Te Moananui-a-Kea/Kiwa/Kiva (secara harfiah berarti samudra luas atau dunia Oseanik). Meskipun teknologi transportasi pada abad ke-20 dan pergeseran rezim perbatasan menjadikan mobilitas baru menjadi kenyataan di banyak wilayah Pasifik, bertentangan dengan akal sehat seputar migrasi dan globalisasi, fenomena pergerakan ini bukanlah hal baru. Kawasan Pasifik sudah ditandai

dengan adanya sirkuit yang menghubungkan masyarakat Kepulauan Pasifik di dalam dan di luar kepulauan mereka satu sama lain yang dibentuk oleh kecenderungan dan praktik perjalanan yang sudah mendarah daging (T.D.I. Salesa, 2003).

Masyarakat di Pasifik telah melakukan mobilitas global, dalam arti mengembangkan jaringan dan pergerakan yang luas melampaui batas pemukiman dan perdagangan selama berabad-abad. Praktik dan keahlian perjalanan yang berani tercermin dalam nama seperti “Kepulauan Navigator” yang diberikan oleh penjelajah Barat. Dalam “The Pacific in Indigenous Time,” Damon Salesa memetakan beberapa pergerakan awal ini, berdasarkan bukti arkeologis dan sejarah lisan, mulai dari pemukiman di Austronesia, dekat dan jauh Oseania, hingga pemukiman selanjutnya di Polinesia Leluhur atau Hawaiki, dan sebagian dari yang sering kita sebut Mikronesia. Melalui perluasan kompleks budaya Lapita dan migrasi pelengkap lainnya, dunia Oseanik pun meluas. “Penyebaran objek yang luas dan berkelanjutan di seluruh wilayah Lapita menunjukkan adanya jaringan atau sistem pertukaran yang bersifat leluhur” (D. Salesa, 2014). Jaringan atau sistem koneksi, pergerakan, dan pertukaran lainnya telah terdokumentasi dengan baik (sistem pertukaran Kula di Melanesia, misalnya). Meskipun hubungan regional yang sangat luas melalui sirkuit dan titik-titik tertentu ini sudah berlangsung lama, hubungan-hubungan tersebut mengikuti rute-rute tertentu baik sampai abad ke-16 maupun dengan kedatangan pendatang baru setelahnya. Kisah era kolonial, sebagai bagian dari pergerakan bangsa, negara bagian, dan perusahaan yang lebih besar di seluruh dunia dalam mencari tanah dan sumber daya untuk ekstraksi, tetap saja merupakan kisah yang “dramatis secara lokal, namun berkepanjangan secara regional dan serampangan” dalam sejarah Pasifik (D. Salesa, 2014). Perhatian terhadap sejarah-sejarah ini mengungkapkan kepekaan global terhadap pergerakan yang terjadi dalam jangka waktu yang jauh, namun juga pentingnya kekhususan dan kontinuitas dalam cara pergerakan terjadi dari waktu ke waktu.

Ontologi Gerakan Pasifik

Salah satu perdebatan terbesar dalam antropologi pertengahan hingga akhir abad ke-20 memperlumahkan pertanyaan yang tampaknya sederhana: apakah masyarakat Kepulauan Pasifik sengaja melakukan perjalanan melintasi hamparan moana yang luas atau apakah mereka terhanyut secara tidak sengaja? Berlembar-lembar kertas yang tak terhitung jumlahnya ditandatangani sebagai dedikasi terhadap perdebatan ilmiah tersebut, dilakukan di atas kepala para praktisi dan dengan cara yang membuat sejarah lisan dan bahkan budaya material menjadi mencurigakan. Hanya ketika model dalam skala besar dapat dibangun dan navigasinya direplikasi dengan pengetahuan Masyarakat Adat Pasifik mengenai pergerakan maritim, gelombang besar dan arus serta laut dan daratan, barulah para pengkritiknya—mereka yang menganggap gagasan Masyarakat Adat dengan sengaja menguji dan menyempurnakan serta membangun - menggunakan pengetahuan untuk mengarungi dunia yang mereka tinggali terlalu sulit dipercaya untuk menjadi kenyataan—akhirnya dibungkam. Kebangkitan pelayaran Pribumi Pasifik dan revitalisasi pencarian jalan Polinesia dibangun berdasarkan pengetahuan para navigator ahli Mikronesia untuk mendapatkan kembali tidak hanya sejarah tetapi juga praktik, yang ditunjukkan dalam pelayaran Hōkūle’a dan Hikianalia.

Dengan melakukan hal tersebut, para penjelajah modern menerapkan mobilitas global yang dibentuk oleh ontologi Pribumi yang bersifat kontemporer dan merupakan bagian dari tradisi panjang dan bertingkat.

Perdebatan mengenai apakah pelayaran awal itu terjadi secara kebetulan atau disengaja merupakan simbol dari jenis dorongan yang terkubur di dalam atau diteriakkan dari atap rumah ketika imajinasi globalisasi dimobilisasi. Dalam imajinasi ini, keagenan dijalankan oleh modal, didukung oleh struktur dan kebijakan tata kelola, yang mendorong dinamika transformatif yang telah mengubah dunia kehidupan kita. Meskipun dorongan modal selalu dikaitkan dengan mobilisasi arus tenaga kerja, hal ini dilakukan dengan cara yang membatasi pilihan dan upaya untuk membuat pekerja patuh dan tidak berdaya. Dalam konteks ini “manusia rasional” dalam teori ekonomi menanggapi peluang atau kesulitan struktural membentuk pemahaman umum tentang bagaimana orang berpindah dan alasannya, dan bahwa dunia manusia rasional selalu dikondisikan oleh imajinasi kapitalisme berbasis pasar Barat. Hanya ada sedikit ruang bagi budaya dan ontologi untuk menyimpang dari hal-hal yang tidak ditandai secara normatif kecuali untuk bertindak sebagai contoh kegagalan: rezim sosial anakronistik yang harus diatasi untuk memungkinkan infiltrasi lebih lanjut terhadap kapital dan kapitalisme. Ontologi pribumi dibungkam dalam teori globalisasi kecuali sebagai respon khusus terhadap struktur modal dan globalisasi yang lebih kuat. Namun penelitian etnografi dengan komunitas transnasional tidak hanya menunjukkan respons terhadap determinisme struktural, melainkan praktik gabungan di mana lembaga pribadi dan komunitas tidak hanya bertemu, membentuk, dan dibentuk oleh struktur yang lebih besar, namun dalam banyak kasus didorong oleh keprihatinan dan kepekaan yang tidak terkait dengan determinisme struktural. sepenuhnya bagian dari atau diatur oleh struktur ini. Ontologi pribumi adalah elemen sentral dari mobilitas Oseanik—dalam banyak hal, ontologi ini berbasis tempat karena muncul dari konsepsi tentang tempat seseorang di dunia yang terkait dengan hubungan kontekstual dan pandangan dunia, serta terwujud dalam kepekaan budaya seputar pergerakan. Apa yang secara eksplisit atau implisit ingin dilenyapkan oleh globalisasi (ekspresi spesifik yang terkait dengan tempat dan ruang) sebenarnya adalah kunci untuk memahami gerakan-gerakan ini.

Bekerja hampir bersamaan dengan Ha’uofa, etnografi gerakan Tonga karya Cathy Small pada tahun 1990-an menelusuri kisah sebuah keluarga besar dari sebuah desa di Tonga hingga San Francisco Bay Area di Kalifornia. Melalui waktunya bersama keluarga, ia menjelaskan perubahan penting dalam gerakan mereka, termasuk adaptasi norma dan praktik gender, ketegangan dan tantangan antargenerasi, dan perubahan kewajiban budaya dalam diaspora. Namun keadaan tidak hanya berubah di luar negeri; Kondisi rumah tangga di desa-desa Tonga telah berubah sehubungan dengan akses terhadap lahan, tekanan ekonomi dan pola konsumsi, serta ritme kerja dan kehidupan sehari-hari. Untuk memahami gerakan transnasional mereka, diperlukan perhatian terhadap “perbedaan mobilitas sosial dan ekonomi” ([1997] 2011: 192). “Perbedaan ini memastikan bahwa hanya dengan kembali ke kampung halaman—dalam bentuk kunjungan transnasional, penghentian investasi, dan pengiriman uang—janji nyata dari proses migrasi dapat dipenuhi” (192). Namun dorongan

untuk melakukan migrasi tidak sesuai dengan pola migrasi Amerika ke negara yang memiliki peluang, sehingga meninggalkan dunia lama. Warga Tonga bermigrasi sebagian untuk memenuhi kavenga atau memenuhi fatongia (kewajiban budaya atau tanggung jawab bersama), untuk melayani keluarga mereka dengan cara Tonga di tengah perubahan prospek dan harapan ekonomi.

Dua puluh tahun kemudian, *Marking Indigeneity* (2017) karya Tēvita O. Ka'ili berfokus pada kepekaan seputar tā dan vā, gagasan filosofis Tonga tentang waktu dan ruang, sebagai prisma yang dapat digunakan untuk memahami upaya mengatur kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan normatif, harapan tenaga kerja, dan untuk memenuhi kewajiban budaya di antara komunitas migran Tonga di Maui. Manipulasi ruang dan pendekatan terhadap waktu adalah bagian tak terpisahkan dari negosiasi kepekaan dan kewajiban budaya Tonga ketika mereka berhadapan dengan kegigihan waktu Barat yang tak kenal ampun yang mengatur dunia kerja dan sekolah. Meskipun Ka'ili tidak membahas hal ini secara spesifik, hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang berusaha keras dalam memperhitungkan antara Tongan tā-vā dan ruang-waktu kapitalisme Amerika, namun tetap bertahan. Bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk menyeimbangkan persaingan ontologi dalam ruang diaspora/transnasional ini mendorong kembali kerangka deterministik globalisasi sebagai kemenangan kapitalis. Seperti yang saya temukan dalam penelitian tentang olahraga dengan komunitas Samoa di dalam dan luar negeri, banyak masyarakat Pasifik telah menjadi subyek kapitalis tetapi tidak hanya tunduk pada kapitalisme—mereka juga menggunakan ontologi lain yang secara aktif membentuk tindakan.

Ontologi-ontologi lain ini muncul di tempat lain dan membantu kita memikirkan kembali pengertian umum kerangka globalisasi. Misalnya, dalam novel *Where We Once Belonged* (1996) karya Sia Figiel, ia berfokus pada Sāmoa sebagai pusat suci—tempat desa, bangsa, dan dunia berlabuh dari sudut pandang orang yang kakinya menginjak fanua atau tanah. di Samoa. Saat karakternya, Alofa Filiga, bergabung dengan teman-temannya dalam hobi favorit menghitung kerabat, dia menampilkan pandangan Samoa tentang 'āiga atau 'āigapotopoto (keluarga besar). Dengan kepekaan bahwa keluarga yang kuat adalah keluarga yang besar, ia pun merangkai gengsi pergi ke luar negeri sebagai sebuah prestasi yang memperluas jangkauan keluarga. Hal ini juga tampak dalam karya Sa'iliemanu Lilomaiva-Doktor mengenai geografi kritis yang mengubah lensa pergerakan dan migrasi sebelumnya menjadi lensa yang konsisten dan berakar pada ontologi Samoa. Dalam pembedahan ini, moa memang menjadi pusatnya, dan dikonseptualisasikan sebagai i'inei, yang di sini berbeda dengan fafo, atau bagian luarnya (2009). Pergeseran perspektif ini terjadi dari pandangan luas dalam teori globalisasi ke teori yang sudah ada; berakar tetapi melihat ke luar, bukannya tanpa tubuh dan tidak terpusat. Namun seperti yang diingatkan oleh Cluny dan La'avasa Macpherson dalam *Warm Winds of Change* (2013), pergerakan dari titik awal ini masih dibentuk dan dinegosiasikan di tengah kontingensi sejarah dan kepekaan Masyarakat Adat, dan dikondisikan oleh jalur-jalur tertentu. (Hubungan di luar negeri yang mereka telusuri, dan yang ditampilkan dalam karya Figiel, pada dasarnya tidak dimotivasi oleh namun tetap terikat dengan masa lalu dan masa kini dari ambisi Selandia Baru untuk menguasai kawasan Pasifik.)

Dengan menggunakan contoh-contoh dari masyarakat Pribumi dan diaspora Pasifik, kita dapat mempertanyakan ontologi globalisasi yang tampaknya sudah mapan sebagaimana muncul dalam wacana mobilitas. Dengan melakukan hal ini, hal ini meningkatkan keterbatasan globalisasi sebagai kerangka mobilitas dan menyoroti pentingnya memperhatikan kekhususan gerakan dengan pandangan kaleidoskopik yang memungkinkan kelincihan—menerangi sejarah spesifik, dinamika kekuasaan, dan juga warisan masa kini. sebagai akuntabilitas dan tanggung jawab berkelanjutan untuk masa depan.

13.2 CARA JALUR OLAHRAGA DAN IMAJINARI GLOBAL

Contoh-contoh penting dari mobilitas olahraga sering kali masih berada pada tingkat individu, dengan fokus pada narasi dramatis. Liputan media yang menarik, baik seputar tokoh-tokoh penting dalam olahraga tertentu atau latar belakang yang ditampilkan dalam liputan berkala Olimpiade, memungkinkan pemirsa untuk terhubung dengan jalur yang dipetakan oleh naik turunnya bintang-bintang dalam olahraga. Berbeda dengan imajinasi olahraga global, hiperfokus ini juga mengaburkan bagaimana kompetisi lokal semakin terkait dengan entitas regional, nasional, dan internasional. Pada bagian ini kami memetakan jalan tengah dengan contoh-contoh dari Pasifik untuk menyoroti keterkaitan antara kekhususan jalur dan tempat, serta kekuatan yang ditimbulkan oleh imajinasi olahraga yang mengglobal.

Di Aotearoa, Selandia Baru, perubahan olahraga nasional melalui kampanye periklanan global oleh perusahaan multinasional dan sponsor Adidas pada saat profesionalisasi rugby union pada tahun 1995 memberikan contoh yang sangat jelas tentang bagaimana praktik lokal semakin terikat dengan budaya lokal. sirkuit yang jangkauannya jauh melampaui cakrawala. Rugby mendominasi dunia olah raga nasional, dan meskipun kesuksesan ikon-ikon seperti Sir Michael Jones, Fiao’o Fa’amausili, dan Dr. Farah Rangikoepa Palmer mendapat sorotan publik, perjalanannya sering kali merupakan jalan yang panjang dan berbahaya. Ini adalah salah satu yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh motu, di klub-klub lokal dan sekolah-sekolah yang didukung oleh keluarga dan komunitas. Upaya-upaya mendasar ini menanamkan dan mempertahankan lanskap olahraga namun tetap terhubung dengan imajinasi yang lebih besar seputar mobilitas dan pergerakan olahraga. Imajinasi itu direkonstruksi dalam setiap pertandingan uji coba dan tur, di mana taonga atau khasanah budaya seperti haka dimobilisasi sebagai simbol nasional di pentas dunia.

Mengindividualisasikan perjalanan-perjalanan ini mengaburkan jaringan-jaringan yang lebih luas, sejarah-sejarah yang mungkin terjadi, dan dalam banyak hal, kepekaan budaya dan ontologi yang mungkin memberi makan atau mendorong mereka; namun fokus pada kerangka makro sistemik olahraga global juga berdampak baik. Diskusi-diskusi terakhir ini berguna untuk memahami dinamika badan-badan olahraga internasional dan kerangka yang lebih luas mengenai investasi dan pergerakan olahraga secara keseluruhan. Namun, wawasan yang dihasilkan, seperti wawasan yang berfokus pada kerangka migrasi global dalam skala besar, masih bersifat parsial. Apa yang bisa kita abstrak menjadi sebuah “sistem” “olahraga

global” sebenarnya adalah sebuah visi agregat dari jalur-jalur yang berbeda dan tumpang tindih secara historis yang menghubungkan apa yang kadang-kadang disebut sebagai Dunia Selatan dan Dunia Utara, namun juga lokalitas yang berbeda satu sama lain. Dalam banyak kasus, jalur kolonial yang membawa para migran olahraga di masa lalu kini dimasukkan ke dalam apa yang kita sebut infrastruktur olahraga global, namun jejak kolonial masih banyak ditemui di masa kini. Dalam konteks ini, visi global menyembunyikan atau lebih banyak hal yang tersembunyi, dan untuk memahami apa yang terjadi di wilayah tertentu dalam dunia olahraga memerlukan perhatian pada koneksi lokal dan kontingen di dalam dan di seluruh jalur yang sudah ada (Besnier dkk., 2020). Memahami pentingnya dan komposisi olahraga seperti rugby union dan liga rugby di tempat-tempat seperti Aotearoa memerlukan wawasan mengenai sejarah kolonial tertentu, masa kini, dan kehidupan setelahnya. Lebih dari satu abad setelah diperkenalkan, rugby tetap menjadi hiburan nasional di Aotearoa—yang kemudian menjadi narasi nasional yang bertahan lama yang pada abad ke-19 dan ke-20 mengutamakan kepekaan gender pemukim-kolonial terhadap maskulinitas dan kulit putih (Phillips, Nauright, & Chandler, 1996; Pringle, 2004). Meskipun pada awalnya terpinggirkan, suku Māori telah menjadi bagian dari permainan lokal sejak awal berdirinya. Saat ini para pemain Māori dan Pasifika semakin berperan penting dalam olahraga putra dan putri. Bagi masyarakat non-Māori di Pasifik, kehadiran olahraga yang besar ini dibangun di atas sejarah migrasi yang mereka sendiri telah dimungkinkan oleh jalur kolonial dan kepekaan masyarakat adat terhadap pergerakan. Masyarakat Pasifika berjumlah sekitar 8 persen dari populasi Aotearoa, dan sebagian besar berasal dari negara-negara Kepulauan Pasifik yang secara historis terkait dengan kerajaan Selandia Baru dan negara-negara yang memiliki hubungan historis dengan Persemakmuran Inggris. Membaca keterlibatan kolonial di Pasifik saat ini bisa menjadi hal yang sangat penting, namun bidang mobilitas olahraga juga mencakup keterkaitan, keterputusan, dan kesenjangan.

Di sisi lain, penelitian saya tentang partisipasi penduduk Kepulauan Pasifik dalam sepak bola Amerika telah menelusuri pergerakan dari wilayah Pasifik seperti Sāmoa dan Hawai'i hingga ke lapangan olahraga di Amerika Serikat, yang difasilitasi oleh warisan dan realitas kontemporer dari sepak bola Amerika. kekaisaran AS (F.L. Uperesa, 2014b). Gelombang migrasi pasca-Perang Dunia II dari Sāmoa sebagian besar terjadi melalui status teritorial Tutuila dan Manu'a, lokasi bekas Pangkalan Angkatan Laut Tutuila, dan status kenegaraan di Hawai'i yang diduduki. Dalam dekade-dekade berikutnya, cakrawala semakin luas dan jaringan pergerakan menjadi semakin kompleks, mengubah Jalur Pipa Polinesia di masa lalu menjadi Jaringan Polinesia di masa kini, namun kisah yang lebih besar tidak dapat dipahami hanya sebagai narasi gerakan olahraga global. Meskipun terdapat lebih banyak kebebasan saat ini dibandingkan di masa lalu, jalur-jalur historis menentukan kemungkinan-kemungkinan yang ada saat ini dan masa depan, dan jalur-jalur ini mempunyai kemungkinan-kemungkinan tertentu yang mengakar, terkait dengan dinamika yang kompleks. Pada saat yang sama, keterlibatan dengan jalur ini sering kali dibangun dan dibentuk oleh kepekaan budaya seputar tautua atau layanan dan orientasi masyarakat adat terhadap mobilitas yang sudah lama dibahas sebelumnya. Dengan memperhatikan artikulasi inilah kita akan lebih memahami tidak

hanya pergerakan modal namun juga peran pihak-pihak yang melakukan globalisasi “dari bawah” (Portes, 2000). Mereka melakukan hal ini tidak hanya sebagai aktor pasif yang terhanyut oleh angin perubahan yang didorong oleh keinginan para elit, namun juga sebagai agen yang berdaya dan secara aktif membentuk dunia di sekitar mereka.

Imajiner dan Tempat Olahraga

Meskipun para migran olahraga adalah agen yang diberdayakan, mereka juga bekerja dalam konteks yang dibentuk oleh imajinasi olahraga. Dalam imajinasi ini, khususnya pada akhir abad ke-20 dan setelahnya, mobilitas (geografis, ekonomi, sosial) menjadi jangkar dari mimpi tersebut. Di seluruh dunia, mobilitas olahraga yang terglobalisasi sering kali mewakili akses tanpa batas terhadap kemungkinan masa depan melalui jaringan, kontrak, visibilitas dan branding, akses terhadap jalur pendidikan, dan peluang profesional yang terus mengalir. Dalam visi ini, lapangan olah raga menawarkan peluang untuk mengubah arah kehidupan dan kehidupan orang-orang di sekitar mereka, dan merupakan peluang langka untuk mengatasi kesenjangan, hierarki, dan terbatasnya peluang hidup yang ada. Hal ini merupakan sebuah potensi pelarian dari kenyataan pahit pergeseran kapitalisme yang terjadi akhir-akhir ini—pencabutan investasi neoliberal, meningkatnya kesenjangan, dan konfigurasi ulang sektor-sektor yang pernah menjadi jalur menuju lapangan kerja kelas pekerja dan kelas menengah yang berkelanjutan. Bagi banyak pemain Kepulauan Pasifik, keterwakilan sebagai atlet dalam budaya populer dan peluang yang diberikan oleh perluasan investasi pada infrastruktur olahraga bersama-sama memengaruhi pilihan sehari-hari oleh para pemain dan keluarga. Hal ini membentuk pandangan kaum muda tentang karir masa depan dan persepsi olahraga sebagai “tiket makan” (McDonald & Rodriguez, 2014). Baik dengan mengumpulkan modal atletik atau menavigasi kompleks industri atletik dan jalur mobilitas olahraga transnasional, para atlet melibatkan imajinasi ini saat mereka secara aktif menghasilkan mobilitas mereka sendiri (Carter, 2011).

Namun di banyak cabang olahraga ini, kemungkinan terjadinya mobilitas ke atas melalui olahraga jauh melebihi kemungkinan yang ada (Eitzen, 2009). Di Amerika Serikat, misalnya, mengingat perjalanan dari sekolah menengah ke profesional, peluang seseorang secara keseluruhan sangatlah kecil: dari jutaan orang yang bermain sepak bola di sekolah menengah, hanya 254 pemain yang direkrut ke NFL pada tahun tertentu (NCAA, 2020). Dalam hal ini, kekuatan imajinasi olahraga global tampaknya membengkokkan pilihan sehari-hari bahkan ketika menghadapi kenyataan yang berlawanan—bagi setiap perguruan tinggi atau atlet profesional yang ternama, ada ribuan orang yang tidak mengalami kemajuan, dan beberapa di antaranya mengalami konsekuensi yang menyedihkan bagi mereka atau keluarga mereka.

Jika kita menolak narasi mobilitas olahraga global yang abstrak, apa yang terungkap dari perhatian terhadap jaringan tertentu? Di negara-negara seperti Hawaii, yang memiliki kesenjangan ekonomi rasial yang signifikan dan kesenjangan besar antara pendidikan negeri dan swasta (Okamura, 2008), olahraga remaja merupakan salah satu strategi untuk mengakses peluang sekolah swasta mulai dari sekolah menengah ke atas. Meskipun hal ini mungkin menempatkan pelajar-atlet dengan baik dalam program feeder untuk perekrutan

perguruan tinggi, mereka lebih cenderung memberikan akses ke jaringan sosial dan pengalaman pendidikan yang istimewa. Hal ini juga memberikan hasil, meskipun titik-titik tersebut lebih sulit untuk dihubungkan karena tertundanya rangkaian hasil yang mungkin terwujud beberapa tahun ke depan. Mengabstraksi partisipasi olahraga pemuda sebagai bagian dari sistem global atau nasional hanya menghasilkan sebagian wawasan, dan mengesampingkan faktor-faktor yang sangat bersifat lokal namun dibentuk oleh lingkaran konteks yang semakin konsentris. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan lokal ini tidak sepenuhnya tercermin dalam visi mobilitas atau akses terhadap modal (sosial, ekonomi, atau budaya). Bagi beberapa kelompok seperti keturunan lokal Jepang yang bermain sepak bola atau baseball tanpa alas kaki sepanjang abad kedua puluh, menunjukkan kewarganegaraan budaya khususnya setelah pemboman Pearl Harbor adalah kuncinya; bagi yang lain, seperti banyak rekrutan sepak bola Polinesia, olahraga menjadi cara untuk mewakili bangsa, melawan rasisme budaya, dan memperoleh sarana untuk memenuhi kewajiban budaya seperti tautua atau pelayanan kepada keluarga dan komunitas (F.L. Uperesa, 2014a). Di Te-Moananui-a-Kiwa dan sekitarnya, partisipasi berkelanjutan juga direproduksi melalui komitmen keluarga dan komunitas terhadap olahraga tertentu. Kaitan antara identitas budaya dan loyalitas tanah air dengan keterwakilan di lapangan dibentuk oleh namun pada akhirnya melampaui kerangka yang disediakan oleh narasi mobilitas global yang didorong oleh kapitalisme. Contoh-contoh terkenal dari liga rugby menantang kebijaksanaan konvensional dalam mengejar bayaran besar atau tim dengan peringkat tertinggi, karena para pemain Tonga yang memiliki posisi baik di luar negeri memilih untuk bergabung dengan tim yang berperingkat lebih rendah dan memiliki dana yang lebih sedikit untuk mewakili kampung halaman leluhur mereka di Rugby. Piala Dunia Liga, dan dengan demikian memenuhi kepekaan budaya seputar pelayanan dan kesetiaan. Kesempatan untuk “Mati demi Tonga” di lapangan olahraga, tulis salah satu pemain selama perjalanan, “tidak seperti apa pun yang pernah saya alami dalam karier saya” (Tupou, 2017).

Melihat lebih dekat jalur mobilitas olahraga di Pasifik mencakup struktur yang didorong oleh modal di tingkat atas dan dampaknya di tingkat amatir dan pemuda, namun para pemain menavigasi rute dengan sejarah, kemungkinan, dan kendala tertentu. Dalam hal ini, pandangan mengenai “olahraga global” kurang berguna dibandingkan memperhatikan hubungan dan kekhususan transnasional, serta mempertimbangkan pandangan dunia tentang mobilitas yang mungkin sejalan dengan konsepsi “transnasional” namun tidak secara eksklusif melekat atau dibatasi oleh negara-bangsa. Seperti dalam diskusi sebelumnya mengenai ontologi gerakan Pasifik, memahami dunia kehidupan dan pembuatan makna yang melekat pada upaya mobilitas olahraga juga memerlukan perhatian pada aspek budaya dan perbedaan yang mungkin tidak sepenuhnya ditangkap oleh kerangka Barat. Oleh karena itu, memahami mobilitas olahraga memerlukan pendekatan kaleidoskopik di mana tingkat, konteks, dan ruang lingkup berubah menjadi fokus, selalu terikat pada tempat dan lokalitas.

13.3 MEMIKIRKAN KEMBALI IMAJINARI GLOBAL

Apa yang berguna dan apa yang tertinggal dalam kerangka globalisasi? Apa yang terjadi jika upaya memanfaatkan modal sebagai strategi individu atau kolektif untuk memanfaatkan fantasi milenial mengenai globalisasi gagal mencakup dan menjelaskan apakah, bagaimana, dan mengapa masyarakat berpindah? Kapan mereka meratakan sejarah, kemungkinan, dan perbedaan penting yang membentuk gerakan? Apa yang bisa kita peroleh dari perubahan lensa yang sering digunakan di pusat-pusat kekuasaan di dunia Barat? Mengutip mendiang Biggie Smalls yang hebat sebagai provokasi, apakah itu semua hanya mimpi—seperti filamen halus yang ditenun di depan mata kita?

Pergeseran ke sudut pandang yang berdasarkan pada pandangan dunia Pasifik memungkinkan kita untuk membuka tabir, dan kegunaan serta batasan globalisasi menjadi lebih jelas. Sebagai konsep agregasi, ini adalah heuristik yang berguna, namun untuk kejelasan menuju pemahaman yang lebih dalam, kita harus memperhatikan kemungkinan, koneksi transnasional, dan persaingan ontologi, nilai, dan kepekaan. Hal ini memungkinkan kita untuk menghubungkan hal-hal lokal dengan hal-hal yang ada di luar cakrawala, dan bersama-sama dengan pendekatan kaleidoskopik memberi kita wawasan yang lebih nyata mengenai perubahan besar dalam dunia kehidupan di zaman kita. Menerima istilah-istilah dan asumsi-asumsi khayalan globalisasi tidak hanya membatasi pandangan kita, namun juga mempertahankan kekuatan ontologi dan ideologi Barat yang menyamar sebagai sesuatu yang universal dan menjadikan semua hal lainnya marginal.

BAB 14

MENATAP PUSAT AKADEMIK

Memperdebatkan Globalisasi Saat Bumi Terbakar

Sejak tahun 1990an, para sarjana di akademi Euro-Amerika telah memperdebatkan dan menganalisis penyebab dan konsekuensi globalisasi. Namun, dalam literatur yang dominan dan paling banyak dikutip, para sarjana jarang membahas hubungan globalisasi dengan alam dan proses yang diakibatkannya berupa pemanasan global, degradasi lingkungan, kepunahan massal keanekaragaman hayati, dan ketidakadilan iklim yang terkait. Jika para sarjana memang mengacu pada lingkungan hidup, biasanya istilah yang digunakan adalah “keberlanjutan” yang tidak jelas yang diperlukan untuk mempertahankan logika neoliberal dari status quo. Esai ini membahas tentang kurangnya perhatian serius dalam literatur mengenai globalisasi dan kerusakan ekologis yang mengarah pada era keruntuhan planet yang akan segera terjadi. Saya merenungkan mengapa hal ini terjadi dan menanyakan apa yang disarankan oleh sikap diam terhadap alam dalam kaitannya dengan politik produksi ilmiah. Saya berpendapat bahwa para pakar globalisasi sebagian besar mencerminkan perspektif Eurosentris dan antroposentris yang didasari oleh pemikiran Pencerahan yang mencakup biner manusia/alam dan logika kemajuan, modernitas, dan ekstraktivisme sumber daya. Pandangan dunia yang tidak jelas ini mengasumsikan dominasi ilmu pengetahuan yang berbasis di Barat dan menghalangi kebutuhan mendesak untuk berpikir secara lebih holistik tentang masa depan global umat manusia yang sangat terikat dengan dunia yang lebih dari sekedar manusia. Saya menyimpulkan bahwa pandangan dunia yang dominan di wilayah utara dan keterbatasan-keterbatasannya menunjukkan semakin tidak relevannya teori globalisasi yang dihasilkan oleh akademi Euro-Amerika.

Pada musim panas tahun 2021, saya sangat beruntung bisa melakukan perjalanan ke Yunani selama sepuluh hari, meskipun terik di bawah suhu musim panas yang memecahkan rekor sambil menghindari bencana kebakaran hutan yang melanda kota-kota di utara Athena. Ketika sebagian wilayah Yunani dan Turki berkobar, saya kembali ke Kalifornia dan disambut dengan berita tentang Kebakaran Dixie, kebakaran hutan lain yang tak terkendali yang memakan lahan luas di utara Sacramento. Faktanya, di seluruh Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Afrika, dan daerah pedalaman Siberia, kebakaran dahsyat terjadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai penanda krisis iklim ekstrem, kebakaran ini merupakan puncak dari kapitalisme ekstraktif yang telah berlangsung selama berabad-abad dan kebijakan neoliberal selama beberapa dekade terakhir yang memungkinkan terjadinya eksploitasi ekonomi global terhadap sumber daya alam dan manusia yang sebagian besar tidak diatur (Malm, 2016).

Saat berada di Yunani, saya menerima undangan luar biasa dari para pakar globalisasi terkemuka untuk berkontribusi pada buku khusus berjudul *Globalization: Past, Present, Future*. Dalam panggilan pembuatan esai, para editor menyarankan untuk membahas topik-

topik seperti tata kelola global, populisme, digitalisasi, sistem ekonomi baru, bentuk demokrasi baru, serta model teoretis dan metodologis untuk lebih memahami globalisasi dan konfigurasi ulangnya di abad kedua puluh satu. Mereka mendesak para kontributor untuk terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai “Kekacauan Besar” dan kondisi ketidakamanan, ketidakpastian, dan dislokasi yang terjadi saat ini. Dan mereka menyerukan, antara lain, evaluasi dinamika globalisasi dari perspektif Pribumi, Selatan, pascakolonial, atau titik-temu yang mengganggu narasi dominan di akademi Euro-Amerika. Yang perlu diperhatikan, hal yang tidak disebutkan sama sekali dalam daftar “ancaman disintegrasi serius terhadap kohesi sosial dan stabilitas kehidupan sehari-hari” adalah perusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang terjadi dalam skala global serta krisis iklim dan ketidakadilan yang berdampak pada dunia.

Dalam esai ini saya berargumentasi bahwa hubungan antara globalisasi—betapapun definisinya—dan keruntuhan ekologi yang akan segera terjadi merupakan hal yang penting dalam pembicaraan mengenai proses global di masa lalu, masa kini, dan masa depan serta teori-teori terkait globalisasi. Degradasi lingkungan mempunyai sejarah yang panjang, terkait dengan ekspansi kolonial, imperialisme, kapitalisme, dan penjarahan sumber daya di Afrika, Timur Tengah, dan Dunia Baru oleh negara-negara Eropa. Degradasi lingkungan yang ekstrim menandai era kita saat ini, yang dimungkinkan oleh logika neoliberal dan neokolonial serta proses ekstraktivisme yang tidak diatur baik di Dunia Selatan maupun Dunia Utara. Prediksi masa depan mengenai degradasi lingkungan dan gangguan terhadap sistem atmosfer, lautan, dan biologi bumi menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi keruntuhan dari segala hal yang kita anggap remeh (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, 2022). Filsuf Prancis Bruno Latour mengatakan bahwa bumi sedang berbalik arah, dan daratan yang kita dengan penuh percaya diri tempati di masa lalu kini secara aktif menempati kita (Latour, 2018). Kita memang sedang menghadapi sebuah permasalahan yang sangat meresahkan! Argumen utama saya adalah bahwa masa depan kita bersama adalah globalisasi yang didorong oleh iklim. Yang saya maksud dengan ini adalah krisis iklim telah menjadi konteks yang lebih luas di mana semua diskusi mengenai globalisasi harus dianalisis. Perusakan alam oleh manusia bukanlah sebuah narasi yang saling bersaing mengenai globalisasi serta pemenang dan pecundangnya, seperti yang dikatakan beberapa orang. Perusakan alam merupakan narasi yang dominan dan sentral karena pada akhirnya menjadi dasar cerita akhir kolektif kita. Jika hutan terbakar, air laut naik, dan air mengering, maka kerugian alam pada akhirnya adalah kerugian umat manusia itu sendiri. Jadi, kita bisa berdebat sepanjang hari: Apakah globalisasi didorong oleh pasar, seperti yang diyakini oleh banyak sarjana Barat? Atau apakah politik memainkan peran yang lebih besar? Bagaimana dengan konflik budaya, agama, atau peradaban? Maksud saya adalah bahwa konstruksi modernis mengenai alam sebagai sesuatu yang berbeda dari manusia, sebagai sebuah arena untuk diidealkan, dikelola, atau dieksploitasi, telah membutuhkan kita dari melihat bencana ekologis yang terjadi di hadapan kita. Kita telah memasuki era antroposentris baru di mana sistem planet bumi melemahkan hak pilihan manusia itu sendiri. Bagi para akademisi, hal ini berarti bahwa penyebab dan konsekuensi dari perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia harus

mencerminkan dan menginformasikan semua permasalahan global, baik itu pandemi, polarisasi politik, migrasi massal, infrastruktur, kelaparan, ketidakstabilan ekonomi, perang nuklir, kegagalan mekanisme tata kelola global, dan seterusnya.

Krisis iklim adalah alasan saya memutuskan untuk menerima undangan untuk berkontribusi pada buku ini. Saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati rekan-rekan saya atas apa yang saya anggap sebagai pemikiran mereka yang keliru, namun saya ingin menekankan bahwa kita tidak bisa terus-terusan berteori tentang globalisasi dan penyebab serta konsekuensinya, baik yang menang maupun yang kalah, tanpa mengedepankan sejarah panjang yang melibatkan globalisasi. Kehancuran yang kejam terhadap masyarakat, hewan, dan ekosistem yang rapuh, khususnya di negara-negara Selatan. Esai ini merupakan seruan mendesak bagi para akademisi di Dunia Utara untuk “melihat” dari komputer mereka dan pandangan dunia Eurosentris yang istimewa dan menganggap serius keruntuhan ekologi dan masa depan kolektif kita yang semakin rapuh. Jika kita ingin memperlambat krisis iklim, kita perlu mengatasi biner dominan manusia/alam dan memperbarui kesadaran tentang hubungan antara manusia dan dunia yang lebih dari sekedar manusia. Kesadaran ini telah hilang selama berabad-abad dalam pengetahuan yang berasal dari akademi Euro-Amerika dan tidak ada dalam sebagian besar teori yang ada saat ini di negara-negara Utara mengenai globalisasi.

14.1 PELAJARAN DARI ZAMAN KUNO

Seperti yang diingatkan oleh Manfred B. Steger, salah satu ahli teori globalisasi terkemuka, para astronom Yunani pada abad ketiga SM termasuk yang paling awal memperkenalkan gagasan tentang Bumi sebagai bola bulat. Orang Yunani kuno membayangkan akses ke inti bumi bulat ini ada di Delphi, sebelah utara Athena, tempat Oracle Apollo diajak berkonsultasi oleh raja, pemimpin militer, dan elit dari seluruh dunia yang ingin mengetahui masa depan. Meskipun Apollo adalah dewa matahari, kata *apollo* berarti batu. Menurut mitologi Yunani, Chronos, dewa langit, dan istrinya Rhea, putri dewi bumi Gaia, memiliki anak. Tapi Chronos percaya pada ramalan bahwa salah satu anaknya akan mengambil alih tahtanya, dan untuk mencegah kemungkinan ini, dia melahap setiap anak yang lahir. Rhea sangat tertekan sehingga dia melahirkan anak terakhirnya, bayi Zeus, di sebuah gua di pulau Kreta, menggantikan anak tersebut dengan batu yang dibungkus dengan lampin (*omphalos*), yang kemudian dimakan Chronos.

Dalam mitos terkait, Zeus mengirim dua elang ke ujung dunia yang berlawanan (timur dan barat) untuk mencari “Nenek Bumi” atau Gaia. Mereka terbang keliling dunia dan berpapasan di Delphi. Zeus kemudian menyatakan Delphi sebagai pusat bumi tempat *omphalos*, atau pusat/rahim Gaia ditemukan, dan menempatkan sebuah batu monumen di sana. Wisatawan yang mencari Oracle memasuki kawasan Delphi yang ketakutan di mana mereka disambut oleh batu pusat di atas pilar, diapit oleh patung elang. Ini pasti merupakan pemandangan yang menakutkan bagi para pelancong yang melihat ke bawah dari cagar alam Delphi, melintasi kuil-kuil dan situs suci lainnya, ke dalam Lembah Sungai Pleistos yang luas di bawahnya. Saat ini monumen marmer asli dapat dilihat di Museum Arkeologi Delphi di

dekatnya, dan di luar kawasan tersebut, versi batu yang disederhanakan menandai tempat di mana monumen tersebut awalnya dipasang (gambar 14.1).



GAMBAR 14.1. Batu pusar atau omphalos. Delphi, Yunani, 2021.

Kisah kuno lainnya yang melibatkan pusar atau omphalos mengelilingi para biarawan di Gunung Atos, sebuah gunung dan semenanjung di timur laut Yunani. Gunung ini dikenal sebagai Gunung Suci dan merupakan rumah para biarawan Yunani dan Kristen awal sejak tahun 200 M. Meskipun agama Kristen merupakan agama baru pada saat itu, agama ini perlahan-lahan memperoleh kekuatan di seluruh kawasan, dan pada tahun 312 M, Kaisar Romawi Konstantinus menjadi pendukungnya karena alasan politik dan keuangan, sehingga menjadikan agama ini menonjol. Konstantin percaya bahwa agama yang berdasarkan pada penyembahan kepada satu tuhan, berbeda dengan banyak tuhan yang disembah oleh orang Yunani, akan menjadi mekanisme yang lebih baik untuk menyatukan Kekaisaran Romawi yang luas. Pada tahun 313 M, Konstantinus mengeluarkan Dekrit Milan, yang melegalkan agama Kristen di seluruh negerinya yang luas, dan dengan demikian mulailah perlahan-lahan menurunnya ritual keagamaan Hellenic yang semakin dianggap kafir dan dilarang. Banyak biara Kristen dibangun di Gunung Atos, hal ini berkaitan dengan menurunnya pengabdian Yunani kepada dewa-dewa Olympian dan kekuatan Delphi dan Oracle. Pada tahun 393 M, Kaisar Theodosius memerintahkan penutupan semua tempat suci pagan termasuk Delphi, yang diambil alih oleh umat Kristen dan akhirnya ditinggalkan pada abad ketujuh.

Meskipun informasi mengenai hal ini masih terbatas, namun terbukti bahwa para biarawan Kristen yang tinggal di biara-biara di Gunung Atos melakukan isolasi sosial, terutama dari perempuan. Mereka juga terlibat dalam bentuk kegairahan untuk membantu mediasi spiritual mereka dengan Tuhan termasuk menatap pusar. Menurut John G. Millingen, seorang ahli bedah yang bertugas di tentara Inggris pada awal abad kesembilan belas, para biarawan adalah omphalo-psikiater, atau pengamat pusar; Millingen menulis bahwa mereka “berpura-pura atau membayangkan bahwa mereka merasakan kegembiraan surgawi ketika menatap

daerah pusat mereka, saat berbicara dengan Dewa” (1839: 40). Bentuk mediasi unik ini divisualisasikan dalam sebuah patung marmer Romawi berukuran besar yang berasal dari abad kedua, yang disimpan di Museum Louvre (gambar 14.2). Saat ini, ungkapan menatap pusat mengacu pada seseorang yang mementingkan diri sendiri, kehilangan perspektif, dan memiliki keinginan terbatas untuk bergerak, berubah, atau berhubungan dengan dunia sekitarnya.



GAMBAR 14.2. Satir di Atlantik. Empat patung yang menggambarkan omphaloskepsis. abad ke-2. Romawi, Marmer. Museum Louvre. Wikimedia Commons.

Sejarah Yunani dan Romawi dari zaman kuno ini memberikan kontras yang menarik dan mewakili mode imajinasi manusia yang berbeda. Pusat Delphi sebagai pintu gerbang dunia yang menghadap ke luar menggarisbawahi hubungan antara timur dan barat, hewan dan manusia, serta melintasi ruang dan waktu. Di Delphi dunia adalah fokus pandangan, dan pusat adalah pintu masuk ke lingkungan inklusif yang mencakup hubungan antara perempuan dan laki-laki, hewan, alam, dewa, serta bintang, matahari, dan bulan. Sebaliknya, imajinasi para pengamat pusat Gunung Atos bersifat melihat ke dalam, eksklusif, mementingkan diri sendiri, dan antroposentris. Dalam patung tersebut, manusia laki-laki adalah pengamat utama yang melihat ke belakang pada diri mereka sendiri dengan rasa kagum, tubuh mereka adalah saluran yang melaluinya keilahian laki-laki diterima. Dalam pandangan dunia Kristen yang eksklusif ini, yang hilang, jika tidak dilupakan, adalah imajinasi Hellenisme yang ekspansif dan jauh lebih holistik.

Yang menonjol dalam kebangkitan Kekaisaran Romawi atas dunia Yunani adalah hubungan instrumental antara agama Kristen, imperialisme, dan perdagangan. Yang sering diabaikan adalah bahwa agama Kristen telah digunakan oleh Kekaisaran Romawi ratusan tahun sebelum agama tersebut digunakan oleh orang-orang Eropa, sehingga memperluas jangkauan kekaisaran mereka hingga ke Timur Tengah, Afrika, dan Dunia Baru. Jangkauan teritorial ini dibenarkan melalui Doktrin Penemuan Paus (1493) dan diperkuat melalui konsep terra nullius, yang secara hukum membenarkan kepemilikan tanah oleh pihak barat dan pendirian jaringan perdagangan kapitalis. Dengan kata lain, di era modern, agama Kristen (baik denominasi Katolik maupun Protestan) berfungsi sebagai kerangka kelembagaan dan pembenaran moral atas penaklukan tanah, pembantaian masyarakat adat dan masyarakat berkulit gelap, serta ekstraksi sumber daya alam untuk diperdagangkan. mendapatkan keuntungan kembali ke kampung halamannya di tanah air Eropa.

14.2 PERANG PARADIGMA

Perbedaan dalam cara manusia membayangkan tempat mereka di dunia kuno—antara Delphi sebagai pusat yang membuka ke dunia di satu sisi, dan bisku yang mengamati pusat di sisi lain—menyerap selama berabad-abad dan muncul kembali saat ini dalam apa yang oleh para sarjana disebut perang paradigma. Frasa ini mengacu pada cita-cita yang bersaing tentang bagaimana masyarakat seharusnya hidup dan berada di dunia dan sering digunakan untuk menggambarkan secara dangkal perbedaan antara masyarakat Eropa dan non-Eropa—yang saat ini sering disebut sebagai kontras antara pandangan dunia Global Utara, yang diinformasikan oleh pemikiran modernis, dan pandangan dunia Global Selatan, yang berkaitan dengan spektrum kosmologi yang luas dan berbagai jenis pengetahuan yang secara historis dianggap (oleh Barat) primitif atau pramodern sehingga inferior.

Tentu saja, tidak ada pandangan dunia Global Utara yang homogen, sama seperti tidak ada pandangan dunia di wilayah Selatan yang homogen. Di mana pun seseorang berada, selalu ada pemikir, filsuf, dan sistem kepercayaan alternatif yang bertentangan dengan kerangka epistemologis dan konseptual yang dominan. Namun, di era Eropa pasca-Pencerahan, hubungan kekuasaan/pengetahuan dan lembaga-lembaga yang melaluinya praktik tersebut “membiarkan” gagasan-gagasan tertentu berkembang dan gagasan-gagasan lain diabaikan, dipinggirkan, dibungkam, atau bahkan dihapuskan (Foucault, 1995). Di Eropa dan Amerika Serikat pada akhir abad ke-18 dan ke-19, dan di berbagai negara jajahan, muncul serangkaian nilai-nilai, pengalaman, dan wacana yang dominan yang dijalin bersama melalui lembaga-lembaga negara dan sosial, logika kapitalistik ekstraktif, dan hierarki budaya superioritas ras Kristen kulit putih (Said, 1979). Imajinasi ini tidak statis atau tetap dan sangat dipengaruhi oleh pertemuan dengan Orang Lain di wilayah kolonial di Amerika, Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Pasifik (Memmi, [1965] 1991; Fanon, 1968; Lowe, 2015). Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa pandangan dunia Barat telah terkonsolidasi pada akhir abad kesembilan belas, diperkuat dengan hukum internasional dan pengetahuan ilmiah, dan terkait erat dengan perluasan ekonomi politik global yang berpusat pada industrialisasi Eropa dan promosi perdagangan dunia; Pandangan dunia ini cukup kohesif sehingga pandangan-pandangan yang

terkait dengan Pan-Afrikaisme pada periode dekolonial pasca-Perang Dunia II mendorong secara eksplisit seperangkat nilai-nilai alternatif dan “pembentukan dunia.

Perulangan baru-baru ini mengenai perbedaan antara perspektif Eropa dan non-Eropa muncul dalam volume *Paradigm Wars: Indigenous Peoples’ Resistance to Globalization* (Perlawanan Masyarakat Adat terhadap Globalisasi) yang telah diedit. Publikasi ini merupakan intervensi penting yang muncul dari perbincangan di kalangan masyarakat adat yang membentuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 2007. Seperti yang ditulis Jerry Mander dalam pendahuluan buku ini, meskipun terdapat banyak komunitas masyarakat adat di sekitar kita, di dunia, yang seringkali sangat berbeda satu sama lain, mereka biasanya memiliki “nilai-nilai utama yang sama seperti hubungan timbal balik dengan alam, batasan dan keseimbangan ekonomi, pentingnya nilai-nilai komunitas dan kepemilikan kolektif, serta integrasinya dan kesetaraan dengan alam dunia” (Mander, 2006). Kosmologi, mitologi, dan apresiasi holistik masyarakat adat yang kompleks terhadap hubungan manusia dengan dunia yang lebih dari sekadar manusia mencerminkan beberapa elemen penting dalam nilai-nilai budaya “paganisme” Yunani Kuno yang direndahkan.

Paradigma yang berlawanan, menurut Mander, mencerminkan perspektif Barat modernis yang berakar kuat pada logika kolonialisme Eropa dan kapitalisme ekstraktif serta mendominasi ekonomi politik global saat ini. Paradigma ini berpusat pada ideologi pertumbuhan ekonomi, kemajuan, dan individualisme. Dan hal ini dipenuhi dengan biner manusia/alam yang sangat terasialisasi dan gender, menempatkan orang-orang tertentu (misalnya, kulit putih, laki-laki) di atas semua kehidupan biologis lainnya sekaligus memutus hubungan semua manusia dari lingkungan tempat mereka tinggal. Seperti yang dicatat oleh William Cronon dalam esainya yang sangat berpengaruh, “The Trouble with Wilderness; atau, Kembali ke Alam yang Salah,” pemikiran intelektual Barat membangun gambaran khusus tentang apa yang dimaksud dengan alam. Dalam kata-katanya: “Tempat dimana kita berada adalah tempat dimana alam tidak berada”. Filsuf ekofeminis, Val Plumwood, mengambil pemikiran ini selangkah lebih maju dalam bukunya yang penting, *Feminism and the Mastery of Nature*, yang menyebut biner manusia/alam sebagai “khayalan dasar Barat” dan berargumen bahwa ini adalah “doktrin berbahaya, yang sangat berimplikasi pada krisis lingkungan hidup saat ini.” Plumwood menyatakan bahwa biner ini diperkuat oleh serangkaian “dualisme yang saling terkait dan saling memperkuat. . . yang membentuk garis patahan yang melintasi seluruh sistem konseptual [budaya Barat]”. Beberapa di antaranya yang lebih jelas termasuk laki-laki/perempuan, pikiran/tubuh, tuan/budak, beradab/primitif, sah/melanggar hukum, dan Kristen/kafir.

Paradigma Barat modern mencerminkan pemahaman dunia yang mementingkan diri sendiri, individualistis, dan berorientasi pada keuntungan. Sebagai bagian dari proses komodifikasi kapitalisme, masyarakat Eropa menganggap lingkungan alam sebagai objek dan sumber daya yang dapat digunakan untuk kepentingan manusia dan keuntungan finansial. Paradigma ini dibenarkan melalui penciptaan hierarki rasial di mana masyarakat kulit putih dianggap lebih unggul dibandingkan masyarakat berkulit gelap yang “tidak beradab” dan

lingkungan alam yang mereka tinggali. Mudah-mudahan, hierarki rasial ini memungkinkan adanya hubungan eksploitatif antara penjajah dan yang dijajah serta menciptakan pandangan dunia yang menganggap unsur-unsur alam (termasuk masyarakat adat dan budak Afrika yang biasanya tidak dianggap manusia) secara luas dianggap sebagai sumber daya yang dapat dimiliki, dijajah, diternakkan, dibunuh, ditambang, digunduli hutan, dibakar, tercemar, dan sebagainya. Sistem kolonialisme, kapitalisme, dan perbudakan yang saling terkait ini—yang oleh Cedric Robinson disebut sebagai “kapitalisme rasial”—masih ada dalam dunia kita saat ini. Sistem ini mempertahankan kekuatan elit kapitalis global dan terus mempengaruhi praktik kapitalis ekstraktif yang secara dramatis menyebabkan pemanasan global. menciptakan komunitas yang siap pakai, menghancurkan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang rapuh, serta mendorong keruntuhan planet. Seperti yang kita ketahui bersama, kapitalisme ekstraktif memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap negara-negara miskin dan masyarakat rentan yang sebagian besar tinggal di negara-negara Selatan. Rob Nixon dengan fasih berargumentasi bahwa mereka yang berada di negara-negara Utara sering kali tidak dapat melihat “kekerasan yang terjadi perlahan-lahan” yang menimpa mereka yang tinggal di negara-negara Selatan, “sebuah kekerasan yang tidak spektakuler dan tidak terjadi seketika, melainkan bersifat bertahap, yang dampak buruknya tertunda selama bertahun-tahun atau puluhan tahun atau bahkan lebih lama lagi. abad” (Nixon, 2011). Banyak orang yang tinggal di masyarakat industri kaya menjalani kehidupan yang tanggap terhadap hal-hal yang bersifat langsung dan nyata, seperti siklus berita perusahaan yang bergerak cepat. Salah satu akibatnya adalah respons politik dan emosional kita tidak cukup untuk memahami aliran racun yang mengalir ke sungai, yaitu tetesan air. . . menetes . . . menetes . . . gletser yang mencair, atau keheningan kicau burung atau berkurangnya senandung lebah (Carson, [1962] 2002). Kita juga tidak melihat kontraktor pertambangan menembak penduduk asli pelindung tanah jauh di dalam hutan hujan Amazon atau tentara bayaran yang disewa oleh Monsanto, perusahaan benih multinasional, meracuni petani kecil yang menolak menanam benih hasil rekayasa genetika. Nixon melanjutkan, “Menghadapi kekerasan secara perlahan berarti mengambil, dalam segala kompleksitasnya, politik yang terlihat dan yang tidak terlihat” (Nixon, 2011).

Perang paradigma menunjukkan adanya unsur-unsur yang mungkin hilang dalam teori globalisasi yang dominan. Sebagian besar teoritikus globalisasi berpandangan pada satu sisi kesenjangan tersebut, dan kajian mereka mencerminkan perspektif Eropa-Amerika yang modernis. Namun jika kita menganggap serius paradigma-paradigma yang berlawanan, kita akan melihat adanya keragaman cara berpikir dan pengetahuan, perspektif-perspektif lain yang menarasikan kontra-tradisi, sejarah dan penceritaan, dan yang terpenting, cara-cara alternatif dalam hidup bersama alam.

14.3 DUNIA YANG LEBIH DARI MANUSIA

Melawan sistem ekonomi global yang bersifat ekstraktivisme dan kapitalisme rasial, saya berpendapat bahwa kita perlu membuka mata, melihat ke atas, dan berpikir dengan dan melalui alam untuk mengatasi biner manusia/alam yang mendominasi pemikiran dominan di Dunia Utara. Hal ini berarti mempelajari kembali pemahaman tentang hubungan antara

manusia dan tempat di mana manusia tinggal dan pada akhirnya bergantung pada kelangsungan hidup mereka. Tentu saja, saya tidak sendirian dalam argumen ini, dan semakin banyak sarjana di akademi Euro-Amerika yang mendorong perluasan pendekatan teoretis, analitis, dan metodologis yang memperhatikan secara serius hubungan konstitutif antara manusia dan alam. Hal ini mencakup berbagai pakar yang terkait dengan ekofeminisme, materialisme baru, pemikiran sosioekologis, dekolonialisme, sastra posthuman dan non-manusia. Dan mungkin yang paling penting, hal ini mencakup karya para sarjana Pribumi yang membantu para sarjana non-Pribumi memahami keterbatasan model teoretis mereka mengingat krisis iklim yang sedang berlangsung.

Apa yang saya maksud dengan dunia yang lebih dari sekedar dunia manusia? Sering disebut sebagai dunia selain manusia atau hubungan alam-budaya, konsepnya cukup sederhana. Ungkapan tersebut mengacu pada dunia yang mencakup dan melampaui manusia, yang menggarisbawahi saling ketergantungan yang kompleks antara seluruh kehidupan biologis di planet ini. Hal ini pada dasarnya berupaya untuk mengganggu biner dominan manusia/alam dan menyangkal perspektif yang memandang manusia lebih unggul dalam keyakinan bahwa mereka dapat mengendalikan alam. Hal ini berarti menganggap manusia hidup di dalam dan menjadi bagian dari alam—yang disebut oleh Donna Haraway sebagai budaya alam.

Istilah “dunia yang lebih dari sekedar manusia” sering dikaitkan dengan wawasan dan pengetahuan mendalam yang dimiliki oleh First Nations dan komunitas Pribumi yang melihat adanya kekerabatan dan hubungan intim di antara semua benda biologis. Dalam konteks darurat iklim, istilah ini digunakan oleh para sarjana dan aktivis untuk menyoroti ketergantungan kita pada hutan, sungai, lautan, dan udara bersih untuk kelangsungan hidup manusia (Kohn, 2013). Dalam kerangka yang lebih dari sekedar manusia, manusia tidak dipahami sebagai entitas otonom yang berbeda dari alam. Sebaliknya, menurut antropolog Tim Ingold dan Gisli Palsson, manusia adalah “makhluk yang cair, dengan batas-batas yang fleksibel dan berpori; mereka selalu tertanam dalam hubungan, tidak murni biologis atau sosial, dan esensi mereka paling baik diterjemahkan sebagai sesuatu yang terus-menerus terbentuk dan bukan sebagai makhluk spesies yang tetap dan tidak bergantung pada konteks” (Ingold & Palsson, 2013). Cara berpikir relasional ini sejalan dengan banyak sarjana Pribumi. Misalnya, Jack Forbes, seorang sarjana Pribumi terkemuka dan pendiri salah satu program Studi Penduduk Asli Amerika yang pertama di Universitas California, Davis, menulis:

Saya bisa kehilangan tangan saya dan masih hidup. Saya bisa kehilangan kaki saya dan masih hidup. Saya bisa kehilangan mata dan masih hidup. . . Tapi kalau aku kehilangan udara, aku mati. Jika saya kehilangan matahari, saya mati. Jika saya kehilangan bumi, saya mati. Jika saya kehilangan air, saya mati. Jika saya kehilangan tumbuhan dan hewan, saya mati. Semua hal ini lebih merupakan bagian dari diriku, lebih penting bagi setiap napasku, dibandingkan apa yang disebut sebagai tubuhku.

Pemikiran dominan di Dunia Utara yang telah berlaku selama berabad-abad adalah bahwa perekonomian, masyarakat, dan sistem ekologi merupakan arena yang berbeda namun saling tumpang tindih. Sebaliknya, pandangan dunia yang lebih dari sekedar manusia

memvisualisasikan hubungan-hubungan ini sebagai sesuatu yang sinergis dan saling konstitutif namun pada akhirnya dibingkai oleh sistem ekologi, atau yang sering disebut dengan jaringan kehidupan. Entitas relasional ini tidak bersifat monolitik (keanekaragaman alam, keberagaman masyarakat, keberagaman perekonomian, keberagaman hukum, dan sebagainya). Terlebih lagi, dalam pandangan dunia yang lebih luas dari manusia, jika spesies manusia, seperti dinosaurus, punah, maka jaringan kehidupan akan beradaptasi dan beregenerasi tanpa kehadiran manusia. Artinya, bertentangan dengan pemikiran arus utama Barat, manusia (misalnya Elon Musk) tidak berada dalam kendali dan mampu—melalui teknologi, pengetahuan ilmiah, dan inovasi wirausaha—untuk mengelola dan mengeksploitasi alam tanpa batas. Arogansi pemikiran antroposentris inilah yang menyebabkan keadaan darurat ekologis yang kita semua hadapi saat ini, meskipun masyarakat miskin, terpinggirkan, dan masyarakat adat adalah pihak yang paling terkena dampaknya.

Maksud saya adalah bahwa elit politik dan ekonomi berupaya membungkam perspektif alternatif seperti pandangan dunia yang lebih dari sekedar pandangan manusia karena asimetri kekuatan struktural global memerlukan hal tersebut. Inilah sebabnya, menurut penulis India Amitav Ghosh dalam bukunya *The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis* (2021), para elit global memahami perubahan iklim sebagai masalah “teknokonomi”, namun bagi masyarakat miskin di dunia, baik di negara kaya maupun miskin, hal ini terutama merupakan masalah keadilan, yang berakar pada sejarah ras, kelas, dan geopolitik. Dari sudut pandang ini, perundingan iklim bukan hanya mengenai emisi dan gas rumah kaca; mereka justru bergantung pada isu-isu yang tidak, dan tidak akan pernah bisa didiskusikan, yaitu isu-isu yang pada akhirnya berkaitan dengan distribusi kekuasaan global.

14.4 TEORI GLOBALISASI YANG BERKEDIP

Sayangnya, sebagian besar ahli teori globalisasi di negara-negara Utara masih tidak terpengaruh oleh perbincangan yang muncul mengenai dunia yang lebih dari sekedar manusia dan seruan untuk memikirkan kembali hubungan manusia dengan alam, yang sangat relevan mengingat keadaan darurat iklim yang akan segera terjadi. Dengan kata lain, para ahli teori ini belum terlibat dengan apa yang terjadi dalam berbagai keilmuan kritis dan teori sosial inovatif di bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial. Dan di luar akademi, para ahli teori ini tampaknya kebal terhadap meningkatnya krisis iklim dan gerakan keadilan sosial dan lingkungan terkait yang sulit untuk diabaikan. Perlu diingat bahwa tahun 2019 menandai tonggak sejarah protes global terhadap darurat iklim. Pada bulan September tahun yang sama, terjadi aksi mogok iklim global di 4.500 lokasi di 150 negara dengan perkiraan partisipasi lebih dari enam juta orang termasuk banyak siswa sekolah, aktivis, ilmuwan, dan tokoh masyarakat dalam apa yang disebut sebagai pemogokan iklim terbesar dalam sejarah dunia.

Kurangnya keterlibatan ilmiah dalam perintisan percakapan intelektual dan protes sosial yang meluas memaksa kita untuk mempertimbangkan produksi teori globalisasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Saya bertanya, bersama Steger, sejauh mana teori globalisasi mencerminkan nilai-nilai, prioritas, dan cara berpikir Eurosentris (Steger, 2021)? Lebih khusus lagi, saya mempertanyakan sejauh mana teori globalisasi secara implisit

mendukung dualisme seperti biner manusia/alam, “yang terjadi dalam seluruh sistem konseptual [budaya Barat].” Apa yang tersirat di sini mengenai relevansi pekerjaan kita, yang terlepas dari keilmuan Barat dan non-Barat yang mutakhir dan realitas kehidupan miliaran orang yang terdegradasi? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena mencerminkan inti dari pekerjaan yang kita lakukan, hubungan kekuasaan yang secara tidak sadar kita dukung, nilai-nilai budaya dan etika yang kita refleksikan, dan posisi istimewa yang kita anggap remeh sebagai akademisi di Dunia Utara.

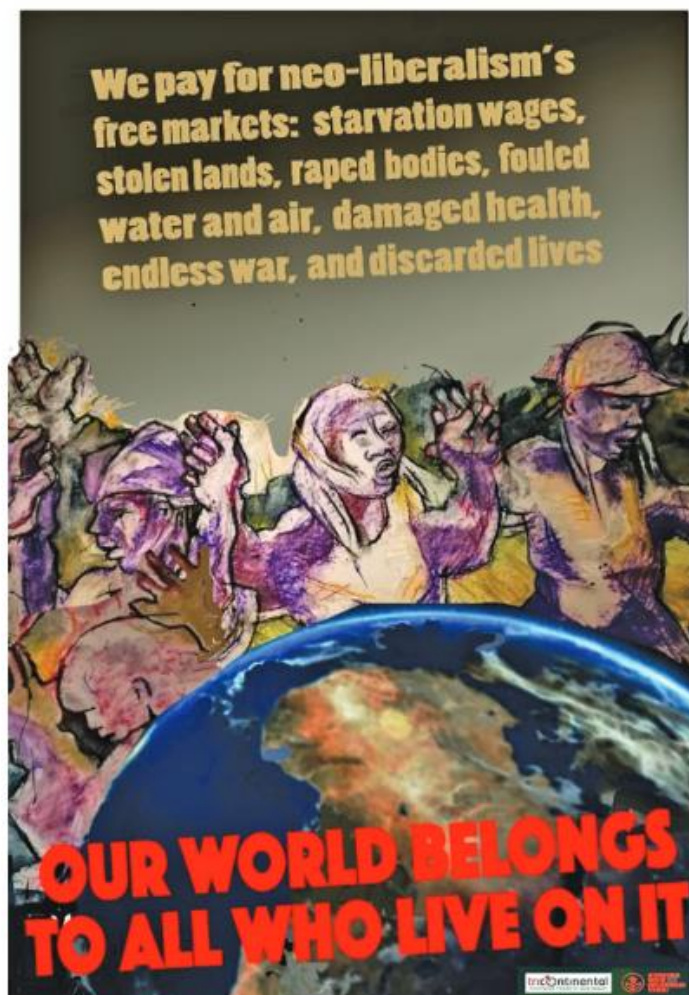
Pada tahun 2015 saya menulis esai tentang bidang baru studi global, yang membahas teori globalisasi dengan serius. Judul esai tersebut mengajukan sebuah pertanyaan: “Studi Global—Pelayan Tangan Neoliberalisme?” Hal ini didasarkan pada makalah yang saya presentasikan di panel yang mencoba mendefinisikan bidang studi global, yang terdiri dari lima pria kulit putih senior, saya sendiri sebagai satu-satunya perempuan, dan tidak ada sarjana kulit berwarna yang terlihat. Di koran saya berpendapat:

Para akademisi yang terlibat dalam studi global mungkin ingin memikirkan cara mendekolonisasi bidang penelitian baru ini dan menjadi lebih inklusif terhadap perspektif pluralistik dan posisi subjek dalam penelitian global kita. Hal ini mengharuskan kita terlebih dahulu mengakui bias kekuatan yang ada saat ini dalam bidang studi global, dan kemudian secara aktif melakukan diskusi dan kolaborasi dengan rekan-rekan dari belahan dunia selatan, timur, dan utara. Hal ini mengharuskan kita untuk melampaui kerangka dan analisis struktural makro yang banyak kita sembunyikan, dan terlibat dengan hal-hal lokal, hal-hal khusus, hal-hal yang tidak dapat diprediksi, dan hal-hal yang bersifat pribadi. Hal ini mengharuskan kita untuk terbuka terhadap konsep dan narasi baru, yang mungkin kontra-intuitif. Dan hal ini akan memaksa kita untuk menginterogasi asumsi-asumsi Barat yang bersifat etnosentris dan berdasarkan sejarah. Saya tidak menyarankan hal ini bisa terjadi dalam semalam, atau bahkan akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi menurutku ini penting untuk dibicarakan. Jika tidak, studi global mungkin hanya akan menjadi milik orang kulit putih saja. Yang lebih buruk lagi, para sejarawan masa depan mungkin menyebut bidang studi global sebagai “pelayan neoliberalisme” (Darian-Smith, 2015; Darian-Smith, 2019).

Sejak tahun 2015, beberapa departemen studi global di Amerika Serikat menjadi semakin beragam dalam hal pengalaman fakultas, pelatihan, perspektif, dan pandangan dunia. Dan beberapa pakar dalam program ini menganggap serius perlunya dekolonisasi asumsi epistemologis yang dibangun dalam produksi pengetahuan Barat. Namun, seperti yang dicatat Steger, hanya sejumlah kecil ahli teori globalisasi yang menentang bias Eurosentrisme (Steger, 2021: 34). Hal ini sesuai dengan sebagian besar departemen di bidang ilmu sosial dan humaniora yang hanya mengalami sedikit perubahan, jika memang ada, dalam orientasi intelektual, prioritas penelitian, dan posisinya meskipun ada pemboman retorika keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) oleh para administrator universitas. Hal ini terutama berlaku di departemen ilmu politik, sosiologi, dan ekonomi, tempat sebagian besar ahli teori globalisasi dominan berada (Darian-Smith, 2017).

Mengapa hal ini terjadi? Apa saja keterbatasan struktural, institusional, dan ideologis yang berdampak pada kesediaan para ahli teori globalisasi arus utama untuk memahami

realitas sistem global yang melibatkan budaya, komunitas, dan perspektif pluralis? Sehubungan dengan itu, mengapa para ahli teori globalisasi tidak terlibat dalam politik global produksi pengetahuan dan posisi istimewa mereka dalam bidang tersebut? Mengapa mereka nampaknya tidak mau mengakui—dilihat dari literatur yang dikutip dalam penelitian mereka—bahwa globalisasi mungkin tampak sangat berbeda bagi sarjana yang lahir di negara-negara Selatan dan, yang penting, mereka bisa belajar banyak dari orang tersebut? Di sini saya memikirkan karya yang diabaikan oleh para sarjana seperti Ngũgĩ wa Thiong’o, seorang sarjana sastra komparatif kelahiran Kenya, yang secara provokatif membuat teori tentang globalisasi dalam bukunya *Globalectics: Theory and Politik Mengetahui* (2014).



GAMBAR 14.3. Judy Seidman, Afrika Selatan. 2020. “Dunia kita adalah milik semua yang tinggal di dalamnya” didasarkan pada pernyataan Piagam Kebebasan Afrika Selatan tahun 1956

Hal ini menimbulkan serangkaian pertanyaan lain: Mengapa para ahli teori globalisasi arus utama gagal memahami warisan abadi degradasi lingkungan yang diterapkan dalam sejarah panjang kolonialisme Eropa dan ekonomi kapitalisme ekstraktif? Mengapa, ketika menganalisis hal-hal seperti interkoneksi yang dimungkinkan oleh teknologi dan

finansialisasi, serta konflik keamanan dan perdagangan yang sedang berlangsung terkait minyak dan sumber daya alam, apakah ada kegagalan untuk “melihat” degradasi lingkungan dan ketidakadilan yang terjadi secara bersamaan? Atau ketika menganalisis sumber-sumber ketidakpuasan kaum populis ekstrem-kanan saat ini, bagaimana kita bisa mengabaikan bahwa kekhawatiran masyarakat mengenai meningkatnya kesenjangan berhubungan dengan dampak negatif krisis iklim yang merugikan pekerjaan, tanah, dan penghidupan masyarakat serta menciptakan ketidakadilan lingkungan yang parah? di Dunia Utara dan Dunia Selatan? Tampaknya kita harus berpandangan sempit jika mengabaikan apa yang dihadapi oleh mayoritas masyarakat miskin di negara-negara Utara dan Selatan setiap hari dalam hal perampasan tanah, pertambangan beracun, pembangunan bendungan besar, kerawanan pangan, polusi, dan polusi. deforestasi, kekeringan, gelombang panas, naiknya permukaan air laut, serta bencana kebakaran dan banjir (gambar 14.3). Yang penting, bukan hanya kelompok miskin dan terpinggirkan yang terkena dampak krisis iklim—sebuah fakta yang tampaknya diabaikan oleh sebagian besar pakar globalisasi di negara-negara Utara. Sebagaimana dicatat oleh jurnalis Matthew Taylor, “Seiring dengan meningkatnya krisis iklim, hal ini akan berdampak pada sebagian besar aspek kehidupan kita di mana pun kita berada, mulai dari keamanan hingga biaya hidup, dari tempat dan cara kita hidup dan bergerak, hingga ke lingkungan kita. pola makan dan bahkan pekerjaan kita” (Taylor, 2022).

Di bawah ini saya mencantumkan apa yang saya lihat sebagai beberapa alasan pemikiran yang keliru di kalangan teoritikus arus utama globalisasi di akademi Euro-Amerika, meskipun saya yakin orang lain dapat memberikan kontribusi poin tambahan:

1. Teori globalisasi di Dunia Utara, meskipun menganalisis proses global, secara historis muncul dari analisis komparatif yang berpusat pada negara. Hal ini mencerminkan pelatihan dominan para ahli teori globalisasi arus utama dalam disiplin ilmu sosial seperti ilmu politik, hubungan internasional, sosiologi, hukum, dan ekonomi (Darian-Smith, 2017).
2. Ilmu pengetahuan yang berpusat pada negara berdasarkan sifat teori, konsep analitis, dan metode modernisnya buta terhadap—bahkan mungkin meremehkan—pengetahuan dan epistemologi yang tidak didasarkan pada asumsi teritorial negara. Sederhananya, hubungan konstitutif manusia dengan alam tidak sesuai dengan model, literatur, dan imajinasi ilmiah yang ada di Dunia Utara. Hal ini khususnya menjadi masalah dalam kasus darurat iklim yang akan segera terjadi, yang memerlukan pemikiran ulang terhadap asumsi-asumsi utama kita mengenai apa yang dimaksud dengan “sosial” yang mungkin tidak berkorelasi erat dengan masyarakat yang dibatasi oleh batas negara.
3. Disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosiologi, hukum, dan ekonomi bangga dengan produksi pengetahuan “empiris”, yang menyiratkan bahwa disiplin ilmu tersebut menghasilkan data ilmu sosial yang “objektif” dan analisis apolitis. Yang lebih meresahkan adalah adanya asumsi bahwa data ini dapat diterapkan secara universal. Objektivitas seperti ini menutupi konservatisme intelektual yang menolak terlibat dalam isu-isu kekuasaan, hak istimewa, dan Eurosentrisme serta menghindari

- memikirkan—apalagi mendorong—perubahan sosial atau politik. Dengan memanfaatkan wawasan Rob Nixon, para ahli teori globalisasi tidak mampu “melihat” paham lingkungan hidup yang dimiliki masyarakat miskin (Nixon, 2011).
4. Sehubungan dengan itu, bahkan di kalangan ilmuwan interdisipliner, terdapat kecenderungan untuk bersikap kritis namun tidak konstruktif. Yang saya maksud dengan ini adalah mudah untuk mengkritik sistem dan struktur kekuasaan tertentu, namun sulit dan berisiko untuk menciptakan kerangka konseptual baru yang dapat dianggap tidak relevan oleh para pakar arus utama. Mungkin hal ini menyebabkan kurangnya beasiswa yang secara efektif mencakup transdisipliner di akademi Euro-Amerika. Sehubungan dengan studi darurat iklim, transdisipliner menunjukkan perlunya melibatkan berbagai pengetahuan yang dihasilkan dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta pengetahuan yang dihasilkan oleh para sarjana sistem bumi, ahli biologi, ahli geologi, dan ahli klimatologi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. pendekatan holistik untuk menganalisis kompleksitas masalah. Hal ini memerlukan banyak usaha dan sulit, meskipun dapat dilakukan. Contoh luar biasa dari beasiswa transdisipliner semacam ini adalah buku Kathryn Yusoff, *A Billion Black Anthropocenes or None* (2019). Namun upaya perintisan semacam ini tidak selalu didukung oleh lembaga pendanaan dan asosiasi ilmiah profesional, dan juga tidak mendapat pengakuan yang layak dalam pedoman universitas mengenai prestasi dan promosi fakultas.
 5. Jika para akademisi di akademi Euro-Amerika menghadapi tantangan terhadap degradasi lingkungan, maka hal ini secara historis terjadi di negara-negara bekas jajahan dan negara-negara termiskin di Dunia Selatan. Dengan kata lain, hingga saat ini, perubahan iklim hanya dianggap sebagai masalah bagi masyarakat “di sana”, dan bukan merupakan kekhawatiran nyata bagi masyarakat di negara-negara kaya di Dunia Utara. Keterputusan spasial geopolitik ini telah membantu menjadikan lingkungan hidup sebagai topik penelitian yang tidak terlalu seksi, dapat didanai, atau relevan. Namun untungnya, hal ini berubah.
 6. Teori globalisasi yang dominan saat ini muncul pada tahun 1990an, dengan fokus pada penyebab dan konsekuensi dari proses neoliberal yang pada dasarnya dipahami sebagai didorong oleh ekonomi politik global. Dalam narasi berbasis pasar ini, alam terus dipandang sebagai sumber daya dan objek komodifikasi, memperkuat basis akumulasi modal biner manusia/alam dan (neo)kolonial yang telah berusia berabad-abad. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak teori globalisasi mengabaikan dampak neoliberalisme terhadap lingkungan (dan dampak tidak proporsional terkait terhadap perempuan, masyarakat miskin, masyarakat adat, dan komunitas yang terpinggirkan secara rasial). Keheningan ini menunjukkan, paling banter, ketidaktahuan dan hak istimewa, dan paling buruk adalah rasisme, seksisme, dan keterlibatan dalam mereproduksi logika eksploitatif kapitalisme akhir.
 7. Mungkin yang paling penting, belum ada wacana yang disepakati di antara para sarjana di Dunia Utara untuk melampaui biner manusia/alam yang memungkinkan kita

berpikir secara relasional dengan dan melalui alam. Hal ini akan melibatkan, seperti yang dikatakan Margaret Davies, “menjungkirbalikkan segala sesuatu yang kita pikir telah kita ketahui dan ciptakan, serta bekerja dengan, konsep-konsep baru” (percakapan pribadi). Tidak semua akademisi mampu melakukan hal ini atau siap untuk melakukan pekerjaan yang menuntut hal ini, meskipun banyak yang setuju bahwa ini adalah jalan yang tepat untuk maju.

14.5 GLOBALISASI BERBASIS IKLIM

Tidak seperti para biksu Romawi di Gunung Atos pada zaman dahulu, sebagian besar cendekiawan di Dunia Utara duduk di sel kantor eksklusif yang terletak tinggi di menara gading universitas, memandangi orang-orang di bawah, mencari pengetahuan melalui pandangan dunia yang diindividualisasikan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang berada di bawah. mewakili seluruh umat manusia. Bidang ilmiah ini didasarkan—secara harfiah, struktural, dan epistemologis—pada kolonisasi, kepemilikan, dan eksploitasi tanah dan masyarakat.

Namun, dengan mengambil contoh dari orang-orang Yunani di Delphi yang memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap dunia dibandingkan dengan orang-orang Romawi, kita bisa membayangkan sebuah dunia yang didasarkan pada keterbukaan dan penerimaan antara manusia dan lebih dari sekedar manusia, daripada sebuah dunia yang terikat. proyeksi kontrol individu yang dirasialisasikan dan berdasarkan gender. Dengan memanfaatkan wawasan Yunani kuno, para pakar studi global saat ini dapat memainkan peran penting dalam melawan posisi elit akademi Euro-Amerika dengan menyoroti dan mempromosikan keragaman perspektif dan pandangan dunia yang menentukan masa depan kita bersama. Memahami keterkaitan proses global yang bersifat bottom-up, para pakar studi global diposisikan secara unik untuk menggarisbawahi politik produksi pengetahuan yang secara historis membungkam pemahaman alternatif tentang keberadaan di dunia. Secara khusus, dalam esai ini saya berpendapat bahwa hal ini berarti melampaui biner manusia/alam dan menerima hubungan kompleks yang dimiliki manusia dengan alam yang selama berabad-abad telah dipinggirkan dalam pemikiran Barat. Kerangka kerja yang lebih dari sekedar manusia yang saat ini mendapatkan perhatian di seluruh akademi memberikan lensa teoritis dan epistemologis yang dapat digunakan untuk mempelajari kembali interkoneksi umat manusia dengan planet ini. Taruhannya sangat besar. Dalam konteks keruntuhan ekologi yang akan segera terjadi, revitalisasi pengetahuan tentang pentingnya alam merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia dalam jangka panjang. Namun mempelajari kembali dunia yang saling terhubung tidaklah mudah, tidak peduli seberapa penting atau penting hal tersebut. Manfred Steger mengakui kesulitan ini. Dalam upaya pembukanya untuk “mendekolonisasi teori globalisasi dengan melepaskannya dari ikatan Euro-Amerika,” ia menyerukan integrasi empat kata kunci yang relevan ke dalam teori kontemporer tentang globalisasi—Eurosentrisme, epistemicide, Anthropocene, dan ecocide (Steger, 2021). Saya berharap para akademisi akan menanggapi seruan ini dengan serius, namun saya juga skeptis terhadap kemanjurannya. Seperti yang diingatkan Ghosh dalam *The Great Derangement*, keadaan

darurat iklim menghadirkan krisis imajinasi budaya. Sangat sulit, dan mungkin bahkan mustahil, bagi masyarakat untuk melepaskan diri dari sistem bahasa, imajinasi, ideologi, dan mitos yang ada yang memberikan “latar belakang” umum yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi (Hekman, 1999). Merangkul kosakata yang menggarisbawahi asimetri kekuatan global dan dampak buruk globalisasi terhadap masyarakat, hewan, dan lingkungan mungkin merupakan langkah awal yang baik. Namun hal ini sepertinya tidak akan menghasilkan cara berpikir alternatif dan “ketidaktaatan epistemik” yang diperlukan untuk mengatasi kesempitan para sarjana di negara-negara Utara (Mignolo, 2010).

Jadi, apa yang akan kita lakukan? Dalam esai ini saya berpendapat bahwa memperdebatkan globalisasi dan mencoba membingkai serta menganalisis apa yang terjadi di dunia dengan mengadopsi kosa kata baru tidaklah cukup. Yang dibutuhkan jauh lebih sulit: kita harus memahami secara kritis keterlibatan politik dan etika kita dengan semua kehidupan biologis dan, pada gilirannya, bertanya, bagaimana kita berhubungan dengan hidup bersama di dunia? Hal ini mengharuskan para akademisi untuk tidak langsung melepaskan diri namun justru membuang perspektif alternatif dan pendekatan yang terpinggirkan dalam teori Eurosentris yang ada. Jadi, tidak ada gunanya berargumentasi bahwa perspektif non-Barat lebih baik, lebih unggul, atau lebih benar dibandingkan perspektif Barat, seperti pendapat beberapa orang yang terlibat dalam perang paradigma yang dibahas di atas. Sebaliknya, sikap yang lebih produktif akan memanfaatkan wacana yang ada untuk mengubah pembicaraan dan menciptakan makna baru agar sesuai dengan tujuan baru. Latar belakang intelektual baru ini – diharapkan – akan lebih responsif terhadap teori dan pendekatan non-Barat. Sarjana feminis Susan Hekman menulis tentang strategi ini beberapa dekade yang lalu dalam upayanya untuk memasukkan perspektif feminis ke dalam akademi yang didominasi laki-laki, dengan berargumentasi “bahwa mengubah alur pemikiran tidak hanya memerlukan perubahan makna kata-kata tetapi juga penyampaian pesan yang berbeda. cerita. Kisah tersebut haruslah sebuah kisah yang dapat dipahami sesuai dengan kisah yang telah diceritakan kepada kita, namun kisah yang juga menjelaskan keanehannya [dan ketidakfamiliarannya]. Singkatnya, yang dibutuhkan adalah konstruksi narasi baru” (Hekman, 1999).

Bagaimana kita, misalnya, menciptakan narasi baru yang menganggap serius implementasi dari apa yang disebut oleh Vandana Shiva, seorang aktivis lingkungan hidup terkenal sebagai “demokrasi bumi” (Shiva, 2015)? Atau bagaimana kita bisa memikirkan kembali subjek manusia secara lebih holistik, bukan sebagai pemilik hierarki properti dan alam, melainkan sebagai makhluk hidup bersama dengan lingkungan yang tertanam dalam kontinum budaya alam—apa yang oleh sarjana sosiolegal kritis Jana Norman disebut sebagai “manusia kosmis” (Norman, 2021)? Khususnya, dengan cara apa intervensi-intervensi ini menggeser makna dominan nasionalisme, kewarganegaraan, identitas, wilayah, ekonomi, dan tata kelola yang mendasari sebagian besar teori globalisasi? Saya ingin memperjelas bahwa pertanyaan-pertanyaan semacam ini bukanlah latihan mental yang dangkal namun didorong oleh urgensi dan relevansi yang sangat besar. Laporan ketiga yang dikeluarkan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim menyatakan bahwa dunia berada di “persimpangan jalan” dan kita memiliki waktu sekitar delapan tahun untuk memperlambat

emisi gas rumah kaca guna “menjamin masa depan yang layak huni” (IPCC, 2022). Meningkatnya intensitas dan skala bencana kebakaran dan banjir yang dialami di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir merupakan pertanda buruk akan terjadinya hal-hal yang akan datang. Argumen utama saya adalah bahwa masa depan kita bersama adalah globalisasi yang didorong oleh iklim. Mengingat kenyataan ini, para ahli teori globalisasi perlu memikirkan kembali subjek dan objek studi mereka dan menciptakan narasi baru tentang asosiasi konstitutif mereka. Mereka perlu membuka mata, hati, dan pikiran mereka terhadap apa yang mungkin dianggap asing dan tidak nyaman oleh banyak orang dalam hubungan inklusif antara dunia manusia dan dunia yang lebih dari sekadar manusia. Hal ini memerlukan pembelajaran ulang, konsep ulang, dan penceritaan kembali posisi masyarakat di dunia dalam ruang dan waktu yang tidak linier—melintasi masa lalu dan masa depan antargenerasi, melintasi sejarah kolonialisme dan rasisme yang terjerat, dan melintasi lingkungan kekerabatan yang mencakup perempuan, laki-laki, hewan, hutan, lautan, tanah, atmosfer, dan matahari. Dengan kata lain, para ilmuwan pertama-tama harus memahami agensi planet yang menggabungkan subjektivitas manusia dengan kekuatan non-manusia jika diskusi ilmiah kita ingin tetap relevan dengan krisis dan konteks yang terjadi di dunia nyata. Pada catatan ini, terlintas dalam benak kita kata-kata masa depan yang ditulis beberapa dekade lalu oleh William Cronon:

Hal ini berarti melihat bagian alam yang ingin kita manfaatkan untuk tujuan kita sendiri dan bertanya apakah kita dapat memanfaatkannya lagi dan lagi dan lagi—secara berkelanjutan—tanpa menguranginya dalam prosesnya. Artinya, jangan pernah membayangkan bahwa kita bisa lari ke hutan belantara mistis untuk menghindari sejarah dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri yang tidak bisa dihindari oleh sejarah. Yang terpenting, ini berarti melatih ingatan dan rasa syukur, karena rasa syukur adalah cara yang paling sederhana dan paling mendasar bagi kita untuk mengingat kembali alam, budaya, dan sejarah yang telah bersatu untuk menjadikan dunia seperti yang kita kenal. Jika keliaran bisa berhenti (hanya) di luar sana dan mulai (juga) ada di sini, jika keliaran bisa mulai menjadi manusiawi dan alami, maka mungkin kita bisa melanjutkan tugas tanpa akhir yaitu berjuang untuk hidup benar di dunia— bukan hanya di taman, bukan hanya di hutan belantara, tapi di rumah yang melingkupi keduanya. (Cronon, 1996: 25)

BAB 15

GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI MASA DEPAN

Dalam buku ini akan membahas globalisasi berkelanjutan di Afrika. Karena Afrika adalah benua dengan sumber daya manusia dan material yang melimpah, namun kemajuannya menuju pembangunan berkelanjutan berjalan lambat dan terkadang mengecewakan. Beberapa tantangannya berasal dari keterlibatannya dalam perekonomian global dan struktur kekuasaan yang menyertainya setidaknya sejak abad kelima belas. Karena kemajuan ekonomi di benua ini belum mencerminkan keseluruhan nilai aset-aset yang dimilikinya, Afrika menjadi rumah bagi banyak orang dan negara miskin saat ini. Bahkan ketika kelompok-kelompok ini berjuang melawan ketidakstabilan politik dan ekonomi, pandemi COVID-19 telah menimbulkan beban tambahan. Sebagai benua berkembang, Afrika harus memanfaatkan kekuatannya dan menyesuaikan diri dengan perekonomian global yang menjanjikan pembangunan yang sejati dan berkelanjutan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang menciptakan hambatan yang menghambat agenda ini, dan hal ini akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Bab ini membahas interaksi antara globalisasi dan pembangunan berkelanjutan di Afrika, termasuk keadaan sebelum globalisasi, janji-janji pembangunan berkelanjutan, dan manfaat globalisasi dan pembangunan berkelanjutan bagi Afrika.

Pembangunan jangka panjang di Afrika tidak dapat dilepaskan dari kekuatan globalisasi yang berupaya meningkatkan perekonomian di seluruh dunia dan menjadikan transaksi lebih efisien bagi semua orang penyebaran manfaat dan konsekuensi yang tidak proporsional terlihat jelas. Benua Afrika telah memosisikan dirinya untuk mengimbangi laju globalisasi yang semakin maju, dan negara-negaranya telah berupaya untuk bergabung dengan negara-negara maju. Ketegangan dalam perjalanan sejarah ini telah ditanggung oleh masyarakat Afrika dan rekan-rekan mereka di Eropa dan Diaspora. Saling ketergantungan antar negara dan bangsa dalam globalisasi, yang terjadi dalam perekonomian, budaya, teknologi, serta pertukaran nilai dan manusia, telah membawa perubahan nyata (Kolbi, 2021). Beberapa inisiatif seperti Agenda 2063 dan NEPAD, antara lain, telah diajukan oleh Afrika sebagai badan kolektif untuk memastikan kemajuan yang kuat di benua ini menuju pembangunan berkelanjutan dan globalisasi.

Afrika menjadi terglobalisasi, namun secara bertahap, dan hanya setelah mengatasi berbagai tantangan. Berbagai kesulitan ini memerlukan pemikiran yang serius, rencana yang matang, dan implementasi yang efisien. Banyak kebijakan pembangunan telah menyadari hal ini, namun terdapat kebutuhan mendesak bagi benua ini untuk sepenuhnya merangkul

gerakan globalisasi. Contohnya adalah Kawasan Perdagangan Bebas Kontinental Afrika (AfCFTA), yang menawarkan pembangunan inklusif dan terkoordinasi serta berpotensi menjadi zona perdagangan bebas terbesar di dunia (Obeng-Odoom, 2020).

Inti dari globalisasi adalah pertukaran manusia dan nilai-nilai. Interaksi ini telah membawa perubahan di Afrika selama berabad-abad, dan narasinya serta narasi pembangunan berkelanjutan telah diwarnai oleh interpretasi Eropa. Negara-negara besar Eropa telah menjelajahi dunia sejak abad keenam belas, mengekstraksi sumber daya dan menerapkan nilai-nilai mereka di setiap bagian dunia. Asia, Amerika, dan wilayah lain, termasuk Afrika, dilibatkan dan ditaklukkan melalui proses tersebut. Perdagangan budak transatlantik juga merupakan pertukaran manusia dan sumber daya secara besar-besaran, dengan distribusi keuntungan yang tidak merata. Pada pertengahan abad ke-19, sekitar 12 juta orang telah dievakuasi dari Afrika. Dari sekitar tahun 1880 hingga awal abad kedua puluh, sekitar 30 juta orang tambahan berpindah melalui jalur ini (Held et al., 1999); dengan jumlah penduduk sekitar 130 juta jiwa, persentasenya turun menjadi sekitar 23,08 persen (Akyeampong et al., 2014). Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, proses tersebut meluas ke kolonisasi dan neokolonisasi, yang meletakkan dasar bagi berbagai perkembangan di Afrika dan memfasilitasi proses globalisasi (Michalopoulos & Papaioannou, 2016).

Terlepas dari sejarah kelam ini, masyarakat Afrika telah berupaya untuk memanfaatkan kekuatan globalisasi. Pembentukan Uni Afrika dan berbagai program serta inisiatif dari kelompok dan masing-masing negara telah menggerakkan globalisasi di benua ini. Upaya-upaya ini harus dikaji untuk menentukan apakah upaya-upaya tersebut dapat dipertahankan dan secara efektif menempatkan Afrika dalam kancah global.

15.1 AFRIKA SAAT INI

Afrika telah menerima kekuatan global sepanjang sejarah, yang sering kali menyebabkan pertumbuhan yang bersifat sementara dan keberlanjutan yang dipertanyakan. Dalam upaya memanfaatkan kekuatan globalisasi, negara-negara Afrika harus memastikan bahwa mereka tidak mengorbankan pertumbuhan jangka panjang demi mencapai manfaat jangka pendek. Kerangka kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB dikembangkan dengan mempertimbangkan keprihatinan ini sebuah komisi yang diketuai oleh mantan perdana menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland menjelaskannya sebagai persyaratan ganda untuk pembangunan saat ini dan masa depan (PBB, 1987). Selama beberapa abad terakhir, Afrika telah dilanda angin puyuh pembangunan yang memungkinkannya menyamai pencapaian negara-negara Barat, seperti kota-kota besar. Karena impian Pan-Afrika baru-baru ini harus menjadikannya sesuai dengan Afrikanisasi, konsep globalisasi *vis-à-vis* pembangunan cocok dengan ruang lingkup diskusi di Afrika.

Afrika adalah titik fokus dari tujuh belas SDGs, yang secara langsung menggambarkan kondisi benua ini yang menyedihkan. Jika Afrika dapat maju dan mengglobal sejalan dengan SDGs pada tahun 2030, tujuan Afrika yang maju secara berkelanjutan dapat dianggap berhasil, karena Afrika diharapkan dapat memenuhi semua struktur dan rencana yang ditetapkan, seperti strategi UNESCO untuk peran Afrika. pendidikan dalam mempersiapkan benua untuk

masa depan (Shettima, 2016). Namun, hal ini memerlukan seluruh sumber daya dan perhatian yang ada di benua ini untuk dikerahkan agar dapat mengeluarkan potensi bawaannya. Ada beberapa tantangan yang mungkin menghalangi ambisi ini untuk menjadi kenyataan.

Salah satu permasalahan utamanya adalah ketidakstabilan politik yang mewabah di Afrika. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, negara-negara Afrika pascakolonial masih mempertahankan nilai-nilai dan struktur politik dari negara-negara penjajahnya dan telah dilanda ketidakstabilan politik terkait dengan struktur yang tidak memadai dan pembagian wilayah yang diberlakukan oleh kekuatan kolonial di benua tersebut (Kieh, 2009). Politik pascakolonial telah dirusak oleh perang saudara dan kudeta yang membawa kekerasan dan kehancuran, yang sering kali berakar pada persaingan etnis yang berbeda (Anyanwu, 1982). Kebusukan pemerintahan dan ketidakstabilan pemilu dalam politik modern telah berkurang, namun hal ini masih berdampak pada benua ini.

Ketidakstabilan politik mengganggu struktur perekonomian dan menciptakan hambatan terhadap pembangunan berkelanjutan. Hantu masa lalu masih menghantui masa kini seiring dengan masih adanya ketidakstabilan politik di Afrika. Pada tahun 2021, Sudan mengalami dua kudeta berbeda. Salah satunya gagal pada bulan September, dan yang lainnya berujung pada pembubaran pemerintahan sipil oleh Jenderal Abdel Fattah Burhan (Kirby, 2021). Di Guinea, tentara menggulingkan Presiden Alpha Conde dan membawa negara tersebut ke dalam ketidakpastian pasca kudeta (Akinpelu, 2021). Mali mengalami dua gangguan pada tahun yang sama, dan kekerasan politik meletus di Niger beberapa hari setelah pemilihan presiden. Dari tahun 2000 hingga 2019, telah terjadi enam belas kudeta di Afrika, yang menunjukkan betapa seriusnya kerusuhan politik yang terjadi di benua tersebut. Afrika mengalami lebih banyak kudeta pada tahun 2021 dibandingkan lima tahun sebelumnya, dengan lebih banyak kudeta yang berhasil sejak tahun 1999.

Terorisme adalah tantangan buruk lainnya yang menghambat kemajuan benua ini. Afrika telah menjadi batu loncatan baru bagi para ekstremis dan jihadis yang ingin mewujudkan agenda “keagamaan” mereka (Davis, 2012). Kelompok ekstremis, seperti Al Qaeda dan ISIS, bertanggung jawab atas banyak serangan di Afrika. Misalnya, Al Qaeda mengebom kedutaan besar Amerika Serikat di Tanzania dan Kenya pada tanggal 7 Agustus 1998 (Hoffman, 2014). Kelompok teroris lain yang tumbuh di dalam negeri juga mendorong kekerasan yang sedang berlangsung di Afrika. Sumber daya yang seharusnya dikerahkan pada sarana dan prasarana untuk melayani masyarakat malah dialihkan untuk melawan serangan teroris. Al Qaeda dan kelompok teroris yang berafiliasi dengannya termasuk Boko Haram di Nigeria, operasi ISIS di Libya dan Sinai Utara, serta al-Shabaab di Mesir dan Somalia membutuhkan upaya kontraterorisme yang berbeda dan terkoordinasi (Alvi, 2019). Upaya lain, seperti yang dilakukan di Kamerun, Sahel, Mali, Kenya, Niger, Burkina Faso, Uganda, dan Pantai Gading, juga menghabiskan banyak sumber daya (Perez, 2021). Sulit untuk memprioritaskan globalisasi dan pembangunan berkelanjutan ketika masyarakat menghadapi kemiskinan ekstrem, dan ini merupakan hambatan lain bagi kemajuan. Pada tahun 2021, sekitar 36 persen dari 490 juta orang di Afrika hidup dalam kemiskinan (Human, 2021). Orang-orang ini tidak mampu membayar Rp.22.500 per hari, yang merupakan garis kemiskinan

internasional Bank Dunia. Kehancuran yang terus-menerus dilakukan oleh para ekstremis, serangan kekerasan, dan kemerosotan ekonomi telah meningkatkan angka tersebut sebanyak 9 juta orang sejak tahun 2019. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan, turun dari 54 persen pada tahun 1990 menjadi 41 persen pada tahun 2015, namun Afrika tetap menjadi benua termiskin dengan jumlah penduduk miskin terbesar (Beegle & Christiaensen, 2019).

Selain itu, infrastruktur merupakan komponen penting dari tujuh belas SDG yang harus dicapai pada tahun 2030. Jika dibandingkan dengan benua lain, Afrika memiliki jumlah infrastruktur yang paling sedikit (Bond, 2017), dan fasilitas tersebut merupakan pendorong utama proses globalisasi. Akses terhadap infrastruktur mempengaruhi perekonomian benua ini dan biaya hidup individu. Pemerintah yang tidak memprioritaskan akses terhadap fasilitas dasar bagi warganya harus siap menghadapi konsekuensi ekonominya. Meskipun beberapa negara telah melakukan upaya yang solid untuk membangun perbaikan yang dapat dilakukan oleh sebagian besar warga negaranya, terdapat juga masalah dalam pemeliharaan yang berkelanjutan. Saat ini, hanya sekitar 38 persen masyarakat Afrika yang mempunyai akses listrik, hanya 25 persen jalan yang diaspal, dan tingkat penetrasi internet hanya 10 persen. Jaringan jalan yang buruk dan fasilitas yang tidak memadai, seperti pelabuhan dan terminal kereta api, menambah sekitar 40 persen biaya produksi. Pengeluaran berlebih ini menghambat organisasi perusahaan dan pengembangan sektor swasta (Mayaki, 2013).

Pendidikan adalah jaminan utama bagi pembangunan berkelanjutan dan kemajuan globalisasi. Kurangnya pendidikan merupakan hambatan besar yang menghancurkan harapan pembangunan di masa depan. Benua ini telah melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pendidikan di berbagai wilayah, namun masih terdapat kesenjangan besar dalam aksesibilitas pendidikan, khususnya di Afrika Sub-Sahara (Krzykawska & Žur, 2020). Ledakan populasi di Afrika dibarengi dengan peningkatan jumlah pendaftaran sekolah, namun menemukan sumber daya dan guru berkualitas yang diperlukan untuk mendukung hal tersebut merupakan tantangan besar. Afrika belum menganut prinsip kesetaraan dalam pendidikan anak perempuan masih terpinggirkan, dan terdapat kesenjangan besar antara anak laki-laki dan perempuan yang berpendidikan (Kaul, 2015). Meskipun terdapat fokus pada inklusi gender dalam Strategi UNESCO 2022–29, secara umum terdapat kekurangan dalam literasi kesehatan untuk mendukung pendidikan dan literasi anak perempuan (Stephens dkk., 2021).

Sejak lama, perguruan tinggi telah menangani masalah pendidikan mereka sendiri, termasuk kegiatan serikat pekerja. Selain itu, pandemi COVID-19 telah menjadi ujian bagi kemajuan globalisasi di Afrika, dan memberikan wawasan mengenai upaya yang masih harus dilakukan untuk memenuhi target SDG 2030. Bahkan sebelum pandemi ini terjadi, layanan kesehatan di Afrika sudah memburuk. Banyak negara di luar benua ini telah mencapai kemajuan besar dalam hal biaya layanan kesehatan yang disubsidi pemerintah, namun masyarakat di Afrika harus menanggung sekitar 65 persen dari seluruh biaya layanan kesehatan, meskipun benua tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Pandemi global ini juga memperlihatkan kelemahan di sektor-sektor lain di Afrika sektor-sektor tersebut

rentan terhadap banyak ancaman ekonomi. Satu hal lain yang mungkin dikaitkan dengan pandemi ini adalah efek multi-resiliensi dari berbagai respons dari berbagai sektor di masyarakat Afrika.

Respons terhadap COVID-19 telah mempercepat pembangunan di banyak sektor, terutama layanan kesehatan, dan banyak negara telah meningkatkan belanja layanan kesehatan untuk mengurangi dampak pandemi ini. Nigeria mengumumkan telah mengeluarkan dana sebesar Rp.131.550 Miliar. Ghana menyatakan mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.450 miliar, sektor kesehatan Maroko mengeluarkan dana sekitar Rp.2.900 miliar, Gambia mengeluarkan dana sebesar Rp. 142 miliar, dan negara-negara lain juga telah mengambil langkah-langkah tambahan (Ozili, 2020). Ini adalah status negara-negara Afrika saat ini mengenai globalisasi dan pencapaian SDGs, yang terlihat mengecewakan. Tidak diragukan lagi, benua ini sedang berada pada jalur menuju percepatan globalisasi, namun kemajuannya mungkin terlalu lambat untuk bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain di dunia; Oleh karena itu, diperlukan upaya terkoordinasi dari benua ini secara keseluruhan untuk menjadikan benua ini berada pada jalur yang lebih lancar.

15.2 GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI AFRIKA

Perekonomian global telah berkembang menjadi serangkaian rantai pasokan terdistribusi yang mendorong transaksi internasional untuk tujuan tertentu. Proses ini dimulai terutama pada abad kelima belas selama kontak Afrika dengan seluruh dunia, dan kontak intensif dengan Afrika ini mencakup periode eksplorasi, perdagangan trans-Sahara, dan perdagangan transatlantik, yang semuanya muncul dari kebutuhan untuk merencanakan rute baru. untuk mengakses sumber daya. Meningkatnya industri pertambangan dan perkebunan di Amerika menyebabkan peningkatan permintaan di seluruh dunia (Inikori, 2007).

Permintaan akan sumber daya mengubah Afrika Barat menjadi pemasok utama dan titik kontak untuk barang-barang seperti kayu merah, cabai merah dari kerajaan Benin, kulit dan kulit Senegambia, tembaga dari Kerajaan Kongo, gading, dan budak yang ditangkap (Inikori, 2007). Meskipun terjadi peningkatan perdagangan, manfaat yang diperoleh tidak merata bagi Afrika dan negara-negara lain di dunia. Benua ini berulang kali berada dalam posisi yang dirugikan, hal ini menjelaskan keraguan yang ada saat ini mengenai konsep globalisasi. Pembangunan dasar di Afrika telah mendapat tantangan di beberapa pihak sebagai dalih untuk terus mengeksploitasi sumber daya di benua tersebut. Misalnya, bantuan yang diberikan oleh Tiongkok sering kali dipertanyakan apakah mereka fokus pada pembangunan atau lebih terkonsentrasi pada eksploitasi sumber dayanya (Mlambo, 2018). Penegasan ini telah berkembang menjadi kritik terhadap SDGs, yang diserang karena tidak bersifat Afrika dan mungkin tidak mengadopsi kekhasan benua tersebut.

Beberapa penulis mempertanyakan apakah tujuan SDGs menyadari kekhasan Afrika. Misalnya, diyakini bahwa untuk mencapai pendidikan berkualitas, pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan kekhasan budaya Afrika. Interpretasi mengenai globalisasi ini lahir dari pengalaman sejarah dan preseden di dunia Barat. Kekhawatiran mengenai globalisasi mungkin ada benarnya, namun tidak sepenuhnya mencerminkan manfaat globalisasi.

Globalisasi menggambarkan perkembangan dan penyebaran telekomunikasi, teknologi, ekonomi, dan manusia di seluruh dunia, termasuk Afrika. Laporan ini menyoroti proses memposisikan Afrika dalam jaringan yang terhubung secara global. Untuk mendapatkan manfaat dari hubungan ini, SDGs harus dicapai. Benua ini harus mengimbangi perkembangan negara-negara lain dengan mengembangkan pengukuran dan program yang akan meningkatkan peluangnya. Upaya-upayanya harus mengatasi kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang.

Afrika Sebagai Fokus SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengatasi kemiskinan, masalah lingkungan, resolusi konflik, keseimbangan gender, dan keadilan bagi semua negara. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk melihat dunia tumbuh secara bersamaan dengan pola yang sama pada tahun 2030. Sebagian besar krisis mendasar yang diatasi oleh tujuan ini terjadi di Afrika aktivitas ekonomi di benua ini menurun dari pertumbuhan 5 persen dalam lima belas tahun sebelumnya (Zamfir, 2016) menjadi 4,2 persen pada tahun 2015, dan tren penurunan terus berlanjut (Ighobor, 2015). Akibat COVID-19, kondisi perekonomian di benua ini menjadi tidak stabil, dan PDB Afrika Selatan terdampak sebesar 51 persen pada awal tahun 2020. Bank Dunia memperkirakan bahwa sekitar dua puluh enam hingga empat puluh juta orang di Afrika Selatan Afrika sub-Sahara bisa mengalami kemiskinan karena pandemi ini.

Afrika memiliki jumlah penduduk miskin terbesar. Ketergantungan pada bisnis yang tidak berkelanjutan, termasuk minyak dan komoditas terkait, telah menyebabkan krisis ekonomi yang parah di Nigeria dan Gabon. Pencemaran lingkungan masih menjadi kekhawatiran utama, dan rekam jejak benua ini dalam mengelola bahaya kesehatan masih jauh dari harapan. Afrika merupakan salah satu pertimbangan utama ketika SDGs ditetapkan, terutama setelah kegagalan yang berkepanjangan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada tahun 2015. Nigeria dan Burkina Faso berupaya meningkatkan tingkat partisipasi sekolah dasar dari 20 persen menjadi 60 persen pada tahun 2015 sebagai bagian dari MDGs, namun gagal. Kekurangan ini menyebabkan diadopsinya SDGs (Kindra & Wasswa-Mugambwa, 2015). Namun, pengakuan terbuka atas kekurangan yang ada di benua ini bersifat progresif. Mengingat fakta dan statistik di atas adalah benar, para pemimpin harus fokus untuk melakukan perbaikan dan memikirkan cara-cara untuk memajukan benua ini.

Pembangunan terlihat jelas di berbagai sektor di Afrika, dan masyarakatnya secara bertahap menyesuaikan budaya mereka dengan paradigma baru ini. Penekanan baru telah diberikan pada produk dan proses berkelanjutan, seperti agrobisnis, teknologi, dan konsep ekonomi maju lainnya oleh banyak masyarakat Afrika yang berupaya menuju pembangunan berkelanjutan. Untuk memicu pertumbuhan di masa depan, upaya signifikan dan penting telah dilakukan untuk menyediakan pendidikan dasar, kemungkinan pengembangan, dan teknologi komunikasi. Badan dan institusi Afrika seperti Uni Afrika, ECOWAS, konfederasi, institusi, dan organisasi lainnya juga telah berinvestasi dalam infrastruktur ekologi dan pemeliharaan lingkungan. Meskipun terdapat permasalahan endemik di benua ini, terdapat perkembangan yang lambat namun progresif di berbagai negara Afrika. Meskipun demikian, Afrika dapat mempercepat kemajuannya dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

sebagai hasil dari upaya-upaya ini, sehingga dapat memperoleh manfaat dari globalisasi sekaligus melindungi kepentingannya sendiri.

Afrika Sebagai Fokus SdGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengatasi kemiskinan, masalah lingkungan, menyelesaikan konflik, keseimbangan gender, dan keadilan bagi seluruh negara. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk melihat dunia tumbuh secara bersamaan dengan pola yang sama pada tahun 2030. Sebagian besar krisis mendasar yang diatasi oleh tujuan ini terjadi di Afrika aktivitas ekonomi di benua ini menurun dari pertumbuhan 5 persen dalam lima belas tahun sebelumnya (Zamfir, 2016) menjadi 4,2 persen pada tahun 2015, dan tren penurunan terus berlanjut (Ighobor, 2015). Akibat COVID-19, kondisi perekonomian di benua ini menjadi tidak stabil, dan PDB Afrika Selatan terdampak sebesar 51 persen pada awal tahun 2020. Bank Dunia berspekulasi bahwa sekitar dua puluh enam hingga empat puluh juta orang di Afrika Selatan Afrika sub-Sahara bisa mengalami kemiskinan karena pandemi ini (Lakemann, Lay, & Tafese, 2020).

Afrika memiliki jumlah penduduk miskin terbesar. Ketergantungan pada bisnis yang tidak berkelanjutan, termasuk minyak dan komoditas terkait, telah menyebabkan krisis ekonomi yang parah di Nigeria dan Gabon. Pencemaran lingkungan masih menjadi kekhawatiran utama, dan rekam jejak benua ini dalam mengelola bahaya kesehatan masih jauh dari harapan. Afrika merupakan salah satu pertimbangan utama ketika SDGs ditetapkan, terutama setelah kegagalan yang berkepanjangan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada tahun 2015. Nigeria dan Burkina Faso berupaya meningkatkan tingkat partisipasi sekolah dasar dari 20 persen menjadi 60 persen pada tahun 2015 sebagai bagian dari MDGs, namun gagal. Kekurangan ini menyebabkan diadopsinya SDGs (Kindra & Wasswa-Mugambwa, 2015). Namun, pengakuan terbuka atas kekurangan yang ada di benua ini bersifat progresif. Mengingat fakta dan statistik di atas benar, para pemimpin harus fokus untuk melakukan perbaikan dan memikirkan cara-cara untuk memajukan benua ini.

Pembangunan terlihat jelas di berbagai sektor di Afrika, dan masyarakatnya secara bertahap menyesuaikan budaya mereka dengan paradigma baru ini. Penekanan baru telah diberikan pada produk dan proses berkelanjutan, seperti agrobisnis, teknologi, dan konsep ekonomi maju lainnya oleh banyak masyarakat Afrika yang berupaya menuju pembangunan berkelanjutan. Untuk memicu pertumbuhan di masa depan, upaya signifikan dan penting telah dilakukan untuk menyediakan pendidikan dasar, kemungkinan pengembangan, dan teknologi komunikasi. Badan dan institusi Afrika seperti Uni Afrika, ECOWAS, konfederasi, institusi, dan organisasi lainnya juga telah berinvestasi dalam infrastruktur ekologi dan pemeliharaan lingkungan (Cumming et al., 2017). Meskipun terdapat permasalahan endemik di benua ini, terdapat perkembangan yang lambat namun progresif di berbagai negara Afrika. Meskipun demikian, Afrika dapat mempercepat kemajuannya dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai hasil dari upaya-upaya ini, sehingga dapat memperoleh manfaat dari globalisasi sekaligus melindungi kepentingannya sendiri.

Janji lain dari globalisasi adalah pembangunan pendidikan untuk mendobrak hambatan terhadap pengetahuan. Gerakan globalisasi memungkinkan akses tak terbatas

terhadap pendidikan dari berbagai sektor. Telekomunikasi dan teknologi menjadikan akses terhadap pendidikan berkualitas lebih mudah dan lebih mudah dicapai banyak gelar diterima melalui jarak jauh tanpa perlu melakukan perjalanan. Hal ini menyebarkan “modal intelektual” dan sumber daya pengetahuan ke seluruh dunia. Kemajuan besar dalam desentralisasi pengetahuan dan gagasan telah memungkinkan negara-negara untuk mengatasi tantangan-tantangan yang spesifik sesuai dengan keadaan mereka. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 telah menunjukkan bagaimana globalisasi dapat mendorong pembangunan pendidikan. Meskipun banyak negara melakukan lockdown, pendidikan online terus berlanjut di seluruh dunia dan pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas tradisional.

Demikian pula, penerapan pembangunan berkelanjutan dan globalisasi akan memajukan layanan kesehatan melalui akses global. Ide dan pengetahuan medis dapat dibagikan secara global, meningkatkan upaya terkoordinasi untuk memerangi penyakit di seluruh dunia dan menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua orang. Afrika sedang berjuang melawan banyak penyakit mematikan, seperti malaria. Untungnya, koordinasi global telah menghasilkan kemenangan dalam bidang medis dalam melawan polio—upaya gabungan dari pemangku kepentingan global dan mekanisme lokal telah memastikan bahwa Afrika telah memberantas polio pada tahun 2020 (Makoni, 2020). Pendekatan serupa juga digunakan untuk mengurangi penyebaran Ebola dan memperlambat perkembangan virus corona. Globalisasi, dalam bahasa pembangunan berkelanjutan, menghadirkan tantangan kesehatan di mana pun sebagai masalah global yang harus dipecahkan oleh semua orang. Akses terhadap berbagai solusi yang ditawarkan oleh globalisasi dapat menjadi jalan menuju pencapaian SDGs yang bertujuan untuk mendorong kehidupan sehat dan kesejahteraan masyarakat di segala usia.

Globalisasi telah dan akan terus bertanggung jawab atas penyebaran budaya dan promosi warisan budaya. Julio Cortazar mendefinisikan budaya sebagai “latihan identitas yang mendalam” (Standish, 2001). Ini adalah kesadaran kolektif yang menampilkan nilai-nilai historis dan situasional suatu kelompok. Globalisasi merestrukturisasi negara-negara dan menambahkan nilai-nilai baru pada setiap budaya, memungkinkan terjadinya penyerbukan silang identitas di dunia. Manfaat globalisasi bagi Afrika mencakup penyebaran budaya yang kaya di benua ini secara lebih luas, masuknya nilai-nilai baru, dan desentralisasi untuk mengakomodasi wilayah lain di dunia. Hal ini telah memperkenalkan ide-ide yang berbeda sepanjang sejarah, dan Afrika telah menganut banyak ide-ide tersebut. Budaya yang tidak memanusiaikan orang lain dan mendorong kesenjangan biasanya dianggap salah karena cita-cita imperialisme budaya bertentangan dengan globalisasi. Namun, globalisasi dapat mencapai banyak tujuan SDG yang terkait dengan nilai-nilai budaya, mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan di seluruh dunia.

Afrika telah memperoleh manfaat dari penyebaran dan mobilitas kemajuan teknologi di bawah globalisasi. Hal ini mempengaruhi hampir setiap aspek perekonomian nasional dan, dengan demikian, dapat dengan mudah menempatkan Afrika pada jalur yang tepat untuk mencapai SDGs dengan kecepatan yang luar biasa. Koneksi yang dimungkinkan oleh dunia yang terglobalisasi dan perekonomiannya yang saling terkait memungkinkan penyebaran

pengetahuan dan teknologi; oleh karena itu, menciptakan jalur sains yang tidak terbatas dalam lingkungan seperti itu dan penerapannya mudah dan tidak terbatas.

Selain itu, globalisasi dan pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan standar hidup di Afrika. Dari sekitar delapan miliar orang di dunia, lebih dari empat ratus juta orang di Afrika hidup dalam kemiskinan ekstrem (Human, 2021). Dengan perekonomian global yang mendesentralisasikan akses terhadap sumber daya lintas batas negara, kemiskinan dapat diberantas di negara-negara berkembang yang menjadi fokus pembangunan berkelanjutan. Kepedulian global ini merupakan sasaran pertama pembangunan berkelanjutan. Proyek yang mendorong usaha bebas dapat mengentaskan kemiskinan tidak hanya di Afrika namun juga di seluruh dunia. Kemitraan yang menguntungkan antara benua ini dan seluruh dunia dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup semua orang.

Melalui globalisasi, Afrika dapat memperoleh manfaat dengan mengakses pasar baru di seluruh benua. Kekuatan ekonomi tidak akan dibatasi dalam batas-batas suatu negara, karena masing-masing negara akan mampu menangkap ikan dari tambak negara lain. Produk-produk buatan lokal sudah dikirim ke luar batas negara dan ke luar benua, namun semakin kuatnya platform pemasaran teknologi memberikan akses baru kepada konsumen. Globalisasi telah menghasilkan pertumbuhan e-commerce sebagai alat pemasaran, dan munculnya perekonomian yang saling terhubung serta hubungan global telah memungkinkan terjadinya pola migrasi yang luas di seluruh dunia. Ada banyak sekali individu-individu berbakat yang bermigrasi ke luar Afrika dan orang-orang non-Afrika pindah ke Afrika. Perusahaan-perusahaan telah memperluas sumber daya manusia mereka untuk memanfaatkan wilayah seluas mungkin, dan talenta-talenta baru sedang dimanfaatkan di seluruh penjuru dunia.

15.3 TANTANGAN GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI AFRIKA

Globalisasi dan pembangunan berkelanjutan telah membawa Injil transformasi ke Afrika dan janji untuk menyelesaikan permasalahan lama yang terkait dengannya. Mempromosikan hak atas pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan strategi pembangunan lainnya yang didukung oleh SDGs merupakan solusi praktis terhadap permasalahan tersebut, namun dengan menerapkan globalisasi akan mempercepat penyelesaiannya. Namun, kekuatan-kekuatan ini dihadapkan pada perlawanan berbeda dan tantangan baru yang meredam energi mereka. Pengalaman globalisasi di masa lalu telah menciptakan kekhawatiran di Afrika yang dapat digambarkan sebagai keengganan historis. Afrika telah mengalami perlakuan tidak adil, eksploitasi, perbudakan, penjajahan, dan ideologi Eurosentris (Garcia, 2014). Hal ini menyulitkan kita untuk mencegah stereotip globalisasi Eurosentris yang menutupi manfaat yang bisa ditawarkan oleh globalisasi dan pembangunan berkelanjutan. Pengalaman masa lalu juga telah mengikis identitas budaya dan menghapus adat istiadat dan warisan berharga dari kesadaran kolektif Afrika, sehingga mendinginkan antusiasme terhadap globalisasi dan memberikan penjelasan atas sikap banyak negara.

Negara-negara Afrika juga terkubur dalam tumpukan utang; sumber daya yang dapat memacu pembangunan malah digunakan untuk memenuhi kewajiban yang ada. Komunitas internasional telah melakukan upaya untuk meringankan sebagian beban ini, yang mungkin

menjadi salah satu alasan Inisiatif Negara-Negara Miskin Berutang Besar (Heavily Indebted Poor Countries Initiative) diluncurkan bersama pada tahun 1996 oleh Bank Dunia dan IMF (Keller, 2007). Sayangnya, masalah ini terus menghambat pembangunan di Afrika. Maraknya kekerasan, terorisme, ketidakamanan, dan kerusuhan politik dan sipil terus mengganggu stabilitas negara-negara Afrika, sehingga sulit untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Kadang-kadang, kemajuan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi di Afrika tampaknya tidak dapat dicapai. Peperangan dan kerusuhan sosial lainnya terus-menerus mengancam akan menghancurkan sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan berkelanjutan dan globalisasi di Afrika.

Globalisasi dan SDGs menghubungkan pertumbuhan saat ini dan masa depan, namun terorisme, kekerasan, dan ketidakamanan terus membahayakan benua ini. Terlepas dari berbagai kampanye, agitasi, dan kerja sama yang dilakukan untuk mengarahkan Afrika ke jalur yang benar sebelum tahun 2030, kemiskinan masih merajalela di benua ini, dan Afrika telah dijuluki sebagai ibu kota kemiskinan dunia (Beegle & Christiaensen, 2019). Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, 1,6 orang harus keluar dari kemiskinan setiap detiknya. Namun, karena tantangan yang semakin berat di benua ini, angka kematian saat ini adalah 2,6 per hari, sehingga keberhasilannya tampaknya tidak mungkin terjadi (Human, 2021). Masalah-masalah ini bukannya tidak dapat diselesaikan, namun memerlukan upaya yang disengaja dan kolektif. Bisakah globalisasi berhasil di Afrika? Bisa saja, tapi hanya jika semua orang siap berkontribusi.

Menuju Pembangunan Berkelanjutan: Membuat Globalisasi Bekerja Untuk Afrika

Meskipun keadaan benua saat ini menunjukkan bahwa globalisasi dan pembangunan berkelanjutan mungkin tidak dapat dicapai dalam waktu dekat di Afrika, hal ini mungkin terjadi jika semua sumber daya dimobilisasi. Harus diakui secara luas bahwa Afrika tidak dapat memenuhi persyaratan dasar saja; memerlukan bantuan dari luar. Negara-negara harus membangun kemitraan strategis di benua ini untuk menempatkan Afrika pada jalur pembangunan. Setiap negara di Afrika juga dapat membina hubungan yang sehat dengan komunitas internasional, membangun hubungan dengan negara-negara sebagai bagian dari misi khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi. Hal ini, misalnya, merupakan salah satu kekuatan terbesar Tunisia (Saddem, 2001).

Afrika tidak hanya harus membuat kemajuan dalam bidang sanitasi dan kesehatan, namun juga harus mengambil tindakan untuk membendung degradasi lingkungan. Hal ini merupakan komponen inti pembangunan berkelanjutan karena perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi umat manusia. Pada tahun 2010, Institute for Security Studies menyatakan bahwa Afrika menerima curah hujan yang tidak mencukupi, yang secara bertahap mempengaruhi kualitas hidup dan produk pertanian di benua tersebut. Perubahan pola curah hujan juga menjadi penyebab terjadinya banjir, yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda di Afrika. Misalnya, emisi lalu lintas dan industri menurunkan kualitas udara di Mesir dan beberapa wilayah lain di benua ini. Peleburan tembaga dan pembakaran kobalt di daerah Kuwe di Zambia telah menyebabkan masalah besar terkait sulfur dioksida yang harus diatasi oleh negara tersebut (Adelzadeh, 2003). Afrika perlu bangkit dari keterpurukannya

karena pengabaian terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan akan menghambat kemajuan benua ini.

Selain itu, Afrika harus mendukung pembangunan dengan menjadi lebih menerima gagasan bantuan luar negeri, perdagangan, dan hubungan baik. Kebijakan luar negeri harus mendukung keterlibatan komersial yang lebih sederhana dan nyaman. Produk-produk di Afrika harus diizinkan menjangkau pasar-pasar baru, dan benua tersebut dapat membuka pasarnya terhadap fasilitas-fasilitas pokok yang tidak diproduksi secara lokal untuk memenuhi kebutuhan Afrika. Perubahan ini dapat meningkatkan perekonomian.

Afrika harus mendesentralisasikan tanggung jawab ekonominya, memperlakukan kedua gender secara setara, sebelum Afrika dapat menjadi pemangku kepentingan dalam diskusi global. Perempuan di Afrika saat ini berjumlah setengah dari jumlah penduduk, namun kontribusi mereka kurang dari 39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini merupakan akibat langsung dari termarginalisasinya anak perempuan dan terhambatnya pendidikan atau kesempatan lainnya (Raheem, 2021). Banyak budaya dan masyarakat yang masih mengirim perempuan kembali ke dapur atau menggunakan mereka sebagai pekerja gratis di pertanian, sehingga berdampak pada pendidikan anak perempuan dan tujuan Strategi UNESCO 2022–2029. Sekitar 37 persen perempuan di benua ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga, meskipun beberapa negara telah mencatat 50 persen prevalensi kekerasan gender yang mengkhawatirkan (African Development Bank Group, 2016). Saling menghormati dan menjunjung tinggi kesetaraan gender merupakan landasan masyarakat sehat yang mampu mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini berarti lebih banyak tenaga yang tersedia untuk mendorong pembangunan Afrika lebih jauh, sehingga lebih mudah untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga menyediakan lebih banyak sumber daya manusia untuk dimanfaatkan oleh benua ini.

Benua ini memerlukan upaya terpadu dan terkoordinasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan globalisasi. Upaya kolektif harus dilakukan, dan Uni Afrika adalah badan yang paling tepat untuk memperjuangkan tujuan ini jika mereka mulai mengambil tindakan proaktif. Rencana dan organisasi seperti Kemitraan Baru untuk Pembangunan Afrika (NEPAD) dapat berkontribusi terhadap pembangunan benua ini. Selain itu, Uni Afrika dapat membentuk komisi multinasional dan menjunjung tinggi kepentingan kontinental, memberikan saran langsung dan memantau proyek-proyek pembangunan.

Ada banyak rencana, sasaran, dan niat, seperti Agenda 2063, untuk mencapai masyarakat yang lebih baik dan lebih suportif bagi masyarakat Afrika. Namun tanpa dukungan dari kepemimpinan yang terfokus dan pemerintahan yang memiliki tujuan, hal tersebut hanya akan menjadi khayalan belaka. Para pemimpin Afrika di negaranya masing-masing harus mendukung dan percaya pada globalisasi dan agenda pembangunan berkelanjutan sebelum mereka dapat membangun konsensus di antara negara-negara Afrika. Peningkatan akuntabilitas akan menjamin kesinambungan pembangunan dan solusi jangka panjang terhadap permasalahan-permasalahan di benua ini. Meskipun perjalanan Afrika masih panjang sebelum dapat sepenuhnya menerima globalisasi dan memenuhi SDGs 2030, kemajuan telah dicapai. Perekonomian negara-negara Afrika tumbuh secara bertahap,

dengan sumber daya alam yang melimpah untuk menyediakan material dan kapasitas keuangan bagi pembangunan berkelanjutan. Negara-negara ini mempunyai kapasitas untuk memainkan peran yang lebih penting dalam desa global.

Pada tahun 2014, Uni Afrika menyetujui investasi sebesar Rp.870 T sebagai bagian dari Program Pembangunan Infrastruktur di Afrika (PIDA), meskipun sebagian besar disponsori melalui bantuan luar negeri. PIDA diharapkan dapat memberikan akses listrik yang dapat diandalkan kepada 70 persen negara-negara Afrika pada tahun 2040, naik dari 39 persen pada tahun 2009. Perbaikan pada sektor transportasi diperkirakan akan menghasilkan peningkatan efisiensi sebesar Rp. 2.496 miliar. Pada tahun 2014, Afrika memiliki 60 persen lahan subur di dunia dan jumlah penduduknya diperkirakan akan melampaui jumlah penduduk Tiongkok pada periode yang sama. Populasi muda berbakat di Afrika merupakan sumber daya manusia yang luar biasa, dan kontribusi cemerlang mereka terhadap Kecerdasan Buatan (AI) dan teknologi lainnya merupakan harapan bagi masa depan yang cerah di Afrika (Benedikter, 2019). Benua ini mempunyai cukup persenjataan untuk memposisikan dirinya sebagai pelopor perekonomian global; jika sumber daya ini dikelola secara efektif, target tahun 2030 akan dapat dicapai.

15.4 AFRIKA DALAM DUNIA GLOBALISASI

Afrika yang kita bayangkan sebagai bagian dari dunia global akan memiliki layanan kesehatan fungsional yang dapat diakses bahkan oleh masyarakat termiskin sekalipun. Ide-ide yang dibagikan melalui globalisasi akan memungkinkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan posisi Afrika di dunia yang terglobalisasi akan menempatkannya pada posisi yang setara dengan negara-negara lain dalam negosiasi internasional. Jika hal ini tidak terjadi berarti Afrika belum siap.

Afrika mempunyai sikap paling miskin terhadap permasalahan lingkungan hidup dan perubahan iklim, namun masyarakat Afrika harus melakukan upaya sadar untuk menanggapi permasalahan ini dengan serius. Ini adalah tanggung jawab yang tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Afrika tetapi juga warga negara lain di dunia. Banyak warga Afrika yang bermigrasi dari benua tersebut untuk mencari layanan kesehatan karena layanan medis di Afrika saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Akses terhadap layanan kesehatan tidak tersedia bagi semua orang di masyarakat, dan individu tidak memiliki keyakinan terhadap terbatasnya pilihan yang tersedia. Selain itu, tenaga medis yang dapat meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di benua ini akan segera pindah ke negara lain (Turner, 2011). Ini adalah contoh globalisasi, namun hanya sebagian saja. Masa depan global yang diharapkan bagi benua ini akan menarik individu-individu berbakat yang akan menyumbangkan keterampilan mereka. Layanan medis di Afrika harus menjadi pilihan yang menarik bagi warga non-Afrika. Jika Afrika ingin mewujudkan potensi dunia yang sepenuhnya mengglobal, beberapa langkah harus diterapkan untuk membendung brain drain dan menarik dokter asing.

Kekuatan dan perkembangan negara-negara abad kedua puluh satu ditentukan oleh kemajuan teknologi di setiap sektor perekonomian. Tangan terbuka yang diperluas untuk merangkul globalisasi telah mencapai prestasi luar biasa di beberapa negara Afrika, khususnya

di sektor AI, dimana generasi muda Afrika merupakan kekuatan utamanya. Laju pertumbuhan, kuantitas, dan kualitas produk pertanian telah ditingkatkan melalui kemajuan bioteknologi dan teknik manajemen pertanian, sebagaimana perbaikan mekanis telah menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja manusia yang tidak efisien. Penerapan teknologi telah membawa kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, dan Afrika dapat diposisikan sebagai pemasok utama tanaman komersial yang didistribusikan ke seluruh dunia untuk memenuhi peningkatan permintaan. Inilah manfaat kemajuan teknologi pertanian di Afrika. Inovasi yang berorientasi komersial di setiap negara mendorong pertumbuhan di setiap sektor perekonomian.

Globalisasi di Afrika telah mendorong berbagai perusahaan internasional untuk mengakses ruang komersial di benua tersebut, sehingga memberikan inovasi teknologi canggih bagi banyak negara. Afrika telah mengimpor model pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajarannya, dan globalisasi telah menawarkan pendidikan berkualitas kepada siswa Afrika, menempatkan mereka di atas yang lain, khususnya di pasar global. Penempatan Afrika yang tepat dalam perekonomian dunia akan memungkinkan Afrika memiliki inovasi teknologi dan mengembangkannya secara memadai. Visi global untuk benua ini menyediakan platform untuk memupuk kemajuan teknologi dan ide-ide inovatif. Investasi yang lebih besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi harus didorong untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat untuk mengatasi keterbatasan mereka saat ini. Afrika tidak boleh menjadi bagian pedesaan dari apa yang disebut “desa global”; sebaliknya, lembaga ini harus mengimbangi upaya segmen-segmen lain di desa yang sangat besar tersebut, dan memastikan bahwa semua anggotanya diakomodasi.

Keinginan untuk melakukan pembangunan selalu mengilhami tujuan setiap pemerintahan yang masuk akal. Dengan kondisi benua saat ini, jelas bahwa pembangunan perlu dilakukan di berbagai aspek masyarakat. Terlebih lagi, hal ini bukan berarti bahwa masyarakat dan pemerintah belum mengambil langkah-langkah menuju pembangunan sebelumnya, namun tantangannya adalah bahwa pembangunan tersebut sebagian besar tidak dilakukan dengan ideologi keberlanjutan. Pertumbuhan Pembangunan Berkelanjutan cenderung memberikan strategi pembangunan yang cukup berkelanjutan untuk masa depan. Negara-negara Afrika mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai hal ini, sehingga memerlukan bantuan asing. Kebutuhan akan sumber daya yang memadai dan efektif untuk mewujudkan pembangunan dapat dipenuhi melalui globalisasi dan peluangnya yang tiada habisnya. Oleh karena itu, SDGs dan globalisasi mungkin merupakan langkah besar dalam mewujudkan impian pembangunan di Afrika.

BAB 16

GLOBALISASI VIRTUAL MENEMBUS BATAS INDIVIDU

Bagaimana perdebatan mengenai arah globalisasi di masa depan dapat dimajukan, khususnya mengenai pertukaran tubuh dan benda dari pengunjung dan wisatawan ke bagian tubuh dan virus, ketika hubungan global dimediasi melalui teknologi yang tidak mengandung tubuh dari platform data dan pengawasan digital hingga biomedis? Dari sisi lain, bagaimana cara terbaik kita memahami proses-proses yang melaluinya proses globalisasi cenderung dikelola, disurvei, dan dikendalikan melalui mekanisme mediasi teknologi yang lebih abstrak? Bab ini menguraikan cara yang konsisten secara metodologis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Laporan ini menyelidiki ketegangan antara berbagai bentuk pertukaran sosial ini, dengan alasan bahwa globalisasi tanpa tubuh kini menjadi bentuk globalisasi yang dominan, dan kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Dengan mengeksplorasi tema-tema perwujudan, termasuk reproduksi manusia, identitas seksual, vaksinasi, dan rekayasa genetika, bab ini berupaya menunjukkan bagaimana intervensi tekno-ilmiah yang dikaitkan dengan ideologi mengatasi keterbatasan tubuh mengubah makna menjadi manusia.

Bahkan pada tingkat aktivitas lokal sehari-hari, hubungan yang terkandung di dalamnya mengalami transformasi mendasar melalui proses abstraksi yang semakin mengglobal. Perkembangan termasuk jangkauan teknologi, kapitalisme siber, dan teknologi komunikasi semakin mempengaruhi cara kita menjalani tubuh kita. Hal ini memungkinkan terjadinya fenomena yang beragam seperti perdagangan global bagian tubuh dan distribusi obat-obatan, termasuk vaksin pandemi. Krisis global akibat COVID-19 telah mewujudkan hal ini, dengan segala dampaknya yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia. Tampaknya sekali lagi, perbaikan teknologi menjadi penting untuk memitigasi dampak dunia yang terbalik akibat teknologisasi dan eksploitasi ekologi bumi—kali ini melalui transfer zoonosis yang semakin intensif akibat perubahan iklim, penggundulan hutan, dan teknologisasi pertanian.

Namun, ada perubahan yang kurang jelas terhadap empat tubuh yang sedang terjadi. Bioteknologi terus memperbarui fondasi prokreasi, kehamilan, dan pembentukan identitas manusia, meskipun tidak merata di berbagai belahan dunia. Bab ini menyatakan bahwa kecuali ada tindakan yang dilakukan secara refleksi diri dan politis untuk memperlambat dominasi teknologi dalam konteks apa yang bisa disebut sebagai “globalisasi tanpa tubuh”, periode kekacauan eksistensial saat ini akan meluas hingga masa depan. Hal ini akan memperparah dan secara radikal memperluas kita ke arah yang berbeda, mematahkan kesadaran kita akan diri kita sendiri dan hubungan kita dengan orang lain dan dengan alam.

Bagaimana kita bisa mengajukan klaim seperti itu? Bagaimana kita dapat menggunakan vektor globalisasi di masa lalu dan masa kini dengan tepat untuk memberikan pemahaman kita mengenai kemungkinan dan peluang terjadinya pertukaran global di masa depan? Bab ini memproyeksikan dominasi globalisasi yang tidak berwujud sebagai salah satu dari banyak kemungkinan di masa depan—yang “mungkin” hanya jika kita melihat kekuatannya saat ini, dan selalu bergantung pada agen, aspirasi, dan keinginan manusia. Ada

perbedaan besar antara memprediksi atau meramalkan dan memproyeksikan skenario masa depan yang masuk akal, dibayangkan, dan mungkin terjadi. Prediksi cenderung berbentuk pelacakan statistik. Ini adalah kutukan bagi futurisme buruk dan mendasari kecenderungannya untuk melakukan kesalahan. Garis pada grafik tidak menentukan masa depan, meskipun analisis statistik merupakan bagian berguna dari pendekatan analitis yang lebih luas.

Tanpa menghindari analisis statistik, pendekatan yang ada saat ini justru bekerja dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan pergerakan kekuatan-kekuatan sosial yang dominan. Bab ini menggunakan analisis “cara praktik” sebagai bagian dari metode teori yang lebih luas (Steger & James, 2019). Tidaklah kontroversial untuk mengatakan bahwa di dunia saat ini, cara produksi yang dominan adalah kapitalisme siber, cara pertukaran yang dominan adalah pertukaran komoditas dan keuangan, cara penyelidikan yang dominan adalah analitik-ilmiah, dan cara berpikir yang dominan. organisasi bersifat birokratis-korporat.¹ Dari persinggungan antara cara-cara praktik ini, telah muncul sebuah fenomena unik dalam sejarah yang dapat disebut sebagai teknosains, yang didefinisikan sebagai instrumentasi penyelidikan yang berteknologi, terkait dengan kapitalisme siber, dengan kecenderungan yang mengarah ke arah menciptakan kembali kehidupan alam dan sosial untuk tujuan pengembalian investasi dan “mengatasi” keterbatasan sejarah sebagai manusia. Jelasnya, bukan penerapan prinsip-prinsip ilmiah pada penyempurnaan teknologi yang perlu dipertanyakan sains teknologi lebih dari itu. Yang lebih jelas adalah segitiga ilmiah-teknologi-kapitalis yang terdiri dari perpecahan, rekonstitusi, dan eksploitasi fondasi dasar kehidupan dan materi di planet ini.

Bab ini dimulai dengan menetapkan istilah-istilah argumen generalisasi tentang globalisasi tanpa tubuh dan dominasinya saat ini dan yang akan datang. Yang mendasari argumen ini adalah sebuah proposisi normatif: kecuali orang-orang secara aktif memilih untuk hidup berbeda, dominasi hubungan tanpa tubuh yang semakin besar, baik secara global maupun lokal, akan terus membentuk kembali hubungan kita satu sama lain dengan cara yang mengganggu kondisi kita sebagai manusia. mengetahuinya. Penyelidikan metodologis dan politis ini terjalin melalui diskusi mengenai sejumlah tema: reproduksi manusia, identitas seksual, vaksinasi, dan rekayasa genetika. Sekarang kita beralih ke pendefinisian istilah-istilah dan proses-proses utama.

16.1 MENYEMBUHKAN GLOBALISASI

Hubungan, tekanan, dan dampak yang tidak berwujud merupakan inti dari globalisasi kontemporer. Dan nampaknya tren ini akan semakin intensif di masa depan, yang secara abstrak mengintegrasikan dunia melalui platform digital dan dengan kejam membaginya dalam hal akses, mobilitas, dan kekayaan. Artinya, dalam kaitannya dengan pola kekuasaan, masyarakat, mulai dari pekerja proses di maquiladora di Matamoros hingga penjual kartu fleksibel Digicel di jalanan Port Moresby, akan terus menjadi pihak kedua dalam fluktuasi nilai dan arus data. pasar keuangan dunia, sistem pertukaran mata uang, dan platform komunikasi. Krisis global akibat COVID-19 telah menjadi ujian tajam terhadap kekuatan struktural dari proses berkelanjutan yang mengintegrasikan dunia pada satu tingkat dan memecah-belahnya

pada tingkat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan digital berupa gambar, tanda, dan data terus meningkat selama periode COVID. Hal ini terjadi bahkan ketika pergerakan manusia semakin terkelola, diawasi, dan dibatasi. Bahkan pada masa krisis yang tidak menentu ketika, dalam waktu singkat, perdagangan menurun drastis dan berbagai pakar kembali salah dalam membicarakan penurunan globalisasi, tren tandingannya tetap mengejutkan. Komunikasi dan aliran data meningkat. Proyeksi bermasalah ini tampaknya merupakan sebuah pengulangan siklus yang mengabaikan bentuk globalisasi baru yang dominan. Sebagai salah satu contoh globalisasi tanpa tubuh di bawah COVID, lalu lintas Internet internasional meningkat dua kali lipat pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Sejak saat itu, angka tersebut terus meningkat dengan kecepatan yang stabil (Altman & Bastian, 2021).

Bagaimana beberapa komentator ekonomi salah menilai proyeksi masa depan mereka? Hal ini sebagian bersifat jangka pendek, dan sebagian lagi bersifat dramatis, namun juga berfokus pada beberapa indikator yang berbeda dengan fokus yang tidak tepat: pergerakan manusia (yang merupakan perwujudan globalisasi) dan angka perdagangan (salah satu aspek dari globalisasi yang berkaitan dengan objek), dengan beberapa komentator menambahkan investasi asing langsung (sebuah aspek kecil dan khususnya mudah berubah dalam globalisasi tanpa tubuh). Data OECD mengenai globalisasi, misalnya, sangat tidak seimbang, dengan semua kategori berfokus pada aktivitas perusahaan dan sebagian besar data terkait perdagangan (OECD, n.d.). Tidak mengherankan jika analisis arus utama bisa begitu keliru.

Semua ini menegaskan perlunya kerangka analitis yang membedakan tingkat globalisasi berdasarkan bentuk sosial dari keterkaitannya. Agar jelas mengenai lintasan saat ini dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan, penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang kita bicarakan. Setidaknya secara analitis, globalisasi dapat dibagi menjadi beberapa lapisan proses yang lebih abstrak hingga yang memperluas dan mengintensifkan hubungan sosial di seluruh dunia. Hubungan yang diwujudkan, yang merupakan lapisan pertama, dilakukan oleh individu dan kelompok yang bergerak dalam kapasitas pribadi mereka secara lokal dan di seluruh dunia sebagai pengunjung, migran, peneliti, turis, dan sebagainya melibatkan orang lain dan memperluas hubungan lebih dari sekedar tempat terdekat. Hal ini menjadi terglobalisasi secara sadar (dengan sistematisitas yang tidak disengaja namun teragregasi) ketika cakrawala imajinatif dan aktif masyarakat meluas hingga ke ujung bumi. Salah satu aspek dari sisi subjektif dari proses ini adalah apa yang disebut Manfred Steger sebagai kebangkitan imajinasi global (Steger, 2008).

Hubungan yang diperluas secara institusional dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas mereka sebagai agen negara, perusahaan, dan institusi lainnya mulai dari personel militer hingga pebisnis yang berkeliling dunia. Bentuk kedua ini menggabungkan tubuh orang-orang yang melakukan perjalanan, namun mengubah praktik kerja mereka sebagai agen dari sesuatu di luar diri mereka. Selain menjadi manusia, mereka juga menjadi personel. Artinya, pada satu tingkat, mereka diangkat dari kedekatan hubungan pribadi mereka untuk menjadi perwakilan dari sesuatu yang lain.

Dalam bentuk ketiga, hubungan yang diperluas dengan objek, keterlibatan berpindah ke objek-objek yang beredar di seluruh dunia, mulai dari komoditas yang diperdagangkan dan partikel plastik hingga bagian tubuh dan virus. Sekali lagi, meskipun objek-objek ini termasuk bagian tubuh manusia ginjal, sperma, dan sel telur mereka diabstraksi dari perwujudan sebelumnya. Disengaja atau tidak, objek-objek ini memperluas dan membentuk kembali makna-makna dan hubungan-hubungan yang ada di ruang yang luas ketika orang-orang mulai dari penjual bagian tubuh hingga penerima organ tubuh mulai menganggap dunia sebagai pasar global yang berisi berbagai kemungkinan yang dikomodifikasi untuk kehidupan mereka sendiri. berjuang. Dan yang terakhir, relasi tanpa tubuh adalah relasi-relasi yang lahir dari benda-benda dan proses-proses non-materi seperti teks elektronik dan kapital yang dikodekan. Bentuk hubungan inilah yang di dunia masa kini, dan bisa dibayangkan di masa depan, akan mengubah bentuk-bentuk hubungan lainnya. Ini merupakan bentuk globalisasi yang dominan.

Dalam metode teori terlibat, masing-masing bentuk ini dipahami secara analitis sebagai lebih abstrak secara material dibandingkan tingkatan sebelumnya. Yang sama pentingnya, sejarah telah mengajarkan kita bahwa seiring berjalannya waktu, tingkat-tingkat yang lebih abstrak cenderung meringkaskan ulang dan menyusun kembali tingkat-tingkat sebelumnya daripada menggantikannya. Dengan menggunakan rangkaian pembedaan analitis ini (dan tidak memperlakukannya sebagai tipe ideal atau formasi yang berdiri sendiri) memungkinkan kita untuk memahami perubahan bentuk-bentuk globalisasi yang dominan tanpa menunjukkan bahwa salah satu bentuk globalisasi lainnya telah tergeser atau direduksi menjadi tidak relevan. Dalam praktiknya, seperti yang akan dijelaskan dalam bab ini, bentuk-bentuk relasional yang berbeda ini semakin terikat satu sama lain. Namun, argumen yang menghubungkan bab ini adalah, dengan memproyeksikan pola dan lintasan masa lalu dan masa kini, kemungkinan besar masa depan kita adalah, pertama, konsolidasi dominasi bentuk tanpa tubuh ini, kedua, merenggangnya ketegangan antara bentuk ini dan bentuk-bentuk lain, dan ketiga, kontestasi keterputusan kekuasaan sebagai proses hubungan tanpa tubuh yang mencakup, mendominasi, dan membentuk kembali semua hubungan lainnya.

Bagaimana kita bisa membicarakan dominasi globalisasi tanpa tubuh ketika pergerakan global dari tubuh manusia menjadi semakin kontroversial dan diperebutkan? Tentu saja kekuatan negatif dari pergerakan pengungsi dan migran ekonomi telah menyebabkan pergolakan politik besar-besaran di dunia dan tanpa adanya perubahan besar dalam politik perbatasan negara, hal ini tampaknya akan terus berlanjut. Jenazah para pelancong yang berpotensi membawa jenis COVID-19 yang berbeda juga mempunyai kekuatan negatif yang mengganggu secara global, dan hal ini juga akan terus berlanjut. Namun, pergeseran perspektif untuk mengkaji proses-proses yang memantau, mensurvei, dan mengelola pergerakan tersebut dengan kata lain, di mana kekuasaan berada memperjelas betapa banyaknya proses tanpa tubuh yang telah mengubah kerangka mobilitas yang diwujudkan. Negara-negara, organisasi internasional, dan industri perusahaan perangkat lunak subkontrak yang sedang berkembang, kini, misalnya, menggunakan infrastruktur digital yang canggih untuk mengelola jenazah orang-orang yang mencari suaka dan perlindungan di

seluruh dunia. Oleh karena itu, yang kita bicarakan bukanlah hilangnya tubuh, melainkan pemulihan hubungan yang terkandung di dalamnya.

16.2 TEKNOLOGI DAN KETERBATASAN KONDISI MANUSIA

Dalam karya sebelumnya, Manfred Steger dan saya telah menggunakan ledakan bom atom pada tahun 1945 sebagai penanda simbolis tentang cara di mana proses-proses abstrak, yang paling mendesak melalui intervensi tekno-ilmiah, telah mengganggu ketenangan perasaan dan praktik dasar hubungan manusia dengan orang lain dan dengan alam (James & Steger, 2021). Kami berpendapat bahwa Kekacauan Besar melibatkan kemampuan untuk membongkar dan menyusun kembali kondisi-kondisi dasar kehidupan. Dalam kasus bom, pembelahan atom mempunyai konsekuensi yang dahsyat terhadap jangkauan kekerasan global, membuka kemungkinan terjadinya akhir dunia seperti yang kita kenal sekarang.

Dalam esai ini, saya ingin menggunakan penanda lain dari Kegelisahan Besar yang lebih berkaitan dengan perwujudan manusia penemuan struktur heliks ganda DNA pada tahun 1953, yaitu asam deoksiribonukleat. Hal ini dinyatakan sebagai “rahasia kehidupan”, namun hal ini melibatkan kemampuan untuk menyusun kembali arti hidup, termasuk makna janin yang “normal”. Sungguh mengejutkan betapa eratnya garis waktu penaklukan genetik dengan garis waktu pemisahan atom. Dalam kata-kata Eugene Thacker, dengan bersatunya basis data genom, sintesis DNA, dan teknologi regeneratif, manusia dalam skala global telah “mendefinisikan ulang secara ontologis gagasan ‘kehidupan itu sendiri’” biologis (Thacker, 2005). Penemuan DNA dalam argumen ini merupakan penanda pergeseran ontologis dalam matriks intervensi biologis lainnya. Rekayasa genetika dan aktivitas terkait seperti fertilisasi in vitro kini memungkinkan kita menghidupkan dan menghidupkan kembali kondisi kehidupan, termasuk penciptaannya. Terobosan teknologi seperti CRISPR, yang ditandai dengan Hadiah Nobel Kimia tahun 2020, dengan cepat menjadi hal yang normal sehingga kini diiklankan untuk digunakan oleh siswa sekolah menengah di ruang kelas untuk merekayasa ulang bentuk kehidupan. Di masa lalu, manusia telah mengendalikan kehidupan -penciptaan melalui dekrit politik dan budaya atau melalui penggunaan praktik fisik dan herbal, namun dengan terungkapnya “rahasia” kehidupan, maka muncullah tingkat intervensi, kontrol, dan eksploitasi yang baru.

Ulrich Beck menyebut proses ini sebagai “menjadi Tuhan”: “Asal usul kehidupan manusia terpapar pada campur tangan manusia dan kemauan kreatif, namun sebagai hasilnya juga menjadi arena bermain bagi berbagai aktor dan kepentingan yang tersebar di seluruh dunia” (Beck, 2016). Beck menjadikan perubahan peran sebagai ibu dan kelahiran yang dimungkinkan oleh teknologi sebagai caranya merestorasi kehidupan sosial di planet ini: “Apa yang dulunya merupakan tindakan intim dan hampir 'sakral' telah bermetamorfosis menjadi bidang aktivitas global yang kosmopolitan” (Beck, 2016). Karena terdapat kesamaan politik yang substansial dengan argumen esai ini (tetapi juga terdapat perbedaan teoritis yang mendalam dengan beberapa implikasi politik), saya akan kembali ke bukunya *The Metamorphosis of the World* untuk memilah permasalahan yang saya rasakan dengan pendekatannya. Saya juga akan menggunakan karya Donna Haraway sebagai titik kontak

dalam prosesnya. Sangat berbeda dengan Beck, dan sebagai pendahulu Materialisme Baru, ia cenderung mereduksi objek yang beragam seperti DNA, janin, dan bom menjadi konstruksi ilmu pengetahuan teknologi yang kompleks:

Benda-benda seperti janin, chip/komputer, gen, ras, ekosistem, otak, database, dan bom adalah sel induk dari tubuh teknosains. Masing-masing objek aneh ini merupakan konstruksi terkini atau “objek pengetahuan” semiotik material, yang ditempa oleh praktik-praktik heterogen dalam tungku ilmu pengetahuan teknologi.

Perbedaannya dengan argumen yang ingin saya kemukakan di sini adalah, terlepas dari kompleksitas deskriptif analisis Haraway, janin dan sel induk secara ontologis diratakan sebagai ciptaan hibrida dari ilmu teknologi global. Dalam metode teori keterlibatan, hal ini terjadi pada satu tingkat, namun keterputusan tetap ada karena, di seluruh dunia, para ibu juga terus mengalami kehamilan dengan cara yang beragam dan diwujudkan secara budaya, yang membuat jantung berdebar-debar meskipun mode ilmiahnya dominan. Sementara Haraway menganjurkan “kebebasan teknosaintifik” yaitu, mengendalikan, menghuni, dan membentuk alat-alat yang membentuk kembali kita esai ini, sebagai perbandingan, mempertanyakan keseluruhan proyek teknosaintifik dalam mengungkap, mengendalikan, dan mengatasi.

Namun, pertama-tama, esai ini menjelaskan beberapa silsilah sejarah yang memungkinkan kita memahami kontinuitas mendalam dan diskontinuitas mendalam dari Kekacauan Besar. Apa yang digambarkan Beck adalah transformasi dunia yang menyeluruh dan membutuhkan bahasa baru. Apa yang dideskripsikan dalam esai ini adalah sebuah rekonstitusi yang sangat meresahkan atas bentuk-bentuk dominan sebelumnya, yang pada satu tingkat meneruskan aspirasi dan khayalan lama. Ironisnya, keterputusan antara khayalan subjektif dan praktik objektif ini memungkinkan para pendukung masa depan pasca-manusia yang berteknologi untuk berpendapat bahwa apa yang terjadi adalah hal yang perlu dan baik. Dengan kata lain, saya berpendapat bahwa kegelisahan di dunia ini lebih rumit daripada yang digambarkan Beck.

The Disemb Odying Mise-En-Scène Dari Kehamilan Manusia

Kerangka teknologi ilmiah mengenai praktik kehamilan yang diwujudkan secara mendalam menjadi manusia memiliki, seperti sebagian besar proses yang meresahkan ini, memiliki sejarah panjang dengan tren tandingan yang signifikan. Kerangka medis kehamilan manusia dimulai dengan berbagai jalur penyelidikan modern. Dua dari baris-baris ini sangat relevan dengan cerita yang lebih panjang yang diceritakan di sini: keinginan untuk mengungkap hal-hal yang tidak diketahui dan aspirasi untuk mengatasi “kekurangan” reproduksi manusia. Mengungkap teknis dari rahim, sebuah bagian dari proses menjungkirbalikkan tradisi lama Doktrin ilmu terlarang (*quae supra nos, ea nihil ad nos*) mula-mula brutal, kemudian dinormalisasi. Pada awal perkembangan pengobatan modern dari abad ke-16 hingga ke-18, ilmu ini melibatkan pemetaan tubuh manusia melalui paparan anatomi, sering kali menggunakan mayat yang dikuliti. Misalnya, atlas obstetri William Hunter yang beredar luas, *Anatomy of the Human Gravid Uterus* (1774), menggambarkan wanita hamil yang terpotong-potong dan meninggal sebelum melahirkan. Kaki dan perut bagian atas

wanita dipotong atau ditutup dengan kain untuk membentuk rahim dengan gangguan grafis yang minimal. Atlas semacam itu adalah bagian dari proses yang lebih luas untuk mengungkap jenazah dengan detail teknis yang tepat. Pada saat yang sama, hal-hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan keyakinan-keyakinan organik yang istimewa atau doktrin-doktrin yang sistematis secara kosmologis tentang anak yang belum dilahirkan (Sasson & Law, 2009). Butuh waktu hampir dua abad agar imajinasi teknis ini dapat digeneralisasikan ke seluruh dunia di luar profesi medis yang sedang berkembang dan menjadi kerangka konsepsi global tentang proses kehamilan. Hal ini terjadi dengan dampak yang kontradiktif.

Perjalanan dari Hunter's Gravid Uterus ke teknik baru di pertengahan abad ke-20 untuk mengungkap janin masih jauh dari berjalannya waktu, namun terdapat kontinuitas—dan terdapat pula diskontinuitas yang semakin mengganggu identitas dan kehidupan. Di satu sisi, mengungkapkan janin kini telah digeneralisasi dan dinormalisasi sebagai bagian dari perawatan pribadi. Tingkat USG memberikan contoh yang baik karena tampaknya sederhana dan tidak berbahaya. Diciptakan pada tahun 1950an, dan meluas ke pasar global pada akhir tahun 1970an, hal ini, pada tingkat tertentu, mengembalikan gambaran janin kepada wanita yang sedang menjalani prosedur pemindaian. Ia memandang pertumbuhan janin di tubuhnya sendiri sebagai peristiwa pribadi yang intim. Di satu sisi, memang demikian adanya. Peristiwa yang terungkap di media massa, seperti gambar janin di sampul depan Majalah Life pada tahun 1965, muncul dari banyak sekali surat dan korespondensi yang diterima. Namun, seperti yang telah didokumentasikan oleh sejumlah feminis dan penulis lain, peristiwa pengungkapan janin juga menjadi proses yang diatur secara budaya dan dimediasi secara medis, yang diulangi di seluruh dunia, yang menghilangkan perempuan melalui teknik, norma, dan pertanyaan yang diatur (Duden, 1993; Nicolson & Fleming, 2013). Ingin tahu jenis kelamin anak Anda? Apakah bayi memiliki sepuluh jari tangan dan sepuluh jari kaki? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pengungkapan tersebut secara bersamaan diberlakukan sebagai "ikatan" pribadi yang intim dan digunakan dalam diagnosis abstrak untuk menentukan apakah janin cukup "normal" untuk dianggap cukup bulan. Dengan demikian, orang tua muncul sebagai penentu hidup dan mati.

Sejak awal, pencitraan telah mengalami lompatan kualitatif, kini digabungkan dengan sejumlah tes lain yang tersedia secara global, termasuk penggunaan plasma ibu untuk melakukan cfDNA atau tes DNA janin tanpa sel. Kodifikasi semacam ini, yang sekarang juga dikaitkan dengan sistem Kecerdasan Buatan, disebut pengujian prenatal "non-invasif" (NIPT), seolah-olah dengan secara progresif mengesampingkan hal-hal yang bersifat fisik dari pengungkapan biomedis, maka ikatan pribadi akan semakin diperkuat. Namun, dengan mundur dari proses yang mendesak, Charis Thompson menggambarkan pengelolaan aspek teknis, hukum, gender, dan pembentuk identitas dari pengobatan reproduksi sebagai koreografi ontologis yang meresahkan:

Apa yang kelihatannya merupakan kekacauan hibrid yang tidak terdiferensiasi sebenarnya adalah perpaduan yang seimbang dari hal-hal yang umumnya dianggap sebagai bagian dari tatanan ontologis yang berbeda (bagian dari alam, bagian dari diri, bagian dari masyarakat). Elemen-elemen ini harus dikoordinasikan secara bertahap agar tugas yang ada bisa terlaksana: menghasilkan orang

tua, anak, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengakuan mereka. Jadi, misalnya, pada saat-saat tertentu suatu bagian tubuh dan alat-alat bedah harus berdiri dalam suatu hubungan yang khusus, pada saat yang lain sebuah keputusan hukum dapat memperjelas kekerabatan dalam prosedur-prosedur selanjutnya yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat yang lain suatu bentuk akuntansi birokrasi dapat melindungi kesucian manusia. embrio atau membiarkan embrio tertentu dibuang. (Thompson, 2005:8)

Apa yang digambarkan oleh Thompson, hal yang umum terjadi di negara-negara Utara dan tidak merata di negara-negara Selatan, adalah proses memisahkan unsur-unsur perwujudan reproduksi dan menyatukannya kembali dalam model biomedis yang secara fundamental mengubah makna identitas dan kekerabatan yang terkandung. Di sini, proses pengungkapan dan penanggulangan modern yang lebih tua dilapisi dengan kerangka bioteknik tanpa tubuh yang secara mendasar mengubah makna tubuh kita (Kukla, 2004).

Tujuan yang semakin intensif untuk mengatasi keterbatasan yang ada telah menghasilkan “bantuan” bagi industri global dalam teknologi reproduksi dengan lebih dari delapan juta anak lahir di seluruh dunia setiap tahunnya, sebagian besar di Dunia Utara. Pasar layanan kesuburan diperkirakan pada tahun 2021 bernilai Rp. 227.450 Miliar (Patrizio et al., 2022). Menggunakan data ekonomi tersebut untuk melacak industri global adalah mekanisme umum untuk menunjukkan dampak global. Pendekatan lainnya adalah dengan memetakan perjalanan global pariwisata reproduksi, pergerakan global gamet manusia (Inhorn, 2011: 87–103), atau perdagangan bagian tubuh seperti ginjal, kornea mata, dan rambut manusia. Di sini metode kami akan menunjukkan bagaimana bio-kolonialisme yang eksploitatif melibatkan pertukaran yang tidak merata dan eksploitatif dalam berbagai bentuk keterkaitan. Namun pencarian kami secara paradoks, mengingat dampaknya yang sangat besar melakukan penelitian yang lebih halus dan sulit dibuktikan, yakni menelusuri perubahan dalam ontologi reproduksi. Salah satu cara untuk memahami perubahan ini adalah melalui deskripsi Barbara Duden tentang momen terungkapnya janin pada tahun 1965 yang melibatkan hilangnya cakrawala, mirip dengan melihat Planet Biru melayang di angkasa:

Saat ini menjadi sangat sulit bagi kita untuk menyadari, merasakan, cakrawala yang di baliknya terdapat hal-hal yang belum tersembunyi dalam sebagian besar sejarah. Salah satu peristiwa yang paling mendasar namun paling sedikit diperhatikan pada paruh kedua abad ke-20 adalah hilangnya cakrawala. Kita hidup di antara TV satelit, yang tidak mengenal cakrawala, dan telepon, yang memungkinkan kita menjangkau melampaui garis pandang kita untuk terhubung dengan nomor mana pun yang kita pilih. Perlu upaya khusus untuk mengingat bahwa cakrawala itu pernah ada, meski baru saja terhapus. Baru kemarin seluruh bumi tiba-tiba “muncul” sebagai Planet Biru dan kita mulai menerima kenyataan bahwa semua akan terpapar pada peralatan perekam yang mengorbit jauh di atas Menara Babel ini. Saya menganggap janin sebagai salah satu hasil modern dari hidup tanpa cakrawala. (Dung, 2000)

Seperti yang ditulis Donna Haraway, “Janin dan planet Bumi adalah saudara kandung dalam dunia teknologi” (Haraway, 1997). Perbedaannya di sini bagi Haraway, dan berbeda

dari argumen yang dibuat dalam esai ini, adalah bahwa hal ini dapat dipahami hanya sebagai cakrawala perwujudan lainnya. Namun, metode level memperjelas apa yang dimaksud dengan proses pembingkai disemodiment. Tubuh tidak mengalami dematerialisasi, namun secara sosial dibentuk kembali melalui tingkat keterlibatan yang lebih abstrak, sebuah dunia yang merelatifkan (secara efektif tidak memiliki horizon) dengan perbedaan dan identitas yang belum terselesaikan (Caddick, 1986). Misalnya, bahkan sejak gambar sampul depan Majalah Life pada tahun 1965 yang menggambarkan janin dan plasenta mengambang di ruang hitam tanpa tubuh, tubuh ibu pada satu tingkat secara obyektif telah diturunkan ke tahap belakang pencitraan medis. Yang terlihat dalam kumpulan foto yang mengubah dunia ini hanyalah kantung ketuban dengan latar belakang hitam. Secara obyektif, ia digambarkan sebagai organisme yang diabstraksikan di luar rahim (Life Magazine, 1965). Pada saat yang sama, secara subyektif, foto-foto tersebut diterima oleh masyarakat umum sebagai sesuatu yang sangat manusiawi. Cetakan pertama Life sebanyak delapan juta eksemplar terjual habis dalam beberapa hari.

Minat global sangat besar, dengan artikel tersebut diterbitkan secara bersamaan di Sunday Times Inggris dan French Paris Match. Foto-foto tersebut dinyatakan sebagai “potret” pertama embrio hidup di dalam rahim ibunya, namun kenyataannya, yang tidak dibahas pada saat itu, banyak dari embrio dalam foto tersebut sudah tidak hidup lagi; mereka adalah organisme hasil aborsi yang “dipentaskan” di luar rahim ibu mereka. Jadi, di satu sisi, kita seolah-olah masih berada di zaman brutal pengungkapan mekanis, hanya disajikan dengan lebih romantis. Namun, secara lebih mendalam, kita menyaksikan perubahan global atas kelahiran manusia sebagai hak yang terungkap dan dipilih bukan anugerah terselubung dari orang lain atau kemungkinan alamiah yang terbatas, seperti yang terjadi sebelumnya. Ilmu pengetahuan kini memungkinkan segalanya, dan seiring berjalannya waktu, kritik feminis sebagian besar kehilangan keunggulannya, dialihkan oleh ideologi globalisasi tentang pembebasan dari kendala yang ada.

Sejarah paralel dapat ditulis mengenai gerakan eugenika, hanya saja gerakan ini dengan cepat menjadi lazim secara global di bidang pertanian dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dinormalisasi pada masa kehamilan manusia dan pertumbuhan bagian tubuh. Pada tahun 1934, terjemahan bahasa Inggris dari volume bahasa Jerman tahun 1921 karya Hermann Rohleder diterbitkan dengan judul *Test Tube Babies: A History of the Artificial Impregnation of Human Beings*. Meskipun judul bukunya membangkitkan revolusi dalam fertilisasi in vitro di kemudian hari, Rohleder menggambarkan proses mekanis yang telah lama diketahui yaitu menghamili wanita dengan sperma dari pria yang dikenal melalui transfer fisik tetapi noncoital. Terkait dengan proses pengungkapan, perubahan yang meresahkan dalam mengatasi kekurangan manusia terjadi pada pertengahan abad ke-20. Namun, dalam kasus ini hal ini terjadi pertama-tama secara ideologis dan kemudian secara ilmiah.

Pada tahun-tahun awal abad ini, perubahannya terjadi secara perlahan. Eugenics: *The Science of Human Improvement by Better Breeding* (1911) karya Charles B. Davenport terkenal karena menghubungkan perkembangan tanaman dengan reproduksi manusia.⁶ Meskipun (atau mungkin karena) ketidakjelasan ilmiah dan sering kali rasis dan elitis, tanaman-tanaman

tersebut buku menyebarkan gerakan eugenika ke seluruh dunia. Pada tahun 1925, Davenport menjadi presiden pertama Federasi Internasional Organisasi Eugenika. Ini adalah konteks di mana Aldous Huxley menerbitkan buku terlarisnya tahun 1932, *Brave New World*. Beberapa dekade kemudian, eksperimen eugenika Nazi semakin memperlambat legitimasi rekayasa genetika. Namun demikian, ilmu pengetahuan terus berjalan secara diam-diam dengan nama-nama baru seperti “reproduksi berbantuan teknologi”, “penyaringan genetik”, dan “biologi sintetik”. Perkembangannya dengan cepat bertambah parah. Pada tahun 1961, seorang ilmuwan Italia berhasil membuahi sel telur manusia di dalam cawan laboratorium. Pada tahun 1985, ibu pengganti kehamilan pertama di dunia dilakukan dengan embrio yang telah dibuahi dari pasangan Amerika berhasil ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Pada tahun 1996, sebuah tim Amerika, yang beroperasi secara transnasional di Meksiko untuk menghindari undang-undang nasional, memfasilitasi kelahiran bayi dengan menggunakan DNA mitokondria dari donor anonim serta sel telur dan sperma dari pasangan Muslim Yordania, sehingga menghasilkan “kejadian terburuk di dunia.” pertama” secara biologis memiliki tiga orang tua. Pada tahun 2021, “model” embrio manusia diciptakan di Australia yang merupakan suatu bentuk kloning untuk menghasilkan apa yang mereka sebut “iBlastoid”, tanpa memerlukan sel telur dan sel sperma. Perkembangan ini kini menguji hukum bahwa blastokista manusia tidak dapat dibiakkan melebihi perkembangan “embrio” dari apa yang disebut “garis primitif.” Pada tahun 2022, David Bennett Sr. dari negara bagian Maryland, jantungnya yang rusak digantikan oleh jantung babi yang diubah secara genetik; dia hidup selama sebulan setelah xenotransplantasi.

Sebelum mengakhiri narasi ini, ada baiknya kita menjelaskan lebih lanjut bagaimana semua ini terkait dengan krisis COVID. Jawaban sederhananya adalah bahwa vaksin mRNA dan adenovirus generasi baru juga bergantung pada penyusunan ulang tubuh manusia yang tidak berwujud ini. Vaksin AstraZeneca, misalnya, menggunakan HEK-293, garis sel ginjal embrio manusia yang berasal dari janin yang diaborsi pada awal tahun 1970-an.⁷ Dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan, garis sel ini dikloning selama beberapa generasi untuk mengembangkan apa yang disebut dengan HEK-293. disebut “pabrik vaksin” untuk membantu replikasi vaksin (dalam hal ini berasal dari adenovirus simpanse Y25). HEK-293 dihilangkan sebelum vaksin diproduksi, sehingga melengkapi lingkaran pertahanan ideologis—“tidak ada sel janin dalam vaksin kami.” Istilah pabrik vaksin adalah sebuah kiasan yang bersifat parallel distance, namun, tentu saja, menghilangkan cell-line tidak akan membuat perbedaan apa pun terhadap pertanyaan etis secara umum, juga tidak membalikkan kerangka hubungan yang tidak berwujud. Garis sel embrio digunakan dalam tiga cara utama: pertama, dalam tahap desain dan pengembangan, untuk meneliti bagaimana vaksin akan dibuat dan diproduksi; kedua, dalam tahap produksi, pembuatan vaksin; dan ketiga, pada tahap konfirmasi, untuk menguji dampak vaksin. Vaksin mRNA COVID-19 yang diproduksi oleh Pfizer dan Moderna menunjukkan bahwa vaksin tersebut tidak diperlukan setidaknya pada dua tahap pertama. Namun, kedua perusahaan menggunakan jalur sel janin HEK-293 dalam tahap konfirmasi mereka. Di situs web mereka, mereka mengatakan bahwa mereka sensitif secara etis terhadap keberatan agama, namun argumen tersebut adalah

argumen yang buruk, sama seperti argumen para pendeta. Mereka masih dalam kondisi kompromi.

Ringkasnya, potensi kehidupan manusia yang diaborsi oleh seseorang digunakan (diinstrumentasi) untuk penyelidikan tekno-ilmiah, penelitian, dan produksi vaksin. Namun, hal yang lebih umum adalah bahwa cakrawala makna telah bergeser sedemikian rupa sehingga proses abstraksi kini menjadi pembelaannya sendiri. Para pendukung vaksin mRNA mengatakan bahwa garis sel janin saat ini adalah ribuan generasi yang diambil dari jaringan aslinya, dan vaksin tersebut tidak mengandung jaringan apa pun dari janin. Ini semua faktual, namun kita perlu memahami maksudnya dengan jelas. Hal ini kini tidak lagi merupakan pembelaan etis dalam pengertian humanis sebelumnya, namun lebih merupakan post-truth yang nyaman dan kuat. Di sisi lain, praktik yang berada di balik pergeseran cakrawala etika menegaskan argumen dalam bab ini bahwa abstraksi kehidupan (dalam hal ini, garis sel janin) tertanam dalam proyek teknosains yang mengglobal. Proyek ini adalah proyek yang membela diri dengan sekaligus menekankan efek terapeutik yang terkandung di dalamnya dan menyarankan bahwa tidak mewujudkan pemahaman sebelumnya tentang batas-batas perwujudan adalah hal yang sangat diperlukan. Dampaknya, setidaknya bagi mereka yang mengetahuinya, adalah bagian dari mereshakan hubungan antara kehidupan alam dan ciptaan, bagian dan keseluruhan, perwujudan dan ketidakwujudan. Bagi yang lain, hal ini hanyalah bagian dari latar belakang yang membingungkan dan mereshakan makna hidup yang tidak diketahui namanya. Kita perlu mendapatkan vaksinasi, dan inilah yang tersedia.

Setiap Hal Telah Berubah Secara Dasar. Kemana Kita Pergi Dari Sini?

Dalam kesimpulan bab ini, saya ingin mengakhiri diskusi secara singkat dengan beralih ke dua cara alternatif untuk membaca perubahan-perubahan ini. Yang pertama adalah pendekatan posthumanis (menggunakan Aaron Bastani sebagai contoh utama), dan yang lainnya adalah pendekatan “modernitas kedua” (berfokus pada Ulrich Beck). Buku terbaru Aaron Bastani, *Fully Automated Luxury Communism* (Bastani, 2019) menjadi contoh yang bermanfaat, agar pendekatan posthumanis (atau transhumanis) tidak hanya terbatas pada tekno-utopianisme sayap kanan atau eksek post-strukturalis. Pendekatannya mengarah pada naturalisasi problematis dalam revolusi tekno-ilmiah saat ini kehidupan organik tidak lebih dari sekadar pengkodean DNA (abstraksi sebagai pertahanannya sendiri).

Pada akhirnya, kita akan menghadapi kemungkinan-kemungkinan baru dalam memelihara sistem biologis planet kita, serta memberi makan dan menyembuhkan tubuh kita sendiri. Dan kenapa tidak? Bagaimanapun, kehidupan organik itu sendiri tidak lebih dari informasi yang dikodekan, meskipun sedikit lebih kompleks: ada empat nukleobase dalam DNA beruntai ganda—C, G, A, dan T—dan bukan kode biner 0 dan 1 seperti pada informasi digital.

Dengan asumsi perwujudan yang abstrak ini, bagaimana kita membangun surga global di masa depan? Jawabannya lebih bersifat teknosains: membawa revolusi digital untuk mengatasi segala hal dan mengabstraksikan diri kita dari alam, termasuk sifat kita sendiri, untuk menyelesaikan semua permasalahan dunia. Dalam perjalanannya, ia secara ajaib memisahkan teknologi dari kapitalisme siber walaupun keduanya saling terkait erat dalam

sejarah keduanya saat ini. Oleh karena itu, Bastani mengantisipasi dunia otomatis yang penuh keajaiban dan kemudahan, yang “jauh lebih baik” daripada dunia saat ini. Teknologi komunikasi dan Kecerdasan Buatan akan menggantikan kebutuhan sebagian besar pekerjaan manusia. Teknologi energi terbarukan akan menghasilkan energi berkelanjutan yang tidak terbatas. Menambang asteroid dekat Bumi akan memungkinkan kita keluar dari batasan penipisan sumber daya di bumi. Pertanian seluler dan produksi daging sintetis akan memungkinkan relokasi besar-besaran produksi pangan ke pertanian vertikal pasca-industri. Rekayasa genetika dan terapi gen preventif akan memprogram ulang tubuh kita untuk mendapatkan kekuatan dan vitalitas, “berpotensi menghilangkan kondisi yang melemahkan atau membunuh jutaan orang setiap tahunnya” (Bastani, 2019: 157).⁸ (Dia memberi kita satu bab tentang masing-masing kondisi ini klaim.)

Bagaimana kita bisa mencapai dunia tanpa tubuh yang abstrak dan “menakutkan” ini? Jawaban Bastani adalah populisme demokratis sayap kiri yang terbuka dan sepenuhnya menganut teknologi baru. Mengakui “skala global dari setiap respons,” katanya, “sangatlah penting. Ambisi kita harus Promethean karena teknologi kita telah menjadikan kita dewa—jadi sebaiknya kita menguasainya” (Bastani 2019: 189). Oleh karena itu, ia menyukai apa yang ia sebut sebagai “Gangguan Ketiga”, yang pertama adalah peralihan manusia ke bidang pertanian dan yang kedua adalah Revolusi Industri. Apa yang akan menghentikan kita, selain dari bentuk-bentuk baru Luddisme? “Salah satu hambatan terbesar terhadap perubahan tersebut,” katanya, “adalah kultus globalisme, yang retorika bawaannya adalah bahwa tantangan yang kita hadapi begitu besar sehingga hanya dapat diselesaikan melalui koordinasi internasional” (Bastani, 2019: 197) . Bastani kemudian kembali ke retorika lama Kiri yang mengatakan internasionalisme itu baik, namun globalisme dan koordinasi internasional buruk. Kalimat ini menjadi tidak sesuai karena perubahan yang diperlukan termasuk pembentukan Bank Internasional untuk Kemakmuran Energi yang mengenakan pajak pada produksi karbon pajak Satu Planet yang memindahkan dana ke Dunia Selatan untuk memungkinkan transfer teknologi. Ada yang mungkin berpikir bahwa hal ini memerlukan kerja sama dan koordinasi global agar bisa terwujud, namun itu adalah pertanyaan lain.

Dunia Ulrich Beck juga sama menakutkannya, hanya saja dia secara nominal menentanginya melawan teknologi yang menjadikan kita dewa. Perhatiannya adalah beralih dari dunia bangsa-bangsa (buruk) ke dunia kosmopolitanisme (baik). Masalah metodologis pertama yang segera ditemui Beck adalah bahwa isu-isu yang telah saya uraikan telah terglobalisasi secara sistematis (walaupun tidak merata), khususnya selama setengah abad terakhir. Jika kondisi global baik-baik saja, bagaimana para agen globalisasi dapat bersedia menjadi mitra dalam menyebarkan proses-proses yang disruptif ini? Hal ini diperparah oleh masalah kedua: argumen pembingkaiannya adalah bahwa segala sesuatu di dunia sedang dalam proses transfigurasi “metamorfosis” menuju ruang aksi yang kosmopolitan. Bagi Beck, bahasa transformasi atau perubahan tidak dapat menangani proses seperti itu. Ini sepenuhnya penting. “Metamorfosis bukanlah perubahan sosial, bukan transformasi, bukan revolusi dan bukan krisis. Ini adalah cara mengubah keberadaan manusia” (Beck, 2016: 20). Namun, karena secara kontradiktif, jelas bahwa segala sesuatunya belum (belum) berubah

misalnya, seperti yang kita saksikan pada perang tahun 2022 di Ukraina, ideologi dan praktik nasionalisme banyak terdapat di kedua pihak yang berkonflik, dan banyak pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Lapangan membuat perbedaan metodenya harus berputar-putar melalui beberapa manuver analitis yang berantakan. Saya berpendapat, langkah-langkah ini dapat ditangani secara lebih sistematis melalui teori menarik yang baru saja saya uraikan.

Beck pertama-tama harus membedakan secara konseptual dan sewenang-wenang antara “ruang tindakan kosmopolitan” yang rutin dan merupakan realitas hidup setiap orang dan “kosmopolitanisme”, yaitu deskripsi normatif tentang dunia baik yang masih ingin kita capai. Kedua, ia harus membedakan antara “latihan” dan “tindakan”. Praktik, katanya, dirutinkan, termasuk di ruang kosmopolitan; tindakan-tindakan tersebut dianggap refleksif, melampaui kerangka praktis dan menuju kemungkinan-kemungkinan kosmopolitan. Bagi saya, hal ini masih merupakan permainan kata-kata konseptual yang belum terselesaikan dan bukan serangkaian langkah analitis yang memperjelas.

Kita bisa menanyakan pertanyaan paralel kepada Beck seperti yang kita tanyakan pada Bastani. Bagaimana dunia kosmopolitannya yang luar biasa dapat dicapai (dan tidak hanya dirutinkan dalam ruang kosmopolitan membingungkan yang ia gambarkan)? Nasib komunitas global yang sama, katanya, akan terjadi ketika hal-hal buruk dari metamorfosis ini menghadapkan kita pada batasan-batasan bentuk kehidupan manusia yang lebih tua dan prasangka: “Ginjal Muslim memurnikan darah Kristen. Para rasis kulit putih bernapas dengan bantuan paru-paru Hitam. Manajer berambut pirang itu melihat dunia dengan mata seorang anak jalanan Afrika. . . Tubuh orang kaya diubah menjadi kumpulan tambal sulam yang terampil, tubuh orang miskin menjadi gudang suku cadang bermata satu atau satu ginjal” (Beck, 2016: 73). Buruknya proses ini, katanya, akan memaksa terwujudnya kemungkinan emansipatoris. Guncangan bencana akan membawa metamorfosis tersendiri menuju “cakrawala kosmopolitan” yang positif (Beck, 2016: 123). Permasalahannya, seperti yang akan dijelaskan dalam bab ini, adalah bahwa cakrawala telah bergeser. Secara ideologis, abstraksi dan framing yang tidak berwujud telah menjadi pertahanan tersendiri. Dan dalam praktiknya, dalam kasus perdagangan bagian tubuh ini, ilmu pengetahuan teknologi telah berupaya mengembangkan sumber daya yang lebih dapat dieksploitasi dan diandalkan tanpa memiliki hubungan biokolonisasi yang tidak menguntungkan. Terapi sel induk, xenotransplantasi, dan produk jaringan yang direkayasa secara biologis, melalui teknologi CRISPR, sudah mulai menggantikan upaya negara-negara Selatan untuk mengambil organ dan jaringan. Ini adalah kondisi kita saat ini, dan kemungkinan masa depan, yang mana kita memerlukan politik yang sangat berbeda dari mengikuti arus global atau berharap bahwa bencana akan membawa visibilitas dan kejelasan baru tentang apa yang harus dilakukan. Buku Beck, yang ditulis pada tahun 2016, sudah ketinggalan zaman.

Metode teori keterlibatan yang diuraikan dalam bab ini menangani permasalahan ini dengan cara yang sangat berbeda. Dengan menggunakan perbedaan analitis dari tingkat-tingkat pertukaran, makna, dan praktik yang diabstraksi secara berbeda, hal ini memungkinkan kita untuk memahami ketegangan antara kesinambungan dan diskontinuitas, dominasi global, dan penerimaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan

bagaimana perubahan kualitatif yang dominan dan mendominasi, yang ditandai dengan objektifikasi, pemeriksaan biomedis, dan upaya untuk mengatasinya, dapat dinormalisasi dalam kaitannya dengan harapan dan aspirasi yang lebih tua—tindakan yang tampaknya tidak termediasi dalam menyambut kelahiran bayi yang sehat ke dunia. Hal ini mendokumentasikan bagaimana penyingkiran teknosaintifik dilakukan di sayap globalisasi sebagai kondisi yang diperlukan namun tidak cukup bagi kekuatan dan jangkauan konstitutif dari konstelasi baru kapitalisme sains-teknologi. Dan yang terpenting, hal ini mengisyaratkan sebuah cara untuk merespons keresahan yang tidak melibatkan diri dalam Gangguan Ketiga (posthumanisme) atau menunggu kekacauan rutin dari ruang-ruang kosmopolitan yang eksploitatif untuk akhirnya mencapai tujuannya (refleksivitas modernitas kedua).

BAB 17

GLOBALISASI DAN RETORIKA VISUAL

17.1 BANGKITNYA TATANAN MEDIA GLOBAL

Dalam menyelidiki dan mendiskusikan keterbatasan dan abstraksi pengukuran kuantitatif “big data” sebagai mode operasi kapitalistik baru yang menguasai persepsi masyarakat terhadap dunia, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif “data kecil” untuk memahami perubahan. Oleh karena itu, melalui kerja lapangan etnografi digital dan kerangka estetika media alternatif, dibantu dengan metode ikonologi global, bab ini bertujuan untuk menilai kembali globalisasi sebagai fenomena visual-ideologis. Secara khusus, penelitian ini menyelidiki bagaimana “reglobalisasi” dunia dimediasi dalam kondisi dominasi citra saat ini. Hal ini dilakukan dengan berfokus pada budaya visual media sosial Instagram dan peran elit media digital transnasional dalam destabilisasi tatanan dunia multipolar yang kita bayangkan. Di era visi komputer, pembelajaran mesin, dan algoritma pengenalan pola, penelitian ini juga akan berspekulasi mengenai peran imperialistik yang dimainkan oleh perusahaan media transnasional dan kemungkinan bahwa mereka dapat, atau tidak, berkontribusi terhadap kebangkitan tatanan media global.

Kita hidup di dunia yang sangat termediasi dan dipenuhi citra di mana jaringan sosial, dibantu oleh ruang gema dan “algoritma jaringan saraf,” diubah menjadi tempat kontestasi dan ancaman terhadap demokrasi dan wacana demokrasi. Faktanya, karena digitalisasi sebagian besar kehidupan dan penggunaan perangkat elektronik pribadi secara besar-besaran, sebuah tatanan dunia baru sedang muncul: “tatanan media global”. “Tatanan media global” adalah bentuk baru tatanan dunia politik yang dimungkinkan oleh bangkitnya elit teknokratis transnasional dan konstitusi ruang publik transnasional yang melihat peran raksasa teknologi media yang tertanam dalam kerangka kerja yang lebih luas. struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat serta aparat ideologis negaranya.

Sebagai akibat dari restrukturisasi masyarakat kapitalistik digital yang dramatis, seperti dalam adegan film gerak lambat, kita mengalami jatuhnya demokrasi neoliberal Barat di bawah beban sistem produksi dan konsumsi yang didasarkan pada modal intelektual (“pengetahuan”). ekonomi”), komodifikasi data (“kapitalisme data”), dan pengembangan teknologi visual pengawasan dan pengendalian. Bab ini mengeksplorasi peran strategis dan kekuatan yang dimainkan oleh teknologi visual, visual, dan retorika visual dalam destabilisasi demokrasi liberal dan “reglobalisasi” tatanan dunia multipolar yang kita tinggali.

Kekuatan jejaring sosial untuk memobilisasi orang-orang dari arena digital yang materialitasnya berbeda di dunia maya ke fisik lapangan publik, melalui satu sentuhan jari atau tweet, jelas menandai perpindahan dari masyarakat modern yang hanya berupa tontonan dan simulasi ke masyarakat modern. kapitalisme digital. Lihat misalnya serangan terhadap simbol demokrasi Amerika, Capitol Hill di Washington, DC, pada 6 Januari 2021 (Tan, Shin, & Rindler, 2021), dan serangan terhadap Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL, Jenderal Italia Konfederasi Buruh) di Roma, Italia, pada 11 Oktober 2021 (Daily Mail,

2021). Ini hanya untuk menawarkan kepada Anda dua kasus serupa. Yang penting untuk diperhatikan adalah baik di US Capitol (DeVega, 2021), simbol rakyat Amerika dan pemerintahannya, tempat pertemuan badan legislatif negara, maupun di Roma (Joly, 2021) di markas besar CGIL, organisasi serikat pekerja nasional yang paling representatif, ketika para pemberontak datang, mereka datang dengan membawa bendera, tanda, dan simbol.

Beberapa ahli teori media berpendapat bahwa representasi media telah menjadi hal yang penting dalam masyarakat yang berpusat pada web, dimana kita hidup pada titik di mana realitas terdiri dari tingkat representasi yang berlapis-lapis. Namun, meskipun bagi sebagian media, kejenuhan media merupakan hal yang patut dirayakan, namun bagi sebagian lainnya, banyaknya gambar dan informasi simultan yang menenggelamkan kita telah mencapai titik di mana “melebihi kapasitas interpretasi subjek” (Stevenson, 2002). Memang, sependapat dengan filsuf dan ahli teori budaya Jean Baudrillard (1994), kejenuhan yang berlapis-lapis membuat hampir mustahil adanya masyarakat nyata atau penjelasan jujur tentang dunia yang ada di bawah semua gambaran dan representasi yang dimediasi.

Dalam studi ini saya berfokus pada fakta-fakta yang diproduksi, diedarkan, dan dikonsumsi oleh jutaan orang di seluruh dunia, dan tidak banyak ruang untuk mendiskusikan konsep-konsep seperti “masyarakat nyata” atau “kebenaran” dalam kaitannya dengan representasi media. Yang saya tahu adalah bahwa orang-orang dalam kehidupan sehari-hari berkomunikasi, bertukar, dan mengonsumsi media, tidak peduli apakah media tersebut “benar” atau salah, atau merupakan produk disinformasi yang direncanakan secara strategis atau misinformasi yang tidak disengaja. Oleh karena itu, representasi media perlu dipertimbangkan dan diselidiki secara kritis, karena representasi tersebut merupakan cakrawala pemaknaan yang sama dengan “masyarakat nyata”, yang terdiri dari “orang-orang nyata”, dan, dalam kondisi digital saat ini. kapitalisme dan reglobalisasi dunia, media dan rentetan gambar media yang terus menerus merupakan bagian integral dari kehidupan dan praktik kita sehari-hari. Terlebih lagi, mereka mendominasi nilai-nilai dan cara kita memahami dunia dan posisi kita di dalamnya.

Menyadari secara mendalam bahwa revolusi tidak dapat di-tweet dan bahwa jaringan sosial tidak dapat memberikan apa yang selalu dibutuhkan oleh perubahan sosial—hubungan yang kuat, perhatian, pembinaan untuk menjaga kemajuan, dan momentum—kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa revolusi dan perubahan sosial dapat terjadi secara ideologis. dan menyebar secara emosional untuk memobilisasi orang dari alun-alun elektronik ke arena fisik perkotaan. Dalam hal ini, simbol dapat berkontribusi untuk menghubungkan orang dan tempat dengan sistem ide dan kepercayaan bersama, dengan berkontribusi pada polarisasi mendalam wacana politik-ideologis. Lebih jauh lagi, interaksi antara eksklusif dan inklusif yang dihasilkan oleh globalisasi kapitalis bergantung pada kekuatan politik yang menyeimbangkan eksklusif ekonomi dengan inklusif budaya-ideologis.

Sebagai buntut dari kegagalan dunia akibat tidak adanya sistem tata kelola global untuk mengekang pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, raksasa teknologi media yang paling berani seperti Apple, Microsoft, Google (Alphabet), dan Facebook/Meta, adalah beberapa di antaranya, semakin bertindak sebagai penguasa dan negara saingan. lan

Bremmer, presiden Eurasia Group, mengamati bahwa meskipun negara-bangsa telah menjadi penggerak utama urusan global selama hampir empat ratus tahun, mereka bertugas melakukan perang dan perdamaian, menyediakan barang publik, menulis dan menegakkan hukum, serta mengendalikan arus informasi. barang, jasa, dan manusia, hal ini tidak lagi terjadi. Pengaruh konglomerat media global dan raksasa teknologi akan memicu banyak reaksi negatif dari para pemimpin di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa, yang semuanya sepakat bahwa mereka perlu bersikap keras terhadap perusahaan teknologi. “Tetapi,” kata Bremmer, “jangan berharap upaya-upaya ini akan berhasil sebagian karena mereka tidak memiliki keahlian dan institusi untuk mengatur Big Tech secara efektif dan ketakutan bahwa penjangkauan yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan” (Bremmer, 2021).

Dalam *The Atlantic*, Adrienne LaFrance (2021) mencirikan Facebook sebagai otokrasi terbesar di dunia. Dalam kata-katanya, Mark Zuckerberg, tidak seperti Einstein, tidak memimpikan Facebook karena rasa kewajiban moral, atau semangat untuk perdamaian dunia. Musim panas ini, populasi rezim supranasional Zuckerberg mencapai 2,9 miliar pengguna aktif bulanan, lebih banyak dibandingkan pengguna yang tinggal di dua negara dengan populasi terbesar di dunia Tiongkok dan India jika digabungkan (LaFrance, 2021). Memang benar, raksasa-raksasa teknologi media telah menjadi semakin kuat dan tersebar luas dalam menjalankan suatu bentuk kedaulatan atas ruang digital, meskipun tidak secara eksklusif, namun juga menjaga hubungan luar negeri dan menangani pemegang saham, karyawan, pengguna, dan pengiklan.

“Kapitalisme data”, sebuah bentuk kapitalisme baru yang mengkomodifikasi data dan menggunakan “data besar dan algoritme sebagai alat untuk memusatkan dan mengkonsolidasikan kekuatan dengan cara yang secara dramatis meningkatkan kesenjangan berdasarkan ras, kelas, gender, dan disabilitas,” dibantu oleh Kecerdasan Buatan (AI) seperti data mining dan jaringan syaraf tiruan, mewakili marketisasi seluruh keberadaan, didukung oleh eksploitasi tenaga kerja digital untuk memaksimalkan keuntungan. Akibatnya, hal-hal tersebut juga berkontribusi terhadap destabilisasi demokrasi liberal, dan pada tingkat yang sangat subjektif, hal ini juga memengaruhi imajinasi dan ideologi sosial masyarakat (Bremmer, 2021).

Seperti yang ditunjukkan dalam *Capital Volume I* karya Karl Marx ([1867] 1990), dalam kapitalisme, dimensi ekonomi dan ideologi memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat dan produksi komoditas. Namun dalam penelitian ini saya berpendapat bahwa kapitalisme dan komoditas globalisasi juga memiliki dimensi estetika yang sangat berkontribusi dalam menipu dan memanipulasi manusia. Meskipun kebangkitan kapitalisme data telah merevolusi kehidupan masyarakat dengan mengubah data pribadi (produksi nilai) menjadi komoditas, sumber keuntungan bagi segelintir orang (minyak di milenium ketiga, sumber daya baru yang berharga), namun kesenjangan masih sangat tinggi. , kemunculan dan konsolidasi jaringan sosial telah merevolusi cara orang membayangkan keberadaan mereka sendiri, imajinasi dan ideologi sosial mereka, dan cara mereka menyesuaikan diri. Teknologi

digital dan media baru juga telah mengubah gaya hidup masyarakat dan cara mereka memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi ide.

Perubahan teknologi yang bergerak cepat berdampak pada negara demokrasi liberal dan, pada tingkat subjektif, pola pikir masyarakat di seluruh dunia. Digitalisasi juga menyoroti hubungan yang erat antara manfaat-manfaatnya, seperti kemudahan akses ke segala sesuatu dari mana saja dan penyediaan layanan, dengan risiko privasi dan prinsip-prinsip perlindungan data yang dirusak atau terkikis seiring berjalannya waktu, terutama dengan data yang besar dan sensitif. Kumpulan data besar. Memang benar, hal ini juga ikut mengikis kesenjangan antara kita, manusia analog—kita adalah perangkat analog yang mengikuti mode operasi biologis—dan mereka, teknologi komputasi yang dioperasikan dan dimiliki oleh raksasa teknologi media global: mode operasi kapitalistik (digital). Di tangan kelompok elit teknokratis yang menyatakan bahwa kita semua dapat berkembang di “Era Eksponensial” arus dan waktu yang mengabstraksikan masyarakat berjejaring yang tak lekang oleh waktu. Hal ini menjelaskan dengan baik cara perusahaan teknologi media terbesar dan terkuat di dunia menggunakan kekuasaan melalui “data besar.”

Menurut Oracle (2021), “big data” terdiri dari tiga V: volume, kecepatan, dan variasi, yang dengan kata lain berarti bahwa big data berisi lebih banyak variasi data, dengan peningkatan volume dan kecepatan yang lebih besar. Bagaimanapun, ada beberapa batasan dalam penggunaan analisis data besar. Misalnya, seperti yang diamati oleh Ciklum (2017), analisis data menggunakan data besar untuk mencari korelasi: ketika satu variabel dikaitkan dengan variabel lainnya. Namun, tidak semua korelasi ini substansial dan bermakna. Selain itu, pengguna bebas menentukan pertanyaan mana yang bermakna. Terlebih lagi, karena sebagian besar data yang perlu Anda analisis terletak di balik firewall atau di cloud pribadi, diperlukan pengetahuan teknis dan dana untuk mengirimkan data ini ke tim analisis secara efisien. Terakhir, terkadang alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan kumpulan data besar tidak tepat. Misalnya, Google terkenal dengan perubahan dan pembaruannya yang mengubah pengalaman pencarian dalam banyak cara; hasil pencarian pada suatu hari kemungkinan besar akan berbeda dengan hasil pencarian pada hari lain. Jika Anda menggunakan penelusuran Google untuk menghasilkan kumpulan data, dan kumpulan data ini sering berubah, korelasi yang Anda peroleh juga akan berubah. Oleh karena itu, big data dipertanyakan dalam hal sifat kualitas dan kepercayaannya: nilai apa pun yang hilang dari data, ketidakkonsistenan dan/atau kesalahan apa pun yang ada dalam data, duplikat atau outlier apa pun dalam data, normalisasi atau transformasi lainnya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemunculan kapitalisme data sebagai mode operasi baru dan perangkat AI-nya yang terdiri dari pembelajaran mesin mendalam, visi komputer, dan algoritme jaringan syaraf yang dikombinasikan dengan teknologi digital visual dan layanan suara berbasis cloud adalah hal yang sangat penting. menjajah imajinasi dan ideologi sosial masyarakat pada tingkat yang sangat subjektif, sekaligus berkontribusi pada apa yang oleh beberapa pakar didefinisikan sebagai “reglobalisasi” dunia. Seperti yang telah diakui sebelumnya, perkembangan teknologi yang pesat berkontribusi terhadap perubahan norma dan nilai, dengan media global -Raksasa teknologi membentuk perangkat ekonomi dan

budaya transnasional mereka sendiri di dalam dan di seluruh negara-bangsa yang ada. Faktanya, globalisasi, seperti yang kita kenal selama beberapa dekade terakhir, nampaknya sedang mengubah wajahnya secara morfologis namun masih menunjukkan sisa-sisa sikap neoliberal yang ekstrim.

17.2 METODE DIGITAL UNTUK MENELITI GLOBAL

Untuk melakukan penelitian global dalam berbagai materialitas dunia maya, kita memerlukan metodologi digital dan disesuaikan yang mencakup metode digital. Metode digital merupakan strategi penelitian yang dapat mengikuti perkembangan metode media, dalam hal ini Instagram (Rogers, 2019). Di antara metode digital yang tersedia, etnografi visual adalah yang saya anggap paling tepat untuk pendekatan saya. Antropolog Sarah Pink mengamati bahwa etnografi visual bukanlah satu tahapan dalam penelitian. Sebaliknya, ini adalah keadaan dialogis yang tertanam di mana teori, praktik, dan keterlibatan dengan orang-orang di dunia nyata terjadi. Oleh karena itu, makna akademis yang diberikan oleh para etnografer pada fotografi dibentuk dalam kaitannya dengan lokasi dan pertemuan kerja lapangan, prioritas disiplin ilmu, pemangku kepentingan lainnya, pendekatan metodologis dan teoritis, serta agenda intervensi. Kita juga tidak bisa menghindari pemaknaan ini berdasarkan pengalaman, kenangan, dan imajinasi pribadi kita. Kontingensi makna ini tidak bisa dihindari (Pink, 2021). Oleh karena itu, mengikuti argumen Pink dan Rogers, dapat dikatakan bahwa untuk penelitian ini saya mengubah Instagram menjadi mesin epistemologis, karena “metode digital dapat dianggap sebagai penyebaran alat dan data online untuk tujuan penelitian media sosial” (Rogers, 2019).

Namun, meskipun saya menggunakan etnografi visual sebagai praktik dan pendekatan dalam hubungannya dengan sensorik dan digital, untuk lebih memahami peran retorika visual dalam lingkungan digital dan pada tingkat subjektif yang dalam, saya juga menggunakan metode dan pendekatan analisis visual kritis “ikonologi global” untuk mengembangkan pemahaman reflektif mendalam tentang bagaimana visual berpartisipasi dalam produksi pengetahuan etnografi dan pemahaman akademis tentang perubahan di era kapitalisme data global. Ikonologi global akan membantu untuk lebih memahami bagaimana dimensi prarefleksif dari imajinasi sosial diubah menjadi konstruksi simbolis dan sosial dari akal sehat masyarakat tentang “global” dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk meneliti aplikasi/jaringan sosial, saya membuka akun pribadi di Instagram. Hal ini diperlukan untuk meneliti aplikasi ini, karena sifat media sosial yang partisipatif dan interaktif dan perlunya penyelidikan saya berupa observasi sosial dan mendengarkan konten dan informasi yang dihasilkan secara online untuk mengungkap tren dan wawasan yang muncul dari aplikasi tersebut. data tersebut.

17.3 SISTEM SYMBOLIC INSTAGRAM

Pencarian dataset Instagram di Google Scholar pada 18 Januari 2022 hanya dalam waktu 0,04 detik menghasilkan sekitar 59.400 makalah konferensi dan artikel akademis. Sebagian besar publikasi dan makalah ini berasal dari ilmu komputer dan studi media. Mereka

telah menganalisis berbagai aspek platform Instagram dan banyak penggunaannya melalui sampel besar kumpulan data (foto) dan metadatanya. Perhatian terhadap jejaring sosial dengan jelas menjelaskan pentingnya hal itu. Namun sebaliknya, dalam penelitian ini saya akan fokus pada “data kecil”. Jika istilah big data mengacu pada mesin dan metodologi kuantitatif, maka small data mengacu pada manusia dan metodologi kualitatif, yang berarti data dapat diakses, informatif, dan dapat ditindaklanjuti (Pollock, 2013).

Saya memilih Instagram karena, sebagai sebuah sistem simbolik, Instagram mampu menata ulang secara visual hubungan antara representasi manusia dan Kecerdasan Buatan, pikiran dan mesin, dan, khususnya, karena Instagram mampu, baik dan buruk, menghasilkan estetika Instagrammar global. Estetika yang dimanipulasi secara teknologi ini juga berdampak pada orang-orang yang bukan anggota komunitas digital atau pengikut biasa, dan oleh karena itu memerlukan perhatian lebih. Faktanya, Instagram mampu menggabungkan dalam satu aplikasi/platform/media pengalaman kehidupan nyata yang lebih besar yang sejauh ini tidak dapat dicapai oleh media sosial lain. Kamera, kertas foto, kamar gelap, ruang pameran seperti galeri swasta dan publik, serta tempat publikasi seperti majalah semuanya ada dalam satu aplikasi ponsel pintar masyarakat (Manovich, 2017).

Di luar perpecahan teknologi, estetika, dan ideologi yang ditunjukkan dengan menjadi media sosial visual khusus pertama yang memungkinkan pertukaran produksi dan konsumsi gambar, seperti yang telah diakui sebelumnya, Instagram mampu membangun estetika global baru: “estetika Instagrammatic global (budaya visual) media sosial.” Yang saya maksud dengan istilah estetika Instagrammatic global adalah pendekatan mendasar, ideologi, dan sistem nilai yang mengarahkan orang-orang (pengguna dan pengikut jejaring sosial) untuk secara aktif berupaya melakukan redefinisi berkelanjutan terhadap branding diri digital mereka, yang dengan kata lain berarti cara mereka memanfaatkan gambar, warna, font, logo, tata letak, nada, dan filter untuk menghasilkan identitas visual mereka pada rangkaian digital hubungan sosial mereka yang menghubungkan orang-orang melalui World Wide Web (web sosial). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejak lahirnya Instagram (6 Oktober 2010), sehubungan dengan “personal self-branding” (strategi pemasaran citra publik yang seragam) dan “retorika visual”, tidak peduli apakah di ruang digital Internet atau di dunia fisik, tidak ada lagi yang sama seperti sebelumnya.

Studi ini memahami “retorika visual” sebagai studi tentang komunikasi visual dan menyelidiki tentang bagaimana gambar bekerja. Dalam melakukan hal ini, ia juga mempertimbangkan fungsi ideologis wacana sebagai kepentingan retorika, baik dalam tahap produksi maupun dalam tahap sirkulasi dan konsumsi. Retorika visual, studi tentang citra visual dalam disiplin retorika, didasarkan pada sifat transdisipliner visualnya. Secara khusus, saya memahami retorika visual sebagai sarana di mana “visual” semua jenis gambaran visual, diam atau bergerak dapat digunakan melalui komunikasi untuk membentuk pikiran, gaya hidup, opini, dan keyakinan seseorang. Oleh karena itu, untuk mempelajari retorika visual, perlu diajukan pertanyaan: “Bagaimana gambar bertindak secara retorik terhadap pemirsanya?” (Hill & Helmes, 2004). Menariknya, untuk membantu pengguna dan pengikutnya mendapatkan pengalaman kehidupan nyata yang lebih kuat, dan untuk melawan

dominasi YouTube dan Tick Tock dalam pengalaman media sosial visual, saat ini Instagram telah membuka diri terhadap gambar bergerak: video (Mosseri, 2021). Ini akan membantu mengubah aplikasi sosial menjadi State of Visual Commerce.

Instagram, milik Facebook/Meta, merayakan ulang tahunnya yang kedua belas pada tahun 2022; Instagram adalah situs web ketujuh yang paling banyak dikunjungi di dunia, istilah pencarian terbanyak kesembilan di Google, dan aplikasi kedua yang paling banyak diunduh di dunia. Sebanyak 1,22 miliar orang menggunakan Instagram setiap bulannya; ini adalah platform sosial favorit Gen Z. Pemirsa Instagram terbagi rata antara pria dan wanita. India memiliki pengguna Instagram terbanyak di dunia; 59 persen orang dewasa AS menggunakan Instagram setiap hari (McLachlan, 2022).

17.4 DIMENSI DIGITAL MIMPI MILENIAL

Untuk memberikan satu contoh bagaimana gambar bertindak secara retorik terhadap pemirsa (pengguna dan pengikut), saya mengidentifikasi kepribadian yang bekerja dengan baik dalam kasus transnasional. Saya memilih untuk menjelajahi akun Instagram sosialita dan tokoh media milenial Amerika Kim Kardashian (@kimkardashian). Meskipun media secara global dipenuhi dengan gambar-gambar ikon budaya pop Amerika, saya memilih akun Instagram-nya sebagai studi kasus karena akun tersebut mampu merangkum estetika Instagram global yang menjadi perdebatan dalam penelitian ini. Dibantu oleh aplikasi seluler/platform sosial dan penggunaan alat digital untuk manipulasi estetika fotografi/visual, Kim mampu mengubah dirinya dari seorang milenial yang “memalukan” seseorang yang mencapai usia dewasa muda di awal abad ke-21 menjadi seorang global logo-merek dan, lebih luas lagi, menjadi perubahan paradigma estetika: Kardashian Life (@kardashianlife). Majalah Time menempatkan sosialita Amerika ini di antara seratus orang paling berpengaruh pada tahun 2021 (Time, 2021). Dia saat ini adalah salah satu ikon fesyen terkemuka di industri Hollywood, dan Hopper HQ yang berbasis di Inggris alat perencanaan dan penjadwalan Instagram Official Instagram Richlist (2018–21) menempatkannya di peringkat keenam dalam daftar dengan 278 juta pengikut (Pelacak Sosial, n.d.). Pada Januari 2022, salah satu postingan Instagramnya bernilai Rp. 20.527.500.000. Terlebih lagi, ketika pada bulan Februari 2021 wanita mandiri Amerika mengajukan gugatan cerai dari suaminya Kanye West, kekayaan bersih real-time-nya menurut Forbes pada 06 September 2022 adalah Rp. 26.200.000.000.000. Menariknya, dengan wall of fame dan di waktu luangnya, ikon pop global, produk inti kapitalisme digital, saat ini nampaknya juga terlibat secara politik (politik Instagram?), kadang-kadang mengadvokasi reformasi peradilan pidana, keamanan senjata, dan kanker. penyebab.

Budaya selebriti adalah bagian yang tak terhindarkan dari lanskap media dan kehidupan kita sehari-hari. Selebriti dan ketenaran mungkin juga bisa dianggap sebagai agama kontemporer yang baru dalam budaya kita (Douglas & McDonnell, 2019). Mendiang Barbara Walters, seorang jurnalis penyiaran, penulis, dan tokoh televisi Amerika, dalam sebuah wawancara dengan keluarga Kardashian di acara spesial tahunan Walters “Orang Paling Menarik” pada tahun 2011, bertanya kepada mereka, “Kamu tidak benar-benar berakting,

kamu tidak melakukannya menyanyi, kamu tidak menari, kamu tidak punya maafkan aku bakat apa pun!” Jawaban Kim adalah: “Saya pikir itu lebih merupakan tantangan bagi Anda untuk tampil di reality show dan membuat orang jatuh cinta kepada Anda karena menjadi diri Anda sendiri, jadi menurut saya, pasti ada lebih banyak tekanan untuk menjadi terkenal karena menjadi diri Anda sendiri. diri kita sendiri” (Marcus, 2011). Bisa jadi Kim Kardashian tidak memiliki keahlian atau bakat tertentu, seperti yang diungkapkan Walters dalam wawancara viralnya. Namun, dapat dikatakan bahwa Kim mampu menguasai self-brandingnya lebih baik dibandingkan banyak wirausaha dan ahli strategi pemasaran.

Apa yang dapat kita pelajari dari studi kasus Instagram Kim Kardashian adalah bahwa menyampaikan kepribadian merek Anda melalui pemasaran strategis dalam bentuk identitas visual-ideologis membuat Anda terlihat lebih profesional dan dapat diandalkan. Ini juga akan memberi Anda status, sekaligus membantu pengikut Anda untuk langsung mengenali konten merek Anda saat mereka muncul di mal global Instagram, bukan di toko di lingkungan Anda. Terlebih lagi, self-branding membantu membangun loyalitas dan mengubah pengunjung profil Anda menjadi pengikut seumur hidup, yang dengan kata lain berarti bahwa dengan kapitalisasi simbolis Anda dapat memaksimalkan keuntungan Anda di dunia nyata: asuransi jiwa. Namun, patut dicermati bahwa konsentrasi kekayaan, pengaruh, dan perhatian yang ekstrim merupakan kondisi mendasar dalam meningkatnya kesenjangan yang mempengaruhi dua pertiga wilayah dunia (UNDESA, 2020).

Tidak mengherankan bahwa, dalam mengeksplorasi kekuatan aisthēsis (sensasi) dalam kaitannya dengan seni persuasi (retorika) dan dengan berfokus pada gambar jaringan Kim Kardashian di Instagram, kita dapat mengakui bahwa gambar, tidak peduli apakah jaringan tersebut (digital) atau analog, menangkap momen-momen yang jarang bersifat komprehensif atau mewakili seluruhnya, sedangkan teks dapat memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam, seperti yang disarankan oleh penelitian ini. Namun, dapat dikatakan bahwa, di dunia yang didominasi oleh gambar, lebih banyak orang melihat gambar yang dikaitkan dengan jejaring sosial atau laporan berita tanpa pernah membaca keterangan terkait atau artikel penyerta yang memberikan konteks pada gambar tersebut, sedangkan gambar asimetris visibilitas pengguna yang menyukai selebriti, institusi berpengaruh, dan perusahaan teknologi media berkontribusi terhadap meningkatnya kesenjangan ekonomi global dan hubungan kekuasaan yang asimetris di berbagai negara.

Bersama dengan media partisipatif lainnya, Instagram menyarankan, mendukung, dan mempertahankan penggunaan retorika visual agar bisnis dapat memaksimalkan penggunaan platform mereka secara efektif dan, pada gilirannya, memaksimalkan keuntungan mereka dan Instagram. Retorika visual adalah cara retorika menggunakan gambar simbolik untuk berkomunikasi, menciptakan makna, membuat argumen, dan membujuk. Citra sebagai alat retorik menjadi kenyataan tersendiri. Perusahaan menggunakan retorika visual dan kemampuan untuk membujuk pengguna dan pengikutnya agar membeli “produk” mereka. Karena Instagram adalah platform kreatif berbasis visual, perusahaan dan konglomerat global memanfaatkan komunikasi strategis melalui praktik retorika visual untuk postingan media sosial mereka guna memenuhi target audiens dan pasar Instagram mereka secara global.

Meskipun hubungan antara retorika (persuasi) dan aisthēsis (sensasi) sama kunonya dengan sejarah manusia (orang Romawi mengajarkan), retorika masih dapat digunakan dengan cara yang sangat ampuh karena sifat manusia yang tidak berubah. Pakar retorika Kenneth Burke mengamati bahwa, di mana pun ada persuasi, di situ ada retorika, dan di mana pun ada “makna”, di situ ada “persuasi” (Burke, 1969: 169–73)

Dalam bukunya *No Filter*, pakar media sosial Bloomberg, Sarah Frier, mengamati bahwa mungkin menyenangkan untuk berpikir bahwa foto bikini dan pengencangan pantat orang Brasil adalah dampak terbesar Instagram terhadap masyarakat. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks dan “orang-orang masih tahu bahwa cara untuk menang di Instagram adalah dengan melakukan sesuatu yang menarik secara visual [. . .] Saya rasa hal itu tidak akan hilang.” Sejak Instagram memperkenalkan filter yang dapat menyesuaikan realitas, Instagram mengubah cara orang, tidak hanya pengikut, menampilkan diri mereka kepada dunia. Pengamatan menarik lainnya dalam *No Filter* adalah Instagram ingin membangun komunitas yang menghargai seni dan kreativitas. Sebaliknya, “mereka membangun mal” (Frier, 2020). Meskipun banyak influencer cantik yang mendorong pil diet dan perjalanan mewah di aplikasi, semua orang di Instagram menjual hidup mereka dengan cara tertentu. Meskipun demikian, baik Anda menggunakan aplikasinya atau tidak, Instagram telah membentuk pola pikir masyarakat, dan oleh karena itu kita harus mempertimbangkannya. Faktanya, dominasi Instagram terhadap tatanan visual di era global kapitalisme data bertindak sebagai lensa bagi seluruh negara demokrasi liberal, meskipun tidak secara eksklusif, menyoroti di satu sisi hubungan kita yang saling bertentangan dan cemas dengan teknologi, dalam hal ini. di sisi lain pertarungan antara raksasa teknologi media global untuk mendapatkan komoditas mereka yang paling berharga: perhatian masyarakat.

Keterangan Penutup: Menuju Tata Media Global?

Menuju masyarakat yang didominasi citra, teknologi visual tidak lagi menjadi isu sesekali dalam keamanan nasional. Sebaliknya, mereka akan ditempatkan di inti masyarakat yang berpusat pada web untuk beroperasi 24/7 guna mengawasi dan mengendalikan kehidupan sehari-hari masyarakat. Apa yang akan dialami generasi masa depan adalah panoptikon digital global yang dibuat oleh raksasa teknologi media global untuk mengubah masyarakat kompleks tempat kita hidup menjadi masyarakat pengawasan dan kontrol yang berpusat pada web dalam kondisi tatanan media global sesuatu yang lebih canggih dan penuh kekerasan, secara paradoks “tidak terlihat”, dibandingkan kenyataan yang kita alami sekarang.

Tatanan media global akan muncul dari dalam negara-bangsa modern yang mandiri dan tidak stabil, yang masih menjadi inti proses reglobalisasi saat ini, melalui kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang sama. Terfragmentasi secara ideologis oleh penyebaran ideologi nasionalis transnasional yang terkait dengan sistem nilai dan kepercayaan populisme serta didominasi oleh citra, dunia multipolar yang rapuh yang kita tinggali saat ini akan hancur. Hal ini akan terjadi karena restrukturisasi mendalam formasi ekonomi kapitalisme menjadi kapitalisme data, dan melalui mediatisasi teknologi yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa, sebagai akibat dari restrukturisasi digital masyarakat yang dilakukan oleh kapitalisme data dan penggunaan big data sebagai mode operasi kapitalisme yang baru, dalam konteks dunia yang didominasi citra, raksasa media-teknologi pasti akan mengalami hal yang sama. berkontribusi untuk menjajah seluruh keberadaan kita. Faktanya, masa depan kita di era global kapitalisme data dan teknologi terdesentralisasi (DeFi) akan dibangun di atas blockchain Ethereum platform blockchain terdesentralisasi. Saat ini, kebangkitan kapitalisme data dan digitalisasi seluruh keberadaan kita telah menimbulkan kekhawatiran yang luas, baik dalam wacana akademis maupun media publik, mengenai dominasi ruang gema jaringan sosial. Pada saat yang sama, fungsi dan kekuatan sistem kecerdasan visual sebuah disiplin ilmu komputer yang melatih mesin untuk memahami gambar visual dan data visual seperti yang dilakukan manusia dan visualitas diremehkan, bahkan diabaikan.

Di luar nostalgia masyarakat analog yang bisa dianggap sebagai barang antik modern, peralihan ke digital ditandai dengan semakin merosotnya kondisi manusia dalam hubungan manusia-teknologi. Oleh karena itu, kita harus menghadapi digitalitas pada tingkat subyektif-objektif dan pada setiap skala global, yang hanya mungkin terjadi ketika kita menyadari bahwa esensi analog kita hanya ada di alam. Namun, untuk menghadapi digitalitas, diperlukan variabel-variabel yang harus kita hadapi. terlalu banyak untuk dianalisis, bahkan ketika kita menggunakan data besar dan Kecerdasan Buatan. Terlebih lagi, dalam kondisi perekonomian saat ini, mengendalikan informasi berarti mengendalikan dunia. Bayangkan saja pengaruh algoritma tersembunyi Facebook, yang memprioritaskan model bisnis korporat di atas semua tujuan lainnya, terhadap politik kita.

Karena restrukturisasi kapitalistik serta proses global terus berubah, di era kapitalisme korporat global, politik Instagrammar global, dan jaringan saraf, tanpa konfrontasi/perlawanan yang tepat di setiap skala global, hal-hal mendasar seperti kekuasaan akan tetap sama. kali ini berada di tangan sekelompok elit teknokrat otoriter. Apa yang mengkhawatirkan dalam kapitalisme data adalah kekuatan jaringan sosial dan fakta bahwa setiap perlawanan, perlawanan, atau protes, termasuk kritik akademis, diubah menjadi stimulus untuk penyesuaian terus-menerus terhadap sistem kapitalis, hal yang sama yang sering terjadi pada gerakan-gerakan ini. berniat untuk bertarung. Hal ini karena kapitalisme digital mampu melahap segala sesuatu yang diproduksi, diedarkan, dan dikonsumsi, atas nama sifat masyarakat yang kita tinggali yang bersifat neoliberal dan termarketisasi. Seperti halnya simbol Ouroboros ular atau ular yang memakan ekornya sendiri, yang melambangkan ketidakterbatasan dan siklus kelahiran dan kematian kapitalisme sedang melakukan kanibalisasi dengan mengubah seluruh keberadaan kita menjadi komoditas yang siap dikonsumsi dan, sebagai akibatnya, menjadi reifi dikurung. Dengan demikian, rasa cinta dan benci terhadap kapitalisme, kritik terhadap sistem, diubah menjadi bentuk yang menstrukturkan wacana visual-ideologis (dominan), yang menurut Michel Foucault terkait erat dengan relasi kekuasaan (Foucault, 1980).

Ada risiko tinggi bahwa kehidupan sosial akan dipisahkan dari kita dan disimpan di server yang dimiliki dan dikendalikan oleh teknokrasi yang diwakili oleh raksasa teknologi

media dan hal ini akan menyebabkan “algoritmik keterasingan” dalam kehidupan pengguna. Sebuah tatanan dunia teknokratis baru dan rezim estetis global yang didasarkan pada marketisasi, pengawasan, dan kendali atas seluruh keberadaan masyarakat. Sebuah konteks di mana kendali atas kekayaan dunia akan berada di tangan sekelompok teknokrat miliarder yang saat ini sedang merancang masa depan umat manusia.

BAB 18

GLOBALISASI, PANDEMI COVID, DAN VISI UNTUK MASA DEPAN GLOBAL

Bab ini mengeksplorasi dinamika kontradiktif dari prospek globalisasi saat ini, saat ini, dan masa depan yang terungkap akibat pandemi COVID pada tahun 2019-22. Dengan menempatkan analisisnya pada dunia pandemi COVID-19, makalah ini mengkaji bagaimana proses yang dipicu oleh COVID-19 membentuk/menggeser idealisme tentang komunitas, rasa memiliki, dan keamanan yang diorganisir di sekitar trio warga negara/bangsa/negara dalam sistem internasional yang mengglobal. Laporan tersebut berpendapat bahwa pandemi COVID mungkin secara bersamaan telah menggerakkan atau menghidupkan nasionalisme sentrifugal di dunia Barat dan negara-negara kaya, sehingga menghasilkan kebijakan neopopulis dan tindakan proteksionis. Laporan ini juga berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang sama, yang memperlihatkan kerawanan struktural di seluruh dunia, khususnya di negara-negara Selatan, kemungkinan besar akan memicu migrasi sentripetal di seluruh dunia. Namun pada akhirnya, menurut argumen bab ini, kedua dinamika tersebut kemungkinan besar akan mendorong globalisasi lebih lanjut, karena keduanya secara apriori terikat dengan (dan berada di dalam) infrastruktur produktif yang sudah terglobalisasi, yang terdiri dari industri digital dan pengetahuan, sektor manufaktur dan transportasi, dan lembaga perdagangan dan keuangan. Pada akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa globalisasi akan tetap ada, meskipun bentuknya berbeda seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19.

Respons global terhadap pandemi COVID-19 pada tahun 2019–22 menunjukkan dua dinamika kontradiktif yang terjadi dalam globalisasi kontemporer. Di satu sisi, banyak negara yang berupaya keras untuk menerapkan kebijakan dan praktik yang dipicu oleh COVID-19 yang menghilangkan fluiditas dan keterhubungan sosial, politik, dan bahkan ekonomi di dunia dalam bentuk kebijakan proteksionis kesehatan, penimbunan vaksin, dan pembatasan perjalanan. Beberapa pengamat melihat langkah-langkah tersebut sebagai bukti kecenderungan deglobalisasi. Di sisi lain, dan secara paradoks, efektivitas banyak kebijakan dan praktik tersebut didasarkan pada kelancaran infrastruktur ekonomi global yang ada di bidang manufaktur, transportasi, dan distribusi. Misalnya, beberapa negara proteksionis bergantung pada India, produsen vaksin utama, untuk pasokan vaksin mereka. Lebih jauh lagi, praktik nasionalis yang dipicu oleh COVID di semua negara bergantung pada “globalisasi pengetahuan” (menahan upaya vaksin). Praktik yang sama juga mengungkap kerentanan/kerentanan struktural di banyak negara di dunia dalam memenuhi kebutuhan warganya khususnya di negara-negara Selatan.

Dalam bab ini, saya mengeksplorasi apa yang diungkapkan oleh dinamika kontradiktif dan kekuatan paradoks mengenai keadaan saat ini dan prospek globalisasi di masa depan. Dengan menempatkan analisis saya pada dunia pandemi COVID-19, saya mengkaji bagaimana proses yang dipicu oleh COVID telah membentuk/menggeser idealisme tentang komunitas,

rasa memiliki, dan keamanan yang diorganisir berdasarkan triad warga negara/bangsa/negara dalam sistem internasional yang mengglobal. Saya berpendapat bahwa pandemi COVID kemungkinan besar akan menggerakkan atau menghidupkan nasionalisme sentrifugal (di Dunia Pertama) dan migrasi sentripetal (dari Dunia Selatan) secara bersamaan. Namun pada akhirnya, kedua dinamika tersebut, seperti dinamika paradoks yang saya singgung di awal, kemungkinan besar akan mendorong globalisasi lebih lanjut, karena keduanya secara apriori terikat dengan (dan berada di dalam) infrastruktur produktif yang sudah mengglobal, baik industri digital maupun pengetahuan. atau sektor manufaktur atau transportasi. Pada akhirnya, saya berpendapat bahwa globalisasi akan tetap ada, meskipun bentuknya berbeda seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19.

18.1 COVID-19 DAN AKHIR VIRAL GLOBALISASI

Epidemi COVID-19 memicu perubahan penting dalam cara berpikir global di berbagai negara di dunia. Beberapa arus global menghadirkan risiko yang melebihi tantangan biasa yang meningkat menjadi risiko keamanan yang berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi di seluruh dunia. COVID-19 dengan cepat meningkat ke tingkat yang sama di seluruh dunia, namun tidak dengan tingkat kewaspadaan yang sama secara universal di seluruh negara di dunia. Meskipun virus ini menyebar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan peredaran benda-benda manusia di planet bumi, deteksi virus ini di seluruh dunia bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari satu negara ke negara lain. Negara-negara yang berada dalam lingkaran peredaran global mendeteksi virus ini lebih awal, sebagian karena posisi mereka di sirkuit global, dan sebagian karena mereka mempunyai sumber daya untuk melakukan hal tersebut. Prancis, Italia, Inggris Raya, Jerman, dan Amerika Serikat termasuk di antara negara-negara tersebut.

Dengan kecepatan yang berbeda-beda, negara-negara ini menyadari bahwa virus ini menghadirkan masa depan yang tidak pasti. Namun begitu realisasinya sudah ada, mereka bergerak cepat untuk mengekang arus barang, pertama arus perjalanan internasional, lalu mobilitas warga negara di dalam negeri, dan, yang terakhir dan tanpa sengaja, arus perdagangan, yakni arus barang. dan komoditas di seluruh dunia. Negara-negara lain juga mengikuti langkah yang sama, pertama di Eropa, Asia Timur, dan juga Australia dan Selandia Baru, kemudian di seluruh dunia, seperti Amerika Selatan, yang tanggapannya meniru tanggapan negara-negara kaya di dunia tanpa ada perbedaan. tidak mampu mengumpulkan sumber daya yang sama untuk melakukan pembendungan dan pengentasan. Dalam waktu enam bulan hingga satu tahun, “pandemi ini telah menyebabkan penurunan arus internasional terbesar dan tercepat termasuk perdagangan, investasi asing langsung, dan perjalanan internasional dalam sejarah modern” (Altman, 2020). Efek yang semakin besar, yang membatasi atau bahkan menghancurkan arus global dengan begitu cepat, tidak diinginkan namun bukan hal yang tidak terduga mengingat infrastruktur kapitalis global (ekstraksi, produksi, dan rantai pasokan) mengkondisikan keterhubungan global dan jaringan saling ketergantungan, menjadi lebih intens dan terkoordinasi. membentuk dunia kontemporer.

Selain itu, para partisipan dalam ekonomi pengetahuan global, yang meresap ke dalam bidang interaksi ekonomi dan politik tradisional, tiba-tiba dihadapkan pada kekacauan dalam hal siapa “penguasa” (negara, perusahaan, komunitas) yang harus dilayani, dan bagaimana serta di mana, kapan mereka datang. di bawah tekanan neopopulis dan global, bahkan kosmopolitan yang kontradiktif. Para ilmuwan, pusat penelitian, institut, dan universitas yang berada di sekitar sirkuit pendanaan global mengubah posisi mereka dalam mencari mitra yang menguntungkan. BioNTech, sebuah perusahaan bioteknologi Jerman yang dijalankan oleh pasangan ilmuwan kelahiran Turki, mengadakan usaha patungan dengan raksasa farmasi Amerika Pfizer untuk mencari vaksin. Astra-Zeneca, perusahaan farmasi dan bioteknologi multinasional Inggris-Swedia, bekerja sama dengan Universitas Oxford. Rusia dan Tiongkok mempunyai usaha mereka sendiri dengan tingkat kerahasiaan dan keberhasilan yang berbeda-beda, sementara negara-negara lain berupaya keras melindungi masyarakat dan institusi mereka dengan melakukan isolasi.

Semakin mereka terisolasi, semakin banyak kesenjangan politik dan ekonomi dalam sistem global yang terungkap. Pandemi COVID mengungkap atau mengungkapkan banyak keterputusan ini. Laporan ini mengungkapkan bahwa globalisasi bukanlah obat mujarab untuk berbagai permasalahan dunia; bahwa janji-janji demokratisasi kehidupan di seluruh dunia tidak pernah terwujud sepenuhnya; dan bahwa keajaiban ekonomi yang diramalkan telah menciptakan kekayaan yang tak terhitung bagi segelintir orang, mengangkat banyak orang keluar dari kemiskinan absolut, namun juga gagal untuk membebaskan masyarakat luas dari kondisi yang sulit atau menciptakan bentuk-bentuk kerentanan baru dalam kehidupan mereka, khususnya melalui tenaga kerja. kebijakan fleksibilitas.

Paradoksnya, pengungkapan pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa yang dipertaruhkan bukanlah stabilitas dan kelangsungan strategis sistem global yang digerakkan oleh modal, melainkan konstitusi internal yang bersifat diskursif yang merugikan pihak lain. Laporan ini mengungkapkan bahwa negara-negara dan komunitas-komunitas yang telah lama diajarkan untuk mendikte arah globalisasi, juga akan terkena dampak yang disengaja atau tidak dari pilihan-pilihan yang diambil dan jalur-jalur yang ditetapkan. Menjadi semakin jelas bahwa bahkan hak-hak istimewa mereka dalam sistem ini sangat bergantung pada saling ketergantungan kompleks yang mereka bantu terapkan, namun kini mereka memiliki kendali terbatas atau bertahap. Misalnya, ketika alat pelindung diri tingkat medis menjadi langka, sehingga menjadi alat yang paling banyak dicari, sebagian besar dunia menyadari bahwa hanya sedikit negara yang mampu memproduksi alat tersebut karena saling ketergantungan yang kompleks. Demikian pula, unit perawatan intensif (ICU), khususnya suku cadang, semakin banyak yang bergantung pada Tiongkok dan India untuk memasok meskipun teknologinya telah dipasok ke Tiongkok secara global. Khususnya di “dunia Barat,” kesadaran akan kerentanan terhadap Tiongkok atau India atau beberapa negara jauh lainnya menambah bahan bakar bagi imajinasi neopopulis yang sudah berkecamuk yang memimpikan masyarakat autarki yang ideal dan menyerukan deglobalisasi.

Virus COVID-19 lebih terungkap di luar negara-negara Barat: virus ini mengungkapkan bahwa saling ketergantungan yang kompleks telah menciptakan globalisasi melalui hierarki

lama dan baru, bukannya meratakan hierarki, seperti yang dijanjikan dalam pengumuman awal atas nama globalisasi. Globalisasi telah memasuki kehidupan orang-orang di mana pun di negara-negara “Istirahat” di luar “Barat”, namun hanya untuk mengkalibrasi ulang subordinasi mereka yang sudah berlarut-larut dalam sistem. Masyarakat umum di beberapa negara Afrika yang mengalami eksploitasi kronis dapat membuktikan status mereka. Di negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo, kewarganegaraan formal tidak memberikan hak dan perlindungan berarti kepada warga negara, namun memberikan berbagai cara untuk tunduk. Mineral tanah jarang yang dibawa keluar dari Kongo melalui jaringan globalisasi menceritakan kisah kalibrasi ulang penaklukan melalui penghancuran bumi dan pengabaian badan-badan warga negara. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak kehidupan yang menggali mineral bagi para dewa globalisasi yang dicatat dalam kisah-kisah globalisasi. Berdasarkan logika operasi (pengaturan) yang bertumpu pada akumulasi modal dan ekstraksi nilai, agen, institusi, dan struktur globalisasi semakin mengintensifkan dan memperdalam pertukaran yang tidak setara, terlepas dari aktor dominan mana yang melakukan proses tersebut. Hal ini bukanlah janji retorik mengenai globalisasi yang diumumkan pada tahun 1970an dan 1980an, namun hal ini menjadi kenyataan di negara-negara seperti Kongo.

Komunitas-komunitas miskin tidak hanya di Afrika tetapi juga di Asia dan Amerika sekali lagi disadarkan bahwa mereka bukanlah prioritas, bahkan jika kelompok masyarakat yang memiliki posisi strategis di komunitas mereka mendapatkan manfaat dari pengaturan struktur yang diatur secara global. Presiden Republik Demokratik Kongo Laurent Kabila, bersama kroni-kroninya, menyedot miliaran dolar, tidak seperti mantan presiden sekaligus diktator Mobutu Sese Soko, yang mengasingkan diri dengan hasil rampasan miliaran dolar yang disimpan di rekening bank global. Jaringan keuangan. Kini perusahaan-perusahaan Tiongkok dikatakan memiliki banyak tambang mineral di Kongo, yang membuat kecewa orang-orang Amerika yang dulunya adalah pengatur kekayaan dan kemiskinan. Dengan latar belakang hierarki yang terus menerus ini yang disoroti oleh gangguan virus akibat COVID, upaya masing-masing negara untuk “menolong diri sendiri” dengan cara apa pun penutupan perbatasan, lockdown, penimbunan APD (alat pelindung diri), pembajakan ICU (intensif unit perawatan), monopoli internasional dan pembelian awal produksi vaksin lebih jauh mengungkap kelemahan pernyataan afirmatif mengenai globalisasi dan untuk kemanusiaan. Satu virus yang menyebar secara global tidak hanya mengganggu mekanisme globalisasi tetapi juga menunjukkan perpecahan yang berdampak pada lokalisasi (dan nasionalisasi) kehidupan.

18.2 DEGLOBALISASI ATAU BUST?

Mengingat semua hal yang terungkap ini, tidak lama kemudian prediksi mengenai kemunduran atau kehancuran globalisasi semakin banyak. Kekuatan sentripetal di negara-negara Barat dan tekanan sentrifugal di negara-negara Selatan nampaknya semakin memperkuat prediksi tersebut. Chatham House menangkap konsensus dari suara-suara tersebut mengenai apa yang dimaksud dengan deglobalisasi: “Deglobalisasi adalah gerakan menuju dunia yang kurang terhubung, ditandai dengan negara-bangsa yang kuat, solusi lokal,

dan kontrol perbatasan dibandingkan institusi global, perjanjian, dan pergerakan bebas.” (Kornprobst & Wallace, 2021). Menurut Irwin (2020), proses yang sudah berjalan menjadi lebih terlihat dengan adanya pandemi.

Pandemi COVID-19 mendorong perekonomian dunia mundur dari integrasi ekonomi global. Para pengambil kebijakan dan pemimpin bisnis kini mempertanyakan apakah rantai pasokan global sudah terlalu terbebani. Dalam lingkungan di mana aliansi tidak pasti dan tidak ada kerja sama internasional, negara-negara tersebut juga mempertanyakan apakah mereka harus mengurangi saling ketergantungan ekonomi. Masalah keamanan nasional dan kesehatan masyarakat memberikan alasan baru bagi proteksionisme, terutama untuk peralatan medis dan makanan, dan penekanan pada pengadaan dalam negeri.

Ada kesepakatan luas mengenai hal ini di antara para pengamat. Beberapa bentuk dari apa yang disebut “deglobalisasi” telah terjadi sejak Krisis Keuangan Global tahun 2008. Namun “pandemi virus corona telah mempercepat tren ini secara signifikan,” ungkap sebuah artikel baru-baru ini (Marin, 2021). “Beberapa permasalahan sebaiknya ditangani di dalam negeri,” ujar Chatham House, seraya menyebut permasalahan rantai pasok sebagai titik lemah globalisasi yang baru terjadi selama pandemi ini. “Pandemi COVID-19 menggambarkan bahayanya ketergantungan pada rantai pasokan global untuk pasokan medis yang penting.” Ironisnya, apa yang tadinya dianggap sebagai lambang globalisasi yang canggih kini muncul sebagai sebuah keretakan atau keterputusan dalam sistem. Kekayaan yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan oleh beberapa perusahaan yang berlokasi strategis sebagai distributor “barang” dalam rantai nilai lintas batas. Namun demikian, bahkan perusahaan-perusahaan tersebut harus menghitung ulang model bisnis mereka seperti yang diperkirakan oleh para pengamat, “menggunakan data dari krisis keuangan, bahwa guncangan COVID-19 kemungkinan besar akan menyebabkan penurunan rantai nilai lintas batas negara sebesar 35% faktor utama yang mendorong globalisasi selama tiga dekade terakhir” (Marin, 2021). Demikian pula, ulama lain mengamati:

Proses integrasi ekonomi internasional, yang merupakan pendorong utama proses globalisasi dan pertumbuhan ekonomi, telah melambat sejak krisis keuangan global (2008–09). Dekade terakhir telah menyaksikan penurunan pertumbuhan perdagangan barang dagangan internasional, perlambatan dinamisme rantai nilai global (GVC) dan penurunan signifikan dalam aliran modal internasional. (Akman dkk., 2021)

Apakah hal ini merupakan tren yang bertahan lama dalam masa kapitalisme, atau merupakan manifestasi dari siklus kontraksi biasa atau koreksi arah ekspansi kapitalis, masih perlu didiskusikan. Manfred B. Steger (2020) menawarkan tiga kemungkinan skenario. Meskipun sudah diperkirakan jauh sebelum pandemi COVID melanda, skenario pertama sudah mengantisipasi potensi “reaksi balik terhadap globalisasi dengan konsekuensi meningkatnya pembatasan pergerakan dan menguatnya otoritarianisme politik.” Skenario sebaliknya adalah “melemahnya populisme nasionalis dan kembalinya globalisasi neoliberal yang berhaluan kiri, mungkin dengan wajah teknologi tinggi.” Bagi sebagian orang, reaksi balik tampaknya sedang terjadi akhir-akhir ini. Pihak lain, bahkan mereka yang mengakui kekuatan “sentimen deglobalis,” melihat pemulihan global yang tidak dapat dielakkan di tahun-tahun

mendatang. Benedikter (2022) menangkap dinamika globalisasi atau reglobalisasi di masa depan yang bersifat paradoks dan saling bergantung satu sama lain, ketika ia menunjukkan bahwa baik arah idealisme progresif maupun populis konservatif akan saling mendukung dan menghidupkan satu sama lain bahkan ketika mereka mengejar tujuan sempit mereka. tujuan.

Sejak tahun 2000an, berbagai konsep dan praktik globalisasi saling bertentangan satu sama lain, dan sebagian lagi hidup berdampingan dengan hampir tidak ada titik kontak nilai ideologis, meskipun infrastruktur, keuangan, ekonomi, atau teknologi saling terkait erat. (Benedikter, 2022) Tidak peduli masa depan yang diimpikan, diskusi-diskusi tersebut akan mengungkapkan bahwa globalisasi bukanlah sebuah pembangunan yang bebas nilai secara kebetulan, namun sebuah produk dari orkestrasi yang sarat nilai dalam sistem global yang digerakkan oleh modal. Pergeseran sistemik kontemporer di berbagai arena kehidupan mulai dari bidang politik, ekonomi, dan teknologi semuanya bersinggungan melalui hubungan kapitalis. Kapitalisme secara fungsional telah mengintegrasikan semua aktivitas produktif di seluruh dunia, mengatur nilai atau nilai aktivitas tersebut sebagai bagian dari logika dan ideologi tunggalnya. Seperti yang dikatakan Steger, mereka telah mengatur “transformasi sosial mendalam yang berpusat pada pasar” melalui “intensifikasi dan perluasan hubungan ekonomi di seluruh dunia”.

Bukan saja tidak ada lagi kapitalisme dan pasar di luar, seperti yang pernah diungkapkan oleh Jacques Derrida (1994), namun juga tidak ada keseragaman di dalam dimana perbedaan-perbedaan idealnya melebur ke dalam kualifikasi produktif untuk melayani sistem yang digerakkan oleh modal. Sebaliknya, sistem yang saat ini mencakup segalanya, justru mendapati dirinya memiliki hierarki yang semakin dalam dan kontradiksi serta disjungtur internal yang semakin tajam. Pandemi COVID telah membuka tabir keretakan sistem ini. Semakin banyak kehidupan yang berada dalam kondisi genting secara ekonomi di seluruh dunia, baik di negara-negara Barat maupun negara-negara lain, bahkan ketika ekonomi kapitalis tumbuh dan berkembang. Menurut Komisi Eropa, ketimpangan pendapatan antar negara telah menurun namun ketimpangan di dalam negara semakin meningkat. Tujuh puluh persen penduduk dunia tinggal di negara-negara yang kesenjangan antara kelompok terkaya dan termiskin semakin meningkat dalam 30 tahun terakhir.

Meskipun meningkatnya ketimpangan tidak secara langsung berkorelasi dengan precarity, hal ini memperkuat precarity karena tidak adanya kebijakan dan tindakan yang dapat memediasi dampak terburuk dari ketimpangan. Tampaknya tidak ada upaya berkelanjutan di seluruh dunia untuk mengatasi dinamika selain sindiran retorik terhadap pembangunan, multilateralisme, kesetaraan, dan lain-lain. Pola-pola ini memperumit argumen bahwa deglobalisasi adalah kembalinya status quo ante, yaitu negara-negara Barat yang sebelumnya memiliki hak istimewa akan beralih ke negara-negara Barat, sekali lagi membatasi produksi di bidang ekonominya dan menawarkan kepada warga negaranya hak-hak ekonomi yang pernah mereka nikmati. Mengingat modal adalah kekuatan pendorong perekonomian global, hal ini tampaknya tidak mungkin dilakukan dan juga tidak sejalan dengan sifat kapitalisme. Memang benar bahwa warga negara-negara Barat tidak lagi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari peluang global atau masyarakat negara-negara Barat

dikutuk untuk menderita secara ekonomi dan politik. Seperti yang diungkapkan oleh Slavoj Žižek secara dramatis namun ringkas, “orang-orang biasa di seluruh dunia tertinggal atau ditinggalkan oleh Tuhan dan Negara,” yang kini harus menghadapi sendiri kerentanan ekonomi mereka (Soguk, 2021). Demikian pula, semakin banyak degradasi ekologi dan lingkungan yang terjadi dalam tatanan sosial dan ekonomi bahkan ketika retorika keberlanjutan dan ketahanan dinormalisasi dan dimonetisasi dengan cara-cara baru. Menurut Perkiraan Dewan Intelijen Nasional tentang Perubahan Iklim pada tahun 2021, perubahan iklim global saja akan menimbulkan ketegangan dan risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam arena geopolitik global seputar isu-isu lintas batas seperti “biaya dekarbonisasi, persaingan predator atas sumber daya yang langka seperti mineral, pangan, dan sumber daya alam. air, geoengineering yang tidak diatur, dan perpindahan manusia akibat perubahan iklim” (NIC, 2021). Yang lebih buruk lagi, secara universal, semua makhluk hidup, tidak terkecuali tubuh manusia, sedang ditembus oleh suatu teknologi, yang ilmu pengetahuannya semakin efektif dan tepat serta bisa dibilang lebih jahat dan menjajah dalam maksud dan jangkauannya. Sebuah studi RAND tentang “Memikirkan Kembali Keamanan” untuk Tahun 2040 mencantumkan beberapa area potensial yang terbuka terhadap kemungkinan seperti ini:

AI melebihi kemampuan manusia (“The Singularity” atau “Super-Intelligence”); mesin menggantikan manusia; dan/atau manusia mentransfer otaknya ke komputer (“eternalisme”); AI dengan cepat menggantikan sebagian besar angkatan kerja; pengeditan genom (CRISPR/Cas-9) semakin meluas; komputasi kuantum [memungkinkan subjektivitas teknologi nano terhadap bentuk kehidupan manusia dan bukan manusia untuk diintervensi dan diawasi]; Perang robotik dan dunia maya melampaui partisipasi manusia [memutus hubungan dan menjauhkan manusia dari penghancuran bentuk kehidupan manusia dan non-manusia]. (Hoehn dkk., 2018)

Bentuk-bentuk baru perbudakan kehidupan manusia dan non-manusia memang sedang terjadi! Dalam dramanya *The Life of Timon of Athens*, Shakespeare menampilkan karakter Pelukis yang menjawab pertanyaan “Bagaimana keadaan dunia?” “Paus pak, seiring pertumbuhannya” begitulah jawaban sang Pelukis (Babak I, Adegan 1). Pembelajaran di sini relevan dengan diskusi mengenai globalisasi yang terjadi dalam sistem kontemporer yang digerakkan oleh modal. Ketika dunia bertumbuh, dunia juga mengalami penurunan dimana keausan menjadi akibat dari pertumbuhan dunia yang didorong oleh modal. Meskipun secara teoritis pertumbuhan ini bersifat partisipatif atau “demokratis”, namun dalam praktiknya, pertumbuhan ini terbukti kurang memberikan kebebasan, tidak memiliki visi kesetaraan maupun tidak didorong oleh kesetaraan baik dalam hal niat maupun hasil. Kelelahan seperti meningkatnya kerentanan di antara masyarakat, migrasi massal, ketegangan etnis, agama, dan ras, serta perubahan iklim secara kolektif membentuk sebagian besar “bagian dalam” atau “isi” kapitalis. Tak satu pun dari fenomena ini berada di luar “pembuatan dunia” atau “pembentukan dunia” kapitalis. Hal-hal tersebut adalah produk sampingan atau konsekuensi yang bersifat gesekan, atau bahkan fungsional, di bidang keuangan, perdagangan, dan

teknologi. Pandemi COVID menjadi cermin virus di mana segala sesuatunya terlihat meski hanya sekilas.

18.3 REDUX GLOBALISASI

Pergeseran planet yang terkait dengan hubungan dan institusi globalisasi sedang mengubah geopolitik global. Ketika dunia tumbuh, terkoyak, dan terkikis, menghasilkan kekayaan sekaligus menimbulkan rasa tidak aman, kekuatan infrastruktur kapital serta tatanan simbolis dari suprastruktur beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk mengamankan sistem dan menekan bahaya yang ada di dalamnya. Tuntutan ganda sangat membebani kekuatan dan perintah ini.

Di satu sisi, “globalisasi dikaitkan dengan liberalisasi menyeluruh, meningkatnya kesenjangan, krisis keuangan, dan perasaan tidak mampu mengendalikan nasib ekonomi dan sosial seseorang. COVID-19 dalam banyak hal memperkuat keyakinan bahwa pandemi ini tidak akan seburuk ini jika kita tidak begitu terbuka” (Massoud & Lee, 2021). Di sisi lain, dan secara paradoks, untuk mengatasi dampak buruk atau konsekuensi tak terduga dari globalisasi, kita harus memanfaatkan hubungan global dan mekanisme koordinasi kelembagaan yang telah mendorong globalisasi. Dampak pertama mungkin memicu kecenderungan autarkis atau bahkan autochtonic. Namun, tingkat integrasi ekonomi yang telah mengubah dunia secara mendasar, terutama melalui teknologi, kemungkinan besar akan memaksa kita untuk kembali ke kerangka global secara ideal dan praksis. Saya melihat tiga alasan untuk masa depan seperti itu.

Pertama, tidak ada perubahan besar dalam struktur fundamental perekonomian dunia. Keunggulan komparatif, meski terus berubah, masih menghubungkan sumber daya dunia secara horizontal dan hierarkis. Integrasi horizontal (menghubungkan) masyarakat, tempat, dan industri melalui diferensiasi (hierarki) dalam sistem pertukaran nilai akan terus memacu globalisasi seiring dengan lanskap global yang baru. Dengan adanya teknologi baru yang memungkinkan pasar pengetahuan global, dorongan untuk mencapai keunggulan komparatif tetap menjadi inti perekonomian yang didominasi modal, dimana seluruh dunia merupakan wilayah aktivitasnya. “Kapitalisme itu rakus karena pencariannya akan akumulasi tanpa akhir,” tulis Charles C. Lemert. “Tetapi obsesi mereka terhadap perubahan juga menjadikannya lebih luas, memperluas dan mengubah kapasitas global dalam hal teknologi baru, hubungan baru, dan kecepatan untuk mengatasi konflik yang timbul” (Lemert, 2015: 166). Saat ini, kemungkinan besar wacana produktif mengenai kemungkinan terjadinya deglobalisasi akan “menyebabkan perubahan kualitatif yang signifikan dalam strategi, struktur, dan perilaku yang dapat diamati dalam bisnis internasional (IB) untuk mengembangkan integrasi politik yang lebih dalam” melawan kecenderungan antiglobalisasi (Witt, 2019: 1053–58).

Bukan saja tidak ada bukti mendasar yang menunjukkan hal sebaliknya seperti yang disarankan oleh para pendukung deglobalisasi, namun juga bukti yang menunjukkan bahwa perpecahan dan keretakan, seperti yang diungkapkan oleh pandemi COVID-19, pada akhirnya

menunjukkan bahwa autarki dan autochthony adalah (a) tidak mungkin dan (b) tidak diinginkan (c) dan pada akhirnya tidak berkelanjutan secara ekonomi.

Kasus pembuatan vaksin mencerminkan dinamika saling ketergantungan yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan tanpa adanya konsekuensi besar. Selama pandemi, Institut Serum India berulang kali dinobatkan sebagai produsen vaksin terbesar di dunia. Perusahaan ini memang merupakan perusahaan besar yang memasok sejumlah besar vaksin ke India dan dunia. Pada tahun 2020, Serum Institute menandatangani perjanjian dengan Oxford-Astra Zeneca untuk memproduksi vaksin COVID yang terjangkau, dan berjanji untuk mencapai kapasitas seratus juta vaksin COVID per bulan pada bulan April 2021 (Freyer, 2021). Perusahaan membuktikan kemampuannya selama krisis varian Delta dengan memasok kebutuhan vaksinasi di India. Namun keberhasilannya di India harus dibayar dengan janji perusahaan untuk memasok ke negara lain. Alasan utama kegagalan tersebut ternyata adalah ketergantungan perusahaan terhadap bahan baku dan peralatan vaksin terhadap mitranya di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Peralatan modal yang diperlukan untuk mengubah bahan obat menjadi vial antara lain adalah “bioreaktor dan pompa filtrasi pasokan bahan-bahan sekali pakai (sekali pakai) secara terus-menerus seperti kantong bioreaktor, filter, dan pipa, serta bahan kimia dan bahan seluler serta bahan mentah lainnya yang dikenal sebagai bahan habis pakai. . . [akhirnya] jalur perakitan untuk menyemprotkan vaksin cair ke dalam jutaan botol kecil, menambahkan tutup dan label, lalu mengemasnya untuk didistribusikan” (Bown & Rogers, 2021). Ketika kelangkaan terjadi di pasar ini, kapasitas Serum Institute terpukul, yang pada dasarnya menyoroti saling ketergantungan yang kompleks yang bekerja di berbagai arah.

Menariknya, Amerika Serikat mengalami kekurangan unit perawatan intensif karena alasan serupa dalam rantai pasokan yang menyediakan suku cadang untuk perangkat tersebut. “Produsen alat kesehatan tidak membuat setiap barang yang dimasukkan ke dalam produknya dimulai dari bahan mentah. Mereka [membeli] suku cadang mesin, komponen elektronik, bahan kimia, dan bahan dari pemasok di seluruh dunia. Pemasok tersebut, pada gilirannya, membeli pasokan dari pemasok lain, dan seterusnya” (Chen et al., 2021). Banyak contoh serupa yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat gangguan, hubungan global ini masih memberikan keunggulan dan nilai komparatif, meskipun hubungan tersebut menopang berbagai hierarki ekonomi dan hubungan yang tidak setara di seluruh dunia. Selama keunggulan komparatif tetap mempertahankan nilai dan efisiensinya, keunggulan komparatif tersebut kemungkinan besar akan mendorong globalisasi melalui proses yang dapat diukur dan tidak dapat diukur.

Kedua, pandemi COVID membuktikan apa yang mungkin salah dengan globalisasi, namun juga menunjukkan bahwa koreksi arah yang berarti harus bergantung pada mekanisme dan institusi globalisasi yang ada. Jaringan perdagangan, keuangan, modal, informasi, dan orang-orang kaya yang mengatur arus global mungkin dirusak karena adanya ketidakpuasan, namun tidak masuk akal untuk mengharapkan adanya perubahan substantif dalam struktur dan tujuannya. Para penggerak jaringan tersebut, mulai dari bank-bank besar hingga raksasa transportasi, berupaya mencegah diskusi mengenai ketidakpuasan/keputusan yang muncul

akibat krisis COVID-19. Pesan umum yang muncul adalah bahwa kesengsaraan globalisasi yang diakibatkan oleh pandemi ini sebagian besar sudah berakhir, seperti yang terlihat dari pemulihan arus global sebelum pandemi di empat bidang penting: perdagangan, modal, informasi, dan manusia.

COVID-19 tidak menyebabkan globalisasi runtuh. Perdagangan barang telah melonjak jauh di atas tingkat sebelum pandemi, sehingga sangat mendukung pemulihan global bahkan ketika tantangan kapasitas dan ketegangan perdagangan masih terus berlanjut. Pandemi ini memberikan pukulan besar terhadap aliran modal internasional, namun aliran ekuitas portofolio menjadi stabil pada pertengahan tahun 2020 dan investasi asing langsung (FDI) kembali meningkat tajam pada tahun 2021. Perkiraan Pola arus global tidak menunjukkan bukti adanya pergeseran besar menuju regionalisasi. Perdagangan jarak jauh telah tumbuh lebih cepat dibandingkan perdagangan jarak pendek selama pandemi ini. Negara-negara termiskin di dunia masih tertinggal dalam pemulihan globalisasi. Keterhubungan global yang lebih kuat dapat mempercepat pemulihan dunia dari COVID-19. Kerentanan yang diakibatkan oleh pandemi ini harus diatasi demi masa depan yang lebih sejahtera dan berketahanan. (Altman & Bastian, 2021)

Laporan DHL ini diterima secara luas sebagai berita baik. Forum Ekonomi Dunia mengumandangkannya dengan menyatakan: “Globalisasi dan perdagangan dunia bangkit kembali dari dampak COVID-19: laporan” (Broom, 2021). Menghubungkan artikel ini dengan artikel tentang “Aliansi Global untuk Fasilitasi Perdagangan,” sebuah inisiatif kemitraan swasta-publik dalam “Platform untuk Membentuk Masa Depan Perdagangan dan Investasi,” Forum Ekonomi Dunia bertanya, “Sudahkah Anda membaca? Mengapa dunia memerlukan globalisasi yang lebih baik, bukannya mengurangnya” (Broom, 2021).

Menariknya, dalam semua perbincangan ini, yang ada hanyalah bisikan pengakuan bahwa kembali ke kondisi “normal” memerlukan perhatian pada beberapa permasalahan. Misalnya, laporan DHL menyebutkan “negara-negara termiskin di dunia tertinggal dalam pemulihan globalisasi.” “Kerentanan yang muncul akibat pandemi harus diatasi demi masa depan yang lebih sejahtera dan berketahanan,” tegasnya (Altman & Bastian, 2021). Empat bidang yang disebut-sebut memerlukan perhatian dan koordinasi segera demi masa depan yang lebih sejahtera: “Memperkuat rantai pasokan global dan regional; Mendukung perjanjian perdagangan dan lembaga internasional; Mencegah negara-negara termiskin di dunia agar tidak semakin tertinggal; [dan] Amankan masa depan globalisasi digital” (Altman & Bastian, 2021). Ian Goldin dan Robert Muggah juga berargumentasi bahwa “pandemi ini menawarkan kesempatan sekali seumur hidup untuk mengatur ulang globalisasi guna memastikan manfaatnya terbagi lebih luas dan ancaman yang ditimbulkannya pandemi, perubahan iklim, kesenjangan, dan sebagainya adalah sangat berkurang” (Goldin & Muggah, 2020).

Dapat dibayangkan bahwa masing-masing bidang ini berpotensi mendorong orientasi dan kapasitas kompetitif dan kooperatif, terutama mengingat adanya interseksionalitas teknologi dengan fungsi ekonomi global. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, sifat transversal dari tantangan terhadap bangunan infrastruktur dan suprastruktural (simbolis) kapitalisme global, mulai dari krisis kesehatan global dan perubahan iklim hingga migrasi

massal, kemungkinan besar akan mendorong kemampuan penyelesaian masalah kolektif yang substansial melebihi daya saing komparatif. Misalnya, setiap dampak alami perubahan iklim yang diperkirakan, mulai dari variasi suhu ekstrem, kekeringan, dan curah hujan lebat hingga kenaikan permukaan laut, diperkirakan memerlukan kolaborasi dan koordinasi lintas batas. Pentingnya kerja sama berakar pada tujuan untuk menghindari konflik yang semakin parah terkait sumber daya alam dan sumber daya hasil produksi. “Komunitas epistemik pemecahan masalah” kemungkinan besar akan muncul sebagai respons yang beralasan. Dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan beberapa kapasitas nasional mungkin masih menjadi hambatan di negara-negara maju, namun harus bersinggungan dengan upaya manajemen risiko global yang diperlukan untuk mobilitas modal dan akses terhadap sumber daya di seluruh dunia. Karena adanya kebutuhan, masa depan kemungkinan besar akan dibentuk secara setara melalui kerja sama pragmatis dan kompetisi refleksif.

Saat ini terdapat lebih banyak keributan mengenai dukungan multilateralisme dan organisasi kebijakan internasional serta peraturan yang cermat untuk mendorong masa depan tersebut. “Pandemi virus corona telah . . . menunjukkan bahwa globalisasi yang tidak diatur bisa berbahaya” (Farrell & Newman, 2020). “Membangun secara multilateral dengan mega-regional” merupakan salah satu gagasan dalam upaya membangun konsensus mengenai perekonomian dunia dari tingkat regional hingga global, dibandingkan dengan mengatur konsensus global dari atas ke bawah. Semakin banyaknya suara yang mendukung globalisasi, bahkan ada yang mendukung globalisasi, dengan beberapa pihak yang berbicara mengenai reformasi globalisasi dengan mengubah roda fungsinya dan pihak lain menyerukan perubahan yang lebih drastis dalam operasional mekanismenya menuju apa yang mereka sebut “globalisasi demokratis”. .” Namun pihak lain menilai adanya pemahaman yang saling berhubungan yang melibatkan “penyempurnaan, penyusunan ulang, reformasi, pendefinisian ulang dan/atau revisi status dan mekanisme [globalisasi] saat ini, serta konsep dan metodologinya” (Benedikter & Kofler, 2019). Melalui pendekatan ini, harapannya adalah untuk membayangkan konsep dan praktik yang memediasi globalisasi yang lebih inklusif dan tangguh di semua tingkatan.

Ketiga, di awal bab ini saya berpendapat bahwa pandemi COVID telah memicu sentimen nasionalis sentrifugal atau neopopulis di seluruh dunia, terutama di negara-negara Barat dan tidak terlalu gencar di negara-negara Selatan. Banyak seruan untuk “kembali” ke swasembada karena “eksternalitas negatif” arus global di lingkungan nasional. Sekelompok pengamat berpendapat bahwa “struktur jaringan eksternal pada skala global” tidak hanya memicu kekhawatiran yang berasal dari imigrasi dan “meningkatkan risiko penularan krisis keuangan,” namun juga “meningkatkan kesenjangan dan polarisasi sosial” (Balsa-Barreiro dkk., 2020). Presiden Emmanuel Macron dari Perancis juga menyuarakan sentimen serupa, dengan menyatakan bahwa pandemi COVID “akan mengubah sifat globalisasi, yang telah kita jalani selama 40 tahun terakhir,” seraya menambahkan bahwa “jelas bahwa globalisasi semacam ini mencapai akhir siklusnya” (Irwin, 2020).

Sentimen-sentimen ini juga disertai dengan pesan-pesan dari “Global Rest” bahwa kemunduran dari globalisasi, jika memungkinkan, tidak akan memberikan keringanan dari apa

yang disebut oleh Edouard Glissant sebagai *chaos monde* (dunia yang berisi pengalaman-pengalaman plural yang menolak kendali) yang tetap terorganisir. dan dikoreografikan menjadi keseluruhan global, seluruh dunia dalam hubungan—*tout-monde* (1997: 94). “Gema” dunia sudah tidak dapat dipisahkan dari “kekacauan” kapitalisme global. Kapitalisme berupaya mengeluarkan kohesi ekonomi dari kekacauan dunia. Kemunduran kelompok neopopulis tanpa perubahan struktural terhadap hubungan pertukaran yang tidak setara akan semakin memperburuk kesenjangan struktural dan mendorong migrasi global. Mengabaikan kerentanan atau kerentanan masyarakat yang terpinggirkan secara transversal atau transnasional, sebagaimana telah disebutkan, pasti akan mendorong migrasi sentripetal (dari Dunia Selatan). Namun pada akhirnya, kedua dinamika tersebut, seperti dinamika paradoks yang saya singgung di awal, kemungkinan besar akan mendorong globalisasi lebih lanjut, karena keduanya secara apriori terikat dengan (dan di dalam) infrastruktur produktif yang sudah mengglobal, baik industri digital dan pengetahuan maupun pertambangan. atau sektor manufaktur atau transportasi. Misalnya, seruan untuk mundur dari integrasi global di Barat mengasumsikan kembalinya negara nasional yang kuat sebagai penengah. Beberapa negara seperti Rusia, Hongaria, dan Polandia sudah menyatakan diri mereka sebagai contoh dalam hal ini. Namun, ada juga seruan yang menganggap “mundurnya” memiliki arti yang berbeda di negara-negara Selatan. Walden Bello mengungkapkan makna mendasarnya pada awal tahun 2002:

Deglobalisasi bukanlah sinonim untuk menarik diri dari perekonomian dunia. Hal ini berarti suatu proses restrukturisasi sistem ekonomi dan politik dunia sehingga sistem tersebut dapat membangun kapasitas perekonomian lokal dan nasional, bukan malah memperburuknya. Deglobalisasi berarti transformasi perekonomian global dari yang terintegrasi berdasarkan kebutuhan perusahaan transnasional menjadi terintegrasi berdasarkan kebutuhan masyarakat, negara, dan komunitas.

Kita tahu bahwa visi Bello belum terwujud secara nyata. Dalam beberapa hal, kata-kata Bello masih bergema ketika ia berargumentasi bahwa “logika yang menentukan dari kapitalisme kontemporer mulai dari meluasnya hutang hingga finansialisasi, dari prekarisasi pekerjaan hingga penetrasi rasionalitas wirausaha ke dalam pengelolaan kelembagaan kesejahteraan dan migrasi adalah hal yang sangat tidak masuk akal. dari tantangan.” Pada saat yang sama, visi neo-otoritarianisme di negara-negara seperti Rusia, Hongaria, dan Tiongkok, yang selalu membutuhkan legitimasi berkelanjutan, tampaknya mempertanyakan beberapa mekanisme logika kapitalis meskipun bukan untuk tujuan mengubah fundamental ekonomi. kapitalisme tetapi untuk membuat mereka melayani kepentingan mereka yang semakin oligarki. Ironisnya, tantangan dari kelompok Kiri tetap lemah dengan latar belakang politik Kiri yang sebagian besar telah membuang “kelas” sebagai faktor pengorganisasian atau pengatur.

Mengingat kenyataan-kenyataan ini, secara keseluruhan, perbincangan pasca-COVID sudah mengenai penegasan dasar-dasar logika kapitalis, dan peran negara di dalamnya, bukan menentang dasar-dasar tersebut. UNCTAD mendeklarasikan hal tersebut dengan slogan “kesejahteraan untuk semua”: “Buku Panduan Statistik UNC-TAD untuk tahun 2021 yang diterbitkan pada tanggal 9 Desember memperkirakan adanya peningkatan yang kuat sebesar

22,4% dalam nilai perdagangan barang dagangan global tahun ini dibandingkan dengan tahun 2020. Pertumbuhan yang kuat akan mendorong nilai perdagangan barang dunia sekitar 15% lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 melanda.” Dalam laporannya yang bertajuk “Masa Depan Globalisasi,” Wells Fargo juga merasa optimis terhadap kesetiiaannya terhadap globalisasi yang didorong oleh modal. Laporan ini dimulai dengan keyakinan yang teguh terhadap globalisasi di mana lembaga-lembaga nasional hanya berfungsi sebagai penyambung bagi pemulihan global: “Kami percaya bahwa kekuatan teknologi, ekonomi, dan politik yang saling bersilangan kemungkinan besar akan mengubah kontur globalisasi, namun tidak mengakhirinya . Pola umum rantai pasok yang diperluas dan terfragmentasi di beberapa pusat produksi berubah rendah tampaknya berkembang menuju perdagangan yang lebih terkonsentrasi, berteknologi tinggi, dan regional. Kami percaya bahwa globalisasi sedang berkembang menuju peluang yang lebih luas dan terus-menerus dalam perdagangan jasa dan teknologi mutakhir.”

Peran yang diberikan kepada negara-negara dalam visinya tidak mengantisipasi adanya perubahan posisi, melainkan kedekatan mereka dengan tuas orkestrasi ekonomi. Kembalinya negara tidak menuntut adanya jarak dari eksternalitas kapitalis di luar batas negara. Sebaliknya, ia menetapkan negara sebagai “regulator dalam hubungan erat dengan modal swasta multinasional, yang pengaruhnya terhadap perekonomian nasional semakin meningkat” (Mezzedra & Neilson, 2013: 178). Dewan Atlantik dengan tegas menetapkan peran Amerika Serikat: “Manfaatkan momen bersejarah untuk memimpin” (Cimino dkk., 2020: 2). “Dengan kerja sama, tekad, dan tekad, Amerika Serikat dan sekutunya dapat pulih dari krisis dan merevitalisasi sistem berbasis aturan yang disesuaikan untuk mewujudkan kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran selama beberapa dekade di masa depan” (Cimmino et al., 2020).

Kesimpulan

Sandro Mezzedra dan Brett Neilsen berpendapat bahwa “perbatasan tetap menjadi pusat organisasi heterogen ruang dan waktu di bawah kapital global.” Namun, yang dimaksud dengan perbatasan tidak hanya merujuk pada batas negara, namun juga pada batas yang dibangun secara diskursif. “Memahami perbatasan dalam arti luas,” menurut mereka, “tidak terbatas pada garis geopolitik konvensional.” Hal ini dapat berarti, misalnya, “perpecahan perkotaan di dalam kota.” Hal ini dapat berarti “batas-batas yang melingkupi ‘zona ekonomi khusus’”. Hal ini dapat merujuk pada “hancurnya hierarki tata ruang yang lama, perombakan geografi pembangunan, dan munculnya regionalisme baru serta pola multilateralisme.” Hal ini juga dapat memicu “perlawanan masyarakat miskin terhadap ekonomi ekstraksi perkotaan di sekitar daerah kumuh dan banyak perjuangan yang bermunculan di pabrik-pabrik dan pabrik-pabrik di dunia” (Mezzedra & Neilsen, 2013). Kapital mengatur dunia melalui perbatasan yang semakin meluas ini.

Oleh karena itu, diskusi mengenai globalisasi tidak perlu dan tidak dapat direduksi menjadi kemunduran teritorial tertentu dari dunia ke dalam batas-batas negara. Kecenderungan untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap globalisasi dalam istilah teritorial juga membatasi respons kritis, bahkan emansipatoris, yang dapat dibayangkan dan

diaktifkan. Meskipun wilayah diasosiasikan dengan kedaulatan negara, masyarakat, dan kewarganegaraan, wilayah tersebut juga telah ditembus oleh kapitalisme global sebagai “teknologi politik untuk mengatur hubungan sosial dan ekonomi” (Mezzedra & Neilsen, 2013). Meskipun hubungan-hubungan ini mempunyai dimensi spasial kedaulatan dalam kaitannya dengan hak negara untuk mengatur, hubungan-hubungan ini juga dipengaruhi oleh atau dimasukkan ke dalam kepentingan-kepentingan transversal di luar kedaulatan yang tidak mudah menerima klaim dan tuntutan kedaulatan.

Pada akhirnya, terlepas dari semua kebisingan seputar deglobalisasi, antiglobalisasi, atau kemunduran dari globalisasi, belum lagi “perlambatan”, globalisasi sebagai sebuah proses tampaknya akan tetap ada di masa mendatang (Feffer, 2019). Perpecahan dan keterputusan yang diakibatkan oleh pandemi COVID mungkin akan melepaskan kekuatan sentripetal dan sentrifugal, namun hal ini juga akan terjadi di dunia yang sudah sangat terhubung. Paradoksnya, apa yang mungkin secara bersamaan memberdayakan kekuatan dan dinamika yang tampaknya saling bertentangan ini adalah infrastruktur globalisasi yang digerakkan oleh modal, bersama dengan “tatanan simbolis” atau suprastruktur, seperti yang disebut oleh Pierre Bourdieu (1998: 82), yang secara diskursif mendukung dan melegitimasi penciptaan dunia kapitalis. Ironisnya, jaringan infrastruktur dan simbolik yang mengatur pesan-pesan modal juga menjadi tuan rumah bagi solidaritas global dalam perlawanan terhadap proyek dan program kapitalis. Tentu saja, ketahanan kekuatan globalisasi tidak berarti “akhir sejarah” dengan kemenangan globalisasi secara permanen, karena tidak ada keniscayaan dalam jangka pendek dan seterusnya. Pembentukan diskursif dari unsur-unsur konstitutif yang mendasari globalisasi selalu mengalami pergeseran sejarah, yang sekarang lebih berpihak pada modal, namun kemudian, mungkin, lebih memilih solidaritas manusia (dan non-manusia) yang didefinisikan lebih dari sekedar “akumulasi, perampasan, dan eksploitasi” yang didorong oleh modal. Berdasarkan sejarah, sebuah virus yang berukuran sangat kecil mengungkapkan bahwa perubahan selalu terjadi dalam waktu dekat dalam segala hal yang tampak solid.

BAB 19

KRISIS KAPITALISME GLOBAL, FINANSIALISASI, DAN DIGITALISASI

19.1 PENDAHULUAN

Perkembangan kapitalisme dunia saat ini ditentukan oleh tiga perkembangan utama. Pertama, sistem ini telah menjadi universal melalui proses globalisasi yang dimulai pada akhir abad ke-20. Kedua, sistem ini sedang menjalani babak baru restrukturisasi dan transformasi berdasarkan digitalisasi dan finansialisasi yang lebih maju pada seluruh perekonomian dan masyarakat global. Ketiga, sistem ini menghadapi krisis kapitalisme yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu krisis ekonomi, struktural, akumulasi berlebihan, dan politik, legitimasi negara, dan hegemoni kapitalis. Krisis ini juga penting karena adanya ancaman keruntuhan ekologi serta ancaman baru perang nuklir dan bahaya pandemi di masa depan yang mungkin melibatkan mikroba yang jauh lebih mematikan daripada virus corona. Meskipun banyak perbincangan mengenai “deglobalisasi” dan rusaknya rantai pasokan global akibat krisis ekonomi akibat virus corona, perdagangan dunia mencapai rekor tertinggi pada tahun 2021. Para elit transnasional menggantungkan harapan mereka pada gelombang baru ekspansi kapitalis dan kemakmuran melalui teknologi yang didorong oleh digital. restrukturisasi. Sekalipun periode baru ekspansi yang didorong oleh teknologi digital akan menggantikan krisis struktural di masa depan, kapitalisme global akan terus menimbulkan krisis sosial yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan miliaran orang.

Sebagaimana dikatakan oleh ahli dialektika mana pun, satu-satunya hal yang permanen di alam semesta adalah perubahan itu sendiri. Segala sesuatu berada dalam proses kemunculan, perkembangan, transformasi, dan pada akhirnya transendensi menjadi sesuatu yang baru secara kualitatif. Kapitalisme sebagai sistem sosial tidak terkecuali. Perkembangan kapitalisme dunia saat ini ditentukan oleh tiga perkembangan utama. Pertama, sistem ini telah menjadi universal melalui proses globalisasi yang dimulai pada akhir abad ke-20. Kedua, sistem ini sedang menjalani babak baru restrukturisasi dan transformasi berdasarkan digitalisasi dan finansialisasi yang lebih maju pada seluruh perekonomian dan masyarakat global. Dan ketiga, sistem ini menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik krisis ekonomi, struktural, maupun politik, salah satunya adalah legitimasi negara dan hegemoni kapitalis. Krisis ini juga penting karena adanya ancaman keruntuhan ekologi serta ancaman baru perang nuklir, yang juga harus ditambah dengan bahaya pandemi di masa depan yang mungkin melibatkan mikroba yang jauh lebih mematikan daripada virus corona.

Para ahli belum pernah mencapai konsensus mengenai bagaimana mendefinisikan globalisasi, atau apakah globalisasi merupakan sebuah konsep yang berguna. Dalam konsepsi saya, globalisasi merupakan sebuah era yang secara kualitatif baru dalam evolusi kapitalisme dunia yang sedang berlangsung dan terbuka, yang terutama ditandai dengan bangkitnya modal transnasional dan integrasi setiap negara ke dalam sistem produksi, keuangan, dan sistem baru yang terglobalisasi. dan layanan. Globalisasi berasal dari tiga zaman sebelumnya dalam sejarah kapitalisme dunia merkantilisme, kapitalisme industri kompetitif atau klasik,

dan kapitalisme korporasi nasional atau kapitalisme “monopoli” (Robinson, 2004, 2014). Masing-masing gelombang panjang dalam perkembangan sistem ini melibatkan serangkaian krisis kecil yang pada akhirnya mencapai puncaknya pada krisis struktural besar di seluruh sistem yang diselesaikan melalui restrukturisasi di seluruh dunia seiring dengan terbentuknya hubungan kelas, institusi, teknologi, dan pola akumulasi modal yang baru.

Krisis kapitalisme dunia yang dimulai pada tahun 1970an secara umum diidentifikasi sebagai titik balik globalisasi ketika kaum kapitalis mencari cara-cara akumulasi baru dan elite penguasa berusaha memulihkan hegemoni kapitalis. Kapitalisme mampu mengatasi krisis tahun 1970-an dengan “menjadi global”, memanfaatkan proses globalisasi menjadi restrukturisasi dan integrasi ekonomi dunia secara besar-besaran. Ketika perekonomian global muncul, produksi menjadi yang pertama mengalami transnasionalisasi, dimulai pada akhir tahun 1970-an, yang ditandai dengan bangkitnya jalur perakitan global dan tersebarnya pabrik-pabrik keringat (sweatshop) modern di zona perdagangan bebas di seluruh dunia. Berikutnya, setelah gelombang deregulasi keuangan di sebagian besar negara di dunia, sistem perbankan dan keuangan nasional mengalami transnasionalisasi pada tahun 1990an dan 2000an. Transnasionalisasi jasa kemudian diikuti oleh gelombang baru perdagangan jasa internasional dan perjanjian-perjanjian lain yang mempercepat desentralisasi penyediaan jasa lintas negara serta privatisasi layanan kesehatan, telekomunikasi, dan industri lainnya.

Namun kini, perdebatan mengenai globalisasi telah mengambil arah baru seiring dengan krisis baru yang terjadi di seluruh sistem yang dimulai dengan keruntuhan keuangan global pada tahun 2008. Perdagangan dunia mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade setelah keruntuhan keuangan global pada tahun 2008, sementara kelompok populis dan demagog politik, yang sebagian besar berasal dari kelompok sayap kanan, mengusung wacana proteksionis dan antiglobalisasi yang memicu xenofobia dan nasionalisme. Kemudian pandemi virus corona memicu krisis ekonomi pada tahun 2020 yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Depresi Besar pada tahun 1930an, sehingga merusak jaringan perdagangan dan pasokan global. Hancurnya jaringan-jaringan tersebut, yang merupakan simbol dari globalisasi, selama puncak pandemi, membuat banyak orang memperkirakan akan adanya gelombang diversifikasi rantai pasok, “de-globalisasi,” dan hampir atau tidaknya pemulihan produksi dan rantai pasok yang sebelumnya telah terjadi. telah lepas pantai. Para akademisi dan pakar menyatakan bahwa dunia sedang memasuki periode “deglobalisasi.”

Namun kenyataannya, analisis terhadap data dan transformasi struktural yang terjadi menunjukkan hal yang sebaliknya bahwa kita sedang mendekati babak baru globalisasi yang didasarkan pada integrasi ekonomi dan masyarakat yang lebih organik di seluruh dunia. Pakar globalisasi Manfred B. Steger dan Paul James (2020) menunjukkan bagaimana perdagangan barang lintas batas yang mendarat dan penurunan arus keuangan lintas batas setelah krisis tahun 2008 dapat diimbangi dengan peningkatan besar-besaran dalam digital global. sehingga alih-alih melakukan deglobalisasi, yang terjadi adalah pergeseran dari “embodied globalization”, yang berarti mobilitas fisik umat manusia, dan “object-related globalization”, yang mengacu pada mobilitas benda-benda fisik, menjadi apa yang disebut dengan “object-

related globalization”. istilah “globalisasi tanpa tubuh” yang berkaitan dengan transaksi global yang tidak berwujud seperti yang akan saya bahas di bawah ini. Meskipun demikian, perdagangan barang pada kenyataannya telah pulih setelah keruntuhan pada tahun 2008, resesi pada tahun 2015, dan krisis akibat pandemi pada tahun 2020 (UNCTAD, 2021). Namun seperti yang akan kita lihat, gelombang baru globalisasi yang didorong secara digital yang sedang terjadi saat ini sepertinya tidak akan menyelesaikan krisis kapitalisme global. Sebaliknya, hal ini sebagian besar disebabkan oleh krisis.

19.2 KRISIS KAPITALIS GLOBAL

Walaupun para ekonom neoklasik menyatakan hal yang sebaliknya, krisis adalah hal yang mewabah dalam kapitalisme, dan ketidakstabilan adalah keadaan alami dari sistem tersebut, bukan keseimbangan. Sejarah kapitalisme adalah salah satu dari dua jenis krisis periodik. Yang satu bersifat siklus, terkadang disebut siklus bisnis, dan muncul sebagai resesi. Biasanya terjadi setiap sepuluh tahun sekali. Terjadi resesi pada awal tahun 1980an, awal tahun 1990an, dan awal tahun 2000an. Yang lainnya lebih serius, krisis struktural, atau yang saya sebut krisis restrukturisasi karena penyelesaiannya memerlukan restrukturisasi sistem secara besar-besaran. Krisis siklus mungkin hanya berdampak pada negara atau wilayah tertentu, sedangkan krisis struktural umumnya berdampak pada perekonomian dunia secara keseluruhan. Selama abad ke-20, sistem ini mengalami dua krisis restrukturisasi, yaitu Depresi Besar pada tahun 1930an dan krisis stagnasi dan inflasi (yang dikenal sebagai “stagflasi”) pada tahun 1970an. Kedua krisis ini bermula dari apa yang oleh para ekonom politik disebut sebagai akumulasi berlebihan. Dalam istilah yang sederhana, hal ini mengacu pada situasi di mana sejumlah besar modal (keuntungan) dibangun namun modal tersebut tidak dapat menemukan jalan keluar yang produktif untuk diinvestasikan kembali. Modal ini kemudian menjadi stagnan, karena para kapitalis mempertahankan akumulasi keuntungan mereka dibandingkan menginvestasikannya kembali, sehingga melemparkan sistem ke dalam krisis.

Krisis struktural pada tahun 1930an diatasi melalui penekanan Keynesian pada intervensi negara untuk mengatur pasar dan mewujudkan redistribusi; bahwa tahun 1970-an diatasi melalui globalisasi. Keruntuhan finansial pada tahun 2008 menandai dimulainya krisis struktural baru yang kini mengancam akan menjadi krisis sistemik seiring dengan semakin dekatnya gangguan iklim yang menghancurkan dan batasan ekologis terhadap reproduksi kapitalisme. Menanggapi krisis ini, sistem ini telah mengalami babak baru restrukturisasi dan transformasi berdasarkan digitalisasi yang lebih maju pada seluruh perekonomian dan masyarakat global. Penularan virus corona telah mempercepat transformasi ini. Agen-agen kapitalisme global berupaya untuk memberikan kesempatan hidup baru bagi sistem tersebut melalui restrukturisasi digital dan reformasi yang dianjurkan oleh sebagian elit global dalam menghadapi tekanan massa dari bawah. Jika reformasi regulasi atau redistributif benar-benar terwujud, restrukturisasi ini mungkin tergantung pada kekuatan sosial dan kelas meluncurkan babak baru ekspansi produktif yang melemahkan krisis. Namun, dalam jangka panjang, sulit untuk melihat bagaimana kapitalisme global dapat terus mereproduksi dirinya sendiri tanpa

adanya perombakan yang lebih mendalam dibandingkan yang akan terjadi saat ini, atau bahkan dengan menggulingkan sistem tersebut.

Kelas kapitalis transnasional (TCC) telah berupaya menyelesaikan krisis tahun 1970an dengan melakukan upaya global, seperti yang telah kita lihat. Globalisasi kapitalis dan penghematan neo-liberal memang menyebabkan ledakan ekonomi baru di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Proses ini mendorong kelas pekerja dan kelas populer global menjadi defensif dan menggeser keseimbangan kekuatan kelas global demi kepentingan modal transnasional setelah periode perjuangan massa pada tahun 1960an dan 1970an. Namun dengan membebaskan modal transnasional dari hambatan nasional, globalisasi melemahkan program redistributif yang telah melemahkan kecenderungan kapitalisme menuju polarisasi sosial dan membantu menjamin kelangsungan sistem tersebut, setidaknya untuk sementara waktu. Dampaknya adalah semakin parah kesenjangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memicu terjadinya akumulasi berlebihan. Memang benar, tingkat polarisasi dan kesenjangan sosial global yang dialami saat ini bukanlah sebuah preseden. Pada tahun 2020, 1 persen orang terkaya di dunia menguasai lebih dari separuh kekayaan dunia, sementara 80 persen orang terbawah hanya mempunyai 5 persen kekayaan. Jika dibiarkan, meluasnya polarisasi sosial akan mengakibatkan krisis stagnasi, resesi, depresi, pergolakan sosial, dan perang seperti yang kita alami saat ini.

Meskipun akumulasi berlebihan berasal dari bidang produksi, namun akumulasi berlebih ini terwujud dalam bidang sirkulasi, yakni muncul di pasar sebagai krisis kelebihan produksi atau kekurangan konsumsi. Hal ini mengacu pada situasi di mana perekonomian telah menghasilkan atau memiliki kapasitas untuk memproduksi kekayaan dalam jumlah besar namun pasar tidak dapat menyerap kekayaan tersebut. Akumulasi berlebih pertama-tama muncul sebagai kelebihan pasokan di pasar dan kemudian sebagai stagnasi. Faktanya, pada tahun-tahun menjelang pandemi, terdapat peningkatan yang terus-menerus dalam kapasitas yang kurang dimanfaatkan dan perlambatan produksi industri di seluruh dunia (lihat, antara lain: Cox, 2019; Toussaint, 2020). Surplus akumulasi kapital yang tidak punya tempat untuk pergi berkembang pesat. Perusahaan transnasional mencatat rekor keuntungan selama tahun 2010-an pada saat investasi perusahaan menurun (The Economist, 2016). Total uang tunai yang disimpan dalam cadangan dua ribu perusahaan non-keuangan terbesar di dunia meningkat dari \$6,6 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 205.900 Triliun pada tahun 2020 jauh lebih besar daripada cadangan devisa pemerintah pusat dunia seiring dengan stagnasi ekonomi global (The Economist, 2020: 60). Konsentrasi kekayaan bumi yang sangat terkonsentrasi di tangan segelintir orang dan percepatan pemiskinan serta perampasan kepemilikan mayoritas menyebabkan semakin sulitnya modal transnasional dalam menemukan saluran produktif untuk mengeluarkan sejumlah besar surplus yang terakumulasi. Semakin besar kesenjangan global, semakin terbatas pula pasar dunia dan semakin besar pula sistem yang menghadapi krisis struktural akibat akumulasi berlebihan.

Kecenderungan modal untuk mengakumulasi secara berlebihan adalah sebuah kecenderungan yang dapat diimbangi, setidaknya untuk sementara, dengan apa yang disebut dengan kecenderungan penyeimbang (*countervailing*) dan dengan mekanisme yang dapat

melawan kecenderungan tersebut. Spekulasi keuangan yang heboh, utang yang tidak berkelanjutan, penjarahan keuangan publik, dan akumulasi militer yang diorganisir oleh negara hanyalah beberapa mekanisme yang digunakan oleh TCC dan negara-negara kapitalis pada tahun-tahun menjelang pandemi untuk menjaga perekonomian global tetap terpukur. dalam menghadapi stagnasi kronis (Robinson, 2020). Ketika perekonomian produktif mengalami stagnasi, kaum kapitalis beralih ke spekulasi keuangan. Perekonomian global telah menjadi kasino raksasa bagi investor transnasional. Setelah Resesi Hebat tahun 2008, Federal Reserve AS melakukan dana talangan rahasia sebesar Rp. 232.000 Triliun kepada bank dan perusahaan di seluruh dunia (GAO, 2011). Namun kemudian bank dan investor institusi hanya mendaur ulang triliunan dolar yang mereka terima ke dalam aktivitas spekulatif baru di pasar komoditas global, mata uang kripto, dan lahan di seluruh dunia, sehingga memicu “perampasan lahan” global yang baru. Ketika peluang untuk investasi spekulatif di satu sektor semakin berkurang, TCC beralih ke sektor lain untuk mengurangi surplusnya.

Akibatnya, kesenjangan antara ekonomi produktif dan modal fiktif semakin lebar. Modal fiktif mengacu pada uang yang dilemparkan ke dalam sirkulasi tanpa basis komoditas atau produksi (lihat, antara lain, Durand, 2017). Sebagian besar pendapatan yang dihasilkan oleh spekulasi keuangan adalah fiktif, yang berarti (di sini dalam bentuk yang disederhanakan) bahwa pendapatan tersebut ada di atas kertas tetapi tidak sesuai dengan kekayaan nyata di dunia, yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, seperti: makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Perdagangan modal fiktif ini tidak mewakili penciptaan nilai baru atau perluasan produksi, melainkan hanya sekedar khayalan dari perekonomian yang sibuk, seiring melonjaknya pasar saham, nilai aset meningkat, dan perluasan kredit. Akumulasi modal fiktif melalui spekulasi mungkin dapat mengimbangi krisis tersebut secara sementara di masa depan atau secara spasial terhadap geografi digital baru dan kelompok populasi baru, namun dalam jangka panjang hanya akan memperburuk masalah mendasar yaitu akumulasi berlebihan. Pada tahun 2018, misalnya, produk bruto dunia atau total nilai barang dan jasa mencapai \$75 triliun, sedangkan pasar derivatif global—yang merupakan penanda aktivitas spekulatif—diperkirakan mencapai \$1,2 kuadriliun (Maverick, 2020) . Akumulasi modal fiktif ini memberikan kesan adanya pemulihan pada tahun-tahun setelah Resesi Besar tahun 2008. Namun hal ini hanya mengimbangi krisis sementara di masa depan dan dalam jangka panjang memperburuk masalah mendasar.

19.3 ERA DIGITAL KEDUA

Krisis struktural seperti yang terjadi pada tahun 1930an dan 1970an biasanya melibatkan transformasi pola akumulasi modal dan babak baru ekspansi, sering kali menggabungkan teknologi mutakhir baru, seperti bahan sintetis, barang konsumsi tahan lama, otomotif dan petrokimia, serta industri militer. teknologi yang mendorong booming pasca-Perang Dunia II. Pada awal abad kedua puluh, ekonom Soviet Nikolai Kondratieff mencatat bagaimana perekonomian dunia, yang didorong oleh teknologi mutakhir, mengalami siklus sekitar empat puluh hingga lima puluh tahun (disebut gelombang Kondratieff). Dalam siklus ini, putaran ekspansi pada akhirnya akan habis dan diikuti oleh

penurunan dan krisis, yang mengakibatkan reorganisasi sistem dan teknologi baru yang membantu meluncurkan siklus baru. Namun, dinamika sebab akibat yang mendasari siklus ini adalah pergulatan antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelas yang saling bersaing. Perjanjian Baru dan tatanan sosial demokrat serta perang dunia dan ekspansi pascaperang “menyelesaikan” krisis struktural pada tahun 1930an. Namun kontradiksi internal dalam model kapitalisme negara-bangsa yang bersifat redistributif menyebabkan krisis struktural baru pada tahun 1970an. Seperti disebutkan di atas, TCC yang baru muncul “menyelesaikan” krisis ini melalui restrukturisasi ekonomi global.

Kapitalisme global kini berada di ambang gelombang restrukturisasi dan transformasi yang didasarkan pada digitalisasi yang lebih mendalam pada seluruh perekonomian dan masyarakat global. Inti dari gelombang baru perkembangan teknologi ini adalah teknologi informasi yang lebih maju atau yang disebut teknologi revolusi industri keempat (lihat, antara lain, Brynjolfsson et al., 2014; Ford, 2015; Schwab, 2016; Srnicek, 2016; Robinson, 2022b). Dipimpin oleh Kecerdasan Buatan (AI) dan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data dalam jumlah besar (“big data”), teknologi-teknologi yang sedang berkembang mencakup pembelajaran mesin, otomasi dan robotika, nano dan bioteknologi, Internet of Things (IoT), komputasi kuantum dan awan, pencetakan 3D, realitas virtual, bentuk penyimpanan energi baru, kendaraan otonom darat, udara, dan laut, dan masih banyak lagi. Teknologi komputer dan informasi (CIT), yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980an, memberikan landasan awal bagi globalisasi.

Hal ini memungkinkan TCC untuk mengoordinasikan dan menyinkronkan rangkaian produksi global dan oleh karena itu menerapkan sistem produksi dan keuangan yang terintegrasi secara global di mana setiap negara menjadi bagiannya. Hal ini juga memungkinkan terjadinya integrasi global sistem keuangan nasional dan bentuk uang baru, seperti dana lindung nilai atau pasar derivatif sekunder. Hal ini memungkinkan pergerakan uang (nilai) tanpa gesekan dan seketika dalam beragam bentuknya di seluruh dunia, sehingga menghasilkan finansialisasi ekonomi global yang dibahas di atas. Sama seperti pengenalan CIT dan Internet pada akhir abad kedua puluh yang mengubah kapitalisme dunia secara mendalam, teknologi berbasis digital generasi kedua ini mengarah pada babak baru restrukturisasi di seluruh dunia yang menjanjikan dampak transformatif lainnya pada struktur dunia, ekonomi, masyarakat, dan politik.

Sulit untuk meremehkan betapa cepat dan luasnya restrukturisasi digital saat ini. Menurut data UNCTAD (UNCTAD, 2019), “ekonomi berbagi” akan meningkat dari \$14 miliar pada tahun 2014 menjadi \$335 miliar pada tahun 2025. Pengiriman printer 3D ke seluruh dunia meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2016, menjadi lebih dari 450.000, dan diperkirakan akan mencapai 6,7 juta pada akhir tahun 2020. Nilai global e-commerce diperkirakan mencapai \$29 triliun pada tahun 2017, yang setara dengan 36 persen PDB global. Pada tahun itu, 277 juta orang melakukan pembelian lintas negara melalui e-commerce. Ekspor jasa yang dapat disampaikan secara digital pada tahun 2019 berjumlah \$2,9 triliun, atau 50 persen dari ekspor jasa global. Pada tahun 2019, lalu lintas Internet global mencapai 66 kali lipat volume lalu lintas Internet global pada tahun 2005, sedangkan lalu lintas Global

Internet Protocol (IP), yang merupakan proxy untuk aliran data, tumbuh dari sekitar 100 gigabyte (GB) per hari pada tahun 1992 menjadi lebih dari 45.000 GB per detik pada tahun 2017. Namun dunia masih berada pada tahap awal perekonomian berbasis data; pada tahun 2022 lalu lintas IP global diproyeksikan mencapai 150.700 GB per detik, didorong oleh semakin banyak orang yang online untuk pertama kalinya dan oleh perluasan IoT. Kita sedang mendekati suatu situasi, atau mungkin sudah sampai pada situasi tersebut, di mana setiap orang di planet ini terhubung sebagian besar secara langsung, meskipun semua orang secara tidak langsung melalui satu jaringan digital yang sama. Pada tahun 2015, lebih dari 30 persen populasi global telah menggunakan platform media sosial. Pada tahun 2019 terdapat 5,2 miliar ponsel pintar yang beroperasi di seluruh dunia dan lebih dari separuh dunia sudah online (Schwab & Malleret, 2020).

Jika generasi pertama globalisasi kapitalis sejak tahun 1980-an melibatkan penciptaan sistem produksi dan keuangan yang terintegrasi secara global, gelombang baru digitalisasi dan kebangkitan platform telah memfasilitasi transnasionalisasi layanan berbasis digital yang sangat pesat sejak tahun 2008. Pada tahun 2017, jasa menyumbang sekitar 70 persen dari total produk bruto dunia (Marois, 2017) dan mencakup komunikasi, informatika, teknologi digital dan platform, e-commerce, jasa keuangan, pekerjaan profesional dan teknis, dan sejumlah produk tidak berwujud lainnya seperti film dan musik. Pergeseran global menuju perekonomian berbasis jasa yang didasarkan pada pengenalan luas teknologi revolusi industri keempat membawa perubahan besar dalam struktur produksi kapitalis menuju sentralitas pengetahuan dalam produksi barang dan jasa. Hal ini melibatkan meningkatnya dominasi modal tidak berwujud (secara harafiah, modal yang tidak bersifat fisik), yang disebut sebagai “modal intelektual”, “kekayaan intelektual”, dan “produksi tidak berwujud”, serta konsep terkait tenaga kerja tidak berwujud, kerja kognitif, dan pekerja pengetahuan, mengacu pada pekerja yang terlibat dalam produksi non-materi. Menggunakan istilah Steger dan James (2020), terdapat perluasan yang luas dari “globalisasi tanpa tubuh.”

Pandemi COVID-19 mendorong upaya perusahaan teknologi raksasa dan agen politik mereka untuk mengubah semakin banyak bidang perekonomian ke ranah digital baru (Robinson, 2022b). Yang menjadi pusat restrukturisasi global adalah perusahaan teknologi raksasa, di antaranya Microsoft, Apple, Amazon, Tencent, Alibaba, dan Facebook. Perusahaan-perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang menakjubkan pada tahun 2010-an. Ditambah dengan raksasa teknologi sebelumnya adalah Zoom, Netflix, dan perusahaan lain yang terimbas oleh pandemi ini serta perusahaan teknologi seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), yang ekspansi dan kapitalisasi pasarnya membengkak bahkan sebelum wabah ini terjadi. Pengguna harian Zoom melonjak 3.000 persen dalam empat bulan pertama pandemi. Terlebih lagi, saat ini terdapat ratusan perusahaan teknologi baru dari seluruh dunia yang tumbuh subur selama pandemi ini dan diperkirakan akan berkembang pesat seiring dengan berjalannya restrukturisasi. Apple dan Microsoft mencatatkan kapitalisasi pasar yang luar biasa, masing-masing sebesar Rp.30.320 Triliyun dan Rp.23.655 Triliyun, pada akhir tahun 2020. Kapitalisasi Amazon mencapai Rp. 15.120 Triliyun menjelang pandemi dan meningkat menjadi Rp. 22.930 Triliyun pada akhir tahun 2020. Alphabet (Google's perusahaan induk)

mencatatkan kapitalisasi Rp. 17.400 Triliun , Samsung Rp. 14.242 Triliun, Facebook Rp. 11.345 Triliun dan Alibaba dan Tencent masing-masing sekitar Rp. 101 miliar. Sementara itu, hanya dalam dua tahun, dari tahun 2015 hingga 2017, nilai gabungan perusahaan platform dengan kapitalisasi pasar lebih dari Rp. 1.450.000.000.000 melonjak sebesar 67 persen, menjadi lebih dari \$7 triliun (untuk data dalam paragraf ini, lihat Robinson , 2022b).

Sejumlah perusahaan teknologi terbesar telah menyerap sejumlah besar uang tunai dari investor TCC dari seluruh dunia yang, karena sangat membutuhkan peluang investasi baru, telah menggelontorkan miliaran dolar ke raksasa teknologi dan platform tersebut sebagai saluran keluar dari akumulasi surplus modal mereka untuk mencari keuntungan. Investasi tahunan di CIT melonjak dari Rp. 247.500 miliar pada tahun 1970, menjadi Rp. 942 miliar pada tahun 1980, kemudian menjadi Rp. 2.537 miliar pada tahun 1990, Rp. 7.184 miliar pada tahun 2000, dan Rp. 9.531 miliar pada tahun 2016, dan kemudian mencapai Rp. 11.600 miliar pada tahun 2019 (Federal Reserve Bank of St. Louis , n.d.). Ketika para kapitalis menginvestasikan miliaran dolar ini, perbankan global dan lembaga investasi menjadi saling terkait dengan modal teknologi, begitu pula bisnis di seluruh dunia yang beralih ke komputasi awan dan Kecerdasan Buatan. Jelas bahwa jumlah besar yang terlibat dalam kapitalisasi pasar perusahaan teknologi sebagian besar merupakan hasil spekulasi saham. Tampaknya terdapat kesenjangan yang sangat besar, yang sulit atau bahkan mustahil untuk diukur, antara nilai aset material perusahaan-perusahaan tersebut dan kapitalisasi pasarnya, yang mencerminkan jurang yang sama antara ekonomi riil dan modal fiktif yang dibahas di atas. Artinya, hubungan antara keuangan dan produksi di sektor teknologi sama dengan hubungan dalam perekonomian global pada umumnya.

Namun apakah hubungan ini hanya bersifat sementara karena investasi di bidang teknologi menghasilkan reaktivasi dan ekspansi yang produktif? Pemulihan produktif, berdasarkan logika kapitalisme, memerlukan peningkatan tingkat keuntungan. Hal ini akan terjadi, *ceteris paribus*, dari peningkatan produktivitas melalui digitalisasi tanpa disertai kenaikan tingkat upah secara keseluruhan, atau setidaknya keuntungan meningkat lebih cepat daripada kenaikan upah. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 1980-an, perusahaan-perusahaan yang beralih ke CIT jauh lebih produktif dibandingkan para pesaingnya, dan berhasil mengatasi apa yang disebut “paradoks produktivitas” (Brynjolfsson & McAfee, 2014), yang menyebabkan pertumbuhan produktivitas melambat secara signifikan mulai tahun 1973, saat terjadinya krisis struktural dan globalisasi setelahnya.² Sebuah laporan McKinsey memperkirakan pada tahun 2016 bahwa tingkat pertumbuhan global dalam lima puluh tahun ke depan akan melambat hingga hampir setengah dari tingkat pertumbuhan dalam lima puluh tahun sebelumnya, dari 3,8 menjadi 2,1 persen. Laporan ini menaruh harapan pada teknologi digital sebagai sumber utama pertumbuhan di masa depan.

Hancurnya rantai pasokan global selama pandemi menyebabkan banyak diskusi mengenai nearshoring dan reshoring, dan memang, beberapa di antaranya sudah terjadi pada akhir tahun 2021. Namun, sangat diragukan bahwa reshoring akan mengembalikan lapangan kerja industri dan pasca-industri yang stabil, berketerampilan tinggi, dan bergaji tinggi ke negara-negara kaya, mengingat relokasi kembali ke pusat-pusat inti perekonomian global

akan melibatkan otomatisasi tingkat tinggi (Robinson, 2022b). (Sebagai catatan tambahan, reshoring atau “deglobalisasi” tidak berarti bahwa modal tidak lagi bersifat transnasional [lihat Robinson, 2018, 2022a]. Modal transnasional adalah yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain seiring dengan konfigurasi ulang geografi kapitalisme global.) Sisi lain dari reshoring ke negara-negara kaya adalah otomatisasi pabrik yang berada di lepas pantai. Sweatshop yang sebagian besar mempekerjakan perempuan muda di zona tenaga kerja murah di seluruh dunia, yang mungkin merupakan gambaran umum perekonomian global, mungkin akan semakin jarang karena tenaga kerja berketerampilan rendah dan berulang-ulang yang dipekerjakan oleh sweatshop ini merupakan jenis pekerjaan yang mudah diotomatisasi. Pada awal tahun 2012, Foxconn, konglomerat berbasis di Taiwan yang merakit iPad dan perangkat elektronik lainnya, mengumumkan menyusul gelombang pemogokan yang dilakukan oleh para pekerjanya di Tiongkok pada tahun itu bahwa mereka akan menggantikan satu juta pekerja dengan robot. Faktanya, statistik resmi Tiongkok melaporkan penurunan tiga puluh juta pekerjaan di bidang manufaktur dari tahun 1996 hingga 2014, atau 25 persen dari total pekerjaan, bahkan ketika output manufaktur meningkat lebih dari 70 persen.

Di sisi lain, digitalisasi mendorong perluasan layanan lintas batas, karena offshoring elektronik, tidak seperti relokasi fasilitas produksi ke luar negeri, tidak menimbulkan gesekan dan tidak menambah biaya transportasi dan biaya tambahan lainnya seperti biaya bea cukai. Pada tahun 2016, produksi barang dan jasa CIT mewakili 6,5 persen PDB global, dan seratus juta orang dipekerjakan di sektor layanan CIT (UNCTAD, 2017: 17). Ketika pekerjaan dilakukan dari jarak jauh, tidak menjadi masalah di mana pekerjaan itu dilakukan. Lonjakan investasi pada kerja jarak jauh selama pandemi membuka pintu bagi peningkatan perdagangan layanan digital.

Bahkan untuk layanan, teknologi digital baru seperti sistem respons suara interaktif mengurangi kebutuhan akan komunikasi langsung dari orang ke orang dan mungkin mengarah pada otomatisasi pusat panggilan di seluruh dunia. Kita mungkin akan melihat di tahun-tahun mendatang perpaduan antara praktik nearshore dan reshoring ke negara-negara kaya serta peningkatan otomatisasi di wilayah yang menjadi zona pemrosesan industri padat karya dan pusat layanan, seperti Provinsi Guangdong di Tiongkok. Dalam jangka panjang, offshoring mungkin merupakan titik bersejarah menuju otomatisasi. Sementara itu, semua tanda menunjukkan berlanjutnya krisis, termasuk prospek kembalinya stagflasi, meskipun tingkat pertumbuhan sudah pulih pada tahun 2021 ketika dunia keluar dari kondisi terburuk pandemi ini.

19.4 KRISIS BERLANJUT DAN PERJUANGAN UNTUK MASA DEPAN

Krisis memberikan TCC peluang untuk memulihkan tingkat keuntungan dengan memaksa produktivitas yang lebih besar dari lebih sedikit pekerja. Proses ini didorong oleh gelombang baru digitalisasi yang dibahas di atas, yang kini dipercepat oleh kondisi ekonomi dan sosial yang dipicu oleh pandemi. Sejak tahun 1980-an, hampir semua pekerjaan yang hilang di Amerika Serikat dalam pekerjaan rutin akibat otomatisasi, misalnya, terjadi selama resesi (untuk diskusi, lihat Robinson, 2020). Gelombang pertama CIT pada dekade-dekade

terakhir abad kedua puluh memicu pertumbuhan produktivitas dan kapasitas produktif yang luar biasa, sementara teknologi digital baru menjanjikan peningkatan kapasitas tersebut berkali-kali lipat. Secara khusus, digitalisasi sangat meningkatkan komposisi modal organik, artinya porsi modal tetap dalam bentuk mesin dan teknologi cenderung meningkat dibandingkan dengan modal variabel dalam bentuk tenaga kerja.

Dalam istilah awam, digitalisasi sangat mempercepat proses dimana mesin dan teknologi menggantikan tenaga manusia, sehingga memperluas jumlah mereka yang berada dalam surplus dan terpinggirkan. Memang benar bahwa gelombang pertama digitalisasi pada akhir abad ke-20 mengakibatkan perpecahan pekerjaan, menghasilkan lapangan kerja bergaji tinggi dan berketerampilan tinggi di satu sisi, sehingga memunculkan angkatan kerja baru yang terdiri dari pekerja teknologi dan keuangan, insinyur, pemrogram perangkat lunak, dan sebagainya. Di sisi lain, digitalisasi menghasilkan lebih banyak pekerja yang tidak memiliki keterampilan dan berupah rendah serta peningkatan jumlah surplus tenaga kerja (Robinson, 2020).

Namun gelombang baru digitalisasi kini mengancam akan membuat banyak pekerjaan yang disebut “pekerjaan berbasis pengetahuan” menjadi mubazir dan menghilangkan keterampilan serta menurunkan peringkat sebagian besar pekerjaan berbasis pengetahuan yang masih ada. Ketika “big data” menangkap data tentang pekerjaan berbasis pengetahuan di tempat kerja dan di pasar dan kemudian mengubahnya menjadi algoritma, tenaga kerja ini sendiri terancam digantikan oleh Kecerdasan Buatan, kendaraan otonom, dan teknologi revolusi industri keempat lainnya. Bahkan sebelum pandemi ini terjadi, otomatisasi sudah menyebar dari industri dan keuangan ke semua cabang jasa, bahkan hingga makanan cepat saji dan pertanian. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat menggantikan banyak pekerjaan profesional seperti pengacara, analis keuangan, dokter, jurnalis, akuntan, penjamin emisi asuransi, dan pustakawan (Robinson, 2020, 2022b).

Ada kemungkinan bahwa restrukturisasi yang didorong secara digital akan memunculkan gelombang ekspansi baru. Namun ekspansi semacam itu akan menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh peningkatan komposisi modal organik, yaitu kecenderungan turunnya tingkat keuntungan, kontraksi permintaan agregat, dan penimbunan keuntungan yang tidak dapat menghasilkan keuntungan. diinvestasikan kembali. Dalam gambaran yang lebih besar, peningkatan kekuatan struktural yang dicapai oleh TCC melalui globalisasi dan finansialisasi telah memungkinkan TCC melemahkan kebijakan redistributif dan menerapkan rezim perburuhan baru pada kelas pekerja global berdasarkan fleksibilitas dan prakariatisasi, atau proletarisasi dalam kondisi permanen. ketidakamanan dan kerawanan. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan pada tahun 2019 bahwa mayoritas dari 3,5 miliar pekerja di dunia mencari nafkah (atau berupaya) di sektor perekonomian informal yaitu, meningkatkan jumlah surplus tenaga kerja—atau bekerja di lingkungan yang berbahaya, termasuk pengaturan kerja informal, fleksibel, paruh waktu, kontrak, migran, dan keliling (ILO, 2019: 2–3). Selama empat dekade terakhir, globalisasi telah membawa babak baru perbudakan global karena ratusan juta orang terpaksa mengungsi dari negara-negara Dunia Ketiga dan menjadi migran internal dan transnasional. Beberapa dari

jutaan orang yang tercerabut dari rumah mereka mengalami eksploitasi besar-besaran melalui penggabungan ke pabrik-pabrik global, pertanian, lokasi konstruksi, dan perkantoran sebagai pekerja tidak tetap, sementara yang lain dipinggirkan dan diubah menjadi manusia yang berlebih-lebihan, dan terdegradasi ke “planet permukiman kumuh.”

Meskipun gelombang inovasi teknologi yang sedang berlangsung saat ini mungkin memberikan harapan besar dalam jangka panjang, di bawah kapitalisme global, implikasi sosial dan politik dari teknologi baru yang dikembangkan berdasarkan logika kapital dan dorongan kerasnya untuk melakukan akumulasi menunjukkan bahaya yang besar. Secara khusus, teknologi-teknologi baru ini, ceteris paribus, akan memperburuk kekuatan yang mendorong akumulasi berlebihan dan perluasan jumlah kelebihan umat manusia. Hal ini akan memungkinkan TCC dan agen-agensya untuk menciptakan sistem kontrol sosial, hegemoni, dan represi baru yang mengerikan, sistem yang dapat digunakan untuk mengekang dan membendung pemberontakan kelas pekerja global, gerakan oposisi, dan massa yang terpinggirkan singkatnya, negara polisi global (Robinson, 2020). Kriminalisasi, sering kali bersifat rasialis, dan kontrol yang dimiliterisasi menjadi mekanisme pembendungan yang bersifat preventif, yang menyatu dengan dorongan menuju akumulasi yang dimiliterisasi. Kita mungkin sudah melihat runtuhnya dominasi konsensus dan bangkitnya sistem kontrol sosial yang bersifat koersif sebagai strategi pengelolaan surplus populasi.

Sekalipun periode baru ekspansi yang didorong secara digital akan menggantikan krisis struktural di masa depan, kapitalisme global akan terus menghasilkan krisis sosial yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan miliaran orang. Di seluruh dunia, 50 persen orang hidup dengan pendapatan kurang dari Rp. 36.250 per hari dan 80 persen hidup dengan pendapatan kurang dari Rp.145.000 per hari. Satu dari tiga orang di bumi menderita malnutrisi, hampir satu miliar orang tidur dalam keadaan lapar setiap malam, dan dua miliar lainnya menderita kerawanan pangan. Pengungsi akibat perang, perubahan iklim, penindasan politik, dan keruntuhan ekonomi sudah mencapai ratusan juta jiwa. Babak baru restrukturisasi yang didorong secara digital mungkin dapat memberikan dorongan yang cukup besar pada perekonomian untuk mengantarkan periode peningkatan keuntungan dan kemakmuran bagi sistem secara keseluruhan bahkan ketika jutaan miliar orang terjerumus ke dalam bahaya dan kehancuran yang lebih besar.

Oleh karena itu, tidak adanya reformasi redistributif dan peraturan atau intervensi negara untuk menghasilkan lapangan kerja publik atau alternatif, ekspansi yang didorong secara digital hanya akan memperburuk krisis struktural karena akumulasi yang berlebihan. Pertanyaannya kemudian menjadi perjuangan kelas dan kontestasi politik. Dapatkah perjuangan massa yang dilakukan oleh kelas rakyat dan kelas pekerja memaksakan sistem redistribusi, reregulasi, dan investasi kesejahteraan sosial yang dapat mengimbangi krisis di masa depan dan memberikan kesempatan baru bagi kapitalisme global untuk hidup? Sebuah “musim semi global” sedang terjadi di seluruh dunia.³ Dari tahun 2017 hingga 2019, lebih dari seratus protes anti-pemerintah melanda dunia, baik di negara-negara kaya maupun miskin, menggulingkan sekitar tiga puluh pemerintah atau pemimpin dan memicu peningkatan konflik. kekerasan negara terhadap pengunjuk rasa (Carnegie Endowment for International

Peace, n.d.). Namun, periode dua tahun ini hanyalah sebuah momen puncak pemberontakan rakyat yang menyebar setelah Resesi Hebat tahun 2008, sebuah tsunami pemberontakan massal yang belum pernah terjadi setidaknya sejak tahun 1968. Namun, bahkan jika pemberontakan global berhasil membawa dampak Dengan adanya redistribusi kekayaan yang signifikan ke bawah, kapitalisme global masih akan menghadapi keterbatasan ekosistem bumi.

Green New Deal, sebuah seruan yang pertama kali disuarakan di Amerika Serikat, mengusulkan penggabungan kebijakan ramah lingkungan, termasuk penghapusan bahan bakar fosil, dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi pro-pekerja yang akan mencakup peluang kerja massal di bidang energi ramah lingkungan dan teknologi lainnya. Kesepakatan Baru Ramah Lingkungan (Green New Deal) yang bersifat global dapat membantu dunia keluar dari depresi ekonomi karena hal ini sekaligus mengatasi darurat iklim dan menghasilkan kondisi yang menguntungkan untuk memperjuangkan tatanan sosial pasca-kapitalis. Dalam gambaran yang lebih besar, infrastruktur teknis revolusi industri keempat menghasilkan sumber daya yang dapat mewujudkan sistem politik dan ekonomi yang sangat berbeda dari kapitalisme global yang kita jalani. Seperti yang telah dicatat oleh banyak orang, teknologi ini dapat digunakan untuk membebaskan kita dari pekerjaan yang membosankan dan membosankan, sehingga secara drastis mengurangi waktu kerja yang diperlukan secara sosial dan meningkatkan waktu senggang.

Hal ini memungkinkan kita untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh perencanaan ekonomi berorientasi sosialis pada abad ke-20 ketika mekanisme harga (pasar) yang mengkoordinasikan produksi kapitalis telah ditekan. Di bawah sistem sosial dan ekonomi yang sama sekali berbeda, kita sebagai manusia tidak lagi menjadi budak mesin dan teknologi yang digunakan untuk tujuan eksploitasi dan malah menjadi tuan atas mesin dan teknologi tersebut. Kemudian, kita dapat membangun masyarakat global berdasarkan demokrasi egaliter serta kesejahteraan material dan spiritual.

BAB 20

MENATA ULANG GLOBALISASI MASA DEPAN YANG MASUK AKAL

20.1 TATANAN GLOBALISASI MASA DEPAN

Bab ini membahas kumpulan pengetahuan tentang menata ulang globalisasi. Laporan ini juga mengusulkan kerangka analitis untuk memahami globalisasi di masa depan. Kerangka kerja ini terdiri dari serangkaian penanda diadik: globalisasi dan deglobalisasi. Di antara narasi-narasi yang saling bersaing ini terdapat empat sub-narasi: hiperglobalisasi, antiglobalisasi, alterglobalisasi, dan reglobalisasi. Setiap subnarasi memiliki momen ketika daya tariknya meningkat dan kemudian menurun. Untuk menginterogasi narasi-narasi yang kuat ini, saya mengkaji tren-tren sejarah, apa yang menjelaskannya, dan sejauh mana tren-tren tersebut diobjektifikasi. Ini adalah masalah siapa yang menceritakan kisah mereka. Pengetahuan siapa dan apa yang berperan?

Bukti empiris mengungkapkan bahwa tingkat keterhubungan global berada di antara apa yang diklaim oleh para pendukung hiperglobalisasi dan apa yang dicari oleh para pendukung deglobalisasi, di tengah globalisasi yang dalam dan dangkal. Perlambatan perekonomian global pada tahun 2020an tidak berarti kemunduran dari globalisasi. Data yang ada malah menunjukkan keterhubungan yang berkelanjutan antar negara dan ketergantungan pada pemasok luar negeri. Efek gabungan dari pandemi virus corona, gangguan rantai pasokan, Brexit, dan Perang Ukraina telah menimbulkan hambatan dan inefisiensi pada arus lintas batas negara, namun tidak menyebabkan penarikan diri yang cukup besar dari globalisasi. Berdasarkan semua indikasi, gelombang globalisasi akan terus bergerak maju dan mundur.

Wacana politik yang semakin kasar, hilangnya kesopanan di dalam dan di antara masyarakat, berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik, dan rusaknya kontrak sosial menjadi ciri masa-masa sulit kita. Kita berada dalam keadaan malaise sosial yang akut, suatu kondisi patologis yang dimulai sebelum pandemi virus corona. Gejala-gejalanya adalah penyakit kapitalisme global pada abad kedua puluh satu. Keinginan merupakan refleksi kreatif yang cukup dalam memikirkan kembali bentuk globalisasi yang akan memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang adil dan merata. Memikirkan kembali tentang temporalitas dan mencapai masa depan yang etis sangat dibutuhkan.

Menata ulang masa depan membutuhkan eksplorasi asal mula. Pertanyaan utamanya adalah, di manakah masa lalu berakhir, masa kini dimulai, dan masa depan dimulai? Jawabannya terletak pada memperhitungkan bukan masa lalu yang mati, melainkan masa lalu yang hidup. Sampai di sini, novelis William Faulkner (1951: 92) berkomentar dengan terkenal, "Masa lalu tidak pernah mati. Ini bahkan belum lewat." Hubungan ini dapat ditafsirkan sebagai dialog tentang bagaimana masa lalu mendorong masa kini. Simultanitas momen saat ini dan masa lalu yang mempengaruhi masa depan dapat mengobarkan kekuatan imajinasi.

Untuk mencapai tujuan ini, saya ingin mengkaji kumpulan pengetahuan tentang menata ulang globalisasi. Saya juga mengusulkan, sebagai langkah awal, sebuah kerangka

analitis untuk memahami globalisasi di masa depan. Tentu saja, memasuki medan perdebatan di bidang futurologi adalah sebuah usaha yang berbahaya. Sejarah mengalami liku-liku yang tak terduga. Konsekuensi yang tidak disengaja dari upaya mengaktifkan pengetahuan sebagai alat untuk membentuk masa depan bisa sangat mengerikan. Ini adalah masalah siapa yang menceritakan kisah mereka. Pengetahuan siapa dan apa yang berperan? Dalam penggunaan istilah ini, pengetahuan adalah instrumen kekuasaan. Pengetahuan yang masih ada tentang menata ulang globalisasi dan mengubah alternatif-alternatif yang mungkin menjadi praktik masih diperdebatkan, dan bukti-bukti penerapannya menunjukkan arah yang berbeda.

Karena masa depan globalisasi belum dapat diprediksi sebelumnya, bagaimana kita dapat mengetahui ke mana arahnya? Para analis berbeda pendapat mengenai ontologi, epistemologi, dan metodologi. Beberapa peneliti, kebanyakan dari mereka menganut tradisi positivis, memasukkan data ke dalam model komputer dan menggunakan hasilnya untuk mencoba menghitung prospek globalisasi. Pengamat lain mengandalkan intuisi dan beralih ke fiksi populer untuk memicu imajinasi dan membuka dorongan kreatif. Yang lain lagi, ahli dialektika dan pemikir evolusi, membuat skenario: ekstrapolasi berdasarkan pola sejarah dan garis tren.

Saya mengadopsi kombinasi pendekatan kedua dan ketiga, bukan penafsiran linier atau abadi, karena, menurut saya, pilihan terakhir mempunyai potensi terbesar untuk memperdalam pemahaman. Para pembuat skenario menawarkan narasi yang masuk akal dan menggugah imajinasi, sedangkan para peramal dan pembuat model menyatakan bahwa metode mereka dalam merencanakan masa depan adalah sebuah ilmu pengetahuan. Dalam pengertian konvensional, "metode ilmiah" adalah keyakinan pada teknik empiris yang keras. Permasalahannya adalah bahwa hal ini dapat bersifat mekanistik: bahayanya terletak pada penerapan pendekatan pseudo-ilmiah, pendekatan yang menggunakan metodologi mesin slot, menerapkan pola menyeluruh pada berbagai kondisi, dan mengabaikan tekstur kondisi sejarah dan budaya.

Dalam penggunaan kritisnya, manfaat dari penerapan skenario terletak pada pembelajaran dari masa lalu, masukan dalam pembuatan kebijakan saat ini, dan mendorong respons masa depan terhadap krisis global. Sesuai dengan tradisi ini, saya akan mengisahkan cerita dan skenario mengenai globalisasi. Masing-masing merupakan permutasi dari konsep inti globalisasi. Halaman-halaman berikutnya disusun berdasarkan serangkaian penanda diadik, globalisasi dan tandingannya, deglobalisasi. Mereka berada di ujung spektrum yang berlawanan. Di antara narasi-narasi yang bersaing ini terdapat empat subnarasi: hiperglobalisasi, antiglobalisasi, alterglobalisasi, dan reglobalisasi. Repertoar politik dan ekonomi ini sangat luas dan, pada tingkat yang berbeda-beda, dapat diobjektifikasi.

Makna

Globalisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah sindrom proses transformatif yang memampatkan ruang dan waktu (Mittelman, 2000, 2004, 2011). Globalisasi merupakan sebuah transformasi historis yang memiliki dampak besar terhadap relasi sosial dan kekuasaan. Dipercepat oleh teknologi baru, globalisasi memperkecil cakrawala dan jarak. Kekuatan globalisasi melintasi batas-batas negara dan berdampak secara berbeda dalam

berbagai konteks. Struktur-struktur ini tidak sepenuhnya berada di luar negara atau wilayah tertentu. Mereka terikat dengan ranah domestik. Semua daerah dan berbagai institusi harus merespons konstelasi tekanan global yang berakar pada akumulasi modal dan dinamika persaingan.

Sejak awal tahun 1990an, para akademisi-aktivis menciptakan narasi yang bersaing: deglobalisasi. Dua varian deglobalisasi dapat dibandingkan. Pertama, sebagai perintis, sebuah buku avant-garde berjudul *Delinking* (1990) karya Samir Amin, seorang intelektual Mesir-Prancis, meletakkan dasar bagi penelitian cermat mengenai jalur ini di berbagai tempat. Sebagai seorang kritikus terhadap pemahaman budayawan mengenai kapitalisme dan imperialisme, Amin berpendapat bahwa buku *Orientalism* (1979) karya Edward Said yang sangat terkenal dan keilmuan pascakolonial yang mengikuti jejaknya kurang menekankan pada dimensi material dari eksploitasi. Kritik tajam Amin terhadap Eurosentrisme membedakan *delinking* dengan autarki dan penarikan diri dari sistem industri, perdagangan, dan keuangan dunia. *Delinking* adalah penolakan untuk menundukkan strategi pembangunan nasional pada kepentingan globalisasi. Hal ini menuntut suatu negara untuk mengarahkan jalannya sendiri dibandingkan mengambil jalur yang ditentukan oleh pihak luar. Dengan kata lain, *delinking* adalah strategi untuk mengambil alih kendali perekonomian nasional—sebuah program autosentris untuk membangun kembali perekonomian nasional. Tujuan di tingkat global adalah bekerja sama dengan negara-negara sekutu untuk membentuk sistem kekuasaan polisentris.

Amin dan pemikir serupa seperti Walden Bello (2005), seorang profesor Filipina dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Filipina, mengemukakan gagasan untuk mentransformasikan ekonomi politik dengan memperhatikan kekhususan masing-masing negara. Dalam pengertian Karl Polanyi (1957), tujuannya adalah untuk memasukkan kembali perekonomian dan institusi ke dalam masyarakat daripada membiarkan perekonomian menggerakkan masyarakat. Dalam pengulangan deglobalisasi ini, prinsip panduannya adalah melepaskan diri dari dan kemudian secara selektif kembali terlibat dalam ekonomi politik global.

Sebagai contoh: Tiongkok telah memperoleh manfaat dari kapitalisme global dengan menetapkan kondisi keterlibatan, termasuk menempatkan kontrol modal pada investasi asing langsung dan menargetkan pergerakan modal. Pihak berwenang Tiongkok menyadari potensi dan keterbatasan strategi ini serta menyadari pentingnya pasar domestik mereka yang besar dan jangkauan wilayah yang jauh. Pada tahap ini, Tiongkok berupaya memperoleh otonomi yang lebih besar dan mengelola arus impor, khususnya jasa keuangan.

Dalam konteks deglobalisasi lainnya, kaum populis sayap kanan telah merumuskan agenda ekonomi nasionalis. Di antara mereka adalah kelompok proteksionis seperti Perdana Menteri India Narendra Modi yang mendukung restrukturisasi ketentuan perdagangan, mengenakan tarif, dan menjaga perekonomian dalam negeri. Langkah-langkah ini mirip dengan perkembangan serupa di negara-negara Utara, di mana kelompok nasionalis ekonomi yang beragam akan menggunakan negara sebagai tameng atau penghalang untuk mengekang

globalisasi. Mereka sadar bahwa meningkatnya globalisasi menghasilkan pemenang dan pecundang.

Yang mengejutkan, sebagian dari mereka yang tertinggal mendukung rezim otoriter dan tidak liberal yang memperjuangkan deglobalisasi, menyebarluaskan narasi resmi, dan membangun masa depan imajiner. Pada umumnya, kelompok-kelompok ini mendambakan seorang pemimpin yang kuat yang akan memulihkan negara yang dianggap kuat dan menghidupkan kembali kebanggaannya. Mereka menyerukan pembatasan imigrasi dan bersikap keras terhadap kelompok minoritas dengan alasan bahwa mereka menggantikan kelompok mayoritas yang dominan—di Barat, umat Kristen berkulit putih. Tindakan mereka menimbulkan gelombang kekerasan terhadap Muslim, Yahudi, Asia, penyandang disabilitas, kelompok LBGTQ, dan lain-lain. Banyak pejabat politik dan orang tua mendukung pembatasan kurikulum sekolah yang diduga salah arah, seperti pengajaran “teori ras kritis.” Semua perkembangan ini sejalan dengan serangkaian tindakan proteksionis nasional yang diterapkan pada globalisasi. Secara keseluruhan, konstelasi kekuatan ini mengingatkan kita pada gambaran Jerman pada tahun 1930-an, meskipun terdapat perbedaan besar juga, dan perbandingan historisnya tidak boleh berlebihan.

Skenario deglobalisasi mulai berkembang pada tahun 2020an. Sebagai simbol dari skenario ini, virus corona menyebabkan pandemi lockdown di Shanghai dan wilayah lainnya, sehingga mengurangi transaksi global. Sementara itu, Perang Ukraina tahun 2022 menimbulkan gelombang proteksionisme baru. Pemerintah berupaya mengamankan komoditas bagi warganya, membangun penghalang untuk memanfaatkan ekspor, dan memberi insentif kepada dunia usaha untuk membangun kembali pabrik mereka. Hambatan menyebar dari satu negara ke negara lain dan sanksi terhadap Rusia semakin menghambat rantai pasokan. Tiongkok menambahkan pembatasan ekspor pupuk dan tanaman pangan (Swanson, 2022), yang memperparah kekurangan pasokan dan memperkuat deglobalisasi. Seperti ditunjukkan di bawah, imajinasi dan narasi merupakan komponen penting dari perkembangan ini.

Imajinari Dan Narasi

Pemahaman penting diperoleh dari gagasan bahwa komunitas politik dibangun dengan membayangkan solidaritas. Secara historis, hal ini bertepatan dengan munculnya kapitalisme cetak. Benedict Anderson (1999) mengemukakan bahwa fenomena ini terkait dengan kebangkitan negara-bangsa. Dia melacak tren ini dan memperkaya pemahaman tentang bagaimana dunia terstruktur.

Selanjutnya, para peneliti globalisasi (misalnya, Steger, 2008) memanfaatkan karya Anderson dan Charles Taylor (2003) yang berpengaruh mengenai imajinasi dan melontarkan kritik tajam terhadap apa yang mereka sebut sebagai nasionalisme metodologis, yaitu fokus utama pada sistem negara dan mengabaikan hal-hal lain. tingkat penyelidikan. Terkait erat, teritorialisme metodologis adalah kecenderungan untuk menegaskan kembali batas-batas wilayah dan kedaulatan nasional tanpa memperhitungkan secara memadai cara-cara kekuatan globalisasi menembus yurisdiksi nasional. Misalnya, pihak berwenang Tiongkok berusaha menutup laporan dari sumber luar tentang pembantaian Lapangan Tiananmen

tahun 1989. Dalam episode ini, negara menindak protes terhadap reformasi ekonomi dan politik namun tidak dapat memblokir sejumlah besar informasi yang masuk ke negara tersebut. Demikian pula, pemerintah mempunyai kemampuan terbatas untuk menghentikan pengaruh budaya yang dibawa oleh pendidikan, pariwisata, musik, dan seni. Intinya adalah bahwa kita salah kaprah jika terus memikirkan sistem negara tanpa memahami lonjakan arus lintas batas yang menghubungkan komunitas politik, ekonomi, dan budaya. Pada tingkat yang diabaikan atau diremehkan oleh para nasionalis metodologis, imajinasi global patut mendapat perhatian lebih dari yang mereka terima. Imajinasi nasional dan global sama-sama merupakan representasi. Itu adalah cara memahami identitas dan ikatan.

Tidak dapat ditekankan terlalu kuat bahwa bidang studi internasional didasarkan pada premis teritorial. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi inovatif, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi, munculnya “masyarakat jaringan” (Castells, 1996) dan munculnya “wilayah non-teritorial” (Ruggie, 1993), terjadi pergeseran ke arah dunia yang sudah mengalami deterritorialisasi. Atas dasar ini, Jan Aart Scholte menantang “teritorialisme metodologis” praktik yang sudah mendarah daging dalam merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, dan mencapai kesimpulan, semuanya melalui prisma kerangka teritorial (1996; 1999: 17; 2005). Tanpa beralih ke ekstrem yang berlawanan dengan mengadopsi “metodologi globalis” dengan sepenuhnya menolak teritorialitas, Scholte menyerukan “reorientasi metodologi skala penuh,” dan menyimpulkan: “bahwa globalisasi memerlukan perubahan paradigma tampaknya tidak dapat dibantah” (1999 : 21–22).

Untuk menyelidiki lebih jauh cara berpikir dan pembicaraan umum tentang bagaimana globalisasi berkembang, saya akan menjelaskan narasi-narasi yang kuat. Yang saya maksud dengan kekuatan naratif adalah kemampuan untuk memutar cerita tentang peristiwa sejarah dan apa penyebabnya. Narator memberikan pemahaman tentang peristiwa dan memungkinkan penilaian. Dalam konteks ini, Robert Shiller, ekonom pemenang Hadiah Nobel, berpendapat bahwa narasi adalah “vektor utama perubahan cepat dalam budaya, *zeitgeist*, dan perilaku ekonomi” (2019). Ia berpendapat bahwa narasi perlu dimasukkan ke dalam teori ekonomi, karena gagasan yang disampaikan dapat menyebar melalui penularan dan mengubah perilaku ekonomi. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan: narasi mana yang harus dipilih, dan mengapa?

Masing-masing versinya berbeda-beda. Beragam segi, mereka terdiri dari subnarasi dan bersifat cair, bukan tetap. Narasi yang sudah mapan mencakup kumpulan cerita, yang mungkin perlu diuraikan. Dengan kata lain, narasi terbagi dan mencakup beberapa bahan dan cabang. Selain itu, narasi-narasi juga diperebutkan misalnya, gerakan sosial, filantropi, dan perusahaan menciptakan narasi keadilan sosial mereka sendiri dan menghasilkan sub-narasi yang saling berduel.

20.2 EMPAT SUBNARATIF UTAMA DAN INDIKATOR GLOBAL

Sebagai simbol dari cara globalisasi ditata ulang, saya akan menginterogasi empat sub-narasi utama yang disebutkan dalam pendahuluan bab ini: hiperglobalisasi, antiglobalisasi, alterglobalisasi, dan reglobalisasi. Diskusi kemudian beralih ke indikator-indikator global dan

ilustrasi bagaimana kisah-kisah ini diterapkan dalam krisis global. Sub-narasi Sub-narasi yang saling bertentangan muncul karena gelombang globalisasi bergerak mundur dan maju. Tidak mungkin melacak perkembangan yang rapi. Namun para analis dapat beralih antara kemajuan dan kemunduran, ketegangan dan tantangan yang melahirkan empat subnarasi tersebut.

Yang pertama diterapkan secara luas oleh badan-badan pemerintahan serta oleh para akademisi dan intelektual kebijakan. Subnarasi hiperglobalisasi menggambarkan percepatan arus modal, teknologi, populasi, dan produk budaya lintas batas. Para pemasoknya meminta perhatian pada sejauh mana kecepatan dan jangkauan globalisasi ekonomi kontemporer berbeda secara signifikan dari kecepatan dan luasnya fase-fase globalisasi sebelumnya. Penganut paham hiperglobalis mengkaji dampak dan manfaat integrasi perdagangan, konsolidasi pasar, dan meningkatnya persaingan global, serta implikasi politiknya, termasuk pengurangan kedaulatan nasional dan apa arti deterritorialisasi bagi demokrasi nasional. Subnaratif hiperglobalisasi mempunyai peminat, kritikus, dan komentator revisionis.

Retorika hiperglobalis sangat kuat karena telah mempengaruhi banyak pembuat kebijakan dan kelompok masyarakat sipil. Namun hal ini hanya sebuah kiasan karena tren yang ingin digambarkan oleh pandangan dunia ini tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Faktanya, pendekatan ini membesar-besarkan kecenderungan-kecenderungan tertentu tanpa memberi bobot pada kecenderungan-kecenderungan yang berlawanan seperti meningkatnya perbedaan (misalnya kesenjangan pendapatan dan diferensiasi budaya), proses disintegrasi, dan penolakan terhadap konvergensi global.

Hal ini disebabkan karena luasnya cakupan dan skala globalisasi neoliberal yang telah mengganggu cara hidup dan mengkalibrasi ulang siapa yang menang dan kalah dalam ekonomi politik global, sehingga muncul reaksi negatif yang nyata. Hal ini terwujud pada pertemuan tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Seattle pada tahun 1999, yang diikuti dengan protes pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Washington, DC, pada tahun 2002, dan beberapa pertemuan puncak global lainnya. Pada subnaratif kedua, demonstrasi-demonstrasi ini digambarkan sebagai manifestasi antiglobalisasi, sebuah kiasan yang sudah menjadi hal yang lumrah di media dan tulisan populer. Dengan mengelompokkan berbagai sikap mengenai globalisasi ke dalam dua kotak yang mendukung dan menentang hal ini mengaburkan beragam keluhan mengenai tren globalisasi yang muncul dari berbagai wilayah dan posisi yang berbeda-beda dalam kontinum politik. Yang menjadi tidak jelas adalah berbagai upaya untuk terlibat, bukan menghindari, globalisasi. Faktanya, sebagian besar perlawanan ini bertentangan dengan aspek neoliberalisme dan globalisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial. Dalam pengertian ini, perlawanan bukanlah antiglobalisasi atau proglobalisasi. Beberapa aktivis gerakan sosial sayap kiri dan pendukung perdagangan bebas, seperti Milton Friedman, menganjurkan penghapusan lembaga keuangan internasional itu sendiri; pihak lain seperti pemodal miliarder George Soros ingin mengubah arah kebijakan; dan ada pula yang berupaya mengubah sisi buruk globalisasi kapitalisme khususnya, hubungan antara kekuatan pasar dan otoritas politik.

Hanya sedikit penentang yang mengambil sikap antiglobalisasi. Mereka tidak menentang globalisasi itu sendiri. Sebaliknya, mereka menganjurkan beberapa aspek globalisasi lebih banyak informasi, peningkatan teknologi, peningkatan produktivitas, dan berlimpahnya barang-barang konsumsi tetapi tidak mendukung aspek-aspek lain, misalnya dampak-dampak buruknya, termasuk peningkatan lapangan kerja tidak tetap dan pekerjaan outsourcing. Sasaran dari banyak pengunjung rasa adalah perpaduan antara globalisasi dan kerangka kebijakan neoliberal.

Gambaran umum tentang antiglobalisasi juga problematis karena ia mendefinisikan sebuah fenomena semata-mata sebagai sebuah negasi. Hal ini memiskinkan kritik sosial dengan membingungkan apa yang dapat dipelajari dari perdebatan sengit mengenai globalisasi tanpa mempertimbangkan hal-hal positif dan afirmatif mengenai hal tersebut. Menganggap kritik sosial sebagai antiglobalisasi menghambat penciptaan alternatif. Di tempat-tempat dimana terjadi protes masyarakat, gerakan massa telah mengangkat isu-isu serius mengenai kelemahan globalisasi neoliberal dan peluang untuk mengubahnya.

Ketiga, banyak kritikus yang mengemukakan kemungkinan globalisasi yang adil, inklusif, partisipatif, dan demokratis. Atas tujuan inilah gerakan alterglobalisasi yang nama umumnya adalah gerakan keadilan sosial global berbasis. Meskipun asal muasal istilah alterglobalisasi tidak diketahui secara pasti, penggunaannya dalam bahasa Perancis (*altermondialization*) berasal dari akhir abad kedua puluh dan telah beredar di seluruh Eropa dan tempat lain. Gerakan sosial ini ditujukan untuk alterglobalisasi yang berarti upaya untuk membentuk kembali kekuatan-kekuatan globalisasi guna mengurangi dampak buruknya dan mendistribusikan peluang-peluangnya dengan cara yang adil. Para aktivis yang berperan sebagai pendorong alterglobalisasi telah membentuk poin-poin artikulasi. Pada Forum Sosial Dunia (WSF), khususnya, jaringan yang dibangun berdasarkan inisiatif sebelumnya berkumpul untuk berbagi gagasan tentang membangun alternatif terhadap globalisasi neoliberal. Meskipun WSF telah membuka ruang politik bagi masyarakat sipil, WSF masih berskala kecil dan tidak memiliki momentum ke depan yang berarti (Patomäki, 2022: 103–104).

Permutasi keempat dalam narasi globalisasi dikenal sebagai reglobalisasi. Secara umum, ini adalah reaksi terhadap populisme nasionalis. Bagi sebagian pendukungnya, ini merupakan respons kebijakan pragmatis yang dimulai dari tingkat nasional dan diperluas. Bagi kaum reformis lainnya, reglobalisasi adalah seruan untuk meningkatkan kerja sama multilateral liberal melalui penguatan lembaga-lembaga internasional. Bagi sebagian lainnya, hal ini merupakan aspirasi normatif untuk melakukan transisi menuju globalisasi “pasca-neoliberal”.

Reglobalisasi mencakup tema dan langkah-langkah tertentu. Penekanannya berkisar dari ekonomi dan lingkungan (Habicher, 2020) hingga arus teknologi dan budaya (Jamet, 2020; Steger, 2021). Subnarasi reglobalisasi menekankan bahwa pandemi ini telah memperlambat arus transnasional tertentu seperti perdagangan antarbenua dan mendorong inovasi, seperti halnya globalisasi jasa dan digitalisasi. Kesulitannya adalah istilah reglobalisasi tidak tepat. Semboyan ini mencakup beragam perkembangan dan menempatkannya dalam satu rubrik. Agar reglobalisasi dapat memasuki leksikon umum dan menjadi narasi yang menggairahkan,

para pendukungnya perlu mempertajam wacana ini dan menambahkan nuansanya. Agar kredibel dan mendapatkan pengikut, tren yang dianggap terjadi pada akhir atau pasca-COVID-19 ini harus berlangsung dalam rentang waktu yang singkat.

Bukti

Dalam makalah tahun 2020, Daniel Esser dan saya berupaya menemukan narasi dan sub-narasi mana yang diobjektifikasi (Esser & Mittelman, 2020). Kami menyandingkan dua indeks global yang berpengaruh, Indeks Globalisasi KOF yang dikeluarkan oleh Swiss Economic Institute (2018a) dan Indeks Keterhubungan Global DHL (Altman, Ghemawat, & Bastian, 2018), yang disusun oleh Universitas New York dan IESE yang berbasis di Barcelona. sekolah bisnis, masing-masing. Pada tahun 2022, saya meninjau kembali indeks KOF dan DHL, yang menggabungkan data hingga tahun 2019.

Agar singkatnya, saya akan fokus pada kedua indeks ini saja, karena dari satu penelitian ke penelitian lainnya, data dan kesimpulan yang diambil dari indikator-indikator tersebut sangat bervariasi. Banyak hal bergantung pada penyedia indikator. Siapa mereka? Bagaimana mereka dilatih? Kepada siapa mereka bertanggung jawab? Bagaimana dan oleh siapa mereka dibayar? Namun saya ngelantur.³ Kembali ke Indeks KOF (KOF Swiss Economic Index, 2018b), globalisasi di seluruh dunia meningkat antara tahun 1990 dan 2007, namun, seperti yang diharapkan, melambat selama krisis keuangan tahun 2008 dan resesi yang terjadi setelahnya.⁴ Meskipun demikian sedikit peningkatan pada tahun 2016, globalisasi ekonomi agregat, termasuk globalisasi keuangan, tidak bergerak antara tahun 2018 dan 2019, dan perdagangan lintas batas negara mengalami surut. Globalisasi keuangan kemudian meningkat, dan integrasi perdagangan juga meningkat; namun arus penduduk, khususnya di sektor pariwisata, menurun.

Indeks DHL menunjukkan bahwa, bagi dunia secara keseluruhan, tingkat keterhubungan global mencapai rekor tertinggi pada tahun 2017. DHL menemukan bahwa sebagian besar arus perdagangan, modal, informasi, dan manusia berasal dari dalam negeri, bukan dari dalam negeri. lintas batas. Bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat keterhubungan global berada di antara apa yang diklaim oleh para pendukung hiperglobalisasi dan apa yang dicari oleh para pendukung deglobalisasi, di tengah globalisasi yang dalam dan dangkal.

Indeks tahun 2022 tidak menyimpang secara substansial dari temuan sebelumnya. Keterhubungan global secara keseluruhan sangat bervariasi menurut negara dan wilayah, tidak hanya bagi mereka yang berada pada peringkat rendah dalam penghitungan indikator globalisasi namun juga bagi mereka yang berada pada peringkat atas.

Pelemahan perekonomian global dan gangguan rantai pasok akibat pandemi virus corona tidak menandakan kemunduran dari globalisasi. Pola-pola ini justru menunjukkan keterhubungan antar negara dan ketergantungan pada pemasok luar negeri. Dampak gabungan dari pandemi ini, gangguan rantai pasokan, dan Brexit telah menyebabkan hambatan dan inefisiensi. Kontraksi perdagangan global dan relokasi produksi telah meningkatkan biaya. Memikirkan kembali isu-isu ini dan mempertimbangkan besarnya dampak buruk dari penyesuaian saling ketergantungan ekonomi global dapat memberikan

dorongan untuk melakukan reformasi, yang cakupannya tidak dapat diperkirakan. Namun globalisasi terus berlanjut dengan cepat; tarifnya bervariasi menurut jenis dan dimensi. Inti dari perkembangan ini adalah penjabaran narasi, yang sebagian didasarkan pada informasi yang salah dan sebagian lagi didasarkan pada informasi yang akurat.

Seperti yang digambarkan oleh kontroversi yang memanas mengenai disinformasi, angka-angka indikator global, sensus, dan penghitungan suara jelas dipolitisasi dan bukan dihasilkan secara ilmiah. Indikator numerik adalah representasi statistik yang dapat dimainkan oleh penulis dan promotornya. Jika cara-cara tersebut melampaui cara-cara masyarakat adat dalam menghasilkan pengetahuan di negara-negara Selatan, kumpulan data dapat menjadi suatu bentuk perpindahan dan penambahan epistemik.

Oleh karena itu, apakah narasi dan subnarasi utama globalisasi dapat diidentifikasi? Dengan meluasnya neoliberalisme ke seluruh dunia selama setengah abad terakhir, setiap subnarasi mempunyai momen di mana daya tariknya tumbuh dan kemudian menurun, dengan bukti yang tidak merata untuk mendukung cerita yang mereka ceritakan. Mereka dapat diterapkan secara bersamaan dalam kejadian nyata.

Saat ini

Sebagai ilustrasi, mari kita ambil contoh pergolakan besar di tahun 2020an. Para perantara wacana menyusun sub-narasi resmi dan tidak resmi, termasuk banyak kebohongan, selama periode ini. Memperhatikan dampak jangka panjang virus corona yang tidak menentu, Laurence Boone, kepala ekonom di Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, mengamati bahwa pandemi ini dan invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 melepaskan “kekuatan deglobalisasi” sebagai akibat dari penerapan sanksi baru Barat, perlambatan pertumbuhan dan arus keuangan, keterlambatan pengiriman pasokan komoditas, dan kerusakan lingkungan.

Memblokir transaksi bank sentral Rusia dari SWIFT, sebuah jaringan untuk transaksi keuangan dan pembayaran antar bank secara global, merupakan elemen utama dalam pemutusan tautan. Menanggapi tindakan ini, Rusia mengambil langkah-langkah untuk menghindari tekanan dan berusaha menjadikan dirinya lebih mandiri.

Pada saat yang sama, beberapa pembuat kebijakan dan narator menyerukan lebih banyak, bukan lebih sedikit, integrasi global. Ngozi Okonjo-Iweala, direktur jenderal WTO, menganjurkan reglobalisasi. Dalam kata-katanya: “Pasar internasional yang lebih dalam dan terdiversifikasi tetap menjadi pilihan terbaik bagi ketahanan pasokan” (dikutip dalam Wong & Swanson, 2022). Menambah perdebatan mengenai subnarasi, ekonom politik Harvard Dani Rodrik mengatakan: “saling ketergantungan dapat dijadikan senjata untuk melawan Anda.” Lebih lanjutnya, ia menegaskan bahwa Perang Ukraina “mungkin telah mengakhiri hiperglobalisasi” (dikutip dalam Wong & Swanson, 2022).

20.3 KONSEPTUALISASI GLOBALISASI

Ringkasnya: untuk mengatasi perdebatan sengit mengenai masa depan globalisasi dan memfasilitasi diagnosis upaya mencapai tatanan yang adil, bab ini menawarkan kerangka konseptual untuk menata ulang globalisasi. Konseptualisasinya terdiri dari matriks dua narasi,

globalisasi dan deglobalisasi, dan empat subnaratif: hiperglobalisasi, antiglobalisasi, alterglobalisasi, dan reglobalisasi. Hal-hal yang dibayangkan di luar bersekongkol melawan hal-hal pragmatis, yang ada di sini dan saat ini. Perlu peregang waktu, melihat apa yang belum sepenuhnya terwujud, menangkap apa yang terpendam. Tantangannya adalah menciptakan visi bersama mengenai tatanan dunia yang benar secara etis dan bijaksana secara politik. Hal ini membutuhkan pandangan yang melampaui urgensi saat ini.

Sejarah dimulai pada fase liminal, memasuki fase interim—transisi dari masa depan yang dekat ke masa depan yang lebih jauh. Dengan kata lain, *longue durée* bukan hanya suatu periode yang tidak dapat dibedakan dan tidak dapat ditentukan. Jalan menuju jangka panjang menghadirkan tantangan-tantangan nyata. Kondisi kontingen harus dinilai dan ditangani. Mereka termasuk:

1. COVID-19 merupakan pelanggaran global yang sempurna dalam arti bahwa hal ini mendorong penegasan kembali perbatasan dan upaya nasional untuk mengendalikan arus lintas batas.
2. Pandemi virus corona mendorong inovasi dalam teknologi komunikasi digital yang memungkinkan pekerjaan terdelokalisasi melintasi zona waktu dan batas negara.
3. Kelangkaan komoditas akibat gangguan rantai pasok memperburuk tekanan akibat Perang Ukraina. Hal ini juga meningkatkan permintaan akan sumber daya lokal dan produksi dalam negeri.
4. Perpindahan penduduk yang disebabkan oleh konflik militer dan politik menunjukkan semakin pentingnya empati, kasih sayang, dan toleransi terhadap perbedaan—apalagi karena perubahan iklim di Amerika Tengah dan negara lain terus memicu arus migrasi.
5. Momok ancaman nuklir, baik disengaja atau tidak, menghantui masa depan global.

Dalam waktu dekat, ketika tantangan-tantangan yang menghadang ini harus dihadapi, peluang untuk mewujudkan skenario jangka panjang akan segera terlihat. Pada saat itu, menata ulang globalisasi dapat memacu upaya untuk membangun kontrahegemoni: sebuah blok historis yang menghadapi bentuk globalisasi yang dominan dalam apa yang disebut oleh Antonio Gramsci (1971) sebagai “perang posisi.” Secara strategis, hal ini dilakukan dengan gerakan avant-garde yang mengandalkan persuasi melalui pendidikan, media, musik, seni, dan tulisan yang ditujukan untuk menentang dan pada akhirnya menggulingkan hegemon. Hal ini mengandaikan partisipasi kelas-kelas subaltern dalam proyek politik ini, yang berupaya untuk mendapatkan persetujuan.

Intelektual organik dapat memainkan peran integral dalam perjuangan ini dengan menyebarkan budaya bersama, sehingga memungkinkan adanya kohesi. Proyek ini sangat penting bagi para intelektual organik yang terlibat dalam medan pertarungan ide. Mereka yang berada di akademi ini dapat berkontribusi secara signifikan dengan memperkuat upaya menata ulang globalisasi. Sebagai bidang pengajaran dan penelitian yang dinamis, studi globalisasi merupakan perpanjangan dari sejarah panjang pendidikan kewarganegaraan, yang diperebutkan secara intens di arena publik. Banyak sekali inisiatif yang sedang berjalan, banyak yang telah dicapai, dan masih banyak lagi yang harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Ismaïl, K., & V. Hlasny (2022). "Wealth Concentration Rocketing in Arab Countries after Covid-19." ERF Policy Forum, March 26.
- Acharya, A. (2017). "After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order." *Ethics & International Affairs* 31 (3): 271–85.
- Achcar, G. (2013). *The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising*. Berkeley: University of California Press.
- Addie, J.D., M.R. Glass, & J. Nelles (2020). "Regionalizing the Infrastructure Turn: A Re- search Agenda." *Regional Studies, Regional Science* 7 (1): 10–26.
- Adelman, J. (2017). "What Is Global History Now?" Aeon, March 2. <https://aeon.co/essays/is-global-history-still-possible-or-has-it-had-its-moment>.
- Adelzadeh, A. (2003). *South Africa Human Development Report 2003: The Challenge of Sustainable Development: Unlocking People's Creativity*. Cape Town: Oxford University Press.
- Administration Report of the Indo-European Telegraph Department for 1873–74 (IOR/V/24/4289) (1874). British Library: Oriental Collections.
- Administration Report of the Indo-European Telegraph Department for 1882–83 (IOR/V/24/4289) (1883). British Library: Oriental Collections.
- Administration Report of the Indo-European Telegraph Department for 1889–90 (IOR/V/24/4290) (1890). British Library: Oriental Collections.
- African Development Bank Group (2016). "The Way Forward to Achieving Sustainable Development in Africa." June 20.
- Aita, S. (2008). "Employment and Labor Law in the Arab Mediterranean Countries and the Euro-mediterranean Partnership: Comparative Study." Fundación Paz y Solidaridad Serafin Aliaga de Comisiones Obreras.
- Akinpelu, Y. (2021). "Why We Ousted President Alpha Condé in Guinea—Coup Leader." *Premium Times*, September 6..
- Akman, M.S., B. Aran, L. Borlini, C. Primo, U. Dadush, F. De Mateo, A. Jara, D. Lippodlt, & G. Sacerdoti (2021). "Confronting 'Deglobalization' in the Multilateral Trading System." *G20 Insights*.
- Akyeampong, E., R. Bates, N. Nunn, & J. Robinson, eds. (2014). *Africa's Development in Historical Perspective*. New York: Cambridge University Press.
- Aliriza, F. (2020). "Perpetual Periphery: IFIs and the Reproduction of Tunisia's Economic Dependence." In T. Radwan, ed., *The Impact and Influence of International Financial Institutions on the Economies of the Middle East and North Africa*, 26–41. Tunis: Friedrich Ebert Stiftung Regional Project.

- Alsenia, A., J. Harnoss, & H. Rapoport (2016). "Birthplace Diversity and Economic Prosperity." *Journal of Economic Growth* 21 (2): 101–38.
- Altman, S.A. (2020). "Will Covid-19 Have a Lasting Impact on Globalization?" *Harvard Business Review*.
- Altman, S.A., & C. Bastian (2021). *DHL Global Connectedness Index 2021 Update*. New York: NYU Stern School of Business.
- Altman, S.A., & C.R. Bastian (2021). "DHL Global Connectedness Index 2021 Update: Globalization Shock and Recovery in the Covid-19 Crisis." DHL.
- Altman, S.A., P. Ghemawat, & P. Bastian (2018). "DHL Global Connectedness Index 2018: The State of Globalization in a Fragile World." Deutsche Post DHL Group.
- Altman, S.A., P. Ghemawat, & P. Bastian (2019). *DHL Global Connectedness Index 2018: The State of Globalization in a Fragile World*. Deutsche Post DHL Group.
- Alvi, H. (2019). "Terrorism in Africa." *Insight Turkey* 21 (1): 111–32.
- Amin, S. (1990). *Delinking: Towards a Polycentric World*. London: Zed Books.
- Amoureux, J.L., & B.J. Steele, eds. (2016). *Reflexivity and International Relations: Positionality, Critique, and Practice*. New York: Routledge.
- Ananth, V.K. (2012). "Coalgate: A Skewed Debate." *Economic & Political Weekly* 47 (40): 22–25.
- Anderson C. (2008). "The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete." *Wired*, June 23.
- Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, revised ed. London: Verso.
- Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Andrejevic M. (2014). "Social Media and Political Participation: Discourse and Deflection." In C. Fuchs & M. Sandoval, eds., *Critique, Social Media and the Information Society*, 179–90. New York: Routledge.
- Aneesh, A. (2006). *Virtual Migration: The Programming of Globalization*. Durham, NC: Duke University Press.
- Angus, I. (2016). *Facing the Anthropocene: Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System*. New York: Monthly Review Press.
- Anonymous (1870). "The Post Office and the Telegraphs." *The Times*, December 7, p. 6.
- Anyanwu, K.C. (1982). "The Bases of Political Instability in Nigeria." *Journal of Black Studies* 13 (1): 101–17.
- Anzolin, E., & S. Aloisi (2021). "The Great Reboot: How Global Supply Chains Are Falling Out of Fashion." *Reuters*, September 29.

- Appadurai, A. (1990). "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy." *Public Culture* 2 (2): 1–24.
- Appadurai, A. (1990). "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy." *Theory, Culture and Society* 7: 295–310.
- Appadurai, A., ed. (1986). *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Arab Barometer (2019). "Arab Barometer V: Tunisia Country Report 2019." www.arabbarometer.org
- Arab Center for Research & Policy Studies (2020). "Mechichi in Power: Can the New Government Deal with the Challenges Ahead?" September 10.
- Arase, D. (2020). "China's Rise, Deglobalization and the Future of Indo-Pacific Governance." *ASIAGLOBAL PAPERS*, no. 2 (July), 1–47.
- Arrighi, G., & J. Drangel (1986). "The Stratification of the World Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone." *Review* 10 (1): 9–74.
- Ashcroft, B., G. Griffiths, & H. Tiffin (2002). *The Empire Writes Back*, 2nd ed. London: Routledge.
- Ashcroft, M. (2016). "How the United Kingdom Voted on Thursday . . . and Why." *Lord Ashcroft Polls*, June 24.
- Asian Development Bank (2022). *Economic Development Corridor in Pakistan: Concept, Framework, and Case Studies*. Manila.
- Assaad, R., & M.A. Marouani (2021). "Economic Growth and Labour Market Outcomes in North Africa: An Overview of Developments in Algeria, Egypt, Sudan and Tunisia since 2000." *The Regional Report on Jobs and Growth in North Africa*, International Labour Organization.
- Associated Press (2022). "Global Vaccine Program COVAX Low on Funds, Seeks \$5.2B." *AP News*, January 19.
- Austin, G. (2018). "Global History in (Northwestern) Europe: Explorations and Debates." In S. Beckert & D. Sachsenmaier, eds., *Global History, Globally. Research and Practice around the World*, 21–44. London: Bloomsbury Academic.
- Axford, B. (2013). *Theories of Globalization*. Cambridge: Polity.
- Axford, B. (2021). *Populism versus the New Globalization*. Thousand Oaks, CA: Sage. Beaton, R. (2021). *The Greeks: A Global History*. New York: Basic Books.
- Azcona, G., A. Bhatt, S.E. Davies, S. Harman, J. Smith, & C. Wenham (2020). *Spotlight on Gender*.
- Azeem, A. (2021). *The Exponential Age: How Accelerating Technology Is Transforming Business, Politics and Society*. New York: Diversion Books.
- Babb, S. (2009). *Behind the Development Banks*. Oxford: Oxford University Press.
- Bajaj, V. (2012). "Indian Court Cancels Contentious Wireless Licenses." *New York Times*, February 2.

- Bajaj, V., & J. Yardley (2012). "Scandal Poses a Riddle: Will India Ever Be Able to Tackle Corruption?" *New York Times*, September 15.
- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Baldwin, R.. (2019). *The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work*. New York: Oxford University Press.
- Bales, K. (2000). "Expendable People: Slavery in the Age of Globalization." *Journal of International Affairs* 53 (2): 461–84.
- Bales, K. (1999). *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*. Berkeley: University of California Press.
- Bales, K. (2005) *Understanding Global Slavery: A Reader*. Berkeley: University of California Press.
- Bhambra, G.K. (2014). *Connected Sociologies*. London: Bloomsbury.
- Balsa-Barreiro, J., A. Vié, A.J. Morales, & M. Cebrian (2020). "Deglobalization in a Hyper-Connected World." *Palgrave Communications* 6 (28).
- Balthazar, A.C. (2017). "Made in Britain: Brexit, Teacups, and the Materiality of the Nation." *American Ethnologist* 44 (2): 220–24.
- Barry, E. (2015). "Indian Court Summons Manmohan Singh, Ex-Premier, in Corruption Case." *New York Times*, March 11.
- Barry, J., B. Baxter, & R. Dunphy, eds. (2004). *Europe, Globalization and Sustainable Development*. New York: Routledge.
- Barth, B., S. Gänger, & N.P. Petersson, eds. (2014). *Globalgeschichten: Bestandsaufnahme und Perspektiven*. Frankfurt: Campus Verlag.
- Bastani, A. (2019). *Fully Automated Luxury Communism*. London: Verso.
- Beck, U. (2016). *The Metamorphosis of the World*. Cambridge: Polity.
- Battersby, P.B., & R.K. Roy, eds. (2017). *International Development: A Global Perspective on Theory and Practice*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and Simulation*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- BBC News (2021). "COVAX: How Many COVID Vaccines Have the US and Other G7 Countries Pledged?" BBC, September 23. www.bbc.com/news/world-55795297.
- BBC. (2010). "China Overtakes Japan as World's Second-Biggest Economy." BBC, February 14.
- BBC.. (2016). "Nigel Farage Says Leave Win Marks UK 'Independence Day.'" BBC, June 24.
- Beaumont, P. (2017). "Brexit, Retrotopia and the Perils of Post-Colonial Delusions." *Global Affairs* 3 (4–5): 379–90.
- Beebe, T.O. (2002). "The Öffentlichkeit of Jürgen Habermas: The Frankfurt School's Most Influential Concept?" In J. Nealon & C. Irr, eds., *Rethinking the Frankfurt School: Alternative Legacies of Cultural Critique*, 187–204. Albany, NY: SUNY Press.

- Beegle, K., & L. Christiaensen, eds. (2019). *Accelerating Poverty Reduction in Africa*. Washington, DC: World Bank.
- Behera, N.C. (2021). "Globalization, Deglobalization and Knowledge Production." *International Affairs* 97 (5): 1579–97.
- Bektas, Y. (2000). "The Sultan's Messenger: Cultural Constructions of Ottoman Telegraphy, 1847–1880." *Technology and Culture* 41 (4): 669–96.
- Bell, D., & S. Vucetic (2019). "Brexit, CANZUK, and the Legacy of Empire." *British Journal of Politics and International Relations* 21 (2): 367–82.
- Bell, D.A. (2013). "This Is What Happens When Historians Overuse the Idea of the Network." *The New Republic*, October 26. <https://newrepublic.com/article/114709/world-connecting-reviewed-historians-overuse-network-metaphor>.
- Bell, D.A.. (2014). "Questioning the Global Turn: The Case of the French Revolution." *French Historical Studies* 37 (1): 1–24.
- Bello, W. (2002). *Deglobalization: Ideas for a New World Economy*. London: Zed Books.
- Bello, W. (2002). *Deglobalization: Ideas for a New World Economy*. London: Zed Books.
- Bello, W. (2005). *Deglobalization: Ideas for a New World Economy*. London: Zed Books.
- Benabdallah, L. (2021). "Spanning Thousands of Miles and Years: Political Nostalgia and China's Revival of the Silk Road." *International Studies Quarterly* 65 (2): 294–305.
- Benedikter, R. (2019). "New Technologies Can Be a Force for Good in Africa If They're Developed from the Ground." *The Conversation*, August 28.
- Benedikter, R. (2021). "What Is Re-Globalization?" *New Global Studies*, 15 (1): 73–84.
- Benedikter, R. (2022). "Re-Globalization—Aspects of a Heuristic Umbrella Term Trying to Encompass Contemporary Change." In R. Benedikter, M. Gruber, & I. Kofler, eds., *Re-Globalization: New Frontiers of Political, Economic and Social Globalization*, 7–32. London: Routledge.
- Benedikter, R. (2022). "Re-Globalization—Aspects of a Heuristic Umbrella Term Trying to Encompass Contemporary Change: An Introductory Overview." In R. Benedikter, M. Gruber, & I. Kofler, eds., *Re-Globalization; New Frontiers of Political, Economic, and Social Globalization*. Abingdon: Routledge.
- Benedikter, R., & I. Kofler (2019). "Globalization's Current Transition Phase: The 5 R's." *Globale* 12 (36).
- Benedikter, R., M. Gruber, & I. Kofler (2022). *Re-Globalization: New Frontiers of Political, Economic, and Social Globalization*. London: Routledge.
- Benedikter, R., M. Gruber, & I. Kofler, eds. (2022). *Re-Globalization: New Frontiers of Political, Economic, and Social Globalization*. New York: Routledge.
- Benedikter, R., M. Gruber, & I. Kofler, eds. (2022). *Re-Globalization: New Frontiers of Political, Economic and Social Globalization*. Abingdon: Routledge.

- Benediktter, R., & I. Kofler (2019). "Globalization's Current Transition Phase: The 5 R's, Re-Globalization." *Global-e Journal* 12 (36).
- Benton, A., & K.Y. Dionne (2015). "International Political Economy and the 2014 West African Ebola Outbreak." *African Studies Review* 58 (1): 223–36.
- Berkhout, E., N. Galasso, M. Lawson, P.A. Rivero Morales, A. Taneja, & D.A. Vázquez Pimentel (2021). *The Inequality Virus: Bringing Together a World Torn Apart by Coronavirus through a Fair, Just and Sustainable Economy*. Oxford: Oxfam GB.
- Besnier, N. (2014). "Pacific Island Rugby: Histories, Mobilities, Comparisons." *Asia Pacific Journal of Sport and Social Science* 3 (3): 268–76.
- Besnier, N., D.G. Calabrò, & D. Guinness (2020). *Sport, Migration, and Gender in the Neoliberal Age*. New York: Routledge.
- Bhagwati, J., & A. Panagariya (2013). *Why Growth Matters: How Economic Growth in India Reduced Poverty and the Lessons for Other Developing Countries*. New York: Public Affairs.
- Bhambra, G.K., & K. Nisancioglu, eds. (2018). *Decolonizing the University*. London: Pluto.
- Biedermann, Z. (2021). "(Dis)connected History and the Multiple Narratives of Global Early Modernity." *Modern Philology* 119 (1): 13–32. <https://doi.org/10.1086/714972>.
- Birla, K.M. (2018). "Atal Bihari Vajpayee's Policies Helped Script High Growth in 2003–08." *The Economic Times*, August 17.
- BIS Papers (2018). "Globalisation and Deglobalisation." Monetary and Economic Department, no. 100, December.
- Bishara, D. (2021). "Precarious Collective Action: Unemployed Graduates Association in the Middle East and North Africa." *Comparative Politics*, 453–76.
- Bishop, M.L., & A. Paine, eds. (2021). *Reglobalization*. New York: Routledge.
- Bishop, M.L., & A. Payne (2021). "The Political Economies of Different Globalizations: Theorizing Reglobalization." *Globalizations* 18 (1): 1–21.
- Bishop, M.L., & A. Payne (2021). "The Political Economies of Different Globalizations: Theorizing Reglobalization." *Globalizations*, 18 (1): 1–21.
- Blanchard, J.M.F., & C. Flint (2017). "The Geopolitics of China's Maritime Silk Road Initiative." *Geopolitics* 22 (2): 223–45.
- Blurter of brilliance (2021). "How to Build Your Personal Brand Based on Kim Kardashian West." YouTube video, 7:37, November 30.
- Bohman, J. (2004). "Expanding Dialogue: The Internet, the Public Sphere and Prospects for Transnational Democracy." In N. Crossley & J.M. Roberts, eds., *After Habermas: New Perspectives on the Public Sphere*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Bohman, J.. (2007). *Democracy across Borders: From Dêmos to Dêmo*. Cambridge, MA: MIT Press.

- Bollyky, T.J., & C.P. Brown (2020). "The Tragedy of Vaccine Nationalism: Only Cooperation Can End the Pandemic." *Foreign Affairs*, September/October.
- Bond, J. (2017). "Infrastructure in Africa." *Global Journal of Emerging Market Economies* 8 (3): 309–33.
- Bonnett, A. (2015). *The Geography of Nostalgia: Global and Local Perspectives on Modernity and Loss*. Abingdon: Routledge.
- Bordachev, T. (2018). "Revisionism of Powers in the Changing Historical Context." *Russia in Global Affairs* 12 (3): 17–41.
- Bosch, J. (1969). *Pentagonism: A Substitute for Imperialism*. Translated by H.R. Lane. New York: Grove Press, 1969.
- Bourdieu, P. (1998). *Acts of Resistance: Against the New Myths of Our Time*. Cambridge: Polity Press.
- Bown, C.P., & C. Rogers (2021). "The US Did Not Ban Exports of Vaccine Supplies. But More Help Is Needed." *PIIE*, June 7.
- Braudel, F. (1973). *Capitalism and Material Life*. New York: Harper and Row.
- Braunstein, R. (2021). "The 'Right' History: Religion, Race, and Nostalgic Stories of Christian America." *Religions* 12 (2): 95.
- Bray, D.W., & M.W. Bray (2002). "Beyond Neoliberal Globalization: Another World." *Latin American Perspectives* 29 (6): 117–26.
- Bremmer, I. (2021). "The Technopolar Moment: How Digital Powers Will Reshape the Global Order."
- Brenner, N. (1999). "Beyond State-Centrism? Space, Territoriality, and Geographical Scale in Globalization Studies." *Theory and Society* 28 (1): 39–78.
- Breul, M., C. Hulke, & L. Kalvelage (2021). "Path Formation and Reformation: Studying the Variegated Consequences of Path Creation for Regional Development." *Economic Geography* 97 (3): 213–34.
- Broom, D. (2021). "Globalization and World Trade Bounce Back from the Impact of COVID-19: Report." *World Economic Forum*, December 7.
- Brownlee, J., T. Masoud, & A. Reynolds (2015). *The Arab Spring: Pathways of Repression and Reform*. New York: Oxford University Press.
- Brynjolfsson, E., & A. McAfee (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W.W. Norton.
- Brynjolfsson, E., A. McAfee, & M. Spence (2014). "New World Order: Labor, Capital, and Ideas in the Power Law Economy." *Foreign Affairs* 93 (4): 44–53.
- Brzezinski, Z. (2016). "Toward a Global Realignment." *American Interest* 11 (6).
- Budiman, R. (2020). "Slacktivism: The Digital Bystander Effect?" *Medium*.
- Bühlmann, E. (1999). *La Ligne Siemens: La construction du télégraphe indo-européen 1867–1870*. Bern: Peter Lang.

- Burke, K. (1969). *A Rhetoric of Motives*. Berkeley: University of California Press.
- Business Wire (2018). "ABCKID Raises \$500 Million in Series D Financing, Led by Coatue Management, Tencent, Sequoia Capital and Yunfeng Capital." June 21. (Author's note: The author has changed the organization's name in the title to a pseudonym for protecting informant rights.)
- Business Wire. (2019). "ABCKID Honored by Glassdoor as One of the Best Places to Work in 2020 for Second Year in a Row, Rising in Rank." December 11. (Author's note: The author has changed the organization's name in the title to a pseudonym for protecting informant rights.)
- Caddick, A. (1986). "Feminism and the Body." *Arena*, first series, no. 74: 60–88.
- Calabrò, D.G. (2016). "Once Were Warriors, Now Are Rugby Players? Control and Agency in the Historical Trajectory of the Māori Formulations of Masculinity in Rugby." *Asia Pacific Journal of Anthropology* 17 (3–4): 231–49.
- Calhoun, C., ed. (1992). *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Callahan, W.A. (2017). "Dreaming as a Critical Discourse of National Belonging: China Dream, American Dream and World Dream." *Nations and Nationalism* 23 (2): 248–70.
- Cameron, A. (1994). *Christianity and the Rhetoric of Empire: The Development of Christian Discourse*. Berkeley: University of California Press.
- Carnegie Endowment for International Peace (n.d.). *Global Protest Tracker*.
- Carrai, M.A. (2021). "Chinese Political Nostalgia and Xi Jinping's Dream of Great Rejuvenation." *International Journal of Asian Studies* 18 (1): 7–25.
- Carson, R.L. ([1962] 2002). *Silent Spring: Fortieth Anniversary Edition*. Introduction by L. Lear. Boston: Mariner Books, Houghton Mifflin.
- Carter, T.F. (2011). In *Foreign Fields: The Politics and Experiences of Transnational Sport Migration*. London: Pluto Press.
- Carter, T.F. (2013). "Re-placing Sport Migrants: Moving beyond the Institutional Structures Informing International Sport Migration." *International Review for the Sociology of Sport* 48 (1): 66–82.
- Casanova, P. (2004). *The World Republic of Letters*. Translated by M.B. DeBevoise. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Caselli, M. (2008). "Measuring . . . What? Notes on Some Globalization Indices." *Globalizations* 5 (3): 383–404.
- Caselli, M.. (2013). "Nation States, Cities, and People: Alternative Ways to Measure Globalization." *SAGE Open*, 3 (4): 1–8.
- Casey, M.J., & P. Vigna (2019). *The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything*. New York: St. Martin's Press.
- Castells, M. (1996). *The Rise of Network Society*. Malden, MA: Blackwell Publishers.
- Castles, S., & M. Miller (2003). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. New York: Guilford Publications.

- Centers for Disease Control and Prevention (n.d.). One Health.
- CFR (Council for Foreign Relations) (n.d.). U.S. Relations with China: 1949–2023.
- Chakrabaty, D. (2021). *The Climate of History in a Planetary Age*. Chicago: University of Chicago Press.
- Chakravorti, B. (2017). “Early Lessons from India’s Demonetization Experiment.” *Harvard Business Review*, March 14.
- Chan, K.W. (2021). “China’s Hukou Reform Remains a Major Challenge to Domestic Migrants in Cities.” *World Bank Blogs*, December 17.
- Chandra, R., & M. Walton (2020). “Big Potential, Big Risks? Indian Capitalism, Economic Reform and Populism in the BJP Era.” *India Review* 19 (2): 176–205.
- Charles, M., & S.-C. Rah (2019). *Unsettling Truths: The Ongoing, Dehumanizing Legacy of the Doctrine of Discovery*. Downers Grove, IL: IVP Books.
- Chase-Dunn, C., & K.S. Lawrence (2011). “The Next Three Futures, Part One: Looming Crises of Global Inequality, Ecological Degradation, and a Failed System of Global Governance.” *Global Society* 25 (2): 137–53.
- Chatzigianni, E. (2018). “Global Sport Governance: Globalizing the Globalized.” *Sport in Society* 21 (9): 1454–82.
- Chen, P.G., E.W. Chan, N. Qureshi, S. Shelton, A.W. Mulcahy (2021). “Medical Device Supply Chains: An Overview and Description of Challenges during the COVID-19 Pandemic.” *Rand Corporation*.
- Chen, W.K. (2020). “Sovereign Debt in the Making: Financial Entanglements and Labor Politics along the Belt and Road in Laos.” *Economic Geography* 96 (4): 295–314.
- Chen, X. (2020), with J.T. Miao and X. Li. *The Belt and Road Initiative as Epochal Regionalisation*. UK: Routledge and the Regional Studies Association.
- Chen, X. (2021a). “‘Built by China’ Going Global.” *Chicago Council on Global Affairs*, December 2.
- Chen, X. (2021c). “Reconnecting Eurasia: A New Logistics State, the China-Europe Freight Train, and the Resurging Ancient City of Xi’an.” *Eurasian Geography and Economics*.
- Chen, X. (2022). “‘Corridor-ising’ Impact along the Belt and Road: Is the Newly Operational China-Laos Railway a Game-Changer?” *European Financial Review*, February–March, 4–14.
- Chen, X.. (2021b). “Connectivity, Connectivity, Connectivity: Has the China-Europe Freight Train Become a Winning Run?” *European Financial Review*, August–September, 3–17.
- China BRI Website (2020a). “The CEFT Chronicle 2011–2020.” December 7.
- China BRI Website. (2020b). “How to Discover the CEFT’s New Customers?” September 9.
- China BRI Website. (2021). “The China-Laos Railway Has Electricity.” September 1.
- China BRI Website. (2022a). “The CLR Is the New Engine and Accelerator for Cross-Border Connection and Economic Cooperation.” January 16.

- China BRI Website. (2022b). "The CLR's Early Dividends through its First Month of Operation." January 4.
- China BRI Website. (2022c). "The New Year's First International Freight Train on the CLR." January 2.
- China BRI Website. (2022d). "This Train Passes Eight Countries." February 18.
- Churchwell, S. (2018). *Behold, America: The Entangled History of "America First" and "the American Dream."* New York: Basic Books.
- Ciklum (2017). "Limitations of Big Data Analytics." October 4.
- Cimmino, J., R. Katz, M. Kroenig, J. Lipsky, & J. Pavel (2020). "A Global Strategy for Shaping the Post-COVID-19 World." *Atlantic Council Strategy Papers*.
- CISION PR Newswire (2020). "China's Involvement in Global Infrastructure." March 31.
- Clark, N., & B. Szersynski (2020). *Planetary Social Thought: The Anthropocene Challenge to the Social Sciences*. Cambridge: Polity.
- Comaroff, J., & J. Comaroff (1992). *Ethnography and the Historical Imagination*. Boulder, CO: Westview Press.
- Congressional Research Service (2020). *US Withdrawal from the World Health Organization: Process and Implications*. October 21.
- Conrad, S. (2016). *What Is Global History?* Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Cooper, F. (2001). "What Is the Concept of Globalization Good For? An African Historian's Perspective." *African Affairs* 100 (399): 189–213.
- Cooper, F. (2005). *Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History*. Berkeley: University of California Press.
- Cortés, J.D. (1851). *Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo*. Granada: Comares.
- Fabian, J. (1983). *Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object*. New York: Columbia University Press.
- COVID-19, and the SDGs: Will the Pandemic Derail Hard-Won Progress on Gender Equality? New York: UN Women.
- Cox, R.W. (1976). "On Thinking about World Order." *World Politics* 28 (2): 175–96.
- Cox, R.W. (2019). "The Crisis of Capitalism through Global Value Chains." *Class, Race and Corporate Power* 7 (1).
- CREDIF (2015). "Chômage des femmes diplômées du supérieur." *Revue du CREDIF*, 49.
- Cronon, W. (1996). "The Trouble with Wilderness; or, Getting Back to the Wrong Nature." *Environmental History* 1 (1): 7–28.
- Cumming, L.T., T.R. Shackleton, J. Forster, J. Dini, A. Khan, M. Gumula, & I. Kubiszewski (2017). "Achieving the National Development Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs)

through Investment in Ecological Infrastructure: A Case Study of South Africa." *Ecosystem Services* 27: 253–60.

Curry, G. (2017). "Capitalism, Structural Crisis and Contemporary Social Movements: An Interview with Immanuel Wallerstein." *Critical Sociology* 43 (3): 331–35.

Daddow, O. (2019). "Global Britain™: The Discursive Construction of Britain's Post-Brexit World Role." *Global Affairs* 5 (1): 5–22.

Daily Mail (2021). "Covid-19: Anti-Vax Protesters Take Over Rome Targeting Draghi's Office." October 11.

Darian-Smith, E. (2015). "Global Studies—Handmaiden to Neoliberalism?" *Globalizations* 12 (2): 164–68.

Darian-Smith, E. (2019). "Decolonizing Global Studies." In M. Juergensmeyer, S. Sassen, & M.B. Steger, eds., *The Oxford Handbook of Global Studies*, 251–76. New York: Oxford University Press.

Darian-Smith, E., & P.C. McCarty (2017). *The Global Turn: Theories, Research Designs, and Methods for Global Studies*. Oakland: University of California Press.

Darian-Smith, E., & P.C. McCarty (2017). *The Global Turn: Theories, Research Designs, and Methods for Global Studies*. Oakland: University of California Press.

Darian-Smith, E.. (2017). "Thinking Globally: Reassessing the Fields of Law, Politics and Economics in the US Academy." *New Global Studies* 11 (3): 243–63.

Darian-Smith, E.. (2022). *Global Burning: Rising Antidemocracy and the Climate Crisis*. Palo Alto, CA: Stanford University Press.

Das, G. (2001). *India Unbound*. New York: Alfred A. Knopf.

Davies, M. (2022). *EcoLaw: Legality, Life, and the Normativity of Nature*. London: Routledge.

Davies, S.E., & B. Bennett (2016). "A Gendered Human Rights Analysis of Ebola and Zika: Locating Gender in Global Health Emergencies." *International Affairs* 92 (5): 1041–60.

Davies, S.E., A. Kamradt-Scott, & S. Rushton (2015). *Disease Diplomacy: International Norms and Global Health Security*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Davies, SE., S. Harman, R. Manjoo, M. Tanyang, and C. Wenham (2019). "Why It Must Be a Feminist Global Health Agenda." *Lancet* 393 (10171): 601–3.

Davis, F. (1977). "Nostalgia, Identity and the Current Nostalgia Wave." *Journal of Popular Culture* 11 (2): 414–24.

Davis, F. (1979). *Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia*. New York: Free Press.

Davis, J. (2012). *Terrorism in Africa: The Evolving Front in the War on Terror*. Lanham, MD: Lexington Books.

De Bengy Puyvallee, A., & K.T. Storeng (2022). "COVAX, Vaccine Donations, and the Politics of Global Vaccine Inequity." *Globalization and Health* 18: 26.

- Delbridge, R., & J.J. Sallaz (2015). "Work: Four Worlds and Ways of Seeing." *Organization Studies* 36 (11): 1449–62.
- Deming, W. (1982). *Out of the Crisis*. Cambridge, MA: MIT Press (reprinted in 2000).
- Deming, W.. (1994). *The New Economics for Industry, Government & Education*, 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press.
- Denzau, A.T., & D.C. North (1994). "Shared Mental Models: Ideologies and institutions." *Kyklos* 47 (1): 3–31.
- Denzau, A.T., & R.K. Roy (2017). "Mental Models of Development." In P.B. Battersby & R.K. Roy, eds., *International Development: A Global Perspective on Theory and Practice*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Derrida, J. (1994). *Specters of Marx, The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International*. New York: Routledge.
- DeVega, C. (2021). "Six Months Later: What Have We Learned from Jan. 6? Not Enough to Stop It from Happening Again." *Salon*, July 9.
- Dietze, C. (2016). *Die Erfindung des Terrorismus in Europa, Russland und den USA 1858–1866*. Hamburger Edition.
- Dougall, A. (2023). "Shrinking Planet, Expanding Imaginary: The Imperial Press System and the Idea of Greater Britain." *International Relations* 37 (1): 48–71.
- Douglas, S.J., & A. McDonnell (2019). *Celebrity: A History of Fame*. New York: New York University Press.
- Drayton, R., & D. Motadel (2018). "Discussion: The Futures of Global History." *Journal of Global History* 13 (1): 1–21. <https://doi.org/doi:10.1017/S1740022817000262>.
- Dreher, A. (2006). "Does Globalization Affect Growth? Evidence from a New Index of Globalization." *Applied Economics* 38 (10): 1091–1110.
- Dreher, A., N. Gaston, & P. Martens (2008). *Measuring Globalisation—Gauging Its Consequences*. New York: Springer.
- Duden, B. (1993). *Disembodying Women: Perspectives on Pregnancy and the Unborn*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Duncombe, C., & T. Dunne (2018). "After Liberal World Order." *International Affairs* 94 (1), 125–42.
- Durand, C. (2017). *Fictitious Capital: How Finance Is Appropriating Our Future*. London: Verso.
- Durante, T. (2023). "Global Iconology: Analyzing and Interpreting Cultural Transformations under Present Conditions." In *Peirce Studies* 11. Berlin: Peter Lang (forthcoming).
- Durante, T. (n.d.). *The Visual Archive Project of the Global Imaginary* (online database).
- Durante, T.. (2021). *The Global and the Visual: UCSB Global Studies Colloquium* (video). YouTube.
- Ecker, E. (2022). "Breaking Down Global Estimates of Human Trafficking: Human Trafficking Awareness Month 2022." *Human Trafficking Institute*, January 12.

- Edmonds, P. (2009). "'I Followed England Round the World': The Rise of Trans-Imperial Anglo-Saxon Exceptionalism, and the Spatial Narratives of Nineteenth-Century British Settler Colonies of the Pacific Rim." In L. Boucher, J. Carey, & K. Ellinghaus, eds., *Re-Orienting Whiteness*, 99–115. New York: Palgrave Macmillan.
- Ehrman, B.D. (2018). *The Triumph of Christianity: How a Forbidden Religion Swept the World*. New York: Simon & Schuster.
- Eisenstein, E.L. (1968). "Some Conjectures about the Impact of Printing on Western Society and Thought: A Preliminary Report." *Journal of Modern History* 40 (1): 1–56.
- Eitzen, D.S. (2009). "Upward Mobility through Sport? Myths and Realities." In D.S. Eitzen, ed., *Sport in Contemporary Society: An Anthology*, 8th ed., 249–56. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
- Ellmers, B. (2021). "IMF Special Drawing Rights: Exiting the COVID-19 Crisis via a Historical Cash Injection?" *Global Policy Forum*.
- Elmandjra, M. (2000). "The Need for a 'Deglobalization' of 'Globalization.'" In C. Pierson & S. Tormey, eds., *Politics at the Edge: The PSA Yearbook 1999*, 29–39. Basingstoke: Macmillan.
- Epple, A. (2012). "Globalisierung/en." *Docupedia-Zeitgeschichte*, June 11. <https://docupedia.de/zg/Globalisierung>.
- Epstein, P.R. (2005). "Climate Change and Human Health." *New England Journal of Medicine* 353 (14): 1433–36.
- Esser, D.E., & J. Mittelman (2017). "Transdisciplinarity." *School of International Service Research Paper* no. 2017-3.
- Esser, D.E., & J.H. Mittelman (2020). "Globalization Narratives and Industrial Policies." In A. Oqubay, C. Cramer, H. Chang, & R. Kozul-Wright, eds., *Oxford Handbook of Industrial Policy*, 284–310. Oxford: Oxford University Press.
- Esson, J. (2013). "A Body and a Dream at a Vital Conjuncture: Ghanaian Youth, Uncertainty and the Allure of Football." *Geoforum* 47: 84–92.
- Falk, R.A. (1999). *Predatory Globalization: A Critique*. Cambridge: Polity Press
- Fanon, F. (1968). *Black Skins, White Masks*. New York: Grove Press.
- Farmer, P. (1995). *Medicine and Liberation Theology*. *America: The Jesuit Review*, July 15.
- Farmer, P. (1999). *Infections and Inequalities: The Modern Plagues*. Berkeley: University of California Press.
- Farrell, H., & A. Newman (2020). "This Is What the Future of Globalization Will Look Like." *Foreign Policy*, July 4.
- Farrell, H., & A. Newman (2020). "Will the Coronavirus End Globalization as We Know It? The Pandemic Is Exposing Market Vulnerabilities No One Knew Existed." *Foreign Affairs*, March 16.
- Faulkner, W. (1951). *Requiem for a Nun*. New York: Random House.

- Featherstone, M. (2020). "Problematizing the Global: An Introduction to Global Culture Revisited." *Theory, Culture & Society* 37 (7–8): 157–67.
- Febvre, L., & H.-J. Martin ([1976] 2010). *The Coming of the Book: The Impact of Printing, 1450–1800*. Translated by D. Gerard. London: Verso.
- Federal Reserve Bank of St. Louis (n.d.). "All Employees, Manufacturing." FRED Economic Data.
- Federal Reserve Bank of St. Louis (n.d.). "Private Fixed Investment in Information Processing Equipment and Software." Economic Research. See continuously updated data in graph, U.S. Bureau of Economic Analysis.
- Feffer, J. (2019). "'Slowbalisation': Will the Slowing Global Economy Be a Boon or Bane?" *Business Standard*, August 21.
- Ferro, M. (1997). *Colonization: A Global History*. London: Routledge.
- Figge, L., & P. Martens (2014). "Globalisation Continues: The Maastricht Globalisation Index Revisited and Updated." *Globalizations* 11 (6): 875–93.
- Figiel, S. (1996). *Where We Once Belonged*. Auckland: Pasifika Press.
- Finney, B., et al. (1995). *Voyage of Rediscovery: A Cultural Odyssey through Polynesia*. Berkeley: University of California Press.
- Firebaugh, G. (2000). "Observed Trends in Between-Nation Income Inequality and Two Conjectures." *American Journal of Sociology* 106 (1): 215–21.
- Fischer, J.L., & Y. Ville (2009). "Fetal Facebook: Historical Representations of the Fetus between Art and Science." *Ultrasound in Obstetrics and Gynecology* 33: 1–4.
- Fitzpatrick, K. (2013). "Brown Bodies, Racialisation and Physical Education." *Sport, Education and Society* 18 (2): 135–53.
- Flew, T. (2018). "Post-Globalisation." *Javnost—The Public* 25 (1/2): 102–9.
- Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class*. New York: Basic Books.
- Flynn, D.O., & A. Giráldez (1995). "Born with a 'Silver Spoon': The Origin of World Trade in 1571." *Journal of World History* 6 (2): 201–21.
- Flynn, D.O., & A. Giráldez. (2008). "Born Again: Globalization's Sixteenth Century Origins (Asian/Global versus European Dynamics)." *Pacific Economic Review* 13 (3): 359–87.
- Fong, V.K. (2020). "Imagining the Future from History: The Tang Dynasty and the 'China Dream.'" In Y. Chan & F. Chen, eds., *Alternative Representations of the Past: The Politics of History in Modern China*, 149–72. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Forbes (2022). "#16—America's Self-Made Woman (2022)." *Forbes Profile: Kim Kardashian*.
- Forbes, J.D. (2001). "Indigenous Americans: Spirituality and Ecos." *Dedalus* 130 (4): 283–300. Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish*. New York: Vintage Books.
- Ford, M. (2015). *The Rise of the Robots*. New York: Basic Books.

- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. New York: Vintage Books.
- Framke, M. (2013). *Delhi-Rom-Berlin: Die indische Wahrnehmung von Faschismus und Nationalsozialismus 1922–1939*. Darmstadt: wbg Academic.
- Franklin, S., C. Lury, & J. Stacey (2000). *Global Nature, Global Culture*. London: Sage.
- Franks, J. (2000). *Crossing Sidelines, Crossing Cultures: Sport and Asian Pacific American Cultural Citizenship*. Lanham, MD: University Press of America.
- Franks, J. (2002). *Hawaiian Sports in the Twentieth Century*. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
- Grainger, A. (2011). "Migrants, Mercenaries, and Overstayers: Talent Migration in Pacific Islands"
- Freyer, L. (2021). "The World's Largest Vaccine Maker Took a Multimillion Dollar Pandemic Gamble." NPR, March 18.
- Friedman, J. (2014). Interview. *Globalizations*, 11 (4): 515–26.
- Friedman, T.L. (2005). *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Frier, S. (2020). *No Filter: The Inside Story of Instagram*. New York: Simon & Schuster.
- Fuchs, C. (2022). "Digital Alienation." In *Digital Capitalism: Media, Communication and Society III*, 207–8. New York: Routledge.
- Fuchs, C. (2014). *Social Media: A Critical Introduction*. Los Angeles: Sage.
- Fuchs, C. (2021). *Digital Capitalism: Media, Communication and Society*. Abingdon: Routledge.
- Fukuyama, F. (2011). "A Conversation with Francis Fukuyama on the Origin of the Political Order." Carnegie Endowment for International Peace, June 6.
- Fusheng, L. (2019). "Volvo's China-Made SUVs Exported to European Market." *China Daily*, July 8.
- Gandhi, L. (1998). *Postcolonial Theory: A Critical Introduction*. New York: Columbia University Press.
- Gerhardt, V. (2012). *Öffentlichkeit: Die Politische Form des Bewusstseins*. München: C.H. Beck.
- Gänger, S. (2017). "Circulation: Reflections on Circularity, Entities, and Liquidity in the Language of Global History." *Journal of Global History* 12 (3): 303–18.
- Ganguly, S. (1997). "India in 1996: A Year of Upheaval." *Asian Survey* 37 (2): 126–35.
- GAO (General Accounting Office) (2011). *Federal Reserve System: Opportunities Exist to Strengthen Policies and Processes for Managing Emergency Assistance*. Washington, DC: GAO-11-696.
- Garcia, P.M. (2014). "From Eurocentrism to Sinocentrism: The New Challenges in Global History." *European Journal of Scientific Research* 119 (3): 337–52.
- GCIM (Global Commission on International Migration) (2005). "Migration in an Interconnected World: New Directions for Action."

- Georg, I., T. Blaschke, & H. Taubenböck (2016). "A Global Inventory of Urban Corridors Based on Perceptions and Night-Time Light Imagery." *International Journal of Geo-Information* 5 (233): 1–19. The Global Economy (n.d.). "China: Percent of World GDP."
- Getachew, A. (2019). *Worldmaking after Empire: The Rise and Fall of Self-Determination*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Ghobrial, J.-P.A. (2019). "Introduction: Seeing the World like a Microhistorian." *Past and Present* 242 (14): 1–22.
- Ghosh, A. (2016). *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ghosh, A. (2021). *The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gibbs, E.P.J. (2014). "The Evolution of One Health: A Decade of Progress and Challenges for the future." *Veterinary Record* 174 (4): 85–91.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Gilio-Whitaker, D. (2019). *As Long as Grass Grows: The Indigenous Fight for Environmental Justice, from Colonization to Standing Rock*. Boston: Beacon Press, 2019.
- Gills, B., ed. (2008). *Globalization and the Global Politics of Justice*. London: Routledge.
- Gills, B.K., & W.R. Thompson (2006). *Globalization and Global History*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203799475>.
- Gleicher, N., V.A. Kushnir, & D.H. Barad (2019). "Worldwide Decline of IVF Birth Rates and its Probable Causes." *Human Reproduction Open*, 1–7.
- Glissant, E. (1997). *Poetics of Relation*. Translated by B. Wing. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Gobe, E. (2010). "The Gafsa Mining Basin between Riots and a Social Movement: Meaning and Significance of a Protest Movement in Ben Ali's Tunisia." *HAL Open Science*, 1–21.
- Goldin, I., & R. Muggah (2020). "Why the World Needs Better—Not Less—Globalization." *World Economic Forum*, December 16.
- Gong, S., & L. Bao (2018). "The Battle against SARS and MERS Coronaviruses: Reservoirs and Animal Models." *Animal Models and Experimental Medicine* 1 (2): 125–33.
- Goodburn, C. (2014). "The End of the Hukou System? Not Yet." Chinese Policy Institute, Policy Paper no. 2.
- Goody, J. (1986). *The Logic of Writing and the Organization of Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gostin, L.O., et al. (2020). "US Withdrawal from WHO Is Unlawful and Threatens Global and US Health and Security." *Lancet* 396 (10247): 293–95.

- Government of Saudi Arabia (2019). Hajj Statistics, 2019–1440.
- Grainger, A.D., M. Falcous, & J.I. Newman (2012). "Postcolonial Anxieties and the Browning of New Zealand Rugby." *The Contemporary Pacific* 24 (2): 267–95. www.jstor.org/stable/23725603.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart.
- Graves, R. (2017). *The Greek Myths: The Complete and Definitive Edition*. London: Penguin Books.
- Grusin, R., ed. (2015). *The Nonhuman Turn*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Gruzinski, S. (2002). *The Mestizo Mind: The Intellectual Dynamics of Colonization and Globalization*. Translated by D. Dusinberre. New York: Routledge.
- Gu, Z. (2018). "Nostalgia in the Context of 'the Belt and Road Initiative': An Analysis of a Chinese Documentary: Maritime Silk Road." *Journal of Contemporary Eastern Asia* 17 (1):
- Guarascio, F., T. Hunnicutt, & S. Nebehay (2022). "Exclusive: US Opposes Plans to Strengthen World Health Organization." *Reuters*, January 22.
- Guha, R. (2007). *India after Gandhi: The History of the World's Largest Democracy*. New York: Harper Collins.
- Guinness, D., & N. Besnier (2016). "Nation, Nationalism, and Sport: Fijian Rugby in the Local-Global Nexus." *Anthropological Quarterly* 89 (4): 1109–41.
- Gul, S. (2021). "'Make America Great Again': From Neoliberalism to Nihilist Nostalgia in Superior Donuts and Good People." *Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences* 15 (1): 17–36.
- Gygli, S., F. Haelg, N. Potrafhe, & J. Sturm (2019). "The KOF Globalisation Index—Revisited." *Review of International Organizations*.
- Gygli, S., F. Haelg, N. Potrafhe, & J.-E. Sturm (2018). "The KOF Globalisation Index—Revisited." *CESifo Working Paper no. 7430*.
- Haass, R. (2019). "How a World Order Ends: And What Comes in Its Wake." *Foreign Affairs*, January
- Haass, R. (2021). "The Age of America First: Washington's Flawed New Foreign Policy Consensus." *Foreign Affairs*, November/December.
- Habermas, J. (1984–87). *The Theory of Communicative Action*. 2 vols. Translated by T. McCarthy. Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1989a). "The Public Sphere: An Encyclopedia Article." In S.E. Bronner and D.M. Kellner, eds., *Critical Theory and Society: A Reader*. New York: Routledge.
- Habermas, J. (1989b). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Translated by T. Burger, with the assistance of F. Lawrence. Cambridge, MA: MIT Press.
- Habermas, J. (2009). "Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Have Epistemic Dimensions? The Impact of Normative Theory on Empirical Research." In *Europe: The Faltering Project*, translated by C. Cronin, 138–83. Cambridge: Polity.

- Habermas, J.. (2021). "Überlegungen und Hypothesen zu einem erneuten Strukturwandel der politischen Öffentlichkeit." In M. Seeliger & S. Seignani, eds., *Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?*, 470–500. Baden-Baden: Nomos Verlag.
- Habicher, D. (2020). "Revise Globalization from a Postgrowth Perspective." *Global-e* 13 (40).
- Haelg, F. (2020). "The KOF Globalisation Index—A Multidimensional Approach to Globalisation." *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik* 240 (5): 691–96.
- Hammes, T.X. (2019). *Deglobalization and International Security*. New York: Cambria Press.
- Hamzawy, A., K. Sadjadpour, A.D. Miller, F. Wehrey, Z. Hassan, Y. Farouk, K. Khaddour, S. Yerkes, A. Coskun, M. Yahya, & M. Muasher (2022). "What the Russian War in Ukraine Means for the Middle East." *Carnegie Endowment for International Peace*, March 24.
- Hanieh, A. (2013). *Lineages of Revolt*. Chicago: Haymarket Books.
- Hannah, E, A. Roberts, & S. Trommer (2021). "Towards a Feminist Global Trade Politics." *Globalizations* 18 (1): 70–85.
- Hansen, V. (2015). *The Silk Road: A New History*. Oxford: Oxford University Press.
- Haouas, I., & M. Yagoubi (2008). "The Flexible Forms of Employment and Working Conditions: Empirical Investigation from Tunisia." *Working Paper Series*, 407. Cairo: Economic Research Forum.
- Haraway, D.J. (1990). *Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science*. London: Routledge.
- Haraway, D.J. (2008). *When Species Meet*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Hardt, M., & A. Negri (2000). *Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Harman, S. (2015). "15 Years of 'War on AIDS': What Impact Has the Global HIV/AIDS Response Had on the Political Economy of Africa?" *Review of African Political Economy* 42 (145): 467–76.
- Harman, S. (2016). "Ebola, Gender, and Conspicuously Invisible Women in Global Health Governance." *Third World Quarterly* 37 (3): 524–41.
- Harste, G. (2021). *The Habermas-Luhmann Debate*. New York: Columbia University Press.
- Harvey, D. (1989). *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Oxford: Blackwell.
- Harvey, D. (1989). *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Oxford: Blackwell.
- Harvey, D. (1990). "Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imagination." *Annals of the Association of American Geographers* 80 (3): 418–34.
- Harvey, D. (1990). *The Condition of Postmodernity*. Oxford: Blackwell.
- Harvey, D. (2007). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.

- Hasegawa, Y. (2016). *The New Sensorium: Exiting from Failures of Modernization*. ZKM, March–September.
- Hassan, R. (2020). *The Condition of Digitality: A Post-Modern Marxism for the Practice of Digital Life*. London: University of Westminster Press.
- Hassan, R., & T. Sutherland (2017). *Philosophy of Media*. New York: Routledge.
- Hau'ofa, E. (1994). "Our Sea of Islands." *The Contemporary Pacific*, 6 (1): 148–61.
- Hawkes, S., & K. Buse (2013). "Gender and Global Health: Evidence, Policy, and Inconvenient Truths." *Lancet* 381 (9879): P1783–87.
- Hayes, J., & K. Weber (2021). "Globalization, Deglobalization and Human Security: The Case of Myanmar." *International Affairs* 97 (5): 1469–88.
- Hebron, L., & J.F. Stack Jr. (2017). *Globalization: Debunking the Myths*, 3rd ed. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Hedinger, D. (2021). *Die Achse: Berlin-Rom-Tokio 1919–1946*. München: C.H. Beck.
- Hekman, S. (1999). "Background and Riverbeds: Feminist Reflections." *Feminist Studies* 25 (2): 427–48.
- Held, D., A. McGrew, D. Goldblatt, & J. Perraton (1999). "Globalization." *Global Governance* 5 (4): 483–96.
- Held, D., A. McGrew, D. Goldblatt, & J. Perraton (1999). *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Held, D., A. McGrew, D. Goldblatt, & J. Perraton. (2000). "Global Transformations: Politics, Economics and Culture." In C. Pierson & S. Tormey, eds., *Politics at the Edge*. Political Studies Association Yearbook Series. London: Palgrave Macmillan.
- Herren, M. (2009). *Internationale Organisationen seit 1865: Eine Globalgeschichte der internationalen Ordnung*. Darmstadt: wbg Academic.
- Heungchong, K. (2020). "Deglobalization, Global Value Chains, and International Cooperation in a Time of Defragmentation: Expert Opinions." *Valdai Club*, October 14.
- Hill, C., & M. Helmes (2004). *Defining Visual Rhetorics*. New York: Routledge.
- Hillebrand, E. (2010). "Deglobalization Scenarios: Who Wins? Who Loses?" *Global Economy Journal* 10 (2): 185–97.
- Hizi, G. (2019). "Speaking the China Dream: Self-Realization and Nationalism in China's Public-Speaking Shows." *Continuum* 33 (1): 37–50.
- Hobsbawm, E. (2007) *Globalisation, Democracy, and Terrorism*. London: Little Brown.
- Hobsbawm, E.J. (1997). *The Age of Empire, 1875–1914*. New York: Vintage Books.
- Hochstadt, S. (1999). *Mobility and Modernity: Migration in Germany, 1820–1889*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

- Hoehn, A.R., A. Parasiliti, S. Efron, S. Strongin (2018). "Discontinuities and Distractions—Rethinking Security for the Year 2040." RAND Corporation.
- Hoffman, T. (2014). *Al Qaeda Declares War: The African Embassy Bombings and America's Search for Justice*. Lebanon: ForeEdge.
- Hokowhitu, B. (2005). "Rugby and Tino Rangatiratanga: Early Maori Rugby and the Formation of Traditional' Maori Masculinity." *Sporting Traditions* 21 (2): 75.
- Holton, R. (2011) *Globalization and the Nation State*, 2nd ed. Basingstoke: Macmillan.
- Homolar, A. (2015). "Human Security Benchmarks: Governing Human Wellbeing at a Distance." *Review of International Studies* 41: 843–63.
- Hooghe, L., T. Lenz, & G. Marks (2019). "Contested World Order: The Delegitimation of International Governance." *Review of International Organizations* 14: 731–43.
- Hotez, P.J. (2021). *Preventing the Next Pandemic: Vaccine Diplomacy in a Time of Anti-Science*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Huang, P. (2020). "How Will the US and WHO Fare without Each Other?" NPR, June 5.
- Huang, Y. (2021). "Vaccine Diplomacy Is Paying Off for China." *Foreign Affairs*, March 11.
- Huber, V. (2010). "Multiple Mobilities: Über den Umgang mit verschiedenen Mobilitätsformen um 1900." *Geschichte Und Gesellschaft* 36 (2): 317–41.
- Huber, V. (2012). "Connecting Colonial Seas: The 'International Colonisation' of Port Said and the Suez Canal during and after the First World War." *European Review of History* 19 (1): 141–61.
- Hudson, M. (2003). *Superimperialism: The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance*. London: Pluto Press.
- Hujo, K., & N. Piper, eds. (2010). *South–South Migration: Implications for Social Policy and Development*. London: Palgrave Macmillan.
- Human Rights Council (2019). "Visit to Tunisia: Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief." October 3. United Nations.
- Human, J.H. (2021). "African Countries Continue to Have the Highest Poverty Rates in the World." *Development Aid*, February 25.
- Hung, H. (2016). *The China Boom: Why China Will Not Rule the World*. New York: Columbia University Press.
- Hunt, L. (2014). *Writing History in the Global Era*. New York: W.W. Norton.
- ICAO (2020). "The World of Air Transport in 2019" (annual report).
- Ighobor, K. (2015). "Sustainable Development Goals Are in Sync with Africa's Priorities." *Africa Renewal* 29 (3): 3–5.
- Ikenberry, G.J. (2018b). "Why the Liberal World Order Will Survive." *Ethics & International Affairs*, 32 (1): 17–29.

- Ikenberry, G.J. (2018a). "The End of the Liberal International Order?" *International Affairs*, 94: 17–23.
- ILO (International Labour Organization) (2019). *The Challenge of Job Recovery; World Employment and Social Outlook: Trends 2019*. Geneva: United Nations. Retrieved October 14, 2021,
- IMF (International Monetary Fund) (2022). "IMF Staff Reaches Staff-Level Agreement on an Extended Fund Facility with Tunisia." October 15.
- Ingold, T., & G. Palsson (2013). *Biosocial Becomings: Integrating Social and Biological Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Inhorn, M.C. (2011). "Globalization and Gametes: Reproductive 'Tourism,' Islamic Bioethics, and Middle Eastern Modernity." *Anthropology & Medicine* 18 (1): 87–103.
- Inikori, J.E. (2007). "Africa and the Globalization Process: Western Africa, 1450–1850." *Journal of Global History* 2 (1): 63–86.
- International Republican Institute (2017). "Public Opinion Survey of Tunisia." April 19–26.
- IOM (International Organization for Migration) (2015). *World Migration Report 2015*.
- IOM (International Organization for Migration). (2020). *World Migration Report 2020*.
- IOM (International Organization for Migration). (2022). *World Migration Report 2022*.
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2022). "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability." United Nations.
- Irwin, G. (1992). *The Prehistoric Exploration and Colonisation of the Pacific*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Itkowitz, C. (2020). "Trump Again Uses Racially Insensitive Term to Describe Coronavirus." *Washington Post*, June 23.
- Ivanov, I. (2019). "Russian Foreign Policy Moving into 2020: Today's Achievements and Tomorrow's Challenges." *The Moscow Times*, December 2.
- Izuzquiza Otero, I. (2013). *La Sociedad sin Hombres: Niklas Luhmann o la Teoría como Escandalo*. Barcelona: Anthropos.
- Jackson, S.J., & B. Hokowhitu (2002). "Sport, Tribes, and Technology: The New Zealand All Blacks Haka and the Politics of Identity." *Journal of Sport and Social Issues* 26 (2): 125–39.
- James, H. (2001). *The End of Globalization: Lessons from the Great Depression*. Cambridge: Cambridge University Press.
- James, H. (2017). "Deglobalization as a Global Challenge." CIGI Paper, no. 135, pp. 1–11.
- James, H. (2018). "Deglobalization: The Rise of Disembedded Unilateralism." *Annual Review of Financial Economics* 10: 219–37.
- James, H. (2021). "Globalization's Coming Golden Age: Why Crisis Ends in Connection." *Foreign Affairs*, May/June.

- James, P., & M.B. Steger (2014). "A Genealogy of 'Globalization': The Career of a Concept." *Globalizations* 11 (4): 417–34.
- James, P., & M.B. Steger (2014). "A Genealogy of 'Globalization': The Career of a Concept." *Globalizations* 11 (4): 417–34.
- James, P., & M.B. Steger (2021). "Globalization in Question: Why Does Engaged Theory Matter?" *Globalizations* 18 (5): 794–809.
- Jamet, R. (2018b). "KOF Globalisation Index: Globalisation Lull Continues."
- Jamet, R. (2018c). "KOF Globalisation Index: Method of Calculation." Eidgenössische Technische Hochschule Zürich.
- Jamet, R. (2020). "The Promises and Pitfalls of Algorithmic Governmentality." *Global-e* 13 (67).
- Jaud, M, & C. Freund (2015). *Champions Wanted: Promoting Exports in the Middle East and North Africa*. Directions in Development. Washington, DC: World Bank Group.
- Jecker, N.S., & C.A. Atuire (2021). "What's Yours Is Ours: Waiving Intellectual Property Protections for COVID-19 Vaccines." *Journal of Medical Ethics* 47 (9): 595–98.
- Jiangxi TV Station (2020). "The China-Europe Freight Train for Volvo Returns to Normal." April 8.
- Johns, A. (1998). *The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making*. Chicago: University of Chicago Press.
- Johnson, E.M. (1982). "Notes: Delphos of Delphi." *Journal of Negro History* 67 (3): 279–82.
- Joly, J. (2021). "Far-Right Leaders Arrested at Large Protest in Italy over COVID Passes." Euronews, October 9.
- Jones, G. (2005). *Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to the Twenty First Century*. New York: Oxford University Press.
- Jun, X., & L. Xuanmin (2021). "Agricultural Trade between China and Laos to Double after Rail Link Opens." *Global Times*, December 1.
- Ka'ili, T.O. (2017). *Marking Indigeneity: The Tongan Art of Sociospatial Relations*. Tucson: University of Arizona Press.
- Kaiser Family Foundation (2023). "US International COVID-19 Vaccine Donations Tracker."
- Kamen, H. (1986). *European Society, 1500–1700*. London: Hutchinson.
- Kanet, R. (2018). "Russia and Global Governance: The Challenge to the Existing Liberal Order." *International Politics* 55 (2): 177–88.
- Kapenawa, D., & B. Albert (2013). *The Falling Sky: Words of a Yanomami Shaman*. Translated by N. Elliott & A. Dundy. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Karshenas, M., V.M. Moghadam, & R. Alami (2014). "States and Social Rights: Social Policy after the Arab Spring." *World Development* 64: 726–39.

- Karunaratne, N.D. (2012). "The Globalization-Deglobalization Policy Conundrum." *Modern Economy* 3 (4): 373–83.
- Kauffman, D., D. Lin, K. Sneader, O. Tonby, & J. Woetzel (2016). "Overcoming Global Turbulence to Reawaken Economic Growth." McKinsey & Company, September.
- Kaul, R. (2015). "Gender Inequality: Challenges of Educating the Girl Child." *Social Change* 45 (2): 224–33.
- Kay, A., & O. Williams (2009). *Global Health Governance: Crisis, Institutions, and Political Economy*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Kearney, A.T. / *Foreign Policy* (2001). "Measuring Globalization." *Foreign Policy* 122 (January–February): 56–65.
- Keller, J.E. (2007). "Africa in Transition: Facing the Challenges of Globalization." *Harvard International Review* 29 (2): 46–52.
- Kennedy, D. (2021). "The Dream of Greater Britain." *Historical Reflections/Réflexions Historiques* 47 (2): 105–17.
- Key, V.O., Jr. (1961). *Public Opinion and American Democracy*. New York: Alfred A. Knopf.
- Kibria, N. (2008). "The 'New Islam' and Bangladeshi Youth in Britain and the US." *Ethnic and Racial Studies* 31 (2): 243–66.
- Kieh, G.K., Jr. (2009). "The State and Political Instability in Africa." *Journal of Developing Societies* 25 (1): 1–25.
- Kiernan, S., S. Tohme, & G. Song (2021). "Billions Committed, Millions Delivered." *Think Global Health*, December 2.
- Kim, H.-M., P. Li, & Y.R Lee (2020). "Observations of Deglobalization against Globalization and Impacts on Global Business." *International Trade, Politics and Development*, 4 (2): 83–103.
- Kimmerer, R.W. (2013). *Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants*. Minneapolis: Milkweed Editions.
- Kindra, J., & J. Wasswa-Mugambwa (2015). "MDGs: An Assessment of Africa's Progress." *Africa Renewal* 3: 20–32.
- Kirby, J. (2021). "The Coup in Sudan, Explained." *Vox*, October 29.
- Kirch, P.V., & R.C. Green (2001). *Hawaiki, Ancestral Polynesia: An Essay in Historical Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kissinger, H. (2014). *World Order*. New York: Penguin Press.
- Klein, N. (2002). *No Logo: No Space, No Choice, No Jobs*. New York: Picador. Komlosy, A. (2011). *Globalgeschichte. Methoden und Theorien*. Böhlau Verlag.
- Kluver, R., & W. Fu (2004). "The Cultural Globalization Index." *Foreign Policy*, February 10.

- Knight, D.M. (2017). "Anxiety and Cosmopolitan Futures: Brexit and Scotland." *American Ethnologist* 44 (2): 237–42.
- Kochtcheeva, L.V. (2020a). "The Implosion of Global Liberal World Order and Russian Foreign Policy: Dimensions, Tensions, and Prospects." *Vestnik RUDN/International Relations* 20 (3): 463–75.
- Kochtcheeva, L.V. (2020b). *Russian Politics and Response to Globalization*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Koegler, C., P.K. Malreddy, & M. Tronicke (2020). "The Colonial Remains of Brexit: Empire Nostalgia and Narcissistic Nationalism." *Journal of Postcolonial Writing* 56 (5): 585–92.
- Kohn, E. (2013). *How Forests Think: Toward an Anthropology beyond the Human*. Berkeley: University of California Press.
- Kolbi, M. (2021). "What Is Globalization?" Peterson Institute for International Economics, August 26 update.
- Kornprobst, M., & J. Wallace (2021). "What Is De-globalization?" Chatham House, October 18.
- Kornprobst, M., & J. Wallace (2021). "What Is Deglobalization?" Chatham House, October 18.
- Kortunov, A. (2020a). "Mnogostronnost nado ne vosstanavlivat, a izobretat zanovo" [Multilateralism should not be revived but rather reinvented]. Russian International Affairs Council.
- Kortunov, A.. (2020b). "The World Order Crisis and the Future of Globalization." Russian International Affairs Council.
- Koselleck, R. (1982). "Krise." In O. Brunner, W. Conze, & R. Koselleck, eds., *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*. Band 3: H-Me 3: 617–50. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Krishna, S. (2012). "Decolonizing International Relations." *E-International Relations*, October 8.
- Krzykawska, A., & A. Żur (2020). "Key Factors Hindering the Development of Education." *Przedsiębiorczość—Edukacja* 16 (2): 334–44.
- Kukla, R. (2004). *Mass Hysteria: Medicine, Culture and Mother's Bodies*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- LaFrance, A. (2021). "The Largest Autocracy on Earth." *The Atlantic*, September 21.
- Lakemann, T., J. Lay, & T. Tafese (2020). "Africa after the Covid-19 Lockdowns: Economic Impacts and Prospects." *GIGA Focus Afrika* 6: 1–14.
- Lakisa, D., D. Adair, & T. Taylor (2014). "Pasifika Diaspora and the Changing Face of Australian Rugby League." *The Contemporary Pacific* 26 (2): 347–67.
- Lakisa, D., K. Teaiwa, D. Adair, & T. Taylor (2019). "Empowering Voices from the Past: The Playing Experiences of Retired Pasifika Rugby League Athletes in Australia." *International Journal of the History of Sport* 36 (12): 1096–114.
- Larik, J. (2018). "The EU's Global Strategy, Brexit and 'America First.'" *European Foreign Affairs Review* 23 (3): 343–64.

- Latonero, M., & P. Kift (2018). "On Digital Passages and Borders: Refugees and the New Infrastructure for Movement and Control." *Social Media + Society* 4 (1): 1–11.
- Latouche, S. (1989). *L'Occidentalization du monde: Essai sur la signification, la portée et les limites de l'uniformisation planétaire*. Paris: La Découverte.
- Latour, B. (2018). *Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime*. Cambridge: Polity Press. Lowe, L. (2015). *The Intimacies of Four Continents*. Durham, NC: Duke University Press.
- Lechner, F.J. (2009). *Globalization: The Making of World Society*. Malden, MA: Wiley Blackwell. Livesey, F. (2017). *From Global to Local: The Making of Things and the End of Globalization*. New York: Vintage.
- Lemert, C.C. (2015). *Globalization: An Introduction to the End of the Known World*. London: Routledge.
- Marin, D. (2021) "Will Deglobalization Fuel Inflation?" Project Syndicate, November 2.
- Leonhard, J. (2020). "Keine Dichotomie: Zum Verhältnis von Nationalstaat und Globalisierung." *Forschung & Lehre* 27 (5): 412–13.
- Levinson, M. (2018). *U.S. Manufacturing in International Perspective (R42135)*. Congressional Research Service.
- Life Magazine (1965). Photographs by Lennart Nilsson. April 30.
- Lilomaiava-Doktor, S. (2009). "Samoan Transnationalism: Cultivating 'Home' and 'Reach.'" In H.M. Lee & S.T. Francis, eds., *Migration and Transnationalism: Pacific Perspectives*. Canberra: Australia National University E-Press.
- Lin, L. (2021). "Control and Consent in the Connected Age: The Work of Contractors on Transnational Online Education Platforms." *Socio-Economic Review* 19 (4): 1291–1313.
- Lin, L., & M.B. Steger (2022). "Sailing around the World or Sinking with the Ship? Disjunctive Globalization and Transnational Education Platforms." *Global Perspectives* 3 (2): 1–13.
- Link, S. (2018). "How Might 21st-Century De-Globalization Unfold? Some Historical Reflections." *New Global Studies* 12 (3): 343–65.
- Lippmann, W. (1993). *The Phantom Public*, with a new introduction by W.M. McClary. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Lockwood, B. (2004). "How Robust Is the Kearney/Foreign Policy Globalisation Index?" *World Economy* 27 (4): 507–23.
- Löffmann, G. (2020). "From the Obama Doctrine to America First: The Erosion of the Washington Consensus on Grand Strategy." *International Politics* 57 (4): 588–605.
- Lu, H., I.T. Kandilov, & R. Zhu (2020). "The Impact of Internal Migration on the Health of Rural Migrants: Evidence from Longitudinal Data in China." *Journal of Development Studies* 56 (4): 840–55.
- Lucassen, L., & J. Lucassen (2009). "The Mobility Transition Revisited, 1500–1900: What Europe Can Teach Us about Global History." *Journal of Global History* 4 (4): 347–77.

- Luhmann, N. (1990). *Political Theory in the Welfare State*. Translated by J. Bednarz Jr. Berlin: Walter de Gruyter.
- Luhmann, N.. (2000). *The Reality of Mass Media*. Translated by K. Cross. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Luhmann, N.. (2012). *Theory of Society, 2*. Translated by R. Barrett. Stanford, CA: Standford University Press.
- Lukyanov, F. (2020). "Nachat' s sebja i soboi zakonchit" [Start from yourself and finish with yourself]. *Russia in Global Affairs* 18 (1): 202–17.
- Lundin, S. (2015). *Organs for Sale: An Ethnographic Examination of the International Body Trade*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Macho, T. (2020). "Krisenzeiten: Zur Inflation eines Begriffs." *Geschichte der Gegenwart*, May 31. <https://geschichtedergegenwart.ch/krisenzeiten-zur-inflation-eines-begriffs/>.
- Macpherson, C., & L. Macpherson (2013). *The Warm Winds of Change: Globalisation and Contemporary Samoa*. Auckland: Auckland University Press.
- Madhok, A. (2021). "Globalization, De-Globalization, and Re-Globalization: Some Historical Context and the Impact of the COVID Pandemic." *Business Research Quarterly* 24 (3): 199–203.
- Maguire, J., & M. Falcous, eds. (2011). *Sport and Migration: Borders, Boundaries, and Crossings*. London: Taylor & Francis.
- Major, C., & N.V. Ondarza (2018). "No 'Global Britain' after Brexit: Leaving the EU Weakens UK Foreign and Security Policy, Closer Ties Remain in Germany's Interest."
- Mako, S., & V.M. Moghadam (2021). *After the Arab Uprisings: Progress and Stagnation in the Middle East and North Africa*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Makoni, M. (2020). "Africa Eradicated Wild Polio." *Lancet Microbe* 1 (6): e243.
- Malm, A. (2016). *Fossil Capital: The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming*. London: Verso.
- Mander, J. (2006). "Introduction: Globalization and the Assault on Indigenous Resources." In J. Mander and V. Tauli-Corpus, eds., *Paradigm Wars: Indigenous Peoples' Resistance to Globalization*, 3–10. San Francisco: Sierra Book Club.
- Manning, P. (2005). *Migration in World History*. London: Routledge.
- Manovich, L. (2017). *Instagram and Contemporary Image*. Manovich-Net.
- Marcos, S. (1997). "The Fourth World War Has Begun." *Le Monde diplomatique*, September.
- Marcus, S. (2011). "Barbara Walters Tells Kardashian Family: 'You Have No Talent.'" *Huffington Post.*, December 15.
- Marois, T. (2017). "TiSA and the Threat to Public Banks." *Transnational Institute*, April 21.

- Martens, P., M. Caselli, P. de Lombaerde, L. Figge, & J.A. Scholte (2015). "New Directions in Globalization Indices." *Globalizations* 12 (2): 217–28.
- Martill, B., & A. Rogstad (2019). "The End of Consensus? Folk Theory and the Politics of Foreign Policy in the Brexit Referendum." *Global Affairs* 5 (4–5): 347–67.
- Marx, Karl ([1867] 1990). *Capital Volume I*. London: Penguin.
- Massoud, A., & N. Lee (2021). "The Future of Globalization." Center for Global Development, October 8.
- Matta, S., S. Appleton, & M. Bleaney (2016). "The Impact of the Arab Spring on the Tunisian Economy." Policy Research Working Paper, World Bank Group, 7856.
- Maverick, J.B. (2020). "How Big Is the Derivatives Market?" Investopedia.
- Mayaki, I. (2013). "The Importance of Infrastructure Development." *The Thinker* 59: 64–65.
- Mayne, M. (2018). "White Nationalism and the Rhetoric of Nostalgia." In L. Zhang & C. Clark, eds., *Affect, Emotion, and Rhetorical Persuasion in Mass Communication*, 81–92. London: Routledge, 2018.
- Mazlish, B., & A. Iriye, eds. (2005). *The Global History Reader*. New York: Routledge.
- McAfee A., & E. Brynjolfsson (2012). "Big Data: The Management Revolution." *Harvard Business Review*, October.
- McDonald, B., & L. Rodriguez (2014). "'It's Our Meal Ticket': Pacific Bodies, Labour and Mobility in Australia." *Asia Pacific Journal of Sport and Social Science* 3 (3): 236–49.
- Mckenzie, L. (2017). "The Class Politics of Prejudice: Brexit and the Land of No-hope and Glory." *The British Journal of Sociology* 68 (S1): S265–80.
- McKeown, A. (2004). "Global Migration, 1846–1940." *Journal of World History* 15 (2): 155–89. Ohmae, K. (1989). "Managing in a Borderless World." *Harvard Business Review*, May–June.
- McLachlan, S. (2022). "35 Instagram Stats That Matter to Marketers in 2022." Hootsuite.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: An Inventory of Effects*. New York: McGraw Hill.
- Mearsheimer, J.J. (2018). *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Megerisi, T. (2021). "Back from the Brink: A Better Way for Europe to Support Tunisia's Democratic Transition." *European Council on Foreign Relations Policy Brief*, 403.
- Memmi, A. (1965, expanded ed. 1991). *The Colonizer and the Colonized*. Boston: Beacon Press.
- Mendieta, E. (2019). "Public Sphere." In A. Allen & E. Mendieta, eds., *The Cambridge Habermas Lexicon*, 356–63. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mendieta, E. (2021). "From the Paperback to the Ebook: Lifelong Learning in the Age of the Internet." In UNESCO, eds., *Embracing a Culture of Lifelong Learning: Transdisciplinary Perspectives on the Futures of Lifelong Learning*, 1–9. Hamburg, Germany: UNESCO Institute for Lifelong Learning.

- Mendieta, E. (2020). "Critique of Decolonial Reason: On the Philosophy of the Calibans." *Graduate Faculty Philosophy Journal* 41 (1): 127–54.
- Menke, D.J., & M.-L. Germany (2019). "Reconstructing Athletic Identity: College Athletes and Sport Retirement." *Journal of Loss and Trauma* 24 (1): 17–30.
- Merrick, H. (2017). "Naturecultures and Feminist Materialism." In Sherilyn MacGregor, ed., *Routledge Handbook of Gender and Environment*, 101–14. New York: Routledge.
- Metcalf, S. (2017). "Neoliberalism: The Idea That Swallowed the World." *The Guardian*, August 18.
- Mezzedra, S., & B. Neilson (2013). "Global Crisis and the Politics of Operations." *Radical Philosophy* 178..
- Michalopoulos, S., & E. Papaioannou (2016). "The Long-Run Effects of the Scramble for Africa." *American Economic Review* 106 (7): 1802–48.
- Middell, M., & U. Engel, eds. (2010). *Theoretiker der Globalisierung*. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. Morus, I.R. (2000). "'The Nervous System of Britain': Space, Time and the Electric Telegraph in the
- Mignolo, W.D. (2011). "(De) Coloniality at Large: Time and the Colonial Difference." In *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*, 49–180. Durham, NC: Duke University Press.
- Mignolo, W.D. (2003). *Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking*, 2nd printing with a new foreword. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Mignolo, W.D. (2010). "Epistemic Disobedience, Independent Thought and Decolonial Freedom." *Theory, Culture & Society* 26 (7–8): 159–81.
- Mignolo, W.D. (2018a). "Foreword: On Pluriversality and Multipolarity." In B. Reiter., ed., *Constructing the Pluriverse*, ix–xv. Durham, NC: Duke University Press.
- Mignolo, W.D. (2018b). "Pluriversality and Multipolar World Order." In B. Reiter, ed., *Constructing the Pluriverse*, 90–116. Durham, NC: Duke University Press.
- Mignolo, W.D., & C.E. Walsh (2018). *On Decoloniality: Concepts, Analytics, Practice*. Durham, NC: Duke University Press.
- Miller, T., G.A. Lawrence, J. McKay, & D. Rowe (2001). *Globalization and Sport: Playing the World*. London: Sage.
- Millingen, J.G. (1839) *Curiosities of Medical Experience*, 2nd ed. London: Richard Bentley.
- Mintchev, N. (2021). "The Cultural Politics of Racism in the Brexit Conjuncture." *International Journal of Cultural Studies* 24 (1): 123–40.
- Mittelman, J.H. (2000). *The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Mittelman, J.H. (2004). *Whither Globalization? The Vortex of Knowledge and Ideology*. London: Routledge.

- Mittelman, J.H. (2011). *Contesting Global Order: Development, Global Governance, and Globalization*. Abingdon: Routledge.
- Mittelman, J.H. (2022). "The Power of Algorithmic Capitalism." *International Critical Thought* 12 (3): 448–69.
- Mlambo, V. (2018). "Exploitation Dressed in a Suit, Shining Shoes, and Carrying a Suitcase Full of Dollars: What Does China Want in Africa?" *Journal of Public Affairs* 9: 1–9.
- Moeller, H.-G. (2019). "Niklas Luhmann (1927–1998)." In A. Allen and E. Mendieta, eds., *The Cambridge Habermas Lexicon*, 601–4. Cambridge: Cambridge University Press.
- Moghadam, V.M. (1998). *Women, Work, and Economic Reform in the Middle East and North Africa*. Boulder: Lynne Rienner.
- Moghadam, V.M.. (2019). "Women and Employment in Tunisia: Structures, Institutions, and Advocacy." *Sociology of Development* 5 (4): 337–59.
- Monaghan, A. (2016). *The New Politics of Russia: Interpreting Change*. Manchester, UK: Manchester University Press.
- Mondal, A.A. (2018). "Scratching the Post-Imperial Itch." In R. Eaglestone, ed., *Brexit and Literature: Critical and Cultural Responses*, 82–91. London: Routledge.
- Mondal, A.A. (2020). "Reflections on the Rhetoric of (De)colonization in Brexit Discourse." *Open Arts Journal* no. 8: 41–50.
- Moore-Gilbert, B. (1997). *Postcolonial Theory: Context, Practices, Politics*. London: Verso.
- Moraña, M., E. Dussel, & C.A. Jáuregui, eds. *Coloniality at Large: Latin America and the Postcolonial Debate*. Durham, NC: Duke University Press.
- Mosher, D., & D. Varinsky (2019). "Jeff Bezos Unveils a Giant Lunar Lander That He Says Is 'Going to the Moon' and Will Help Blue Origin Populate Space." *Insider*, May 9.
- Mouelhi, R., & M. Goaid (2017). "Women in the Tunisian Labor Market." In Ragui Assaad and Mongi Boughzala, eds., *The Tunisian Labor Market in an Era of Transition*, 113–39. Oxford: Oxford University Press.
- Murphy, A.R. (2009). "Longing, Nostalgia, and Golden Age Politics: The American Jeremiad and the Power of the Past." *Perspectives on Politics* 7 (1): 125–41.
- Mutz, D.C. (2018). "Status Threat, Not Economic Hardship, Explains the 2016 Presidential Vote." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115 (19): E4330–39.
- Narlikar, A. (2021) "Holding Up a Mirror to the World Trade Organization: Lessons from the CO-VID-19 Pandemic." ORF Special Report, no. 141. Observer Research Foundation.
- NCAA (2020). *Estimated Probability of Competing beyond High School Figures and Methodology*.
- Negroponte, N. (1995). *Being Digital*. New York: Vintage Books.
- Netterstrøm, K.L. (2016). "The Tunisian General Labor Union and the Advent of Democracy." *Middle East Journal* 70 (3): 383–98.

- Ngũgĩ wa Thiong'o (2014). *Globalectics: Theory and the Politics of Knowing*. New York: Columbia University Press.
- Niblett, R. (2017). (2020). "The End of Globalization as We Know It." *Foreign Policy*, March 20.
- Niblett, R. (2017). "Liberalism in Retreat: The Demise of a Dream." *Foreign Affairs* 96: 17.
- NIC (National Intelligence Council). (2021). "National Intelligence Estimate on Climate Change: Climate Change and International Responses Increasing Challenges to US National Security through 2040."
- Nicita, A., & C. Razo (2021). "China: The Rise of a Trade Titan." UNCTAD, April 27.
- Nicolson, M., & J.E.E. Fleming (2013). *Imaging and Imagining the Fetus: The Development of Obstetric Ultrasound*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Nikonov, V.A. (2004). "Resursy i priorityty vneshney politiki Rossiiskoy Federatsii." In A.V. Torkunov, ed., *Sovremennye mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika*. Moscow: MGIMO.
- Nixon, R. (2011). *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Norman, J. (2021). *Posthuman Legal Subjectivity: Reimagining the Human in the Anthropocene*. New York: Routledge.
- Novack, S.L. (2017). "The Politics of Nostalgia: Perils and Untapped Potentials." *Psychoanalysis, Culture & Society* 22 (1): 2–5.
- Novy, A. (2022). "The Political Trilemma of Contemporary Social-Ecological Transformation." *Globalizations* 19 (1): 59–80.
- Nye, J. (2009). "Military Deglobalization?" *Foreign Policy*, November 20.
- O'Manique, C. (2015). "Gender, Health, and Security." In S. Rushton & J. Youde, eds., *Routledge Handbook of Global Health Security*, 48–59. Abingdon: Routledge.
- O'Rourke, K.H., & J.G. Williamson (2002). "When Did Globalisation Begin?" *European Review of Economic History* 6 (1): 23–50.
- O'Rourke, K.H., & J.G. Williamson. (2004). "Once More: When Did Globalisation Begin?" *European Review of Economic History* 8 (1): 109–17.
- Obeng-Odoom, F. (2020). "The African Continental Free Trade Area." *American Journal of Economics and Sociology* 79 (1): 167–97.
- Obstfeld, M., & A.M.Taylor (1998). "The Great Depression as a Watershed: International Capital Mobility over the Long Run." In M.D. Bordo, C. Goldin, & E.N. White, eds., *The Defining Moment: The Great Depression and the American Economy in the Twentieth Century*, 353–402. Chicago: University of Chicago Press.
- OECD (n.d.). *Statistics on Measuring Globalisation*.
- OECD. (2018). "Tunisia." *OECD Economic Survey*, Paris.

- OECD. (2021). "Economy of Tunisia at a Glance." www.oecd.org/economy/tunisia-economic-snapshot/.
- Omri, M. (2015). "No Ordinary Union: UGTT and the Tunisian Path to Revolution and Transition." *Workers of the World* 1 (7): 14–29.
- Ohmae, K. (1990). *The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy*. New York: HarperCollins.
- Okamura, J.Y. (2008). *Ethnicity and Inequality in Hawai'i*. Philadelphia: Temple University Press.
- Olivié, I., & I. Molina (2011). *Elcano Global Presence Index*. Madrid: Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.
- Olivié, I., & M. Gracia (2020). "Is This the End of Globalization (As We Know It)?" *Globalizations* 17 (6): 990–1007.
- Ong, A. (1999). *Flexible Citizenship: The Cultural Logic of Transnationality*. Durham, NC: Duke University Press.
- Oracle (2021). "What Is Big Data?" www.oracle.com/big-data/what-is-big-data/.
- Pink, S. (2021). *Doing Visual Ethnography*. London: Sage.
- Osterhammel, J. (2014). *The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Osterhammel, J.. (2017). *Die Flughöhe der Adler: Historische Essays zur globalen Gegenwart*, 2nd ed. München: C.H. Beck.
- Our World in Data (n.d.). "Tourism." <https://ourworldindata.org/tourism>, accessed June 12, 2023.
- Ozili, P. (2020). "COVID-19 in Africa: Socio-Economic Impact, Policy Response and Opportunities." *International Journal of Sociology and Social Policy* 42 (3–4): 177–200.
- Panagariya, A. (2005). "The Triumph of India's Market Reforms: The Record of the 1980s and 1990s." *Policy Analysis*, Cato Institute, issue 554, November 7.
- Panagariya, A.. (2008). *India: The Emerging Giant*. New Delhi: Oxford University Press.
- paperperson, Ia (2017). *A Third University Is Possible*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Pieterse, J.N. (2021). *Connectivity and Global Studies*. London: Palgrave Macmillan.
- Park, J., & T. Stangarone (2019). "Trump's America First Policy in Global and Historical Perspectives: Implications for US–East Asian Trade." *Asian Perspective* 43 (1): 1–34.
- Parrenas, R.S. (2001). *Servants of Globalization*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Patel, K.K. (2016). *The New Deal: A Global History*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Patomäki, H. (2022). *The Three Fields of Global Political Economy*. London: Routledge.
- Patomäki, H., & T. Teivainen (2004). *A Possible World: Democratic Transformation of Global Institutions*. London: Zed Books.
- Patrick, S. M. (2017). "An Open World Is in the Balance. What Might Replace the Liberal Order?" *World Politics Review*, January 10.

- Patrizio, P., D.F. Albertini, N. Gleicher, & A. Caplan (2022). "The Changing World of IVF: The Pros and Cons of New Business Models Offering Assisted Reproductive Technologies." *Journal of Assisted Reproduction and Genetics* 39 (2): 305–13.
- Paul, T.V. (2021). "Globalization, Deglobalization and Reglobalization: Adapting Liberal International Order." *International Affairs* 97 (5): 1599–1620.
- Payne, T. (2017). "'De-globalisation,' or 'Re-globalisation'?" *Huffington Post*, January 24.
- Peacock, E.J. (2022). "Vaccine Nationalism Will Persist: Global Public Goods Need Effective Engagement of Global Citizens." *Globalization and Health* 18: 14.
- Perez, E.E. (2021). "The Economic Cost of Terrorism in Africa." *AEI*, June 29.
- Perry, M. (2002). *Marxism and History*. London: Palgrave Macmillan.
- Pettegree, A. (2014). *The Invention of the News: How the World Came to Know about Itself*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Phillips, J., J. Nauright, & T. Chandler (1996). "The Hard Man: Rugby and the Formation of Male Identity in New Zealand." In J. Nauright & T.J.L. Chandler, eds., *Making Men: Rugby and Masculine Identity*, 71–90. London: Frank Cass.
- Pieterse, J.N. (2020). "Global Culture, 1990, 2020." *Theory, Culture & Society* 37 (7–8): 233–40.
- Plumwood, V. (1993). *Feminism and the Mastery of Nature*. London: Routledge.
- Polanyi, K. (1957). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Times*. Boston: Beacon Press.
- Pollock, R. (2013). "Forget Big Data, Small Data Is the Real Revolution." *The Guardian*, April 23.
- Porter, R. (2003). *Flesh in the Age of Reason*. London: Allen Lane.
- Portes, A. (2000). "Globalization from Below: The Rise of Transnational Communities." In D. Kalb, M. van der Land, R. Staring, B. van Steenberg, & N. Wilterdink, eds., *The Ends of Globalization: Bringing Society Back In*, 253–70. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Potter, S.J. (2007). "Webs, Networks, and Systems: Globalization and the Mass Media in the Nineteenth and Twentieth Century British Empire." *Journal of British Studies* 46 (3): 621–46.
- Pringle, R. (2004). "A Social-History of the Articulations between Rugby Union and Masculinities within Aotearoa/New Zealand." *New Zealand Sociology* 19 (1): 102–28.
- Qingqing, C., & H. Yuwei (2022). "Unprecedented China-Russia Ties to Start a New Era of International Relations Not Defined by US." *Global Times*, February 5.
- Quayson, A. (2000). *Postcolonialism: Theory, Practice or Process?* Cambridge: Polity Press.
- Quijano, A. ([1992] 2007). "Coloniality and Modernity/Rationality." *Cultural Studies* 21 (2–3): 168–78.
- Quijano, A. ([2000] 2008). "Coloniality of Power, Eurocentrism and Social Classification." In M. Moraña, E.D. Dussel, & C.A. Jáuregui, eds., *Coloniality at Large: Latin America and the Postcolonial Debate*, 181–224. Durham, NC: Duke University Press.

- Quijano, A. (2008). "Coloniality of Power, Eurocentrism, and Social Classification." In M. Moraña, E. Dussel, & C.A. Jáuregui, eds., *Coloniality at Large: Latin America and the Postcolonial Debate*, 181–224. Durham, NC: Duke University Press.
- Raab, M., M. Ruland, B. Schonberger, H.-P. Blossfeld, D. Hofacker, S. Buchholz, & P. Schmelzer (2008). "GlobalIndex: A Sociological Approach to Globalization Measurement." *International Sociology* 23 (1): 596–631.
- Raheem, O. (2021). "UN Women and the Pitfalls of Gender Equality and Representation in Nigeria." In E. Uchendu & N. Edeagu, eds., *Negotiating Patriarchy and Gender in Africa*, 257–72. Lanham, MD: Lexington Books.
- Rake, B. (2022). "Waiving Intellectual Property Rights: Boom or Bust for Medical Innovation." *Drug Discovery Today* 27 (2): 384–89.
- Reardon, S. (2021). "COVAX Effort to Vaccinate the World Is Faltering." *Scientific American*, June 16.
- Reiss, M.B. (2021). "Britain in a Contested World." *Survival* 63 (3): 181–92.
- Reuters (2022). "Factbox: Vaccines Delivered under COVAX Sharing Scheme for Poorer Countries." Reuters, March 18.
- Riechmann, D. (2020). "Trump Praises China on Coronavirus, Then Excoriates Them. Calls It 'The Chinese Virus,' Then Lauds President Xi." *Chicago Tribune*, April 2.
- Riley, P., & R.K. Roy (2016). "Corruption and Anti-Corruption: The Case of India." *Journal of Developing Societies* 32 (1): 173–99.
- Ripsman, N.M. (2021). "Globalization, Deglobalization and Great Power Politics." *International Affairs* 97 (5): 1317–33.
- Roberts, A., & N. Lamp (2021). *Six Faces of Globalization: Who Wins, Who Loses, and Why It Matters*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Robertson, J. (1997). "Empire of Nostalgia: Rethinking Internationalization in Japan Today." *Theory, Culture & Society* 14 (4): 97–122.
- Robertson, R. (1990). "After Nostalgia? Willful Nostalgia and the Phases of Globalization." In B.S. Turner, ed., *Theories of Modernity and Postmodernity*, 45–61. London: Sage Publications.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London: Sage Publications.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London: Sage.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. Newbury Park, CA: Sage.
- Robertson, R. (1995). "Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity." In M. Featherstone, S. Lash, & R. Robertson, eds., *Global Modernities*. London: Sage Publications.
- Robertson, R. (1995). "Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity." In M. Featherstone, S. Lash, & R. Robertson, eds., *Global Modernities*, 25–44. London: Sage.
- Robertson, R., & D. Buhari-Gulmez (2016). *Global Culture: Consciousness and Connectivity*. Burlington: Ashgate.

- Robertson, R. (2018). "Glocalization." In H. Callan, ed., *The International Encyclopedia of Anthropology*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Robinson, C. (1983). *Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition*. London: Zed Press. Said, E. (1979). *Orientalism*. London: Vintage.
- Robinson, W.I. (2014). *Global Capitalism and the Crisis of Humanity*. New York: Cambridge University Press.
- Robinson, W.I. (2004). *A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Robinson, W.I. (2018). *Into the Tempest: Essays on the New Global Capitalism*. Chicago: Haymarket.
- Robinson, W.I. (2020). *The Global Police State*. London: Pluto Press.
- Robinson, W.I. (2022a). *Can Global Capitalism Endure?* Atlanta: Clarity Press.
- Robinson, W.I. (2022b). *Global Civil War: Repression and Rebellion in the Post-Pandemic World*. Oakland, CA: PM Press.
- Rodrik, D. (1997). *Has Globalization Gone Too Far?* Washington, DC: Institute for International Economics.
- Rodrik, D. (2016). "Premature Deindustrialization." *Journal of Economic Growth* 21: 1–33.
- Rogers, K., & A. Mandavilli (2020). "Trump Administration Signals Formal Withdrawal from WHO." *New York Times*, July 7.
- Rogers, R. (2019). *Doing Digital Methods*. London: Sage.
- Rolph-Trouillot, M. (2002). "North Atlantic Universals: Analytic Fictions, 1492–1945." *South Atlantic Quarterly* 101 (4): 839–58.
- Rongala, S. (2007). "Experiments with Neoliberalism in India: Shattering of a Mental Model." In R.K. Roy, A.T. Denzau, & T.D. Willett, eds., *Neoliberalism: National and Regional Experiments with Global Ideas*. London: Routledge.
- Rotella, S., J. Bandler, & P. Callahan (2020). "Inside the Trump Administration's Decision to Leave the World Health Organization." *Pro Publica*, June 20.
- Rothman, A. (2021). "Five Things Western Investors Misunderstand about China." *Fortune*, May 3.
- Roy, R.K., & A.T. Denzau (2020). "Shared Mental Models: Insights and Perspectives on Ideologies and Institutions." *Kyklos* 73 (3): 323–40.
- Roy, R.K., A.T. Denzau, & T.D. Willett, eds. (2007). *Neoliberalism: National and Regional Experiments with Global Ideas*. London: Routledge.
- Roy, R.M. (1976). *Indian Democracy in Crisis*. Northridge: The University Corporation, California State University.
- Rugby." In J. Maguire & M. Falcous, eds., *Sport and Migration: Borders, Boundaries, and Crossings*, 129–140. London: Taylor & Francis.

- Ruger, J.P. (2012). "Global Health Justice and Governance." *American Journal of Bioethics* 12 (12): 35–54.
- Ruggie, J.G. (1993). "Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations." *International Organization* 47 (1): 139–74.
- Runstedtler, T. (2018). "More than Just Play: Unmasking Black Child Labor in the Athletic Industrial Complex." *Journal of Sport and Social Issues* 42 (3): 152–69.
- Saddem, A. (2001). "How Tunisia Is Meeting the Challenges of Globalization." *Finance & Development* 4: 28–30.
- Sadiki, L. (2020). "For Tunisian Protesters, Democracy Is Not Enough." *openDemocracy*, July 8.
- Sadiki, L. (2019). "Regional Development in Tunisia: The Consequences of Multiple Marginalization." *Brookings Doha Center Publications*.
- Safranchuk, I. (2019). "Russian-U.S. Relations: Torn between the Practical and Ideational Agendas." *Russia in Global Affairs* 16 (4): 96–121. <https://doi.org/10.31278/1810-6374-2018-16-4-96-119>.
- Said, E.W. (1979). *Orientalism*. New York: Vintage Books / Random House.
- Sakwa, R. (2017). *Russia against the Rest: The Post–Cold War Crisis of World Order*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Saleem, R.M.A. (2021). "Hinduism, Hindutva and Hindu Populism in India: An Analysis of Party Manifestos of Indian Right Wing Parties." *Religions* 12 (803).
- Salesa, D. (2014). "The Pacific in Indigenous Time." In D. Armitage & A. Bashford, eds., *Pacific Histories: Ocean, Land, People*, 31–52. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Salesa, T.D.I. (2003). "'Travel-Happy' Samoa: Colonialism, Samoan Migration and a 'Brown Pacific.'" *New Zealand Journal of History* 37 (2): 171–88.
- Sallaz, J.J. (2019). *Lives on the Line: How the Philippines Became the World's Call Center Capital*. New York: Oxford University Press.
- Salzer, S.J., R. Silver, K. Simone, & C.B. Behravesch (2017). "Prioritizing Zoonoses for Global Health Capacity Building—Themes from One Health Zoonotic Disease Workshops in 7 Countries, 2014–2016." *Emerging Infectious Diseases* 23 (Suppl. 1): S55–64.
- Sambaraju, R. (2018). "'We Are Happy We Welcome This Decision What . . . Our Prime Minister Has Taken': Political Subjectivities in Populist Politics during Demonetization in India." *Journal of Community & Applied Social Psychology* 28 (6): 446–59.
- Samuel, S. (2019). "The Next Global Pandemic Could Kill Millions of Us. Experts Say We're Really Not Prepared." *Vox*, September 19.
- Santos, B.S., ed. (2007). *Another Knowledge Is Possible: Beyond Northern Epistemologies*. London: Verso.
- Sassen, S. (1996). *Losing Control? Sovereignty in the Age of Globalization*. New York: Columbia University Press.

- Sassen, S. (2002). *The Global City: New York, London, Tokyo*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Sassen, S., ed. (2016). *Global Networks, Linked Cities*. London: Routledge.
- Sasson, V.R., & J.M. Law (2016). *Imagining the Fetus: The Unborn in Myth, Religion and Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- Saunders, R. (2020). "Brexit and Empire: 'Global Britain' and the Myth of Imperial Nostalgia." *Journal of Imperial and Commonwealth History* 48 (6): 1140–74.
- Saunier, P.-Y. (2019). "Comment: Global History, Jürgen Osterhammel." In M. Tamm & P. Burke, eds., *Debating New Approaches to History*, 35–40. London: Bloomsbury Academic.
- Saxsenian, A. (2005). "From Brain Drain to Brain Circulation: Transnational Communities and Regional Upgrading in India and China." *Studies in Comparative and International Development* 40 (2): 35–61.
- Schafer, A., & D.G. Victor (2000). "The Future Mobility of the World Population." *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 34 (3): 171–205.
- Schmitt, C. ([1922] 1988). *Theologie Politique*. Translated by J.-E. Schlegel. Paris: Gallimard.
- Schmitt, C. (1962). "El orden del mundo después de la Segunda Guerra Mundial." *Revista de Estudios Políticos* 122: 19–38.
- Scholte, J.A. (1996). "The Geographies of Collective identities in a Globalizing World." *Review of International Political Economy*, 3 (4): 565–607.
- Scholte, J.A. (1999). "Global Civil Society: Changing the World?" CSGR Working Paper 31 (99).
- Scholte, J.A. (2005). *Globalization: A Critical Introduction*, 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan.
- Schraut, S. (2018). *Terrorismus und politische Gewalt*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Schwab, K., & T. Malleret (2020). *Covid-19: The Great Reset*. Geneva: Forum Publishing. Srnicek, N. (2016). *Platform Capitalism*. London: Polity Press.
- Schwengel, H. (2006). "Globalization with a European Face." *Theory, Culture & Society* 23 (2–3): 414–16.
- Scott, M. (2015). *Delphi: A History of the Center of the Ancient World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Selchow, S. (2020). "The Politics of the Adjective Global: May's Global Britain and the 'New World.'" In I. Rossi, ed., *Challenges of Globalization and Prospects for an Inter-Civilizational World Order*, 209–24. Cham: Springer.
- Sharjah Art Foundation (2011). "Yuko Hasegawa Appointed Curator of the Sharjah Biennial." e-flux, December 14.
- Sharma, R. (2016). "Globalisation As We Know It Is Over—and Brexit Is the Biggest Sign Yet." *The Guardian*, July 28.

- Sharma, R. (2016). "View: Populist Nationalism Cannot Paper Over Economic Chaos Unleashed by Demonetisation Drive." *The Economic Times / India Times*, November 21.
- Shaw, M.J. (2021). *An Inky Business: A History of Newspapers from the English Civil Wars to the American Civil War*. London: Reaktion Books.
- Shaw, R. (2014). "Is Modi's Win India's Thatcher Moment?" *The Times of India*, May 24.
- Sheller, M., & J. Urry (2006). "The New Mobilities Paradigm." *Environment and Planning A: Economy and Space* 38: 207–26.
- Shettima, K. (2016). "Achieving the Sustainable Development Goals in Africa: Call for a Paradigm Shift." *African Journal of Reproductive Health* 20 (3): 19–21.
- Shiller, R.J. (2019). *Narrative Economics: How Stories Go Viral & Drive Major Economic Events*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Shiva, V. (2013). *Making Peace with the Earth*. London: Pluto Press.
- Shiva, V. (2015). *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace*. Berkeley, CA: North Atlantic Books.
- Shiva, V., & M. Mies (2014). *Ecofeminism*. London: Zed Books.
- Sina.com (2021). "Benefiting from the CLR to Expand Production of Potash Fertilizer." December 15.
- Sinha, S. (2017). "Fragile Hegemony: Modi, Social Media, and Competitive Electoral Populism in India." *International Journal of Communication* 11: 4158–80.
- Skaria, F. (1994). "Cultura Is Destiny. A Conversation with Lee Kuan Yew." *Foreign Affairs* 72 (3).
- Skinner, E.B. (2008). *A Crime So Monstrous: Face-to-Face with Modern-Day Slavery*. New York: Free Press.
- Sluga, G., & P. Clavin, eds. (2017). *Internationalisms: A Twentieth-Century History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Small, C. ([1997] 2011). *Voyages: From Tongan Villages to American Suburbs*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Smith, J., S.E. Davies, H. Feng, C.C.R. Gan, K. Grepin, S. Harman, A. Herten-Crabb, R. Morgan, N. Vandan, & C. Wenham (2021). "More than a Public Health Crisis: A Feminist Political Economic Analysis of COVID-19." *Global Public Health* 16 (8–9): 1364–80.
- Social Tracker (n.d.). "Track Social Media Performance of Influencers and Brands." January.
- Soguk, N. (2021). "Precarity Unbound: Insurrectional Migrancy and Citizen Precarity in a Globalized World." In R. Vij, T. Kazi, & E. Wynne-Hughes, eds., *Precarity and International Relations*, 231–52. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Sommaruga, C. (2004). "The Global Challenge of Human Security." *Foresight* 6 (4): 208–11.
- Sparke, M. (2013). *Introducing Globalization: Ties, Tensions, and Uneven Integration*. Chichester: Wiley-Blackwell.

- Speier, A. (2016). *Fertility Holidays: IVF Tourism and the Reproduction of Whiteness*. New York: New York University Press.
- Srinivas, T. (2021). "India Prepares for Kumbh Mela, World's Largest Religious Gathering, amid COVID-19 Fears." *The Conversation*, April 8.
- Standish, P. (2001). *Understanding Julio Cortázar*. Columbia: University of South Carolina.
- Statista (2021). "Total Contribution of Travel and Tourism to Gross Domestic Product (GDP) World-wide from 2019 to 2021."
- Statista (n.d.). "China's Share of the Global GDP Would Be 18.3% in 2020 Adjusted for Purchasing-Power Parity (PPP)."
- Stauth, G., & B.S. Turner (1988). "Nostalgia, Postmodernism and the Critique of Mass Culture." *Theory, Culture & Society* 5 (2–3): 509–26.
- Stearns, P. (2020). *Globalization in World History*. New York: Routledge.
- Steel, F. (2015). "The 'Missing Link': Space, Race, and Transoceanic Ties in the Settler-Colonial Pacific." *Transfers* 5 (3): 49–67.
- Steger, M., & P. James (2020). "Disjunctive Globalization in the Era of the Great Unsettling." *Theory, Culture, and Society* 37 (7–8): 187–203.
- Steger, M.B. (2005). *Globalism: Market Ideology Meets Terrorism*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Tsu, S. (2010). *The Art of War (5th century bc)*. Translated from the Chinese by L. Giles. Leicester, England: Allandale Online Publishing.
- Steger, M.B. (2008). *Globalisms: The Great Ideological Struggles of the Twenty-First Century*, 3rd ed. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Steger, M.B. (2008). *The Rise of the Global Imaginary: Political Ideologies from the French Revolution to the Global War on Terror*. Oxford: Oxford University Press.
- Steger, M.B. (2008). *The Rise of the Global Imaginary: Political Ideologies from the French Revolution to the Global War on Terror*. Oxford: Oxford University Press.
- Steger, M.B. (2013). *Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Steger, M.B. (2019). "Committing to Cultures of Creativity: The Significance of Transdisciplinarity." *Globalizations* 16 (5): 763–69.
- Steger, M.B. (2020). *Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Steger, M.B. (2021). "The State of Globality in a (Post)-COVID World." *New Global Studies* 15 (2–3): 117–43.
- Steger, M.B. (2021). "Two Limitations of Globalization Theory." *Global Perspectives* 2 (1).
- Steger, M.B., & P. James (2019). *Globalization Matters: Engaging the Global in Unsettled Times*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Steger, M.B., & P. James (2019). *Globalization Matters: Engaging the Global in Unsettled Times*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Steger, M.B., & P. James (2019). *Globalization Matters: Engaging the Global in Unsettled Times*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Steger, M.B., & P. James (2019). *Globalization Matters: Engaging the Global in Unsettled Times*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Steger, M.B., & P. James (2020). "Disjunctive Globalization in the Era of the Great Unsettling." *Theory, Culture & Society* 37 (7–8): 187–203.
- Steger, M.B., & P. James, eds. (2017). *Globalization: The Career of a Concept*. New York: Routledge.
- Steger, M.B., & P. James. (2020). "Disjunctive Globalization in the Era of the Great Unsettling." *Theory, Culture & Society* 37 (7–8): 187–203.
- Steger, M.B., & R.K. Roy, eds. (2021). *Neoliberalism: A Very Short Introduction*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
- Stein, J. (2001). "Reflections on Time, Time-Space Compression and Technology in the Nineteenth Century." In J. May & N. Thrift, eds., *TimeSpace: Geographies of Temporality*, 106–19. London: Routledge.
- Steinbock, D. (2018). "U.S.-China Trade War and Its Global Impacts." *China Quarterly of International Strategic Studies* 4 (4): 515–42.
- Stephens, M., P. Elsner, N. Matthews, & G. Beadon (2021). *Evaluation of the Strategic Positioning of IOC-UNESCO*. UK: UNESCO.
- Stevenson, N. (2002). *Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication*. London: Sage.
- Strange, R. (2020). "Whither Globalization?" *Journal of International Management* 26 (1).
- Strange, S. (1988). "The Future of the American Empire." *Journal of International Affairs* 42 (1): 1–17.
- Thorsten, M. (2005). "Silk Road Nostalgia and Imagined Global Community." *Comparative American Studies: An International Journal* 3 (3): 301–17.
- Ström, T.E. (2020). *Globalization and Surveillance*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Subrahmanyam, S. (1997). "Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Eurasian History." *Modern Asian Studies* 31 (3): 735–62.
- Subrahmanyam, S.. (2022). *Connected History: Essays and Arguments*. London: Verso.
- Subramanian, A., & J. Felman (2022). "India's Stalled Rise: How the State Has Stifled Growth." *Foreign Affairs* 101 (1): 139–50.
- Suhardiman, D., J. DiCarlo, O. Keovilignavong, J. Rigg, & A. Nicol (2021). "(Re)constructing State Power and Livelihoods through the Laos-China Railway Project." *Geoforum* 124: 79–88.
- Swanson, A. (2022). "Food Exports Are Blocked, Ripples Are Felt around Globe." *New York Times*, April 30.

- Tabb, W.K. (2021). "The Present in History." *Monthly Review*, 73 (6): 30–43.
- Tan, S., Y. Shin, & D. Rindler (2021). "How One of America's Ugliest Days Unraveled Inside and Outside the Capitol." *Washington Post*, January 9.
- Taylor, C. (2003). *Modern Social Imaginaries*. Durham, NC: Duke University Press.
- Taylor, M. (2022) "What Connects 'Hellish' Heatwaves and Cost of Living." *The Guardian*, December 5.
- Teaiwa, K.M. (2016). "Niu Mana, Sport, Media and the Australian Diaspora." In M. Tomlinson & T.P. Kāwika Tengan, eds., *New Mana: Transformations of a Classic Concept in Pacific Languages and Cultures*, 107–30. Acton, Australia: ANU Press.
- Teivainen, T. (2002). "The World Social Forum and Global Democratisation: Learning from Porto Allegre." *Third World Quarterly* 23 (4): 621–32.
- Teti, A., P. Abbott, & F. Cavatorta (2019). "Beyond Elections: Perceptions of Democracy in Four Arab Countries." *Democratization* 26 (4): 645–65.
- Thacker E. (2005). *The Global Genome: Biotechnology, Politics and Culture*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Thakurta, P.G., & A. Kaushal (2010). "Underbelly of the Great Indian Telecom Revolution." *Economic and Political Weekly* 65 (49): 49–55.
- Tharoor, S. (1997). *India: From Midnight to the Millennium*. New York: Arcade Publishing.
- The Economist (2019). "Emmanuel Macron Warns Europe: NATO Is Becoming Brain-Dead." November 7.
- The Economist (2022a). "Bread and Oil: The Ripples of Putin's War." March 12, pp. 39–40.
- The Economist. (2015). "Arab Bureaucracies: Aiwa (Yes) Minister." November 14, p. 47.
- The Economist. (2016). "The Problem with Profits." May 26.
- The Economist. (2022b). "The World Economy: Fuel, Food and Fury." March 12, p. 8.
- The Economist. (2022c). "The World Economy: Trading with the Enemy." March 19, p. 8.
- The Economist.. (2020). "Hanging Together." May 16, p. 60.
- Thompson, C. (2005). *Making Parents: The Ontological Choreography of Reproductive Technologies*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Thompson, N. (2016). "E Ho'i Mau: Honoring the Past, Caring for the Present, Journeying to the Future." *Hūlili: Multidisciplinary Research on Hawaiian Well-Being* 10: 157–81.
- Tilly, C. (1978). "Migration in Modern European History." In W.H. McNeill and B. Adams, eds., *Human Migrations: Patterns and Policies*. Bloomington: University of Indiana Press.
- Time (2021). "Time 100 Most Influential People 2021." <https://time.com/collection/100-most-influential-people-2021/>.

- Tinsley, M. (2020). "Revisiting Nostalgia: Imperialism, Anticolonialism, and Imagining Home." *Ethnic and Racial Studies* 43 (13): 2327–55.
- Torkunov, A.V. (2012). *Sovremennye Mezhdunarodnye Otnosheniya* [Contemporary international relations]. Moscow: Aspekt Press.
- Torpey J. (1998). "Coming and Going." *Sociological Theory* 16 (3): 239–59.
- Torpey J. (2000). *The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship, and the State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Toussaint, E. (2020). "No, The Coronavirus Is Not Responsible for the Fall in Stock Prices." MR Online, March 4.
- Trimbur, L. (2013). *Come Out Swinging*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Trump, D. (2017). "Remarks by President Trump to the People of Poland." The White House, July 6.
- Tsygankov, A.P. (2014). *The Strong State in Russia: Development and Crisis*. Oxford: Oxford University Press.
- Tsygankov, A.P. (2019). "From Global Order to Global Transition." *Russia in Global Affairs* 17 (1): 52–70.
- Tupou, D. (2017). "Die for Tonga." *Players Voice*, November 23.
- Turner, B., & H. Khondker (2010). *Globalization: East and West*. London: Sage. Twain, M. (1897). *Following the Equator*. New York: American Publishing Company.
- Turner, B.S. (1987). "A Note on Nostalgia." *Theory, Culture & Society* 4 (1): 147–56.
- Turner, L.G. (2011). "Quality Healthcare and Globalization of Health Services: Accreditation and Regulatory Oversight of Medical Tourism Companies." *International Journal for Quality in Healthcare* 23 (1): 1–7.
- Turner, O. (2019). "Global Britain and the Narrative of Empire." *Political Quarterly* 90 (4): 727–34.
- Turse, N. (2022). "Before Ukraine, a Refugee Crisis Ignored by the Western Powers That Largely Caused It." *Responsible Statecraft*, March 24.
- UN (2016). *The Human Security Handbook: An Integrated Approach for the Realization of the Sustainable Development Goals and the Priority Areas of the International Community and the United Nations System*. United Nations Human Security Unit.
- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). (2017). *Information Economy Report*. UNCTAD: Geneva.
- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). (2019). *Digital Economy Report 2019*.
- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). (2021). *Global Trade Update*.
- UNDESA (2020). *World Social Report 2020: Inequality in a Rapidly Changing World*.
- UNDOC (2021). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. New York: United Nations.

- UNDP (2009). *Human Development Report 2009: Overcoming Barriers: Human Ability and Development*. New York: United Nations Development Program.
- UNDP (United Nations Development Programme) (1994). *Human Development Report (HDR) 1994*. New York: Oxford University Press.
- UNHCR (2022). *Global Report on Law and Policy on Internal Displacement: Implementing National Responsibility*. UN High Commissioner for Refugees.
- UNHCR. (2022). "UNHCR Data Visualization on Mediterranean Crossings Charts Rising Death Toll and Tragedy at Sea." UN High Commissioner for Refugees.
- UNHCR. (2022). *Global Trends: Forced Displacement in 2020*. UN High Commissioner for Refugees. www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/.
- United Nations (1987). *Our Common Future (The Brundtland Report): Report of the World Commission on Environment and Development*. New York: Oxford University Press.
- Uperesa, F.L. (2014a). "Fabled Futures: Migration and Mobility for Samoans in American Football." *The Contemporary Pacific* 27 (1): 281–301.
- Uperesa, F.L. (2014b). "Seeking New Fields of Labor: Football and Colonial Political Economies in American Samoa." In A. Goldstein, ed., *Formations of U.S. Colonialism*. Durham, NC: Duke University Press.
- Uperesa, F.L. (2018). "Training for Empire?: Samoa and American Gridiron Football." In C. McGranahan & J. Collins, eds., *Ethnographies of U.S. Empire*, 129–48. Durham, NC: Duke University Press.
- Uperesa, F.L. (2021). "Entangled Histories and Transformative Futures: Indigenous Sport in the 21st Century." In B. Hokowhitu, A. Moreton-Robinson, L. Tuhiwai-Smith, C. Andersen, & S. Larking, eds., *Routledge Handbook of Critical Indigenous Studies*, 511–24. London: Routledge.
- Uperesa, L. (2022). *Gridiron Capital: How American Football Became a Samoan Game*. Duke University Press.
- Urry, J. (1999). "The 'Consumption' of Tourism." *Sociology* 24 (1): 23–35.
- Urry, J.. (2000). *Sociology beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century*. London: Routledge.
- World Bank (2016). *Migration and Remittances Factbook (2016)*, 3rd ed.
- Urry, J.. (2022). *Migration*. www.worldbank.org/en/topic/migration/overview.
- Vaittinen, T., & C.C. Confortini, eds. (2019). *Gender, Global Health, and Violence*. London: Rowman & Littlefield.
- Valdai Club. 2018. *Zhizn' v Ospyayushemysya Mire*. Annual Report. Moscow.
- van Bergeijk, P. (2019). *Deglobalization 2.0: Trade and Openness During the Great Depression and the Great Recession*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Van Winkle, W.W. (2020). "Appealing to the Rust Belt and Appalachian Voter—Trump and the Rhetoric of Nostalgia and Race." PhD diss., University of Dayton.

- Vanderslott, S., et al. (2021). "Vaccine Nationalism and Internationalism: Perspectives of COVID-19 Vaccine Trial Participants in the United Kingdom." *BMJ Global Health*, 6 (10): e006305.
- Victorian Age." *British Journal for the History of Science* 33 (4): 455–75.
- Vilches, E. (2010). *New World Gold: Cultural Anxiety and Monetary Disorder in Early Modern Spain*. Chicago: University of Chicago Press.
- Virdee, S., & B. McGeever (2018). "Racism, Crisis, Brexit." *Ethnic and Racial Studies* 41 (10): 1802–19.
- Viswanath, S. (2021). "Modi's Religious Nationalism Hurts India's Hindus, Too: Islamophobic Policies Harm Not Just Muslims, but the Poor and Marginalized." *Foreign Policy*.
- Vujakovic, P. (2010). "How to Measure Globalisation? A New Globalisation Index (NGI)." *Atlantic Economic Journal* 38 (2): 237.
- Wallerstein, I. (2011). *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Berkeley: University of California Press.
- Wallerstein, I. (2013). "Structural Crisis, or Why Capitalists May No Longer Find Capitalism Reward- ing." In I. Wallerstein, R. Collins, M. Mann, G. Derluigan, & C. Calhoun, eds., *Does Capitalism Have a Future?*, 9–36. Oxford: Oxford University Press.
- Wallerstein, I. (2014). "Antisystemic Movements, Yesterday and Today." *Journal of World-Systems Research* 20 (2): 158–72.
- Wamsley, L. (2020). "Trump Criticizes WHO and Threatens to Pull US Funding." NPR, April 7.
- Warren, K.J. (2000). *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- WeChat Platform: The China Merchants Group (2020). "The Inaugural 'Great Bay Express' Arrived in Duisburg, Germany, After Running for 13438 Kilometres." September 9.
- WeChat Platform: The Train Track World (2021a). "The CLR Uses All-China Standard." December 3.
- WeChat Platform: The Vientiane Commercial Office of Yunnan Province (2021b). "Laos' Exports Reach \$26.5 Billion with Annual Growth of 10.9% during 2016–20." November 5.
- WeChat Platform: The Vientiane Commercial Office of Yunnan Province (2022). "Present Thongloun Sisoulith Summarizes 2022's Opportunities and Challenges for Laos." January 7.
- Weilandt, R. (2018). "Socio-Economic Challenges to Tunisia's Democratic Transition." *European View* 17 (2): 210–17.
- Wellings, B., & H. Baxendale (2015). "Euro scepticism and the Anglosphere: Traditions and Dilemmas in Contemporary English Nationalism." *JCMS: Journal of Common Market Studies* 53 (1): 123–39.
- Wenham, C. (2021). *Feminist Global Health Security*. New York: Oxford University Press.
- Wenham, C., A. Arevalo, E. Coast, S. Correa, K. Cuellar, T. Leone, & S. Valonguiero (2019). "Zika, Abortion, and Health Emergencies: A Review of Contemporary Debates." *Globalization and Health* 15: 49.

- Wenzlhuemer, R. (2013). *Connecting the Nineteenth-Century World: The Telegraph and Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wenzlhuemer, R. (2015). "Verbrechen, Verbrechensbekämpfung und Telegrafie: Kriminalhistorische Perspektiven auf die Entkoppelung von Transport und Kommunikation im langen 19. Jahrhundert." *Historische Zeitschrift* 301 (2): 347–73.
- Wenzlhuemer, R. (2019). "Connections in Global History." *Comparativ* 29 (2): 106–21. <https://doi.org/10.26014/j.comp.2019.02.06>.
- Wenzlhuemer, R. (2020). *Doing Global History: An Introduction in Six Concepts*. London: Bloomsbury Academic.
- Williamson, J.G. (1996). "Globalization, Convergence, and History." *Journal of Economic History* 56 (2): 277–306.
- Wessler, H. (2008). *Public Deliberation and Public Culture: The Writings of Bernhard Peters, 1993–2005*. New York: Palgrave Macmillan.
- Whyte, M.K. (2020). "China's Economic Development History and Xi Jinping's 'China Dream': An Overview with Personal Reflections." *Chinese Sociological Review* 53 (2): 1–20.
- Wildcat, D.R. (2009). *Red Alert! Saving the Planet with Indigenous Knowledge*. Golden, CO: Fulcrum Publishing.
- Williamson, J. (1990). "What Washington Means by Policy Reform." In J. Williamson, ed., *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?* Washington, DC: Peterson Institute for International Economics.
- Wilson, K., J. Loh, & N. Purewal (2018). "Gender, Violence, and the Neoliberal State in India." *Feminist Review* (119): 1–6.
- Winter, C.J. (2021). *Subjects of Intergenerational Justice: Indigenous Philosophy, the Environment, and Relationships*. London: Routledge.
- Winter, T. (2019). *Geocultural Power: China's Quest to Revive the Silk Roads for the Twenty-First Century*. Chicago: University of Chicago Press.
- Winter, T. (2021). "The Geocultural Heritage of the Silk Roads." *International Journal of Heritage Studies* 27
- Witkowski, J.A., & J.R. Inglis, eds. (2008). *Davenport's Dream: 21st Century Reflections on Heredity and Eugenics*. Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
- Witt, M.A. (2019). "De-globalization: Theories, Predictions, and Opportunities for International Business Research." *Journal of International Business Studies* 50: 1053–77.
- Wojczewski, T. (2018). "Global Power Shifts and World Order: The Contestation of 'Western' Discursive Hegemony." *Cambridge Review of International Affairs* 31 (1): 33–52.
- Wolf, M. (2015). "Same as It Ever Was: Why the Techno-Optimists are Wrong." *Foreign Affairs* 94 (4): 15–22.
- Wong, E., & A. Swanson (2022). "Strands Break in Global War of Commerce." *New York Times*, March 23.

- World Bank (2011). *World Development Report 2012: Gender Equality and Development: Main Report* (English). World Bank Group.
- World Bank (2015). "Consolidating Social Protection and Labor Policy in Tunisia: Building Systems, Connecting to Jobs." Policy note.
- World Bank (2020). *From Landlocked to Land-Linked: Unlocking the Potential of Lao-China Rail Connectivity*. World Bank, Vientiane.
- World Bank. (1997). *World Development Report 1997: The State in a Changing World*. New York: Oxford University Press.
- World Bank. (2015). *World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank. (2017). "Republic of Tunisia Impact of the Libya Crisis on the Tunisian Economy." Report no. ACS16340.
- World Bank. (2021). "Economic Update: Tunisia."
- World Bank. (2022). *Tunisia Systematic Country Diagnostic, Executive Summary*. September. Washington, DC: World Bank Group.
- World Health Organization. (n.d.) COVAX.
- Worobey, M. (2021). "Dissecting the Early COVID-19 Cases in Wuhan." *Science* 374 (6572): 1202–4.
- Wulf, A. (2015). *The Invention of Nature: Alexander Von Humboldt's New World*. New York: Alfred A. Knopf.
- Xi Jinping. (2017). "Full Text of Xi Jinping Keynote at the World Economic Forum." January 17.
- Xi Jinping. (2021). "Full Text of Xi Jinping's Speech on the CCP's 100th Anniversary." *Nikkei Asia*, July 1.
- Yan, H. (2018). "New China Rail Express train service imports Volvo Cars to Xi'an." *China Daily*, June 15.
- Yan, X. (2013). *Ancient Chinese Thoughts, Modern Chinese Power*. Translated by D.A. Bell & S. Zhe. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Yew, L.K. (2012). *The Grand Master's Insights on China, the United States, and the World: Interviews and Selections by Graham Allison and Robert D. Blackwell, with Ali Wyne*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Yong, E. (2022). "America Is Zooming through the Pandemic Panic-Neglect Cycle." *The Atlantic*, March 17.
- Youde, J. (2018). "The Securitization of Health in the Trump Era." *Australian Journal of International Affairs* 72 (6): 535–50.
- Youde, J.. (2019). *Globalization and Health*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Yusoff, K. (2019). *A Billion Black Anthropocenes or None*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Zamfir, I. (2016). "Africa's Economic Growth—Taking Off or Slowing Down?" European Parliamentary Research Service (EPRS), January, 1–25.
- Zelinsky, W. (1971). "The Hypothesis of the Mobility Transition." *Geographical Review* 61: 219–49. Zhao, L., & C.R. Fu (2010). *China's Hukou Reform: The Guangdong and Shanghai Cases*. Singapore: East Asian Institute, National University of Singapore.
- Zemni, S. (2013). "From Socio-Economic Protest to National Revolt: The Labor Origins of the Tunisian Revolution." In N. Ghana, ed., *The Making of the Tunisian Revolution: Contexts, Architects, Prospects*, 127–46. Edinburgh: University of Edinburgh Press.
- Zhang, W. (2012). *China Wave: The Rise of a Civilizational State*. Detroit: WCPC.
- Zhao, T. (2016). *All under Heaven: The Tianxia System for a Possible World Order*. Translated by J.F. Harrof. Oakland: University of California Press.
- Zhou, L. (2021). "The Long History of Anti-Asian Hate in America, Explained." *Vox*, March 5.
- Zimmer, C. (2021). "Newly Discovered Bat Viruses Give Hints to COVID's Origins." *New York Times*, October 14.

PERGERAKAN GLOBALISASI

(Sebelum Covid, Saat Covid, Sesudah Covid)

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-19-9 (PDF)

